

INDIKASI JADWAL

Masa Penawaran Awal	10-21 Juni 2024	Tanggal Pengembalian Uang Pemesan	5 Juli 2024
Perkiraan Tanggal Efektif	27 Juni 2024	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	5 Juli 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum	1-2 Juli 2024	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	8 Juli 2024
Perkiraan Tanggal Penજાતાહાન	3 Juli 2024		

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KE OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS INI.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK.

Kegiatan Usaha Utama:
Bbergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat:
Menara Bank BJB
Jl. Narijan No.12-14, Bandung 40111, Indonesia
Telepon: (022) 4234868 Faksimili: (022) 4206099
Situs internet: www.bankbjb.co.id
Email: ir@bankbjb.co.id

Per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 5 kantor wilayah, 64 Kantor Cabang, 820 Kantor Cabang Pembantu, 183 cash recycle machine dan 1.776 Jaringan ATM.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV BANK BJB DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV BANK BJB TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI SUBORDINASI")

Obligasi Subordinasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi Subordinasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi Subordinasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp(*) (**) (Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar (*)% (**) (persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi Seri A adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp(*) (**) (Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar (*)% (**) (persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi Seri B adalah 7 (tujuh) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2024 sedangkan Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2029 untuk Obligasi Subordinasi Seri A dan tanggal 5 Juli 2031 untuk Obligasi Subordinasi Seri B.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap II dan/atau Tahap Selanjutnya (Jika Ada) Akan Ditentukan Kemudian

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIPROTEKSI MAUPUN DIJAMIN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 AYAT 1 HURUF F PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.11/POJK.03/2016 TANGGAL 29 JANUARI 2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.34/POJK.03/2016 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.11/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SUBORDINASI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, yaitu:

A+ (*Single A plus*)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

OBLIGASI SUBORDINASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI:



PT BRI DANAREKSA
SEKURITAS



PT CIMB NIAGA SEKURITAS



PT INDO PREMIER
SEKURITAS



PT MANDIRI SEKURITAS



PT MEGA CAPITAL
SEKURITAS



PT TRIMEGAH SEKURITAS
INDONESIA TBK

WALI AMANAT:

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) TERJADI KONDISI PERISTIWA TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHA ATAU POINT OF NON VIABILITY DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERATURAN OJK NO. 34/POJK.03/2016 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO. 11/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DAN SE OJK NO. 20/SEOJK.03/2016 TANGGAL 21 JUNI 2016, (ii) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) DENGAN MEMPERHATIKAN HAL HAL YANG DISYARATKAN DALAM SE OJK NO. 20/SEOJK.03/2016 TANGGAL 21 JUNI 2016, (iii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19 AYAT 1 HURUF E PERATURAN OJK NO. 34 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2016, (iii) RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024 melalui surat No. 0296/DIR-TRE/2024 tertanggal 18 April 2024, perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU P2SK") beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM" atau "Undang-Undang Pasar Modal").

Untuk memperhitungkan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Subordinasi sebagai komponen modal pelengkap (Tier 2) maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03.2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum serta memperhatikan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Peraturan OJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*), Surat Edaran OJK No.20/SEOJK.03/2016 tentang Fitur Konversi Saham Biasa atau Write Down terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap, Surat Edaran OJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti, Perseroan telah memperoleh persetujuan atas rencana penerbitan Obligasi Subordinasi tersebut dari OJK berdasarkan Surat No. S-132/KO.122/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Persetujuan Rencana Penyelenggaraan Kegiatan yang Dilakukan untuk Kepentingan Bank Sendiri Berupa Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan IV (PUB IV) Obligasi Subordinasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB dengan total target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), pada Tahap I Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan sebanyak-banyaknya Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-04799/BEI.PP2/05-2024 tanggal 15 Mei 2024. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan akan batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi Subordinasi sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi dan Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	19
III. PERNYATAAN UTANG	21
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	37
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	42
VI. FAKTOR RISIKO	62
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	67
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	68
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	68
A.1. RIWAYAT PENDIRIAN	68
A.2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM	70
A.3. PERIZINAN	72
A.4. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN	72
A.5. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)	82
A.6. SUMBER DAYA MANUSIA	107
A.7. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN, ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI	111
A.8. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI	112
A.9. ASURANSI	119
A.10. ASET TETAP	120
A.11. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI	124
A.12. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	125
A.13. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	129
B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	133
B.1. KEGIATAN USAHA	133
B.2. JARINGAN DISTRIBUSI	140
B.3. PEMASARAN	140
B.4. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA	141
B.5. PERSAINGAN USAHA	143
B.6. KESEHATAN PERSEROAN	144
B.7. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ("HAKI")	145
IX. PERPAJAKAN	147
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI	149
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	150
XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	153
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI	160
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI	164
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	165
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	188

Halaman ini sengaja dikosongkan

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	:	<p>Berarti:</p> <p>(a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan; <p>(b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan; <p>(c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</p> <p>(d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</p> <p>(e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</p> <p>(f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</p> <p>(g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</p>
Agen Pembayaran	:	<p>Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yaitu pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan dalam bentuk akta notariil untuk melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi termasuk Denda (jika ada) dan/atau pembayaran manfaat lain atas Obligasi Subordinasi (jika ada) berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPO dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
ATM	:	<p>Berarti Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.</p>
ATMR	:	<p>Berarti Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan BI, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (<i>Capital Adequacy Ratio/CAR</i>).</p>
Bank Kustodian	:	<p>Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.</p>
Bapepam	:	<p>Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.</p>
Bapepam dan LK	:	<p>Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.</p>
BI	:	<p>Berarti Bank Indonesia</p>

BOPO	:	Berarti biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional.
Bunga Obligasi Subordinasi	:	Berarti bunga Obligasi Subordinasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi kecuali Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.
Bursa Efek Indonesia atau BEI	:	Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
CKPN	:	Berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.
Daftar Pemegang Rekening	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi Subordinasi oleh Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	:	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Pokok Obligasi Subordinasi yaitu sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	:	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, dan Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam POJK No.7/2017.
Efek	:	Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivarif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Emisi	:	Berarti tindakan menerbitkan Obligasi Subordinasi oleh Perseroan yang selanjutnya ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Entitas Anak	:	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
<i>Force Majeure</i>	:	Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
GWM	:	Berarti Giro Wajib Minimum yang merupakan jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan, yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.
Hari Bursa	:	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek Indonesia melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuanketentuan Bursa Efek Indonesia tersebut.
Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius Calendar tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh

Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Jumlah Terutang	:	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Kredit yang Diberikan	:	Berarti kredit yang diberikan (tidak termasuk piutang pembiayaan konsumen) setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan, kecuali dinyatakan lain.
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, yang dapat dilampiri keterangan dari Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi Subordinasi serta konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi Subordinasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi serta hak lain yang berkaitan dengan Obligasi Subordinasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPOS/KTUR	:	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPOS atau meminta diselenggarakan RUPOS, dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI.
Kustodian	:	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang mendapat persetujuan Bapepam.
Manajer Penjatahan	:	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi Subordinasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan Nomor: IX.A.7 yaitu PT CIMB Niaga Sekuritas.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.
Modal Pelengkap	:	Berarti modal pelengkap bank sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 11/2016 dan POJK No.34/2016.
NIM	:	Berarti <i>Net Interest Margin</i> yaitu Marjin Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aset produktif.
NPL	:	Berarti <i>Non Performing Loan</i> yaitu kredit bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Obligasi Subordinasi	:	Berarti Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi, yang berjumlah sebanyak-banyaknya

Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Obligasi Subordinasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Subordinasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi Subordinasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi Subordinasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp(*) ((*) Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar (*)% ((*) persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp(*) ((*) Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar (*)% ((*) persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi Seri B adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dari masing-masing seri Obligasi Subordinasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK : berarti Lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian dengan UU P2SK.
- Peraturan IX.A.7 : Berarti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- POJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 9/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- POJK No. 11/2016 : Berarti Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 34/POJK.03/2016.
- POJK No. 34/2016 : Berarti Peraturan OJK Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- POJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.
- POJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- POJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk, yang diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014.
POJK No.19/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat yang diundangkan pada tanggal 23 April 2020.
POJK No.20/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diundangkan pada tanggal 23 April 2020.
POJK No.49/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diundangkan pada tanggal 11 Desember 2020.
PBI No.10/15/PBI/2008	:	Berarti Peraturan BI No. 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, tanggal 24 September 2008 beserta seluruh peraturan pelaksana atau penggantinya.
Pemegang Obligasi Subordinasi	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (i) Rekening Efek pada KSEI; atau (ii) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemeringkat	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan pemingkatan efek, yang dalam hal ini adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), berkedudukan di Jakarta Pusat dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPM.
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi	:	Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Subordinasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), sesuai dengan POJK No.36/2014.
Pengakuan Utang Obligasi Subordinasi	:	Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi Subordinasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024 No. 10 tanggal 17 April 2024 juncto Akta Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024 No. 09 tanggal 22 Mei 2024 yang semuanya dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H.M.Hum, Notaris di Jakarta.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas Obligasi Subordinasi yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi	:	Berarti berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi, yang dalam hal ini PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi	:	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.
Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau <i>Point of Non Viability</i>	:	Berarti peristiwa yang terjadi dalam hal OJK telah menetapkan kondisi dimana Perseroan dinyatakan terganggu kelangsungan usahanya dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan untuk melakukan <i>Write Down</i> atas kewajibannya terhadap Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam SEOJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016.
Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024 No. 11 tanggal 17 April 2024 yang semuanya dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H.M.Hum, Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam perjanjian No. SP-043/OBL/KSEI/0424 tanggal 17 April 2024 yang dibuat di bawah tangan.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek	:	Berarti persetujuan yang diterbitkan oleh PT Bursa Efek Indonesia No. S-04799/BEI.PP2/05-2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024 No. 09 tanggal 17 April 2024 juncto Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024 No. 08 tanggal 22 Mei 2024 yang semuanya dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H.M.Hum, Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024 No. 08 tanggal 17 April 2024 juncto Perubahan I Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024 No. 07 tanggal 22 Mei 2024 yang semuanya dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H.M.Hum, Notaris di Jakarta.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi	:	Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024 No. 07 tanggal 17 April 2024 juncto Akta Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB No. 06 tanggal 22 Mei 2024 yang semuanya dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H.M.Hum, Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen-dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan memperhatikan Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 7/2017.
Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	:	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. atas dasar lewatnya waktu yaitu: <ul style="list-style-type: none"> (i) 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau

(ii) 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi;
atau b. atas dasar pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Perseroan	:	Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk, berkedudukan di Bandung dan beralamat di Jalan Naripan No. 12-14, Bandung 40111.
Perusahaan Efek	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Pokok Obligasi Subordinasi	:	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan Obligasi Subordinasi yang terutang yang pada Tanggal Emisi yang berjumlah sebanyak-banyaknya Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).
Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 26 UUPM <i>juncto</i> POJK No.9/2017.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah penjaminan emisi efek, tingkat suku Bunga Obligasi Subordinasi atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi Subordinasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi Subordinasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi Subordinasi.
RUPOS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Subordinasi.
Satuan Pemindahbukuan	:	Berarti satuan jumlah Obligasi Subordinasi yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
SEOJK No. 20/2016	:	Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.03/2016 tanggal 21 Juni 2016 Tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa Atau <i>Write Down</i> terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap.
Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi	:	Berarti bukti penerbitan Obligasi Subordinasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi.
Surat Kabar Harian	:	Berarti surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit setiap hari kerja dan mempunyai peredaran nasional.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan Tanggal Emisi Obligasi Subordinasi dan dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.
Tanggal Emisi	:	Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi Subordinasi, yang diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI sebagaimana tanggal tersebut dicantumkan dalam Prospektus.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	:	Tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Subordinasi dan dapat ditagihnya seluruh pokok masing-masing seri Obligasi Subordinasi yang wajib dibayar oleh Perseroan.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti Tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi Subordinasi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi	:	Berarti tanggal saat Bunga Obligasi Subordinasi masing-masing seri Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran yaitu setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.
Tanggal Penjataan	:	Berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi Subordinasi, sebagaimana tanggal tersebut dicantumkan dalam Prospektus.
Undang-undang Pasar Modal atau UUPM	:	Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995 sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
Undang-undang Perbankan	:	Berarti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UUP2SK.
UUP2SK	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 Tambahan No. 6845.
Wali Amanat	:	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang pada saat ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta.
<i>Write Down</i>	:	Berarti pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) Perseroan, dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada pemegang Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.2.F Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dalam jumlah yang setara dengan nilai yang akan ditetapkan oleh OJK berdasarkan pemberitahuan tertulis.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam jutaan Rupiah dan secara konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, serta disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA

Perseroan merupakan salah satu Bank Umum milik Pemerintah Daerah di Indonesia yang memiliki nasabah utama berupa perorangan, karyawan, koperasi, BUMD, BUMN, beserta institusi lainnya baik Pemerintah maupun swasta. Sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 5 kantor wilayah, 64 Kantor Cabang, 820 Kantor Cabang Pembantu, 183 cash recycle machine dan 1.776 Jaringan ATM.

Per tanggal 31 Desember 2023, total dana pihak ketiga Perseroan dikontribusi oleh dana-dana Pemerintah yang mencapai Rp23.495.976 juta (18,58%), dana corporate sebesar Rp62.920.097 juta (49,75%) dan dana retail sebesar Rp40.044.661 juta (31,67%). Selain itu Perseroan juga telah menyalurkan pinjamannya kepada debitur di seluruh daerah operasional Perseroan yang terdiri dari 42,81% debitur kredit konsumen, 16,99% debitur kredit ritel, 14,99% debitur kredit korporasi, 6,91% debitur kredit komersial, 9,00% debitur kredit KPR, 2,30% debitur kredit BPR dan LKM, 4,16% debitur kredit UMKM dan sebesar 2,84% debitur kredit internasional.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan kegiatan usaha perbankan sebagai berikut:

A. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana yang diarahkan kepada dana-dana ritel/perorangan disamping mempertahankan nasabah korporasi maupun instansi dan departemen terkait. Penghimpunan dana dilakukan melalui produk-produk sebagai berikut:

- Giro
- Tabungan
- Deposito

B. Penyaluran Dana

Dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, maka penyaluran dana lebih diarahkan kepada peningkatan kredit dan pembiayaan ritel yang memberikan *multiplier effect* kepada seluruh sektor usaha kecil, serta penyaluran program kredit kepada debitur-debitur binaan yang prospektif dengan tetap mengatur kesesuaian penyaluran kredit konsumtif dan produktif secara bertahap. Sedangkan untuk dana-dana yang belum tersalurkan dalam bentuk kredit, dioptimalkan dalam bentuk penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan memperhatikan faktor likuiditas, rentabilitas dan risiko.

Penjelasan lebih lanjut terkait kegiatan usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

2. PROSPEK USAHA

Di tengah perlambatan ekonomi global dengan ketidakpastian yang tinggi, tekanan inflasi secara global diperkirakan masih tinggi dipicu oleh kenaikan harga energi dan pangan akibat eskalasi konflik geopolitik, serta fenomena El Nino. Ekonomi global diperkirakan melambat menjadi 2,8% pada 2024. Penurunan inflasi di negara maju, termasuk AS, berlanjut, meski masih berada di atas sasaran, sementara inflasi Tiongkok menurun dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat. Siklus kenaikan suku bunga kebijakan moneter negara maju, termasuk Fed Funds Rate (FFR), diperkirakan telah berakhir meskipun masih bertahan tinggi pada semester I 2024, dengan kemungkinan akan mulai menurun pada semester II 2024. Yield obligasi Pemerintah negara maju, termasuk US Treasury, menurun secara gradual tapi masih berada di level tinggi sejalan dengan premi risiko jangka Panjang (term-premia) terkait besarnya pembiayaan fiskal dan utang pemerintah AS. Tekanan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia juga berkurang. Perkembangan tersebut mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing dan mengurangi tekanan pelemahan nilai tukar di emerging market.

Perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global. Percepatan belanja negara terkait penyelenggaraan Pemilu dan penguatan peran APBN sebagai shock absorber diharapkan dapat mendorong konsumsi Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,7%-5,5% didukung oleh permintaan domestik utamanya berlanjutnya pertumbuhan

konsumsi serta peningkatan investasi khususnya bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Sementara itu, kinerja ekspor diperkirakan belum kuat sebagai dampak perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas.

Transmisi kebijakan moneter berjalan dengan baik. Suku bunga pasar uang (IndONIA) bergerak dalam kisaran BI-Rate sebesar 5,81% pada 16 Januari 2024. Suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tercatat menarik pada level 6,68%, 6,78% dan 6,87% masing-masing untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan pada 15 Januari 2024 sehingga mendukung efektivitas SRBI sebagai instrumen moneter yang pro-market. Sementara itu, suku bunga perbankan tetap rendah dipengaruhi oleh likuiditas perbankan yang memadai serta kebijakan transparansi SBDK yang meningkatkan efisiensi suku bunga perbankan. Ke depan, pertumbuhan kredit diperkirakan meningkat dalam kisaran 10% - 12% pada 2024, sejalan dengan tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Nilai transaksi digital banking diproyeksikan meningkat 9,11% (yoy) hingga mencapai Rp63.803,77 triliun pada tahun 2024. Sementara nilai transaksi Uang Elektronik (UE) diproyeksikan meningkat 25,77% (yoy) hingga mencapai Rp1.051,24 triliun pada tahun 2024.

Penjelasan lebih lanjut terkait prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

3. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Ringkasan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi

Nama Obligasi Subordinasi	: Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024
Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi	: Sebanyak-banyaknya Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).
Harga Penawaran	: 100,00% dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi.
Jangka Waktu	: Jangka waktu Obligasi Subordinasi untuk seri A adalah 5 (lima) tahun dan Seri B adalah 7 (tujuh) tahun sejak tanggal Emisi.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Tingkat Suku Bunga Obligasi Subordinasi	: Obligasi ini memberikan tingkat suku bunga sebesar (*)% ((*) persen) per tahun untuk Seri A dan (*)% ((*) persen) per tahun untuk Seri B.
Jenis Tingkat Suku Bunga	: Tetap.
Periode Pembayaran Bunga	: Triwulanan.
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	: 5 Oktober 2024.
Jaminan	: Obligasi Subordinasi ini tidak diproteksi maupun dijamin oleh Perseroan atau perusahaan anak sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 1 huruf F peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
Peringkat Efek	: A^+ (<i>single A plus</i>) dari Pefindo.
Dana Pelunasan Obligasi Subordinasi (<i>Sinking Fund</i>)	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.
Wali Amanat	: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Subordinasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan. Keterangan selengkapnya mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII pada Prospektus ini.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka ekspansi kredit serta peningkatan struktur perhimpunan dana jangka panjang.

5. OBLIGASI YANG PERNAH DITERBITKAN PERSEROAN

Jumlah Obligasi Perseroan yang masih terutang sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

No	Obligasi	Seri	Nilai Penerbitan	Tenor	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo
1.	Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017	C	780.000	7 tahun	6 Desember 2017	6 Desember 2024	780.000
	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017	B	693.000	7 tahun	6 Desember 2017	6 Desember 2024	693.000
2.	Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap III Tahun 2019	B	108.000	5 Tahun	18 Oktober 2019	18 Oktober 2024	108.000
		C	74.000	7 Tahun	18 Oktober 2019	18 Oktober 2026	74.000
3.	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II bank bjb Tahap I Tahun 2020	A	132.000	5 tahun	3 Maret 2020	3 Maret 2025	132.000
		B	368.000	7 tahun	3 Maret 2020	3 Maret 2027	368.000
4.	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II bank bjb Tahap II Tahun 2020	A	162.580	5 tahun	17 November 2020	17 November 2025	162.580
		B	337.420	7 tahun	17 November 2020	17 November 2027	337.420
5.	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III bank bjb Tahap I Tahun 2021	A	379.000	5 tahun	15 Juli 2021	15 Juli 2026	379.000
		B	621.000	7 tahun	15 Juli 2021	15 Juli 2028	621.000
6.	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III bank bjb Tahap II Tahun 2022	A	399.910	5 tahun	9 Jun 2022	9 Juni 2027	399.910
		B	600.090	7 tahun	9 Jun 2022	9 Juni 2029	600.090
Jumlah							4.655.000

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, jumlah Obligasi terutang Perseroan adalah sebesar Rp4.655.000 juta.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

6. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.144 tanggal 29 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Raden Tandy Suwarman, SH, Notaris di Kota Bandung, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-AH.01.03-0219601 tanggal 1 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0065083.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 1 April 2022 (“Akta PKR No.144/2022”) dimana telah dilakukan perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 sehubungan dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dengan dilakukannya pengeluaran saham baru dari dalam portepel dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.05 tanggal 4 April 2023 yang dibuat dihadapan Raden Tandy Suwarman, SH, Notaris di Kota Bandung, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No.AHU-0024508.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 3 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0081141.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 3 Mei 2023 (“Akta PKR No.05/2023”) juncto Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek pada tanggal 30 April 2024, yaitu sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.250,00		Nilai Nominal Rp.250,00		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
	Modal Dasar	9.600.000.000	2.400.000.000.000	6.400.000.000	1.600.000.000.000	
	Modal Ditempatkan dan Disetor					
A	Pemerintah Propinsi Jawa Barat	3.756.415.785	939.103.946.250	296.756.810	74.189.202.500	38,52
B	Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Barat					
1	Kota Bandung	116.000.006	29.000.001.500	8.048.569	2.012.142.250	1,18
2	Kota Cirebon	17.837.704	4.459.426.000	1.237.655	309.413.750	0,18
3	Kota Sukabumi	38.545.063	9.636.265.750	2.674.412	668.603.000	0,39
4	Kota Bekasi	62.493.022	15.623.255.500	4.336.029	1.084.007.250	0,64
5	Kota Bogor	46.737.809	11.684.452.250	3.242.866	810.716.500	0,48
6	Cimahi	104.000.000	26.000.000.000	7.215.958	1.803.989.500	1,06
7	Kota Depok	93.777.672	23.444.418.000	-	-	0,89
8	Kota Tasikmalaya	62.810.189	15.702.547.250	4.428.044	1.107.011.000	0,64
9	Kota Banjar	41.000.000	10.250.000.000	2.878.228	719.557.000	0,42
10	Kabupaten Bandung	712.485.914	178.121.478.500	49.435.275	12.358.818.750	7,24
11	Kabupaten Cirebon	56.121.123	14.030.280.750	3.893.920	973.480.000	0,57
12	Kabupaten Karawang	56.863.937	14.215.984.250	9.841.711	2.460.427.750	0,63
13	Kabupaten Ciamis	32.721.097	8.180.274.250	4.059.040	1.014.760.000	0,35
14	Kabupaten Tasikmalaya	130.953.800	32.738.450.000	9.963.099	2.490.774.750	1,34
15	Kabupaten Sukabumi	86.889.260	21.722.315.000	6.028.743	1.507.185.750	0,88
16	Kabupaten Subang	44.937.610	11.234.402.500	-	-	0,43
17	Kabupaten Indramayu	87.986.270	21.996.567.500	7.380.073	1.845.018.250	0,91
18	Kabupaten Bekasi	73.550.504	18.387.626.000	5.103.243	1.275.810.750	0,75
19	Kabupaten Sumedang	46.052.684	11.513.171.000	3.195.329	798.832.250	0,47
20	Kabupaten Bogor	202.523.232	50.630.808.000	14.051.915	3.512.978.750	2,06
21	Kabupaten Cianjur	102.416.760	25.604.190.000	-	-	0,97
22	Kabupaten Kuningan	28.797.110	7.199.277.500	1.845.018	461.254.500	0,29
23	Kabupaten Majalengka	35.462.669	8.865.667.250	7.380.073	1.845.018.250	0,41
24	Kabupaten Garut	26.366.698	6.591.674.500	4.428.044	1.107.011.000	0,29
25	Kabupaten Purwakarta	51.219.171	12.804.792.750	5.904.059	1.476.014.750	0,54
26	Kabupaten Bandung Barat	5.263.157	1.315.789.250	7.380.073	1.845.018.250	0,12
27	Kabupaten Pangandaran	-	-	2.656.826	664.206.500	0,03
C	Pemerintah Propinsi Banten	520.589.856	130.147.464.000	-	-	4,95
D	Pemerintah Kota/Kabupaten se Banten					
1	Kota Tangerang	125.117.942	31.279.485.500	8.681.210	2.170.302.500	1,27
2	Kota Cilegon	60.631.578	15.157.894.500	4.059.041	1.014.760.250	0,61
	Kota Tangerang Selatan	-	-	7.380.073	1.845.018.250	0,07
	Kota Serang	-	-	7.380.073	1.845.018.250	0,07
3	Kabupaten Serang	151.092.304	37.773.076.000	10.332.103	2.583.025.750	1,53
4	Kabupaten Tangerang	289.306.189	72.326.547.250	20.073.282	5.018.320.500	2,94
5	Kabupaten Lebak	37.586.022	9.396.505.500	2.607.876	651.969.000	0,38
6	Kabupaten Pandeglang	110.162.524	27.540.631.000	-	-	1,05
E	Masyarakat	-	-	2.572.850.355	643.212.588.750	24,45
	Jumlah	7.414.714.661	1.853.678.665.250	3.106.729.025	776.682.256.250	100,00
	Saham Dalam Portepel	2.185.285.339	546.321.334.750	3.293.270.975	823.317.743.750	

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah informasi keuangan Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, firma anggota dari jaringan global RSM (*partner* penanggung jawab Saptoto Agustomo berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini tanpa modifikasi).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Total Aset	188.295.488	181.241.291
Total Liabilitas	163.579.102	158.120.881
Dana Syirkah Temporer	9.267.368	8.374.424
Total Ekuitas	15.449.018	14.745.986
Total Liabilitas, Dana Syirkah Temporer Dan Ekuitas	188.295.488	181.241.291

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan bunga	13.287.106	12.816.082
Pendapatan syariah	916.628	772.467
Pendapatan provisi dan komisi	34.001	35.228
Pendapatan komisi syariah	20.474	12.197
	14.258.209	13.635.974
BEBAN BUNGA DAN BAGI HASIL SYARIAH	(7.194.587)	(5.227.996)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH NETO	7.063.622	8.407.978
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	1.922.255	1.639.688
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	(6.837.152)	(7.198.808)
LABA OPERASIONAL	2.148.725	2.848.858
BEBAN NON-OPERASIONAL - NETO	(22.358)	(13.240)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	2.126.367	2.835.618
BEBAN PAJAK – NETO	(445.190)	(590.336)
LABA TAHUN BERJALAN	1.681.177	2.245.282

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Permodalan		
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) (%)	20,05	19,19
Aset Produktif		
Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif (%)	1,09	0,90
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif (%)	1,06	0,88
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan terhadap Aset Produktif (%)	1,20	1,09
Profitabilitas		
NPL bruto (%)	1,35	1,16
NPL neto (%)	0,75	0,46
Imbal hasil aset (ROA) (%)	1,29	1,75
Imbal hasil ekuitas (ROE)	13,37	18,63
Marjin bunga bersih (NIM) (%)	4,89	5,86
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (%)	85,65	80,35
Likuiditas		
Loan to Deposit Ratio (LDR) (%)	87,54	85,03
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (%)	6,13	6,56
Rasio Pertumbuhan (%)		
Total Pendapatan Bunga – bersih	-15,99	6,42
Laba Operasional	-24,58	9,63
Laba Tahun Berjalan	-25,12	11,23
Total Aset	3,89	14,45

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Total Liabilitas	3,45	14,62
Total Dana Syirkah Temporer	10,66	14,46
Total Ekuitas	6,72	10,64
Giro Wajib Minimum (dalam %)		
GWM Utama Rupiah		
Harian (%)	0,00	0,00
Rata-rata (%)	7,91	8,28
GWM Valuta Asing (%)	4,35	4,36
Posisi Devisa Neto (dalam %)	8,09	1,84

Keterangan tentang Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

8. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi yang dimiliki langsung yang berkontribusi sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap total asset Perseroan.

Entitas Anak

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Kepemilikan	Tahun Beroperasi	Jumlah Aset per 31 Desember 2023
1	PT Bank BJB Syariah	Perbankan	99,24%	2010	2010	13.639.709
2	PT BPR Intan Jabar	Bank Perkreditan	10,92%	1998	2015	28.935
3	PT BJB Sekuritas	Perusahaan Efek Daerah	93,75%	2020	2015	31.646
4	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	Bank Perkreditan	15,56%	2024	1971	9.042.102

Entitas Asosiasi

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Kepemilikan	Tahun Beroperasi	Jumlah Aset per 31 Desember 2023
1	PT Asuransi Bangun Askrida	Asuransi	9,45%	2008	1989	3.861.427
2	PT. BPR Serang	Bank Perkreditan	4,95%	1998	2008	581.762
3	PT. BPR Lebak	Bank Perkreditan	1,69%	1998	2017	61.443
4	PT. BPR Sejahtera Berkah	Bank Perkreditan	1,18%	1998	1998	301.718
5	PT BPR Bogor Jabar	Bank Perkreditan	8,55%	1998	1999	114.654
6	PT BPR Cianjur Jabar	Bank Perkreditan	8,81%	1998	2015	164.417
7	PT BPR Wibawa Mukti Jabar	Bank Perkreditan	4,27%	1998	1998	66.542
8	PT. BPR Cipatujah Jabar	Bank Perkreditan	2,17%	1998	2015	376.874
9	PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar	Bank Perkreditan	3,75%	1998	1998	26.655

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Kepemilikan	Tahun Beroperasi	Jumlah Aset per 31 Desember 2023
10	PT. BPR Kerta Raharja	Bank Perkreditan	1,47%	2007	2008	589.680
11	PT BPR Majalengka Jabar	Bank Perkreditan	3,47%	1998	2017	86.720
12	PT BPR Karya Utama Jabar	Bank Perkreditan	20,93%	1998	2017	228.723
13	PT BPR Indramayu Jabar	Bank Perkreditan	7,22%	1998	1998	181,014

Keterangan tentang Entitas Anak Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

9. RISIKO USAHA

Berikut ini merupakan risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan dan telah disusun sesuai dengan bobot tertinggi hingga terendah dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dimulai dari risiko utama yakni sebagai berikut:

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Kredit

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Operasional
2. Risiko Hukum
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Pasar
5. Risiko Reputasi
6. Risiko Kepatuhan
7. Risiko Strategis
8. Risiko Persaingan Usaha
9. Risiko Investasi
10. Risiko Perubahan Teknologi

C. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro
2. Risiko Kebijakan Pemerintah
3. Risiko Ketentuan Negara Lain
4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

D. Risiko Bagi Investor

Risiko Investor Pembeli Obligasi Subordinasi

Penjelasan mengenai risiko usaha, risiko umum dan risiko bagi investor lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV BANK BJB DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV BANK BJB TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI SUBORDINASI")

Obligasi Subordinasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi Subordinasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi Subordinasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp(*) ((*) Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar (*)% ((*) persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp(*) ((*) Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar (*)% ((*) persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi Seri B adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2029 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 5 Juli 2031 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap II dan/atau Tahap Selanjutnya (Jika Ada) Akan Ditentukan Kemudian
Obligasi Subordinasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, yaitu:

idA+ (Single A plus)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat:

Menara Bank BJB

Jl. Naripan No.12 -14, Bandung 40111, Indonesia

Telepon: (022) 4234868 Faksimili: (022) 4206099

Situs internet: www.bankbjb.co.id

Email: ir@bankbjb.co.id

Per 31 Maret 2021, Perseroan memiliki 5 kantor wilayah, 64

Kantor Cabang, 820 Kantor Cabang Pembantu, 183 cash

recycle machine dan 1.776 Jaringan ATM.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) TERJADI KONDISI PERISTIWA TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHA ATAU POINT OF NON VIABILITY DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERATURAN OJK NO. 34/POJK.03/2016 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2016 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO. 11/POJK.03.2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DAN SE OJK NO. 20/SEOJK.03/2016 TANGGAL 21 JUNI 2016, (ii) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) DENGAN MEMPERHATIKAN HAL HAL YANG DISYARATKAN DALAM SE OJK NO. 20/SEOJK.03/2016 TANGGAL 21 JUNI 2016, (iii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19 AYAT 1 HURUF E PERATURAN OJK NO. 34 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2016, (III) RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

I. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No.36/2014, sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan penerbitan Obligasi tahap terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif;
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 2 April 2024 dan Surat Pernyataan Akuntan No. 1960424/SAT/11212 tanggal 17 April 2024, keduanya menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor;
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek.

II. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI SUBORDINASI

Nama Obligasi Subordinasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024".

JENIS OBLIGASI SUBORDINASI

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Obligasi Subordinasi diterbitkan dalam mata uang Rupiah.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Subordinasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI, BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI, DAN JATUH TEMPO OBLIGASI SUBORDINASI

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang diterbitkan pada tahap pertama adalah sebanyak-banyaknya Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp(*) ((*) Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar (*)% ((*) persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp(*) ((*) Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar (*)% ((*) persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi Seri B adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2024 sedangkan Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2029 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 5 Juli 2031 untuk Obligasi Seri B.

Tingkat bunga Obligasi Subordinasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi	
	Seri A	Seri B
1	5 Oktober 2024	5 Oktober 2024
2	5 Januari 2025	5 Januari 2025
3	5 April 2025	5 April 2025
4	5 Juli 2025	5 Juli 2025
5	5 Oktober 2025	5 Oktober 2025
6	5 Januari 2026	5 Januari 2026
7	5 April 2026	5 April 2026
8	5 Juli 2026	5 Juli 2026
9	5 Oktober 2026	5 Oktober 2026
10	5 Januari 2027	5 Januari 2027
11	5 April 2027	5 April 2027
12	5 Juli 2027	5 Juli 2027
13	5 Oktober 2027	5 Oktober 2027
14	5 Januari 2028	5 Januari 2028
15	5 April 2028	5 April 2028
16	5 Juli 2028	5 Juli 2028
17	5 Oktober 2028	5 Oktober 2028
18	5 Januari 2029	5 Januari 2029
19	5 April 2029	5 April 2029
20	5 Juli 2029	5 Juli 2029
21	-	5 Oktober 2029
22	-	5 Januari 2030
23	-	5 April 2030
24	-	5 Juli 2030
25	-	5 Oktober 2030
26	-	5 Januari 2031
27	-	5 April 2031
28	-	5 Juli 2031

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI SUBORDINASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI SUBORDINASI

Satuan perdagangan Obligasi Subordinasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JAMINAN

Obligasi Subordinasi ini tidak diproteksi maupun dijamin oleh Perseroan atau perusahaan anak sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 1 huruf F peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI SUBORDINASI

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari Pefindo untuk periode 17 April 2024 sampai dengan 1 April 2025 sesuai dengan suratnya No. RC-504/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 17 April 2024, dengan peringkat:

idA+ (Single A plus)

Perusahaan pemeringkat dalam penawaran umum ini merupakan pihak tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi yang diterbitkan setiap tahun selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020.

Rating Outlook

Pefindo memberikan peringkat "idA" untuk rencana emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahun 2024 dengan nilai sebesar-besarnya Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah).

Efek utang jangka panjang dengan peringkat idA mengindikasikan bahwa kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan obligor lainnya di Indonesia, adalah kuat. Walaupun demikian, kemampuan obligor mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi, dibandingkan dengan efek utang yang peringkatnya lebih tinggi.

Peringkat tersebut dapat dinaikkan jika Perseroan mampu memperkuat profil usaha dan pada saat yang bersamaan meningkatkan indikator kualitas aset dan profitabilitasnya secara signifikan dan berkelanjutan. Peringkat tersebut dapat diturunkan jika pangsa pasar Perseroan sangat menurun atau indikator keuangan mengalami pemburukan yang signifikan khususnya pada profil profitabilitas dan kualitas aset.

DANA PELUNASAN OBLIGASI SUBORDINASI (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan, menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Selain itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% dari jumlah Obligasi yang di waliamanati sesuai dengan POJK No.19/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Up.: Financial Services Department – Wali Amanat
Menara 2 BTN Lantai 8
Jalan H.R.Rasuna Said No.1 Jakarta Selatan 12980
Website: <https://www.btn.co.id/>

PEMBELIAN KEMBALI

Perseroan tidak dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi Subordinasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya dan Obligasi Subordinasi tidak dijamin dengan jaminan apapun sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan dan para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk menuntut pembayaran jumlah terutang oleh Perseroan maupun pembayaran jumlah lain dari Perseroan dibatasi sesuai dengan Pasal 9.4 Perjanjian Perwaliamanatan dan ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 9.5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Perseroan tidak mempunyai utang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen.

SIFAT-SIFAT KHUSUS OBLIGASI SUBORDINASI

POJK No. 11/2016 jo. POJK No. 34/2016 SEOJK No. 20/2016 mengatur mengenai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu obligasi subordinasi untuk dapat diperlakukan sebagai modal pelengkap suatu bank, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal, bersifat subordinasi untuk memperoleh seluruh pelunasan pembayaran pada saat terjadi likuidasi dan memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih serta hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan OJK. Terkait dengan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi, POJK No. 11/2016 jo. POJK No. 34/2016 SEOJK No. 20/2016 memuat ketentuan bahwa pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi juga dapat ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cummulative*), apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara individual atau rasio KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko. Obligasi Subordinasi dapat di *Write Down* tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan berpotensi mengganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) sesuai dengan pasal 19 POJK No. 11/2016 jo. POJK No. 34/2016 SEOJK No. 20/2016. *Write Down* terhadap modal pelengkap (*Tier 2*) dapat dilakukan secara proporsional, parsial, atau keseluruhan dengan persetujuan OJK.

IKHTISAR PERSYARATAN POKOK DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI SUBORDINASI

A. STATUS OBLIGASI SUBORDINASI

Perseroan untuk dirinya sendiri, Wali Amanat untuk setiap Pemegang Obligasi Subordinasi menerima Obligasi Subordinasi, dengan tanpa dapat ditarik kembali dengan ini mengakui dan setuju bahwa:

- A. Obligasi Subordinasi merupakan Obligasi Subordinasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan jaminan apapun (termasuk Jaminan khusus) dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, hal tersebut tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi. Obligasi Subordinasi tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit, tidak memiliki fitur *step-up*, tidak disertai fitur opsi beli (*call option*), tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Pokok Obligasi Subordinasi. Dalam hal terjadi kelalaian (*event of default*) atau cidera janji lain terhadap Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap wanprestasi atas suatu pembayaran yang telah jatuh tempo, hak-hak Wali Amanat dan (melalui Wali Amanat) para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk menuntut pembayaran Jumlah Terutang oleh Perseroan maupun pembayaran jumlah lain dari Perseroan dibatasi sesuai dengan Pasal 9.4 Perjanjian Perwaliamanatan dan ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.2 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan tidak ada kecualinya.
- B. Dalam hal terjadi Penutupan Usaha atau disolusi atau likuidasi Perseroan karena alasan lain apapun, pembagian harta kekayaan Perseroan hasil Likuidasi untuk pembayaran Jumlah Terutang oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dilakukan sesuai urutan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.2.C dibawah ini, dan hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para Kreditur Utang Senior, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia Hak tagih sehubungan dengan Obligasi Subordinasi menempati peringkat paripassu tanpa preferensi diantara para Pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur lain yang ada atau akan ada dikemudian hari yang memegang kewajiban pembaruan Perseroan yang disubordinasi tetapi memiliki prioritas hak tagih yang tidak lebih rendah daripada terhadap hak tagih para pemegang saham Perseroan dan memiliki prioritas hak tagih yang lebih tinggi terhadap kreditur (jika ada) yang memegang kewajiban Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syarat menempati peringkat hak tagih dibawah Obligasi Subordinasi.
- C. Dalam proses Likuidasi:
 - (i). Sebelum para Pemegang Obligasi Subordinasi berhak menerima pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi Subordinasi maka:
 - C.i.1. Para Kreditur Preferen pertama-tama berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - C.i.2. Setelah para Kreditur Preferen menerima pembayaran penuh atas seluruh piutangnya, maka para Nasabah Penyimpan dan Kreditur Utang Senior berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan perjanjian utang masing-masing, dengan memperhatikan jaminan khusus yang diberikan.
 - ii). Setelah para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para Kreditur Utang Senior, menerima pembayaran penuh seluruh tagihan utang sesuai ketentuan dalam perjanjian utang masing-masing maka Pemegang Obligasi Subordinasi (termasuk pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur pinjaman subordinasi lain yang

- kedudukannya paripassu dengan Pemegang Obligasi Subordinasi) berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perjanjian utang masing-masing;
- (iii). Dalam hal para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para Kreditur Utang Senior, belum menerima pembayaran secara penuh atas piutangnya dan jika Wali Amanat menerima pembayaran atau pembagian dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi, maka:
- C.iii.1. Wali Amanat tidak boleh membagikan uang yang telah diterima oleh Wali Amanat dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi, kepada Pemegang Obligasi Subordinasi kecuali Wali Amanat telah menerima:
- C.iii.1.a penegasan tertulis dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus aset Perseroan dalam proses Likuidasi tersebut bahwa semua Kreditur-Preferen, Nasabah Penyimpan dan para Kreditur Utang Senior, telah dibayar lunas; atau
- C.iii.1.b perintah pengadilan yang berwenang dalam yurisdiksi yang bersangkutan yang memerintahkan atau memberikan wewenang kepada Wali Amanat untuk melakukan pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi karena semua Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, para Kreditur Utang Senior dan telah dibayar lunas.
- C.iii.2. Dalam hal Wali Amanat tidak menerima penegasan tertulis sebagaimana tersebut dalam C.iii.1.a atau perintah pengadilan sebagaimana tersebut dalam C.iii.1.b tersebut dalam ayat ini maka Wali Amanat harus segera mengembalikan pembayaran yang telah diterima Wali Amanat tersebut kepada kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi, untuk pembayaran semua Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para Kreditur Utang Senior yang masih belum di bayar. Apabila kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi tidak menerima uang yang dikembalikan oleh Wali Amanat, maka Wali Amanat harus membuka rekening Bank terpisah dan menyetor uang yang telah diterima tersebut kedalam rekening tersebut sampai Wali Amanat menerima surat/dokumen yang disebut dalam butir C.iii.1.a. atau butir C.iii.1.b. tersebut diatas.
- (iv). kecuali dalam hal para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan Kreditur Utang Senior telah menerima pembayaran secara penuh dalam proses likuidasi dan dengan tidak mengesampingkan Pasal 5.2.D Perjanjian Perwalianan, Pemegang Obligasi Subordinasi yang secara langsung menerima (baik melalui perjumpaan utang atau dengan cara lain) pembayaran dari, atau pembagian aset dari Perseroan, apapun jenis atau sifatnya, baik dalam bentuk uang tunai, harta benda atau efek, maka Pemegang Obligasi Subordinasi tersebut wajib menyerahkan pembayaran atau pembagian aset tersebut kepada Wali Amanat atau kurator dalam kepailitan, atau likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi untuk pembagian aset Perseroan sesuai dengan ketentuan butir C.i dan C.ii di atas.
- (v). Jika sisa hasil Likuidasi Perseroan setelah pemenuhan tagihan Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpanan dan Kreditur Utang Senior tidak cukup untuk membayar jumlah yang harus dibayar berkenaan dengan Obligasi Subordinasi dan setiap hak tagih yang menempati peringkat paripassu dengan Obligasi Subordinasi, maka para pemegang Obligasi Subordinasi dan para pemegang hak tagih yang menempati peringkat pari passu dengan Obligasi Subordinasi akan berbagi sebanding dalam setiap pembagian aset yang tersisa dari Perseroan sebanding dengan jumlah yang terutang, masing-masing yang merupakan hak mereka.
- D. Setiap hak perjumpaan utang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa yang dapat mengakibatkan Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mendapatkan pelunasan dari sebagian atau keseluruhan Jumlah Terutang, dengan ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum. Untuk menghindari keragu-raguan, tidak ada Pemegang Obligasi Subordinasi yang dapat melakukan tuntutan atau meminta hak perjumpaan utang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa sehubungan dengan jumlah terutang oleh Perseroan yang timbul sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi.
- (a) Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan ini, setiap ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memungkinkan terjadinya perjumpaan utang sebagaimana dilarang oleh ketentuan ini, dengan ini secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum;
- (b) Setiap hak untuk memohon diadakan perjumpaan utang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2004 tanggal 14-10-2004 (empat belas Oktober dua ribu empat) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan setiap perubahan, dan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut serta setiap hak serupa yang dicantumkan dalam peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Penutupan Usaha atau Likuidasi suatu bank, dengan ini secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali, dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian setiap pelunasan Jumlah Terutang akibat perjumpaan utang, penuntutan kembali atau pelaksanaan reklame, retensi atau hak-hak lain serupa dianggap tidak pernah terjadi.

- E. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai modal pelengkap level bawah (*lower tier-2*) Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK Nomor: 11 juncto Peraturan OJK Nomor: 34 dengan memperhatikan risiko pasar dan perubahannya serta peraturan pelaksanaannya dan karenanya sesuai dengan ketentuan tersebut baik sebagian maupun keseluruhan Obligasi Subordinasi tidak boleh dibatalkan atau dengan cara lain dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan pasal ini tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan.
- F. Dalam terjadi kondisi Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau *Point of Non Viability* terhadap Perseroan maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- i. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor: 11, Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha terjadi dalam hal OJK telah menetapkan bahwa Perseroan berada dalam kondisi terganggu kelangsungan usahanya.
 - ii. Dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha maka OJK berwenang dan berhak untuk memerintahkan Perseroan melakukan fitur yang telah dipilih oleh Perseroan yaitu *Write Down* tanpa kompensasi dengan memperhatikan SE OJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) instrumen modal inti tambahan (*additional tier 1*) dan/atau modal pelengkap (*tier 2*) harus dilakukan *write down* tanpa kompensasi:-
 1. Perseroan harus melakukan *write down* tanpa kompensasi terhadap instrumen modal inti tambahan (*additional tier 1*) dan/atau modal pelengkap (*tier 2*) dalam hal Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non viability*).
 2. *Write down* tanpa kompensasi terhadap instrumen modal inti tambahan (*additional tier 1*) dan/atau modal pelengkap (*tier 2*) dilakukan dalam hal:
 - A. Rasio modal inti utama (*common equity tier 1/cet 1*) lebih rendah atau sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (*atmr*) baik secara individu maupun konsolidasi dengan perusahaan anak; dan/atau
 - B. Terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada bank yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan -
 - C. Terdapat perintah dari otoritas jasa keuangan untuk melakukan *write down* tanpa kompensasi.Dengan adanya perintah dari OJK tersebut maka dengan demikian Perseroan melakukan perintah OJK tersebut sesuai dengan Pasal 19 dan penjelasan Peraturan OJK Nomor: 11/POJK.03/2016 serta SE OJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016 tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau tanpa memerlukan keputusan RUPO.
 - iii. Setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari OJK atas Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha tersebut, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari OJK tersebut, dan Perseroan melalui Wali Amanat wajib untuk sesegera mungkin memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai adanya perintah dari OJK tersebut.
 - iv. Termasuk dalam mekanisme *Write Down* antara lain pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi), dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.
 - v. Dengan dilakukannya *Write Down* sesuai dengan perintah dari OJK tersebut, maka jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) Perseroan terhadap Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi setara dengan nilai Obligasi Subordinasi yang dilakukan *Write Down* dan/atau jumlah sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi. Sehubungan dengan pengurangan tersebut maka akan menghilangkan hak dari Pemegang Obligasi Subordinasi terhadap jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) yang setara dengan nilai Obligasi Subordinasi yang telah dilakukan *Write Down* dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dalam penerbitan Obligasi Subordinasi secara proporsional. Pemegang Obligasi Subordinasi tidak berhak untuk menuntut suatu pembayaran akibat dari dilakukannya *Write Down* tersebut dan Pemegang Obligasi Subordinasi menyatakan menyetujui dan menghilangkan haknya dalam kondisi atau proses likuidasi dan para Pemegang Obligasi Subordinasi dianggap telah mengesampingkan haknya untuk menerima dan menuntut dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran dengan jumlah yang seharusnya Pemegang Obligasi Subordinasi terima dan Pemegang Obligasi Subordinasi menerima segala kerugian yang dideritanya akibat dilakukannya *Write Down* tersebut, dengan memperhatikan ketentuan OJK dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
 - vi. Sebagaimana diatur dalam SE OJK Nomor 20/SEOJK.03/2016, yaitu Perseroan harus melakukan upaya bahwa *write down* dapat dilakukan dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) instrumen modal pelengkap (Tier 2) harus dilakukan *write down*, antara lain:

- a) Adanya opini hukum dari pihak independen pada saat penerbitan instrumen yang menyatakan bahwa write down dapat dilakukan pada saat terjadi kondisi yang menyebabkan (trigger event) modal pelengkap (Tier 2) dilakukan write down sebagaimana ternyata dari pendapat hukum dari Konsultan Hukum “HKGM & Partners”, sesuai dengan Surat Nomor: Ref.010/HKGM-RL/Ext/IV/2024 tanggal 03-04-2024 (tiga April tahun dua ribu dua puluh empat), Perihal: Pemilihan Fitur *Write Down* oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, dalam rangka Penerbitan dan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024;
 - b) Perseroan telah memastikan bahwa tidak terdapat perjanjian yang dilakukan antara Bank dengan para pihak lainnya termasuk pemegang saham yang dapat menghambat dilakukannya *write down* pada saat terjadi kondisi yang menyebabkan (trigger event) modal pelengkap (Tier 2) dilakukan write down, yang didukung dengan pernyataan Perseroan dalam suratnya tertanggal 02-04-2024 (dua April tahun dua ribu dua puluh empat).
- vii. Terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan *Write Down* tidak secara otomatis dapat dianggap termasuk sebagai terjadinya kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan.
- viii. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan *Write Down* ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku, maka peraturan-peraturan yang terbaru tersebut yang akan diberlakukan untuk Pemegang Obligasi Subordinasi.
- G. Dalam hal OJK telah memerintahkan Perseroan untuk melakukan fitur yang telah dipilih oleh Perseroan yaitu *Write Down*, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan dalam Pasal 5.2.F.
- H. Apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan dalam kondisi terdapat Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan Perseroan melaksanakan *Write Down* sesuai ketentuan Pasal 5.2.F Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dibebaskan dari tuntutan dari Pemegang Obligasi atau pihak lain atas kerugian yang diderita oleh Pemegang Obligasi Subordinasi akibat terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan *Write Down* atas Obligasi Subordinasi oleh Perseroan.

B. PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan, selama jangka waktu Obligasi Subordinasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi Subordinasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi Subordinasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa:

- A. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:
- Perseroan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1. melakukan perubahan bidang usaha utama;
 - 2. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, kecuali pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK);
 - 3. mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semua syarat dan kondisi Obligasi Subordinasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi Subordinasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi Subordinasi dan perusahaan penerus tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang Perbankan; atau
 - b. disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - 4. melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan;
 - 5. melakukan transaksi dengan pihak ter Afiliasi-nya kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Perseroan atau setidaknya tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan ter Afiliasi-nya dalam transaksi yang lazim;
 - 6. memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan

pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan.

- B. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

Apabila Wali Amanat tidak menyetujui maka harus diputuskan oleh RUPO.

- C. Perseroan berkewajiban untuk:

- Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi ke rekening Agen Pembayaran dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
- Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut diatas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar.

Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut diatas, maka Perseroan harus membayar Denda.

Kewajiban penyetoran dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur di atas, dilaksanakan dengan memperhatikan Pasal 19 ayat 1 huruf e Peraturan OJK Nomor: 11/POJK.03/2016 juncto Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.03/2016 juncto Surat Edaran OJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016 tentang fitur konversi menjadi saham biasa atau *Write Down* terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan Dan Modal Pelengkap, yaitu bahwa pembayaran Pokok Obligasi dan/atau bunga ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cummulative*) apabila pembayaran dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 Peraturan OJK Nomor: 11 juncto Peraturan OJK Nomor: 34 juncto Surat Edaran OJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016 tentang fitur konversi menjadi saham biasa atau *Write Down* terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan Dan Modal Pelengkap.

- Mengupayakan untuk mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 yang tergolong "Cukup Baik" sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan OJK.
- Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum.
- Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan Keuangan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.
- Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat memberikan dampak secara material pada kegiatan usaha atas usaha-usaha atau operasi Perseroan dan segera memberikan kepada Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan aset Perseroan dan hal-lain-lain.
- Membayar semua kewajiban pajak dan seluruh kewajiban Perseroan kepada pemerintah sebagaimana mestinya.
- Dengan tidak mengenyampingkan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat dengan ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu, sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas bukubuku, izin-izin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan pada saat jam kerja

- Perseroan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai Wali Amanat sesuai dengan Perjanjian Perwalianamanatan.
10. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan perubahan-perubahannya di kemudian hari dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan peraturan OJK;
 11. Memelihara harta kekayaan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
 12. Memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan OJK pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
 13. Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan.
 14. menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
 - a. laporan keuangan Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;
 - b. laporan keuangan triwulanan dan tengah Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
 - i. 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - ii. 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - iii. 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
 15. Memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat atas:
 - a. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
 - b. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianamanatan;
 - c. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - d. setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.
 - e. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi Subordinasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
 16. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 49, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan OJK Nomor: 49.
 17. Memastikan bahwa tidak terdapat perjanjian yang dilakukan antara Emiten dengan para pihak lainnya termasuk pemegang saham Emiten yang dapat menghambat dilakukannya write down atas Obligasi Subordinasi pada saat terjadi kondisi yang menyebabkan (trigger event) instrumen modal pelengkap (Tier 2) harus dilakukan write down.

C. KELALAIAN PERSEROAN

- A. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini
- Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi kecuali kelalaian pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi tersebut disebabkan karena kondisi ditanggukannya dan diakumulasi pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi oleh OJK dengan ketentuan bahwa kejadian ini tidak termasuk terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan *Write Down*, dengan memperhatikan peraturan OJK yang saat ini diatur dalam Pasal 19 ayat 1 huruf e Peraturan OJK Nomor: 11 juncto Peraturan OJK Nomor: 34 juncto Surat Edaran OJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016 tentang fitur konversi menjadi saham biasa atau *Write Down* terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan Dan Modal Pelengkap; atau;
 - Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
Yang merupakan "Pinjaman" adalah total pinjaman yang diterima dan utang surat berharga berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Audited Perseroan; atau
 - Apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan (selain Pasal 9.1.a dan 9.1.b atau
 - Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
- B. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu: Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam
- Ayat 9.1. huruf a dan b Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - Ayat 9.1. huruf c dan d Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
- Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.
- Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Subordinasi.
- Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi Subordinasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.
- Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.
- C. Apabila:
- Perseroan dicabut izin usahanya oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
 - Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
 - Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang

- berwenang; atau
- d) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Subordinasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi. Dalam hal ini Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya dan pelaksanaannya memperhatikan ketentuan dalam Pasal 9.4 Perjanjian Perwaliamanatan.

D. Dengan mengesampingkan setiap ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang bertentangan dengan Ayat 9.4 ini, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.2 Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat untuk setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dan setiap Pemegang Obligasi Subordinasi (dengan menerima Obligasi Subordinasi), dengan tanpa dapat ditarik kembali dengan ini mengakui dan setuju bahwa baik Wali Amanat atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi maupun Pemegang Obligasi Subordinasi atas nama dirinya sendiri bahwa:

- a. Dalam hal terjadi kelalaian (*event of default*) sebagaimana dimaksud dalam Ayat 9.2 dan Ayat 9.3 ini, Perseroan tidak dapat dituntut sesuatu apapun, baik didalam maupun diluar pengadilan, kecuali dapat dimohonkan kepailitan dan/atau Likuidasi Perseroan kepada pihak yang berwenang dan menyatakan Obligasi Subordinasi jatuh tempo serta melakukan penagihan kepada Perseroan sebagai langkah awal proses permohonan kepailitan dan/atau Likuidasi Perseroan tersebut (dan bukan untuk tujuan lain) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dalam bentuk apapun selain daripada kelalaian (*event of default*) sebagaimana dimaksud dalam Ayat 9.2 dan Ayat 9.3 Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau terjadi kelalaian (*event of default*) berdasarkan Dokumen Emisi selain daripada Obligasi Subordinasi atau Perjanjian Perwaliamanatan, pelanggaran tersebut tidak akan dianggap sebagai kelalaian (*event of default*) terhadap Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan tidak dapat dituntut sesuatu apapun, baik didalam maupun diluar pengadilan, kecuali dapat dituntut agar Perseroan memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan ini diluar kewajiban untuk membayar Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi termasuk denda (jika ada) dengan syarat bahwa Perseroan tidak dapat dipaksa untuk menyeter atau membayar sejumlah uang berapapun sebagai akibat dari tindakan Wali Amanat berdasarkan Ayat 9.4 butir b ini.

Tanpa mengurangi sifat umum dari Ayat 9.4 Perjanjian Perwaliamanatan, dan sesuai dengan ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 5.2 Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat untuk setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dan setiap Pemegang Obligasi Subordinasi (dengan menerima Obligasi Subordinasi), dengan tanpa dapat ditarik kembali dengan ini mengakui dan setuju bahwa setiap ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan setiap ketentuan lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dapat mengakibatkan Perseroan dipaksa untuk membayar sejumlah uang berupa atau yang merujuk pada jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi lebih cepat daripada seharusnya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan seandainya Wali Amanat tidak mengambil tindakan berdasarkan Ayat 9.4 Perjanjian Perwaliamanatan dengan ini secara tegas dengan tidak dapat ditarik kembali dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan.

D. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI (RUPOS)

Untuk penyelenggaraan RUPOS, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

1) RUPOS diadakan untuk tujuan antara lain:

- a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, Pokok Obligasi Subordinasi, suku Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 20, perubahan tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam

Perjanjian Perwaliamanatan dan dengan tetap tunduk pada ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dalam keadaan apapun, kecuali dalam hal terdapat perintah dari OJK untuk *Write Down* sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.2.F Perjanjian Perwaliamanatan.

- b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian dengan ketentuan bahwa perintah OJK untuk melaksanakan *Write Down* tidak termasuk dalam ketentuan butir b ini.
 - c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan OJK Nomor: 20, dan
 - e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) **RUPOS dapat diselenggarakan atas permintaan:**
- a) Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPOS dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.
Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b) Perseroan;
 - c) Wali Amanat; atau
 - d) OJK.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPOS.
- 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Subordinasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPOS, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPOS:
- a) Pengumuman RUPOS wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b) Pemanggilan RUPOS dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPOS, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c) Pemanggilan untuk RUPOS kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPOS kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPOS sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPOS dan mengungkapkan informasi antara lain: -
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPOS;
 - (2) agenda RUPOS;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPOS;
 - (4) Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPOS; dan
 - (5) kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPOS .
 - e) RUPOS kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPOS sebelumnya.
- 6) Tata cara RUPOS;
- a) Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPOS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

- b) Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPOS adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPOS yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c) Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPOS wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
- d) Seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/ dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPOS sampai dengan tanggal berakhirnya RUPOS yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi Subordinasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPOS.
- e) Setiap Obligasi Subordinasi sebesar Rp 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPOS, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPOS mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
- f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- g) Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
- h) Sebelum pelaksanaan RUPOS:
- Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi Subordinasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi Subordinasi atau kuasa Pemegang Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- i) RUPOS dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
- j) RUPOS dipimpin oleh Wali Amanat.
- k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPOS termasuk materi RUPOS dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPOS.
- l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi, maka RUPOS dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPOS tersebut.
Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPOS tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPOS dan materi RUPOS serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPOS.
- 7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6.g) Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a) Dalam hal RUPOS bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1) diatur sebagai berikut:
- (1) Apabila RUPOS dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki ^[1] oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
- (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPOS yang kedua.
- (c) RUPOS kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari

- jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
- (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPOS yang ketiga.
 - (e) RUPOS ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
- (2) Apabila RUPOS dimintakan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPOS yang kedua.
 - (c) RUPOS kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPOS yang ketiga.
 - (e) RUPOS ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
- (3) Apabila RUPOS dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPOS yang kedua.
 - (c) RUPOS kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPOS yang ketiga. -
 - (e) RUPOS ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
- b) RUPOS yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
- 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPOS kedua.
- 3) RUPOS kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
- 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPOS yang ketiga.
- 5) RUPOS ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPOS yang keempat.
- 7) RUPOS keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
- 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPOS keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
- 9) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPOS menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 10) Penyelenggaraan RUPOS wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris.
- 11) Keputusan RUPOS mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Subordinasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi Subordinasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPOS. Keputusan RUPOS mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi Subordinasi.
- 12) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPOS dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPOS tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- 13) RUPOS untuk memutuskan mengenai perubahan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, perubahan dasar penentuan tingkat bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi dan perubahan perjanjian perwaliamanatan dalam rangka perubahan tersebut diatas, RUPOS hanya dapat diajukan dalam hal terjadi kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan dengan tetap tunduk pada ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.-Apabila RUPOS yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPOS atau tanggal lain yang diputuskan RUPOS (jika RUPOS memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPOS, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa perintah OJK untuk melaksanakan *Write Down* tidak termasuk dalam perubahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir ini;
- 14) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPOS dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat, dengan

- mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Peraturan KSEI serta peraturan Bursa Efek.
- 15) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPOS ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI SUBORDINASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI

Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI

Tata cara pemesanan Obligasi Subordinasi dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini.

PERPAJAKAN

Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai modal pelengkap (tier 2) dalam rangka ekspansi kredit serta peningkatan struktur perhimpunan jangka panjang.

Rencana penggunaan dana dari penerbitan Obligasi Subordinasi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan

Tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Subordinasi yang diperoleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai modal pelengkap (Tier 2) dalam rangka ekspansi kredit serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang, sesuai dengan Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 13 Peraturan POJK No.17/2020, tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai transaksi material dikarenakan tujuan penggunaan dana dalam rangka ekspansi kredit adalah merupakan kegiatan usaha Perseroan yang telah termuat dalam anggaran dasar Perseroan yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan disamping itu tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi yang diperoleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai modal pelengkap (Tier 2) dalam rangka ekspansi kredit tidak memenuhi kualifikasi sebagai transaksi afiliasi baik yang memiliki atau tidak memiliki benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan dikarenakan pemberian kredit tersebut bukan ditujukan untuk membiayai Perseroan dan/atau afiliasinya namun ditujukan untuk pembiayaan kepada pihak ketiga.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPOS dan memperoleh persetujuan RUPOS sesuai dengan POJK No.30/2015 dan POJK No.20/2020.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No.30/2015. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat sebagaimana setelah Tanggal Distribusi dan untuk selanjutnya wajib disampaikan kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan telah menggunakan seluruh dana hasil Penawaran Umum sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan sesuai dengan POJK No.30/2015.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi tersebut dalam instrumen keuangan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020.

Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi telah direalisasikan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Bank BJB Tahun 2022 yang telah diserahkan Perseroan kepada OJK melalui surat No. 633/DIR-TRE/2022 tanggal 1 Juli 2022 seluruh dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Bank BJB Tahun 2022 seluruhnya telah dipergunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya (sudah termasuk pajak) yang dikeluarkan Perseroan adalah kurang lebih setara dengan (*)% dari nilai Emisi Obligasi Subordinasi. Semua biaya di bawah ini merupakan presentasi dari total biaya yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sekitar (*)% yang termasuk di dalamnya adalah (*)% untuk biaya penyelenggaraan (*Management Fee*), (*)% biaya jasa penjaminan (*Underwriter Fee*); dan (*)% biaya jasa penjualan (*Selling Fee*);

- Biaya jasa untuk Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar (*)% yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar (*)%, biaya jasa Konsultan Hukum sekitar (*)% dan biaya jasa Notaris sekitar (*)%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar (*)% yang terdiri dari: biaya jasa Wali Amanat sekitar (*)% dan Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar (*)%;
- Biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sekitar (*)%;
- Biaya lain-lain (Bursa Efek, Kustodian, Auditor Penjatahan, Percetakan, Iklan) sekitar (*)%.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut diambil dari laporan keuangan Perseroan tahun 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan ("RSM") pada tanggal 22 Mei 2024 dengan Opini Tanpa Modifikasi.

Per 31 Desember 2023, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp163.579.102 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
LIABILITAS	Jumlah
Liabilitas segera	2.212.830
Simpanan nasabah	
- pihak berelasi	6.401.344
- pihak ketiga	120.077.043
	126.478.387
Simpanan nasabah – syariah	
- pihak berelasi	480
- pihak ketiga	947.836
	948.316
Simpanan dari bank lain	
- pihak berelasi	86.755
- pihak ketiga	2.454.785
	2.541.540
Liabilitas derivative	23
Liabilitas akseptasi	288.944
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.244.805
Efek utang yang diterbitkan	957.991
Pinjaman yang diterima – pihak ketiga	20.323.823
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	13.131
Utang pajak	82.159
Bunga dan bagi hasil yang masih harus dibayar	285.191
Liabilitas imbalan kerja pasti	293.605
Liabilitas lain-lain	1.229.508
Obligasi subordinasi	3.678.849
Total Liabilitas	163.579.102

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Liabilitas Segera

Saldo Liabilitas Segera Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.212.830 juta. Rincian dari saldo Liabilitas Segera adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas Segera	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)	Ekuivalen Rupiah
Rupiah		
Rekening titipan		1.606.746
Kiriman uang		387.502
Liabilitas kepada Kantor Bendahara dan Kas Negara		164.719
Setoran Jaminan yang telah jatuh tempo tetapi belum diambil nasabah		10.206
Zakat, infaq, dan Shadaqah		313
Titipan kredit dan pembiayaan syariah		1.171
Titipan dana bantuan pemerintah		6.517
		2.177.174
Dolar Amerika Serikat		
Setoran jaminan yang telah jatuh tempo tetapi belum diambil oleh nasabah	274.936	4.233
Lain-lain	2.040.830	31.423
		35.656
Total		2.212.830

Rekening titipan merupakan hasil dari uang titipan yang diterima Perseroan dan entitas anak atas transaksi pembayaran dari nasabah yang akan disetorkan pihak bank ke rekening tujuan. Kiriman uang digunakan untuk membukukan setoran transfer sebelum mengkredit atau mendebet rekening nasabah. Liabilitas kepada Kantor Bendahara dan Kas Negara merupakan hasil penerimaan pajak dari para wajib pajak baik perorangan maupun perusahaan yang diterima Perseroan sebagai bank persepsi.

2. Simpanan Nasabah dan Simpanan Nasabah Syariah

Saldo Simpanan Nasabah dan Simpanan Nasabah Syariah pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp126.478.387 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Simpanan Nasabah	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)	Ekuivalen Rupiah
Pihak - berelasi		
Rupiah		
Giro		6.184.407
Tabungan		
Tandamata Gold		7.221
Simpeda		11.226
Tandamata		26.162
Lain-lain		6.866
		51.475
		164.687
		6.400.569
Mata Uang Asing		
Dolar Amerika Serikat		
Tabungan Tandamata	17.689	272
Deposito berjangka	22.227	342
Dolar Singapura		
Tabungan Tandamata	13.786	161
		775

(dalam jutaan Rupiah)

Simpanan Nasabah	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)	Ekuivalen Rupiah
Subtotal - pihak berelasi		6.401.344
Pihak ketiga		
Rupiah		
Giro		15.041.139
Tabungan		
Tandamata		14.052.900
Simpeda		2.393.645
Tandamata Gold		917.842
Tandamata Pumabakti		2.209.804
TabunganKu		374.013
Tandamata Berjangka		248.382
Lain-lain		11.013.459
		31.210.045
Deposito berjangka		67.759.697
Subtotal - rupiah		114.010.881
Dolar Amerika Serikat		
Giro	2.204.884	33.949
Tabungan Tandamata	2.310.787	33.580
Deposito Berjangka	388.985.715	5.989.213
Dolar Singapura		
Giro	3.696	43
Tabungan Tandamata	406.314	4.744
Deposito berjangka	205.347	2.398
Euro Eropa		
Giro	8.238	140
Renminbi		
Giro	35.100	76
Yen Jepang		
Giro	139.969	15
Dolar Australia		
Giro	363	4
		6.066.162
Subtotal - pihak ketiga		120.077.043
Total		126.478.387

(dalam jutaan Rupiah)

Simpanan Nasabah Syariah	31 Desember 2023
Pihak berelasi	
Rupiah	
Tabungan IB	480
	480
Pihak ketiga	
Rupiah	

(dalam jutaan Rupiah)

Simpanan Nasabah Syariah	31 Desember 2023
Giro Wadiah	211.910
Tabungan Wadiah	3.694
Tabunganku IB	732.232
	<u>947.836</u>
Total	948.316

Rincian deposito berjangka berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Simpanan Nasabah	Jumlah Nosional Mata Uang Asing (angka penuh)	Ekuivalen Rupiah
Rupiah		
1 bulan		19.775.980
3 bulan		20.696.871
6 bulan		11.774.724
12 bulan		12.810.289
Lebih dari 12 bulan		2.866.521
		<u>67.924.385</u>
Dolar Amerika Serikat		
1 bulan	215.507.862	3.318.174
3 bulan	170.368.367	2.623.162
6 bulan	1.749.441	26.936
12 bulan	1.382.272	21.282
		<u>5.989.554</u>
Dolar Singapura		
1 bulan	117.000	1.366
6 bulan	88.347	1.032
		<u>2.398</u>
		5.991.952
Total		73.916.337

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2023
Giro	
Rupiah	0,06%
Dolar Amerika Serikat	0,02%
Tabungan	
Rupiah	0,12%
Dolar Amerika Serikat	0,04%
Deposito berjangka	
Rupiah	3,48%
Dolar Amerika Serikat	1,31%

Giro yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan dan pembiayaan dan piutang syariah pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.466.333 juta.

Deposito yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan dan pembiayaan dan piutang syariah pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp677.349 juta..

Perseroan memberikan *special rate* deposito khusus kepada nasabah institusi rupiah dengan minimal penempatan dana di atas Rp2.000 juta (dua miliar Rupiah) untuk mata uang rupiah dan USD100.000 (seratus ribu USD) dengan suku bunga yang diberikan antara 3.00% - 8.00% untuk Rupiah dan 0,75% - 6,00% untuk USD. Untuk *Special Rate* Giro diberikan kepada Nasabah Institusi rupiah dengan penempatan dana di atas Rp2.000 juta (dua miliar Rupiah) dengan tingkat suku bunga yang diberikan antara 1,50% - 5.00%.

3. Simpanan dari Bank Lain

Saldo Simpanan dari Bank Lain pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.541.540 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Simpanan dari Bank Lain	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)	Ekuivalen Rupiah
Pihak - berelasi		
Rupiah		
Tabungan		32.263
Deposito berjangka		36.447
Giro		18.045
		<hr/>
		86.755
Pihak ketiga		
Rupiah		
Deposito berjangka		648.583
Tabungan		410.314
Call money		860.000
Giro		510.734
Sertifikat deposito		25.154
		<hr/>
		2.454.785
Total		2.541.540

Rincian deposito berjangka berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Simpanan Nasabah	31 Desember 2023
Rupiah	
1 bulan	421.011
3 bulan	75.535
6 bulan	66.913
12 bulan	120.652
24 bulan	2.919
Total	685.030

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2023
Giro	
Rupiah	0,45%
Tabungan	
Rupiah	1,07%

Keterangan	31 Desember 2023
Deposito berjangka	
Rupiah	4,34%
Call Money	
Rupiah	6,27%

Deposito dari bank lain yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp346.587 juta.

4. Liabilitas atas Efek-Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)

Nasabah	Jenis Surat Berharga	Nilai Nominal	Tanggal Dimulai	Tanggal Pembelian Kembali	Harga Pembelian Kembali	Beban Bunga yang belum diamortisasi	Nilai tercatat
Pihak Ketiga Bank Indonesia	SUN FR 59	500.000	27 Des 2023	3 Jan 2024	487.415	169	487.246
	SUN FR 82	500.000	27 Des 2023	3 Jan 2024	483.976	168	483.808
	SUN FR 65	500.000	28 Des 2023	3 Jan 2024	468.414	161	468.253
	SUN FR 86	500.000	28 Des 2023	3 Jan 2024	471.575	162	471.413
	SUN FR 86	500.000	28 Des 2023	3 Jan 2024	471.575	162	471.413
	SUN FR 90	500.000	28 Des 2023	3 Jan 2024	462.794	159	462.635
	SUN FR 90	500.000	28 Des 2023	3 Jan 2024	462.794	159	462.635
	SUN FR 91	500.000	28 Des 2023	3 Jan 2024	464.475	160	464.315
	SUN FR 87	500.000	28 Des 2023	4 Jan 2024	473.335	247	473.087
	Total		4.500.000			4.246.353	1.547

5. Efek Utang yang Diterbitkan

Saldo Efek Utang yang Diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp957.991 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Bank Jabar Banten	780.000
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Bank Jabar Banten	182.000
	<hr/>
	962.000
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(4.009)
Total	957.991

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Bank Jabar Banten terdiri dari:

- Seri C dengan nilai nominal Rp780.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 8,85% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2024.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Bank Jabar Banten terdiri dari:

- 1) Seri B dengan nilai nominal Rp108.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 8,50% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2024.
- 2) Seri C dengan nilai nominal Rp74.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 8,75% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2026.

Pada tanggal 31 Desember 2023 peringkat Obligasi Berkelanjutan I Tahap III untuk Seri B dan Seri C menurut Pefindo masing-masing adalah idAA..

Pada 31 Desember 2023, Perseroan telah mengamortisasi biaya emisi obligasi sebesar Rp5.458 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Bertindak sebagai wali amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap Idan III adalah PT Bank MegaTbk. Hubungan dengan wali amanat bukan merupakan pihak berelasi Perseroan.

Tidak terdapat jaminan ataupun pembentukan dana untuk pelunasan pokok obligasi dengan menunjuk pos yang berhubungan.

Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan bidang usaha utama;
2. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, kecuali pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan);
3. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi Subordinasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi Subordinasi dan perusahaan penerus tersebut salah satu bidangnya adalah bergerak dalam bidang Perbankan; atau
 - b. Disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan;
5. Melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Perseroan atau setidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan afiliasi dalam transaksi yang lazim;
6. Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan.

6. Pinjaman yang Diterima

Saldo Pinjaman yang Diterima pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp20.323.823 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Bank Central AsiaTbk	5.700.000
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	5.059.407
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	4.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.500.000
PT Bank DKI	1.500.000

PT Bank BTPN Tbk	1.000.000
PT Bank ICBC Indonesia	800.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	500.000
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	200.000
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	34.465
PT BPR Daya Lumbung Asia	7.768
BPR Supra Artapersada	11.200
PT Bank Oke Indonesia Tbk	5.566
PT Bank CIMB Niaga Tbk	5.417
Total	20.323.823

PT Bank Central Asia Tbk

Perseroan mendapatkan 2 (dua) fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk, sebagai berikut:

- Term Loan Non Revolving 2* dengan plafon Rp2.000.000 juta. Sebelumnya pinjaman ini memiliki jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sampai tanggal 27 Maret 2020 dengan tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan+0,75% per tahun. Pada 10 Desember 2019, Perseroan melakukan perpanjangan atas pinjaman ini sehingga jatuh tempo pinjaman menjadi tanggal 27 Maret 2026 namun tingkat suku bunga tidak berubah;
- Term Loan Non Revolving 3* dengan plafon Rp2.000.000 juta. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sampai tanggal 17 Oktober 2024 dengan tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan + 0,5% per tahun.
- Term Loan Non Revolving 4* dengan plafon Rp1.500.000 juta. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sampai tanggal 30 Juni 2025 dengan tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan + 1,15% per tahun.
- Term Loan Non Revolving 5* dengan plafon Rp200.000 juta. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sampai tanggal 29 Oktober 2025 dengan tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan + 1,15% per tahun.

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan BCA tersebut pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.700.000 juta dan Rp4.000.000 juta.

Selama masa pinjaman, Perseroan memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan antara lain (i) menyerahkan laporan keuangan selambat-lambatnya 14 hari setelah tanggal publikasi, (ii) memberitahukan perubahan susunan anggaran dasar; (iii) kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan pemberian fasilitas.

Perseroan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian untuk tanggal 31 Desember 2023. Perseroan tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Bank BJB Syariah ("BJBS") mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) berdasarkan akad pembiayaan No. 124/AKAD/SMF-BJBS/XI/2018 tanggal 4 September 2018 yang berjangka waktu 15 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 September 2033. Porsi nisbah yang disepakati adalah 77,75% untuk PT SMF dan 22,25% untuk BJBS.

Selama masa pinjaman, BJBS memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan antara lain (i) menyerahkan laporan keuangan setiap 6 (enam) bulan, (ii) perubahan akta pendirian dan anggaran Perseroan, (iii) kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan pemberian fasilitas.

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan SMF tersebut pada tahun 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp200.000 juta Rp100.000 juta.

BJBS telah memenuhi semua persyaratan ditetapkan dalam perjanjian untuk tahun 31 Desember 2023. Atas pinjaman Term Loan I, BJBS menjaminkan agunan berupa fidusia atas piutang penerbitan KPR.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perseroan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan limit Rp1.500.000 juta. Jangka waktu kredit selama 2 (dua) tahun dari tanggal 25 September 2023 sampai dengan 24 September 2025 dengan tingkat suku bunga pinjaman adalah JIBOR 3 M + 0.60%.

Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman untuk melakukan pengembangan ekspansi kredit. Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian pinjaman Perseroan antara lain:

- Menjaga Capital Adequacy Ratio (CAR) minimal sebesar 10,28% atau sesuai dengan ketentuan OJK untuk Bank Buku III dan profil risiko Perseroan mana yang lebih besar;

- b. Menjaga maksimum *Non Performing Loan* (NPL) net sebesar 3,50%;
- c. Menjaga net income tahun berjalan dengan angka positif;
- d. Menjaga *Liquidity Coverage Ratio* minimal sebesar 100% pada posisi laporan keuangan triwulan.

Perseroan juga mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan limit Rp500.000 juta. Jangka waktu kredit selama 1 tahun dari tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 19 Desember 2023 dengan tingkat suku bunga JIBOR 3M + 1%.

Selama masa pinjaman, Perseroan memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan antara lain (i) memastikan ketersediaan laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; (ii) ketersediaan penggunaan dana dengan tujuan pemberian fasilitas; dan (iii) menyampaikan akta perubahan anggaran dasar debitor setiap ada perubahan.

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.500.000 juta dan, Nihil.

Perseroan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian untuk 31 Desember 2023 dan 2022. Perseroan tidak menjaminkan apapun atas pinjaman ini.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Pinjaman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPUPERA) Republik Indonesia merupakan fasilitas penyaluran dana program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Sejahtera Syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan Perjanjian Kerjasama Operasional No. HK.02.03-Sg.DL/03/2017, No. 001/PKS/DIR-KS/2017 tanggal 3 Januari 2017 dan Perjanjian Kerjasama Operasional No. 13/PKS/Satker-DJPB/2017, No. 003/PKS/DIR-KS/2017 tanggal 5 Januari 2017. Pinjaman memiliki tingkat suku bunga sebesar 4,40%.

Ketentuan perjanjian Kerja Sama tersebut sebagai berikut:

- a. Akad penanaman dana dari KEMENPUPERA sebagai pemilik dana kepada BJBS dengan sistem bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati dengan sistem revenue sharing;
- b. Objek dalam perjanjian tersebut adalah Dana KPR Sejahtera yang terdiri dari dana KEMENPUPERA dan BJBS dengan jumlah paling tinggi sebesar Rp237.000 juta untuk pembiayaan KPR Sejahtera paling rendah 2.500 unit, dengan dana yang disiapkan oleh pihak BJBS paling rendah sebesar 10% dari total dana yang diperjanjikan;
- c. Atas dana yang dikelola oleh BJBS, KEMENPUPERA menerima pembayaran imbal bagi hasil setiap bulan sebesar counter nisbah imbal hasil maksimal yang berlaku di BJBS;
- d. Imbal hasil yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian x jumlah hari x (gross yield x nisbah)/365 sebagaimana perjanjian antara BJBS dengan KEMENPUPERA;
- e. BJBS menyediakan laporannya yang terkait dengan pelaksanaan FLPP yang mencakup data nasabah dan lainnya;
- f. Kelompok sasaran KPR Sejahtera merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dengan batasan penghasilan tertentu sesuai dengan Peraturan Kementerian PUPERA No. 552/KPTS/M/2016, antara lain:
 - Nilai KPR paling tinggi sebesar batasan harga jual rumah dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan;
 - Margin KPR paling tinggi 5,00% (lima persen) per tahun (bersifat tetap);
 - Jangka waktu KPR Sejahtera paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- g. Pengembalian pokok dana FLPP ke KEMENPUPERA dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya sejak BJBS menerima perintah pemindahbukuan dana FLPP.

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan KEMENPUPERA pada 31 Desember 2023 dan 2022 berturut-turut adalah sebesar Rp1.564.587 juta, dan Rp2.928.716 juta..

BJBS telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman di atas. Perseroan tidak menjaminkan apapun atas pinjaman ini.

PT Bank ICBC Indonesia

Perseroan memiliki fasilitas *Bilateral Committed Loan Credit Facility* dari PT Bank ICBC Indonesia dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal 28 Desember 2023 hingga 28 Desember 2025 dengan plafon Rp800.000 juta dengan bunga sebesar JIBOR 3M + 0.70%.

Selama masa pinjaman, Perseroan harus menyerahkan laporan keuangan (audited) dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal tutup buku tahunan, Perseroan harus menyerahkan laporan keuangan beserta dokumen lainnya.

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan ICBC pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp800.000 juta dan Rp800.000 juta..

Perseroan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian untuk 31 Desember 2023. Perseroan tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Perseroan memiliki fasilitas Kredit Angsuran Berjangka dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan plafon Rp1.500.000 juta yang memiliki jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 28 September 2022 hingga 26 September 2025 dengan bunga 7,15%.

Perseroan juga mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan limit Rp1.000.000 juta. Jangka waktu kredit selama 2 tahun dari tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 28 Maret 2024 dengan tingkat suku bunga tetap 4,50%.

Selama masa pinjaman, Perseroan memiliki kewajiban untuk menjaga agar kolektibilitas debitur pada setiap kreditur dari debitur adalah tetap pada kolektibilitas 1 sesuai aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan Danamon pada 31 Desember 2023 dan 2022 berturut-turut adalah sebesar Rp1.000.000 juta dan Rp1.000.000 juta serta Rp4.000.000 juta dan Nihil.

Perseroan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian untuk 31 Desember 2023 dan 2022. Perseroan tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Perseroan mendapatkan pinjaman dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB) dengan plafon sebesar Rp200.000 juta. Pinjaman memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun setelah pencairan pertama. Perseroan melakukan pencairan pertama pada September 2019.

Pinjaman yang diberikan kepada Perseroan nantinya akan disalurkan sebagai kredit kepada Koperasi Usaha Mikro dan Menengah. Porsi penyaluran kredit dari Perseroan adalah 80% dari plafon atau Rp160.000 juta, untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan 40% atau Rp40.000 juta untuk Koperasi. Tingkat suku bunga yang diberikan dari LPDB ke Perseroan sebesar 5% dan suku bunga dari Perseroan kepada Usaha Mikro dan Menengah sebesar maksimal 16% pertahun.

Jaminan atas pinjaman ini adalah jaminan fidusia atas piutang dengan kategori sehat dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun, dengan nilai minimal sebesar 125% dari plafon pinjaman.

Berdasarkan perjanjian pinjaman Perseroan disyaratkan untuk memperhatikan dan menjaga tingkat kesehatan keuangannya sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Bank Umum dengan tingkat kesehatan minimal "SEHAT".

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan LPDB-KUMKM selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.524 juta, dan Rp20.000 juta.

Perseroan berkewajiban melakukan pengembalian pokok dilakukan secara bulanan, selambat-lambatnya pada tanggal 25 (dua puluh lima), sesuai dengan jadwal angsuran pinjaman ke Rekening Pengembalian Pokok Dana Bergulir LPDB-KUMKM.

Perseroan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian untuk 31 Desember 2023. Perseroan tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

PT Bank DKI

Perseroan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank DKI dengan limit Rp1.500.000 juta. Jangka waktu kredit selama 2 (dua) tahun dari tanggal 29 September 2022 sampai dengan 27 September 2024 dengan tingkat suku bunga pinjaman adalah JIBOR 3 M + 0,65%.

Selama masa pinjaman, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar OJK selambat-lambat 180 hari setelah tanggal penutupan buku.

Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman untuk tujuan memenuhi kebutuhan likuiditas.

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan Bank DKI pada 31 Desember 2023 berturut-turut adalah sebesar Nihil dan Rp1.500.000 juta.

Perseroan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian untuk tahun 31 Desember 2023 dan 2022. Perseroan tidak menjaminkan apapun atas pinjaman ini.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berdasarkan persetujuan kredit No. 1792 tanggal 30 Desember 2019, BPR Intan Jabar memperoleh fasilitas Pinjaman modal kerja dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. Jumlah fasilitas kredit sebesar Rp7.500 juta, dengan tingkat suku bunga sebesar 10% per tahun, jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2025. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha yang berasal dari fasilitas kredit yang diberikan.

Fasilitas kredit pada PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan nilai nominal Rp40.000 juta telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal jatuh tempo pada tanggal 6 September 2022. Fasilitas kredit pada PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan nilai nominal Rp40.000 juta telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal jatuh tempo pada tanggal 17 September 2022.

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan PT CIMB Niaga Tbk pada 31 Desember 2023 dan 2022 berturut-turut adalah sebesar Nihil dan Rp537 juta.

BPR Intan Jabar telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pada tanggal 31 Desember 2023. Perseroan tidak menjaminkan apapun atas pinjaman ini.

PT Bank Oke Indonesia

BPR Intan Jabar memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Oke Indonesia Tbk dengan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp40.000 juta dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman No. 086/BA/JKT/IV/2017 tanggal 28 Mei 2017 BPR Intan Jabar mendapatkan fasilitas pinjaman dengan plafon Rp20.000 juta. Pinjaman memiliki jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan. Tingkat suku bunga pinjaman ini adalah 10,75% per tahun;
- b. Berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman No. 078/BOI/BD/IV/2018 tanggal 5 April 2018 BPR Intan Jabar mendapatkan fasilitas pinjaman dengan plafon Rp20.000 juta. Pinjaman memiliki jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan. Tingkat suku bunga pinjaman ini adalah 10,50% per tahun.

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usahayang berasal dari fasilitas kredit yang diberikan. BPR Intan Jabar telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjianpinjaman.

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan PT Bank Oke Indonesia Tbk pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp138 juta dan Nihil.

Fasilitas kredit pada PT Bank Oke Indonesia Tbk dengan nilai nominal Rp15.000 juta telah dilunasi oleh BPR Intan Jabar pada tanggal jatuh tempo pada tanggal 7 Agustus 2022.

PT BPR Daya Lumbung Asia

BPR Intan Jabar memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari PTBPR Daya Lumbung Asia dengan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp6.000 juta dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman No. 0119/BPR-DLA/KREDIT/IV/2020 tanggal 27 April 2020 BPR Intan Jabar mendapatkan fasilitas pinjaman dengan plafon Rp3.000 juta. Pinjaman memiliki jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. Tingkat suku bunga pinjaman ini adalah 5,93% per tahun;
- b. Pada tanggal 09 Juli 2020 BPR Intan Jabar mendapatkan fasilitas pinjaman dengan plafon Rp2.000 juta. Pinjaman memiliki jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. Tingkat suku bunga pinjaman ini adalah 5,79% per tahun;
- c. Pada tanggal 14 September 2020 BPR Intan Jabar mendapatkan fasilitas pinjaman dengan plafon Rp1.000 juta. Pinjaman memiliki jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. Tingkat suku bunga pinjaman ini adalah 11,00% per tahun.
- d. Berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. 14 tanggal 26 Desember 2022, BPR Intan Jabar mendapat fasilitas restrukturisasi kredit eksisting dengan plafon sebesar Rp3.000 juta. Pinjaman memiliki jangka waktu 60 (enam puluh) bulan. Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 9,00% efektif per tahun.
- e. Berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. 59 tanggal 26 Desember 2022, BPR Intan Jabar mendapat fasilitas restrukturisasi kredit eksisting dengan plafon sebesar Rp5.000 juta. Pinjaman memiliki jangka waktu 60 (enam puluh) bulan. Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 9,00% efektif per tahun.

- f. Berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. 36 tanggal 26 Desember 2022, BPR Intan Jabar mendapat fasilitas restrukturisasi kredit eksisting dengan plafon sebesar Rp5.000 juta. Pinjaman memiliki jangka waktu 60 (enam puluh) bulan. Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 9,00% efektif per tahun.

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan PT BPR Daya Lumbung Asia pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Nihil dan Rp1.492 juta.

PT BPR Intan Jabar telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian untuk tahun 31 Desember 2023 dan 2022. PT BPR Intan Jabar tidak menjaminkan apapun atas pinjaman ini.

PT BPR Supra Antapersada

BPR Intan Jabar memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT BPR Supra Artapersada dengan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp10.000 juta. Pada tanggal 15 September 2020 BPR Intan Jabar mendapatkan fasilitas pinjaman dengan plafon Rp10.000 juta. Pinjaman memiliki jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan. Tingkat suku bunga pinjaman ini adalah 11,75% per tahun.

Berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. 58 tanggal 14 September 2023, BPR Intan Jabar mendapat fasilitas restrukturisasi kredit eksisting dengan plafon sebesar Rp10.000 juta. Pinjaman memiliki jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan. Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 11,75% efektif per tahun.

Berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. 26 tanggal 14 September 2023, BPR Intan Jabar mendapat fasilitas restrukturisasi kredit eksisting dengan plafon sebesar Rp5.000 juta. Pinjaman memiliki jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan. Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 11,00% efektif per tahun.

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan PT BPR Supra Arta persada pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Nihil dan Nihil.

PT BPR Intan Jabar telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian untuk 31 Desember 2023. PT BPR Intan Jabar tidak menjaminkan apapun atas pinjaman ini.

PT Bank BTPN Tbk

Perseroan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank BTPN Tbk dengan limit Rp1.000.000 juta. Jangka waktu kredit selama 1 (satu) tahun dari tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan 28 Desember 2024 dengan tingkat suku bunga pinjaman adalah JIBOR 3M + 0.25%.

Selama masa pinjaman, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar OJK selambat-lambat 180 hari setelah tanggal penutupan buku.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian pinjaman Perseroan antara lain:

- a. Menjaga Capital Adequacy Ratio (CAR) minimal sebesar 14.00%;
- b. Menjaga maksimum *Gross Non Performing Loan (NPL)* sebesar 5.00%;
- c. Menjaga net income tahun berjalan dengan angka positif

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan PT Bank BTPN Tbk pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.000.000 juta dan Nihil.

Perseroan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian untuk tahun 31 Desember 2023. Perseroan tidak menjaminkan apapun atas pinjaman ini.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Perseroan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan limit Rp500.000 juta. Jangka waktu kredit selama 2 (dua) tahun dari tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan 28 Desember 2025 dengan tingkat suku bunga pinjaman adalah JIBOR 3M + 0.65%.

Selama masa pinjaman, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar OJK selambat-lambat 180 hari setelah tanggal penutupan buku.

Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman untuk tujuan umum Perseroan. Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian pinjaman Perseroan antara lain:

- a. Menjaga Capital Adequacy Ratio (CAR) minimal sebesar 14.00%;
- b. Menjaga rasio maksimum Nett Non Performing Loan (NPL) sebesar 4.00%;
- c. Mematuhi hukum dan peraturan dari Bank Indonesia dan/atau OJK atau institusi lainnya yang mengawasi debitur.

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan PT Bank Maybank Indonesia Tbk pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp500.000 juta dan Nihil.

Perseroan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian untuk tahun 31 Desember 2023. Perseroan tidak menjaminkan apapun atas pinjaman ini.

7. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Saldo estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp29.765 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	31 Desember 2023
Fasilitas kredit yang belum digunakan	13.043
Bank garansi	88
Total	13.131

(dalam jutaan Rupiah)

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	31 Desember 2023
Saldo awal	10.747
Penyisihan selama tahun berjalan	6.506
Pembalikan selama tahun berjalan	(4.122)
Total	13.131

Manajemen berpendapat bahwa jumlah estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang dibentuk telah memadai.

8. Utang Pajak

Utang pajak pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp82.159 juta.

a. Utang Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Perseroan	31 Desember 2023
Pajak Penghasilan bafan (Pasal 29)	29.675
Pajak Penghasilan badan (Pasal 25)	22.435
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	6.165
Pasal 4 (2) dan 23	14.827
	73.102
Entitas Anak	
Pajak penghasilan badan	64
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	2.566
Pasal 4 (2) dan 23	6.427
	9.057
Total	82.159

b. Beban (manfaat) pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Perseroan	31 Desember 2023
Pajak kini	378.448
Pajak tangguhan	50.163
	428.611
Entitas Anak	
Pajak kini	13.913
Pajak tangguhan	2.666
	16.579
Total	445.190

9. Bunga yang Masih Harus Dibayar dan Bagi Hasil

Saldo bunga yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp285.191 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Bunga yang Masih Harus Dibayar dan Bagi Hasil	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)	Ekuivalen Rupiah
Rupiah		
Simpanan nasabah		170.431
Efek utang yang diterbitkan		44.302
Pinjaman yang diterima		33.489
Bagi hasil syariah		17.735
Simpanan dari bank lain		1.215
		267.172
Dolar Amerika Serikat		
Simpanan nasabah	1.170.294	18.019
Total		285.191

10. Liabilitas Lain-lain

Saldo liabilitas lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.229.508 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas Lain-Lain	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)	Ekuivalen Rupiah
Rupiah		
Jasa produksi		341.049
Setoran jaminan		93.673
Dana Corporate Social Responsibility		106.377
Provisi dan komisi diterima dimuka		16.838
Penghargaan kerja		63.804
Liabilitas sewa		512.507
Lain-lain		93.841
		1.228.089
Dolar Amerika Serikat		
Setoran jaminan	92.015	1.417
Lain-lain	110	2
		1.419
Total		1.229.508

Lainnya terutama terdiri dari rekening titipan, rekening dalam penyelesaian, dan titipan THR.

Perseroan senantiasa melakukan pemantauan terhadap kewajiban yang akan jatuh tempo, sehingga setiap kewajiban yang akan jatuh tempo selalu dapat dipenuhi dengan tepat waktu.

Tidak terdapat keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya dan tidak terdapat negosiasi dalam rangka restrukturisasi utang.

Dengan ini manajemen menyatakan sanggup untuk menyelesaikan seluruh liabilitas Perseroan sebagaimana mestinya.

11. Obligasi Subordinasi

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2023
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Bank Jabar Banten	693.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I Bank Jabar Banten	500.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II Bank Jabar Banten	500.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Bank Jabar Banten	1.000.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap II Bank Jabar Banten	1.000.000
	<u>3.693.000</u>
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(14.151)
Total	3.678.849

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Bank Jabar Banten terdiri dari Seri B dengan nilai nominal Rp693.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 9,90% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2024.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I Bank Jabar Banten terdiri dari:

- 1) Seri A dengan nilai nominal Rp132.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 8,60% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2025;
- 2) Seri B dengan nilai nominal Rp368.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 9,35% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2027.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II Bank Jabar Banten terdiri dari:

- 1) Seri A dengan nilai nominal Rp162.580 juta dengan suku bunga tetap sebesar 8,50% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 November 2025;
- 2) Seri B dengan nilai nominal Rp337.420 juta dengan suku bunga tetap sebesar 9,00% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 November 2027.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Bank Jabar Banten terdiri dari:

- 1) Seri A dengan nilai nominal Rp379.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 7,85% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2026;
- 2) Seri B dengan nilai nominal Rp621.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 8,60% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2028;

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap II Bank Jabar Banten terdiri dari:

- 1) Seri A dengan nilai nominal Rp399.910 juta dengan suku bunga tetap sebesar 7,85% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2027;
- 2) Seri B dengan nilai nominal Rp600.090 juta dengan suku bunga tetap sebesar 8,60% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2029.

Pada tanggal 31 Desember 2023, peringkat obligasi subordinasi berkelanjutan ini menurut Pefindo adalah idA+.

Selama jangka waktu obligasi tersebut di atas, tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak diperkenankan untuk:

1. Melakukan perubahan bidang usaha utama;
2. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, kecuali pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan);

3. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semua syarat dan kondisi Obligasi Subordinasi dalam Perjanjian Perwalianan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (surviving company), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi Subordinasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi Subordinasi dan perusahaan penerus tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang Perbankan; atau
 - c. Disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan;
5. Melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Perseroan atau setidaknya tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan afiliasi dalam transaksi yang lazim;
6. Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 22 MEI 2024 SERTA YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT DI ATAS. SERTA SELAIN LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI DARI KEGIATAN USAHA NORMAL.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS - LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM BAB III PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (firma anggota RSM Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00727/2.1030/AU.1/07/0499-2/1/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Registrasi Akuntan Publik No. 0499) dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET		
Kas	3.530.074	3.300.031
Giro pada Bank Indonesia	14.879.767	13.032.593
Giro pada bank lain - pihak ketiga	1.196.787	1.243.695
Cadangan kerugian penurunan nilai	(57)	(68)
	<u>1.196.730</u>	<u>1.243.627</u>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - pihak ketiga	3.886.989	7.156.807
Cadangan kerugian penurunan nilai	(296)	(2.133)
	<u>3.886.693</u>	<u>7.154.674</u>
Tagihan derivatif	1.289	17.388
Surat berharga - pihak ketiga	30.976.967	27.387.574
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11.357)	(5.256)
	<u>30.965.610</u>	<u>27.382.318</u>
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	5.468.915
Wesel ekspor dan tagihan lainnya - pihak ketiga	689.974	843.826
Cadangan kerugian penurunan nilai	(351)	-
	<u>689.623</u>	<u>843.826</u>
Kredit yang diberikan		
- pihak berelasi	710.248	466.150
- pihak ketiga	115.589.821	107.873.542
	<u>116.300.069</u>	<u>108.339.692</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.913.951)	(1.631.811)
	<u>114.386.118</u>	<u>106.707.881</u>
Pembiayaan dan piutang syariah - setelah dikurangi margin ditangguhkan		
- pihak berelasi	10.881	
- pihak ketiga	8.767.233	7.415.908
Cadangan kerugian penurunan nilai	(216.946)	(159.875)
	<u>8.561.168</u>	<u>7.256.033</u>
Tagihan akseptasi	288.944	227.970
Cadangan kerugian penurunan nilai	(519)	(2.374)
	<u>288.425</u>	<u>225.596</u>
Penyertaan saham - pihak berelasi	190.089	142.093
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.303)	(1.303)
	<u>188.786</u>	<u>140.790</u>

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset tetap dan aset hak guna		
Harga perolehan	7.225.400	6.683.040
Akumulasi penyusutan	(2.429.907)	(2.119.791)
Nilai buku	4.795.493	4.563.249
Aset pajak tangguhan - neto	62.046	189.749
Bunga yang masih akan diterima	1.367.656	1.169.105
Aset lain-lain - neto	3.496.010	2.545.516
TOTAL ASET	188.295.488	181.241.291
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS LIABILITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	2.212.830	2.403.981
Simpanan nasabah		
- pihak berelasi	6.401.344	9.884.589
- pihak ketiga	120.077.043	112.134.754
	126.478.387	122.019.343
Simpanan nasabah - Syariah		
- pihak berelasi	480	274
- pihak ketiga	947.836	795.705
	948.316	795.979
Simpanan dari bank lain		
- pihak berelasi	86.755	96.339
- pihak ketiga	2.454.785	4.365.451
	2.541.540	4.461.790
Liabilitas derivatif	23	2.207
Liabilitas akseptasi	288.944	227.970
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.244.805	3.081.103
Efek utang yang diterbitkan	957.991	1.871.461
Pinjaman yang diterima - pihak ketiga	20.323.823	17.533.761
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	13.131	10.747
Utang pajak	82.159	139.347
Bunga dan bagi hasil yang masih harus dibayar	285.191	254.160
Liabilitas imbalan kerja pasti	293.605	291.904
Liabilitas lain-lain	1.229.508	1.347.965
Obligasi subordinasi	3.678.849	3.679.163
TOTAL LIABILITAS	163.579.102	158.120.881
Dana syirkah temporer		
Bukan bank		
- pihak berelasi	9.316	7.148
- pihak ketiga	9.172.780	8.316.448
	9.182.096	8.323.596
Bank		
- pihak ketiga	85.272	50.828
Total dana syirkah temporer	9.267.368	8.374.424

EKUITAS

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk
 Modal saham nilai nominal Rp250 (nilai penuh) per saham

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Modal dasar:		
Seri A - 9.600.000.000 saham		
Seri B - 6.400.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh:		
Seri A - 7.414.714.661 saham dan		
Seri B - 3.106.729.025 saham		
Per 31 Desember 2023 dan 2022	2.630.361	2.630.361
Tambahan modal disetor	1.812.876	1.812.876
Surplus dari revaluasi aset tetap	2.164.733	2.169.577
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	(289.695)	(420.813)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan	(167.121)	(166.272)
Saldo laba		
- telah ditentukan penggunaannya	4.786.067	4.785.382
- belum ditentukan penggunaannya	4.622.656	3.947.964
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	15.559.877	14.759.075
Kepentingan non-pengendali	(110.859)	(13.089)
TOTAL EKUITAS	15.449.018	14.745.986
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	188.295.488	181.241.291

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH		
Pendapatan bunga	13.287.106	12.816.082
Pendapatan syariah	916.628	772.467
Pendapatan provisi dan komisi	34.001	35.228
Pendapatan provisi dan komisi syariah	20.474	12.197
	14.258.209	13.635.974
BEBAN BUNGA DAN BAGI HASIL SYARIAH	(7.194.587)	(5.227.996)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH NETO	7.063.622	8.407.978
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	1.196.432	1.051.115
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus buku	335.778	365.404
Keuntungan transaksi valuta asing - neto	14.095	23.826
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga - neto	86.529	49.315
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar pernyataan saham - neto	40.041	-
Lain-lain	249.380	150.028
	1.922.255	1.639.688
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Beban umum dan administrasi	(2.725.498)	(2.744.760)
Beban tenaga kerja dan tunjangan	(2.580.668)	(3.242.167)
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan - neto	(746.262)	(223.976)
Kerugian dair penjualan surat berharga - neto	(23.164)	(92.808)
Pembalikan kerugian komitmen dan kontinjensi	631	13.192
Lain-lain	(762.191)	(908.289)
	(6.837.152)	(7.198.808)
LABA OPERASIONAL	2.148.725	2.848.858

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
BEBAN NON-OPERASIONAL - NETO	(22.358)	(13.240)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	2.126.367	2.835.618
BEBAN PAJAK - NETO	(445.190)	(590.336)
LABA TAHUN BERJALAN	1.681.177	2.245.282
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:		
Akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas program imbalna pasti	(39.442)	(24.657)
Revaluasi aset tetap	(4.844)	(31.191)
Pajak penghasilan	38.593	4.824
Akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak penghasilan	131.107	(412.236)
Penghasilan Komprehensif		
Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak Penghasilan	125.414	(463.260)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.806.591	1.782.022
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	1.778.395	2.304.376
Kepentingan non-pengendali	(97.218)	(59.094)
TOTAL	1.681.177	2.245.282
TOTAL LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	1.903.820	1.840.482
Kepentingan non-pengendali	(97.229)	(58.460)
TOTAL	1.806.591	1.782.022
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (NILAI PENUH)	169,03	219,02

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Permodalan		
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) (%)	20,05	19,19
Aset Produktif		
Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif (%)	1,09	0,90
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif (%)	1,06	0,88
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan terhadap Aset Produktif (%)	1,20	1,09
Profitabilitas		
NPL bruto (%)	1,35	1,16
NPL neto (%)	0,75	0,46
Imbal hasil aset (ROA) (%)	1,29	1,75
Imbal hasil ekuitas (ROE)	13,37	18,63
Marjin bunga bersih (NIM) (%)	4,89	5,86
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (%)	85,65	80,35
Likuiditas		
Loan to Deposit Ratio (LDR) (%)	87,54	85,03
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (%)	6,13	6,56

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Rasio Pertumbuhan (%)		
Total Pendapatan Bunga – bersih	-15,99	6,42
Laba Operasional	-24,58	9,63
Laba Tahun Berjalan	-25,12	11,23
Total Aset	3,89	14,45
Total Liabilitas	3,45	14,62
Total Dana Syirkah Temporer	10,66	14,46
Total Ekuitas	6,72	10,64
Giro Wajib Minimum (dalam %)		
GWM Utama Rupiah		
Harian (%)	0,00	0,00
Rata-rata (%)	7,91	8,28
GWM Valuta Asing (%)	4,35	4,36
Posisi Devisa Neto (dalam %)	8,09	1,84

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (firma anggota RSM Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00727/2.1030/AU.1/07/0499-2/1/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Registrasi Akuntan Publik No. 0499) dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

A. UMUM

Perseroan adalah merupakan atau bagian dari perusahaan N.V Denis (De Eerste Nederlandsche Indische Shareholding), berkedudukan di Bandung yang merupakan perusahaan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.33 Tahun 1960 tanggal 30 Agustus 1960 Tentang Penetapan Perusahaan Di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi ("PP No.33/1960"), yang mana ditentukan bahwa perusahaan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat.

Sebagai tindak lanjut PP No.33/1960, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.125 tanggal 19 Nopember 1960 juncto Akta Perubahan No.152 tanggal 21 Maret 1961 juncto Akta Perubahan No.84 tanggal 13 Mei 1961, seluruhnya dibuat di hadapan Noezar, Notaris yang pada saat itu berkedudukan di Bandung, Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat mendirikan PT Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat, disingkat PT Bank Karja Pembangunan, yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Djawa Barat No.3/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961 juncto Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Djawa Barat No.7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961.

Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No.11/PD-DPRD/1972 tanggal 27 Juni 1972 tentang Kedudukan Hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Djawa Barat yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan No.193A Tahun 1972 tanggal 15 Desember 1972 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No.43 Tahun 1972, bentuk hukum Perseroan diubah dari PT Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat menjadi Perusahaan Daerah Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat dan selanjutnya melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No.1/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama Perusahaan Daerah Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.

Berdasarkan Akta PKR No.05/2023, Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha di bidang Aktivitas Keuangan (Perbankan). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
3. melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
4. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
5. menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi surat berharga untuk kepentingan Bank dan/atau nasabah;
6. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
7. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
8. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
9. melakukan kegiatan penitipan barang dan surat berharga;
10. melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga jasa keuangan dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
11. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar jasa keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;

12. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
13. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah; dan/atau
14. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, sebagai Bank Pembangunan Daerah, Perseroan juga membantu Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan institusi jasa keuangan lainnya milik pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Perseroan, atau Perseroan sama sekali tidak memiliki saham namun diminta untuk membantu pembinaan BPR dimaksud.

B. KEUANGAN

1. Analisis Laporan Laba Rugi Komprehensif

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH		
Pendapatan bunga	13.287.106	12.816.082
Pendapatan syariah	916.628	772.467
Pendapatan provisi dan komisi	34.001	35.228
Pendapatan provisi dan komisi syariah	20.474	12.197
	<u>14.258.209</u>	<u>13.635.974</u>
BEBAN BUNGA DAN BAGI HASIL SYARIAH	<u>(7.194.587)</u>	<u>(5.227.996)</u>
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH NETO	<u>7.063.622</u>	<u>8.407.978</u>
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	1.196.432	1.051.115
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus buku	335.778	365.404
Keuntungan transaksi valuta asing - neto	14.095	23.826
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga - neto	86.529	49.315
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar pernyataan saham - neto	40.041	-
Lain-lain	249.380	150.028
	<u>1.922.255</u>	<u>1.639.688</u>
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Beban umum dan administrasi	(2.725.498)	(2.744.760)
Beban tenaga kerja dan tunjangan	(2.580.668)	(3.242.167)
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan - neto	(746.262)	(223.976)
Kerugian dair penjualan surat berharga - neto	(23.164)	(92.808)
Pembalikan kerugian komitmen dan kontinjensi	631	13.192
Lain-lain	(762.191)	(908.289)
	<u>(6.837.152)</u>	<u>(7.198.808)</u>
LABA OPERASIONAL	<u>2.148.725</u>	<u>2.848.858</u>
BEBAN NON-OPERASIONAL - NETO	<u>(22.358)</u>	<u>(13.240)</u>
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	<u>2.126.367</u>	<u>2.835.618</u>
BEBAN PAJAK - NETO	<u>(445.190)</u>	<u>(590.336)</u>
LABA TAHUN BERJALAN	<u>1.681.177</u>	<u>2.245.282</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:		
Akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas program imbalna pasti	(39.442)	(24.657)
Revaluasi aset tetap	(4.844)	(31.191)
Pajak penghasilan	38.593	4.824
Akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak penghasilan	131.107	(412.236)

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Penghasilan Komprehensif		
Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak Penghasilan	125.414	(463.260)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.806.591	1.782.022
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	1.778.395	2.304.376
Kepentingan non-pengendali	(97.218)	(59.094)
TOTAL	1.681.177	2.245.282
TOTAL LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	1.903.820	1.840.482
Kepentingan non-pengendali	(97.229)	(58.460)
TOTAL	1.806.591	1.782.022
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (NILAI PENUH)	169,03	219,02

Pendapatan Bunga

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan Perseroan dari pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.287.106 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp471.024 juta atau 3,68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp12.816.082 juta. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan pendapatan bunga atas kredit yang diberikan, sejalan dengan peningkatan portofolio kredit sebagaimana rencana strategis Perseoran untuk ekspansi kredit yang dilakukan pada tahun 2023.

Pendapatan Syariah

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan Perseroan dari pendapatan syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp916.628 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp144.161 juta atau 18,66% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp772.467 juta. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan rata-rata saldo pembiayaan yang diberikan sesuai dengan rencana strategis untuk ekspansi pembiayaan syariah yang dilakukan pada tahun 2023, selain itu juga terjadi sedikit kenaikan tingkat imbal hasil dan margin di tahun 2023.

Pendapatan Provisi dan Komisi

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan Perseroan dari pendapatan provisi dan komisi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp34.001 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.227 juta atau 3,48% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp35.228 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penyaluran kredit dengan program tanpa provisi di tahun 2023 sebagai salah satu metode pemasaran Perseroan untuk meningkatkan penyaluran kredit.

Pendapatan Provisi dan Komisi Syariah

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan Perseroan dari pendapatan provisi dan komisi syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp20.474 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp8.277 juta atau 67,86% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp12.197 juta. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan syariah pada tahun 2023.

Beban Bunga dan Bagi Hasil Syariah

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Beban bunga dan bagi hasil syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.194.587 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.966.591 juta atau 37,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp5.227.996 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga kepada nasabah sebagai akibat dari adanya peningkatan BI Rate yang berdampak juga pada peningkatan rate yang diberikan kepada nasabah dalam penghimpunan dana dan kenaikan saldo rata-rata simpanan nasabah selama tahun 2023, serta kenaikan beban bunga dari pinjaman yang diterima, seiring dengan peningkatan saldo pinjaman yang diterima selama tahun 2023.

Pendapatan Operasional Lainnya

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan Operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.922.255 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp282.567 juta atau 17,23% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.639.688 juta. Hal ini terutama disebabkan kenaikan provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan (*fee based income*) dan keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar aset keuangan (surat berharga dan investasi saham).

Beban Operasional Lainnya

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.837.152 juta, mengalami penurunan sebesar Rp361.656 juta atau 5,02% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp7.198.808 juta. Hal ini terutama disebabkan penurunan pada beban karyawan terutama pada beban tunjangan dan jasa produksi yang disebabkan karena penurunan pada insentif yang diterima serta jasa produksi, seiring dengan penurunan kinerja keuangan Grup selama tahun 2023 dibandingkan dengan 2022, selain itu juga terjadi penurunan beban imbalan kerja sesuai dengan hasil perhitungan oleh aktuaris independen. Penurunan ini dikompensasi dengan kenaikan pada beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan perhitungan berdasarkan PSAK 71, seiring dengan pertumbuhan kredit dan juga adanya kenaikan sedikit pada rasio NPL.

Pendapatan (Beban) Non-Operasional

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan (Beban) non-operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp22.358 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp9.118 juta atau 68,87% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp13.240 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada pendapatan lain-lain di tahun 2023, yang nilainya secara keseluruhan relatif rendah.

Laba Tahun Berjalan

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.681.177 juta, mengalami penurunan sebesar Rp564.105 juta atau 25,12% dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.245.282 juta. Hal ini terutama karena penurunan pada pendapatan bunga bersih sebagai akibat dari kenaikan beban bunga yang signifikan pada tahun 2023, yang dikompensasi dengan kenaikan pendapatan operasional.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.806.591 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp24.569 juta atau 1,38% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.782.022 juta. Hal ini terjadi karena kenaikan keuntungan yang belum direalisasi atas kenaikan

nilai wajar surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, hal ini terutama dari kenaikan nilai wajar di tahun 2023 yang meningkat dibandingkan tahun 2022.

2. Analisis Laporan Posisi Keuangan

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET		
Kas	3.530.074	3.300.031
Giro pada Bank Indonesia	14.879.767	13.032.593
Giro pada bank lain - pihak ketiga	1.196.787	1.243.695
Cadangan kerugian penurunan nilai	(57)	(68)
	<u>1.196.730</u>	<u>1.243.627</u>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - pihak ketiga	3.886.989	7.156.807
Cadangan kerugian penurunan nilai	(296)	(2.133)
	<u>3.886.693</u>	<u>7.154.674</u>
Tagihan derivative	1.289	17.388
Surat berharga - pihak ketiga	30.976.967	27.387.574
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11.357)	(5.256)
	<u>30.965.610</u>	<u>27.382.318</u>
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	5.468.915
Wesel ekspor dan tagihan lainnya - pihak ketiga	689.974	843.826
Cadangan kerugian penurunan nilai	(351)	-
	<u>689.623</u>	<u>843.826</u>
Kredit yang diberikan		
- pihak berelasi	710.248	466.150
- pihak ketiga	115.589.821	107.873.542
	<u>116.300.069</u>	<u>108.339.692</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.913.951)	(1.631.811)
	<u>114.386.118</u>	<u>106.707.881</u>
Pembiayaan dan piutang syariah - setelah dikurangi margin ditangguhkan		
- pihak berelasi	10.881	
- pihak ketiga	8.767.233	7.415.908
Cadangan kerugian penurunan nilai	(216.946)	(159.875)
	<u>8.561.168</u>	<u>7.256.033</u>
Tagihan akseptasi	288.944	227.970
Cadangan kerugian penurunan nilai	(519)	(2.374)
	<u>288.425</u>	<u>225.596</u>
Penyertaan saham - pihak berelasi	190.089	142.093
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.303)	(1.303)
	<u>188.786</u>	<u>140.790</u>
Aset tetap dan aset hak guna		
Harga perolehan	7.225.400	6.683.040
Akumulasi penyusutan	(2.429.907)	(2.119.791)
Nilai buku	<u>4.795.493</u>	<u>4.563.249</u>
Aset pajak tangguhan – neto	62.046	189.749
Bunga yang masih akan diterima	1.367.656	1.169.105
Aset lain-lain – neto	3.496.010	2.545.516
TOTAL ASET	<u>188.295.488</u>	<u>181.241.291</u>

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS LIABILITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	2.212.830	2.403.981
Simpanan nasabah		
- pihak berelasi	6.401.344	9.884.589
- pihak ketiga	120.077.043	112.134.754
	126.478.387	122.019.343
Simpanan nasabah – Syariah		
- pihak berelasi	480	274
- pihak ketiga	947.836	795.705
	948.316	795.979
Simpanan dari bank lain		
- pihak berelasi	86.755	96.339
- pihak ketiga	2.454.785	4.365.451
	2.541.540	4.461.790
Liabilitas derivative	23	2.207
Liabilitas akseptasi	288.944	227.970
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.244.805	3.081.103
Efek utang yang diterbitkan	957.991	1.871.461
Pinjaman yang diterima - pihak ketiga	20.323.823	17.533.761
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	13.131	10.747
Utang pajak	82.159	139.347
Bunga dan bagi hasil yang masih harus dibayar	285.191	254.160
Liabilitas imbalan kerja pasti	293.605	291.904
Liabilitas lain-lain	1.229.508	1.347.965
Obligasi subordinasi	3.678.849	3.679.163
TOTAL LIABILITAS	163.579.102	158.120.881
Dana syirkah temporer		
Bukan bank		
- pihak berelasi	9.316	7.148
- pihak ketiga	9.172.780	8.316.448
	9.182.096	8.323.596
Bank		
- pihak ketiga	85.272	50.828
Total dana syirkah temporer	9.267.368	8.374.424
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk		
Modal saham nilai nominal Rp250 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar:		
Seri A - 9.600.000.000 saham		
Seri B - 6.400.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh:		
Seri A - 7.414.714.661 saham dan		
Seri B - 3.106.729.025 saham		
Per 31 Desember 2023 dan 2022	2.630.361	2.630.361
Tambahan modal disetor	1.812.876	1.812.876
Surplus dari revaluasi aset tetap	2.164.733	2.169.577

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	(289.695)	(420.813)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan	(167.121)	(166.272)
Saldo laba		
- telah ditentukan penggunaannya	4.786.067	4.785.382
- belum ditentukan penggunaannya	4.622.656	3.947.964
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	15.559.877	14.759.075
Kepentingan non-pengendali	(110.859)	(13.089)
TOTAL EKUITAS	15.449.018	14.745.986
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	188.295.488	181.241.291

a. Aset

Rincian Aset pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

(i) Kas

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.530.074 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp230.043 juta atau 6,97% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.300.031 juta. Peningkatan tersebut disebabkan karena terdapat kebutuhan pada operasional Perseroan yang memang diperkirakan akan meningkat pada akhir tahun 2023 akibat dari tahun 2023 sudah mulai kembali kegiatan pasca covid.

(ii) Giro pada Bank Indonesia

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.879.767 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.847.174 juta atau 14,17% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp13.032.593 juta. Hal ini disebabkan adanya kenaikan giro pada mata uang Rupiah sebagai dampak dari pemenuhan giro wajib minimum yang pada tahun 2023 meningkat akibat kenaikan rata-rata simpanan nasabah

(iii) Giro pada bank lain – pihak ketiga

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Giro pada bank lain – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.196.787 juta, mengalami penurunan sebesar Rp46.908 juta atau 3,77% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.243.695 juta. Sedikit penurunan ini terjadi terutama pada giro dalam mata uang asing, dimana pada tahun 2023 terjadi penurunan kurs nilai tukar dibandingkan dengan tahun 2022.

(iv) Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – pihak ketiga

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.886.989 juta, mengalami penurunan sebesar Rp3.269.818 juta atau 45,69% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp7.156.807 juta. Hal ini disebabkan adanya penurunan terbesar pada perpindahan penempatan pada Bank Indonesia (*depo facility*) Rupiah ke mata uang asing. Selain itu, Perseroan juga mengalihkan investasinya dari penempatan pada Bank Indonesia menjadi surat berharga Pemerintah yang memberikan imbal hasil lebih tinggi.

(v) Surat Berharga – Pihak ketiga

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Surat berharga – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp30.976.967 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp3.589.393 juta atau 13,11% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp27.387.574 juta. Hal ini disebabkan oleh kondisi likuiditas perbankan yang *ample* dan tren pergerakan *yield* yang cenderung meningkat seiring dengan

kebijakan kenaikan BI-7 Day Reverse Repo Rate sehingga menimbulkan strategi investasi melalui penempatan surat berharga yang dapat memberikan imbal hasil yang cukup tinggi atau yield enhancement dan juga instrumen investasi di pasar keuangan dengan tingkat risiko yang lebih rendah melalui transaksi jual beli surat berharga negara.

(vi) Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Nihil, mengalami penurunan sebesar Rp5.468.915 juta atau 100,00% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp5.468.915 juta. Grup menempatkan dana pada akun ini selain untuk menghasilkan return, juga untuk menempatkan dana yang belum dapat disalurkan melalui kredit. Pada tahun 2023 dana tersebut digunakan untuk penyaluran fasilitas kredit yang diberikan, sesuai dengan strategi utama Perseroan untuk meningkatkan portofolio kredit.

(vii) Wesel ekspor dan tagihan lainnya

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Wesel ekspor dan tagihan lain pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp689.974 juta, mengalami penurunan sebesar Rp153.852 juta atau 18,23% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp843.826 juta. Hal ini disebabkan turunnya wesel ekspor dan tagihan lainnya dari mata uang asing (dolar Amerika Serikat).

(viii) Kredit yang diberikan

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Kredit yang diberikan – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp114.386.118 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp7.678.237 juta atau 7,20% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp106.707.881 juta. Kenaikan signifikan terutama pada kredit konsumsi yang merupakan komposisi kredit terbesar yang dimiliki oleh Perseroan sesuai dengan rencana strategis untuk terus mengembangkan portofolio kreditanya dengan sasaran segmen konsumtif.

(ix) Pembiayaan dan piutang syariah – setelah dikurangi margin ditangguhkan

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Pembiayaan dan piutang syariah – setelah dikurangi margin ditangguhkan dan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.561.168 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.305.135 juta atau 17,99% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp7.256.033 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pembiayaan jenis akad *murabahah* dan *musyarakah* yang tumbuh seiring dengan rencana strategis BJBS untuk meningkatkan portofolio pembiayaan dan piutang yang diberikan.

(x) Aset tetap dan aset hak guna

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Aset tetap dan aset hak guna pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.795.493 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp232.244 juta atau 5,09% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp4.563.249 juta. Kenaikan signifikan terutama terjadi karena pembelian perlengkapan yang dilakukan di tahun 2023, terutama sehubungan dengan penambahan perlengkapan dari gedung T Tower yang dalam proses penyelesaian inferior serta penambahan aset yang masih dalam proses.

(xi) Aset Pajak Tangguhan - Neto

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Aset pajak tangguhan – neto pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp62.046 juta, mengalami penurunan sebesar Rp127.703 juta atau 67,30% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp189.749. Penurunan aset pajak tangguhan terjadi terutama pengakuan liabilitas pajak tangguhan atas aset hak guna, penurunan aset pajak tangguhan atas liabilitas imbalan kerja dan kenaikan liabilitas pajak tangguhan atas cadangan kerugian penurunan nilai di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

(xii) Bunga yang Masih Akan Diterima

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Bunga yang masih akan diterima pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.367.656 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp198.551 juta atau 16,98% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp1.169.105 juta. Kenaikan terutama pada bunga yang masih akan diterima atas kredit dan pembiayaan yang diberikan dan surat berharga, sejalan dengan meningkatnya portofolio kredit yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah dan surat berharga yang dimiliki, atas pos tersebut masing – masing meningkat sebesar 7,35%, 18,37% dan 13,11% pada tahun 2023.

(xiii) Aset Lain-lain - Neto

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Aset lain-lain – neto pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.496.010 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp950.494 juta atau 37,34% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp2.545.516 juta. Hal ini disebabkan adanya peningkatan baik dari BDD asuransi kredit yang meningkat sebesar 43,90%. Hal ini seiring dengan meningkatnya portofolio kredit yang diberikan.

b. Liabilitas

(i) Liabilitas Segera

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.212.830 juta, mengalami penurunan sebesar Rp191.151 juta atau 7,95% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp2.403.981 juta. Hal ini disebabkan adanya penurunan dari rekening titipan yang harus segera dibayarkan oleh Perseroan.

(ii) Simpanan Nasabah

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Simpanan nasabah untuk pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp126.478.387 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp4.459.044 juta atau 3,65% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp122.019.343 juta. Hal ini disebabkan kenaikan simpanan dari pihak ketiga terutama dalam bentuk tabungan dan deposito.

(iii) Simpanan Nasabah - Syariah

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Simpanan nasabah – syariah pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp948.316 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp152.337 juta atau 19,14% dibandingkan tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp795.979 juta. Hal ini disebabkan adanya penambahan penempatan dana syariah pada tahun 2023 dampak dari ekspansi bisnis dalam penghimpunan dana pada anak perusahaan syariah.

(iv) Simpanan dari Bank Lain

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Simpanan dari bank lain untuk pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.541.540 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.920.250 juta atau 43,04% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp4.461.790 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan terbesar pada *interbank call money* seiring dengan penurunan kebutuhan pendanaan karena kenaikan pada simpanan nasabah.

(v) Liabilitas akseptasi

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp288.944 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp60.974 juta atau 26,75% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp227.970 juta. Hal ini disebabkan adanya pos akseptasi kepada bank terkait SKBDN dan LC.

(vi) Liabilitas derivatif

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas derivatif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp23 juta, mengalami penurunan sebesar Rp2.184 juta atau 98,96% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp2.207 juta.

(vii) Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.244.805 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.163.702 juta atau 37,77% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp3.081.103 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan pada transaksi repo selama 2023 dikarenakan adanya perlambatan pertumbuhan DPK, dan tentunya memicu kekhawatiran akan munculnya pengetatan likuiditas perbankan, mengingat pertumbuhan kredit tumbuh justru lebih tinggi serta perbaikan struktur pendanaan bank menjadi salah satu yang menyebabkan posisi transaksi repo bank mengalami kenaikan yang signifikan.

(viii) Efek utang yang diterbitkan

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Efek utang yang diterbitkan – neto untuk pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp957.991 juta, mengalami penurunan sebesar Rp913.470 juta atau 48,81% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp1.871.461 juta. Hal ini disebabkan adanya efek utang yang diterbitkan yang telah jatuh tempo pada tahun 2023 yang telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal jatuh tempo.

(ix) Pinjaman Yang Diterima – Pihak Ketiga

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Pinjaman yang diterima – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp20.323.823 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp2.790.062 juta atau 15,91% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp17.533.761 juta. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pada pinjaman yang diterima dari PT Bank BTPN Tbk ditambah adanya dana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang digunakan untuk membiayai penyaluran kredit.

(x) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.131 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp2.384 juta atau 22,18% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp10.747 juta. Hal ini disebabkan adanya peningkatan terbesar pada bank garansi yang diterbitkan.

(xi) Utang Pajak

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Utang pajak pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp82.159 juta, mengalami penurunan sebesar Rp57.188 juta atau 41,04% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp139.347 juta. Hal ini sejalan dengan penurunan laba kotor pada tahun 2023.

(xii) Bunga dan bagi hasil yang masih harus dibayar

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Bunga yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp285.191 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp31.031 juta atau 12,21% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp254.160 juta. Hal ini disebabkan adanya kenaikan beban bunga deposito atas simpanan nasabah yang masih harus dibayar.

(xiii) Liabilitas Imbalan Kerja pasti

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas imbalan kerja pasti pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp293.605 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.701 juta atau 0,58% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp291.904 juta. Hal ini disebabkan adanya pembebanan tahun berjalan yang dikompensasi dengan pembayaran manfaat.

(xiv) Liabilitas Lain-Lain

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.229.508 juta, mengalami penurunan sebesar Rp118.457 juta atau 8,79% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp1.347.965 juta. Hal ini disebabkan turunnya akru biaya jasa produksi dan CSR sebagai akibat dari turunnya profitabilitas di tahun 2023.

(xv) Obligasi subordinasi

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Obligasi Subordinasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.678.849 juta, mengalami penurunan sebesar Rp314 juta atau 0,01% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp3.679.163 juta. Hal ini disebabkan beban emisi obligasi yang belum diamortisasi.

c. Dana Syirkah Temporer

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Dana syirkah temporer pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.267.368 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp892.944 juta atau 10,66% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp8.374.424 juta. Hal ini disebabkan adanya kenaikan dana syirkah bukan bank dari pihak ketiga sebesar Rp856.330 juta, peningkatan terbesar pada tabungan mudharabah.

d. Ekuitas

Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.449.018 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp703.032 juta atau 4,77% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp14.745.986 juta. Hal ini merepresentasikan laba bersih tahun berjalan yang dikompensasi dengan pembayaran dividen kas..

3. Arus Kas

Rincian arus kas untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	612.359	(9.870.642)
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(2.560.554)	(607.142)
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	694.591	5.366.615
Penurunan Neto Kas dan Setara Kas	(1.253.604)	(5.058.486)
Kas dan Setara Kas pada awal tahun	24.733.126	29.767.787
Dampak Bersih Perubahan Nilai Tukar atas Kas dan Setara Kas	14.095	23.825
Kas dan Setara Kas pada akhir tahun	23.493.617	24.733.126

Arus Kas Neto Dari Aktivitas Operasi

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2023 sebesar Rp612,359 miliar, meningkat sebesar 106,20% dari tahun 2022 sebesar Rp9,87 triliun. Hal tersebut dipengaruhi sebagian besar oleh pos surat berharga dan reverse repo termasuk kredit yang diberikan.

Arus Kas Neto Dari Aktivitas Investasi

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2023 Rp2,56 triliun, menurun 321,74% dari tahun 2022 sebesar Rp607,14 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh sebagian besar penempatan pada surat berharga.

Arus Kas Neto Dari Aktivitas Pendanaan

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2023 sebesar Rp694.591 juta, menurun 87,06% dari tahun 2022 sebesar Rp5.366.615 juta. Hal tersebut dipengaruhi terutama oleh berkurangnya penerimaan neto dari pinjaman yang diterima dan obligasi subordinasi di tahun 2023.

4. Informasi Segmen Usaha

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang utama dari Perseroan yaitu segmen usaha konvensional dan syariah (Perseroan dan entitas anak) disajikan dalam tabel di bawah ini.

(jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023			
	Konvensional	Syariah	Eliminasi	Total
Pendapatan segmen	13.322.032	937.001	(824)	14.258.209
Beban segmen	(7.684.649)	(363.064)	853.126	(7.194.587)
Pendapatan segmen - neto	5.637.383	573.937	852.302	7.063.622
Pendapatan operasional lainnya	1.883.579	38.705	(29)	1.922.255
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non Keuangan	(703.089)	(63.345)	20.172	(746.262)
Pemulihan kerugian komitmen dan kontinjensi	631	-	-	631
Beban operasional lainnya	(6.697.863)	606.342	-	(6.091.521)
Laba operasional	120.641	1.155.639	872.445	2.148.725
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(27.898)	5.540	-	(22.358)
Beban pajak - neto	(461.770)	16.580	-	(445.190)
Laba (rugi) periode berjalan	(369.027)	1.177.759	827.445	1.681.077
Total aset	176.534.191	13.649.880	(1.888.583)	188.295.488

5. Kualitas Pendapatan

Pendapatan Perseroan yang utama adalah berasal dari penyaluran dana berupa kredit yang diberikan. Untuk mempertahankan kualitas pendapatan strategi Perseroan antara lain adalah:

- Ekspansi Kredit
- Menjaga Kualitas Kredit

6. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2023 dan 2022.

7. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan standar baru dan atau revisi terhadap standar akuntansi sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Keuangan. Perubahan tersebut telah disampaikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Sepanjang periode pelaporan, tidak ada standar baru dan/atau revisi terhadap standar akuntansi yang memiliki dampak signifikan pada Laporan Keuangan Perseroan.

8. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung secara material dan signifikan terhadap kegiatan usaha Perusahaan yang tercermin di laporan keuangan.

9. Manajemen Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga dihadapkan pada beberapa faktor-faktor atau risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan. Beberapa upaya dan pencapaian Perseroan dalam mengelola risiko utama, risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi antara lain:

A. RISIKO UTAMA

Risiko Kredit

Terkait proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bank secara berkala melakukan analisa menyeluruh atas aspek internal dan eksternal bank melalui Root Cause of Credit Risk (RCCR) yang berisi analisa penyebab penurunan kolektibilitas debitur yang berdampak pada timbulnya Non Performing Loan (NPL).
- b. Bank melakukan perhitungan Stress Test Risiko Kredit yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan stress test dilakukan dengan pendekatan portfolio level dan bertujuan untuk menghitung pengaruh kondisi shock makro ekonomi terhadap peningkatan NPL secara bankwide. Pelaksanaan perhitungan menggunakan satellite model yang meliputi baik kredit produktif maupun kredit non-produktif pada seluruh sektor ekonomi. Satellite model tersebut merupakan perhitungan regresi multiple yang menghubungkan kondisi makro ekonomi sebagai independent variable dan NPL sebagai dependent variable.
- c. Selanjutnya secara berkala disusun laporan perkembangan eksposur risiko kredit yang disusun dalam rangka mitigasi risiko dan sebagai upaya perbaikan segera sesuai perkembangan tingkat risiko. Pemantauan atas kualitas portofolio kredit yang dilaporkan secara berkala kepada Direksi melalui hal-hal sebagai berikut:
 - Review dan evaluasi berkala melalui pelaksanaan business review termasuk diantaranya pembahasan mengenai posisi serta kualitas portofolio kredit.
 - Kaji ulang atas potensi risiko dalam aktivitas perkreditan yang dilaporkan secara independen oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Operasional

Adapun upaya pengelolaan risiko operasional yang telah dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan melakukan proses pengukuran risiko operasional dilakukan secara berkala melalui perangkat pengukuran risiko operasional diantaranya risk control self assessment, key risk indicator, laporan data kerugian risiko operasional pada masing-masing unit kerja serta pengukuran profil risiko operasional bankwide yang dilakukan secara periodik. Adapun hasil analisa atas penilaian risiko operasional tersebut dilaporkan kepada pihak manajemen yang dilakukan secara berkala seperti pelaporan monthly report.
- b. Risk taking unit senantiasa melakukan risk assessment atas pengembangan Produk dan Aktivitas Baru dalam rangka melakukan penerapan manajemen risiko didalamnya.
- c. Perseroan berupaya untuk melakukan penyempurnaan business process terutama untuk aktivitas perkreditan. Hal tersebut terlihat dari penerapan model bisnis dengan melibatkan beberapa fungsi seperti Relationship Manager, Relationship Officer dan Account Officer dan telah diakomodir dalam Struktur Organisasi serta terdapat beberapa review atas prosedur kerja serta penggunaan sistem dalam rangka mendukung proses manajemen risiko yang handal.
- d. Perseroan senantiasa melakukan peningkatan kualitas SDM khususnya pada aktivitas bisnis utama bank yaitu perkreditan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai.
- e. Dalam menjaga kepentingan bank dan penegakan disiplin, Perseroan telah melaksanakan pedoman sanksi disiplin dengan cukup efektif termasuk dalam penerapan sistem sanksi kepegawaian

2. Risiko Hukum

Perseroan melalui Divisi Hukum senantiasa melakukan penanganan atas kasus yang terjadi, baik yang dilakukan oleh bank secara langsung maupun menggunakan jasa konsultan hukum atas permintaan risk taking unit. Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko hukum yaitu:

- a. Divisi hukum melakukan pembinaan dalam bidang hukum secara berkala melalui proses pendampingan perkara hukum, legal session kepada risk taking unit dengan pembahasan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi pada kantor cabang, serta melaksanakan review terhadap perjanjian-perjanjian kerjasama yang akan dilaksanakan guna melindungi kepentingan Perseroan. Namun masih terdapat kelemahan terkait proses review perjanjian yang hanya berdasarkan atas permintaan dari risk taking unit.
- b. Perseroan melakukan identifikasi dan pengendalian risiko hukum terhadap produk dan aktivitas baru melalui pengkajian terkait aspek hukum serta menyampaikan informasi dan pelaporan yang berkaitan dengan mitigasi risiko hukum kepada Direksi yang membidangi unit kerja hukum.
- c. Terkait dengan pelaksanaan sistem informasi manajemen risiko hukum telah dilaksanakan dengan baik salah satunya adanya laporan secara berkala terkait dengan pemantauan dan pencatatan atas pelaksanaan pendampingan perkara hukum serta penanganan hukum, update perkara hukum yang ditangani oleh Divisi Hukum serta laporan setiap triwulan disajikan dalam bentuk profil risiko hukum.

3. Risiko Likuiditas

Adapun upaya pengelolaan Risiko Likuiditas yang telah dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan melakukan analisis terhadap seluruh sumber risiko likuiditas baik dari sisi internal maupun eksternal seperti produk dan aktivitas perbankan yang mempengaruhi sumber penggunaan dana secara komprehensif, kecukupan pendanaan melalui pasar, serta analisis risiko didukung dengan sistem informasi dan kecukupan data yang memadai.
- b. Perseroan telah memiliki risk appetite, risk tolerance, dan risk limit untuk parameter risiko pasar yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
- c. Perseroan telah memiliki alat pengukuran yang dapat mengkuantifikasi dan mengidentifikasi risiko likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif berdasarkan indikator internal dan eksternal dalam early warning indicator berupa pengukuran untuk mengukur risiko inheren mengenai komposisi pendanaan, rasio likuiditas, proyeksi arus kas, liquidity gap, scenario analysis, dan stress testing.
- d. Perseroan telah mengembangkan Early Warning Indicator risiko likuiditas yang merupakan indikator yang digunakan untuk memprediksi potensi krisis likuiditas di masa datang sebagai bentuk identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko likuiditas secara harian yang bertujuan untuk memitigasi sejak dini apabila ada potensi krisis likuiditas di kemudian hari.
- e. Perseroan melakukan pemantauan limit secara harian seperti limit $(AL+NAB)/NCD$, Ekses Likuiditas, LDR, Pinjaman Overnight, Ekses Reserve GWM Primer, Ekses Reserve GWM Sekunder, excess reserve GWM Primer, PLM, LCR dan $(AL+NAB)/NCD$ terhadap threshold yang telah ditetapkan oleh regulator termasuk tindak lanjut yang akan dilakukan oleh risk taking unit apabila terjadi pelampauan dan dilaporkan kepada Direksi.
- f. Perseroan telah memiliki prosedur dalam hal rencana pendanaan darurat ketika bank menghadapi kondisi krisis likuiditas (Contingency Funding Plan/CFP) serta bank telah melakukan skenario uji coba CFP-Framework apabila terjadi krisis likuiditas dikemudian hari.
- g. Perseroan telah melakukan perhitungan Basel III terkait risiko likuiditas yaitu perhitungan Net Stable Funding Ratio (NSFR) dan Liquidity Coverage Ratio (LCR).

4. Risiko Pasar

Adapun upaya pengelolaan Risiko Pasar yang telah dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan telah memiliki prosedur dan identifikasi risiko suku bunga banking book yang didukung oleh sistem informasi yang sangat memadai dan adanya pelaporan secara harian mengenai pergerakan nilai tukar, suku bunga, dan informasi pasar lainnya ke Direksi termasuk over limit (pelampauan limit).
- b. Perseroan telah memiliki risk appetite, risk tolerance dan risk limit untuk parameter risiko pasar yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
- c. Perseroan melakukan proses review atau validasi model pengukuran risiko pasar yang dilakukan secara berkala melalui back testing dimana model pengukurannya masih valid sesuai hasil back testing. Adapun mengenai validasi dan back testing tersebut disusun dalam bentuk laporan VaR (Value at Risk) dan validasi model.
- d. Perseroan memiliki prosedur pemantauan limit secara harian sebagai standardisasi pemantauan Divisi Manajemen Risiko Kredit, Pasar dan Terintegrasi terhadap aktivitas Dealing Room Treasury termasuk tindak lanjut yang akan dilakukan oleh risk taking unit apabila terjadi pelampauan dan dilaporkan kepada Direksi.
- e. Perseroan melakukan pengendalian risiko pasar melalui monitoring terhadap kontrak transaksi dan penilaian kembali kredibilitas counterparty secara harian dan dipantau oleh dedicated person yang berpengalaman kemudian

dalam penetapan limit counterparty dilakukan oleh unit kerja lain yang independen dari unit kerja bisnis sehingga proses penetapan limitnya melibatkan four eyes principle.

- f. Sebagai upaya meningkatkan informasi atas eksposur risiko pasar yang dihadapi bank, unit kerja terkait telah melaporkan eksposur risiko pasar baik secara harian (utilisasi treasury), mingguan (treasury utilization report) bulanan (analisis pengukuran risiko pasar & likuiditas), semesteran (market risk stress test), kepada Direksi dan pejabat eksekutif sehingga diharapkan adanya tindak lanjut perbaikan dan proses mitigasi untuk meminimalisir potensi risiko yang akan datang.
- g. Perseroan telah memiliki Komite ALCO sebagai perangkat organisasi dalam mendukung manajemen risiko pasar yang efektif.
- h. Dalam proses pengukuran, pemantauan yang dilakukan satuan kerja manajemen risiko melalui pelaporan atas aktivitas unit kerja treasury masih dilakukan secara manual dan belum tersistem namun demikian mempertimbangkan eksposur transaksi bank yang belum kompleks, potensi risiko yang dihadapi bank masih dapat termitigasi dengan baik.
- i. Terdapat proses mark to market secara harian bagi instrumen yang aktif serta pengembangan model bagi instrumen yang kurang aktif dan tidak aktif di pasar dengan menggunakan mark to model terhadap transaksi trading bank untuk mengetahui kerugian/keuntungan bank dan bank pun memiliki metode dalam proses mark to market-nya termasuk perhitungan valuasi model internal serta prosedur contingency plan dalam proses mark to market-nya apabila terjadi kondisi di luar normal yang dilakukan oleh unit kerja terkait.

5. Risiko Reputasi

- a. Identifikasi serta pengukuran risiko reputasi dilakukan secara berkala yaitu melalui pemantauan terhadap keluhan nasabah baik melalui call center dan/atau frontliner.
- b. Perseroan melakukan penatausahaan setiap adanya pemberitaan negatif dalam Laporan Media Monitoring yang terdiri dari judul berita, nama media massa berikut dengan news value sehingga bank dapat mengetahui pengaruh dari pemberitaan tersebut.
- c. Perseroan melakukan penatausahaan setiap adanya pengaduan nasabah dalam Laporan Pengaduan Nasabah yang disampaikan kepada Direksi secara berkala.
- d. Terdapat pemantauan atas keluhan nasabah dan penyelesaian pengaduan nasabah yang sesuai dengan ketentuan/SLA.
- e. Terdapat pemantauan atas pemberitaan negatif kepada bank melalui berbagai media termasuk search engine optimization untuk meningkatkan citra positif bagi bank, serta penilaian profil risiko reputasi melalui pelaporan profil risiko secara triwulanan.
- f. Perseroan dengan segera menindaklanjuti jika terdapat pemberitaan negatif yang memiliki dampak signifikan bagi Perseroan baik secara materil maupun immateril dengan berkoordinasi bersama divisi terkait dan bank tetap menindaklanjuti setiap adanya pemberitaan negatif yang tidak berdampak signifikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Perseroan juga melakukan sosialisasi kepada customer service untuk senantiasa mengedukasi nasabah guna meminimalisir potensi risiko reputasi yang mungkin timbul atas kesalahpahaman nasabah terkait penggunaan produk/jasa Perseroan. Selain itu terdapat kunjungan ke setiap jaringan kantor bank mengenai penyesuaian standardisasi layanan industri perbankan, coaching dan pendampingan kepada Kantor Cabang serta adanya program Service dan Budaya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Perseroan.
- h. Dalam rangka peningkatan kualitas layanan bank juga melakukan survey atas layanan bank baik secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah kepada bank melalui:
 - Survey Internal:
 - a) Score kinerja layanan sesuai dengan standar Market Research Indonesia;
 - b) Monitoring internal yang dilakukan baik oleh kantor pusat maupun kantor wilayah terhadap kantor cabang;
 - c) Adanya penilaian layanan secara self assessment oleh seluruh jaringan kantor bank serta selain itu terdapat mysterious shopper oleh vendor yang bekerjasama dengan bank dalam rangka penilaian layanan Perseroan secara independen;
 - d) Adanya Service Quality Assurance yang berperan melakukan evaluasi, coaching dan monitoring layanan di kantor cabang untuk mendukung tercapainya service excellence dan pencitraan Perseroan yang baik.
 - Survey External:
 - a) Perseroan bekerjasama dengan vendor mengenai survey kepuasan nasabah melalui program Customer Satisfaction Index dan Customer Loyalitas Index guna mengetahui ekspektasi nasabah terhadap layanan bank yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan meningkatkan loyalitas nasabah.
 - b) Perseroan melakukan pula sosialisasi atas hasil kepuasan nasabah/customer feedback tersebut kepada seluruh Kantor Cabang sebagai bahan evaluasi layanan bank.
 - c) Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pemberian pendidikan dan pelatihan service excellent & standar layanan bagi frontliner serta pelatihan communication skill.

- d) Selain itu untuk meminimalisir potensi risiko reputasi yang berasal dari keluhan nasabah atas produk/layanan bank, bank terus melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait mengenai tindakan lanjut perbaikan terkait kerusakan mesin/sistem transaksi yang ada pada mesin ATM dan electronic banking.
- e) Bentuk mitigasi lainnya yang secara rutin dilakukan yaitu sebagai berikut:
 - Media Visit ke beberapa media massa berskala nasional baik cetak maupun elektronik;
 - Membangun sarana komunikasi dengan para investor;
 - Menjalin hubungan baik rekan-rekan media baik lokal maupun nasional dan pelaksanaan media gathering, undangan media untuk berpartisipasi dalam liputan kegiatan Perseroan serta pelaksanaan seminar bagi beberapa media massa dalam rangka menjaga nilai keseimbangan antara bank dengan pihak media.

6. Risiko Kepatuhan

Upaya pengelolaan risiko kepatuhan yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan monitoring atas kewajiban pelaporan kepada regulator berdasarkan peraturan OJK dan ketentuan eksternal lainnya yang baru.
- b. Melakukan identifikasi titik rawan gratifikasi pada Perseroan sebagai early warning dalam melaksanakan tindakan mitigasi risiko gratifikasi dan/atau fraud.
- c. Melakukan pengembangan sistem yang dapat mengurangi potensi Risiko Kepatuhan, antara lain bjb AMOLA sebagai sistem yang digunakan pada kegiatan APU-PPT, dan bjb SiPatuh sebagai sistem yang digunakan dalam monitoring kewajiban pelaporan kepada Regulator, penyampaian notifikasi ketentuan eksternal dan ketentuan internal terbaru melalui KMS (Knowledge Management System) serta prinsip kehati-hatian;
- d. Melaksanakan monitoring, menyampaikan notifikasi dan menyusun resume atas kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan otoritas, misalnya PBI, PADG, POJK, SEOJK dan peraturan lain yang berhubungan dengan Perseroan. Hasil resume tersebut disampaikan kepada unit kerja terkait untuk selanjutnya digunakan oleh unit kerja terkait untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap kebijakan, sistem dan prosedur yang telah ada pada unit kerja;
- e. Melakukan pemantauan kepatuhan Perseroan sesuai prinsip kehati-hatian, melalui pemantauan rasio, diantaranya terhadap rasio KPMM, BMPK, aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif, CKPN, PDN, NSFR, LCR, dan GWM;
- f. Melakukan pengkinian terhadap kertas kerja atau tools yang dipergunakan dalam pemantauan pelaporan dan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Perseroan saat ini. Hal tersebut dilakukan agar kedepan tidak terjadi keterlambatan penyampaian pelaporan kepada otoritas pengawas ataupun otoritas yang berwenang lainnya yang dapat menimbulkan sanksi atau denda kepada Perseroan;
- g. Melakukan pengembangan sistem yang dapat mengurangi potensi Risiko Kepatuhan, antara lain bjb AMOLA sebagai sistem yang digunakan pada kegiatan APU PPT, dan bjb SiPatuh sebagai sistem yang digunakan dalam monitoring kewajiban pelaporan kepada Regulator, penyampaian notifikasi ketentuan eksternal terbaru dan prinsip kehati-hatian;
- h. Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada sektor usaha Perseroan untuk menghindari adanya praktik penyuapan (Zero Tolerance);
- i. Menjadi instansi yang dirujuk oleh KPK dalam kegiatan benchmarking terkait implementasi SMAP.
- j. Penerapan ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan (SMK);
- k. Dalam menghadapi era transformasi digital, dilaksanakan strategi-strategi antara lain:
 - Penyusunan strategi roadmap transformasi digital, yang dilaksanakan secara bertahap melalui 3 (tiga) fase, yaitu:
 - a) Phase 1. Digital Readiness Assessment;
 - b) Phase 2. Strategy Ideation and Prioritization; dan
 - c) Phase 3. Roadmap Development
 - Prioritisasi kecukupan ketentuan-ketentuan internal khususnya dalam bidang digitalisasi;
 - Penguatan Risk Awareness;
 - Penguatan Sistem Informasi, misalnya pengembangan Knowledge Management System sebagai sistem yang memudahkan pegawai dalam mencari ketentuanketentuan yang berlaku dan Fraud Detection System untuk mendeteksi transaksi mencurigakan/ fraud secara cepat.
- l. Menyusun kajian terhadap seluruh rancangan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang akan dilakukan Perseroan agar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Memberikan notifikasi dan rekomendasi terhadap pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang - undangan yang berlaku melalui memo internal dalam hal terdapat ketentuan baru yang dikeluarkan oleh regulator;

- n. Menyusun tools dalam rangka memperhatikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang berlaku dalam bentuk compliance sheet, selain itu juga memberikan masukan terhadap kajian perkreditan guna mengedepankan prinsip kehati-hatian maka Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko ikut terlibat secara aktif dalam pengkajian rancangan kebijakan dan prosedur yang akan diberlakukan oleh Perseroan;
- o. Menetapkan risk limit, risk tolerance, dan risk appetite risiko kepatuhan.

7. Risiko Strategis

Pengelolaan risiko strategik yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan secara berkala melakukan pengukuran risiko strategik melalui pemantauan atas progress report pencapaian rencana bisnis bank serta melakukan business review atas perkembangan bisnis Perseroan.
- b. Pencapaian atas bisnis bank tersebut dibahas dan dilaporkan kepada pihak manajemen yang dilakukan secara berkala termasuk kepada komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.
- c. Perseroan senantiasa melakukan monitoring atas kinerja kantor cabang.
- d. Perseroan melakukan beberapa upaya dan strategi yaitu optimalisasi dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan melakukan penagihan, klaim asuransi dan eksekusi agunan, melakukan peningkatan dana CASA.
- e. Perseroan melakukan peningkatan kerjasama layanan dengan operator/instansi/lembaga lain dalam rangka meningkatkan fee based atau keuntungan tambahan bagi Perseroan.

8. Risiko Persaingan

Sejalan dengan perkembangan industri perbankan yang pesat terutama dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat kepada perbankan terkait produk dan jasa layanan keuangan, menuntut Perseroan untuk senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan produk dan layanannya dikarenakan Perseroan menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam jasa keuangan. Untuk menghadapi hal tersebut bank dalam mengembangkan produk memperhatikan kebutuhan nasabah dalam penetapan pricing yang kompetitif dan meningkatkan pelayanan untuk menjaga loyalitas nasabah atau debitur maupun menarik nasabah atau debitur baru akan menurunkan portofolio simpanan, pinjaman atau pangsa pasarnya yang akan berdampak terhadap pencapaian strategi bisnis Perseroan.

9. Risiko Investasi

Dalam melakukan investasi di pasar keuangan melalui instrumen pasar uang, pasar utang, pasar valuta asing, dan pasar derivatif, risiko yang mungkin timbul atas aktivitas investasi tersebut antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko kredit. Guna menghadapi risiko investasi bank melihat atau menganalisa kondisi dan kinerja counterparty dalam melakukan investasi melalui credit line dengan mempertimbangkan counterparty credit risk dan penetapan limit open posisi atas posisi perdagangan bank.

10. Risiko Perubahan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi di industri perbankan telah mengubah strategi bisnis bank dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Kebutuhan nasabah saat ini yang memiliki mobilitas tinggi dan rutin menuntut pengembangan teknologi ke arah electronic banking melalui electronic channel merupakan keharusan yang harus dipenuhi. Inovasi produk berbasis digital banking harus terus dikembangkan seiring dengan tuntutan nasabah yang menghendaki kemudahan dalam bertransaksi. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan aplikasi dan infrastruktur Teknologi Informasi untuk mendukung meningkatnya transaksional perbankan secara menyeluruh dan berkelanjutan
- b. Melengkapi kebijakan dan prosedur untuk mendukung peningkatan kualitas Good Corporate Governance (GCG) bank bjb khususnya di bidang teknologi Informasi
- c. Melakukan pengembangan untuk mendukung penguatan (kelancaran dan keamanan) sistem pembayaran, pelaporan dan administrasi jasa
- d. Penambahan fitur dan/atau layanan transaksi e-banking.
- e. Meningkatkan kemampuan dan kehandalan TI untuk mendorong terwujudnya layanan digital bank sebagai tindakanantisipasi kebutuhan layanan nasabah yang berbasis elektronik.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro

Untuk memitigasi Perubahan kondisi perekonomian perusahaan dalam penentuan strategi bisnis memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan perkembangan suku bunga yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha perbankan di dalam penghimpunan dana, pemberian kredit, pengembalian pokok kredit dan bunganya.

2. Risiko Kebijakan Pemerintah

Perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam industri perbankan dari waktu ke waktu akan mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha Perseroan. Dalam memitigasi hal tersebut perseroan senantiasa mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut yang akan menimbulkan kerugian atau dikenakan sanksi yang berdampak negatif terhadap performance Perseroan.

3. Risiko Ketentuan Negara Lain

Ketentuan Negara lain secara tidak langsung berdampak kepada perekonomian nasional, Secara tidak langsung Perseroan juga akan mengalami peningkatan risiko apabila terjadi perubahan ketentuan pada Negara lain yang memberikan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Dalam memitigasi hal tersebut perseroan senantiasa mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut yang akan menimbulkan kerugian atau dikenakan sanksi yang berdampak negatif terhadap performance Perseroan.

4. Risiko Tuntutan dan Gugatan Hukum

Melalui unit kerja hukum, perseroan melakukan pendampingan perkara hukum kepada risk taking unit dan apabila diperlukan maka penanganan masalah hukum menggunakan jasa konsultan hukum atas penyelesaian kasus hukum tersebut.

C. PRINSIP – PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, maka Perseroan terus mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari kegiatan operasionalnya. Penilaian kondisi ini digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu mendatang. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, maka kondisi kesehatan suatu bank dinilai secara kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor berikut:

Permodalan (*Capital*)

- a. Faktor permodalan ditentukan oleh komponen-komponen berikut: kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku (*Capital Adequacy Ratio/CAR*), komposisi permodalan, proyeksi KPMM. Aset Produktif Yang Diklasifikasi (APYD) dibandingkan dengan modal, kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan), rencana permodalan yang mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan. Semakin kuat modal yang dimiliki oleh bank maka akan membuat bank semakin mampu untuk mengembangkan usaha dan menampung risiko kerugian.
- b. Dari komponen-komponen yang menentukan tingkat kekuatan dari faktor permodalan, maka yang memiliki bobot terbesar adalah komponen kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku (*Capital Adequacy Ratio/CAR*). Saat ini Bank Indonesia mewajibkan bank-bank untuk memiliki struktur perbandingan antara jumlah modal dengan aset tertimbang perhitungan modal minimum sesuai Profil Risiko Bank seperti yang tercantum pada POJK No. 11/POJK.03/2016.

Dasar kebijakan untuk mempertahankan rasio yang cukup tinggi:

- Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.01/SK-DK/2014 tentang Wewenang dan Prosedur Persetujuan Komite Kredit Tingkat Direksi. Perseroan menerapkan kebijakan untuk memelihara Rasio Kecukupan Modal (CAR) sekurang-kurangnya 9% sampai dengan kurang dari 10%.
- Manfaat yang diperoleh dengan mempertahankan rasio tersebut dibandingkan dengan pengelolaan penempatan aset Perseroan agar pendapatan yang diterima lebih meningkat.

Dengan Rasio CAR yang tinggi Perseroan memperoleh manfaat berupa:

- i. Kemampuan menyerap risiko yang lebih besar sehingga tidak rentan terhadap perubahan kondisi perekonomian, gejala pasar dan risiko usaha lainnya.
- ii. Memiliki kesempatan yang lebih besar untuk merebut peluang usaha yang ada tanpa adanya hambatan dari aspek permodalan.
- iii. Kepercayaan yang lebih besar dari nasabah, kreditor dan pasar uang sehingga dapat memperoleh dana dengan suku bunga yang lebih baik.

Perkembangan nilai rasio NPL

Berikut tabel perkembangan NPL Perseroan sejak tahun 2023 hingga 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
NPL (Gross)	1,21%	1,16%
NPL (Net)	0,65%	0,46%

Dari tahun ke tahun Perseroan berusaha menurunkan rasio NPL dan memperbaiki kualitas aktiva. Walau NPL *gross* masih cukup tinggi, namun Perseroan berhasil menyisihkan cadangan dalam jumlah yang mencukupi, sehingga NPL *nett* senantiasa berada dibawah 5% sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Rentabilitas (*Earnings*)

- a. Faktor rentabilitas ditentukan oleh komponen-komponen berikut: *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM), biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO), perkembangan laba operasional, komposisi portofolio aset produktif dan diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya dan prospek laba operasional.
- b. *Net Interest Margin* (NIM) diperoleh dengan membagi total Pendapatan bunga bersih dalam satu tahun terhadap rata-rata aset produktif.

Likuiditas (*Liquidity*)

- a. Faktor likuiditas ditentukan oleh komponen-komponen berikut: aset likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan. *Loan to Deposit ratio* (LDR), proyeksi *cash flow* 3 bulan mendatang, ketergantungan pada dana antar bank dan deposito inti, kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*Assets and Liabilities Management / ALMA*), kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya dan stabilitas dana pihak ketiga (DPK).
- b. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan.

Belanja Modal (*Capital Expenditure*)

Penggunaan belanja modal terutama ditujukan untuk mendanai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana pendukung operasional, perluasan/perbaikan jaringan kantor secara umum, teknologi informasi, serta saluran distribusi lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan Perseroan secara keseluruhan. Sumber dana penggunaan belanja modal berasal dari anggaran yang tercantum pada Rencana Bisnis Bank. Saat ini perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material.

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Dalam kegiatan operasinya Perseroan membutuhkan likuiditas yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi baik pemberian kredit, penanaman dalam surat-surat berharga, transaksi antar bank, pembayaran bunga dan lain-lain. Sesuai Laporan Arus Kas Perseroan per 31 Desember 2023, kebutuhan likuiditas diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut:

- Dana Pihak Ketiga
- Pinjaman dari Bank Lain
- Utang atas Surat Berharga yang Dijual
- Surat Berharga yang Diterbitkan

Kecukupan Modal kerja bagi perusahaan dapat dilihat dari unsur-unsur aktiva lancar dalam hal ini kas, surat-surat berharga, penempatan pada bank lain dan sebagainya dalam laporan keuangan. Perseroan dalam hal ini memiliki kecukupan modal kerja yang kemudian akan digunakan oleh bank untuk membiayai operasional perusahaan. Tambahan modal kerja bagi Perseroan dapat diperoleh melalui instrumen pasar modal dengan menerbitkan surat berharga seperti Obligasi, Negotiable

Certificate of Deposit (NCD) atau melalui pinjaman bilateral dengan bank lain.

Penurunan likuiditas secara historis akan terjadi setiap bulan Juni dan Desember. Pada bulan Juni, terjadi penarikan dana yang cukup besar mengingat pada bulan Juni bersamaan dengan bulan puasa dan hari Raya Idul Fitri serta tahun ajaran baru. Sedangkan pada bulan Desember, terjadi penarikan dana-dana milik Pemda dalam jumlah yang signifikan dimana Pemda menggunakan dananya pada akhir tahun anggaran. Agar kondisi likuiditas terjaga langkah antisipasi atas penarikan dana pemda tersebut diantaranya dengan melakukan penghimpunan DPK non Pemda yang lebih intensif dan penghimpunan dana melalui instrumen pasar uang melalui transaksi borrowing antarbank, transaksi Repo dan FX swap.

SESUAI DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/3/PBI/2018 PERIHAL GWM BANK UMUM, GWM PRIMER RUPIAH PERSEROAN YANG DIWAJIBKAN PER POSISI DESEMBER 2023 ADALAH 9%, PERSEROAN MENDAPATKAN INSENTIF BERUPA KELONGGARAN GWM PRIMER RUPIAH PER POSISI DESEMBER 2023 ADALAH 2,95%, SEHINGGA GWM PRIMER RUPIAH YANG HARUS DIPENUHI PERSEROAN PER POSISI DESEMBER 2023 ADALAH 6,05% PERSEROAN TELAH MEMENUHI KEWAJIBANNYA DENGAN MENYEDIAKAN GWM SEBESAR 7,91%.

VI. FAKTOR RISIKO

Sebelum melakukan investasi pada Obligasi Subordinasi Perseroan, para calon investor harus memperhatikan risiko-risiko yang disebutkan di bawah ini, beserta dengan informasi-informasi lainnya yang terdapat pada bagian-bagian lain dalam Prospektus ini. Perseroan telah mengungkapkan seluruh faktor risiko yang mempengaruhi Perseroan dan industrinya yang secara material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan/atau operasional dan/atau prospek Perseroan secara negatif. Risiko-risiko sebagaimana disebutkan di bawah ini merupakan semua risiko yang dapat mempengaruhi secara material dan negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek Perseroan. Dalam kondisi tersebut di atas, calon investor mungkin dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Setiap calon investor dalam Penawaran Umum ini harus memperhatikan seluruh fakta yang dibuat dan diatur dalam peraturan hukum yang berlaku.

Berikut ini merupakan risiko utama, risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan dan telah disusun sesuai dengan bobot tertinggi hingga terendah dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dimulai dari risiko utama yakni sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Kredit

Bagian terbesar dari aktiva yang dimiliki Perseroan sebagai suatu bank adalah berupa kredit yang diberikan kepada nasabah. Risiko kredit timbul apabila terjadi ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya baik berupa pokok pinjaman maupun bunganya. Hal tersebut disebabkan oleh faktor internal berupa kelalaian dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian maupun faktor eksternal berupa terjadinya hal-hal yang menyebabkan kegagalan usaha debitur. Apabila jumlah kredit yang tidak dapat dikembalikan cukup material, termasuk eksekusi terhadap jaminan kredit yang bersangkutan (jika ada), maka kredit tersebut menjadi kredit bermasalah dan mempengaruhi tingkat NPL kredit yang akhirnya akan mempengaruhi likuiditas dan kondisi keuangan Perseroan. Portofolio kredit terbesar saat ini adalah penyaluran kredit pada sektor konsumtif sebesar 42,7%.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/ atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank bjb. Risiko operasional melekat kepada seluruh aktivitas bank bjb, oleh karena itu risiko operasional tidak dapat dihilangkan namun dapat dikendalikan melalui mitigasi risiko yang memadai. Dampak kerugian dari risiko operasional dapat berupa kerugian keuangan atau kerugian non keuangan. bank bjb melakukan tata kelola mengenai pengelolaan risiko operasional yang dilakukan melalui three line of defense yaitu Risk Taking Unit sebagai lini pertahanan pertama, unit kerja Manajemen Risiko Operasional sebagai lini pertahanan kedua, serta Internal Audit sebagai lini pertahanan ketiga

2. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko hukum antara lain dapat bersumber dari pada operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian hukum dan kelalaian penerapan hukum, hambatan dalam proses litigasi untuk penyelesaian klaim, serta masalah yurisdiksi antar negara.

Apabila Perseroan tidak melakukan pengelolaan risiko hukum dengan baik, dampaknya bisa memberikan eksposur-eksposur litigasi, kerugian finansial, dan reputasi negatif. Terkait dengan pengelolaan atas eksposur risiko hukum berupa perkara litigasi, Perseroan senantiasa melakukan penanganan atas kasus hukum yang dihadapi tersebut dengan ditangani oleh Divisi Hukum serta dibantu oleh konsultan hukum secara intensif. Adapun eksposur litigasi bagi Perseroan pada Desember Tahun 2023 terdapat 40 kasus hukum litigasi perdata namun tidak terdapat kerugian finansial yang timbul atas kasus hukum tersebut. Selain itu dalam melakukan pengelolaan risiko hukum, Perseroan memiliki unit yang secara khusus menangani bidang litigasi, non litigasi, *corporate legal* yang berfungsi sebagai "*legal watch*" yang tercermin melalui kajian hukum, pendampingan hukum dan pendapat hukum sesuai permintaan risk taking unit dalam bentuk kajian serta memastikan penanganan permasalahan hukum ditangani dengan baik yang sesuai dengan ketentuan berlaku.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang timbul atau kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko ini terjadi akibat kegagalan pengelolaan sumber dana dan penanaman dana (*mismatch*) atau kekurangan likuiditas (*shortage*) yang mengakibatkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya pada waktu yang telah ditetapkan. Risiko likuiditas dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Risiko likuiditas pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar (*market disruption*).
- b. Risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

Perseroan dalam mengelola risiko likuiditas memiliki limit-limit yang dipantau secara harian serta dilaporkan kepada manajemen secara berkala. Limit-limit tersebut secara umum menunjukkan pengawasan Perseroan terhadap posisi likuiditas yang harus dijaga dari waktu ke waktu. Dalam mengelola kecukupan likuiditas agar dapat memitigasi risiko likuiditas, Perseroan akan melakukan pemenuhan dana baik dari DPK retail maupun yang berasal dari korporasi, yang tentunya berimbang terhadap biaya dana yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Biaya dana yang dikeluarkan oleh Perseroan harus dapat dimanfaatkan dalam bentuk penyaluran kredit sehingga bank mendapatkan keuntungan yang tentunya mendorong kinerja perusahaan secara langsung.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul atas portofolio pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Komponen risiko pasar meliputi:

- Risiko suku bunga adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *Trading Book* yang disebabkan oleh pergerakan sensitivitas risiko (*risk factor*) pada setiap instrumen atau akibat perubahan nilai ekonomis modal (*economic value of equity*) Perseroan dari aktivitas *banking book* yang disebabkan oleh perubahan suku bunga.
- Klasifikasi risiko suku bunga mencakup pula risiko suku bunga dari posisi *banking book* yang antara lain meliputi *repricing risk*, *yield curve risk*, *basis risk*, dan *optionality risk*.
- Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi terbuka valuta asing klasifikasi *trading book* atau akibat perubahan posisi devisa neto Perseroan (*banking book*) yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing.

Risiko pasar timbul dari pergerakan/perubahan tingkat suku bunga dan/atau nilai tukar yang mempengaruhi posisi keuangan Perseroan khususnya terhadap rasio permodalan. Secara garis besar, manajemen risiko pasar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu manajemen risiko pasar *trading book* dan manajemen risiko pasar *banking book*. Sumber risiko pasar *trading book* timbul dari aktivitas *dealing room* Divisi Treasury akibat posisi terbuka Perseroan yang terekspos pergerakan suku bunga atau nilai tukar valuta asing.

Sumber risiko pasar *banking book* timbul antara lain disebabkan oleh perubahan struktur portofolio neraca dan rekening administratif Perseroan yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga sehingga berdampak terhadap pendapatan bunga bersih dan yang disebabkan pula karena perubahan struktur portofolio neraca dan rekening administratif Perseroan yang sensitif terhadap pergerakan nilai tukar yang tercermin dari posisi devisa neto Perseroan.

Dampak risiko pasar terhadap rasio permodalan Perseroan khususnya setelah adanya penerapan Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), menyebabkan bertambahnya nilai dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dalam hitungan KPMM. Hal tersebut secara langsung mempengaruhi nilai CAR bank pada saat perhitungan.

5. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank bjb. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perseroan yang bersifat negatif, serta adanya komunikasi Perseroan yang kurang efektif.

Terkait dengan pengelolaan risiko reputasi, Perseroan memiliki unit kerja hubungan kemasyarakatan yang berfungsi dalam melakukan penanganan pemberitaan negatif serta unit kerja yang menangani keluhan nasabah secara memadai. Perseroan melakukan penatausahaan setiap adanya pemberitaan negatif melalui portal khusus mengenai media monitoring berbasis web untuk memudahkan Perseroan dalam melakukan pemantauan pemberitaan, dalam portal tersebut terdapat pembahasan mengenai content analysis yang berisi klasifikasi tone pemberitaan serta valuasi berita yang terdiri dari judul berita. Dampak yang akan disebabkan dengan adanya reputasi yang buruk akan mendorong nasabah untuk beralih ke bank lain dengan

reputasi uang lebih baik. Adapun selama tahun 2023 tidak terdapat pemberitaan negatif yang bersifat signifikan bagi Perseroan, selain itu Perseroan senantiasa melakukan penanganan keluhan nasabah sesuai dengan Service Level Agreement (SLA).

6. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern yang konsisten.

7. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan dan entitas anak yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan dan entitas anak terhadap perubahan eksternal.

Risiko Strategis dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi kebijakan strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan kebijakan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisa lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Apabila Perseroan tidak melakukan mitigasi risiko ini maka Perseroan akan mengalami kerugian antara lain penurunan pendapatan.

8. Risiko Persaingan Usaha

Sejalan dengan perkembangan industri perbankan yang pesat terutama dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat kepada perbankan terkait produk dan jasa layanan keuangan, menuntut Perseroan untuk senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan produk dan layanannya dikarenakan Perseroan menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam jasa keuangan. Masing-masing Perseroan berusaha mempertahankan dan memperluas pangsa pasar dengan memberikan pelayanan yang prima kepada para nasabah dan calon nasabah dalam hal tingkat suku bunga yang ditawarkan dan keunggulan produk-produk lainnya. Kegagalan Perseroan dalam mengembangkan produk yang sesuai kebutuhan nasabah penetapan *pricing* yang kompetitif dan meningkatkan pelayanan untuk menjaga loyalitas nasabah atau debitur maupun menarik nasabah atau debitur baru akan menurunkan portfolio simpanan, pinjaman atau pangsa pasarnya yang akan berdampak terhadap pencapaian strategi bisnis Perseroan.

9. Risiko Investasi

Perseroan dalam menjalankan fungsinya sebagai intermediasi penghimpunan dana dan penyaluran dana tidak lepas dari aktivitasnya berupa investasi pada pasar keuangan. Dalam melakukan investasi di pasar keuangan melalui instrumen pasar uang, pasar utang, pasar valuta asing, dan pasar derivatif. Risiko yang mungkin timbul atas aktivitas investasi tersebut antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko kredit. Dari sisi investor sebagai pembeli surat berharga akan menghadapi risiko gagal bayar pokok pada saat jatuh tempo dan atau pembayaran bunga, jika Perseroan mengalami kesulitan keuangan. Selain itu investor pembeli surat berharga berpotensi pula menghadapi risiko kesulitan untuk menjual efek tersebut di pasar dalam hal tidak likuidnya efek.

Dalam melakukan investasi di pasar keuangan melalui instrumen pasar uang, pasar utang, pasar valuta asing, dan pasar derivative, risiko yang mungkin timbul atas aktivitas investasi tersebut antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko kredit.

10. Risiko Perubahan Teknologi

Dengan semakin ketatnya persaingan dalam industri perbankan, teknologi merupakan salah satu basis keunggulan persaingan suatu Perseroan. Dengan infrastruktur teknologi yang mendukung, kalangan perbankan mampu menciptakan produk sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta kenyamanan kepada nasabah yang semakin kritis dalam menilai kualitas pelayanan bank. Apabila Perseroan tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka hal ini akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada nasabah yang akan berdampak kepada menurunkan daya saing dan kinerja Perseroan.

Perkembangan teknologi informasi di industri perbankan telah mengubah strategi bisnis Perseroan dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Kebutuhan nasabah saat ini yang memiliki mobilitas tinggi dan rutin menuntut pengembangan teknologi ke arah *electronic banking* melalui *electronic channel* merupakan keharusan yang harus dipenuhi. Inovasi produk berbasis *digital banking* harus terus dikembangkan seiring dengan tuntutan

nasabah yang menghendaki kemudahan dalam bertransaksi. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi dan infrastruktur Teknologi Informasi untuk mendukung meningkatnya transaksional perbankan secara menyeluruh dan berkelanjutan
2. Melengkapi kebijakan dan prosedur untuk mendukung peningkatan kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) bank bjb khususnya di bidang teknologi Informasi
3. Melakukan pengembangan untuk mendukung penguatan (kelancaran dan keamanan) sistem pembayaran, pelaporan dan administrasi jasa
4. Penambahan fitur dan/atau layanan transaksi *e-banking*.
5. Meningkatkan kemampuan dan kehandalan TI untuk mendorong terwujudnya layanan digital bank sebagai tindakanantisipasi kebutuhan layanan nasabah yang berbasis elektronik.

C. RISIKO UMUM YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro

Industri perbankan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perekonomian nasional maupun internasional. Perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan seperti penurunan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kenaikan suku bunga akan mempengaruhi kegiatan usaha perbankan di dalam penghimpunan dana, pemberian kredit, pengembalian pokok kredit dan bunganya, serta aktivitas lainnya yang berdampak negatif pada pendapatan Perseroan.

2. Risiko Kebijakan Pemerintah

Industri perbankan memperoleh pengawasan yang cukup ketat dari pemerintah karena kegiatan-kegiatannya banyak menyangkut kepentingan umum. Pengawasan yang ketat ini tercermin dari banyaknya peraturan-peraturan Pemerintah, OJK dan Perseroan Indonesia yang mengatur penyelenggaraan kegiatan perbankan dan senantiasa dilakukan pembaharuan dari waktu ke waktu. Perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam industri perbankan dari waktu ke waktu ini akan mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha Perseroan karena menuntut dilakukannya penyesuaian-penyesuaian tata cara pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut akan menimbulkan kerugian atau dikenakan sanksi yang berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

Perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam industri perbankan dari waktu ke waktu akan mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha Perseroan.

3. Risiko Ketentuan Negara Lain

Ketentuan Negara lain secara tidak langsung berdampak kepada perekonomian nasional, Secara tidak langsung Perseroan juga akan mengalami peningkatan risiko apabila terjadi perubahan ketentuan pada Negara lain yang memberikan dampak negatif bagi perekonomian nasional.

4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan memastikan bahwa pengikatan perjanjian antara Perseroan dengan para pihak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam upaya melindungi kepentingan Perseroan.

Perseroan saat ini tengah menghadapi sengketa atau gugatan perdata, perkara tata usaha negara, perkara pada pengadilan niaga dan sengketa perpajakan. Namun demikian, sengketa-sengketa yang sedang dialami oleh Perseroan tersebut tidak berdampak negatif secara material bagi kelangsungan usaha Perseroan kecuali sengketa perpajakan yang dapat menurunkan kinerja Perseroan yang disebabkan kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan setelah keputusan akhir dan mengikat yang diterbitkan oleh pemerintah.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

Risiko Investor Pembeli Obligasi Subordinasi

Risiko yang mungkin dihadapi investor pembeli Obligasi Subordinasi adalah (i) Obligasi Subordinasi dapat di *write down* tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) sesuai dengan ketentuan pasal 19 POJK No. 11/2016 *juncto* POJK No. 34/2016, (ii) penangguhan pembayaran pokok dan bunga obligasi subordinasi pada pemegang obligasi subordinasi, (iii) tidak likuidnya obligasi subordinasi yang ditawarkan

pada penawaran umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian obligasi subordinasi sebagai investasi jangka panjang.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian dan transaksi penting yang memiliki dampak material terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan Publik tertanggal 22 Mei 2024 atas informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam bagian lain dalam Prospektus ini .

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam bagian lain dalam Prospektus ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (firma anggota RSM Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00727/2.1030/AU.1/07/0499-2/1/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Registrasi Akuntan Publik No. 0499) dengan opini tanpa modifikasian.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A.1. RIWAYAT PENDIRIAN

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. ("Perseroan") adalah merupakan atau bagian dari perusahaan N.V Denis (De Eerste Nederlandsche Indische Shareholding), berkedudukan di Bandung yang merupakan perusahaan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.33 Tahun 1960 tanggal 30 Agustus 1960 Tentang Penetapan Perusahaan Di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi ("PP No.33/1960"), yang mana ditentukan bahwa perusahaan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat.

Sebagai tindak lanjut PP No.33/1960, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.125 tanggal 19 Nopember 1960 juncto Akta Perubahan No.152 tanggal 21 Maret 1961 juncto Akta Perubahan No.84 tanggal 13 Mei 1961, seluruhnya dibuat di hadapan Noezar, Notaris yang pada saat itu berkedudukan di Bandung, Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat mendirikan PT Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat, disingkat PT Bank Karja Pembangunan, yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Djawa Barat No.3/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961 juncto Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Djawa Barat No.7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961.

Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No.11/PD-DPRD/1972 tanggal 27 Juni 1972 tentang Kedudukan Hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Djawa Barat yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan No.193A Tahun 1972 tanggal 15 Desember 1972 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No.43 Tahun 1972, bentuk hukum Perseroan diubah dari PT Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat menjadi Perusahaan Daerah Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat dan selanjutnya melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No.1/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama Perusahaan Daerah Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 aktivitas Perseroan ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No.22 Tahun 1998 tanggal 14 Desember 1998 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ("Perda No.22 Tahun 1998"), dilakukan perubahan bentuk hukum Perseroan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Perda No.22 Tahun 1998. Adapun Perda No.22 Tahun 1998 telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.584.32-027 tanggal 13 Januari 1999 Tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No.22 Tahun 1998 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.

Perseroan berkedudukan di Kota Bandung, didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.4 tanggal 8 April 1999 juncto Akta Perbaikan No.8 tanggal 15 April 1999, yang keduanya dibuat dihadapan Popy Kuntari Sutresna, S.H., pada saat itu Notaris di Bandung yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.C-7103.HT.01.01.TH.99 tanggal 16 April 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Bandung di bawah No.871/BH.10.11/IV/99 pada tanggal 24 April 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.39 tanggal 14 Mei 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.2811/1999 ("Akta Pendirian No.4/1999 jo Akta Perbaikan No.8/1999")

Akta Pendirian No.4/1999 jo Akta Perbaikan No.8/1999 merupakan implementasi dari Perda No.22 Tahun 1998 dimana Perseroan didirikan sebagai suatu perseroan terbatas pada tahun 1999.

Sejak pendirian, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah didasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.05 tanggal 4 April 2023 yang dibuat dihadapan Raden Tedy Suwarman, SH, Notaris di Kota Bandung, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No.AHU-0024508.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 3 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0081141.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 3 Mei 2023 ("**Akta PKR No.05/2023**") dimana telah dilakukan perubahan pasal 3 anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta penyusunan

dan pernyataan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.12 tanggal 2 April 2024 yang dibuat dihadapan Raden Tendy Suwarman, SH, Notaris di Kota Bandung, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU-AH.01.03-0089374 tanggal 19 April 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0076336.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 19 April 2024 (“**Akta PKR No.12/2024**”) yang berisikan mengenai perubahan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 22 anggaran dasar serta penyusunan dan pernyataan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar

Berdasarkan Akta PKR No.05/2023, Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha di bidang Aktivitas Keuangan (Perbankan).. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
3. melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
4. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
5. menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi surat berharga untuk kepentingan Bank dan/atau nasabah;
6. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
7. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
8. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
9. melakukan kegiatan penitipan barang dan surat berharga;
10. melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga jasa keuangan dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
11. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar jasa keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
12. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
13. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah; dan/atau
14. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, sebagai Bank Pembangunan Daerah, Perseroan juga membantu Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan institusi jasa keuangan lainnya milik pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Perseroan, atau Perseroan sama sekali tidak memiliki saham namun diminta untuk membantu pembinaan BPR dimaksud.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Perseroan telah menjalankan seluruh kegiatan usaha seperti ditetapkan dalam Anggaran Dasar tahun 2017 dan 2019, kecuali kegiatan usaha berupa jasa mendirikan perusahaan baru yang belum dijalankan.

Sejarah Penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi Perseroan

Jumlah Obligasi Perseroan yang masih terutang sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

No	Obligasi	Seri	Nilai Penerbitan	Tenor	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo
1.	Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017	C	780.000	7 tahun	6 Desember 2017	6 Desember 2024	780.000
	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017	B	693.000	7 tahun	6 Desember 2017	6 Desember 2024	693.000
2.	Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap III Tahun 2019	B	108.000	5 Tahun	18 Oktober 2019	18 Oktober 2024	108.000
		C	74.000	7 Tahun	18 Oktober 2019	18 Oktober 2026	74.000

(dalam jutaan Rupiah)

No	Obligasi	Seri	Nilai Penerbitan	Tenor	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo
3.	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II bank bjb Tahap I Tahun 2020	A B	132.000 368.000	5 tahun 7 tahun	3 Maret 2020 3 Maret 2020	3 Maret 2025 3 Maret 2027	132.000 368.000
4.	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II bank bjb Tahap II Tahun 2020	A B	162.580 337.420	5 tahun 7 tahun	17 November 2020 17 November 2020	17 November 2025 17 November 2027	162.580 337.420
5.	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III bank bjb Tahap I Tahun 2021	A B	379.000 621.000	5 tahun 7 tahun	15 Juli 2021 15 Juli 2021	15 Juli 2026 15 Juli 2028	379.000 621.000
6.	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III bank bjb Tahap II Tahun 2022	A B	399.910 600.090	5 tahun 7 tahun	9 Jun 2022 9 Jun 2022	9 Juni 2027 9 Juni 2029	399.910 600.090
Jumlah							4.655.0 00

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, jumlah Obligasi terutang Perseroan adalah sebesar Rp4.655.000 juta.

A.2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Pada Saat Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.4 tanggal 8 April 1999 juncto Akta Perbaikan No.8 tanggal 15 April 1999, yang keduanya dibuat dihadapan Popy Kuntari Sutresna, S.H., pada saat itu Notaris di Bandung yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.C-7103.HT.01.01.TH.99 tanggal 16 April 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Bandung di bawah No.871/BH.10.11/IV/99 pada tanggal 24 April 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.39 tanggal 14 Mei 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.2811/1999 ("Akta Pendirian No.4/1999 jo Akta Perbaikan No.8/1999"), struktur permodalan dan susunan kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp10.000		Nilai Nominal Rp10.000		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
Modal Dasar		20.000.000	200.000.000.000	5.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
A	Pemerintah Propinsi Jawa Barat	5.366.749	53.667.490.000			57,32
B	Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Barat					
1	Kota Bandung	462.922	4.629.220.000			4,94
2	Kota Cirebon	86.788	867.880.000			0,93
3	Kota Sukabumi	16.080	160.800.000			0,17
4	Kota Bekasi	30.782	307.820.000			0,33
5	Kota Bogor	65.175	651.750.000			0,70
6	Kabupaten Bandung	220.091	2.200.910.000			2,35
7	Kabupaten Cirebon	146.768	1.467.680.000			1,57
8	Kabupaten Karawang	139.566	1.395.660.000			1,49
9	Kabupaten Ciamis	70.958	709.580.000			0,76
10	Kabupaten Tasikmalaya	45.846	458.460.000			0,49
11	Kabupaten Sukabumi	102.250	1.022.500.000			1,09
12	Kabupaten Subang	88.336	883.360.000			0,94
13	Kabupaten Indramayu	110.563	1.105.630.000			1,18
14	Kabupaten Bekasi	370.563	3.705.630.000			3,96
15	Kabupaten Sumedang	96.743	967.430.000			1,03
16	Kabupaten Bogor	227.380	2.273.800.000			2,43
17	Kabupaten Cianjur	110.419	1.104.190.000			1,18
18	Kabupaten Kuningan	53.598	535.980.000			0,57

No	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp10.000		Nilai Nominal Rp10.000		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
19	Kabupaten Majalengka	39.045	390.450.000			0,42
20	Kabupaten Garut	47.660	476.600.000			0,51
21	Kabupaten Purwakarta	95.611	956.110.000			1,02
C	Pemerintah Kota/Kabupaten se Banten					
1	Kota Tangerang	156.003	1.560.030.000			1,67
2	Kota Cilegon					
3	Kabupaten Serang	509.547	5.095.470.000			5,44
4	Kabupaten Tangerang	502.757	5.027.570.000			5,37
5	Kabupaten Lebak	87.451	874.510.000			0,93
6	Kabupaten Pandeglang	113.749	1.137.490.000			1,21
Jumlah		9.363.400	93.634.000.000			100,00
Saham Dalam Portepel		10.636.600	106.366.000.000	5.000.000	50.000.000.000	

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Terakhir

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.144 tanggal 29 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Raden Tandy Suwarnan, SH, Notaris di Kota Bandung, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-AH.01.03-0219601 tanggal 1 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0065083.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 1 April 2022 ("Akta PKR No.144/2022") dimana telah dilakukan perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 sehubungan dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dengan dilakukannya pengeluaran saham baru dari dalam portepel dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) juncto juncto Akta PKR No.05/2023, yaitu sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.250,00		Nilai Nominal Rp.250,00		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
Modal Dasar		9.600.000.000	2.400.000.000.000	6.400.000.000	1.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
A	Pemerintah Propinsi Jawa Barat	3.756.415.785	939.103.946.250	296.756.810	74.189.202.500	38,52
B	Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Barat					
1	Kota Bandung	116.000.006	29.000.001.500	8.048.569	2.012.142.250	1,18
2	Kota Cirebon	17.837.704	4.459.426.000	1.237.655	309.413.750	0,18
3	Kota Sukabumi	38.545.063	9.636.265.750	2.674.412	668.603.000	0,39
4	Kota Bekasi	62.493.022	15.623.255.500	4.336.029	1.084.007.250	0,64
5	Kota Bogor	46.737.809	11.684.452.250	3.242.866	810.716.500	0,48
6	Cimahi	104.000.000	26.000.000.000	7.215.958	1.803.989.500	1,06
7	Kota Depok	93.777.672	23.444.418.000	-	-	0,89
8	Kota Tasikmalaya	62.810.189	15.702.547.250	4.428.044	1.107.011.000	0,64
9	Kota Banjar	41.000.000	10.250.000.000	2.878.228	719.557.000	0,42
10	Kabupaten Bandung	712.485.914	178.121.478.500	49.435.275	12.358.818.750	7,24
11	Kabupaten Cirebon	56.121.123	14.030.280.750	3.893.920	973.480.000	0,57
12	Kabupaten Karawang	56.863.937	14.215.984.250	9.841.711	2.460.427.750	0,63
13	Kabupaten Ciamis	32.721.097	8.180.274.250	4.059.040	1.014.760.000	0,35
14	Kabupaten Tasikmalaya	130.953.800	32.738.450.000	9.963.099	2.490.774.750	1,34
15	Kabupaten Sukabumi	86.889.260	21.722.315.000	6.028.743	1.507.185.750	0,88
16	Kabupaten Subang	44.937.610	11.234.402.500	-	-	0,43
17	Kabupaten Indramayu	87.986.270	21.996.567.500	7.380.073	1.845.018.250	0,91
18	Kabupaten Bekasi	73.550.504	18.387.626.000	5.103.243	1.275.810.750	0,75
19	Kabupaten Sumedang	46.052.684	11.513.171.000	3.195.329	798.832.250	0,47
20	Kabupaten Bogor	202.523.232	50.630.808.000	14.051.915	3.512.978.750	2,06
21	Kabupaten Cianjur	102.416.760	25.604.190.000	-	-	0,97
22	Kabupaten Kuningan	28.797.110	7.199.277.500	1.845.018	461.254.500	0,29
23	Kabupaten Majalengka	35.462.669	8.865.667.250	7.380.073	1.845.018.250	0,41
24	Kabupaten Garut	26.366.698	6.591.674.500	4.428.044	1.107.011.000	0,29
25	Kabupaten Purwakarta	51.219.171	12.804.792.750	5.904.059	1.476.014.750	0,54

No	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.250,00		Nilai Nominal Rp.250,00		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
26	Kabupaten Bandung Barat	5.263.157	1.315.789.250	7.380.073	1.845.018.250	0,12
27	Kabupaten Pangandaran	-	-	2.656.826	664.206.500	0,03
C	Pemerintah Propinsi Banten	520.589.856	130.147.464.000	-	-	4,95
D	Pemerintah Kota/Kabupaten se Banten					
1	Kota Tangerang	125.117.942	31.279.485.500	8.681.210	2.170.302.500	1,27
2	Kota Cilegon	60.631.578	15.157.894.500	4.059.041	1.014.760.250	0,61
	Kota Tangerang Selatan	-	-	7.380.073	1.845.018.250	0,07
	Kota Serang	-	-	7.380.073	1.845.018.250	0,07
3	Kabupaten Serang	151.092.304	37.773.076.000	10.332.103	2.583.025.750	1,53
4	Kabupaten Tangerang	289.306.189	72.326.547.250	20.073.282	5.018.320.500	2,94
5	Kabupaten Lebak	37.586.022	9.396.505.500	2.607.876	651.969.000	0,38
6	Kabupaten Pandeglang	110.162.524	27.540.631.000	-	-	1,05
E	Masyarakat	-	-	2.572.850.355	643.212.588.750	24,45
Jumlah		7.414.714.661	1.853.678.665.250	3.106.729.025	776.682.256.250	100,00
Saham Dalam Portepel		2.185.285.339	546.321.334.750	3.293.270.975	823.317.743.750	

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran.

A.3. PERIZINAN

Sehubungan dengan kegiatan usaha utama yang dijalankan, Perseroan telah memiliki izin operasional sebagai berikut:

- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nr.9-3-22 tanggal 18 Mei 1961 yang berisikan pemberian izin usaha bank kepada Perseroan (saat itu bernama PT Bank Karya Pembangunan Daerah Djawa Barat) sebagai bank umum.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.25/84/KEP/DIR tanggal 2 Nopember 1992 Tentang Penunjukkan Perseroan (saat itu bernama Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat) menjadi bank devisa.
- Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner No.KEP-05/D.04/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 yang berisikan persetujuan bagi Perseroan untuk sebagai Kustodian Di Pasar Modal.
- Surat Tanda Terdaftar Lembaga Penunjang Pasar Modal Sebagai Wali Amanat No.1/PM.2/STTD-WA/2016 tanggal 4 Januari 2016.
- Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No.KSEI-9871/DIR/0919 tanggal 17 September 2019 Perihal Surat Penunjukan, yang berisikan penunjukan Perseroan sebagai Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) periode 2019-2024 yang akan menjadi mitra kerja KSEI dalam menjalankan tugas dan fungsi Bank Administrator RDN di bidang Pasar Modal Indonesia.
- Nomor Induk Berusaha dengan No.8120117050946 yang ditetapkan tanggal 4 Oktober 2018 yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan nama KBLI Bank Umum Pemerintah Daerah Devisa dan Kode KBLI 64122 dengan status penanaman modal PMDN.
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-00419/WPJ.09/KP.1103/2007 tanggal 19 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus – Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Kantor Pusat No.01.118.605.3-054.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus - Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa dan No.01.118.605.3-441.001 atas nama PERSEROAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.
- Perseroan telah memiliki izin sebagai penyelenggara atau penerbit alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) dari Bank Indonesia yaitu:
 - Surat Bank Indonesia No.11/500/DASP tanggal 3 Juli 2009 untuk kategori Kartu ATM; dan
 - Surat Bank Indonesia No.12/813/DASP tanggal 5 Oktober 2010 untuk kategori Kartu Debet.

A.4. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.10 tanggal 6 April 2021 yang dibuat dihadapan Raden Tedy Suwarman, SH, Notaris di Kota Bandung, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU-AH.01.03-0255714 tanggal 22 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0074323.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 22 April 2021 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan No.154 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Raden Tedy Suwarman, SH, Notaris di Kota Bandung, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU-AH.01.09-0007373 tanggal 21 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0079730.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 21 April 2022 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.06 tanggal 4 April 2023 yang dibuat dihadapan Raden Tedy Suwarman, SH, Notaris di Kota Bandung, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU-AH.01.09-0113695 tanggal 2 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0080919.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 2 Mei 2023 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.72 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dihadapan DR. Yenni Yunithawati Rukmana, SH, Notaris di Kota Bandung, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU-AH.01.09-0125287 tanggal 9 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0106257.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 9 Juni 2023 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.53 tanggal 19 September 2023 yang dibuat dihadapan Raden Tedy Suwarman, SH, Notaris di Kota Bandung, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU-AH.01.09-0166302 tanggal 22 September 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0188915.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 22 September 2023 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.13 tanggal 2 April 2024 yang dibuat dihadapan Raden Tedy Suwarman, SH, Notaris di Kota Bandung, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU-AH.01.09-0152342 tanggal 19 April 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0076342.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 19 April 2024 ("Akta PKR No.13/2024"), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama Independen	:	Ventje Rahardjo Soedigno;*)
Komisaris	:	Drs. Toms Tohir M.Si;
Komisaris	:	Rudie Kusmayadi;
Komisaris Independen	:	Diding Sakri.

*) Pengangkatan Ventje Rahardjo Soedigno sebagai Komisaris Utama Independen baru akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi:

Direktur Utama	:	Yuddy Renaldi;
Direktur Operasional	:	Tedi Setiawan;
Direktur Information Technology, Treasury dan International Banking	:	Ir. Rio Lanasier, M.Sc;
Direktur Keuangan	:	Hana Dartiwan;*)
Direktur Konsumer dan Ritel	:	Yusuf Saadudin;*)
Direktur Komersial dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	:	Nancy Adistyasari;
Direktur Kepatuhan	:	Cecep Trisna;

*) Pengangkatan Hana Dartiwan sebagai Direktur Keuangan dan Yusuf Saadudin sebagai Direktur Konsumer dan Ritel baru akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Prospektus, Perseroan telah menyampaikan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) kepada OJK bagi Ventje Rahardjo selaku Komisaris Utama Independen berdasarkan Surat Perseroan No.0308/DIR-CSE/2024 tanggal 17 April 2024 Perihal Permohonan Mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Komisaris Utama Independen serta bagi Hana Dartiwan selaku calon Direktur Keuangan dan Yusuf Saadudin selaku calon Direktur Konsumer dan Ritel berdasarkan Surat PERSEROAN No.0337/DIR-CSE/2024 tanggal 30 April 2024 Perihal Permohonan Mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direktur Keuangan dan Direktur Konsumer dan Ritel

Para Dewan Komisaris dan anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya. Penunjukkan dan pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014.

Hubungan Kekeluargaan di Antara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan dan Entitas Anak

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan dan Entitas Anak.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Ventje Rahardjo Soedigno
Komisaris Utama Independen, 69 Tahun

Warga Negara Indonesia. Lahir di Yogyakarta tahun 1954. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Studi Pembangunan dari Universitas Indonesia (1980), Master of Economics dari The University of New England (1986)

Berikut adalah Riwayat pekerjaan Ventje Rahardjo Soedigno:

Tahun	Jabatan	Perusahaan
2002-2003	Assistant to The President Director, SVP	Bank Mandiri
2003-2005	Managing Director, EVP Commercial Banking	Bank Mandiri
2005-2006	Managing Director, Retail & Micro Banking	BRI
2006-2007	Senior Advisor/Project Director	Batasa Tazkia Consulting
2007-2008	Managing Director, SME Commercial and Syariah Banking	Bill
2008-2011	Chief Executive Officer	BRI Syariah
2012-2017	SEVP Change Management Office/Chief Transformation Officer	Bank Mandiri
2012-2015	Komisaris Utama	Mandiri AXA General Insurance
2014-2017	Komisaris Utama	PT Bank Syariah Mandiri
2017-2019	Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
2019-2022	Direktur Eksekutif	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
2023-sekarang	Advisor to BOD on Islamic Ecosystem Projects	BSI



Toms Tohir
Komisaris, 55 Tahun

Warga Negara Indonesia. Lahir di Tanjung Karang pada tahun 1969. Menyelesaikan pendidikan Akademi Kepolisian (1990) dan memperoleh gelar Magister *Police Science* dari Universitas Indonesia (2001).

Berikut adalah Riwayat pekerjaan Toms Tohir:

Tahun	Jabatan	Perusahaan
1991-1992	Prana Polresta Palembang Polda Sumsel	POLRI
1992-1994	Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi Polda Jambi	POLRI
1994-1995	Kapolsek Abung Timur Polda	POLRI

	Lampung	
1995	Kasat Reskrim Polres Batanghari Polda Jambi	POLRI
1995-1997	Pama pada PTIK (dalam rangka DIK)	POLRI
1997-1999	Pama pada Polda Kalteng	POLRI
1999-2000	Peneliti Pok Ahli PPITK POLRI	POLRI
2000-2001	Pama pada PTIK STIK Lemdiklat POLRI	POLRI
2001-2002	Kasat Reskrim Polres Bojonegoro	POLRI
2002-2005	Wakapolres Kediri Polda Jatim	POLRI
2005-2006	Kasat I/Kemneg Subditkamneg Ditreskrim Polda Metro Jaya	POLRI
2006-2007	Kasat II/ Sumdaling Ditreskrim Polda Metro Jaya	POLRI
2007-2009	Kapolres Pamekasan Polda Jatim	POLRI
2009-2010	Kapolres Jombang Polda Jatim	POLRI
2010-2011	Wakapolrestabes Surabaya Polda Jatim	POLRI
2011	Kaden C Ropaminal Divpropam	POLRI
2011-2013	Kabid Propam Polda Jatim	POLRI
2013-2015	Kabag Prodok Ropaminal Divpropam	POLRI
2015-2016	Anjak Madya Bid. Paminal Divpropam	POLRI
2016	Dir. Reskrimsus Polda Sumsel	POLRI
2016-2017	Ses Ropaminal Divpropam POLRI	POLRI
2017-2018	Karo Wassidik Bareskrim POLRI	POLRI
2018-2019	Kapolda Provinsi Banten	POLRI
2019-2020	Kapolda Provinsi NTB	POLRI
2020-2022	Sahli Sospol Kapolri	POLRI
2022-sekarang	Irjen Kemendagri	KEMENDAGRI
2023-sekarang	Komisaris	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk



Rudie Kusmayadi
Komisaris, 66 Tahun

Warga Negara Indonesia. Lahir di Ciamis pada tahun 1958. Memperoleh Sarjana Manajemen Pembangunan Daerah dari STIA LAN (2001) dan Magister Manajemen Pembangunan Daerah dari STIA LAN (2004)

Berikut adalah Riwayat pekerjaan Rudie Kusmayadi:

Tahun	Jabatan	Perusahaan
-------	---------	------------

1983-1984	Staf Teknik	Perumda Air Minum Tirta Raharja
1984-1987	KUR Teknik Cabang I Lembang	Perumda Air Minum Tirta Raharja
1987-1988	Kepala Cabang I Lembang	Perumda Air Minum Tirta Raharja
1988-1994	Kepala Cabang II Cimahi	Perumda Air Minum Tirta Raharja
1994-1995	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian	Perumda Air Minum Tirta Raharja
1995-1996	Kepala Bagian Laboratorium	Perumda Air Minum Tirta Raharja
1996-1997	Kepala Bagian Eksploitasi Wilayah	Perumda Air Minum Tirta Raharja
1997-2000	Kepala Cabang III Rancaekek, Cileunyi & Cicalengka	Perumda Air Minum Tirta Raharja
2000-2002	Kepala Cabang IV Majalaya & Paseh	Perumda Air Minum Tirta Raharja
2002-2005	Kepala Cabang I Cimahi	Perumda Air Minum Tirta Raharja
2005-2007	Direktur Teknik	Perumda Air Minum Tirta Raharja
2007-2009	Plt. Direktur Utama	Perumda Air Minum Tirta Raharja
2009-2023	Direktur Utama	Perumda Air Minum Tirta Raharja
2023-Sekarang	Komisaris	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk



Diding Sakri
Komisaris Independen, 46 Tahun

Warga Negara Indonesia. Lahir di Kuningan tahun 1977. Memperoleh Sarjana FTSP (Perencanaan Wilayah dan Kota) dari Institut Teknologi Bandung (2001), Master of Arts dari Trento University Italia dan Regensburg University Germany (2011) serta PhD pada bidang Development Economics dari King's College London (United Kingdom)

Berikut adalah Riwayat pekerjaan Diding Sakri:

Tahun	Jabatan	Perusahaan
2001-2004	Peneliti	IPGI (Indonesian Partnership on Local Governance Initiatives)
2004-2009	Direktur Eksekutif	Perkumpulan Inisiatif
2004-2005	Konsultan/Peneliti	The World Bank
2004-2005	Tim Kompetensi	FPPM (Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat)
2005	Staf Ahli	BIGS (Bandung Institute of Governance Studies)
2007	Development Planning Specialist	RTI (Research Triangle Institute)

2008	Editor	Prakasa
2011	Local Budget Specialist	TAF (The Asia Foundation)
2011-2015	Research Analyst/Public Finance and Governance Specialist	The World Bank
2011	Konsultan	The Mazars
2015	PFM Specialist	The DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade)
2016-2020	PhD Resercher	King's College London (UK)
2020-2021	Team Leader	ASEAN Secretariat
2020-2022	Anggota	Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat
2022-sekarang	Dosen	Universitas Padjajaran
2022-sekarang	Komisaris Independen	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk

DIREKSI


Yuddy Renaldi
Direktur Utama, 59 Tahun

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Tangerang. Lahir pada tanggal 27 Oktober 1964.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi di Universitas Trisakti (1990) dan gelar Magister Manajemen dari STIE IPWI (2000).

Berikut adalah Riwayat pekerjaan Yuddy Renaldi:

Tahun	Jabatan	Perusahaan
26 April 2010 – 16 Desember 2019	Departement Head Specialist Asset Management	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
16 Desember 2013 – 1 Mei 2016	Group Head Special Asset Management II	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
1 Mei 2016 – 8 Mei 2017	Group Head Subsidiaries Management	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
2017 – Mei 2019	Senior Executive Vice President Remedial & Recovery	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
3 Juli 2019 – Sekarang	Direktur Utama	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk



Tedi Setiawan
Direktur Operasional, 57 Tahun

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung. Lahir pada tanggal 19 Juni 1966.

Memperoleh gelar Sarjana bidang Administrasi Negara dari Universitas Parahyangan Bandung (1991), gelar Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Pasundan Bandung (2017).

Berikut adalah Riwayat pekerjaan Tedi Setiawan:

Tahun	Jabatan	Perusahaan
2006	Pemimpin Bagian Likuiditas	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2007	Pemimpin Bagian Treasury Trading	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2008	Pemimpin Cabang Pandegelang	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2009	Pemimpin Bagian Kredit Menengah & Korporasi	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2009	Pemimpin Cabang Subang	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2010	Pemimpin Cabang Taman Sari	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2011	Pemimpin Divisi Treasury	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2012	Pemimpin Divisi Anak Perusahaan	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2012	Pemimpin Divisi Dana & Jasa Konsumer	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2015	Pemimpin Divisi	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa

	Perencanaan Strategis	Barat dan Banten, Tbk
2018	Senior Executive Vice President Credit Risk	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2019 – sekarang	Direktur Operasional	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk



Rio Lanasier
Direktur IT, Treasury dan International Banking, 48 Tahun

Warga Negara Indonesia berdomisili di Jakarta Selatan. Lahir pada tanggal 20 Agustus 1975.

Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Katolik Parahyangan (1998) dan gelar Magister dari University of New South Wales Sydney Australia (2000).

Berikut adalah Riwayat pekerjaan Rio Lanasier:

Tahun	Jabatan	Perusahaan
Juni 2002- July 2003	ODP	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Agustus 2003- September 2004	Manager Commercial Credit Group – Credit Analyst	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Oktober 2004- September 2006	Manager Treasury – FX Dealer	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Oktober 2006- Mei 2007	Assistant Vice President Treasury – Chief Dealer	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Juni 2007- Juni 2008	Assistant Vice President Treasury – Head of Interbank	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Juni 2008 - 31 Juli 2015	VP Treasury Interbank – Global Financial Market	DBS Bank
Agustus 2015- Desember 2016	EVP Treasury, Financial Institution & Special Asset Management.	Bank JTrust Indonesia
Desember 2016- 2019	Direktur Treasury, Financial Institution, Funding & Fintech Solution.	Bank JTrust Indonesia
Juli 2019 - Sekarang	Direktur IT, Treasury & International Banking	bank bjb



Hana Dartiawan
Direktur Keuangan, 54 Tahun

Warga Negara Indonesia. Lahir di Tasikmalaya pada tahun 1970. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dan Manajemen Industri dari Universitas Islam Bandung (1996) dan Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Padjajaran Bandung (2009).

Berikut adalah Riwayat pekerjaan Hana Dartiawan:

Tahun	Jabatan	Perusahaan
2009	Pemimpin Bagian Treasury Trading	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2009	Pemimpin Bagian <i>Financial Institution</i>	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2009	<i>Senior Dealer</i> Setingkat	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa

	Pemimpin Seksi	Barat dan Banten, Tbk
2009	Direktur Keuangan Dapen	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2010	Pemimpin Bagian Transaksi Luar Negeri	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2011	Direktur Utama Dana Pensiun Setingkat Pemimpin Cabang	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2011	Direktur Keuangan Dana Pensiun Bank Jabar	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2011 -2012	Pemimpin Cabang Cilegon	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2012	Pemimpin Cabang Indramayu	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2014 - 2015	Direktur Dana Pensiun	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2015 - 2018	Pemimpin Grup Manajemen Likuiditas & ALM	Dana Pensiun bank bjb
2018 - 2024	Pemimpin Divisi Treasury	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2024	Direktur Keuangan bank bjb	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk



Yusuf Saadudin
Direktur Konsumer dan Ritel, 50 Tahun

Warga Negara Indonesia. Lahir di Bandung pada tahun 1973. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjajaran (1999) dan Magister Hukum Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Padjajaran pada tahun 2015.

Berikut adalah Riwayat pekerjaan Yusuf Saadudin:

Tahun	Jabatan	Perusahaan
2011	Pemimpin Cabang Ciamis	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2011	Ketua YKP	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2012	Pemimpin Cabang Utama Bandung	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2012	Pemimpin Kantor Wilayah	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2013	Pemimpin Divisi Umum	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2015	Pemimpin Divisi Hukum	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2016-2017	Pemimpin Divisi Credit Risk	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2019	Pemimpin Divisi KPR & KKB	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2021	Pemimpin Divisi Kredit Konsumer	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2024	Direktur Konsumer dan Ritel	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk



Nancy Adistyasari
Direktur Komersial dan UMKM, 43 Tahun

Warga Negara Indonesia. Lahir di Bojonegoro tahun 1981. Memperoleh gelar Sarjana Geofisika dan Meteorologi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2004 dan Magister Management dari Binus University pada tahun 2020.

Berikut adalah Riwayat pekerjaan Nancy Adistyasari:

Tahun	Jabatan	Perusahaan
2015	Senior Reallionship Manager – Corporate Banking Bandung	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2016-2019	Vice President Sector Energy	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2019-2020	Senior Vice President Commercial Banking 5	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2020	Direktur Komersial dan UMKM	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk



Cecep Trisna
Direktur Kepatuhan, 56 Tahun

Warga Negara Indonesia. Lahir di Bandung tahun 1967. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran pada tahun 1990.

Berikut adalah Riwayat pekerjaan Cecep Trisna:

Tahun	Jabatan	Perusahaan
2013-2014	Pemimpin Divisi Change Management Offive	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2014-2015	Pemimpin Divisi Pndidikan dan Pelatihan	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2015-2017	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2017-2017	Ketua I	Yayasan Kesejahteraan Pegawai bank bjb
2017-2018	Ketua Umum	Yayasan Kesejahteraan Pegawai bank bjb
2018-2021	Pemimpin Divisi Kepatuhan & APU PPT	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
2021-Sekarang	Direktur Kepatuhan	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk

Direksi Perseroan menyatakan:

1. Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.
2. Tidak terdapat hal yang menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur standar penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris meminta Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menyusun rancangan usulan remunerasi.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi meminta pihak independen untuk menyusun rancangan remunerasi.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi mengusulkan kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi.
4. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS.
5. RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Indikator Penetapan Remunerasi

Dalam menetapkan indikator Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha.
 2. Faktor kompleksitas usaha.
 3. Tingkat inflasi.
 4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.
- Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris adalah masing-masing sebesar Rp34.350 juta dan Rp27.797 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah remunerasi yang diterima oleh Direksi adalah masing-masing sebesar Rp94.441 juta dan Rp103.706 juta.

A.5. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

DEWAN KOMISARIS

Tugas Dewan Komisaris

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris Perseroan terus proaktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi dan memberikan masukan kepada Direksi. Bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris tentunya mengacu pada implementasi atas rekomendasi yang telah diberikan Dewan Komisaris terhadap Direksi maupun melalui komite-komite yang dibentuk.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Dewan Komisaris telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi termasuk pengawasan terhadap:
 - a. Perumusan dan pelaksanaan rencana bisnis Perseroan;
 - b. Evaluasi pencapaian kinerja bulanan;
 - c. Ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS;
 - d. Peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan bisnis Perseroan.
4. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS, diantaranya adalah:
 - a. Memantau dan melaporkan pelaksanaan action plan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance);
 - b. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan bisnis Perseroan (kebijakan kepengurusan oleh Direksi);
 - c. Mengawasi efektivitas penerapan GCG pada setiap tingkatan dan jenjang organisasi Perseroan;
 - d. Mengawasi pelaksanaan Manajemen Risiko;
 - e. Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi ;
 - f. Memantau kepatuhan Perseroan terhadap peraturan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak – pihak lainnya;
 - g. Mengawasi dan memberikan nasihat terkait pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) Perseroan;
 - h. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) Perseroan.
5. Menyusun pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Dewan Komisaris;
6. Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris setiap tahun serta mekanisme review terhadap kinerja Dewan Komisaris;
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada RUPS;
8. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi, termasuk laporan hasil audit internal Perseroan;
9. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain yang berwenang;
10. Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif;
11. Melaksanakan review atas struktur organisasi;
12. Melaksanakan review atas KPI Direksi.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris terus berupaya untuk mendorong pelaksanaan

pengawasan yang semakin efektif. Selama 2023, Dewan Komisaris telah mengeluarkan beberapa keputusan dan persetujuan, antara lain:

1. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/SK/DKO/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
2. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/SK/DKO/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Pembagian Tugas dan Pelaksanaan Kegiatan Dewan Komisaris serta Komite – Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
3. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/SK/DKO/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Persetujuan Atas Revisi Rencana Bisnis Tahun 2023 - 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 04/SK/DKO/2023 tanggal 22 Agustus 2023 Tentang Pembagian Tugas dan Pelaksanaan Kegiatan Dewan Komisaris serta Komite – Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/SK/DKO/2023 tanggal 21 November 2023 Tentang Persetujuan Atas Rencana Bisnis Tahun 2024 - 2026 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
6. Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Posisi Tahun 2022 Berdasarkan Metode Self Assessment.
7. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit terkait:
 - a. Audit Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun 2022.
 - b. Kaji Ulang (review) Penerapan Fungsi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
 - c. Audit Laporan Keuangan bank bjb Tahun 2023.
 - d. Audit Laporan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bank bjb Tahun 2023.
 - e. Pendampingan Dalam Rangka Penerbitan Surat Berharga Perpetual I bank bjb Tahun 2023.
8. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Satuan Kerja Audit Internal Tahun 2024.
9. Memberikan persetujuan Penerbitan Laporan Keuangan dengan mempertimbangkan Rekomendasi Komite Audit yaitu:
 - a. Penerbitan Laporan Keuangan bank bjb Periode 31 Desember 2022 (Audited).
 - b. Penerbitan Laporan Keuangan bank bjb Periode 31 Maret 2023.
 - c. Penerbitan Laporan Keuangan bank bjb Periode 30 Juni 2023.
 - d. Penerbitan Laporan Keuangan bank bjb Periode 30 September 2023.
 - e. Penerbitan Laporan Keuangan bank bjb Periode 31 Desember 2023
10. Persetujuan Kebijakan Dana, Layanan, dan/atau Jasa.
11. Persetujuan Kebijakan Perkreditan Bank.
12. Persetujuan Pencabutan SK Direksi Tentang Pedoman Penerapan Program APU PPT bank bjb.
13. Persetujuan Penyediaan Dana Fasilitas Kredit kepada Pihak terkait atas nama:
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - b. Perubahan Syarat Penarikan Fasilitas Kredit KMK Koperasi Simpan Pinjam pada Pihak Terkait atas nama Koperasi Konsumen bank bjb “Ziebar”.
 - c. PT Artdeco Sejahtera Abadi.
 - d. Restrukturisasi Faskred KMK BPR Installment Pihak Terkait atas nama PT BPR Indramayu Jabar
 - e. Perpanjangan Fasilitas Kredit Cash Collateral pada Pihak Terkait atas nama BPR Cipatujah Jabar (Perseroda).
 - f. Koperasi Konsumen bank bjb “Ziebar”.
14. Persetujuan Penyertaan Modal Tahap II Kepada BPD Bengkulu Dalam Rangka Kelompok Usaha Bank (KUB).
15. Persetujuan Penetapan Rencana Bisnis DPLK bank bjb Periode Tahun 2024.
16. Persetujuan Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM).
17. Persetujuan Risk Appetite Statement dan Risk Tolerance terkait Teknologi Informasi.
18. Persetujuan Penyesuaian Struktur Organisasi bank bjb.
19. Persetujuan Rencana Penyehatan BPR Intan Jabar (BIJ).
20. Persetujuan Risk Appetite Statement dan Risk Tolerance.
21. Persetujuan Kebijakan Kepatuhan.
22. Persetujuan Perubahan RBB Audit Teknologi Informasi Periode Triwulan IV Tahun 2023.
23. Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2024.
24. Persetujuan Recovery Plan bank bjb.
25. Persetujuan Kebijakan Trisury.
26. Evaluasi Kebijakan, Strategi, dan Kerangka manajemen Risiko.
27. Persetujuan penyesuaian RBB tahun 2023 - 2024
28. Persetujuan penyesuaian struktur organisasi
29. Persetujuan penunjukan KAP untuk penerbitan *comfort letter* obligasi subordinasi IV tahap I

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Periode hingga Desember 2023, Perseroan mengadakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 23 kali dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 36 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Dewan Komisaris dan Direksi		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Ventje Rahardjo Soedigno*	-	-	-	-	-	-
Rudie Kusmayadi**	5	5	100%	16	16	100%
Toms Tohir**	5	5	100%	16	16	100%
Diding Sakri.	23	23	100%	36	36	100%

* baru diangkat menjadi Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan RUPST Perseroan pada tanggal 2 April 2024

** Diangkat berdasarkan salah satu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2023 dan Efektif menjabat pada tanggal 9 Agustus 2023 berdasarkan keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

DIREKSI

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab

Berikut ini adalah ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab dari anggota Direksi Perseroan:

Nama	Jabatan dan Ruang Lingkup Pekerjaan	Tanggung Jawab
Yuddy Renaldi	Direktur Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinir dan memberikan arahan dalam penyusunan visi, misi dan nilai-nilai serta rencana korporasi dan rencana bisnis untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank. - Menyelaraskan dan mengakomodir inisiatif internal Perseroan yang dapat memberi nilai tambah serta meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan. - Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar anggota Direksi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan Perseroan secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan asas keseimbangan dan keserasian serta memastikan kepatuhan terhadap aturan regulator yang berlaku. - Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip GCG dan standar etika Perseroan secara konsisten dalam perusahaan. - Memimpin rapat Direksi..
Cecep Trisna	Direktur Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Perseroan. - Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi. - Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perseroan. - Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Meminimalkan risiko kepatuhan Perseroan. - Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Perseroan atau pimpinan kantor cabang dari

Nama	Jabatan dan Ruang Lingkup Pekerjaan	Tanggung Jawab
		<p>bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.
Hana Dartiwan	Direktur Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dari bidang-bidang yang berada di bawah tanggung jawabnya agar efektif dengan mengutamakan asas keseimbangan. - Mengembangkan program efisiensi, efektivitas dan manajemen mutu dari produk-produk Perseroan, serta memastikan dilaksanakannya secara konsisten di lingkungan unit kerja masing-masing. - Memantau serta mengawasi Batas Maksimal Pemberian Kredit atas aktivitas intermediasi Perseroan. - Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang di bawahnya agar rencana bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai. - Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada bidang-bidang di bawahnya. - Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja masing-masing bidang di bawahnya..
Ir. Rio Lanasier, M.Sc.	Direktur <i>Information Technology, Treasury dan International Banking</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dari bidang-bidang yang berada di bawah tanggung jawabnya agar efektif dengan mengutamakan asas keseimbangan. - Mengembangkan program efisiensi, efektivitas dan manajemen mutu dari produk-produk Perseroan, serta memastikan dilaksanakannya secara konsisten di lingkungan unit kerja masing-masing. - Memantau serta mengawasi Batas Maksimal Pemberian Kredit atas aktivitas intermediasi Perseroan. - Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang di bawahnya agar rencana bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai. - Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada bidang-bidang di bawahnya. - Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja masing-masing bidang di bawahnya.
Yusuf Saadudin	Direktur Konsumer dan Ritel	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dari bidang-bidang yang berada di bawah tanggung jawabnya

Nama	Jabatan dan Ruang Lingkup Pekerjaan	Tanggung Jawab
		<p>agar efektif dengan mengutamakan asas keseimbangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan program efisiensi, efektivitas dan manajemen mutu dari produk-produk Perseroan, serta memastikan dilaksanakannya secara konsisten di lingkungan unit kerja masing-masing. - Memantau serta mengawasi Batas Maksimal Pemberian Kredit atas aktivitas intermediasi Perseroan. - Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang di bawahnya agar rencana bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai. - Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada bidang-bidang di bawahnya. - Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja masing-masing bidang di bawahnya.
Tedi Setiawan	Direktur Operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dari bidang-bidang yang berada di bawah tanggung jawabnya agar efektif dengan mengutamakan asas keseimbangan. - Mengembangkan program efisiensi, efektivitas dan manajemen mutu dari produk-produk Perseroan, serta memastikan dilaksanakannya secara konsisten di lingkungan unit kerja masing-masing. - Memantau serta mengawasi Batas Maksimal Pemberian Kredit atas aktivitas intermediasi Perseroan. - Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang di bawahnya agar rencana bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai. - Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada bidang-bidang di bawahnya. - Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja masing-masing bidang di bawahnya.
Nancy Adistyasari	Direktur Komersial dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dari bidang-bidang yang berada di bawah tanggung jawabnya agar efektif dengan mengutamakan asas keseimbangan. - Mengembangkan program efisiensi, efektivitas dan manajemen mutu dari produk-produk Perseroan, serta memastikan dilaksanakannya secara konsisten di lingkungan unit kerja masing-masing. - Memantau serta mengawasi Batas Maksimal Pemberian Kredit atas aktivitas intermediasi Perseroan.

Nama	Jabatan dan Ruang Lingkup Pekerjaan	Tanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none"> - Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang di bawahnya agar rencana bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai. - Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada bidang-bidang di bawahnya. - Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja masing-masing bidang di bawahnya.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Periode Januari hingga Desember 2023, Perseroan mengadakan rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing sebanyak 69 kali dan 8 kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Rapat Direksi			Rapat Direksi dan Dewan Komisaris		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Yuddy Renaldi;	69	67	97%	8	8	100%
Cecep Trisna	69	68	98,5%	8	8	100%
Hana Dartiwan*	-	-	-	-	-	-
Yusuf Saadudin*	-	-	-	-	-	-
Tedi Setiawan;	69	66	95,6%	8	8	100%
Ir. Rio Lanasier, M.Sc;	69	67	97,1%	8	8	100%
Nancy Adistyasari	69	58	84%	8	8	100%

* baru diangkat menjadi Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan RUPST Perseroan pada tanggal 2 April 2024

SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Perseroan telah memiliki sekretaris perusahaan yaitu Divisi *Corporate Secretary*, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.0581/SK/DIR-HCA/2020 tanggal 9 September 2020, Perseroan telah menunjuk Widi Hartoto sebagai Pemimpin Divisi *Corporate Secretary* Perseroan.

Adapun keterangan mengenai pendidikan, pengalaman kerja dan pelatihan yang pernah diikuti dari Widi Hartoto adalah sebagai berikut:

Pendidikan

Meraih gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Prof. DR. Moestopo pada tahun 2003.
Meraih gelar Magister Management dari Universitas Widyatama pada tahun 2012

Pengalaman Kerja

Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Grup Kesekretariatan Direksi (tahun 2014-2017) dan Wakil Pemimpin Divisi *Corporate Secretary* tahun 2017 – 2020.

Kontak Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Alamat korespondensi : Divisi *Corporate Secretary*
Menara bank bjb Lantai 7
Jl. Naripan No. 12 – 14 Bandung

Telepon : (022) 4234868
Faksimil : (022) 4206099
Email : ir@bankbjb.co.id

Pelatihan yang pernah diikuti

Agar dapat terus mengikuti perkembangan terkini mengenai pelaksanaan fungsi dan peran Sekretaris Perusahaan yang efektif,

Perseroan telah memfasilitasi pegawai di lingkungan Sekretaris Perusahaan mengikuti pelatihan maupun training. Pada periode Tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti training sebagai berikut:

Periode	Materi	Waktu & Tempat	Jenis Pelatihan & Penyelenggaraan
2023	Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Strategi Jitu Implementasi GCG Dalam Rangka Mencapai Peringkat GCG	Juni 2023	LMI (Learning Media Indonesia)
	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	Juli 2023	ARFAIDAMS SECRET
	Leaders Talk: Leading Successful BUsiness	Agustus 2023	bjb University
	Executive Workshop Tahun 2023: Menjaga Momentum Pertumbuhan Bisnis Dalam Mencapai Komitmen Tahun 2023 Melalui Fee Based Income Kredit Yang Berkualitas	September 2023	TD Consultant

Tugas dan tanggung jawab Divisi *Corporate Secretary* antara lain sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat Dewan Komisaris dan Direksi, mencatat hasil rapat dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Mengirimkan pemberitahuan dan mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan mempublikasikan hasil keputusan rapat.
3. Menjaga hubungan baik dengan Otoritas Pasar Modal dan mempersiapkan laporan – laporan mengenai pengungkapan keterbukaan informasi Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan koordinasi dan administrasi pencatatan kepemilikan Saham dan tindakan korporasi.
5. Mengkoordinasikan kegiatan public relations dan marketing communications untuk Perseroan.
6. Mengelola dan melakukan kegiatan promosi produk dan jasa Perseroan, termasuk pembuatan Buku Laporan Tahunan
7. Mengkoordinasikan dan memantau tindak lanjut atas pengaduan nasabah.
8. Melaksanakan pembinaan cabang dalam bidang kehumasan, pengaduan nasabah, dan kesekretariatan.
9. Melaksanakan program CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai wujud kepedulian dan kontribusi Perseroan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar.

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan alat kelengkapan Dewan Komisaris yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal, internal audit dan proses pelaporan keuangan. Fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dengan menelaah laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya sebelum diberikan Perseroan kepada *stakeholders* serta menelaah sistem pengendalian internal bank, dan ekektivitas fungsi audit intern.

Dasar pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Komite Audit merupakan alat kelengkapan Dewan Komisaris yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian intern, internal audit, proses pelaporan keuangan, sehingga Perseroan dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Pembentukan Komite Audit Perseroan juga berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/ POJK.04/2015 Tanggal 25 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 05/SK/DK/2005 tanggal 17 Mei 2005 Tentang Pembentukan Komite Audit.
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.6/SK/DKO/2024 tanggal 3 April 2024 Tentang Pembagian Tugas Dan Pelaksanaan Kegiatan Dewan Komisaris Serta Komite-Komite (“SK Komisaris No.6/2024”).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Diding Sakri	Ketua merangkap anggota (Komisaris Independen Perseroan)
Dewi Kania Sugiharti	Anggota (Pihak Independen)
Wawan Hernawan	Anggota (Pihak Independen)

Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 POJK No.55/2015, dimana Komite Audit Perseroan diketuai oleh Diding Sakri selaku Komisaris Independen Perseroan

Piagam Komite Audit

Komite Audit mempunyai suatu Pedoman Kerja Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 12/SK/DKO/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang menetapkan secara jelas peran, tanggungjawab dan lingkup kerjanya untuk meningkatkan efektifitas, tanggungjawab, keterbukaan dan objektivitas Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya. Dalam Piagam Komite Audit diatur organisasi dan masa kerja Komite Audit, tugas dan tanggung jawab, rapat, pelaporan dan anggaran serta standar etika bagi Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas Komite Audit antara lain adalah:

1. Pengawasan Terhadap Proses Pelaporan Keuangan Komite audit bertugas melakukan pengawasan terhadap proses pembuatan Laporan Keuangan Perseroan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Komite Audit:
 - a. Memantau proses pelaporan keuangan untuk memastikan terpenuhinya standar dan kebijakan akuntansi yang berlaku.
 - b. Melakukan evaluasi atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
 - c. Memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota Komite Audit secara bulanan, triwulanan dan tahunan.
 - d. Melakukan pemantauan atas penetapan metode penilaian aktiva dan passiva, komitmen dan kontijensi serta cadangan-cadangan yang harus dibentuk.
 - e. Melakukan pemantauan atas pos-pos laporan keuangan yang mengandung transaksi-transaksi yang kompleks dan tidak lazim.
 - f. Menilai kecukupan pengungkapan transaksi dengan pihak terkait.
 - g. Menilai dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap saran yang diajukan oleh Auditor Eksternal, Direksi dan Auditor Internal jika terdapat perubahan dalam ruang lingkup audit serta prinsip dan standar akuntansi.
 - h. Komite Audit mengkomunikasikan kepada Auditor Eksternal, Direksi dan Auditor Internal bila menghadapi penafsiran yang berbeda maupun sesuatu hal yang tidak konsisten.
2. Seleksi dan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta Pengawasan Pekerjaannya Komite Audit dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit tahunan sebagai Auditor Eksternal sekurang-kurangnya melakukan, sebagai berikut:
 - a. Menyeleksi dan merekomendasikan penunjungan KAP sebagai Auditor Eksternal
 - Komite Audit menyeleksi dan merekomendasikan calon KAP yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris.
 - Proses seleksi dan penunjukkan KAP berpedoman pada peraturan yang berlaku
 - Komite Audit dapat merekomendasikan untuk pemutusan hubungan kerja dengan auditor ekstern kepada Dewan Komisaris jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi auditor dapat terganggu atau terbukti bahwa auditor tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik.
 - b. Mengawasi pekerjaan Auditor Eksternal
 - Melakukan evaluasi terhadap Rencana Audit dan kecukupan program audit serta melakukan pengawasan atas pekerjaan Auditor Eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
 - Terlibat dalam dan/atau menerima laporan atas pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal dengan manajemen serta membuat laporan tertulis mengenai adanya perbedaan pendapat antara auditor dengan manajemen yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.
 - Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut di atas, Komite Audit sekurang-kurangnya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap;
 - a) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku
 - b) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
 - c) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Auditor Eksternal sebagai rekomendasi untuk Dewan Komisaris.
 - d) Memberi masukan kepada Auditor Eksternal agar mengidentifikasi area-area berisiko tinggi.
 - e) Berkonsultasi dengan Auditor Eksternal tanpa kehadiran manajemen tentang pengendalian internal berkenaan dengan identifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal, serta pemenuhan dan ketepatan laporan keuangan Perseroan.

- f) Memastikan agar Auditor Eksternal, dalam kaitannya dengan pelaksanaan audit umum (general audit) mengkomunikasikan hal-hal berikut:
- Tingkat tanggung jawab auditor terhadap pengendalian internal dalam penyajian laporan keuangan.
 - Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan.
 - Kelemahan signifikan dalam disain dan penerapan pengendalian internal.
 - Metode pencatatan, pelaporan dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap laporan keuangan.
 - Adanya Fraud ataupun indikasi Fraud serta penyimpangan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh manajemen atau pegawai yang berdampak salah saji material dalam laporan keuangan.
 - Koreksi audit yang signifikan.
 - Prosedur yang dilaksanakan oleh auditor terhadap laporan tahunan yang berisi laporan keuangan audit-an.
 - Ketidaksepakatan dengan manajemen tentang penerapan standar akuntansi, lingkup audit, pengungkapan dalam laporan keuangan dan kata-kata yang digunakan auditor dalam laporan auditnya.
 - Adanya perbedaan pendapat antara manajemen dengan auditor eksternal untuk melakukan konsultasi dengan Auditor Eksternal lainnya.
 - Hambatan dalam pelaksanaan audit.
- Melakukan kajian bersama Komisaris, Direksi serta Auditor Eksternal mengenai:
- a) Laporan Keuangan Tahunan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan sebelum dipublikasikan.
 - b) Laporan audit dari Auditor Eksternal mengenai Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan pendapat serta saran dari Auditor Eksternal.
 - c) Temuan penting dan rekomendasi yang dibuat oleh Auditor Eksternal serta memonitor tindak lanjut atas rekomendasi tersebut oleh Direksi dan manajemen.
 - d) Mengkaji surat representasi yang ditandatangani oleh Direksi, serta meyakinkan tidak adanya kesulitan dalam memperoleh surat tersebut dan juga hal-hal spesifik yang ditemui dalam penugasan.
 - e) Menilai pendapat Auditor Eksternal tentang kualitas dan ketepatan penerapan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi perbankan.
- Komite Audit melakukan evaluasi terhadap Auditor Eksternal mengenai kualifikasi, kinerja dan independensi atas Partner Audit dari KAP serta auditor yang ditugaskan untuk melakukan audit keuangan, menerima masukan dari manajemen serta Satuan Kerja Audit Internal atas pekerjaan Auditor Eksternal tersebut.
- Berdiskusi dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta Auditor Eksternal untuk mendapatkan pengertian atas pertimbangan yang digunakan dalam menentukan standar akuntansi beserta aplikasinya.
- Memastikan adanya pengungkapan yang memadai terhadap standar akuntansi.
3. Evaluasi Jasa Non-Audit
- Untuk menjaga independensi Auditor Eksternal, Komite Audit wajib melakukan evaluasi sebelum memberikan persetujuan awal (pre-approval) terhadap jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada Auditor Eksternal yang sedang melaksanakan jasa audit. Jasa-jasa non-audit yang mengganggu independensi adalah:
- a. Jasa pembukuan atau jasa-jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi atau laporan keuangan Perseroan.
 - b. Jasa disain dan implementasi sistem informasi keuangan
 - c. Jasa penilaian atau jasa untuk memberikan opini atas kewajaran
 - d. Jasa aktuarial
 - e. Jasa outsourcing internal audit
 - f. Jasa fungsi manajemen atau sumber daya manusia
 - g. Jasa perantara
 - h. Jasa layanan hukum dan jasa keahlian yang tidak berkaitan dengan audit
 - i. Jasa konsultasi perpajakan
 - j. Jasa lain berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Bank Indonesia.

Langkah-langkah yang harus dilaksanakan manajemen Perseroan untuk mendapatkan persetujuan awal (pre-approval) adalah sebagai berikut:

- a. Direksi, menyampaikan kepada Dewan Komisaris uraian rinci mengenai jenis jasa dan pekerjaan yang akan ditugaskan kepada KAP.
- b. Komite Audit mengevaluasi dan menganalisis jasa nonaudit yang akan ditugaskan kepada KAP agar tidak mengganggu independensi atau menimbulkan benturan kepentingan.
- c. Komite Audit hanya dapat menyetujui pemberian jasa non-audit tersebut apabila hasil evaluasi tidak menunjukkan adanya gangguan dalam hal independensi atau menimbulkan benturan kepentingan.

Pre-approval terhadap jasa non-audit ini dapat dikecualikan, jika nilai seluruh jasa non-audit tidak lebih dari 5% dari total nilai biaya audit yang dibayarkan Perseroan kepada KAP dalam tahun fiskal di mana jasa non-audit diberikan.

4. Pengawasan Pengendalian Internal

Komite Audit dan Satuan Kerja Audit Internal melakukan pengawasan atas operasional Perseroan sesuai dengan fungsi masing-masing agar tidak melanggar peraturan Bank Indonesia, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Komite Audit mendapatkan laporan audit internal secara berkala dari Satuan Kerja Audit Internal sebagai masukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
- b. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal, Komite Audit dapat memberikan masukan kepada manajemen Perseroan, melalui Dewan Komisaris, saran tersebut berkenaan dengan peningkatan kinerja Satuan Kerja Audit Internal.
- c. Mengkaji dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas Rencana Kerja Tahunan Audit Internal, termasuk ruang lingkup Audit, serta untuk memastikan bahwa Rencana Kerja Tahunan Audit Internal tersebut sudah mencakup risiko operasional Perseroan secara Keseluruhan.
- d. Setiap awal tahun, Komite Audit mengevaluasi Program Kerja Audit tahunan yang disusun oleh Satuan Kerja Audit Internal serta ruang lingkup audit, dan merekomendasikan hasil evaluasinya kepada Dewan Komisaris.
- e. Mengkaji dan memberikan pertimbangan kepada Dewan Komisaris atas kesulitan dan hambatan yang dihadapi Audit Internal dalam melaksanakan tugasnya, termasuk hambatan atas lingkup kerja audit dan/atau hambatan akses untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.
- f. Komite Audit harus berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal untuk;
 - Mengadakan pertemuan reguler dalam rangka membahas temuan dan/atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan
 - Membahas tanggapan manajemen Perseroan atas temuan signifikan dalam operasional bank serta rekomendasi yang diberikan oleh Satuan Kerja Audit Internal terhadap temuan tersebut.
 - Secara tahunan melakukan pemantauan terhadap kode etik profesi, mengevaluasi kegiatan, struktur organisasi dan kualifikasi anggota audit internal.
 - Memperluas evaluasi untuk menilai sifat, lingkup, besaran dan dampak dari kelemahan signifikan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan.
- g. Melakukan penilaian efektivitas dan independensi Satuan Kerja Audit Internal serta melakukan evaluasi atas aktivitas-aktivitas rutin, penempatan auditor internal, dan struktur organisasi Satuan Kerja Audit Internal.
- h. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris tentang:
 - Perubahan signifikan dalam lingkup kerja audit dari rencana semula, termasuk sumber daya manusia dan anggaran Audit Internal
 - Pemutakhiran Pedoman Kerja Komite Audit
 - Kepatuhan terhadap Pedoman Kerja Komite Audit
- i. Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris dapat merekomendasikan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Satuan Kerja Audit Internal

5. Pengawasan Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan

Komite Audit dan Satuan Kerja Kepatuhan dan Hukum sesuai dengan fungsinya masing-masing bertugas untuk memantau kepatuhan operasional Perseroan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Bank Indonesia, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pemantauan dapat dilakukan melalui evaluasi atas temuan, pelaporan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, auditor ekstern, satuan kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, satuan kerja Manajemen Risiko/Komite Manajemen Risiko.
- b. Apabila terdapat indikasi kuat bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Bank Indonesia, Komite Audit harus melaporkan kepada Dewan Komisaris dan mengusulkan diadakannya investigasi.

6. Penelaahan Pengaduan Pihak Ketiga

Komite Audit tidak hanya menerima informasi yang berasal dari pelaksanaan tugas-tugas rutinnya, akan tetapi juga menerima pengaduan pihak ketiga mengenai akuntansi, pengendalian internal dan fraud yang dapat mengganggu operasi Perseroan.

- a. Syarat pengaduan yang dapat diproses lebih lanjut:
 - Pengaduan disampaikan secara tertulis.
 - Terdapat alibi dan permasalahan yang jelas atas pengaduan yang dibuat.
- b. Penelaahan Pengaduan
Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta audit intern untuk menindaklanjutinya.
- c. Hasil Penelaahan
Jika dari hasil penelaahan, terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar:

- Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris.
- Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.

7. Pelaksanaan Tugas Khusus

Tugas khusus merupakan tugas diluar rutin sebagaimana diperintahkan oleh Dewan Komisaris, dengan memberikan surat penugasan kepada Komite Audit.

a. Dewan Komisaris memberikan tugas khusus, karena:

- terdapat indikasi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga Komite Audit, dengan persetujuan Dewan Komisaris, memperluas evaluasi dengan melaksanakan Audit Investigasi untuk menentukan dampak dan besarnya kerugian akibat pelanggaran tersebut. Untuk melaksanakan audit investigasi tersebut, Komite Audit dapat meminta bantuan pihak Divisi Audit Intern atau auditor eksternal.
- terdapat laporan/pengaduan pihak ketiga yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan dan/atau kecurangan.

b. Pelaksanaan tugas khusus Komite Audit antara lain dapat:

- Melakukan evaluasi terhadap semua pencatatan termasuk didalamnya risalah rapat Direksi dan risalah rapat Dewan Komisaris, dokumentasi serta informasi lainnya yang diperlukan.
- Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan stafnya, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi yang dilaksanakan bekerjasama dengan Divisi Audit Intern atau Auditor Eksternal.

8. Pelaksanaan Tugas Terkait Pelaksanaan Tata kelola Dana Pensiun

Dalam hal pelaksanaan tata kelola dana pensiun, Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas (dalam hal ini Dewan Komisaris bank bjb) untuk memastikan bahwa:

- Struktur pengendalian internal dana pensiun telah dilaksanakan dengan baik
- Pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen

Selain itu, Komite Audit mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- Memastikan bahwa laporan keuangan Perseroan dapat dimengerti, transparan dan dapat diandalkan.
- Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Divisi Audit Intern maupun Auditor Ekstern sehingga dapat mencegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
- Melakukan evaluasi kebijakan Perseroan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, etika, benturan kepentingan dan investigasi akan adanya kesalahan maupun kecurangan, melalui Dewan Komisaris memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern Perseroan serta pelaksanaannya.
- Melakukan evaluasi Rencana Kerja Divisi Audit Intern, pelaporan dan temuan yang signifikan.
- Berkomunikasi dengan Direksi dan Satuan Kerja terkait tentang status, kemajuan dan perkembangan baru pada permasalahan operasional yang dijumpai serta temuan Divisi Audit Intern.
- Memastikan bahwa Divisi Audit Intern dapat memiliki akses langsung kepada Komite Audit dan mendorong adanya komunikasi di luar rapat komite yang telah dijadwalkan.
- Menciptakan jalur komunikasi langsung dengan Auditor Eksternal/pengawas Perseroan untuk membahas rencana audit, temuan maupun laporan.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit Perseroan:

Diding Sakri

Ketua merangkap Anggota

Riwayat hidup singkat beliau dapat dilihat pada bab VIII Prospektus sub bab Pengawasan dan Pengurusan.

Dewi Kania Sugiharti

Anggota (Pihak Independen)

Warga negara Indonesia, Lahir di Bandung, pada tahun 1962 saat ini berusia 61 tahun. Surat Keputusan Direksi Nomor 0665/SK/DIR-CSE/2022 tanggal 9 November 2022 periode menjabat terhitung mulai tanggal 4 November 2022 sampai dengan 3 November 2023. Surat Keputusan Direksi Nomor 0450/SK/DIR-CSE/2023 tanggal 3 November 2023 periode menjabat terhitung mulai tanggal 04 November 2023 sampai dengan 03 November 2025

Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung (1986), Pascasarjana dari Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung (1995) dan S3 dari Program Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2010. Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting diantara lain sebagai Ketua Satuan Pengawasan Intern UNPAD (2014-

2015), Anggota Senat FH UNPAD (2016-2018), Wakil Dekan II FH UNPAD (2016-2018) dan Anggota Senat FH UNPAD (2021- Sekarang), Kepala Dept HAN FH UNPAD (2021- Sekarang).

Wawan Hernawan Anggota (Pihak Independen)

Warga negara Indonesia, Lahir di Bandung, pada tahun 1963 saat ini berusia 60 tahun. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 009/SK/DIR-CS/2019 tanggal 4 Januari 2019 periode menjabat terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020. Surat Keputusan Direksi Nomor 011/SK/DIR-CSE/2021 tanggal 06 Januari 2021 periode menjabat terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Surat Keputusan Direksi Nomor 0756/SK/DIR-CSE/2022 tanggal 28

Desember 2022 periode menjabat terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

Meraih D3 Akuntansi di Pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan (PAAP) di Universitas Padjadjaran Bandung pada Tahun 1986 dan Sarjana di bidang Manajemen dari Universitas Bandung Raya (UNBAR) pada tahun 2014. Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting diantara lain Pemimpin bagian Akuntansi Keuangan bank bjb (2009-2010), Pemimpin cabang bank bjb (2010-2012), Pemimpin Grup Audit Kantor Pusat & Kantor Wlayah bank bjb (2012-2014) dan Pemimpin Grup SD & QA Audit Internal bank bjb (2014-2016).

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Periode Januari hingga Desember 2023, Perseroan mengadakan rapat Komite Audit sebanyak 15 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Farid Rahman*	15	15	100%
Diding Sakri	15	15	100%
Fahlino F. Sjuib**	4	4	100%
Dewi Kania Sugiharti	15	15	100%
Wawan Hernawan	15	15	100%

* Diberhentikan dengan hormat sebagai Komisaris Utama Independen berdasarkan keputusan RUPS Tahun 2024 tanggal 02 April 2024.

** Mulai menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tanggal 22 Agustus 2023 dan diberhentikan dengan hormat sebagai Komisaris Independen berdasarkan keputusan RUPS Tahun 2024 tanggal 02 April 2024.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dibentuk berdasarkan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 02/SK/DK/2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.6/SK/DKO/2024 tanggal 3 April 2024 Tentang Pembagian Tugas Dan Pelaksanaan Kegiatan Dewan Komisaris Serta Komite-Komite ("SK Komisaris No.6/2024").

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Diding Sakri	Ketua merangkap anggota (Komisaris Independen Perseroan)
Rudie Kusmayadi	Anggota (Komisaris)
Toms Tohir	Anggota (Komisaris)
Sunu Widiyanto	Anggota (Pihak Independen)
Dadan Yonanda	Anggota (Ex Officio Pemimpin Divisi Human Capital)

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Agar Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerja secara efektif, maka Komite Nominasi dan Remunerasi harus mempunyai suatu pedoman yang mengatur secara jelas peran dan tanggung jawab komite dan lingkup kerjanya, yang ditetapkan atas keputusan Dewan Komisaris Perseroan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi terakhir diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/SK/DKO/2022 tanggal 4 Januari 2022 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas yang terkait dengan Nominasi, yaitu:

1. Memberikan rekomendasi pemberhentian, pengisian, dan penggantian Pengurus untuk disampaikan atas nama Dewan Komisaris kepada RUPS.
2. Memberikan rekomendasi mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
3. Memberikan usulan yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Pengurus kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
5. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi calon anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
7. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi
8. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

Tugas yang terkait dengan Remunerasi, yaitu:

1. Mempelajari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kebijakan remunerasi, penetapan fasilitas dan tunjangan lainnya.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur remunerasi
 - b. Kebijakan atas remunerasi
 - c. Besaran atas remunerasi
3. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 2) harus memperhatikan:
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan sejenis dan skala usaha perusahaan dalam industri.
 - b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja perusahaan
 - c. Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - d. Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan bersifat variabel
4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
5. Mengevaluasi struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi yang berlaku pada Perseroan paling kurang 1 (satu) tahun sekali
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi berupa gaji, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b. Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi melalui Dewan Komisaris.
7. Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6) disampaikan dengan memperhatikan kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan remunerasi pegawai Perseroan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
10. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

Diding Sakri

Ketua merangkap Anggota Komisaris Independen Perseroan

Riwayat hidup singkat beliau dapat dilihat pada bab VIII Prospektus sub bab Pengawasan dan Pengurusan.

Rudie Kusmayadi
Anggota yang juga menjabat sebagai Komisaris Perseroan

Riwayat hidup singkat beliau dapat dilihat pada bab VIII Prospektus sub bab Pengawasan dan Pengurusan.

Toms Tohir
Anggota yang juga menjabat sebagai Komisaris Perseroan

Riwayat hidup singkat beliau dapat dilihat pada bab VIII Prospektus sub bab Pengawasan dan Pengurusan.

Sunu Widiyanto
Anggota

Warga negara Indonesia, Lahir di Pontianak, pada tahun 1983 saat ini berusia 40 tahun. Diangkat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0066/SK/DIR-CSE/2023 tanggal 28 Februari 2023.

Meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen dari Universitas Gajah Mada (2006), gelar Magister di bidang Manajemen dari Universitas Gajah Mada (2009) dan gelar Doktor / PHD di bidang Organizational Behavior dari University of Twente (2018). Beliau pernah bekerja sebagai Secretary Program International Business, Vocational Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Padjadjaran (2013-2014), Deputy Director for Research and Cooperation, Center for Management and Business Studies (CMBS), Faculty of Economics and Business, Universitas Padjadjaran (2018 - saat ini), Program Director Magister Management at Faculty of Economics and Business Universitas Padjadjaran Bandung Indonesia (2019 - saat ini) dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi bank bjb (2023 - saat ini).

Dadan Yonanda
Anggota

Warga negara Indonesia, Lahir di Majalengka, pada tahun 1972 saat ini berusia 51 tahun. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Human Capital sejak 24 Juli 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No 0871/SK/DIR-HC/2019

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1995. Beliau pernah bekerja di Pegawai Pimpinan / Rekrutmen PT Bank Export Import Indonesia (1996-1998), *Human Resources Strategic* PT Bank Mandiri (1999-2015) dan Pemimpin Divisi Human Capital Perseroan (2015-saat ini).

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Periode Januari hingga Desember 2023, Perseroan mengadakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sebanyak 16 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Farid Rahman*	16	16	100%
Muhadi**	10	10	100%
Rudie Kusmayadi***	2	2	100%
Setiawan Wangsaatmaja*	16	16	100%
Toms Tohir***	2	2	100%
Diding Sakri	16	16	100%
Fahlino F. Sjuib*	16	16	100%
Ernie Tisnawati Sule****	2	2	100%
Sunu Widiyanto*****	12	12	100%
Dadan Yonanda	16	16	100%

* Diberhentikan dengan hormat sebagai Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS Tahun 2024 tanggal 02 April 2024.

** Diberhentikan dengan hormat sebagai Komisaris berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023.

*** Pengangkatan sebagai Komisaris berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023 dan efektif menjabat pada tanggal 09 Agustus 2023

**** Berakhirnya masa jabatan Anggota KNR tanggal 28 Februari 2023.

***** Pengangkatan Anggota KNR terhitung mulai tanggal 28 Februari 2023

UNIT AUDIT INTERNAL

Pada tanggal Prospektus, Perseroan telah memiliki piagam audit internal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, dengan telah ditetapkannya Piagam Audit Internal PT Bank Pembangunan Daerah

Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 15 Juni 2022. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.1516/SK/DIR-HC/2018 tanggal 13 Desember 2018, telah ditetapkan Joko Hartono Kalisman selaku Pj Pemimpin Satuan Kerja Audit Internal.

Pihak yang ditunjuk sebagai kepala audit internal beserta tim adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Joko Hartono Kalisman	Pemimpin Satuan Kerja Audit Internal

Tugas dan Tanggung Jawab

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja audit internal tahunan
2. Melakukan evaluasi atas efektivitas semua tingkatan organisasi dalam pengelolaan sumber daya Perseroan serta ketaatan kepada kebhikhan dan prosedur yang telah ditetapkan
3. Memberi rekomendasi penyempurnaan pengendalian internal untuk melindungi sumber daya, mendorong pertumbuhan, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip kehati-hatian
4. Menyusun dan memelihara kebijakan dan prosedur kerja audit internal sesuai standar audit terkini
5. Menetapkan rencana kerja pengembangan kompetensi auditor intern, serta menyusun program evaluasi mutu kegiatan audit internal
6. Membuat dan menyampaikan laporan hasil audit, memonitor pelaksanaan tindak lanjut, serta mengevaluasi kecukupan penyelesaian tindak lanjut
7. Memberikan konsultasi, baik berdasarkan kebutuhan pihak auditee ataupun secara proaktif dari SKAI. Aktivitas konsultasi tidak berarti bahwa subjek pembahasan akan dikecualikan dari pemeriksaan
8. Melakukan pemeriksaan khusus atau investigasi dan memberikan rekomendasi sanksi sesuai hasil pemeriksaan
9. Bekerja sama dengan Komite Audit dalam hal evaluasi dan penyempurnaan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan pengendalian internal
10. Mengungkapkan segala bentuk potensi benturan kepentingan atas kegiatan atau objek yang akan diperiksa, termasuk masa tunggu atas posisi sebelum melaksanakan penugasan audit.
11. Melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas dan keberlanjutan implementasi Standar Sertifikasi Manajemen di Perseroan

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Komite Pemantau Risiko merupakan alat kelengkapan Dewan Komisaris yang berfungsi memonitor risiko dan menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perseroan, mengevaluasi perbaikan yang dilakukan atas kebijakan, prosedur dan praktik manajemen risiko Perseroan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan risiko dengan baik, terutama pada pengelolaan risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko bank lainnya.

Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan:

1. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.6/SK/DKO/2024 tanggal 3 April 2024 Tentang Pembagian Tugas Dan Pelaksanaan Kegiatan Dewan Komisaris Serta Komite-Komite ("SK Komisaris No.6/2024").

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Diding Sakri	Ketua merangkap anggota (Komisaris Independen)
Rudie Kusmayadi	Anggota (Komisaris)
Toms Tohir	Anggota (Komisaris)
Maman Setiawan	Anggota (Pihak Independen)
Tettet Fitrianti	Anggota (Pihak Independen)

Piagam Komite Pemantau Risiko

Perseroan memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor No.01/SK/DKO/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Berikut ini tugas dan tanggung jawab dari Komite Pemantau Risiko:

1. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko bank **bjb** secara triwulanan serta laporan lain atau hasil kajian yang relevan dan memberikan pendapat berupa saran dan atau rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan.
2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan tingkat kesehatan bank untuk bagian profil risiko dan *Good Corporate Governance*.
3. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko bank **bjb**.
4. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan Komite Pemantau risiko sesuai ketentuan yang berlaku

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan:

Diding Sakri

Ketua yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan

Riwayat hidup singkat beliau dapat dilihat pada bab VIII Prospektus sub bab Pengawasan dan Pengurusan.

Rudie Kusmayadi

Anggota yang juga menjabat sebagai Komisaris Perseroan

Riwayat hidup singkat beliau dapat dilihat pada bab VIII Prospektus sub bab Pengawasan dan Pengurusan.

Tomsi Tohir

Anggota yang juga menjabat sebagai Komisaris Perseroan

Warga negara Indonesia, Lahir di Tanjung Kara, pada tahun 1969 saat ini berusia 54 tahun. Meraih Pasca Sarjana di bidang Kajian Ilmu Kepolisian dari Universitas Indonesia (2001). Beliau pernah bekerja sebagai Kapolda Provinsi Nusa Tenggara Barat (2019-2020), Sahli Sospol Kapolri (2020-2022), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (2002-saat ini).

Maman Setiawan

Anggota

Warga negara Indonesia, Lahir di Jakarta, pada tahun 1978 saat ini berusia 45 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Universitas Padjadjaran (2001), gelar Magister dari Fakultas Teknologi Industri dengan jurusan Manajemen Industri di Intitut Teknologi Bandung (2004), dan gelar PhD Ekonomi dari Wageningen University (2012). Beliau pernah bekerja sebagai Regional Chief Economist of BNI (2020-2023), Research Partner of BI Institute (2021), Associated Lecturer (Dosen Pembina) for Pasundan University (2020-Present), Professor in Industrial Organization/Industrial Economics, Padjadjaran University (2021-saat ini), Reviewer for Research Grant Proposal, Universitas Indonesia (2022), Reviewer of Credit Score Assesment, Kemendikbudristek RI (2023-saat ini).

Tettet Fitrijanti

Anggota

Warga negara Indonesia, Lahir di Tarakan, pada tahun 1968 saat ini berusia 55 tahun. Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Padjadjaran (1987), gelar Magister Akuntansi dari Universitas Gadjah pada (1998), gelar Doktor di bidang Keuangan pada Universitas Padjadjaran (2004). Beliau pernah bekerja sebagai Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik FEB UNPAD (2021 - sekarang), Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (2016 - 2021) dan Dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (1995 - sekarang)

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Periode Januari hingga Desember 2023, Perseroan mengadakan rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 8 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Diding Sakri	8	8	100%
Farid Rahman*	8	8	100%
Fahlino F. Sjuib*	8	8	100%

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Muhadi**	2	2	100%
Rudie Kusmayadi***	4	4	100%
Setiawan Wangsaatmaja*	8	6	75%
Toms Tohir***	4	4	100%
Tettet Fitrijanti	8	8	100%
Nury Effendi****	5	5	100%

* Diberhentikan dengan hormat sebagai Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS Tahun 2024 tanggal 02 April 2024.

** Diberhentikan dengan hormat berdasarkan salah satu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023

*** Diangkat berdasarkan salah satu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2023 dan Efektif menjabat pada tanggal 9 Agustus 2023 berdasarkan hasil keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

**** Berakhirnya masa jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen pada tanggal 28 Oktober 2023.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko merupakan komite dalam sistem manajemen risiko bank yang berkedudukan di Kantor Pusat dan bersifat non struktural dan independen terhadap *Risk Taking Unit*.

Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. Surat Keputusan Dewan Direksi Perseroan Nomor 0166/SK/DIR-MRI/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Pedoman Komite Manajemen Risiko.
3. Surat Keputusan Dewan Direksi Perseroan Nomor 0403/SK/DIR-MRI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Kebijakan Manajemen Risiko.

Proses KMR secara spesifik terdapat dalam Pedoman Komite Manajemen Risiko yang telah disahkan dalam Surat Keputusan Direksi bank **bjb** nomor 0166/SK/DIR-MRI/2022 Tanggal 21 April 2022 Tentang Pedoman Komite Manajemen Risiko. Susunan keanggotaan komite sesuai dengan ketentuan mengenai struktur organisasi yang berlaku dan dapat dilakukan perubahan apabila diperlukan. Struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Ketua	: Direktur yang membawahkan Divisi Manajemen Risiko
Sekretaris	: Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (Merangkap sebagai anggota tetap tanpa hak suara);
Anggota tidak tetap	: Direktur Utama
Anggota Tetap	: Seluruh Direksi lainnya (tidak termasuk Direktur Utama)
Anggota tetap Tanpa Hak Suara	: - Pemimpin Divisi Kepatuhan : - Pemimpin Divisi Audit Internal : - Pemimpin Divisi Credit Risk Review : - Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis : - Pemimpin Divisi Change Management Office : - Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Berikut ini tugas dan tanggung jawab dari Komite Manajemen Risiko:

- a. Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal (*stress*);
- b. Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil Risiko bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi;
- c. Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang memiliki kondisi khusus, seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui batasan yang telah ditetapkan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Komite Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Cecep Trisna	Ketua Komite (Direktur Kepatuhan)
Asep Dani Fadilah	Sekretaris Komite
Yuddy Renaldi	Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara
Nia Kania	Anggota Tetap Dengan Hak Suara
Suartini	Anggota Tetap Dengan Hak Suara
Nancy Adistiyasari	Anggota Tetap Dengan Hak Suara
Tedi Setiawan	Anggota Tetap Dengan Hak Suara
Rio Lanasier	Anggota Tetap Dengan Hak Suara
Joko Hartono Kalisman	Anggota Tetap Tanpa Hak Suara
Deden Hilman	Anggota Tetap Tanpa Hak Suara

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan:

Cecep Trisna
Ketua

Riwayat hidup singkat beliau dapat dilihat pada bab VIII Prospektus sub bab Pengawasan dan Pengurusan.

Asep Dani Fadilah
Sekretaris

Warga negara Indonesia, Lahir pada tahun 1971 saat ini berusia 52 tahun. Meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen dari STIE Kuningan (2000). Mendapat gelar Magister di bidang Manajemen dari STIE Ganesha (2003) dan Magister di bidang Hukum Ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung (2018). Beliau pernah bekerja sebagai Pemimpin Divisi Hukum bank bjb (2018), Pemimpin Divisi Manajemen Risiko bank bjb (2019) dan Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Kredit, Pasar & Terintegrasi bank bjb (2023-saat ini).

Yuddy Renaldi
Anggota Tidak Tetap

Riwayat hidup singkat beliau dapat dilihat pada bab VIII Prospektus sub bab Pengawasan dan Pengurusan.

Nancy Adistiyasari
Anggota Tetap

Riwayat hidup singkat beliau dapat dilihat pada bab VIII Prospektus sub bab Pengawasan dan Pengurusan.

Tedi Setiawan
Anggota Tetap

Riwayat hidup singkat beliau dapat dilihat pada bab VIII Prospektus sub bab Pengawasan dan Pengurusan.

Rio Lanasier
Anggota Tetap

Riwayat hidup singkat beliau dapat dilihat pada bab VIII Prospektus sub bab Pengawasan dan Pengurusan.

Joko Hartono Kalisman
Anggota Tanpa Hak Suara

Warga negara Indonesia, Lahir pada tahun 1973 saat ini berusia 51 tahun. Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Padjajaran (2002), mendapat gelar Magister di bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Padjajaran (2006), Meraih gelar Doktor di bidang Manajemen Pemasaran dari Universitas Padjajaran (2019). Beliau pernah bekerja sebagai CEO Regional Kantor Wilayah 5 bank bjb (2018), Pemimpin Divisi KPR & KKB (2018) dan Pemimpin Satuan Kerja Audit Internal (2018-saat ini).

Deden Hilman
Anggota Tanpa Hak Suara

Warga negara Indonesia, Lahir pada tahun 1974 saat ini berusia 50 tahun. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran (1998) dan mendapat gelar Magister bidang Hukum Ekonomi & Bisnis dari Universitas Padjadjaran Bandung (2010). Beliau pernah bekerja sebagai eputy CEO Regional Kantor Wilayah 5 bank bjb (2021) dan Pemimpin Divisi Kepatuhan & APU PPT (2023-saat ini).

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Periode Januari hingga Desember 2023, Perseroan mengadakan rapat Komite Manajemen Risiko sebanyak 8 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Cecep Trisna	8	8	100%
Asep Dani Fadillah	8	8	100%
Yuddy Renaldi	8	8	100%
Nia Kania*	8	8	100%
Suartini*	8	8	100%
Nancy Adistyasari	8	8	100%
Tedi Setiawan	8	8	100%
Rio Lanasier	8	8	100%
Joko Hartono Kalisman	8	8	100%
Deden Hilman	8	8	100%

* Diberhentikan dengan hormat sebagai Direksi berdasarkan keputusan RUPS Tahun 2024 tanggal 02 April 2024.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko

No	Tanggal	Agenda
1	9 Januari 2023	Pembahasan Limit Switching Portofolio Guidelines Segmen Korporasi dan Komersial
2	18 Januari 2023	Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank Secara Individu Posisi Desember Tahun 2022
3	24 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> Risk Appetite Statement dan Risk Tolerance terkait Teknologi Informasi Limit kewenangan memutus biaya operasional Portofolio Guideline Segmen Korporasi dan Komersial
4	17 April 2023	Profil Risiko Bank secara Individu Posisi TW I Tahun 2023
5	17 Juli 2023	Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank Secara Individu Semester I Tahun 2023
6	25 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Risk Appetite Statement dan Risk Tolerance Limit Switching Credit Portofolio Guideline Segmen Korporasi
7	16 Oktober 2023	Pembahasan Profil Risiko Bank secara Individu Posisi 30 September 2023
8	18 Oktober 2023	Pembahasan Profil Risiko Bank secara Individu Posisi 30 September 2023

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan dibentuk berdasarkan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/SK/DK/2016 tanggal 31 Maret 2016 Tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.6/SK/DKO/2024 tanggal 3 April 2024 Tentang Pembagian Tugas Dan Pelaksanaan Kegiatan Dewan Komisaris Serta Komite-Komite ("SK Komisaris No.6/2024").

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Diding Sakri	Ketua merangkap anggota (Komisaris Independen)
Rudie Kusmayadi	Anggota (Komisaris)
Toms Tohir	Anggota (Komisaris)
Humbul Kristiawan	Anggota (Pihak Independen)
Agus Riswanto	Anggota (<i>Ex Officio</i> dari Dewan Komisaris bank bjb Syariah)
Endjo Sunidja	Anggota <i>Ex Officio</i> dari Dewan Pengawas bank bjb Syariah)
Teti Sarifeni	Anggota (<i>Ex Officio</i> dari Dewan Komisaris PT BPR Intan Jabar)
Hana Dartiwan	Anggota (<i>Ex Officio</i> dari Dewan Komisaris PT bjb Sekuritas)

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTT) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.06/SK/DKO/2021 tanggal 28 Desember 2021 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Serta Struktur Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTT).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan tindak lanjut hasil audit dari pihak intern dan ekstern.
3. Melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Tata Terintegrasi yang telah ditetapkan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
5. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai arahan Dewan Komisaris dan ketentuan yang berlaku di Perseroan.
6. Membuat laporan hasil evaluasi dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap Triwulan.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan:

Diding Sakri

Anggota yang juga menjabat Komisaris Independen Perseroan

Riwayat hidup singkat beliau dapat dilihat pada bab VIII Prospektus sub bab Pengawasan dan Pengurusan.

Rudie Kusmayadi

Anggota yang juga menjabat Komisaris Perseroan

Riwayat hidup singkat beliau dapat dilihat pada bab VIII Prospektus sub bab Pengawasan dan Pengurusan.

Toms Tohir

Anggota yang juga menjabat Komisaris Perseroan

Riwayat hidup singkat beliau dapat dilihat pada bab VIII Prospektus sub bab Pengawasan dan Pengurusan.

Humbul Kristiawan

Anggota

Warga negara Indonesia, Lahir di Sukabumi, pada tahun 1975 saat ini berusia 49 tahun. Meraih Sarjana di bidang Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Padjadjaran (1997) dan Master of Business Administration di Institut Teknologi Bandung (2012). Beliau pernah bekerja sebagai Partner di Eloitte South East Asia (2014-2016), Partner RSM AAJ (2017-2018), Anggota Komite Pemantau Risiko PT Pegadaian Tahun 2020 dan Anggota Komite Audit PT Bank UOB Indonesia Tahun 2021 sampai dengan saat ini.

Agus Riswanto
Anggota (Ex Officio dari Dewan Komisaris bank bjb Syariah)

Warga negara Indonesia, Lahir di Bandung, pada tahun 1961 saat ini berusia 62 tahun. Meraih Sarjana Manajemen dari Universitas Islam Nusantara, Bandung (1989). Beliau pernah bekerja sebagai Pemimpin Divisi Keuangan & Akuntansi Perseroan (2011-2014), Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan Perseroan (2014-2016), SEVP Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan Perseroan (2016– 2020), Komisaris bank bjb syariah (2020-2022) dan Komisaris Utama Independen bank bjb syariah (2022-saat ini).

Endjo Sunidja
Anggota (Ex Officio dari Dewan Pengawas PT bank bjb Syariah)

Warga negara Indonesia, Lahir di Bandung, pada tahun 1950 saat ini berusia 74 tahun. Meraih Sarjana Muda dari Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta (1975), Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Indonesia (1983), Magister Manajemen dari Universitas Padjajaran, Bandung (1997) dan Magister Agama Studi Ekonomi Islam dari UIN, Bandung (2005). Beliau pernah bekerja sebagai Bendahara dan Manajer Investasi Yakes PT Telkom (1971-2006), Instruktur Diklat PT Telkom (1978-2005), Dosen STIE Makassar (1983-1988), Dosen STIE Tridarma Bandung (1996-2000), Dosen Telkom University (1996-sekarang), Ketua MUI Jawa Barat (2000-saat ini), Komisaris PT MUawanah Al-Ma'some (Quazam) Bandung (2007-saat ini), Komisaris PT Al-Ma'some Travel, Umroh dan Haji (2008-2015), Anggota Dewan Pengawas Syariah bank bjb syariah (2012- saat ini) dan Wakil Ketua Umum FK-KBIHU (2014- saat ini).

Teti Sarifeni
Anggota (Ex Officio dari Dewan Komisaris PT BPR Intan Jabar)

Warga negara Indonesia, Lahir di Bandung, pada tahun 1964 saat ini berusia 59 tahun. Meraih Dipoloma Akuntansi dari Universitas Padjadjaran (1987), Sarjana Ilmi Sosial (Fisip) dari Universitas Garut (1995) dan Magister Administrasi Negara dari Universitas Garut (2002). Beliau pernah bekerja sebagai Kepala Bdan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut (2016-2021), Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekertariat Daerah Kabupaten Garut (2022), Komisaris Utama PT BPR Intan Jabar (2023-saat ini).

Hana Dartiwan
Anggota (Ex Officio dari Dewan Komisaris PT bjb Sekuritas)

Riwayat hidup singkat beliau dapat dilihat pada bab VIII Prospektus sub bab Pengawasan dan Pengurusan.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Periode Januari hingga Desember 2023, Perseroan mengadakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 4 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Fahlino F. Sjuib*	4	4	100%
Farid Rahman*	4	4	100%
Diding Sakri	4	4	100%
Muhadi**	1	1	100%
Rudie Kusmayadi***	2	2	100%
Setiawan Wangsaatmaja*	4	4	100%
Toms Tohir***	2	2	100%
Humbul Kristiawan	4	4	100%

* Diberhentikan dengan hormat sebagai Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS Tahun 2024 tanggal 02 April 2024.

** Diberhentikan dengan hormat berdasarkan salah satu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023

*** Diangkat berdasarkan salah satu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2023 dan Efektif menjabat pada tanggal 9 Agustus 2023 berdasarkan hasil keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Perseroan secara berkesinambungan yang kualitas desain dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh pejabat dan pegawai Perseroan. SPI dirancang untuk dapat memberikan yang memadai guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan Perseroan, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (fraud) dan

pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Ruang lingkup pelaksanaan audit umum dalam rangka sistem pengendalian internal meliputi:

1. Aspek Keuangan, Informasi dan Komunikasi:

Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab

masing-masing. Sistem akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat/membukukan dan melaporkan transaksi Perseroan. Untuk menjamin data akuntansi yang akurat dan konsisten dengan data yang tersedia berdasarkan hasil olahan sistem maka proses rekonsiliasi antara data akuntansi dan sistem informasi manajemen wajib dilaksanakan secara berkala atau sekurang-kurangnya setiap bulan.

Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris. Sistem pengendalian intern yang efektif sekurang-kurangnya menyediakan data/informasi intern yang cukup dan menyeluruh mengenai keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, informasi pasar (kondisi eksternal) dan setiap kejadian serta kondisi yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem Komunikasi mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal.

Sistem pengendalian intern Perseroan menyediakan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh pegawai Perseroan sepenuhnya memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Aspek Operasional, meliputi:

a. Top Level Review

Direksi secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dan non operasional dari pejabat eksekutif sehingga memungkinkan untuk mereview ulang hasil kemajuan (realisasi) dibandingkan dengan target yang akan dicapai, seperti laporan keuangan dibandingkan dengan rencana kerja anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan review tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya (fraud).

b. *Functional Review (Kaji Ulang Kinerja)*

Adanya review terhadap kinerja bank yang meliputi aktivitas operasional dan non operasional bank. Review ulang ini dilaksanakan oleh unit pengendalian terkait dengan frekuensi sesuai tuntutan dan kebutuhan, cakupan review tersebut antara lain:

Melakukan review ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh satuan kerja manajemen risiko.

- i. Menganalisis data kegiatan operasional dan non operasional, baik data yang terkait dengan risiko maupun
- ii. data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan output (laporan) yang dihasilkan oleh satuan kerja manajemen risiko.
- iii. Melakukan review ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran sehingga bisa:

c. *Pengendalian Sistem Informasi*

- i. Perseroan melakukan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan melaksanakan prosedur otorisasi, sesuai dengan ketentuan intern
- ii. Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam dua kriteria, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi
- iii. Pengendalian umum meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan software
- iv. Pengendalian aplikasi diterapkan terhadap program yang digunakan Perseroan dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi dapat memantau terjadinya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

SKAI, Direksi, Dewan Komisaris serta Komite Audit telah melakukan pemantauan terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. SKAI, Direksi, Dewan Komisaris serta Komite Audit memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian intern berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal serta harus meningkatkan kapasitas sistem pengendalian internal tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan. Pada tahun 2023, SKAI, Direksi, Dewan Komisaris serta Komite Audit menilai bahwa sistem pengendalian internal telah memadai.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR*)

Perseroan dalam memformulasikan program tanggung jawab sosial, Perseroan membagi program CSR menjadi 7 aspek yaitu:

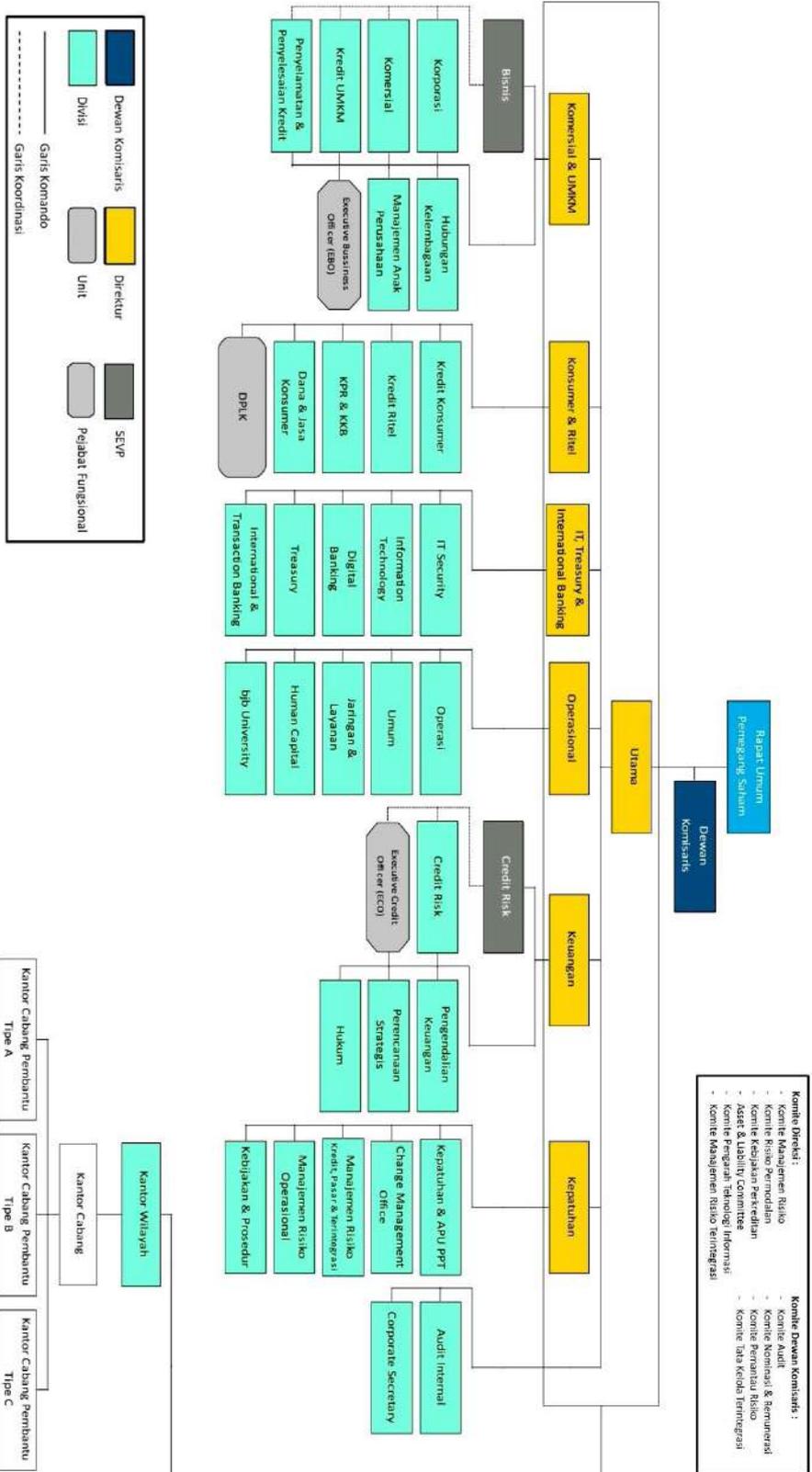
1. Aspek Hak Asasi Manusia
2. Aspek Operasi Yang Adil
3. Aspek Lingkungan Hidup
4. Aspek Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja
5. Aspek Tanggung Jawab Terhadap Konsumen
6. Aspek Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
7. Aspek Tanggung Jawab Kepada Pemasok

Tanggung jawab sosial yang pernah dilakukan Perseroan.

Kegiatan	Rincian Kegiatan
Prasarana dan Sarana Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan/perbaikan infrastruktur - Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik - Peningkatan sarana prasarana olahraga - Pembangunan museum/monumen sejarah - Bantuan sarana prasarana pengelolaan sampah - Pengembangan potensi ekowisata - Bantuan sarana prasarana penanggulangan bencana - Pembangunan/penataan taman - Pembangunan sarana air bersih
Sosial Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan ekonomi masyarakat - Pelatihan kewirausahaan - Santunan - Bantuan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 - Bantuan untuk korban/penanggulangan bencana - Bantuan untuk program ketahanan pangan - perbaikan rumah tidak layak huni - Apresiasi bagi atlet - Perbaikan/peningkatan kualitas lingkungan hidup (penanaman pohon, pengelolaan sampah) - penataan kawasan lembur bjb
Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan/perbaikan sarana prasarana ibadah - Pengadaan perlengkapan ibadah - Kegiatan keagamaan
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan/Peningkatan sarana prasarana rumah Sakit - Santunan - Pengobatan gratis - Khitanan Massal - Pemeriksaan kesehatan - Bantuan bagi penyandang disabilitas - Pengadaan mobil ambulance, mobil jenazah

Kegiatan	Rincian Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none">- Renovasi Posyandu- Bantuan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan/perbaikan sarana prasarana pendidikan- perbaikan/Pengadaan fasilitas sekolah- Pelestarian budaya- taman literasi

STRUKTUR ORGANISASI



A.6. SUMBER DAYA MANUSIA

Sejalan dengan amanah Corporate Plan dan Strategi Perseroan dalam mendorong pertumbuhan bisnis dan menciptakan produktivitas pegawai yang berkelanjutan, human capital (HC) bank bjb terus memperkuat fondasi organisasi dengan meningkatkan kapabilitas human capital. Melalui beragam program, human capital bank bjb berkomitmen untuk mendorong seluruh insan bank bjb memiliki business mindset yang kuat dan budaya proaktif sebagai bagian dari transformasi organisasi.

Human Capital Statagic Plan (HCSP) 2021-2025 menjadi acuan bagi bank bjb dalam mewujudkan pilar-pilar strategi pengelolaan

human capital dan menciptakan talent terbaik yang unggul, handal, dan tangguh serta bertaraf nasional yang mampu berkompetisi di Industri Keuangan Indonesia.

Sebagai jawaban terhadap perkembangan organisasi dan perubahan bisnis yang dinamis, Divisi Human Capital secara responsif turut menyelaraskan Strategi, Visi-Misi pengelolaan human capital yang merupakan unsur fundamental dalam membangun insan Great People bjb yang Unggul, Handal dan Tangguh. Productivity menjadi fokus utama dalam mendorong pertumbuhan bisnis Perseroan, sehingga dilakukan peningkatan pengelolaan fungsi human capital terutama dalam hal rekrutmen, kompetensi, penajaman KPI, system reward, pengembangan budaya dan penerapan strategi talent management yang kokoh serta berkelanjutan. Talent Development dilaksanakan pada setiap level Jabatan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan karir pegawai sebagai bagian dari Program Succession Planning bank bjb.

Tema budaya di Tahun 2023 yang akan ditetapkan bertujuan untuk membangun budaya kerja dengan standar kualitas kinerja yang tinggi, meningkatkan budaya kepatuhan dan sadar risiko pegawai, serta menumbuhkan tata kelola dan bisnis proses dalam pencapaian kinerja yang sistematis, efektif dan efisien. Beberapa referensi perilaku kerja dalam penyusunan tema budaya Perusahaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perilaku bekerja yang selalu membiasakan sesuatu yang benar, bukan membenarkan sesuatu yang biasa atau yang sudah menjadi kebiasaan.
2. Kewajiban untuk melakukan review dan refreshment dalam tata kelola dan bisnis proses yang berlaku.
3. Bekerja secara kolaborasi dan sinergi antar Pegawai dan Unit Kerja.
4. Pemimpin harus menjadi Role Model dan Change Leader untuk menciptakan budaya kerja yang lebih baik.

Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah karyawan Perseroan sebanyak 7.327 karyawan yang terdiri dari 7.300 karyawan tetap dan 27 karyawan tidak tetap. Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi karyawan menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan, status, aktivitas utama dan lokasi:

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Lokasi

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Kantor Pusat	1.702	1.692
Kantor Wilayah 1	1.843	1.877
Kantor Wilayah 2	1.249	1.301
Kantor Wilayah 3	1.291	1.312
Kantor Wilayah 4	842	873
Kantor Wilayah 5	373	358
Jumlah	7.300	7.412

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
≥ Executive Management	31	33
Senior Management	179	182
Middle Management	642	657
First Line Management	1.723	1.676
Staff	4.725	4.864
Jumlah	7.300	7.412

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Usia

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
> 50 tahun	176	183
41 – 50 tahun	783	684
31 – 40 tahun	4.760	4.700
18 – 30 tahun	1.581	1.845
Jumlah	7.300	7.412

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Diploma	602	696
Sarjana	5.955	5.994
Pasca Sarjana	736	715
Doktor	7	7
Jumlah	7.300	7.412

Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Tetap	7.300	7.412
Kontrak	27	39
Jumlah	7.327	7.451

Komposisi Karyawan PT Bank BJB Syariah

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Tetap	1.145	1.039
Kontrak	17	24
Jumlah	1162	1063

Komposisi Karyawan PT BPR Intan Jabar

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Tetap	97	131
Kontrak	4	3
Jumlah	101	134

Komposisi Karyawan PT BJB Sekuritas

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Tetap PT BJB Sekuritas	11	5
Tetap bank bjb yang ditempatkan di PT BJB Sekuritas	12	12
Kontrak	-	-
Jumlah	23	17

Komposisi Karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Tetap	787	697
Kontrak	2	98
Jumlah	789	795

Sarana Pendidikan dan Pelatihan

Di seluruh level organisasi Perseroan, setiap pegawai memiliki kesempatan yang setara dalam proses pengembangan karir sesuai dengan kinerja, kompetensi, pengalaman dan kriteria lainnya yang ditetapkan serta kesempatan dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Hal ini sesuai dengan kebijakan terkait pengembangan kompetensi karyawan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No.704/SK-DIR/ET/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan (PP).

Program kegiatan bjb University Perseroan, baik berupa *in house training*, *public training/seminar/workshop* (dalam negeri maupun luar negeri). Program pendidikan dan pelatihan tersebut telah diupayakan untuk disesuaikan dan diselaraskan dengan kebutuhan dan bidang fokus pendidikan masing-masing unit kerja.

Sarana Kesejahteraan

Perseroan memiliki sarana kesejahteraan yang diberikan kepada seluruh karyawan meliputi fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, seni dan hobi, serta fasilitas rekreasi. Dengan adanya sarana kesejahteraan yang diberikan Perseroan kepada karyawan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas dari masing-masing karyawan Perseroan.

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Tenaga Kerja Ahli

Pada tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pegawai yang dengan ketidakteradaannya, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usahanya.

Serikat Pekerja

Perseroan memiliki serikat karyawan yang mengakomodir aspirasi karyawan, yaitu Serikat Karyawan bank bjb atau disingkat "SEKAR bank bjb" yang didirikan pada tanggal 8 Juni 2007, yang perubahan anggaran dasar terakhirnya dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar Serikat Karyawan bank bjb tanggal 19 Februari 2018 yang telah dicatat dalam buku daftar Dian Indrawaty Gunawan, SH, M.Kn. Notaris di Kota Bandung pada no 66.- tanggal 19 Februari 2018.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Serikat Karyawan Bank bjb No.004/SK-DPP/SEKAR-bankbjb/11/2023 tanggal 17 November 2023 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Dan Dewan Pengurus Wilayah Serikat Karyawan bank bjb Periode 2023-2026, adalah sebagai berikut:

Susunan Pengurus - Majelis Pertimbangan Organisasi

Ketua : Tri Ramadhy

Susunan Pengurus - Dewan Pengurus Pusat

Ketua Umum : Khandinar Shidik Megantara
 Ketua Harian : Ferry Firmansyah
 Sekretaris Jenderal : Agam Gumbilar
 Bendahara I : Retno Wulandari
 Bendahara II : Kharisya Bella
 Bidang Komunikasi
 Koordinator : Fahmi Rusyad

Bidang Hubungan Industrial

Koordinator : Rendy Martiandita
Anggota : Ria Nursikmawati

Bidang advokasi

Koordinator : Eryandi Nur prasetyo
Anggota : Derian Bagja

Bidang Usaha

Koordinator : Ginanjar Nugraha
Anggota : Adham Mustofa

Bidang Organisasi

Koordinator : Zumara Ibrahim
Anggota : Aggy Achmadi

Bidang Kepedulian Sosial

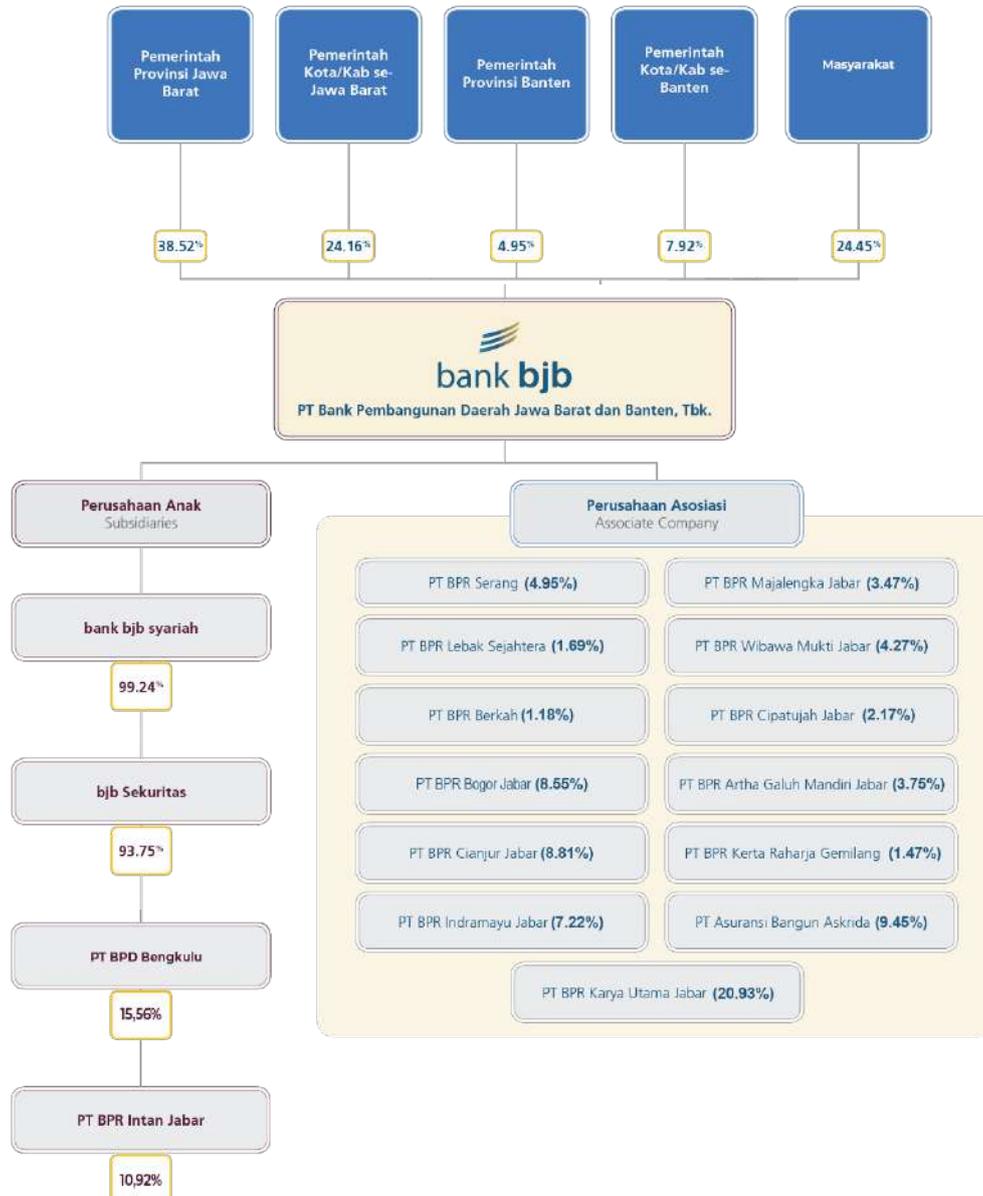
Koordinator : Avis Alfian
Anggota : Deni Rahmat

Susunan Pengurus - Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW)

DPW I (Kanwil I) : Ari Prasetya
DPW II (Kanwil II) : Gustam Candra Prasetya
DPW III (Kanwil III) : Sunaryo
DPW IV (Kanwil IV) : Yadi Setia Permana
DPW V (Kanwil V) : R. Herdian Wibawa Mukti

A.7. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN, ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Berikut adalah diagram kepemilikan langsung Perseroan kepada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi (Entitas di mana Perseroan memiliki penyertaan saham minoritas):



Pada tanggal Prospektus, telah terdapat orang-perorangan (individu) yang menjadi pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dimana berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat No.7944/KH.03.02.04/Bumdinvesadbang tanggal 22 September 2023, Perihal Tanggapan Penetapan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat diwakili oleh Bey Triadi Machmudin dalam jabatannya selaku Pj. Gubernur Jawa Barat adalah pemilik manfaat (Beneficial Owner) dari Perseroan.

A.8. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi yang dimiliki langsung yang berkontribusi sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap total aset, total liabilitas atau laba sebelum pajak Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah)

Entitas Anak

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Kepemilikan	Tahun Beroperasi	Jumlah Aset per 31 Desember 2023
1	PT Bank BJB Syariah	Perbankan	99,24%	2010	2010	13.639.709
2	PT BPR Intan Jabar	Bank Perkreditan	10,92%	1998	2015	28.935
3	PT BJB Sekuritas	Perusahaan Efek Daerah	93,75%	2020	2015	31.646
4	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	Bank Perkreditan	15,56%	2024	1971	9.042.102

Entitas Asosiasi

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Kepemilikan	Tahun Beroperasi	Jumlah Aset per 31 Desember 2023
1	PT Asuransi Bangun Askrida	Asuransi	9,45%	2008	1989	3.861.427
2	PT. BPR Serang	Bank Perkreditan	4,95%	1998	2008	581.762
3	PT. BPR Lebak Sejahtera	Bank Perkreditan	1,69%	1998	2017	61.443
4	PT. BPR Berkah	Bank Perkreditan	1,18%	1998	1998	301.718
5	PT BPR Bogor Jabar	Bank Perkreditan	8,55%	1998	1999	114.654
6	PT BPR Cianjur Jabar	Bank Perkreditan	8,81%	1998	2015	164.417
7	PT BPR Wibawa Mukti Jabar	Bank Perkreditan	4,27%	1998	1998	66.542
8	PT. BPR Cipatujah Jabar	Bank Perkreditan	2,17%	1998	2015	376.874
9	PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar	Bank Perkreditan	3,75%	1998	1998	26.655
10	PT. BPR Kerta Raharja	Bank Perkreditan	1,47%	2007	2008	589.680
11	PT BPR Majalengka Jabar	Bank Perkreditan	3,47%	1998	2017	86.720
12	PT BPR Karya Utama Jabar	Bank Perkreditan	20,93%	1998	2017	228.723
13	PT BPR Indramayu Jabar	Bank Perkreditan	7,22%	1998	1998	181.014

Berikut merupakan keterangan singkat masing-masing Entitas Anak yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan:

PT Bank BJB Syariah (“BJBS”)

i. Riwayat Singkat

PT Bank Jabar Banten Syariah (“BJBS”), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan hukum di Kota Bandung didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.04 tanggal 15 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-04317.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0006426.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 (“**Akta Pendirian No.4/2010**”).

BJBS merupakan anak perusahaan hasil dari pemisahan (spin off) Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. ke dalam PT Bank Jabar Banten Syariah No.3 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Sejak pendirian, anggaran dasar BJBS telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir anggaran dasar BJBS adalah didasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya No.50 tanggal 16 Nopember 2023 yang dibuat di hadapan R. Tedy Suwarman, S.H., Notaris di Kota Bandung, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-AH.01.03-0156389 tanggal 14 Desember 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0253574.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Desember 2023 (“**Akta PKR No.50/2023**”), telah dilakukan antara lain perubahan Pasal 12 tentang Direksi dan Pasal 15 tentang Dewan Komisaris dan penyusunan kembali seluruh isi anggaran dasar BJBS.

ii. Permodalan

Komposisi permodalan BJBS berdasarkan Akta PKR No.50/2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham: Rp.250,00		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:	12.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
a. Perseroan	7.327.560.496	1.831.890.124.000	99,24
a. PT Banten Global Development	56.000.000	14.000.000.000	0,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.383.560.496	1.845.890.123.995	100,00
Jumlah saham dalam portepel:	672.439.504	154.109.876.005	

iii. Susunan Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.02 tanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan R. Tedy Suwarman, S.H., Notaris di Kota Bandung, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-AH.01.09-0148886 tanggal 7 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0151185.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 7 Agustus 2023 (“**Akta PKR No.02/2023**”) jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya No.49 tanggal 16 Nopember 2023 yang dibuat di hadapan R. Tedy Suwarman, S.H., Notaris di Kota Bandung, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-AH.01.09-0195963 tanggal 14 Desember 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0252917.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Desember 2023 (“**Akta PKR No.49/2023**”) jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.123 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat di hadapan R. Tedy Suwarman, S.H., Notaris di Kota Bandung, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-AH.01.09-0166343 tanggal 26 April 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0081434.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 26 April 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BJBS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen	:	Agus Riswanto
Komisaris	:	Isa Anwari
Komisaris	:	Didi Suhardi
Komisaris independen	:	Rio Febrian Wilantara

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Beny Riswandi*)
Direktur Operasional	:	Vicky Fitriadi
Direktur Kepatuhan	:	Anwar Munawar.
Direktur Bisnis	:	Ita Garneita;

*) Pengangkatan Beny Riswandi sebagai Direktur Utama baru akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

iv. Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usaha utama yang dijalankan, BJBS telah memiliki izin operasional yaitu Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/35/KEP.GBI/2010 tanggal 30 April 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Jabar Banten Syariah, yang berisikan mengenai pemberian izin kepada BJBS untuk melakukan usaha bank umum syariah.

v. Ikhtisar Data Keuangan Penting

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Total Aset	13.649.880	12.445.811
Total Liabilitas	2.988.577	2.740.101
Total Dana Syirkah Temporer	9.272.835	8.374.424
Total Ekuitas	1.388.467	1.331.286

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Total Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai Mudharib	937.385	781.855
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	351.786	233.998
(Rugi) Laba Tahun Berjalan	58.517	101.709

vi. Analisis Keuangan

Total Aset

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Total Aset Entitas Anak ini dari untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.649.880 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.204.069 juta atau 9,67% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp12.445.811 juta. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan pembiayaan syariah – bersih sebesar Rp1.306.012 juta dari sebesar Rp7.255.157 juta pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp8.561.168 juta pada tahun 2023

Total Liabilitas

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Total Liabilitas Entitas Anak ini dari untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.988.577 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp248.477 juta atau 9,07% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.740.101 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya kenaikan dan penurunan pada beberapa komponen liabilitas, diantaranya kenaikan simpanan nasabah sebesar Rp152.336 juta atau 19,14%, kenaikan pinjaman kepada bank lain sebesar Rp339.418 juta atau sebesar 34,34%, dan penurunan simpanan bank lain sebesar Rp339.330 juta atau sebesar 42,39%.

Total Dana Syirkah Temporer

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Total Dana Syirkah Temporer Entitas Anak ini dari untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.272.836 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp898.412 juta atau 10,73% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp8.374.424 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya kenaikan dana syirkah temporer non bank sebesar Rp863.800 juta dari sebesar Rp.8.323.596 juta pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp9.187.396 juta pada tahun 2023.

Total Ekuitas

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Total Ekuitas Entitas Anak ini dari untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.388 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp57 juta atau 4,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.331 juta. Hal ini terutama disebabkan kenaikan dari saldo laba sebesar Rp56.181 juta atau sebesar 8,91%.

(Rugi) Laba Tahun Berjalan

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

(Rugi) Laba Tahun Berjalan Entitas Anak ini dari untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp58.517 juta, mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp43.191 juta atau 42,47% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp101.709 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya kenaikan dan pendapatan pengelolaan dana sebesar Rp144.225 atau sebesar 18,67%, kenaikan atas beban bagi hasil sebesar Rp118.770 juta atau sebesar 48,62%, dan kenaikan atas beban penyisihan kerugian aset produktif sebesar Rp61 juta atau sebesar 77,59%.

PT BPR INTAN JABAR (“BPR IJ”)

i. Riwayat Singkat

PT Bank BPR Intan Jabar (“BPR IJ”), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan hukum di Kabupaten Garut didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.47 tanggal 11 Desember 2014, yang dibuat dihadapan Intan Rubyati Dewi, S.H. M.Kn, Notaris di Kabupaten Garut yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-39238.40.10.2014 tanggal 11 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0129965.40.80.2014 tanggal 11 Desember 2014

Sejak pendirian, anggaran dasar BPR IJ telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir didasarkan dengan Akta Berita Acara Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No.18 tanggal 6 Pebruari 2024 yang dibuat dihadapan I.Irfan Ibrahim, S.H. M.Kn, Notaris di Kabupaten Garut yang pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No.AHU-AH.01.09-0054725 tanggal 7 Pebruari 2024 serta telah didaftar dalam Daftar Perseroan dibawah No.AHU-0028355.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 7 Pebruari 2024 (“Akta Berita Acara No.18/2024”) dimana telah dilakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal setor BPR-IJ

ii. Permodalan

Komposisi permodalan BPR IJ didasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.260 tanggal 27 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Intan Rubyati Dewi, S.H. M.Kn, Notaris di Kabupaten Garut, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-0940269.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 7 Agustus 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3539125.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 7 Agustus 2015 jo Akta Berita Acara No.18/2024, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham: Rp.1.000,00		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:	88.000.000	88.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
a. Pemerintah Propinsi Jawa Barat	37.500.000	37.500.000.000	46,51
b. Pemerintah Kabupaten Garut	34.320.000	34.320.000.000	42,57
c. Perseroan	8.800.000	8.800.000.000	10,92
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.620.000	80.620.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel:	7.380.000	7.380.000.000	

iii. Susunan Kepengurusan

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.43 tanggal 12 Juli 2023 yang dibuat dihadapan I. Irfan Ibrahim, S.H. M.Kn, Notaris di Kabupaten Garut yang pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No.AHU-AH.01.09-0146553 tanggal 31 Juli 2023 serta telah didaftar dalam Daftar Perseroan dibawah No.AHU-0146288.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Juli 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BPR-IJ adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Teti Sarifeni
Komisaris	:	Dedi Achmad Santika

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Budi
Direktur Bisnis	:	Dicky Fardiansyah
Direktur Operasional dan Kepatuhan	:	Dadang Kurnia

iv. Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usaha utama yang dijalankan, BPR-IJ telah memiliki izin operasional yaitu Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan - Kepala Regional 2 Jawa Barat No.21/KR.2/2015 tanggal 22 Mei 2015 Tentang Pengalihan Izin Usaha Atas Perubahan Badan Hukum Dari PD Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Garut Kota Kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Intan Jabar juncto Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan - Kepala Regional 2 Jawa Barat No.22/KR.2/2015 tanggal 22 Mei 2015 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PD Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Garut Kota Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Perkreditan Rakyat Intan Jabar, yang berisikan pernyataan tetap berlakunya izin usaha sebagai bank perkreditan rakyat dari PD Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Garut Kota bagi BPR-IJ.

v. Ikhtisar Data Keuangan Penting

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Total Aset	28.934	135.049
Total Liabilitas	170.099	194.505
Total Ekuitas	(141.165)	(59.456)

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pendapatan bunga dan provisi komisi	3.013	6.857
Beban bunga dan provisi komisi	10.536	13.354
Rugi Tahun Berjalan	(112.776)	(80.857)

vi. Analisis Keuangan

Total Aset

Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Total Aset Entitas Anak ini pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp28.934 juta, mengalami penurunan sebesar Rp106.115 juta atau 78,58% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp135.049 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan saldo CKPN kredit yang diberikan sebesar Rp104.491 juta sehingga nilai bersih kredit yang diberikan juga mengalami penurunan.

Total Liabilitas

Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Total Liabilitas Entitas Anak ini pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp170.099 juta, mengalami penurunan sebesar Rp24.406 juta atau 12,55 % dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp194.505 juta. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan terbesar pada simpanan nasabah sebesar Rp38.891 juta atau sebesar 37,92%.

Total Defisit Ekuitas

Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Total Defisit Ekuitas Entitas Anak ini pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp141.165 juta, mengalami penurunan sebesar Rp81.709 juta atau 137,43% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp59.456 juta. Hal ini terutama karena perolehan rugi bersih tahun 2023 sebesar Rp112.776 juta.

(Rugi) Laba Tahun Berjalan

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Rugi Tahun Berjalan Entitas Anak ini dari untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp112.776 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp31.919 juta atau 39,48% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp80.857 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya kenaikan beban penyisihan kerugian aktiva produktif untuk kredit yang diberikan sebesar Rp34.514 juta dari Rp59.167 juta pada tahun 2022 menjadi Rp93.644 juta pada tahun 2023.

PT BJB SEKURITAS JAWA BARAT ("BJB SEKURITAS")

i. Riwayat Singkat

PT BJB Sekuritas Jawa Barat, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan hukum di Kota Bandung didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 38 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dihadapan Intan R. Tedy Suwarman, S.H. Notaris di Kota Bandung, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0063135.AH.01.01.TAHUN2020 tanggal 27 November 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT BJB Sekuritas Jawa Barat dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0200383.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 27 Nopember 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.099 tanggal 11 Desember 2020, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.046628. Pada Tanggal Mei 2015 PT BJB Sekuritas Jawa Barat mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Kepala Regional 2 Jawa Barat No. KEP-292/D.04/2021 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Daerah Kepada PT BJB Sekuritas Jawa Barat dan secara resmi mulai beroperasi pada Tanggal 8 Oktober 2021.

Sejak pendirian, anggaran dasar BJB Sekuritas telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir didasarkan kepada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.34 tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Raden Tedy Suwarman, S.H., Notaris di Kota Bandung, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima oleh Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di bawah No.AHU-AH.01.03-0437392 tanggal 16 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0138908.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 16 Agustus 2021 (“**Akta PK No.34/2021**”), telah dilakukan perubahan peralihan saham BJB Sekuritas yang dimiliki oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten kepada Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.105 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Beta Wulandhayu Azhari, SH., M.Kn., pengganti dari Raden Tedy Suwarman, S.H., Notaris di Kota Bandung (“**Akta PK No.105/2022**”), telah dilakukan perubahan pasal 4 ayat 2 anggaran dasar sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal setor BJB Sekuritas.

ii. Permodalan

Komposisi permodalan BJB Sekuritas berdasarkan Akta PK No.34/2021 jo Akta PK No.105/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham: Rp.250,00		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:	38.000	38.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
a. Perseroan	30.000	30.000.000.000	93,75
b. Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten	2.000	2.000.000.000	6,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	32.000	32.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel:	6.000	6.000.000.000	

iii. Susunan Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pendirian No.38/2020 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.55 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Raden Tedy Suwarman, S.H., Notaris di Kota Bandung, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-AH.01.09-0108944 tanggal 10 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0071392.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 10 April 2023 susunan Dewan Komisaris dan Direksi BJB Sekuritas adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hana Dartiwan

Dewan Direksi

Direktur Utama : Maryadi Suwondo
Direktur : Yogi Heditta Permadi

iv. Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usaha utama yang dijalankan, BJB Sekuritas telah memiliki izin berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No.KEP-29/D.04/2021 tanggal 29 Juni 2021 Tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Daerah Kepada PT BJB Sekuritas Jawa Barat, dinyatakan bahwa OJK memberikan izin usaha Perusahaan Efek Daerah kepada BJB Sekuritas

v. Ikhtisar Data Keuangan Penting

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Total Aset	32.599	30.023
Total Liabilitas	4.254	22.686
Total Ekuitas	28.345	7.337

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Total Pendapatan Operasi	2.705	455
Total Beban Operasi	3.798	2.530
Rugi Tahun Berjalan	(1.093)	(2.075)

vi. Analisis Keuangan

Total Aset

Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Total Aset Entitas Anak ini pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp32.599 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp2.576 juta atau 8,58% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp30.023 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya kenaikan piutang transaksi perantara perdagangan efek pihak ketiga sebesar Rp3.369 juta.

Total Liabilitas

Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Total Liabilitas Entitas Anak ini pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.254 juta, mengalami penurunan sebesar Rp18.432 juta atau 81,25% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp22.686 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya penurunan utang lain-lain secara seluruhnya atau 100% bernilai Rp22.500 juta.

Total Ekuitas

Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Total Ekuitas Entitas Anak ini pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp28.345 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp21.008 juta atau 286% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp7.337 juta. Hal ini terutama disebabkan kenaikan dari peningkatan modal saham sebesar Rp22.500 juta atau sebesar 237%. Tambahan setoran modal ini berasal dari tambahan setoran modal dari Bank BJB.

(Rugi) Laba Tahun Berjalan

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Rugi Tahun Berjalan Entitas Anak ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.093 juta, mengalami penurunan sebesar Rp978 juta atau 48% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.075 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan pendapatan sebesar Rp2.259 juta. Peningkatan pendapatan yang signifikan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari hasil investasi yang juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 609%

A.9. ASURANSI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, seluruh aset Perseroan diasuransikan kepada PT Asuransi Bangun Askrida. Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT. Asuransi Cakrawala Proteksi dan PT. Asuransi Binagriya Upakara terhadap risiko kebakaran, gempa bumi dan risiko lainnya. Berikut ini adalah polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan:

1. Perseroan telah menutup Asuransi *Property All Risk* (PAR), asuransi perlindungan untuk kejadian property all risks (kebakaran, gempa bumi, gunung meletus dan bencana alam lainnya), kerusakan, pemogokan dan huru hara yang melindungi bangunan kantor, mesin-mesin dan inventaris kantor di berada di daerah kerja Kantor Pusat, Kantor Wilayah I, Kantor Wilayah II, Kantor Wilayah III, Kantor Wilayah IV dan Kantor Wilayah V, dari kebakaran, kerusakan dan/atau kehilangan berdasarkan Property All Risks Insurance Policy No.1481-8080-0124-0155-00 tanggal 2 Pebruari 2024 untuk periode 16 Januari 2024 sampai dengan 16 Januari 2025 pada PT. Asuransi Bangun Askrida cabang Bandung dengan nilai premi sebesar Rp.1.528.503.213,00
2. Perseroan telah menutup Asuransi Gempa Bumi, asuransi perlindungan untuk bencana alam, kerugian harta benda termasuk kerusakan, pemogokan, kejahatan dan huru hara, banjir dan kerusakan akibat air yang melindungi bangunan kantor, mesin-mesin dan inventaris kantor dari kebakaran, kerusakan dan/atau kehilangan di daerah kerja Kantor Pusat, Kantor Wilayah I, Kantor Wilayah II, Kantor Wilayah III, Kantor Wilayah IV dan Kantor Wilayah V,, berdasarkan Polis Indonesian Standard Earthquake Policy No.1419-8080-0124-0153-00 tanggal 2 Pebruari 2024 untuk periode 16 Januari

2024 sampai dengan 16 Januari 2025 pada PT. Asuransi Bangun Askrida cabang Bandung dengan nilai premi sebesar Rp.2.614.213.783,00

Seluruh aset Perseroan yang bersifat material telah diasuransikan dan asuransi tersebut cukup untuk menutup seluruh kerugian yang mungkin dapat terjadi apabila aset tersebut mengalami kerusakan atau musnah. Seluruh polis asuransi Perseroan masih berlaku dan mengikat Perseroan.

Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PT Asuransi Bangun Askrida dimana Perseroan merupakan salah satu pemegang saham dari PT Asuransi Bangun Askrida.

A.10. ASET TETAP

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa tanah, bangunan dan prasarana bangunan, prasarana, peralatan kantor dan kendaraan dengan total nilai buku sebesar Rp 4.415.348 juta.

Perseroan memiliki secara sah tanah-tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (HM) yang dipergunakan sebagai kantor, gudang kantor, rumah dinas, dan ada pula tanah-tanah yang masih merupakan tanah kosong. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah Hak Guna Bangunan (HGB)

Tanah-tanah HGB milik Perseroan yang digunakan sebagai kantor adalah sebagai berikut:

No.	No.HGB	Tanggal	Luas	Berakhir	Peruntukkan
1.	641/Pabaton	20-9-1994	1.627	19-9-2014*)	KC Bogor
2.	28/Hegarsari	20-10-2005	1.755	20-10-2035	KC Banjar
3.	01100/Kertajaya	9-3-2022	2.015	19-8-2027	KC Padalarang

*) Berdasarkan Surat Keterangan No.017/NOT-DIG/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Dian Indrawaty Gunawan SH., Mkn. dinyatakan bahwa pada saat ini Sertifikat HGB No.641/Pabaton sedang dalam proses perpanjangan di Kantor Pertanahan Kota Bogor.

Adapun tanah HGB yang digunakan sebagai rumah dinas adalah sebagai berikut:

No.	No.HGB	Tanggal	Luas	Berakhir	Peruntukkan
1.	351/Pekiringan	7-5-1994	223	6-5-2014*)	Rumah Dinas dari KC Cirebon
2.	352/Pekiringan	7-5-1994	253	6-5-2014*)	Rumah Dinas dari KC Cirebon

*) Berdasarkan Surat Keterangan No.013/NOT-DIG/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Dian Indrawaty Gunawan SH., Mkn. dinyatakan bahwa pada saat ini Sertifikat HGB No.351/Pekiringan dan Sertifikat HGB No.352/Pekiringan sedang dalam proses pembukaan blokir dimana berdasarkan data BPN Cirebon, tanah yang akan dimohonkan untuk peningkatan status hak tersebut diakui sebagai asset dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

2. Tanah Hak Milik (HM)

Tanah-tanah HM milik Perseroan yang digunakan sebagai kantor adalah sebagai berikut:

No	No. HM	Tanggal	Luas	Peruntukkan
1.	1258/Margahayu	9-6-1979	970	bjb Syariah - KCS Bekasi
2.	4086/Cijagra	6-12-2007	675	KC Buah Batu
3.	1068/Mekar Mulya	15-11-2013	80	KCP Gede Bage
4.	630/Kebon Pisang	28-2-2003	921	KCP Asia Afrika
5.	611/Ciamis	2-12-1977	1.917	KC Ciamis
6.	1761/Ciamis	3-1-1992	365	KC Ciamis
7.	975/Tengah	11-9-1999	3.000	KC Cibinong
8.	656/Karangmekar	18-5-1995	380	KC Cimahi
9.	142/Karangmekar	14-1-1992	887	KC Cimahi
10.	1246/Kejaksan	22-6-1983	910	bjb Syariah - KCS Cirebon
11.	765/Pakuwon	20-2-2001	2.100	KC Garut
12.	01484/Regol	16-9-1980	289	bjb Syariah - KCS Garut
13.	253/Lemahabang	26-11-1987	1.760	KC Indramayu
14.	01845/Lemahabang	12-3-2020	2.406	KCP Pemkab Indramayu
15.	1869/Braga	24-11-2017	4.415	Kantor Pusat
16.	1870/Braga	24-11-2017	4.415	Kantor Pusat dan KC Bandung

No	No. HM	Tanggal	Luas	Peruntukkan
17.	1884/Braga	29-1-2018	7.451	Kantor Pusat
18.	1513/Braga	28-2-2003	820	Kantor Pusat
19.	6755/Dago	17-6-2020	1.969	Kanwil I dan KCP Simpang Dago
20.	86/Lingkar Selatan	16-5-2002	482	bjb Syariah - KCS Bandung
21.	7167	30-1-2018	150	KK Pasar Caringin
22.	4071/Karawang Kulon	12-11-1998	3.125	KC Karawang
23.	03721/Cikampek Selatan	7-9-2020	1.486	KCP Cikampek
24.	3282/Purwawinangun	19-5-2006	396	KC Kuningan
25.	936/Labuan	8-7-1999	840	KC Labuan
26.	178/Majalengka Kulon	15-4-1967	875	KC Majalengka
27.	02048/Kabayan	28-10-2019	959	KC Pandeglang
28.	428/Kabayan	2-7-1994	414	KC Pandeglang
29.	3639/Palabuhanratu	26-11-2019	962	KC Palabuhan Ratu
30.	02050/Nagritengah	6-6-2020	2.242	KC Purwakarta
31.	268/Sindangkasih	4-2-1985	446	KCP Pasar Simpang
32.	279/Muaraciujung Barat	19-2-1991	1.178	KC Rangkasbitung
33.	382/Cipare	16-12-1985	384	PP Ahmad Yani
34.	752/Cipare	31-3-1981	7.145	bjb Syariah - KCS Serang
35.	01759/Rajapolah	3-12-2020	176	KCP Rajapolah
36.	00662/Pamekaran	14-3-2001	4.080	KC Soreang
37.	326/Soreang	18-12-1997	815	bjb Syariah - KCS Soreang
38.	4834/Karanganyar	19-7-2007	1.115	KC Subang
39.	1460/Cikutra	6-10-1997	1.065	KC Suci
40.	1991/Pasteur	24-3-2003	1.171	KC Sukajadi
41.	337/Sumber	19-2-1992	3.000	KC Sumber
42.	1601/Tamansari	24-3-2003	1.181	KC Tamansari
43.	108/Empangsari	24-8-1981	2.590	KC Tasikmalaya
44.	262/Lengkongsari	10-10-1980	561	KK Sutisna Senjaya
45.	1170/Cikarang Kota	7-6-1993	2.015	KC Cikarang
46.	05573/Hegarsari	14-9-2023	1.755	KC Banjar
47.	808/Cilendek Barat	3-5-2000	516	Kantor Kas Empang
48.	809/Cilendek Barat	3-5-2000	74	Kantor Kas Empang
49.	490/Kotakulon	14-4-1987	2.080	KC Sumedang
50.	167/Kotakulon	28-11-1991	280	KC Sumedang
51.	658/Kebon Waru	17-6-2020	780	KCP Cicadas
52.	03560/Pamoyanan	23-1-2019	453	KCP Pemkab Cianjur
53.	4214/Sukmajaya	31-5-2018	6.176	KC Cilegon
54.	3445/Cigending	8-2-2019	592	KCP Ujung Berung
55.	13495/Margahayu	4-7-2018	1.208	KC Bekasi
56.	02309/Muka	7-6-2018	1.840	KC Cianjur
57.	01460/Gunungparang	1-7-2019	2.241	KC Sukabumi
58.	11777/Jatiwaringin	26-6-2018	287	KCP Pondok Gede
59.	3479//Kesenden	19-1-2018	2.190	KC Cirebon
60.	10837/Margahayu	15-6-2005	1.955	KC Bekasi
61.	10838/Margahayu	15-6-2005	1.690	KC Bekasi
62.	07167/Babakan Ciparay	30-1-2018	150	KCP Caringin
63.	923/Majalaya	29-3-2012	45	KC Majalaya
64.	924/Majalaya	29-3-2012	45	KC Majalaya
65.	925/Majalaya	29-3-2012	45	KC Majalaya
66.	01192/Majalaya	27-1-2020	183	KC Majalaya
67.	1222/Majalaya	30-9-2020	13	KC Majalaya
68.	00104/Baleendah	14-8-2017	113	KCP Baleendah

No	No. HM	Tanggal	Luas	Peruntukkan
69	484/Depok	19-12-1991	1.115	KC Depok
70	95/Depok	16-12-2003	6.093	KC Depok
71	3868/Jombang Wetan	6-12-2018	590	KCP Jalan Stasiun
72	1441/Kelapa Indah	7-5-2019	252	KC Tangerang

Adapun tanah HM yang digunakan sebagai gudang kantor, rumah dinas, dan ada pula tanah-tanah yang masih merupakan tanah kosong atau digunakan untuk kepentingan lain oleh pihak ketiga adalah sebagai berikut:

No	No. HM	Tanggal	Luas	Peruntukkan
1.	502/Pabaton	11-3-1986	345	Rumah Dinas dari KC Bogor
2.	607/Menteng	3-5-2000	412	Rumah Dinas dari KC Bogor
3.	608/Menteng	3-5-2000	157	Rumah Dinas dari KC Bogor
4.	808/Cilendek Barat	3-5-2000	516	Rumah Dinas dari KC Bogor
5.	809/Cilendek Barat	3-5-2000	74	Rumah Dinas dari KC Bogor
6.	3582/Lengkong Gudang	27-12-2018	948	Tanah Kosong dari KC BSD
7.	52/Ciamis	1-6-1983	2.200	Rumah Dinas dari KC Ciamis
8.	60/Ciamis/	14-6-1983	215	Rumah Dinas dari KC Ciamis
9.	884/Bojongherang	4-5-1991	1.386	Rumah Dinas dari KC Cianjur
10.	795/Sawahgede	5-3-1991	172	Rumah Dinas dari KC Cianjur
11.	03561/Pamoyanan	23-1-2019	346	Rumah Dinas dari KC Cianjur
12.	180/Ciputri	22-5-1991	4.415	Tanah Kosong dari KC Cianjur
13.	00602/Baros	26-6-2001	510	Rumah Dinas dari KC Cimahi
14.	1140/Baros	25-4-2017	438	Rumah Dinas dari KC Cimahi
15.	1307/Sunyaragi	31-2-1986	889	Rumah Dinas dari KC Cirebon
16.	1362/Kotakulon	24-7-1985	141	Rumah Dinas dari KC Garut
17.	484/Kotakulon	24-7-1985	469	Rumah Dinas dari KC Garut
18.	4101/Dago	28-2-2003	1.232	Rumah Dinas dari Kantor Pusat
19.	4105/Dago	24-3-2003	613	Rumah Dinas dari Kantor Pusat
20.	470/Lingkar Selatan	2-12-2005	183	Rumah Dinas dari Kantor Pusat
21.	660/Lebakgede	24-3-2003	1.036	Rumah Dinas dari Kantor Pusat
22.	661/Lebakgede	24-3-2003	602	Rumah Dinas dari Kantor Pusat
23.	663/Lebakgede	24-3-2003	1.364	Rumah Dinas dari Kantor Pusat
24.	1156/Cihapit	22-12-2020	211	Rumah Dinas dari Kantor Pusat
25.	284/Braga	30-12-1989	727	Rumah Dinas dari Kantor Pusat
26.	2687/Karasak	29-4-1998	338	Rumah Dinas dari Kantor Pusat
27.	1083/Cihapit	25-9-2015	721	Rumah Dinas dari Kantor Pusat
28.	231/Pasirkaliki	31-3-1989	705	Rumah Dinas dari Kantor Pusat
29.	1605/Lebakgede	10-5-2019	427	Rumah Dinas dari Kantor Pusat
30.	1606/Lebakgede	10-5-2019	368	Rumah Dinas dari Kantor Pusat
31.	1607/Lebakgede	10-5-2019	370	Rumah Dinas dari Kantor Pusat
32.	1608/Lebakgede	16-5-2019	1.578	Rumah Dinas dari Kantor Pusat

No	No. HM	Tanggal	Luas	Peruntukkan
33.	1609/Lebakgede	16-5-2019	237	Rumah Dinas dari Kantor Pusat
34.	6694/Dago	29-5-2019	661	Rumah Dinas dari Kantor Pusat
35.	6695/Dago	29-5-2019	1.184	Rumah Dinas dari Kantor Pusat
36.	1855/Braga	20-3-2017	715	Gedung Arsip Kantor Pusat
37.	4104/Nagasari	30-4-1998	1.000	Rumah Dinas dari KC Karawang
38.	5845/Karawang Wetan	24-3-1998	313	Rumah Dinas dari KC Karawang
39.	482/Cikampek Selatan	30-3-1995	488	Rumah Dinas dari KC Karawang
40.	5655/Adiarsa	24-3-1998	358	Rumah Dinas dari KC Karawang
41.	1329/Bukit Duri	24-4-2001	639	Rumah Dinas dari KC Jakarta
42.	203/Cijoho	9-12-1980	365	Rumah Dinas dari KC Kuningan
43.	318/Purwawinangun	18-1-1988	272	Rumah Dinas dari KC Kuningan
44.	711/Kuningan	30-10-1986	428	Rumah Dinas dari KC Kuningan
45.	1356/Kuningan	9-12-1980	1.392	Kantor Dispenda Kuningan*)
46.	5025/Kuningan	16-4-2004	410	Kantor Dispenda Kuningan*)
47.	192/Labuan	5-8-2004	369	Rumah Dinas dari KC Labuan
48.	991/Majalengkakulon	15-3-1991	760	Rumah Dinas dari KC Majalengka
49.	1347/Majalengkawetan	3-11-1990	440	Rumah Dinas dari KC Majalengka
50.	424/Cigasong	9-3-1992	1.200	Tanah Kosong dari KC Majalengka
51.	1274/Pandeglang	12-4-1995	1.033	Rumah Dinas dan KC Pandeglang
52.	268/Negritengah	4-2-1985	446	Rumah Dinas dari KC Purwakarta
53.	00917/Cipaisan	3-8-1999	488	Rumah Dinas dari KC Purwakarta
54.	331/Muaraciujung Timur	28-12-1995	293	Rumah Dinas dari KC Rangkasbitung
55.	587/Muaraciujung Barat	23-9-1999	1.100	Rumah Dinas dari KC Rangkasbitung
56.	1956/Cijoropasir	9-8-1990	840	Rumah Dinas dari KC Rangkasbitung
57.	275/Muaraciujung Barat	12-10-1990	789	Lapangan Olahraga dari KC Rangkasbitung
58.	139/Kagungan	28-12-1985	315	Rumah Dinas dari KC Serang
59.	3399/Pasirkareumbi	2-7-2001	228	Rumah Dinas dari KC Subang
60.	458/Pasirkareumbi	10-6-1989	390	Rumah Dinas dari KC Subang
61.	22/Pasirkareumbi	25-6-1980	670	Rumah Dinas dari KC Subang
62.	1021/Sriwidari	16-6-1999	2.430	Rumah Dinas dari KC Sukabumi
63.	1206/Sriwidari	30-5-2002	207	Rumah Dinas dari KC Sukabumi
64.	1207/Sriwidari	30-5-2002	385	Rumah Dinas dari KC Sukabumi
65.	368/Kotakulon	28-11-1991	169	Rumah Dinas dari KC Sumedang
66.	398/Kotakulon	28-5-1997	428	Rumah Dinas dari KC Sumedang
67.	820/Kotakulon	28-11-1991	520	Rumah Dinas dari KC Sumedang
68.	312/Suka Asih	14-8-1999	215	Rumah Dinas dari KC Tangerang
69.	313/Suka Asih	21-8-1999	415	Rumah Dinas dari KC Tangerang
70.	917/Sukarasa	25-7-2018	2.682	Tanah Kosong dari KC Tangerang

No	No. HM	Tanggal	Luas	Peruntukkan
71.	1348/Kelapa Indah	8-6-2016	120	Rumah Dinas dari KC Tangerang
72.	258/Lengkongsari	24-8-1981	485	Rumah Dinas dari KC Tasikmalaya
73.	261/Lengkongsari	8-10-1980	350	Rumah Dinas dari KC Tasikmalaya
74.	02066/Pekandangan	14-3-2017	171	Rumah Dinas dari KC Indramayu
75.	02067/Pekandangan	14-3-2017	169	Rumah Dinas dari KC Indramayu
76.	124/Negri Tengah	29-9-1981	1.780	Gedung Kosong dari KC Purwakarta
77.	168/Negri Tengah	23-10-1982	404	Gedung Kosong dari KC Purwakarta
78.	13460/Margahayu	21-2-2018	208	Rumah Dinas dari KC Bekasi
79.	14166/Margahayu	7-9-2023	370	Rumah Dinas dari KC Bekasi
80.	1879/Gedepangrango	18-7-2019	4.118	Tanah Kosong dari KC Sukabumi
81.	2332/Muka	27-12-2018	1.536	Gedung Arsip dari KC Cianjur
82.	2858/Cibaduyut	6-2-2019	972	Gedung Arsip dari Kantor Pusat
83.	2859/Cibaduyut	6-2-2019	1.214	Gedung Arsip dari Kantor Pusat
84.	10160/Sukmajaya	27-1-2020	278	Rumah Dinas dari KC Depok
85.	09623/Cibatu	13-10-2022	2.000	Tanah Kosong KC Cikarang
86.	253/Cingcin	14-7-1997	1.970	Rumah Dinas KC Soreang
87.	640/Mekarsari	30-8-1991	1.405	Gudang Arsip KC Banjar
88.	692/Citepus	22-9-2005	1.000	Gudang KC Palabuhan Ratu
89.	528/Citepus	2-6-2006	450	Rumah Dinas KC Palabuhan Ratu
90.	1881/Palabuhan Ratu	13-5-2004	509	Rumah Dinas KC Palabuhan Ratu

*) Penggunaan tanah Sertifikat Hak Milik No.1356/Kuningan dan Sertifikat Hak Milik No.5025/Kuningan (angka 45 dan 46) untuk Kantor Dispenda Kuningan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kuningan adalah atas permintaan dari Bupati Kuningan dengan didasarkan pada Surat Bupati Kuningan No.050/976/Bapenda, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kuningan belum dapat mempersiapkan gedung permanen untuk Bappenda, dan transaksi pemanfaatan ruangan tersebut tidak memiliki nilai yang material.

A.11. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam kegiatan normal usaha, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak Afiliasi yang telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

No	Pihak-Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan Istimewa	Transaksi
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemegang saham	1. Giro 2. Simpanan nasabah 3. Kredit yang diberikan
2.	Manajemen Kunci	Hubungan pengendalian kegiatan Perseroan	1. Kredit yang diberikan 2. Simpanan nasabah
3.	BPR dan PD-LPK	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Provinsi dan Kabupaten	1. Penyertaan saham 2. Simpanan dari bank lain
4.	PT Asuransi Bangun Askrida	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Provinsi dan Kabupaten	1. Asuransi asset tetap

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah agregat dari transaksi pihak Afiliasi (selain manajemen kunci) dan transaksi dengan manajemen kunci pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Transaksi Pihak Afiliasi (Selain Manajemen Kunci)

No	Keterangan	31 Desember	
		2023	2022
1.	Persentase total aset pihak berelasi terhadap total aset	0,48%	0,36%
2.	Persentase total liabilitas dan dana syirkah temporer pihak berelasi terhadap total liabilitas dan total dana syirkah temporer	3,99%	6,47%
3.	Persentase terhadap total pendapatan bunga dan syirkah	0,36%	0,21%
4.	Persentase terhadap total beban bunga dan bonus	5,39%	5,75%

Transaksi dengan Manajemen Kunci

No	Keterangan	31 Desember	
		2023	2022
1.	Persentase terhadap total aset	0,07%	0,06%
2.	Persentase terhadap total liabilitas dan dana syirkah temporer	0,09%	0,05%
3.	Persentase terhadap total pendapatan bunga dan syariah	0,06%	0,05%
4.	Persentase terhadap total beban bunga dan bonus	0,03%	0,02%
5.	Persentase terhadap total beban tenaga kerja dan tunjangan karyawan	19,02%	20,02%

A.12. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Selain melakukan transaksi penting dengan pihak Afiliasi, Perseroan juga melakukan sejumlah transaksi dengan pihak ketiga yang penting bagi Perseroan, antara lain sebagai berikut:

- Perjanjian Kredit

- Perjanjian Kredit No.28 tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Muhamat Hatta, SH, Notaris di Jakarta, dengan PT Bank Central Asia Tbk., juncto Akta Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit No.41 tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Karin Christina Basoeki, SH, Notaris di Jakarta Pusat juncto Akta Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit No.14 tanggal 17 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Karin Christina Basoeki, SH, Notaris di Jakarta Pusat juncto Perubahan Ketiga Atas Perjanjian Kredit No.465/Add-KCK/2019 tanggal 20 Desember 2019 juncto Perubahan Keempat Atas Perjanjian Kredit No.127/Add-KCK/2020 tanggal 30 April 2020 juncto Akta Perubahan Kelima Atas Perjanjian Kredit No.174 tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Satria Amiputra A., SE, Akt, SH, MAkt, MH, M.Kn., Notaris di Jakarta juncto Perubahan Keenam Atas Perjanjian Kredit No.120/Add-KCK/2022 tanggal 24 Maret 2022 juncto Perubahan Ketujuh Atas Perjanjian Kredit No.355/Add-KCK/2022 tanggal 12 Oktober 2022 juncto Perubahan Kedelapan Atas Perjanjian Kredit No.201/Add-KCK/2023 tanggal 21 Juni 2023 juncto Perubahan Kesembilan Atas Perjanjian Kredit No.344/Add-KCK/2023 tanggal 29 September 2023, yang terbagi dalam 4 (empat) fasilitas yaitu:
 - Fasilitas Time Loan Non-Revolving 2 maksimal sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), yang berlaku hingga tanggal 27 Maret 2026 untuk tujuan pembiayaan modal kerja dengan suku bunga JIBOR + 0,75% per tahun dengan nilai outstanding per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 2.000.000.000.000,00.
 - Fasilitas Time Loan Non-Revolving 3 maksimal sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), yang berlaku hingga tanggal 17 Oktober 2024 untuk tujuan pembiayaan modal kerja dengan suku bunga sebesar JIBOR + 0,5% per tahun dengan nilai outstanding per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 2.000.000.000.000,00.
 - Fasilitas Time Loan Non-Revolving 4a maksimal sebesar Rp.1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang berlaku hingga tanggal 30 Juni 2025 untuk tujuan pembiayaan modal kerja dengan suku bunga sebesar JIBOR + 1,15% per tahun dengan nilai outstanding per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp Rp.1.500.000.000.000,00.
 - Fasilitas Time Loan Non-Revolving 4b maksimal sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah), yang berlaku hingga tanggal 29 Oktober 2025 untuk tujuan pembiayaan modal kerja dengan suku bunga sebesar JIBOR + 1,15% per tahun dengan nilai outstanding per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.200.000.000.000,00.
- Akta Perjanjian Kredit Fasilitas Bank Loan No.WCO.KP/1544/BL/2023 No.20 tanggal 25 September 2023 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang dibuat dihadapan Julius Purnawan, SH, MSi, Notaris di Jakarta Selatan, untuk tujuan pengembangan ekspansi kredit Perseroan untuk jangka waktu sampai tanggal 24 September 2025, dengan nilai pinjaman

Rp.1.500.000.000.000,00 dan suku bunga JIBOR + 60 bps per tahun dengan nilai outstanding per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.500.000.000.000,00.

3. Perjanjian Kredit No.770/PK/FI/0920 tanggal 28 September 2020 dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. jo Addendum I Perjanjian Kredit No.052/PP/EB/0222 tanggal 15 Pebruari 2022 jo Addendum II Perjanjian Kredit No.333/PP/EB/0922 tanggal 28 September 2022 jo Addendum III Perjanjian Kredit No.094/PP/EB/0323 tanggal 27 Maret 2023, , yang terbagi dalam 2 (dua) fasilitas yaitu:
 - a, Kredit Angsuran Berjangka 2 maksimal sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), yang berlaku hingga tanggal 28 Maret 2025 untuk tujuan pembiayaan umum dengan suku bunga *floating rate* (repricing setiap 3 bulan) dengan nilai outstanding per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah).
 - b, Kredit Angsuran Berjangka 3 maksimal sebesar Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah), yang berlaku hingga tanggal 17 Oktober 2025 untuk tujuan pembiayaan umum dengan suku bunga berdasarkan konfirmasi Perseroan sebelum penarikan pinjaman dengan nilai outstanding per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah).
4. Perjanjian Kredit No.028/ICBCI-TCT/PTDB/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan PT Bank ICBC Indonesia, untuk tujuan pembiayaan umum untuk jangka waktu 24 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas, dengan nilai pinjaman Rp.800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah) dan suku bunga JIBOR + 0,7% per tahun dengan nilai outstanding per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah).
5. Akta Perjanjian Pinjaman No.03 tanggal 17 Mei 2019 dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dibuat dihadapan Gunawan Wibisana Iskandar, SH, Sp.N., Notaris di Kota Bandung jo Akta Addendum Perjanjian Pinjaman No.01 tanggal 9 Juli 2019 , yang dibuat dihadapan Gunawan Wibisana Iskandar, SH, Sp.N., Notaris di Kota Bandung jo Akta Addendum Kedua Perjanjian Pinjaman No.13 tanggal 12 Desember 2019 , yang dibuat dihadapan Gunawan Wibisana Iskandar, SH, Sp.N., Notaris di Kota Bandung jo Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pinjaman No.17 tanggal 28 Agustus 2020 , yang dibuat dihadapan Gunawan Wibisana Iskandar, SH, Sp.N., Notaris di Kota Bandung jo Akta Addendum Keempat Perjanjian Pinjaman No.28 tanggal 29 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Gunawan Wibisana Iskandar, SH, Sp.N., Notaris di Kota Bandung untuk tujuan Modal Kerja pemberian pinjaman kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal penarikan fasilitas, dengan nilai pinjaman Rp.200.000.000.000,00 dan suku bunga untuk modal kerja kepada UMKM sebesar 5% per tahun dan modal kerja kepada Koperasi Simpan Pinjam sebesar 4% per tahun dengan nilai outstanding per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0,00
6. Perjanjian Kredit No.495/TERMLOAN/TRS/IX/2022 tanggal 28 September 2022 dengan PT Bank DKI untuk tujuan Pemenuhan Kebutuhan Likuiditas Perseroan untuk jangka waktu 24 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas, dengan nilai pinjaman Rp.1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan suku bunga JIBOR + 0,65% per tahun dengan nilai outstanding per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah);
7. Perjanjian Kredit (Fasilitas Pinjaman Berjangka) No.199/PK/CDU1/23 tanggal 22 Desember 2023 dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. untuk tujuan umum dari kegiatan usaha Perseroan untuk jangka waktu 24 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas, dengan nilai pinjaman Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dan suku bunga JIBOR + 0,65% per tahun dengan nilai outstanding per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah)
8. Surat Perjanjian No.BTPN/NS/0227 tanggal 27 Desember 2023 dengan PT Bank BTPN Tbk. untuk tujuan kebutuhan umum Perseroan untuk jangka waktu 24 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas, dengan nilai pinjaman Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dan suku bunga JIBOR + 0,25% per tahun dengan nilai outstanding per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah)

Tidak ada perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan para krediturnya, yang dapat menghambat atau menghalangi penerbitan Obligasi Subordinasi termasuk dengan rencana penggunaan dana Obligasi Subordinasi yang diterima yaitu untuk ekspansi kredit dikarenakan hal tersebut merupakan suatu kegiatan yang baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha bisnis Perseroan sehari-hari.

- Perjanjian Penting

1. Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Treasury Notional Pooling Rekening Pemerintah Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja Pada Bank Umum/ Kantor Pos No.PRJ-73/PB/2015, 032/PKS/DIR/2015 tanggal 30 April 2015 dengan Direktorat Jenderal Pembendaharaan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan tujuan kerja sama adalah untuk mengatur pelaksanaan Treasury Notional Pooling (TNP) pada Perseroan yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Apabila jangka waktu Perjanjian berakhir dan tidak ada Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian, maka Para Pihak sepakat bahwa pada setiap tanggal jatuh tempo jangka waktu Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

2. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rekening Pemerintah Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja Pada Bank Umum/ Kantor Pos No.PRJ-74/PB/2015, 033/PKS/DIR/2015 tanggal 30 April 2015 dengan Direktorat Jenderal Pembendaharaan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan tujuan kerja sama adalah untuk mengatur pelaksanaan Treasury Notional Pooling (TNP) pada Perseroan yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Apabila jangka waktu Perjanjian berakhir dan tidak ada Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian, maka Para Pihak sepakat bahwa pada setiap tanggal jatuh tempo jangka waktu Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
3. Nota Kesepahaman Penggunaan Produk, Jasa Dan Layanan Perbankan No.AHU.UM.01.01-764, No.016/NK/DIR-INS/2016 tanggal 15 Agustus 2016 dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tujuan kerja sama adalah untuk memenuhi sistem pelayanan jasa perbankan melalui mekanisme pemberian fasilitas jasa layanan perbankan yang berlaku untuk 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masing-masing pihak tidak bermaksud untuk mengakhiri nota kesepahaman sampai batas waktu yang telah ditetapkan maka nota kesepahaman ini secara otomatis akan diperpanjang secara terus menerus untuk jangka waktu yang sama.
4. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.AHU.1UM.01.01-830, No.108/PKS/DIR-INS/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tujuan kerja sama adalah untuk mendukung program transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PNBP atas pelayanan jasa hukum, dimana AHU akan menggunakan produk dan jasa dari PERSEROAN untuk menyediakan fasilitas perbankan yang berhubungan dengan Modul Penerimaan Negara (MPN) guna menerima pembayaran tarif PNBP dari masyarakat yang wajib membayarnya (Wajib Bayar) atas pelayanan jasa hukum dari AHU yang berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017. Apabila jangka waktu Perjanjian berakhir dan tidak ada Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian, maka Para Pihak sepakat bahwa pada setiap tanggal jatuh tempo jangka waktu Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
5. Nota Kesepahaman Penggunaan Produk, Jasa Dan Layanan Perbankan No.MOU/13/102015, 014/NK/DIR-INS/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan tujuan kerja sama adalah untuk Memenuhi sistem pelayanan jasa perbankan melalui mekanisme pemberian fasilitas jasa layanan perbankan yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masing-masing pihak tidak bermaksud untuk mengakhiri nota kesepahaman sampai batas waktu yang telah ditetapkan maka nota kesepahaman ini secara otomatis akan diperpanjang secara terus menerus untuk jangka waktu yang sama.
6. Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Melalui Kantor Bersama Samsat Dan Sentra-Sentra Pelayanan Samsat Propinsi Jawa Barat No.119/701-DISPENDA/2014, 001/INS-DIR/PKS/2014 tanggal 23 Mei 2014 dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan tujuan kerja sama adalah untuk Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat meliputi penerimaan pembayaran PKB dan /atau BBNKB di seluruh kantor bersama Samsat milik Jabar dan sentra-sentra pelayanan Samsat yang berlaku untuk jangka waktu terus berlaku sampai dengan adanya pemberitahuan untuk mengakhiri perjanjian atas dasar kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
7. Nota Kesepahaman Penggunaan Produk, Jasa Dan Layanan Perbankan No.3/SKB-32/VIII/2015, 013/NK-INS/2015 tanggal 8 April 2015 dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat dengan tujuan kerja sama adalah untuk Memenuhi sistem pelayanan jasa perbankan melalui mekanisme pemberian fasilitas jasa layanan perbankan yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masing-masing pihak tidak bermaksud untuk mengakhiri nota kesepahaman sampai batas waktu yang telah ditetapkan maka nota kesepahaman ini secara otomatis akan diperpanjang secara terus menerus untuk jangka waktu yang sama..
8. Nota Kesepahaman Penggunaan Produk, Jasa Dan Layanan Perbankan No. 590/1-36/V/2016, 011/NK/DIR-INS/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten dengan tujuan kerja sama adalah untuk Memenuhi sistem pelayanan jasa perbankan melalui mekanisme pemberian fasilitas jasa layanan perbankan yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masing-masing pihak tidak bermaksud untuk mengakhiri nota kesepahaman sampai batas waktu yang telah ditetapkan maka nota kesepahaman ini secara otomatis akan diperpanjang secara terus menerus untuk jangka waktu yang sama..
9. Nota Kesepahaman Kerjasama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan No. 373/UN6.RKT/MoU/ 2021, 010/NK/DIR-HKE/2021 tanggal 6 Juli 2021 dengan Universitas Padjajaran dengan tujuan kerja sama adalah untuk Mendukung Tri Dharma perguruan tinggi melalui mekanisme pemberian fasilitas jasa layanan

perbankan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masing-masing pihak tidak bermaksud untuk mengakhiri nota kesepahaman sampai batas waktu yang telah ditetapkan maka nota kesepahaman ini secara otomatis akan diperpanjang secara terus menerus untuk jangka waktu yang sama..

10. Nota Kesepahaman Jasa Layanan Perbankan No. 275/UN58/KS/2016, 010/NK/DIR-INS/2016 tanggal 11 Mei 2016 dengan Universitas Siliwangi dengan tujuan kerja sama adalah untuk Memenuhi sistem pelayanan jasa perbankan melalui mekanisme pemberian fasilitas jasa layanan perbankan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masing-masing pihak tidak bermaksud untuk mengakhiri nota kesepahaman sampai batas waktu yang telah ditetapkan maka nota kesepahaman ini secara otomatis akan diperpanjang secara terus menerus untuk jangka waktu yang sama..
11. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Melalui Seluruh Jaringan Kantor Dan Jaringan Elektronik Bank BJB Serta Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pengesahan STNK Tahunan Di Daerah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat No.119/2256-Bapenda, B/46/XI/HUK.1.1/2020, P/33/SP/2020, 006/PKS/HKE-DJ2/2020 tanggal 19 Nopember 2020 dengan Tim Pembina Samsat Propinsi Jawa Barat dengan tujuan kerja sama adalah untuk Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dalam pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui seluruh jaringan kantor dan jaringan elektronik Perseroan serta Identifikasi Kendaraan Bermotor Pengesahan STNK Tahunan di Daerah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Jangka waktu sampai dengan 22 Nopember 2024 dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri menurut persetujuan Para Pihak.
12. Nota Kesepahaman No.004/INS-MOU/2019-K.TEL.05-0242/HK.840/DES-B1000000/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Kerjasama Sinergi Pemanfaatan Produk Dan Jasa dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan tujuan kerja sama adalah untuk mempersiapkan hal yang berkaitan dengan kerja sama pemanfaatan produk dan jasa antara Perseroan dengan Telkom termasuk anak perusahaan dari masing-masing pihak untuk menciptakan sinergi usaha dengan prinsip yang saling menguntungkan antara Perseroan dengan Telkom yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak untuk jangka waktu yang sama;
13. Perjanjian Kerjasama No.PKS-4/PB/2019, No.100/PKS/DIR-INS/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Koordinasi Pengembangan Pelaksanaan Pembayaran Dengan Kartu Kredit Corporate Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan, dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan tujuan kerja sama adalah untuk menetapkan mekanisme dan melaksanakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan untuk mendorong pengembangan pelaksanaan pembayaran dengan kartu kredit corporate dalam rangka penggunaan uang persediaan yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian dan akan diperpanjang dengan sendirinya untuk jangka waktu yang sama seterusnya sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak atau sampai dengan peraturan yang terkait pembayaran dengan kartu kredit corporate dalam rangka penggunaan uang persediaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
14. Perjanjian Kerjasama No.211/PKS/DIR-KKR/2019, No.PJ-1279/DS102/SM.08. 02/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Guna Bhakti Dan Bantuan Pembayaran Kolektif Angsuran Kredit Guna Bhakti dengan Perusahaan Umum (Perum) BULOG dengan tujuan kerja sama adalah untuk melakukan kerja sama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok fungsi Para Pihak untuk memenuhi sistem pelayanan jasa perbankan dan jasa lainnya yang berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak;
15. Nota Kesepahaman No.002/HKE-MOU/2020, No.1143/HL.01.02/J.5/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Jasa Layanan Perbankan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Banggakencana Di Propinsi Jawa Barat, dengan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Propinsi Jawa Barat dengan tujuan kerja sama adalah untuk Melakukan kerja sama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok fungsi Para Pihak dengan tujuan untuk memberikan fasilitas jasa layanan perbankan kepada BKKBN dan sebagai salah satu kerjasama kemitraan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui Program Banggakencana di Propinsi Jawa Barat dimana Jangka waktu Perjanjian adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang menurut kesepakatan Para Pihak.

A.13. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang terlibat dalam 12 (dua belas) perkara perdata, 7 (tujuh) perkara pengadilan niaga dan 3 (tiga) perkara perpajakan, di mana apabila di kemudian hari ternyata Badan-badan Peradilan tersebut memutuskan dengan mengalahkan Perseroan, maka tidak ada yang akan memberikan dampak negatif yang material terhadap keadaan keuangan dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta tidak akan menghalangi rencana penerbitan dan penawaran umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024. Sedangkan Entitas Anak yang dalam hal ini PT Bank BJB Syariah terlibat dalam 2 perkara perdata - ekonomi syariah dan 2 perkara perdata yang sedang dalam proses di badan peradilan di Indonesia.

Tidak ada dari perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Entitas Anak yang apabila diputus dengan mengalahkan Entitas Anak dapat memberikan dampak negatif yang material yang akan mempengaruhi kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan atau dapat berakibat menghambat Penerbitan Obligasi Subordinasi

Adapun detail dari perkara-perkara tersebut, yaitu:

PERSEROAN

Perkara Perdata

No	No. Perkara	Uraian	Posisi Perseroan	Pihak Lawan	Materi Perkara	Nilai Perkara (Rp,00)	Status Perkara
1	597/Pdt.G/2020/P N.Jkt.Tim	keputusan Perseroan yang menolak pembayaran atas cek terhadap penggugat yang dikeluarkan oleh nasabahnya dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formal dan saldo nasabah yang tidak cukup	Turut Tergugat	Wahyu Setyo Herwono CV Kirana Karya	Wanprestasi	Terdapat tuntutan pembayaran secara tanggung renteng kepada para Penggugat sebesar Rp.2.158.835.694	Banding
2	767/Pdt.G/2021/P N.Jkt.Utr	keberatan dari penggugat dengan telah disita, diblokir dan dicairkannya Bilyet Deposito atas nama penggugat di Perseroan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tergugat	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)	PMH	Pengembalian uang sisa eksekusi pencairan sejumlah 126.494.237.582 dan ganti rugi sebesar 597.326.832.325	Kasasi
3	768/Pdt.G/2021/P N.Jkt.Utr	Sama Dengan angka 2	Tergugat	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi	PMH	Pengembalian uang sisa eksekusi pencairan	Kasasi

No	No. Perkara	Uraian	Posisi Perseroan	Pihak Lawan	Materi Perkara	Nilai Perkara (Rp,00)	Status Perkara
				dan Informasi (BAKTI)		sejumlah 126.494.237.582 dan ganti rugi sebesar. 597.326.832.325	
4	796/Pdt.G/2021/P N.Jkt.Pst	Sama Dengan angka 2	Tergugat	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)	PMH	Pengembalian uang sisa eksekusi pencairan sejumlah 126.494.237.582. dan ganti rugi sebesar. 597.326.832.325-	Banding
5	1090/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt	Sama Dengan angka 2	Tergugat	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)	PMH	Pengembalian uang sisa eksekusi pencairan sejumlah 126.494.237.582 dan ganti rugi sebesar. 597.326.832.325	Kasasi
6	1091/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt	Sama Dengan angka 2	Tergugat	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)	PMH	Pengembalian uang sisa eksekusi pencairan sejumlah 126.494.237.582 dan ganti rugi sebesar. 597.326.832.325	Kasasi
7	194/Pdt.G/2023/P N.blb	perkara yang diakibatkan keberatannya penggugat atas penyelesaian kredit melalui cessie dan upaya lelang jaminan yang akan dilakukan	Tergugat	Rafika Marandika Ajat Sudrajat	PMH	Material 978.861.482 Immaterial 1.000.000.000	Tingkat Pertama
8.	418/Pdt.G/2023/P N.Jkt.Tim	perkara yang timbul akibat perselisihan dan sengketa bisnis antara nasabah Perseroan dan rekanan kerjanya yang	Tergugat	Manase Sitanggung	PMH	Material 2.128.703.985 Immaterial 2.000.000.000	Tingkat Pertama

No	No. Perkara	Uraian	Posisi Perseroan	Pihak Lawan	Materi Perkara	Nilai Perkara (Rp,00)	Status Perkara
		bertindak diluar batas kewenangannya dengan memindahkan hak tagih terhadap sumber pembiayaan proyek tersebut kepada bank lain					
9	51/Pdt.G/2023/P N.Idm	perkara yang timbul akibat perselisihan dan sengketa bisnis antara penggugat dan rekanan kerjanya yang menuntut agar dana hasil bisnis tersebut menjadi milik pribadi penggugat dan bukan perusahaan (nasabah Perseroan) tempat bekerja penggugat.	Tergugat	Yakub A. Gani	PMH	Material 3.077.492.600	Tingkat Pertama
10	164/Pdt.G/2023/P N.Sby	perkara yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan usaha debitur yang dibiayai oleh Perseroan tidak berjalan dengan baik sehingga timbul wanprestasi	Tergugat	Evan Indra Indriawan	Wanprestasi	Material 3.000.000.000	Kasasi
11	185/Pdt.G/2023/P N.blb	Perkara yang timbul diakibatkan adanya keberatan dari ahli waris debitur Perseroan yang keberatan agunan atas kredit yang diterimanya akan disita	Tergugat	Nenden Herlina	PMH	Material 270.000.000 Immaterial 2.000.000.000	Banding

No	No. Perkara	Uraian	Posisi Perseroan	Pihak Lawan	Materi Perkara	Nilai Perkara (Rp,00)	Status Perkara
		oleh Perseroan.					
12	8/Pdt.G/2022/PN. Pdl	perkara yang timbul akibat debitur Perseroan yang telah membayar lunas kreditnya keberatan bahwa jaminan tanah yang diberikannya dikembalikan Perseroan kepada pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat tanah tersebut	Tergugat	Cepi Sayfudin	PMH	Material 1.000.000.000	Kasasi

PMH = Perbuatan Melawan Hukum

Perkara Pengadilan Niaga

	No. Perkara	Posisi Perseroan	Pihak Lawan	Materi Perkara	Nilai Perkara	Status Perkara
1	46/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst	Kreditor Separatis	CV Sinar Anugerah Lestari Textindo	PKPU	Sebesar Nilai Tagihan Piutang	Proses PKPU
2	26/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst jo. 23/Pdt-Sus-PKPU/2012/PN-Niaga.Jkt.Pst	Kreditor Separatis	PT Istaka Karya	Kepailitan	Sebesar Nilai Tagihan Piutang	Proses Kepailitan
3.	320/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Jkt Pst	Kreditor Separatis	PT Sekar Artha Sentosa	PKPU	Sebesar Nilai Tagihan Piutang	Proses PKPU
4.	91/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Sby	Kreditor Separatis	PT Polowijo Gosari	PKPU	Sebesar Nilai Tagihan Piutang	Putusan PKPU (Homologasi)
5.	62/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Jkt Pst	Kreditor Separatis	Dziki Dzirkullah Afanda	PKPU	Sebesar Nilai Tagihan Piutang	Proses PKPU
6.	313//Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Jkt Pst	Kreditor Separatis	PT Ekawira Sarana Perkasa	PKPU	Sebesar Nilai Tagihan Piutang	Proses PKPU
7.	43/Pdt.Sus/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt Pst	Kreditor Separatis	PT Cireamai Putra Mandiri	Kepailitan	Sebesar Nilai Tagihan Piutang	Proses Kepailitan

PMH = Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perkara Pengadilan Pajak

No	No. Perkara	Posisi Perseroan	Pihak Lawan	Materi Perkara	Nilai Perkara Awal*)	Nilai Perkara Saat Ini*)	Status Perkara
1	005747.15/2019/PP	Pemohon Peninjauan Kembali	Dirjen Pajak	PPh Pasal 4(2) Tahun 2014	21.959	10.995	Proses Peninjauan Kembali
2	009526.15/2020/PP	Pemohon Peninjauan Kembali	Dirjen Pajak	PPh Badan Tahun 2015	66.015	66.015	Proses Peninjauan Kembali
3	014064.15/2022/PP	Pemohon Peninjauan Kembali	Dirjen Pajak	PPh Badan Tahun 2019	34.964	34.964	Proses Sidang Banding

Keterangan:

*) Termasuk denda dan pokok (dalam jutaan Rupiah)

PT Bank BJB Syariah

Perkara Perdata – Ekonomi Syariah

No. Perkara	Posisi Perseroan	Pihak Lawan	Materi Perkara	Nilai Perkara (Rp,00)	Status Perkara
679/Pdt.G/2024/PA.Bad g	Tergugat I	PT Hastuka Sarana Karya	PMH	2.008.940.683.205	Sidang Tingkat I
430/Pdt.G/2023/PA.CN	Tergugat I	Koperasi BMT Al-Ikhlas	Perlawanan	Tidak ada	Banding

PMH : Perbuatan Melawan Hukum

Perkara Perdata

No. Perkara	Posisi Perseroan	Pihak Lawan	Materi Perkara	Nilai Perkara (Rp,00)	Status Perkara
340/Pdt.G/2023/PN.Cbi	Tergugat I	Andika Prasetya	PMH	2.750.000.000	Sidang Tingkat I
82/Pdt.G/2023/PN.Tsm	Tergugat	H. Jojo Sunaryo	Perlawanan	Tidak Ada	Sidang Tingkat I

B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

B.1. KEGIATAN USAHA

Perseroan merupakan salah satu Bank Umum milik Pemerintah Daerah di Indonesia yang memiliki nasabah utama berupa perorangan, karyawan, koperasi, BUMD, BUMN, beserta institusi lainnya baik Pemerintah maupun swasta. Sampai dengan 31 Maret 2021, Perseroan memiliki 5 Kantor Wilayah, 64 Kantor Cabang, 920 Kantor Cabang Pembantu, 342 Kantor Kas, 183 *Cash Recycle Machine* dan 1.776 Jaringan ATM.

Per tanggal 31 Desember 2023, total dana pihak ketiga Perseroan dikontribusi oleh dana-dana Pemerintah yang mencapai Rp23.495.976 juta (18,58%), dana corporate sebesar Rp62.920.097 juta (49,75%) dan dana retail sebesar Rp40.044.661 juta (31,67%). Selain itu Perseroan juga telah menyalurkan pinjamannya kepada debitur di seluruh daerah operasional Perseroan yang terdiri dari 42,81% debitur kredit konsumen, 16,99% debitur kredit ritel, 14,99% debitur kredit korporasi, 6,91% debitur kredit komersial, 9,00% debitur kredit KPR, 2,30% debitur kredit BPR dan LKM, 4,16% debitur kredit UMKM dan sebesar 2,84% debitur kredit internasional.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan kegiatan usaha perbankan sebagai berikut:

B.1.1. PENGHIMPUNAN DANA

Penghimpunan dana yang diarahkan kepada dana-dana ritel/perorangan disamping mempertahankan nasabah korporasi maupun instansi dan departemen terkait. Penghimpunan dana dilakukan melalui produk-produk sebagai berikut:

Giro

Dana pihak ketiga dalam Rupiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan Perseroan. Perseroan memiliki produk giro dengan nama bjb Giro Rupiah dan bjb Giro Valas. Untuk bjb Giro Rupiah Perorangan dapat diberikan fasilitas kartu ATM.

Tabungan

Untuk meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga, Perseroan menyediakan beberapa pilihan produk tabungan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah saat ini, tabungan memiliki fasilitas jaringan lebih dari 23.000 ATM di seluruh Indonesia, dapat melakukan transaksi tarik tunai sampai dengan Rp10 juta, transfer antar bank melalui fasilitas jaringan ATM Bersama dan/atau jaringan ATM Prima sampai dengan Rp25 juta, dapat dijadikan agunan kredit, fasilitas kartu ATM berfungsi sebagai kartu debit (Prima Debit) dengan transaksi sampai Rp10 juta, dapat melakukan pembayaran berbagai tagihan serta suku bunga harian yang kompetitif. Produk tabungan tersebut antara lain sebagai berikut:

- ✓ **Tabungan bjb Tandamata (Tabungan Anda Masa Datang)** adalah produk tabungan yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka menjangkau golongan masyarakat kecil dan menengah, melalui setoran awal yang relatif ringan dan diikutsertakan dalam Undian Berhadiah Perseroan
- ✓ **Tabungan bjb Tandamata Gold** adalah produk tabungan perorangan yang diterbitkan Perseroan yang bertujuan untuk menjangkau golongan masyarakat menengah keatas dengan beberapa tambahan fasilitas yang dimiliki diantaranya suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk tabungan lain, diikutsertakan dalam Undian Berhadiah Perseorangan, fasilitas perlindungan asuransi untuk nasabah yang mencapai saldo tertentu.
- ✓ **Tabungan bjb Tandamata Dollar** adalah salah satu produk tabungan valuta asing dari bank **bjb** tersedia dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) dan Dollar Singapura (SGD). Diperuntukan bagi nasabah perorangan, non perorangan maupun joint account.
- ✓ **Tabungan bjb Tandamata Bisnis** adalah produk tabungan perorangan yang diterbitkan oleh Perseroan dengan fasilitas dan informasi yang dibutuhkan untuk menjangkau para pelaku usaha nasabah perorangan dengan usaha kecil dan menengah serta Optimalisasi Dana Usaha Nasabah dengan beberapa fasilitas yang dimiliki diantaranya suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk tabungan lain, fasilitas autotransfer dari rekening Tandamata Bisnis ke Rekening Giro yang dimiliki oleh nasabah.
- ✓ **Tabungan bjb Tandamata Berjangka** adalah Tabungan Anda Masa Datang perorangan dalam mata uang rupiah dengan jumlah setoran bulanan dan jangka waktu tertentu yang disertai dengan manfaat pertanggungansuan sesuai ketentuan bank. Terdapat rekening utama yang berlaku sebagai rekening sumber dana untuk setoran rutin bjb Tandamata Berjangka yang dilakukan melalui proses autodebet, yang tanggal pendebetannya dapat dipilih sesuai dengan keinginan nasabah. Atas saldo bjb Tandamata Berjangka tidak dapat dilakukan pengambilan & penarikan layaknya tabungan pada umumnya kecuali berniat menutup rekening tersebut. Bjb Tandamata Berjangka akan berakhir dalam hal telah jatuh tempo / tidak melakukan setoran selama 3 bulan berturut-turut atau atas permintaan nasabah.
- ✓ **Tabungan bjb Tandamata Purnabhakti** adalah Produk Tabungan yang diperuntukan bagi nasabah pensiunan dalam mata uang rupiah yang dipergunakan sebagai media penerimaan untuk pembayaran pensiun kelolaan PT Taspen dan PT Asabri. Diberikan fasilitas kartu ATM sesuai dengan permohonan nasabah.
- ✓ **Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah)** adalah produk tabungan bersama yang dikeluarkan oleh BPD seluruh Indonesia, yang diikutsertakan dalam 2 Undian yaitu BPD seluruh Indonesia dan Undian Gratis Berhadiah Perseroan. Diberikan fasilitas kartu ATM bagi nasabah Simpeda.
- ✓ **TabunganKu** adalah Tabungan dalam mata uang rupiah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui budaya menabung. Diperuntukan bagi nasabah perorangan dan tidak diperbolehkan untuk Badan Usaha/ Badan Hukum maupun *Joint Account*. Satu orang nasabah hanya memiliki satu rekening TabunganKu di satu bank untuk produk yang sama, kecuali bagi orang tua yang membuka rekening untuk anak yang masih dibawah perwalian sesuai Kartu Keluarga yang bersangkutan. Diberikan fasilitas Kartu ATM bagi nasabah TabunganKu.
- ✓ **Tabungan bjb Tandamata My First** adalah Tabungan yang diperuntukan bagi nasabah perorangan berusia 0-17 tahun dalam mata uang rupiah sebagai tabungan edukasi perbankan sejak dini bagi anak untuk memulai belajar dan membudayakan menabung. Diberikan fasilitas kartu ATM bagi nasabah Tandamata My First.
- ✓ **Simpanan Pelajar (Tabungan Simpel)** adalah produk tabungan bersama yang dikeluarkan oleh OJK yang diperuntukan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung. Produk SimPel hanya dapat dipasarkan secara kolektif yang didahului dengan adanya perjanjian kerjasama (PKS) antara Sekolah dengan Perseroan, diperuntukan bagi nasabah perorangan WNI yang berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP. Perseroan dapat melakukan konversi atau perubahan jenis tabungan SimPel mejadi produk tabungan bank bjb lainnya pada saat nasabah mencapai usia 17 tahun ke atas.

- ✓ **bjb Tandamata Simuda** adalah produk tabungan untuk mendukung budaya menabung bagi pemuda dan mahasiswa. Diperuntukan bagi nasabah perorangan kelompok usia 18-30 tahun, dengan jumlah setoran bulanan dan jangka waktu tertentu dengan mekanisme autodebet dari rekening sumber dana, yang dilengkapi perlindungan asuransi jiwa dengan skema asuransi mikro.
- ✓ **bjb Simuda Investasiku** adalah Layanan installment reksa dana bagi nasabah perorangan yang memberikan kemudahan pembelian produk reksa dana untuk golongan pemuda atau mahasiswa, dengan fitur installment reksa dana yang dilengkapi perlindungan asuransi jiwa dengan skema asuransi mikro.

Deposito

Seperti kegiatan usaha di setiap bank pada umumnya, Perseroan juga menyediakan produk-produk deposito yang ditawarkan kepada nasabah antara lain sebagai berikut:

- ✓ **bjb Deposito Berjangka** adalah Simpanan berjangka pihak ketiga baik perorangan maupun non perorangan dalam mata uang rupiah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara deposan dengan bank. Pencairan yang dilakukan sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya penalti berupa tidak dibayarkannya bunga berjalan. Jangka waktu penempatan bjb deposito berjangka adalah 1,3,6,12,24 bulan. Terdapat fasilitas Automatic Roll Over (ARO) yaitu perpanjangan secara sistem pada deposito yang telah jatuh tempo. Bunga yang diperoleh dapat dipindahbukukan ke rekening bank bjb maupun di transfer ke rekening bank lain.
- ✓ **bjb Deposito Suka-Suka** adalah Simpanan berjangka pihak ketiga perorangan dalam mata uang rupiah pada bank yang dapat dicairkan sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan biaya penalti, diperuntukan bagi nasabah perorangan. Jangka waktu penempatan bjb deposito suka-suka adalah 1,3,6,12 bulan. Terdapat fasilitas Automatic Roll Over (ARO) yaitu perpanjangan secara sistem pada deposito yang telah jatuh tempo. Bunga yang diperoleh dapat dipindahbukukan ke rekening bank bjb maupun di transfer ke rekening bank lain.
- ✓ **bjb Deposito Valas** adalah Simpanan berjangka pihak ketiga baik perorangan, non perorangan maupun joint account dalam mata asing (USD,SGD,EUR,JPY) pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara deposan dengan bank. Jangka waktu penempatan bjb deposito berjangka adalah 1,3,6,12,bulan. Apabila dicairkan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan biaya penalti, dan bunga berjalan tidak dibayarkan.
- ✓ **bjb Deposito Diskonto** adalah simpanan berjangka atas nama nasabah dengan pembayaran bunga dibuka yang dikeluarkan oleh bank yang bukti simpanannya tidak dapat diperjualbelikan. Jangka waktu deposito berjangka diskonto adalah 1,3,6,12 bulan.

Berikut ini merupakan pertumbuhan dana pihak ketiga Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Giro	21.259.883	24.762.436
Tabungan	31.276.436	26.548.140
Deposito	73.883.498	70.438.502
Total	126.419.817	121.749.083

B.1.2. PENYALURAN DANA

Dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, maka penyaluran dana lebih diarahkan kepada peningkatan kredit dan pembiayaan ritel yang memberikan *multiplier effect* kepada seluruh sektor usaha kecil, serta penyaluran program kredit kepada debitur-debitur binaan yang prospektif dengan tetap mengatur kesesuaian penyaluran kredit konsumtif dan produktif secara bertahap. Sedangkan untuk dana-dana yang belum tersalurkan dalam bentuk kredit, dioptimalkan dalam bentuk penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan memperhatikan faktor likuiditas, rentabilitas dan risiko.

Penyaluran dana Perseroan kepada nasabah dilakukan melalui berbagai produk-produk sebagai berikut:

Kredit Umum

- a. bjb Kredit Guna Bhakti
Fasilitas kredit dengan tujuan multiguna bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)/Non-ASN berpenghasilan tetap yang gajinya sudah/ belum disalurkan melalui bank bjb.
- b. bjb Kredit Pra Purna Bhakti (KPPB)
Fasilitas kredit dengan tujuan multiguna bagi ASN yang akan memasuki masa pensiun dengan jangka waktu kredit dapat melintasi usia pensiun.
- c. bjb Kredit Purna Bhakti (KPB)
Fasilitas kredit bagi Calon Debitur/Debitur dengan status Pensiun Sendiri atau Pensiun Janda/Duda yang pensiun bulanannya telah disalurkan melalui bank atau kantor bayar lainnya dimana sumber pengembaliannya berasal dari pensiun bulanan.
- d. bjb Back to Back Loan
Fasilitas kredit bagi kepada debitur perorangan dengan jaminan berupa Agunan Kas.
- e. bjb KPR
Fasilitas kredit kepada Calon Debitur perorangan untuk pembiayaan kepemilikan Properti, baik pembelian baru atau second dengan beragam tujuan fasilitas kredit: Pembelian Rumah (rumah tapak/ apartemen/ ruko/ rukan/ lainnya), Take Over XTRA, Top Up, Membangun, dan Multiguna.
- f. bjb KKB
Pemberian fasilitas kredit kepada Debitur perorangan dengan tujuan pembelian kendaraan bermotor atau kendaraan bermotor berwawasan lingkungan non produktif, baik baru maupun bekas atau tujuan refinancing multiguna dan atau tujuan take over pengambilalihan kredit di Lembaga Jasa Keuangan.
- g. bjb MLT BPJS Ketenagakerjaan
Fasilitas kredit konsumtif yang diberikan Bank kepada calon debitur peserta BPJS Ketenagakerjaan berupa Kredit Pemilikan Rumah, Pinjaman Uang Muka Perumahan, Pinjaman Renovasi Perumahan.
- h. bjb KPR Sejahtera FLPP
Pembiayaan rumah bersubsidi berkerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat untuk mewujudkan rumah idaman dengan suku bunga rendah sepanjang tenor, cicilan ringan, dan jangka waktu panjang untuk rumah tapak atau rumah susun.
- i. bjb KPR TAPERA
Fasilitas kredit konsumtif yang diberikan bank bjb kepada Calon Debitur perorangan yang berpenghasilan rendah berupa Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Renovasi Rumah, dan Kredit Pembangunan Rumah.
- j. bjb KPR Gaul
Fasilitas kredit bagi Calon Debitur anak muda/generasi milenial yang memiliki fix income dan ingin memiliki rumah dengan bunga kompetitif serta uang muka minimal 0%.
- k. bjb KPR Lelang
Fasilitas kredit bagi Calon Debitur yang ingin memiliki properti/properti usaha (rumah tapak/rumah toko/toko/kantor dan lainnya) melalui mekanisme Lelang baik dari bank bjb ataupun bank lain.
- l. bjb Credit Card
Kartu kredit co-branding hasil kolaborasi dua bank besar, yaitu bank bjb dan BNI. Pemegang Kartu akan mendapatkan double benefit, karena selain dapat menikmati program diskon yang diciptakan eksklusif dari bank bjb, nasabah juga dapat menikmati fitur dan manfaat serta promo dari kartu kredit BNI regular.
- m. bjb Kredit Mikro Utama
Fasilitas Kredit bagi para pelaku usaha perorangan, Badan Usaha (PT, CV) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam sektor ekonomi produktif berskala Mikro, Kecil dan Menengah yang telah menjalankan usahanya selama minimal 2 (dua) tahun dengan plafon pinjaman maksimal Rp500.000.000.

- n. Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM)
Fasilitas kredit bagi para pelaku baik perorangan maupun badan usaha dalam sektor ekonomi produktif yang masuk kategori Usaha Kecil dan Menengah yang telah menjalankan usahanya selama minimal 3 (tiga) tahun dengan plafon pinjaman di atas Rp500.000.000 sampai dengan maksimal Rp2.000.000.000.
- o. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Fasilitas kredit bagi para pelaku baik perorangan maupun badan usaha dalam sektor ekonomi produktif yang masuk kategori Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha telah berjalan minimal 6 (enam) bulan dengan plafon maksimal Rp500.000.000. Jenis KUR terdiri dari KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus dan KUR Penempatan PMI.
- p. bjb Kredit Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG)
Fasilitas kredit kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi dengan jaminan Resi Gudang, dan mendapatkan subsidi Bunga dari Pemerintah. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
- q. Kredit bjb Mesra
Fasilitas kredit bagi masyarakat kecil yang belum bankable dengan plafond maksimal Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Kredit bjb Mesra memiliki keunggulan bunga 0%, tanpa agunan dan bebas biaya provisi.
- r. Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Terpadu (PESAT)
Selain memberikan permodalan, bank bjb memiliki program pendampingan yaitu Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Terpadu (PESAT) yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas usaha para pelaku UMKM agar semakin maju dan berkembang. PESAT bank bjb terdiri dari 3 (tiga) Pilar yaitu Pilar pertama Pesat Kapasitas Usaha, Pilar kedua Pesat Wirausaha Baru dan Pilar Ketiga Pesat Go Digital.
- s. bjb Kredit Cash Collateral
Fasilitas kredit dengan agunan Cash Collateral (agunan yang bersifat likuid yaitu berupa uang kas atau yang dipersamakan dengan uang kas antara lain giro, tabungan dan deposito).
- t. bjb Kredit Investasi
Fasilitas kredit untuk membiayai kebutuhan barang-barang modal atau aktiva tetap dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi (perluasan), relokasi maupun project financing atau refinancing.
- u. bjb Kredit Modal Kerja
Fasilitas kredit untuk membiayai aset lancar dan/ataumenggantikan hutang dagang, serta membiayai kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan karakter bisnisnya.
- v. bjb Kredit Modal Kerja Kontrak
Fasilitas kredit modal kerja untuk membiayai kebutuhan modal kerja Debitur yang memperoleh kontrak pengadaan barang/jasa atau penyelesaian suatu proyek dalam rangka pelaksanaan jasa konstruksi dan usaha penyediaan bangunan.
- w. bjb Kredit Modal Kerja Kepada Pengembang
Fasilitas kredit modal kerja untuk untuk membiayai kebutuhan modal kerja pengembang dalam melaksanakan pekerjaan/ kegiatan konstruksi pengadaan bangunan dan/atau sarana dan prasarana yang dimaksudkan untuk dijual.
- x. bjb Kredit Modal Kerja Resi Gudang
Fasilitas kredit modal kerja yang diberikan dengan jaminan komoditas yang disimpan dalam gudang untuk Debitur yang tidak dalam kategori penerima kredit melalui Skema Subsidi Resi Gudang.
- y. bjb Kredit Jangka Pendek
Fasilitas Kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan calon debitur/debitur untuk pemenuhan deficit cash flow dalam jangka waktu pendek.
- z. bjb Kredit Kepada Bank Perekonomian Rakyat (BPR)
Fasilitas kredit kepada BPR untuk tujuan ekspansi usaha.

- å. bjb Kredit Kepada Koperasi
Fasilitas kredit kepada Koperasi untuk tujuan penambahan modal kerja.
- ä. bjb Kredit Modal Kerja Kepada Lembaga Pembiayaan
Fasilitas kredit kepada lembaga pembiayaan yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan modal kerja Lembaga Pembiayaan dengan pola *executing*.
- ö. Pinjaman Daerah
Fasilitas kredit yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi untuk membiayai kegiatan investasi maupun *deficit cash flow* daerah.
- aa. Receivable Financing
Fasilitas kredit kepada penjual/seller dalam rangka pembiayaan perdagangan.
- bb. Kredit Investasi Kepada PDAM
Fasilitas kredit kepada PDAM untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan atau pendirian proyek baru.
- cc. Distributor Financing
Fasilitas kredit kepada Distributor dan/atau Sub Distributor sebagai jaminan pembayaran atas pengiriman produk dari Principal/ Main Distributor.

Berikut ini merupakan pertumbuhan kredit yang diberikan oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Konsumer	49.535.855	47.143.365
Ritel	19.749.628	18.479.344
Korporasi	25.526.157	16.527.086
Komersial		7.937.368
KPR	10.507.382	9.183.365
BPR dan LKM	2.673.400	3.007.780
UMKM	4.842.026	3.979.520
International	3.307.940	-
Total	116.142.388	106.257.828

Prosedur Pengajuan dan Pemberian Kredit

Kebijakan Perseroan dalam proses pemberian kredit dan pengawasan kredit adalah sebagai berikut:

- I. Tahap Penetapan Target Market
 - Melakukan identifikasi awal terhadap bidang usaha debitur/calon debitur yang potensial yang akan dibiayai oleh Perseroan.
 - *Relationship Officer* melakukan pemetaan terhadap potensi kredit yang diselaraskan dengan penetapan target market.
 - Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk analisa kredit yang diajukan oleh debitur/calon debitur.
 - Melakukan dokumentasi kredit dan administrasi kredit.
- II. Tahap Verifikasi
 - Menetapkan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) sebagai ketentuan minimum yang ditetapkan sebagai *pre-screening* calon debitur.
 - Melakukan *credit checking* yang dilakukan oleh Unit Bisnis dan merupakan media verifikasi mengenai reputasi dan untuk memperoleh keyakinan atas kondisi usaha debitur/calon debitur. *Credit checking* dapat dilakukan melalui bank checking, trade checking dan referensi.
 - Menerapkan model pemeringkatan (*credit rating*) yang merupakan salah satu metode yang digunakan dalam upaya mitigasi risiko kredit. Untuk kredit komersial, model pemeringkatan yang digunakan berupa *credit rating* yang mengurutkan debitur/calon debitur, fasilitas, dan/atau proyek pekerjaan berdasarkan tingkat risiko terjadinya gagal bayar (*probability of default*). *Credit rating* dilaksanakan oleh Unit Bisnis dan Unit *risk reviewer* dilakukan review

secara berkala. Apabila terdapat informasi kualitatif yang berdampak signifikan terhadap kondisi debitur/calon debitur, segera dilakukan *review* atas *credit rating* tersebut oleh Unit Bisnis dan Unit *Risk Reviewer* untuk melihat dampaknya terhadap *credit rating* dan/atau *rating* debitur/calon debitur.

III. Tahap Analisa Kredit

- Melakukan analisa kredit berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan dari debitur/calon debitur.
- Ketika data dan informasi debitur/calon debitur telah lengkap, akan dilanjutkan dengan keputusan kredit yang ditetapkan oleh manajemen Perseroan yang menggunakan *four eyes principle* dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudent banking principles*).
- Komite kredit Perseroan akan melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan kredit dalam jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Direksi.
- Selanjutnya Perseroan akan menerbitkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang ditujukan kepada calon debitur yang berisi penawaran pemberian fasilitas kredit kepada calon debitur termasuk di dalamnya syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon debitur dan bersifat tidak mengikat. SPPK ini dimaksudkan agar calon debitur memahami terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan pemberian kredit dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh Perseroan.

IV. Tahap Persetujuan Kredit

- Setelah debitur/calon debitur menyetujui SPPK Perseroan, akan dilanjutkan dengan proses penerbitan perjanjian kredit dan penandatanganan perjanjian kredit antara Perseroan dengan debitur/nasabah. Perjanjian kredit ini mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat adanya pinjam meminjam uang.

Selain penghimpunan dan penyaluran dana, Perseroan melayani jasa-jasa perbankan lainnya antara lain:

1. bjb digi
2. bjb digicash
3. bjb EDC
4. bjb e-SAMSAT Jabar
5. bjb e-Tax
6. bjb edu-pay
7. bjb Tip FX
8. bjb Deposito on Call
9. bjb Custody
10. bjb Wali Amanat
11. bjb DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan)
12. bjb Remittance
13. bjb Quick Cash
14. bjb Bisa (Laku Pandai)
15. bjb Call
16. bjb Cash Management Service
17. Internet Banking Corporate
18. Signal (Samsat Digital Nasional)
19. Jaminan Bank (Garansi Bank)
20. Letter of Credit & SKBDN
21. Pre Post Shipment Financing
22. Inkaso
23. Kiriman Uang
24. Western Union
25. Transfer Kliring Antar Wilayah (Intercity Clearing)
26. BPDnet Online
27. Fasilitas Safe Deposit Box (SDB)
28. Bancassurance
29. Reksadana
30. Produk Treasury
31. Mobile Banking (M-ATM Bersama)
32. Layanan bjb Precious
33. Layanan Weekend Banking
34. Layanan Kas Mobil
35. Layanan Penerimaan Pencairan Jaminan dan Pembayaran BUBM BPJS Ketenagakerjaan
36. Layanan Penerimaan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan.

B.2. JARINGAN DISTRIBUSI

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 5 kantor wilayah dengan dengan rincian sebagai berikut:

Wilayah	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas	ATM
Kantor wilayah I	17	260	108	517
Kantor wilayah II	16	190	76	397
Kantor wilayah III	13	221	100	408
Kantor wilayah IV	10	117	67	365
Kantor wilayah V	8	32	1	89
Total	64	820	352	1.776

B.3. PEMASARAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi pesaing yang memiliki kegiatan usaha yang sejenis. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dan strategi pemasaran yang efektif menghadapi pertumbuhan kebutuhan nasabah yang semakin bervariasi. Berikut ini merupakan strategi pemasaran yang dijalankan oleh Perseroan:

Pemasaran Kredit

1. Program pemberian tingkat suku bunga khusus yang disesuaikan dengan local demand untuk Kantor Cabang bank bjb, baik di wilayah Jawa Barat maupun di luar wilayah Jawa Barat
2. Program pemberian tingkat suku bunga khusus yang diberikan kepada debitur new, debitur top up dan debitur mengulang produk bjb Kredit Guna Bhakti
3. Program pemberian reward/insentif kepada nasabah Perseroan yang dapat memberikan referral debitur kredit konsumen
4. Program Penghargaan Nasabah Setia
5. Program bjb Perjalanan Religi
6. Program bjb Musisi

Pemasaran Kredit Ritel

- Optimalisasi penyaluran bjb KGB Pola 2 atas PKS Nasional
- Referral marketing melalui pemberian komisi/benefit kepada mitra bank bjb yang telah memberikan referral debitur melalui program All Get Member
- Pricing melalui pemberlakuan program marketing berupa sweetener kepada calon debitur/debitur eksisting melalui pricing khusus
- Pengembangan infrastruktur di sektor teknologi informasi secara bertahap
- Kolaborasi dengan pihak TASPEN, ASABRI dan DAPEN dalam kegiatan sosialisasi
- Kolaborasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)/Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
- Kolaborasi dengan himpunan/paguyuban pensiunan seperti Persatuan Wredatama Reupblik Indonesia

Pemasaran Kredit Korporasi

- Menyalurkan kredit terhadap sektor industri yang potensial sesuai dengan portofolio guideline
- Meningkatkan fee based income melalui pola pembiayaan sindikasi
- Meningkatkan kerjasama yang baik dengan lembaga dan instansi
- Pemetaan potensi kredit di antaranya melalui referral, internal data mining, eksternal data mining dan media searching
- Memberikan suku bunga khusus dengan dasar perhitungan Customer Profitability Analysis (CPA)
- Secara aktif melakukan cross selling produk kredit dengan menggali potensi lain debitur dalam hal penempatan dana dalam bentuk giro, tabungan dan deposito yang dapat meningkatkan CASA bank, serta menggali kebutuhan kredit lainnya

Pemasaran Kredit Komersial

- Memberikan penawaran untuk pembiayaan pinjaman daerah dan pembiayaan kepada RSUD
- Melakukan re-mapping potensi dan top up debitur eksisting yang memenuhi RAC dan melakukan mapping BPR dan Koperasi yang berkinerja baik untuk dilakukan penawaran

Pemasaran Kredit UMKM

- Fokus terhadap monitoring pipeline dengan mengoptimalkan monitoring terhadap pergerakan dan eksekus pipeline dari kantor cabang oleh kantor wilayah
- Optimalisasi data pipeline calon debitur

- Optimalisasi penawaran top up dengan cara kantor cabang fokus melakukan penawaran top up kepada debitur eksisting
- Melakukan monitoring on ccall terhadap debitur dengan kolektabilitas 2
- Optimalisasi pola kemitraan dan penyaluran KUR TKI
- Pengembangan produk dan penyempurnaan bisnis proses
- Pengembangan sistem aplikasi proses kredit yang terintegrasi melalui aplikasi bjb Mesra, DiSentra dan bjbLaku
- Penyaluran Kredit UMKM pola channeling melalui lembaga financial technology
- Refreshment dan peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan team UMKM
- Mendukung program pemerintah pusat dan daerah dalam penyaluran kredit produktif untuk segmen UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat, Kredit Skema Subsidi Resi Gudang serta Kredit bjb Mesra
- Meningkatkan Promosi produk dan layanan UMKM melalui media online dan offline

Pemasaran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

Perseroan memasarkan berbagai produk dan program KPR dengan keunikan fitur serta promo menarik untuk para calon debitur.

Strategi Pemasaran Dana Pihak Ketiga

- Peningkatan dan pengembangan fitur baik produk maupun layanan yang dapat menunjang kebutuhan nasabah di era digital untuk menyediakan layanan perbankan yang lebih efisien guna mendukung proses pemulihan ekonomi nasional
- Sinergitas dan kolaborasi dengan BPD-BPD lain di seluruh Indonesia untuk menambah feebased income Perseroan
- Menyelenggarakan program promosi tematik yang menarik dan tepat sasaran

Strategi Pemasaran bjb Prioritas

- Menyelenggarakan program promosi dan kegiatan yang menarik dan tepat sasaran

Strategi Pemasaran Wealth Management

- Perseroan melakukan berbagai aktivitas dan program promosi produk untuk meningkatkan penjualan reksa dana dan bancassurance

Strategi Pemasaran International and Transaction Banking

- Melakukan review dan penambahan counterparty untuk mendukung bisnis bank
- Mempertahankan hubungan yang baik dan menggali potensi kerjasama dengan counterparty serta melakukan cross selling berbagai produk yang dimiliki
- Peningkatan credit line sesuai dengan kebutuhan bisnis namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian
- Optimalisasi utilisasi credit line dalam rangka peningkatan bisnis dan pendapatan bank
- Menyediakan produk trade finance dengan tarif yang kompetitif dan optimalisasi trade facility yang sudah dibentuk
- Melakukan pemasaran terintegrasi produk trade finance and value chain
- Melakukan Promosi untuk produk remitansi
- Melakukan sales visit kepada nasabah yang transaksinya masih belum optimal
- Melakukan ekspansi bisnis dengan Perusahaan Aggregator terkait kerjasama pembayaran tagihan Perusahaan Air Minum (PAM)

Strategi Pemasaran Treasury

- Target pasar produk Treasury adalah nasabah perorangan dan non perorangan yang terbagi berdasarkan kebutuhan produk yang ditawarkan

Strategi Pemasaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan

- Memperkuat branding DPLK Perseroan diseluruh wilayah kerja jaringan kantor bank bjb dalam rangka meningkatkan jumlah kepesertaan
- Meningkatkan program marketing untuk memperluas pasar melalui literasi dan inklusi sesuai dengan potensi calon peserta milenial dan Gen-Z
- Optimalisasi penetrasi ke potensial customer dan captive market (existing customer)
- Meningkatkan program pemasaran dan kolaborasi dengan pendiri untuk menjadikan DPLK sebagai rantai produk Perseroan

B.4. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA

Di tengah perlambatan ekonomi global dengan ketidakpastian yang tinggi, tekanan inflasi secara global diperkirakan masih tinggi dipicu oleh kenaikan harga energi dan pangan akibat eskalasi konflik geopolitik, serta fenomena El Nino. Ekonomi global diperkirakan melambat menjadi 2,8% pada 2024. Penurunan inflasi di negara maju, termasuk AS, berlanjut, meski masih berada di atas sasaran, sementara inflasi Tiongkok menurun dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat. Siklus

kenaikan suku bunga kebijakan moneter negara maju, termasuk Fed Funds Rate (FFR), diperkirakan telah berakhir meskipun masih bertahan tinggi pada semester I 2024, dengan kemungkinan akan mulai menurun pada semester II 2024. Yield obligasi Pemerintah negara maju, termasuk US Treasury, menurun secara gradual tapi masih berada di level tinggi sejalan dengan premi risiko jangka Panjang (term-premia) terkait besarnya pembiayaan fiskal dan utang pemerintah AS. Tekanan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia juga berkurang. Perkembangan tersebut mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing dan mengurangi tekanan pelemahan nilai tukar di emerging market.

Perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global. Percepatan belanja negara terkait penyelenggaraan Pemilu dan penguatan peran APBN sebagai shock absorber diharapkan dapat mendorong konsumsi Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,7%-5,5% didukung oleh permintaan domestik utamanya berlanjutnya pertumbuhan konsumsi serta peningkatan investasi khususnya bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Sementara itu, kinerja ekspor diperkirakan belum kuat sebagai dampak perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas.

Transmisi kebijakan moneter berjalan dengan baik. Suku bunga pasar uang (IndONIA) bergerak dalam kisaran BI-Rate sebesar 5,81% pada 16 Januari 2024. Suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tercatat menarik pada level 6,68%, 6,78% dan 6,87% masing-masing untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan pada 15 Januari 2024 sehingga mendukung efektivitas SRBI sebagai instrumen moneter yang pro-market. Sementara itu, suku bunga perbankan tetap rendah dipengaruhi oleh likuiditas perbankan yang memadai serta kebijakan transparansi SBDK yang meningkatkan efisiensi suku bunga perbankan. Ke depan, pertumbuhan kredit diperkirakan meningkat dalam kisaran 10%-12% pada 2024, sejalan dengan tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik. Kinerja transaksi ekonomi dan Keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Nilai transaksi digital banking diproyeksikan meningkat 9,11% (yoy) hingga mencapai Rp63.803,77 triliun pada tahun 2024. Sementara nilai transaksi Uang Elektronik (UE) diproyeksikan meningkat 25,77% (yoy) hingga mencapai Rp1.051,24 triliun pada tahun 2024.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi domestic yang diprediksi rebound di kisaran 4%-5%, maka harus didukung oleh pertumbuhan kredit perbankan. Untuk pertumbuhan kredit tahun 2021 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pertumbuhan kredit tumbuh sebesar 7% -9%, sementara DPK akan tumbuh pada kisaran 8%.

Dengan proyeksi tersebut bank bjb yakin memiliki prospek yang baik serta peluang untuk terus tumbuh secara berkelanjutan. Peluang yang dimiliki bank bjb antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan skala pasar, sebagian besar Kantor Cabang bank bjb masih menjadi market nichers di wilayah operasionalnya sehingga masih memiliki peluang yang cukup besar untuk meningkatkan pangsa pasarnya dari sisi aset, baik DPK maupun kredit
2. Semakin meningkatnya literasi keuangan masyarakat melalui program yang dicanangkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka menerapkan kebijakan keuangan inklusif sebagai suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (financial service deepening) yang ditujukan kepada masyarakat ini the botton of the pyramid untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (keeping), transfer, menabung maupun pinjaman dari asuransi.
3. Kegiatan pelaku ekonomi yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta merupakan potensi pengembangan perkreditan dan pendanaan.
4. Berbagai proyek pembangunan infrastruktur, termasuk Proyek Strategis Nasional berada di wilayah kerja Jawa Barat dan Banten, sehingga bank bjb memiliki kesempatan untuk memaksimalkan penyaluran kredit dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal.
5. Dukungan dari Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengembangkan bank bjb sebagai penggerak dan pendorong laju perekonomian di daerah
6. Potensi yang masih besar dalam pengembangan produk digital untuk menyasar segmen ritel dan membangun ekosistem bisnis bank bjb.

Berdasarkan hal yang telah dijabarkan di atas, bank bjb optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerja dalam jangka pendek maupun jangka panjang secara berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada kekuatan yang dimiliki oleh bank bjb yaitu:

1. Berada di Provinsi Jawa Barat dan Banten yang mempunyai sumber daya alam yang luas, sumber daya manusia dan kawasan industri besar serta kegiatan ekonomi yang terus berkembang.
2. Sebagai institusi pengelola keuangan kas daerah bank bjb memiliki akses yang luas dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta telah tercatat sebagai perusahaan publik yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Memiliki basis nasabah yang loyal dalam jumlah sangat besar yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN), para Pensiunan dan masyarakat lokal, terutama di wilayah Jawa Barat dan Banten sehingga memudahkan dalam pembangunan ekosistem transaksi.

4. Memiliki jaringan kantor yang relatif menyebar di lingkungan kegiatan ekonomi yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta yang merupakan pusat serta penopang laju perekonomian di Indonesia. Selain itu juga didukung juga oleh jaringan kantor lainnya yang sudah tersebar di 14 Provinsi di Indonesia.
5. Telah ditunjuknya bank bjb sebagai partner dari Pemerintah Pusat yang melaksanakan penyaluran gaji Pemerintahan Pusat yang ditempatkan di Daerah.
6. Transformasi digital bank bjb melalui pengembangan layanan berbasis digital seperti transaksi dengan bjb Digi menjadi lebih mudah karena fitur layanan terintegrasi melalui mobile banking system bank bjb.
7. Memiliki program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu (PESAT) yang mencakup Program Pesat Sehat dan Produktif. Program Pesat Kapasitas Usaha dan Program Pesat Wirausaha Baru dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
8. Berbagai penghargaan yang telah diperoleh bank bjb selama beberapa periode baik untuk kategori daerah, nasional maupun internasional dari berbagai lembaga Swasta, BUMD/ BUMD maupun Pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya.

Strategi Usaha

Untuk dapat menangkap berbagai peluang yang dimiliki bank bjb, maka arahan strategi yang tertuang dalam bentuk Arahan Strategi Direksi Tahunan (ASDT) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pangsa pasar kredit secara prudent dengan portofolio management business melalui pengembangan digitalisasi dan menjaga kualitas kredit
2. Menjaga likuiditas yang sustain dengan optimalisasi share of wallet untuk mendukung akselerasi penyaluran dana
3. Menyediakan solusi berbasis teknologi informasi guna mendukung bisnis dengan keamanan informasi yang terkendali
4. Peningkatan pendapatan melalui pemanfaatan potensi bisnis lainnya dan pengembangan bisnis secara anorganik serta pengelolaan biaya secara efektif dan efisien
5. Memperkuat struktur modal dan mendorong peningkatan kompetensi, produktivitas serta integritas human capital
6. Memperkuat sinergi untuk membangun ekosistem inklusi keuangan dan akselerasi transaksi instrumen keuangan berkelanjutan
7. Mendukung pengelolaan manajemen risiko yang efektif dan penguatan governance serta compliance dalam mencapai kinerja bank bjb yang berkelanjutan

Kecenderungan Usaha

Pada tanggal laporan keuangan terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi kondisi keuangan masa datang.

Kebijakan Riset dan Pengembangan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kebijakan terkait riset dan pengembangan dalam menjalankan kegiatan usaha utama Perseroan.

B.5. PERSAINGAN USAHA

Perseroan sebagai bank konvensional, secara umum, menghadapi persaingan dengan seluruh bank umum yang ada di Indonesia dalam menentukan penguasaan pasar. Persaingan usaha tersebut antara lain dapat dilihat berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dan jumlah pinjaman yang diberikan oleh Perseroan.

Berikut ini tabel pangsa pasar Perseroan di industri perbankan Indonesia per tanggal 29 Februari dan 29 Februari 2023:

(dalam miliar Rupiah)

Kriteria	Keterangan	29 Februari	
		2024	2023
Jumlah Aset	Industri	11.121.426	10.422.140
	Perseroan	172.449	159.901
	Pangsa Pasar	1,55%	1,53%

(dalam miliar Rupiah)

Kriteria	Keterangan	29 Februari	
		2024	2023
Jumlah DPK	Industri	3.747.642	3.597.838
	Perseroan	123.701	116.194
	Pangsa Pasar	3,30%	3,23%
Jumlah Kredit yang Diberikan	Industri	7.188.333	6.445.815
	Perseroan	114.125	106.356
	Pangsa Pasar	1,59%	1,65%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (SPI OJK) Februari 2024

Perbandingan Rasio Keuangan dengan rata-rata industri Bank Umum

(dalam miliar Rupiah)

Kriteria	Keterangan	29 Februari	
		2024	2023
CAR	Industri	27,83%	26,01%
	Perseroan	19,61%	21,07%
BOPO	Industri	91,68%	82,16%
	Perseroan	89,10%	88,69%
ROA	Industri	2,55%	2,78%
	Perseroan	0,95%	1,00%
LDR	Industri	84,25%	80,00%
	Perseroan	87,83%	87,84%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) & Laporan Keuangan Publikasi Perseroan

Pangsa Pasar Berdasarkan Jumlah DPK

Total DPK Perseroan sampai dengan 29 Februari 2024 tercatat sebesar Rp123.701 miliar atau tumbuh sebesar 6,46% secara *year on year* (yoy). Dari total DPK tersebut, Perseroan berhasil menguasai pangsa pasar sebesar 3,30% di periode 29 Februari 2024.

Pangsa Pasar Berdasarkan Kredit yang Diberikan

Total kredit Perseroan sampai dengan 29 Februari 2024 tercatat sebesar Rp114.125 miliar atau tumbuh sebesar 7,30% secara *year on year* (yoy). Dari total kredit tersebut, Perseroan berhasil menguasai pangsa pasar sebesar 1,59% di periode 29 Februari 2024.

B.6. KESEHATAN PERSEROAN

Mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Perseroan yang dilakukan terhadap Risiko dan kinerja Perseroan.

Perseroan wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara *self assessment* untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Penilaian Tingkat Kesehatan dengan pendekatan Risiko (*Risk-Based Bank Rating*) tersebut dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor:

- Profil Risiko;
- Tata Kelola;
- Rentabilitas; dan
- Permodalan.

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor penilaian.

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank dikategorikan sebagai berikut:

- Peringkat Komposit 1 (PK-1) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Sangat Sehat.
- Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Sehat.
- Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Cukup Sehat.
- Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Kurang Sehat.
- Peringkat Komposit 5 (PK-5) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Tidak Sehat.

Hasil penilaian secara *self assessment* Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perseroan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

SFaktor Penilaian	Peringkat Komposit
	30 Desember 2023
Profil Risiko	2
Tata Kelola	1
Rentabilitas	2
Permodalan	2
Peringkat komposit	2

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perseroan posisi 31 Desember 2023, OJK telah menyatakan bahwa Tingkat Kesehatan Perseroan berada pada PK 2 (Sehat) yaitu Kondisi Perseroan secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas dan permodalan yang secara umum baik.

B.7. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”)

- Hak Merek “SUKA-SUKA” yang terdaftar di bawah No.IDM000318924 tanggal 5 Maret 2020 untuk kelas 36, untuk jangka waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan (5 Maret 2030);
- Hak Merek “TANDAMATA” yang terdaftar di bawah No.IDM000318925 tanggal 5 Maret 2020, untuk jangka waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan (5 Maret 2030);
- Hak Merek “BANK BJB”, yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000410956 tanggal 5 Desember 2021 untuk kelas 16, yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2032;
- Hak Merek “BANK BJB”, yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000410957 tanggal 5 Desember 2021 untuk kelas 16, yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2032;
- Hak Merek “BANK BJB”, yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000410959 tanggal 5 Desember 2021 untuk kelas 16, yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2032;
- Hak Merek “BANK BJB”, yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000410960 tanggal 6 Desember 2021 untuk kelas 16, yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2032;
- Hak Merek “BANK BJB”, yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000431205 tanggal 15 Desember 2021 untuk kelas 16, yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2032;
- Hak Merek “BANK BJB”, yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000432673 tanggal 5 Desember 2021 untuk kelas 16, yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2032;
- Hak Merek “BJB QUICKCASH - LOGO”, yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000478736 tanggal 5 Juni 2015 untuk kelas 36, yang telah diperpanjang masa berlakunya sampai dengan tanggal 30 Juli 2032;
- Hak Merek “QUICKCASH - LOGO”, yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000491087 tanggal 10 Agustus 2015 untuk kelas 36, yang telah diperpanjang masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2032.
- Hak Merek “bjb Bisa!” yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000899986 tanggal 15 Oktober 2021 untuk kelas 9, yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2030.
- Hak Merek “bjb Bisa!” yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000899987 tanggal 15 Oktober 2021 untuk kelas 16, yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2030.
- Hak Merek “bjb Bisa!” yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000930785 tanggal 7 Desember 2021 untuk kelas 36, yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2030.
- Hak Merek “T-SAMSAT” yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000930786 tanggal 7 Desember 2021 untuk kelas 35, yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2030.
- Hak Merek “T-SAMSAT” yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000895124 tanggal 29 September 2021 untuk kelas 36, yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2030.
- Hak Merek “T-SAMSAT” yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000899564 tanggal 14 Oktober 2021 untuk kelas 9, yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2030.
- Hak Merek “BJB TANDA MATA MY FIRST!” yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000886729 tanggal 1 September 2021 untuk kelas 9, yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2030.
- Hak Merek “BJB TANDA MATA MY FIRST!” yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000886735 tanggal 1 September 2021 untuk kelas 16, yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2030.
- Hak Merek “BJB TANDA MATA MY FIRST!” yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000895118 tanggal 29 September 2021 untuk kelas 35, yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2030.
- Hak Merek “BJB TANDA MATA MY FIRST!” yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000895119 tanggal 29 September 2021 untuk kelas 36, yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2030.
- Hak Merek “SUKA SUKA” yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000904122 tanggal 1 Nopember 2021 untuk kelas 35, yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2030.

22. Hak Merek "SUKA SUKA" yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000904152 tanggal 1 Nopember 2021 untuk kelas 36, yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2030.
23. Hak Merek "BJB DIGI" yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000929970 tanggal 16 Desember 2021 untuk kelas 9, yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Nopember 2030.
24. Hak Merek "BJB DIGI" yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000932988 tanggal 14 Desember 2021 untuk kelas 35, yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Nopember 2030.
25. Hak Merek "BJB DIGI CASH" yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000937282 tanggal 27 Desember 2021 untuk kelas 9, yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Nopember 2030.
26. Hak Merek "BJB DIGI CASH" yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000938107 tanggal 27 Desember 2021 untuk kelas 36, yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Nopember 2030.
27. Hak Merek "bank bjb Tandamata Untuk Negeri" yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000931211 tanggal 8 Desember 2021 untuk kelas 35, yang berlaku sampai dengan tanggal 13 Oktober 2030.
28. Hak Merek "bank bjb Tandamata Untuk Negeri" yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000914429 tanggal 8 Nopember 2021 untuk kelas 36, yang berlaku sampai dengan tanggal 14 Oktober 2030.
29. Hak Merek "bjb Disentra" yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000940271 tanggal 29 Desember 2021 untuk kelas 9, yang berlaku sampai dengan tanggal 8 Januari 2031.
30. Hak Merek "bjb Disentra" yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000940304 tanggal 29 Desember 2021 untuk kelas 35, yang berlaku sampai dengan tanggal 8 Januari 2031.
31. Hak Merek "bjb Disentra" yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000940316 tanggal 29 Desember 2021 untuk kelas 36, yang berlaku sampai dengan tanggal 8 Januari 2031.
32. Hak Merek "bjb LAKU" yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000940260 tanggal 29 Desember 2021 untuk kelas 36, yang berlaku sampai dengan tanggal 8 Januari 2031.
33. Hak Merek "bjb prioritas" yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000953861 tanggal 14 Maret 2022 untuk kelas 36, yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Maret 2031.
34. Hak Merek "bjb siap Untuk Masa Depanmu" yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM001120299 tanggal 15 September 2023 untuk kelas 9, yang berlaku sampai dengan tanggal 27 Desember 2032.
35. Hak Merek "bjb siap Untuk Masa Depanmu" yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM001120296 tanggal 15 September 2023 untuk kelas 35, yang berlaku sampai dengan tanggal 27 Desember 2032.
36. Hak Merek "bjb siap Untuk Masa Depanmu" yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM001124564 tanggal 27 September 2023 untuk kelas 36, yang berlaku sampai dengan tanggal 27 Desember 2032.
37. Hak Merek "BJB DIGI" yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000937249 tanggal 27 Desember 2021 untuk kelas 36, yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Nopember 2030.

IX. PERPAJAKAN

A. Pajak penghasilan atas bunga obligasi yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Obligasi penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan, yaitu:

- sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, untuk bunga dari obligasi dengan kupon;
- sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, untuk diskonto dari obligasi dengan kupon;
- sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga;
- Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak:

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dikenai pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan. Sedangkan untuk pemotongan pajak penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) dikenai pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) atau tax treaty.

B. Pajak Penghasilan atas Jasa di Bidang Perdagangan Surat-Surat Berharga

Atas penghasilan berupa imbalan jasa dengan nama apapun yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (rekanan) dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari penghasilan bruto (tidak termasuk PPN) oleh pihak yang wajib membayar. Apabila tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 4%. Untuk penghasilan jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga atau jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, yang diterima Bursa Efek, KSEI dan KPEI tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23.

Pembayaran jasa kepada pihak ketiga (tidak termasuk BUMN) di atas Rp10.000.000,- (termasuk PPN) maka Perseroan wajib memungut, menyetor, dan melapor PPN.

C. Bea Meterai

Efektif mulai tanggal 1 Januari 2021, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 terkait Bea di tetapkan penggunaan tarif tunggal Bea Meterai Rp.10.000 yang diberlakukan mulai 1 Januari 2021. Fasilitas & Pengenaan Bea Meterai atas dokumen tertentu seperti dokumen atas transaksi surat berharga diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 2022

D. Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak Perseroan telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Perseroan telah menyampaikan SPT tahun pajak 2023 dan 2022.

CALON PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi, para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Subordinasi kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebanyak-banyaknya Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak, yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi	Porsi Penjaminan		Jumlah Penjaminan	Persentase (%)
	Seri A	Seri B		
PT BRI Danareksa Sekuritas				
PT CIMB Niaga Sekuritas				
PT Indo Premier Sekuritas				
PT Mandiri Sekuritas				
PT Mega Capital Sekuritas				
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk				
Total			1.500	100%

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang turut dalam Emisi Obligasi Subordinasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Pada Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi ini, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan adalah PT CIMB Niaga Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sesuai dengan UUP2SK.

Metode Penentuan Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi subordinasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi, dan *risk premium* (sesuai dengan *rating* dari Obligasi Subordinasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat

: **PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.**

Financial Institution & Capital Market Division (FICD)

Menara 2 BTN Lantai 8

Jl. H.R Rasuna Said No. 1,

Jakarta Selatan 12980

Untuk Perhatian : Wali Amanat - Financial Services Department

- No. STTD : 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996
- Pedoman Kerja yang digunakan oleh Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.
- Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat nomor: 0394/PLJ-PO/2024 tanggal 12 Februari 2024.

Tugas Pokok:

Mewakili kepentingan pemegang Obligasi Subordinasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi Subordinasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi Subordinasi.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat:

- (i) Tidak Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan
- (ii) Tidak Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan.

Akuntan Publik

: **Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM)**

Plaza Asia Lantai 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Jakarta 12190

- Nama Rekan : Saptoto Agustomo
- No. STTD : STTD.AP-232/PM.22/2018 tanggal 6 Februari 2018
- Keanggotaan Asosiasi Institut Akuntan Publik Indonesia: 0499
- Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 0410424/SAT/11212/EL tanggal 1 April 2024.

Pedoman Kerja: Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP).

Fungsi utama dari Akuntan Publik dalam rangka Emisi Obligasi Subordinasi antara lain:

- Menerbitkan Surat Pernyataan Akuntan (*Comfort Letter*) yang akan ditujukan kepada OJK berkaitan dengan rencana penerbitan Obligasi;
- Pemberian bantuan kepada Penjamin Pelaksana Emisi sehubungan dengan uji tuntas (*due diligence*) yang akan mereka lakukan berkaitan dengan rencana penerbitan Obligasi, termasuk pertemuan, pembahasan prospektus dan pemberian tanggapan secara lisan atau dengan cara lain, atas pertanyaan yang diajukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi atau oleh penasihat mereka;
- Memberikan bantuan lainnya kepada Perseroan sehubungan dengan rencana penerbitan Obligasi, termasuk namun tidak terbatas pada pertemuan/diskusi dengan OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Konsultan Hukum**: HKGM & Partners**

Pondok Indah Plaza 3, Blok E/4 & E/5
Jl. T.B. Simatupang,
Jakarta 12310

- Nama Rekan : Ruli Fajar Hidayat
- No Keanggotaan Asosiasi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM): 200134.
- No. STTD : STTD.KH-38/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 9 Pebruari 2023.
- Pedoman Kerja yang digunakan oleh mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
- Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerjasama 0096/LEP-PKS/2024 tanggal 15 Maret 2024

Tugas Pokok:

Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas (dari segi hukum) atas fakta mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

Notaris**: Vita Cahyojati, S.H.M.Hum**

Jl. Jati Padang V Nomor 17 C
Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12540

- Nama Rekan : Vita Cahyojati
- No. STTD : STTD.N-193/PM.223/2019 tanggal 16 Juli 2019.
- Pedoman Kerja: Pernyataan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
- Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 0108/LEP-PKS/2024 tanggal 19 Maret 2024.

Tugas pokok Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain ini adalah membuat akta otentik atas:

- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Obligasi Subordinasi.
- Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Wali Amanat.

Perusahaan Pemeringkat**PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)**

Panin Tower Senayan City, lantai 17
Jalan Asia Afrika Lot. 19
Jakarta, 10270

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 0111/LEP-PKS/2024 tanggal 2 April 2024.

Pedoman Kerja : Kode etik PEFINDO mengacu pada *Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies* (IPSCP Code) yang diterbitkan oleh International Organization of Securities Commissions ("IOSCO"). Anggota-anggot IOSCO adalah otoritas Pasar Modal lebih dari 100 negara.

Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari Association of Credit Rating Agencies ini Asia ("ACRAA"). ACRAA adalah asosiasi yang didirikan oleh Asian credit rating agencies, dan diawasi oleh Asian Development Bank ("ADB").

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITERBITKAN SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI SELAMA KEWAJIBAN ATAS EFEK TERSEBUT BELUM LUNAS, DAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK No. 49/2020.

XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut sebagai "BTN") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi Subordinasi sesuai dengan UUPM sebagaimana diubah dalam UUP2SK.

Bank BTN dalam penerbitan Obligasi Subordinasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di OJK dengan No.10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi antara Perseroan dengan BTN.

BTN sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan *due diligence* terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. 279/FICD/FS/IV/2024 tanggal 17 April 2024 sebagaimana diatur dalam POJK No.20/2020.

BTN sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. 280/FICD/FS/IV/2024 tanggal 17 April 2024 menyatakan bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat :

- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
- Tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi dan/atau sukuk ijarah yang diwaliamanati sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020;
- Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi Subordinasi;
- Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024.

A. RIWAYAT SINGKAT

BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 *juncto* Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara.

Pendirian Perusahaan Persero BTN berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar BTN yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk. atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 28 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 April 2023 sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor : AHU-0023685.AH.01.02.Tahun 2023 serta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0057199 tanggal 18 April 2023.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 07 tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0105385 tanggal 15 Maret 2024. ("Akta No. 07")

1. Permodalan

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/IV/2024-1154 tanggal 2 April 2024 perihal Laporan Bulanan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir BTN per 31 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per lembar Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham Nominal	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	100,00
Jumlah Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah			
- Saham Seri B	1	500	0,00
1. Pemerintah	8.420.666.647	4.210.333.323.500	60,00
2. Masyarakat (<5%)	5.613.777.765	2.806.888.882.500	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.034.444.413	7.017.222.206.500	100,00
Sisa Saham dalam Portepel			
- Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
- Saham Seri B	6.443.987.587	3.221.993.793.500	
Total Saham dalam Portepel	6.443.987.587	3.221.993.793.500	

2. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 07 tanggal 6 Maret 2024, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama / Independen	:	Chandra Hamzah
Wakil Komisaris Utama / Independen	:	Iqbal Latanro
Komisaris	:	Andin Hadiyanto
Komisaris	:	Herry Trisaputra Zuna
Komisaris	:	Himawan Arief Sugoto
Komisaris Independen	:	Armand Bachtiar Arief
Komisaris Independen	:	Bambang Widjanarko ^{*)}
Komisaris Independen	:	Sentot Achmad Sentausa
Komisaris Independen	:	Adi Sulistyowati ^{*)}

Direksi:

Direktur Utama	:	Nixon Lambok Pahotan Napitupulu
Wakil Direktur Utama	:	Oni Febriarto Rahardjo
Direktur Consumer	:	Hirwandi Gafar
Direktur Finance	:	Nofry Rony Poetra
Direktur Human Capital, Compliance and Legal	:	Eko Waluyo
Direktur Assets Management	:	Elisabeth Novie Riswanti
Direktur Distribution and Institutional Funding	:	Jasmin
Direktur Information Technology	:	Andi Nirwoto
Direktur Risk Management	:	Setiyo Wibowo
Direktur Operational and Customer Experience	:	Hakim Putratama
Direktur SME and Retail Funding	:	Muhammad Iqbal ^{*)}

^{*)Berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkenaan dengan fit & proper test dan memenuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku.}

3. Kegiatan Usaha

BTN selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi “Menjadi *The Best Mortgage Bank* di Asia Tenggara pada tahun 2025”, dan misi antara lain secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah, mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak, menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.

Pada tahun 1974, BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

BTN mengemban tugas dari Pemerintah sebagai Bank yang melaksanakan Program Sejuta Rumah dalam rangka membantu seluruh masyarakat mendapatkan rumah. BTN telah menjadi kontributor utama pada peningkatan realisasi Program Sejuta Rumah Pemerintah, dengan konsisten berkontribusi lebih dari 60% per tahunnya.

BTN menjalankan *one stop solutions* di sektor perumahan dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan dan senantiasa konsisten dalam menjalankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Sejalan dengan komitmen BTN untuk memperkokoh dominasi bisnis di sektor perumahan, didukung organisasi yang solid dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi tinggi, BTN terus mengembangkan transformasi *digital banking* untuk mengembangkan potensi pasar yang ada serta mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin dinamis.

Dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas bisnis terutama dalam penyaluran kredit perumahan, BTN telah melakukan aksi korporasi Penambahan Modal Dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Right Issue*. BTN terus meningkatkan layanan perbankan yang dimiliki, disrupsi pandemi COVID-19 memberikan kesempatan bagi BTN untuk memacu performa layanan digital seperti *banking from home* dan aplikasi *mobile banking* BTN baru serta membuat variasi produk KPR bersama produk *cash management* maupun produk tabungan untuk menarik nasabah agar lebih loyal terhadap BTN seperti *launching* KPR BTN Gaess for Millenials, KPR BTN *Rent To Own*, Tabungan BTN Bisnis, peluncuran Portal BTN Properti, BTN Solusi dan Program Batara Spekta. Diperkuat dengan mengusung budaya AKHLAK yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, pandemi menjadi motivasi untuk memacu kinerja dalam memperbaiki dan meningkatkan *business process* serta mengembangkan sejumlah strategi meningkatkan pelayanan perbankan dan juga mendukung Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi, sebagai mitra Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan stimulus untuk menunjang perekonomian masyarakat.

BTN melalui penerapan berbagai kebijakan strategis berhasil mendapatkan penghargaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai *The Greatest Champions of GRC Excellence Performance 2023*, *The Best GRC For IT/Digital Transformation 2023* dan *The Best CEO For GRC Excellence 2023* pada ajang *GRC & Performance Excellence 2023*. Dalam ajang *ESG Disclosure Transparency Award 2023* BTN berhasil meraih *Predikat Leadership AA*, *The Asian Experience Award Tahun 2023* serta *Best Bank for CSR in Indonesia*.

BTN memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di bidang kredit komersial dan pengadaan. Selain itu, BTN juga berhasil memperoleh penghargaan antara lain *Millenials Popular Digital Brand* dalam produk KPR Gaess *Best Bank For Millenial Mortgage Program*, 1st Rank KPR BTN 3 kategori Asset Class > IDR 200 Triliun dalam ajang 11th Digital Brand Awards 2022, dan *Asia's Best Bank Tranformation 2022* serta meraih penghargaan *Best Bank Award 2023* atas Pencapaian BTN yang menunjukkan Kinerja Keuangan Positif dari Investor Daily.

BTN telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis *digital banking* seperti yang telah lama berjalan *Cash Management* BTN dan pembukaan *Smart Branch* BTN yang dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah yang berbasis digital. BTN sebagai pemeran utama dalam program sejuta rumah konsisten melakukan, pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital Bank* dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkokoh pilar – pilar *enabler* untuk pertumbuhan bisnis yang efisien. Melangkah ke depan BTN menapaki fase transformasi *Global-Playership* yang mampu membawa produk dan layanan BTN beroperasi sesuai standar layanan internasional dan kelas dunia.

Tiga produk utama BTN, yakni *consumer banking*, *commercial banking* dan perbankan syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* BTN ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya kepada individu. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti KPR BTN *Gaess for Milenials*, KPR BTN *Rent To Own*, BTN *Property*, BTN *Smart Residence*, kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti Tabungan BTN Bisnis, BTN Solusi, giro, tabungan dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit sindikasi dan kredit komersial lainnya, BTN *Property for Developer* serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen *commercial* seperti giro dan deposito berjangka. BTN Syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti produk baru KPR BTN HITS (*Hijrah To Syariah*) for *Milenials*.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, BTN selama 3 tahun terakhir berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dalam penerbitan :

- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II BJB Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023.
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023;
- Obligasi VII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023;
- Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023; dan
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023.
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023;

- Obligasi VIII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2024;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024.

4. Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BTN terus meluas sebagai berikut :

- Jaringan Perbankan Konvensional:
BTN telah memiliki 1 Kantor Pusat, 6 Kantor Wilayah, 81 Kantor Cabang, 541 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 3 Kantor Fungsional, 2 Kantor Layanan Setara KCP, dan 51 Mobil Kas Keliling (BTNMove didukung dengan 2.209 *Automatic Teller Machine* (ATM) dan *Cash Recycling Machine* (CRM) di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.
- Jaringan Perbankan Syariah :
BTN Syariah memiliki 34 Kantor Cabang Syariah, 75 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 5 Kantor Kas Syariah dan 6 Payment Point Syariah.

5. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No. 19/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat antara lain adalah:

- Mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi Subordinasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan dan mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi;
- Melaksanakan ketentuan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

6. Penggantian Wali Amanat

- Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:
 - Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
 - Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - Atas permintaan para Pemegang Obligasi Subordinasi melalui RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
 - Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020; atau
 - Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri karena atau Perseroan tidak membayar Imbalan Jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan dan setelah Perseroan memberikan tanggapan tertulis kepada Wali Amanat mengenai tidak dibayarnya imbalan kepada Wali Amanat.

- (ii) Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
- Obligasi Subordinasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi termasuk Denda (jika ada), dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan jika Perseroan tidak menggunakan Agen Pembayaran;
 - Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi Subordinasi; dan
 - Setelah diangkatnya wali amanat baru.

7. Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data Laporan keuangan BTN pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young Global*) yang juga disajikan dalam Informasi Tambahan ini berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2023	2022
ASET		
Kas dan setara kas	2.127.489	1.661.533
Giro pada Bank Indonesia	18.145.761	25.416.941
Giro pada bank lain – neto	2.201.594	1.470.510
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	30.561.122	12.975.955
Efek-efek- neto	5.282.970	1.720.769
Obligasi Pemerintah	35.893.929	51.964.973
Kredit yang diberikan – neto	282.392.324	252.552.651
Pembiayaan/piutang syariah – neto	35.713.853	30.054.130
Tagihan akseptasi	520.691	420.426
Aset pajak tangguhan – neto	2.998.282	2.915.428
Aset tetap – neto	8.117.812	6.353.803
Bunga yang masih akan diterima	11.526.687	10.750.302
Aset lain-lain	3.235.046	2.352.762
TOTAL ASET	438.749.736	402.148.312
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	3.277.514	3.205.358
Simpanan dari nasabah	322.501.148	297.099.801
Simpanan dari Bank Lain	91.312	136.408
Liabilitas akseptasi	544.567	420.562
Liabilitas Derivatif	-	-
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	8.272.098	8.652.260
Pinjaman yang diterima	33.762.089	24.821.005
Bunga yang masih harus dibayar	647.496	629.366
Liabilitas imbalan kerja dan lain-lain	2.951.848	7.248.985
Pinjaman subordinasi	9.112.837	9.158.219
TOTAL LIABILITAS	381.164.489	351.376.683
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Simpanan Nasabah	27.082.860	24.823.456
Simpanan dari Bank Lain	23.235	38.819
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	27.106.095	24.862.275
EKUITAS		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	7.017.222	5.295.000
Tambahan modal disetor	4.418.900	2.054.454
Opsi saham	-	2.756.575

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2023	2022
Keuntungan (Kerugian) neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual, setelah pajak tangguhan	(769.001)	(1.193.252)
Pengukuran kembali Program Imbalan Pasti - setelah pajak tangguhan surplus revaluasi aset tetap	(560.339)	(409.657)
Arus kas	(32.346)	(49.301)
Pajak tangguhan surplus revaluasi aset tetap	3.565.773	3.508.565
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	13.181.214	10.745.157
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	3.657.72	3.201.813
TOTAL EKUITAS	30.479.152	25.909.354
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	438.749.736	402.148.312

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Pendapatan bunga dan bagi hasil	28.281.252	25.907.368
Beban bunga, bagi hasil, dan bonus	(14.850.962)	(10.910.084)
Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto	13.430.290	14.997.284
Pendapatan operasional lainnya	3.891.147	2.274.852
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(3.765.397)	(4.017.378)
Beban operasional lainnya	(9.017.450)	(9.438.880)
Laba operasional	4.539.729	3.814.803
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(159.519)	60.887
Laba sebelum pajak	4.380.210	3.875.690
Beban pajak	(879.222)	(830.617)
Laba periode/ tahun berjalan	3.500.988	3.045.073
Pendapatan (beban) komprehensif lain	347.732	(1.061.317)
Laba komprehensif selama periode/ tahun berjalan	3.848.720	1.983.756
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	249	288

Alamat BTN adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
 Menara 2 BTN Lantai 8
 Jalan H.R Rasuna Said No. 1
 Jakarta Selatan 12980, Indonesia
 Web situs : www.btn.co.id
 Untuk Perhatian : Wali Amanat - Financial Services Department

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI

1. PENDAFTARAN OBLIGASI SUBORDINASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi Subordinasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi Subordinasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi Subordinasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Subordinasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum ini akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi Subordinasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, memberikan suara dalam RUPOS serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Subordinasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi maupun pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Hak untuk menghadiri RUPOS dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPOS (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPOS yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi Subordinasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI

Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi ("FPPOS") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI

Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN

Masa penawaran Obligasi Subordinasi dimulai pada tanggal 1 Juli 2024 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 2 Juli 2024 pukul 16.00 WIB.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI

Sebelum Masa Penawaran Obligasi Subordinasi ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi dengan mengajukan FPPOS selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Prospektus ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus, dan FPPOS.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI

Para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPOS yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI SUBORDINASI

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi Subordinasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi Subordinasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi serta Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 3 Juli 2024.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi Subordinasi serta terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi Subordinasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan pada Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi Subordinasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.2.

Manajer penjatahan, dalam hal ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

1) Pengembalian Uang Pemesanan Akibat Penjatahan:

Dalam hal pemesanan Obligasi Subordinasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat penjatahan dan jika pesanan Obligasi Subordinasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan maka Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi masing-masing Seri Obligasi Subordinasi dari jumlah dana yang terlambat dikembalikan, yang harus dibayarkan secara tunai atau transfer. Denda dikenakan sejak hari ketiga setelah Tanggal Penjatahan.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi Subordinasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi Subordinasi.

2) Pengembalian Uang Pemesanan Akibat Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum

Apabila Perseroan melakukan penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum sebagaimana diuraikan dalam angka 11 di atas dan uang pemesanan Obligasi Subordinasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi atau Perseroan, maka Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi atau Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut

kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum tersebut.

Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan akibat penundaan atau pembatalan penawaran umum, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan, yaitu Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi atau Perseroan, wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi masing-masing Seri Obligasi Subordinasi dari jumlah dana yang terlambat dikembalikan, yang harus dibayarkan secara tunai atau transfer. Denda dikenakan sejak hari ketiga setelah tanggal penundaan atau pembatalan Penawaran Umum.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi Subordinasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut, maka Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi Subordinasi.

10. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI

Selambat-lambatnya pada tanggal 4 Juli 2024, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, kecuali Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dapat melakukan transfer paling lambat pada tanggal emisi 5 Juli 2024 ditujukan pada rekening di bawah ini:

Bank BJB	Bank BJB	Bank BJB	Bank BJB	Bank BJB	Bank BJB
Cabang S. Parman	Cabang Saharjo	Cabang KCP Cikini	Cabang Tendean	Cabang Cikini Jakarta	Cabang Gajah Mada
No. Rekening: 0089069092001	No. Rekening: 0115620916001	No. Rekening: 0115711652002	No. Rekening: 1112223339999	No. Rekening: 0115711652002	No. Rekening: 011.567.699.7001
Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas	Atas Nama: PT CIMB Niaga Sekuritas	Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas	Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas	Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

11. DISTRIBUSI OBLIGASI SUBORDINASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi Subordinasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 5 Juli 2024, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Subordinasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi serta KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi Subordinasi dari Rekening Obligasi Subordinasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Subordinasi kepada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

12. PEMBATALAN DAN PENUNDAAN PENAWARAN UMUM

1. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

- 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2.
- b. Dalam hal Perseroan menunda Masa Penawaran atau membatalkan Penawaran Umum, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengumumkan penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 1);
 - 3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - 4) Perseroan yang menunda Masa Penawaran atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
2. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf a butir 1), dan akan memulai kembali Masa Penawaran berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal penundaan Masa Penawaran disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf a butir 1), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - b. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf a butir 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran;
 - c. Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - d. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

13. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI

Pada tanggal 1 – 2 Juli 2024, Prospektus dan FPPOS dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

PT BRI Danareksa Sekuritas
Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimili: (021) 2520 990

PT CIMB Niaga Sekuritas
Graha CIMB Niaga
Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Tel: (021) 50847848
Fax: (021) 50847847

PT Indo Premier Sekuritas
Gedung Pacific Century Place
Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCB Lot 10
Jakarta 12190
Tel. (021) 5088 7168
Fax. (021) 5088 7167

PT Mega Capital Sekuritas
Menara Bank Mega Lt.2
Jl. Kapten Tendean Kav 12-14A
Jakarta 12790
Telp.: (021) 7917 5599
Fax.: (021) 7917 3900

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri Tower I
24th – 25th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Tel. (62 21) 526 3445
Fax. (62 21) 526 3507

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha Lt. 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (62 21) 2924 9088
Fax. (62 21) 515 4554

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

HKGM & PARTNERS

Law Firm

No. Ref.: 023/HKGM-RL/Ext/V/2024

22 Mei 2024

Kepada yang terhormat

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk.

Jl. Naripan No.12-14,

Bandung 40111 - Indonesia

u.p. **Direksi.**

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Atas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan maksud PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., berkedudukan di Bandung (selanjutnya disebut "**Perseroan**") untuk melakukan penerbitan dan penawaran umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB dengan Target Dana Yang Akan Dihimpun Sebesar Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah). Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok pada tanggal emisi sebesar Rp.1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Obligasi Subordinasi**"), yang terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi Subordinasi, yaitu:

- Seri A : Obligasi Subordinasi dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi;
- Seri B : Obligasi Subordinasi dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi;

Obligasi Subordinasi ini telah mendapatkan peringkat *id.A+* (*single A plus*) dari PT Peringkat Efek Indonesia berdasarkan Surat No.RC-504/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 17 April 2024 yang akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan dijamin oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi secara kesanggupan penuh (*full commitment*) berdasarkan hasil penawaran awal, yang dana hasil penawaran umum Obligasi Subordinasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai modal pelengkap (Tier 2) dalam rangka ekspansi kredit serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang.

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi pada tanggal Emisi dengan satuan jumlah Obligasi Subordinasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening Efek ke rekening efek lainnya yang pada tanggal emisi adalah senilai Rp.1,00 (satu Rupiah) dan dengan satuan perdagangan Obligasi Subordinasi di bursa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

Kami yang bertandatangan di bawah ini, Ruli Fajar Hidayat, Partner pada, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Kantor Konsultan Hukum HKGM & Partners, berkantor di Pondok Indah Plaza 3, Blok E/4 & E/5, Jl. TB Simatupang, Jakarta 12310, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor pendaftaran STTD.KH-38/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 9 Pebruari 2023 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No.200134, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerjasama 0096/LEP-PKS/2024 tanggal 15 Maret 2024 (Perjanjian Kerjasama), untuk melaksanakan uji tuntas sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas kami No. Ref.:022/HKGM-RL/Ext/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 (untuk selanjutnya disebut "LHUT") dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau para Penjamin Emisi Obligasi, berturut-turut yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Pelaksanaan uji tuntas tersebut pada pokoknya dilakukan dengan memeriksa dokumen-dokumen Perseroan yang bersifat material dan/atau masih tetap berlaku sampai dengan tanggal LHUT sebagaimana telah kami ungkapkan dalam LHUT.

Dalam melakukan pelaksanaan uji tuntas untuk kepentingan Pendapat Dari Segi Hukum ini, kami menganggap dan mendasarkan pada:

1. Bahwa dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi dan keterangan serta konfirmasi baik lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy, sehubungan dengan aspek hukum yang kami peroleh langsung dari Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau konfirmasi Perseroan sebagaimana termuat dalam Surat Konfirmasi Perseroan No.0413/DIR-TRE/2024 tanggal 21 Mei 2024 ("Surat Konfirmasi") dan dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi dan keterangan serta konfirmasi yang diberikan pihak ketiga yang berkepentingan kepada kami untuk tujuan pelaksanaan uji tuntas adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak menghilangkan fakta yang penting atau perlu diketahui, serta sampai dengan tanggal LHUT dan Pendapat Dari Segi Hukum tidak mengalami perubahan, dan tidak ada data, fakta, informasi dan keterangan serta konfirmasi material yang tidak diberikan Perseroan dan/atau pihak ketiga lainnya kepada kami dan tidak ada data, fakta, informasi dan keterangan serta konfirmasi yang salah, tidak benar dan/atau keliru yang diberikan kepada kami yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam LHUT dan Pendapat Dari Segi Hukum;
2. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan kepada kami dalam rangka LHUT dan Pendapat Dari Segi Hukum adalah asli dan ditandatangani oleh yang berwenang, dan dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya;

3. Bahwa data, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy, sehubungan dengan aspek hukum yang kami peroleh langsung dari pihak ketiga, yang berhubungan erat dengan pelaksanaan uji tuntas dan untuk maksud pemberian LHUT dan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, lengkap dan tidak menghilangkan fakta yang penting atau perlu diketahui sampai dengan tanggal LHUT dan Pendapat Dari Segi Hukum;
4. Di dalam melakukan pelaksanaan uji tuntas dan pemberian pendapat hukum ini, atas suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait, kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansialnya.

Berdasarkan pelaksanaan uji tuntas sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asumsi-asumsi tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Bandung, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Akta pendirian Perseroan beserta perubahan-perubahannya adalah benar dan sah serta sesuai dengan anggaran dasar dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Ketentuan-ketentuan dalam akta perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah benar dan sah serta telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, Direktur Perseroan telah melaksanakan kewajiban untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus pemegang saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2024, tidak ada pemegang saham masyarakat yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perseroan.

Berdasarkan Daftar Khusus Pemegang Saham per tanggal 30 April 2024, terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang memiliki saham-saham Perseroan yang masuk dalam bagian saham Perseroan yang dimiliki oleh masyarakat. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan atas perolehan dan/atau perubahan kepemilikan saham Perseroan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 1 Undang-

Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juncto Pasal 2 ayat 1 Peraturan OJK No.11/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 Tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Setiap perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan serta pengalihan saham yang terjadi sejak pendirian Perseroan sampai dengan saat ini adalah benar dan sah serta telah dilakukan secara berkesinambungan dan telah disetor penuh dan tunai sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah melakukan kewajiban untuk menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan dengan nilai untuk mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUP.

Kepemilikan saham Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam Perseroan telah melebihi batas maksimum sebesar 30% sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan OJK No.56/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum (POJK No.56/2016) untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan. Namun, berdasarkan Pasal 22 POJK No.56/2016, pemegang saham pada bank yang memperoleh penilaian tingkat kesehatan bank dan/atau penilaian tata kelola dengan peringkat 1 (satu) atau 2 (dua) pada posisi penilaian bulan Desember 2013 dan tetap dapat mempertahankan peringkat tersebut sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan sebelum berlakunya POJK No.56/2016, tetap dapat memiliki saham sebesar persentase saham yang telah dimiliki. Hasil penilaian tingkat kesehatan Perseroan dan penilaian faktor tata kelola Perseroan pada posisi penilaian per 31 Desember 2023 adalah peringkat 2 (dua), sehingga Pemerintah Propinsi Jawa Barat tidak diwajibkan untuk melakukan penyesuaian batas maksimum kepemilikan saham.

Disamping itu berdasarkan Pasal 14 POJK No.56/2016, dinyatakan bahwa pemerintah daerah yang telah memiliki saham bank pembangunan daerah dapat menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, telah terdapat orang-perorangan (individu) yang menjadi pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dimana berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat No.7944/KH.03.02.04/Bumdinvesadbang tanggal 22 September 2023, Perihal Tanggapan Penetapan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat diwakili oleh Bey Triadi Machmudin dalam jabatannya selaku Pj. Gubernur Jawa Barat adalah pemilik manfaat (Beneficial Owner) dari Perseroan.

Pihak pengendali Perseroan adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan penetapan Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebagai pihak pengendali telah sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, dimana Perseroan telah mengungkapkannya pertama kali dalam Prospektus Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021 yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari dokumen pernyataan pendaftaran.

3. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat secara sah dan memenuhi ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("POJK No.55/2016") jo. Pasal 49 Peraturan OJK No.12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 Tentang Bank Umum ("POJK No.12/2021") dimana terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang belum memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan. Adapun konsekuensi hukum atas belum terpenuhinya persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah yang bersangkutan belum dapat melaksanakan tugasnya dalam jabatannya tersebut.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, Perseroan telah menyampaikan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) kepada OJK bagi Ventje Rahardjo selaku Komisaris Utama Independen berdasarkan Surat PERSEROAN No.0308/DIR-CSE/2024 tanggal 17 April 2024 Perihal Permohonan Mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Komisaris Utama Independen serta bagi Hana Dartiwan selaku calon Direktur Keuangan dan Yusuf Saadudin selaku calon Direktur Konsumer dan Ritel berdasarkan Surat Perseroan No.0337/DIR-CSE/2024 tanggal 30 April 2024 Perihal Permohonan Mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direktur Keuangan dan Direktur Konsumer dan Ritel.

Yuddy Renaldi selaku Direktur Utama Perseroan adalah berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("POJK No.17/2023").

Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai jumlah komisaris independen sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) POJK No.17/2023, dimana jumlah komisaris independen Perseroan paling sedikit adalah 50% (lima puluh persen) dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, tidak terdapat benturan kepentingan diantara para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan tidak ada benturan kepentingan antara Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan transaksi penerbitan Obligasi Subordinasi.

Pihak utama Perseroan tidak melakukan pelanggaran atas ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

4. Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit juncto POJK No.17/2023, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut dengan telah memiliki Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.12/SK/DKO/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit. Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.6/SK/DKO/2024 tanggal 3 April 2024 Tentang Pembagian Tugas Dan Pelaksanaan Kegiatan Dewan Komisaris Serta Komite-Komite ("SK Komisaris No.6/2024").

Berdasarkan SK Komisaris No.6/2024, Perseroan telah membentuk dan memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik serta untuk memenuhi ketentuan POJK No.17/2023.

Komite Nominasi Dan Remunerasi telah memenuhi kewajiban untuk menyusun pedoman yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.03/SK/DKO/2022 tanggal 4 Januari 2022 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Berdasarkan SK Komisaris No.6/2024, Perseroan telah membentuk dan memiliki Komite Pemantau Risiko untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, POJK No.17/2023 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 dan Perseroan telah memiliki pedoman dan tata kerja komite pemantau risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.01/SK/DKO/2023 tanggal 15 Pebruari 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.03/2014 tanggal 19 Nopember 2014 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 19 Nopember 2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Perseroan telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan SK Komisaris No.6/2024. Perseroan telah menetapkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.06/SK/DKO/2021 tanggal 28

Desember 2021 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Serta Struktur Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTT).

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (POJK No.18/2016), Perseroan telah memiliki pedoman Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.0166/SK/DIR-MRI/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Pedoman Komite Manajemen Risiko dan Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.0403/SK/DIR-MRI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Kebijakan Manajemen Risiko.

Perseroan telah membentuk pula satuan kerja Manajemen Risiko yang bertanggung jawab kepada direktur yang ditugaskan secara khusus untuk memenuhi ketentuan Pasal 16b jo Pasal 18 POJK No.18/2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.0693/SK/DIR-PST/2020 tanggal 5 Nopember 2020, dimana satuan kerja Manajemen Risiko tersebut bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

5. Perseroan telah mengangkat Widi Hartoto sebagai Pemimpin Divisi *Corporate Secretary* Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.0581/SK/DIR-HCA/2020 tanggal 9 September 2020. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Perseroan telah memiliki piagam audit internal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dengan telah ditetapkannya Piagam Audit Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 15 Juni 2022. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.1516/SK/DIR-HC/2018 tanggal 13 Desember 2018, telah ditetapkan Joko Hartono Kalisman selaku Pemimpin Satuan Kerja Audit Internal.
7. Sehubungan pemenuhan Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, berdasarkan hasil RUPS Tahunan sebagaimana termuat dalam Akta PKR No.10/2021, Pemegang Saham Perseroan telah menugaskan Cecep Trisna sebagai direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

8. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 anggaran dasar Perseroan dan berdasarkan izin yang diperoleh dan dimiliki Perseroan dari badan atau instansi pemerintah yang berwenang, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dibidang Aktivitas Keuangan (Perbankan).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional yang mencakup kegiatan usaha bank secara konvensional.

Maksud dan Tujuan dalam anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020, sebagaimana termuat dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No.2 Tahun 2020 tanggal 15 September 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dengan telah dilakukan perubahan ke-1 atas Nomor Induk Berusaha Perseroan pada tanggal 10 Mei 2022 dan penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

9. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, berdasarkan pelaksanaan uji tuntas yang kami lakukan, Perseroan telah memperoleh dan memiliki izin-izin pokok yang berkaitan dengan usaha perbankan serta izin-izin untuk pembukaan kantor-kantor Perseroan dari instansi yang berwenang yang masih tetap berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.

Perseroan hanya menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang termuat dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perseroan tidak pernah melakukan kegiatan usaha lain yang menyimpang dari maksud dan tujuan tersebut.

Berdasarkan modal inti yang dimiliki oleh Perseroan sesuai dengan nilai ekuitas Perseroan pada 31 Maret 2024 yaitu sebesar Rp.13.827.449.000.000,00, dimana untuk nilai ekuitas tersebut Perseroan masuk dalam kelompok KBMI 2 yaitu bank dengan modal inti lebih dari Rp.6.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp.14.000.000.000.000,00 dan Perseroan telah melakukan pelaporan nilai ekuitas tersebut kepada OJK Perbankan.

Status pengawasan bank terhadap Perseroan adalah termasuk dalam status pengawasan normal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.

10. Perseroan telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) No.8120117050946.

11. Perseroan telah memenuhi kewajiban perizinan perpajakannya dengan telah dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Perseroan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk kantor pusat dan kantor-kantor cabang Perseroan. Adapun kewajiban perpajakan dari kantor-kantor wilayah Perseroan menginduk pada kantor pusat Perseroan dan kewajiban perpajakan dari kantor-kantor cabang Perseroan meliputi pula kewajiban perpajakan dari kantor cabang pembantu dan kantor fungsional yang berada dibawah kantor cabang Perseroan tersebut.

Perseroan tidak terlibat baik dalam suatu sengketa ataupun perkara perpajakan, di hadapan pengadilan pajak yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang akan berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan dan Perseroan telah mematuhi setiap ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait perpajakan, melaksanakan kewajiban-kewajiban pajak dan telah menyelesaikan tanggung jawab pajak Perseroan serta tidak berada dalam keadaan lalai membayar atas setiap kewajiban, utang dan/atau tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan perpajakan sebagaimana termaktub dalam laporan keuangan Perseroan terakhir.

12. Perseroan telah melaksanakan pemenuhan atas kewajiban-kewajiban penyampaian pelaporan dengan secara tertib dan benar kepada Otoritas Jasa Keuangan Perbankan berupa laporan keuangan publikasi triwulanan dan laporan keuangan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh akuntan publik.
13. Perseroan telah melaksanakan kewajiban untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Berdasarkan laporan hasil penilaian tingkat kesehatan bank secara individu posisi per tanggal 31 Desember 2023, yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 2 OJK Jawa Barat di Bandung berdasarkan Surat Perseroan No.0072/DIR-MRP/2024 tanggal 19 Januari 2024, dinyatakan bahwa peringkat tingkat kesehatan bank dari Perseroan adalah Peringkat 2.

14. Perseroan selalu memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan mengenai ketenagakerjaan seperti pemenuhan terhadap perjanjian kerja bersama, lembaga kerja sama bipartit, wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP), program asuransi ketenagakerjaan (sekarang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)) baik untuk program asuransi BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan yang diikuti oleh seluruh karyawan Perseroan, penerapan upah minimum baik propinsi maupun kota, dana pensiun, dan serikat pekerja.

15. Harta kekayaan Perseroan baik yang berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak serta hak kekayaan intelektual berupa hak merek yang ada pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, setelah diteliti bukti pemilikannya berdasarkan dokumen Perseroan adalah dimiliki secara sah oleh Perseroan serta tidak ada gugatan dari pihak lain terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan tersebut.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, seluruh harta kekayaan berupa benda tidak bergerak baik untuk aset-aset tanah berstatus hak milik maupun hak guna bangunan yang dimiliki oleh Perseroan telah diatasmamakan Perseroan serta tidak ada dari aset tersebut yang dibebankan sebagai jaminan atau dalam keadaan sengketa. Disamping itu harta kekayaan berupa benda bergerak yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan, tidak ada yang dibebankan sebagai jaminan.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, Perseroan memiliki penyertaan pada 2 (dua) anak perusahaan berbentuk perseroan terbatas dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor. Disamping itu Perseroan memiliki penyertaan pada 15 (lima belas) perusahaan berbentuk perseroan terbatas dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan tersebut kurang dari 50% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, Perseroan memiliki pengendalian pada 2 perusahaan yang kepemilikan Perseroan pada perusahaan tersebut kurang dari 50% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor, yaitu pada PT BPR Intan Jabar dan PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu.

Penyertaan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut adalah sah dan didukung oleh dokumen kepemilikan yang benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, disamping itu penyertaan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut tidak dalam sengketa maupun dijaminakan kepada pihak lain.

16. Perseroan telah melakukan perlindungan terhadap harta kekayaan yang dimilikinya dengan melakukan penutupan asuransi terhadap resiko kebakaran, gempa bumi, kerusakan, kehilangan serta resiko lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi harta kekayaannya tersebut dengan nilai pertanggungan dan jangka waktu asuransi yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.
17. Perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani Perseroan dengan pihak ketiga yang material, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian kredit, adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak ketiga (*negative covenants*) yang dapat

merugikan hak dan kepentingan dari pemegang saham publik dan pemegang Obligasi Subordinasi serta tidak akan menghalangi rencana penerbitan Obligasi Subordinasi.

Berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, larangan penerimaan pinjaman dari pihak manapun juga tidak akan menghambat penawaran umum berkelanjutan Obligasi Subordinasi yang akan dilakukan oleh Perseroan dikarenakan kegiatan penerbitan Obligasi Subordinasi telah termuat dalam Pasal 3 huruf c anggaran dasar Perseroan mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Perseroan yaitu menerbitkan Surat Pengakuan Utang. Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1982 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dinyatakan dalam penjelasan Pasal 6 huruf c bahwa Surat Pengakuan Hutang berjangka panjang dapat berupa obligasi. Disamping itu tujuan penggunaan dana Obligasi Subordinasi berupa ekspansi kredit merupakan suatu kegiatan yang baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha bisnis Perseroan.

Tidak ada kewajiban bagi Perseroan, berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani Perseroan untuk meminta persetujuan dari dan/atau melakukan penyampaian pemberitahuan kepada para krediturnya sehubungan dengan pelaksanaan penawaran umum Obligasi Subordinasi dan rencana penggunaan dana Obligasi Subordinasi yang diterima.

18. Tidak ada kewajiban yang tidak dipenuhi Perseroan kepada kreditur selama perjanjian kredit dan/atau perjanjian penting yang telah ditandatangani oleh Perseroan sampai dengan tanggal Surat Pernyataan, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk menjaga rasio keuangan sebagaimana disepakati dalam tiap-tiap perjanjian kredit.

Tidak ada kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan yang akan melanggar dalam hal Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi.

Tidak ada kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari kreditur dan/atau melakukan pemberitahuan kepada kreditur sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi dengan memperhatikan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam tiap-tiap perjanjian yang telah ditandatangani.

Tidak ada kewajiban Perseroan untuk melakukan pemenuhan peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan pada saat ditandatanganinya perjanjian dan/atau apabila ada perubahan terhadap perjanjian-perjanjian tersebut.

19. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, Perseroan sedang terlibat dalam 12 perkara perdata, 7 perkara pengadilan niaga dan 3 perkara perpajakan, dimana apabila dikemudian hari ternyata badan-badan peradilan tersebut memutuskan dengan mengalahkan Perseroan, maka tidak ada dari perkara-perkara tersebut yang akan memberikan dampak negatif yang material terhadap keadaan keuangan dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta tidak akan menghalangi rencana penerbitan dan penawaran umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB.

Perseroan tidak terdaftar sebagai pemohon untuk diri sendiri dan termohon dalam perkara kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga, namun Perseroan sedang terlibat dalam perkara kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam kedudukannya selaku kreditur separatis.

Perseroan tidak terlibat dalam suatu sengketa hukum/perselisihan lain yang terjadi di luar pengadilan dengan atau memperoleh teguran (somasi) dari pihak ketiga, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan atau berakibat menghambat rencana Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam kedudukannya sebagai pribadi dan sesuai jabatannya masing-masing, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan di badan-badan peradilan di Indonesia baik untuk perkara perdata dan atau perkara pidana dan atau perkara tata usaha negara dan atau perkara hubungan industrial/ketenagakerjaan dan atau arbitrase dan atau perkara perpajakan serta tidak sedang terlibat dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau tidak terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit dan tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum/perselisihan lain yang terjadi di luar pengadilan dengan atau memperoleh teguran (somasi) dari pihak ketiga yang dapat memberikan dampak negatif secara material terhadap kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB.

20. Bahwa berdasarkan pelaksanaan uji tuntas yang telah kami lakukan, Perseroan tidak melakukan pelanggaran atas ketentuan Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) dan atau pelampauan BMPK sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum juncto Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
21. Bahwa pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai penyediaan modal minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah oleh Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Modal Minimum Bank Umum ("POJK No.11/2016 jo POJK No.34/2016"), dimana berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 rasio kecukupan modal Perseroan adalah sebesar 18,49%.

Perseroan telah memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 3 POJK No.11/2016 jo POJK No.34/2016, dimana Perseroan masuk dalam Profil Risiko Peringkat 2. Disamping itu Obligasi Subordinasi telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf d POJK No.11/2016 jo POJK No.34/2016, dengan tidak memiliki fitur *step-up*.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, Perseroan telah melakukan kewajiban untuk memenuhi modal inti minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

22. Berdasarkan pelaksanaan uji tuntas yang telah kami lakukan, nilai agunan yang diambil alih (AYDA) per tanggal 30 April 2024 adalah sebesar Rp.48.710.420.328,00 yang merupakan nilai dari agunan berupa benda tidak bergerak yang diberikan oleh para debitur kepada Perseroan. Penjualan AYDA yang dilakukan oleh Perseroan dan entitas anak tidak termasuk dalam transaksi yang dikategorikan sebagai Transaksi Material dikarenakan tidak memenuhi unsur batasan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 POJK 17/2020 yaitu tidak mencapai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan dan entitas anak.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, tidak ada penyelesaian AYDA yang dimiliki Perseroan yang telah melebihi dari batas waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

23. Semua Perjanjian yang berkenaan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi telah dibuat secara sah dan memiliki sifat yang mengikat bagi Perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, khususnya peraturan mengenai penawaran obligasi kepada masyarakat dan perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan penerbitan Obligasi tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan.

Adapun perjanjian perwaliamanatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Sehubungan dengan penerbitan dan penawaran umum Obligasi, Perseroan telah menerima persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat utang dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat PT Bursa Efek Indonesia No.S-04799/BEI.PP2/05-2024 tanggal 15 Mei 2024 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

Obligasi Subordinasi ini telah mendapatkan peringkat *id.A+* (*single A plus*) dari PT Pemingkat Efek Indonesia berdasarkan Surat No.RC-504/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 17 April 2024 yang berlaku untuk periode 17 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Rencana penggunaan dana dari penerbitan Obligasi Subordinasi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan, yang mana dana hasil penawaran umum Obligasi Subordinasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai modal pelengkap (Tier 2) dalam rangka ekspansi kredit serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang.

Sehubungan dengan Penerbitan dan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi, sesuai dengan Surat OJK No.S-210/D.04/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Penegakan Ketentuan dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK No.17/2020), bahwa penerbitan efek selain efek bersifat ekuitas oleh Perusahaan Terbuka melalui Penawaran Umum yang nilainya memenuhi batas nilai material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/2020 tidak wajib mengikuti prosedur transaksi material, tetapi hanya wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Penawaran Umum

Tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Subordinasi yang diperoleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai modal pelengkap (Tier 2) dalam rangka ekspansi kredit serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang, sesuai dengan Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 13 Peraturan POJK No.17/2020, tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai transaksi material dikarenakan tujuan penggunaan dana dalam rangka ekspansi kredit adalah merupakan kegiatan usaha Perseroan yang telah termuat dalam anggaran dasar Perseroan yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan disamping itu tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi yang diperoleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai modal pelengkap (Tier 2) dalam rangka ekspansi kredit tidak memenuhi kualifikasi sebagai transaksi afiliasi baik yang memiliki atau tidak memiliki benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan dikarenakan pemberian kredit tersebut bukan ditujukan untuk membiayai Perseroan dan/atau afiliasinya namun ditujukan untuk pembiayaan kepada pihak ketiga.

24. Obligasi Subordinasi ini tidak diproteksi maupun dijamin oleh Perseroan atau Perusahaan Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 huruf h Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016

Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016
Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

25. Rencana penerbitan dan penawaran umum Obligasi Subordinasi telah dimuat dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Perseroan Tahun 2024 - 2026 yang telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan - Kantor Regional 2 berdasarkan Surat Perseroan No.0792/DIR-PST/2023 tanggal 24 Nopember 2023 Perihal Rencana Bisnis bank bjb Tahun 2024 - 2026. Adapun rencana bisnis Perseroan tahun 2024 - 2026 telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.05/SK/DKO/2023 tanggal 21 Nopember 2023 Tentang Persetujuan Atas Rencana Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tahun 2024-2026.
26. Sehubungan penerbitan dan penawaran umum Obligasi Subordinasi, Perseroan telah melakukan permohonan perizinan produk baru untuk menerbitkan Obligasi Subordinasi melalui skema penawaran umum berkelanjutan dengan target nilai transaksi adalah sebanyak-banyaknya Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) yang dilakukan secara bertahap berdasarkan Surat Perseroan No.0253/DIR-TRE/2024 tanggal 27 Maret 2024 Perihal Permohonan Izin Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) IV Obligasi Subordinasi bank bjb yang ditujukan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Propinsi Jawa Barat (Surat Perseroan) dan berdasarkan Surat Perseroan, Perseroan telah memilih fitur *write down* tanpa kompensasi terhadap instrumen modal pelengkap untuk Obligasi Subordinasi dalam hal Perseroan mengalami potensi gangguan atas kelangsungan usahanya (*point of non viability*), yang disebabkan kondisi-kondisi sebagaimana diuraikan dalam ketentuan angka II, 2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.03/2016 tanggal 21 Juni 2016 Tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa Atau *Write Down* Terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan Dan Modal Pelengkap (SEOJK No.20/2016).

Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan - Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2, No.S-132/KO.122/2024 tanggal 20 Mei 2024 perihal Persetujuan Rencana Penyelenggaraan Kegiatan yang Dilakukan untuk Kepentingan Bank Sendiri Berupa Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan IV (PUB IV) Obligasi Subordinasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., dinyatakan bahwa OJK dapat menyetujui rencana penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan yaitu penerbitan surat berharga Obligasi Subordinasi Penawaran Umum Berkelanjutan IV sebesar Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) dengan menggunakan fitur *write down* tanpa kompensasi.

Berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, tidak ada perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak ketiga termasuk pemegang saham Perseroan, yang dapat menghambat dilakukannya pelaksanaan *write down* tanpa kompensasi terhadap instrumen modal pelengkap untuk Obligasi Subordinasi dalam hal Perseroan berada dalam kondisi berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non viability*), yang disebabkan kondisi-kondisi sebagaimana diuraikan dalam ketentuan angka II. 2 SEOJK No.20/2016.

Pemilihan fitur *write down* tanpa kompensasi dapat merugikan kepentingan pemodal atau pemegang Obligasi Subordinasi apabila Perseroan mengalami kondisi terganggu kelangsungan usahanya dan/atau hal-hal sebagaimana diatur dalam Romawi II angka 2 SEOJK No.20/2016 yang dicantumkan dalam perjanjian penerbitan Obligasi Subordinasi, namun demikian bahwa sepanjang telah dilaksanakannya pengungkapan resiko yang akan dihadapi oleh investor pembeli atau calon pemegang Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka investor pembeli atau calon pemegang Obligasi Subordinasi dianggap telah mengetahui, mengerti dan menyetujui adanya resiko sebagaimana diungkapkan. Sehingga dengan demikian, klausula mengenai *write down* tersebut dapat dilaksanakan pada saat terjadi kondisi yang menyebabkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan (*point of non viability*).

27. Perseroan tidak memiliki hubungan terafiliasi dengan para penjamin pelaksana emisi obligasi dan para penjamin emisi obligasi, wali amanat, para profesi penunjang pasar modal dan serta PT Perneringkat Efek Indonesia yang terlibat dalam penerbitan Obligasi dan Perseroan tidak pula telah memiliki hubungan kredit dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selaku wali amanat dalam penerbitan Obligasi Subordinasi ini, yang jumlahnya melebihi ketentuan dalam Peraturan OJK No.19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
28. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, tidak ada kewajiban-kewajiban yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian perwalianamanatan dari penerbitan obligasi terdahulu yang tidak dipenuhi oleh Perseroan kepada wali amanat dan tidak ada kewajiban untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari wali amanat dan/atau pemegang obligasi terdahulu sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi.
29. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("Peraturan OJK No.36/2014") dikarenakan Perseroan merupakan emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan POJK No.36/2014.

Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan telah memenuhi persyaratan sebagai efek bersifat utang yang diterbitkan dengan tata cara penawaran umum berkelanjutan serta telah memenuhi persyaratan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan OJK No.36/2014, dimana Obligasi Subordinasi masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Perneringkat Efek.

30. LHUT dan Pendapat Dari Segi Hukum telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pasar Modal termasuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 Tanggal 14 Maret 2017 Tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9/POJK.04/2017 Tanggal 14 Maret 2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
31. PT Bank Jabar Banten Syariah selaku anak perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan lebih dari 50% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Akta pendirian PT Bank Jabar Banten Syariah beserta perubahan-perubahannya adalah benar dan sah serta sesuai dengan anggaran dasar dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Bank Jabar Banten Syariah adalah benar dan sah serta telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Jabar Banten Syariah telah diangkat secara sah dan telah memenuhi ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT Bank Jabar Banten Syariah telah membentuk dan memiliki komite audit, komite remunerasi dan nominasi, komite pemantau risiko dan komite manajemen risiko yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Disamping itu PT Bank Jabar Banten Syariah telah memiliki dewan pengawas syariah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan PT Bank Jabar Banten Syariah telah pula memiliki piagam audit internal serta memiliki Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan telah memiliki Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, PT Bank Jabar Banten Syariah telah memiliki izin-izin pokok sehubungan dengan kegiatan usahanya sebagai bank umum syariah dari instansi yang berwenang dan hanya menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang termuat dalam anggaran dasar PT Bank Jabar Banten Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa harta kekayaan PT Bank Jabar Banten Syariah yang berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak serta hak kekayaan intelektual yang ada pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, setelah diteliti bukti pemilikannya berdasarkan dokumen adalah dimiliki secara sah oleh PT Bank Jabar Banten Syariah.

PT Bank Jabar Banten Syariah telah melakukan perlindungan terhadap harta kekayaan yang dimilikinya dengan melakukan penutupan asuransi terhadap resiko kebakaran, gempa bumi, kerusakan, kehilangan serta resiko lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi harta kekayaannya tersebut dengan nilai pertanggungan dan jangka waktu asuransi yang memadai.

Perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani antara PT Bank Jabar Banten Syariah dengan pihak ketiga yang material adalah sah dan mengikat PT Bank Jabar Banten Syariah serta tidak bertentangan dengan anggaran dasar PT Bank Jabar Banten Syariah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh PT Bank Jabar Banten Syariah dengan pihak ketiga yang dapat menghalangi rencana penerbitan Obligasi Subordinasi yang dilakukan oleh Perseroan dan tidak ada pula pembatasan-pembatasan dari perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh PT Bank Jabar Banten Syariah dengan pihak ketiga yang dapat merugikan hak dan kepentingan dari pemegang saham PT Bank Jabar Banten Syariah maupun pemegang saham publik dari Perseroan (*negative covenants*).

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, PT Bank Jabar Banten Syariah sedang terlibat dalam perkara perdata - ekonomi syariah dan perkara perdata, dimana apabila dikemudian hari ternyata badan-badan peradilan tersebut memutuskan dengan mengalahkan PT Bank Jabar Banten Syariah, maka tidak ada dari perkara-perkara tersebut yang dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kelangsungan dan kegiatan usaha PT Bank Jabar Banten Syariah dan juga tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kelangsungan dan kegiatan usaha Perseroan serta tidak akan menghambat rencana penerbitan Obligasi Subordinasi.

Disamping itu, PT Bank Jabar Banten Syariah tidak terlibat dalam suatu sengketa hukum/perselisihan lain yang terjadi di luar pengadilan dengan atau memperoleh teguran (somasi) dari pihak ketiga, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Jabar Banten Syariah dalam kedudukannya sebagai pribadi dan sesuai jabatannya masing-masing, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan di badan-badan peradilan di Indonesia baik untuk perkara perdata dan atau perkara pidana dan atau perkara tata usaha negara dan atau perkara hubungan industrial/ketenagakerjaan dan atau arbitrase dan atau perkara perpajakan serta tidak sedang terlibat dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau tidak terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit dan disamping itu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pula terlibat dalam suatu sengketa hukum/ perselisihan yang terjadi di luar pengadilan dengan dan/atau mendapatkan teguran (somasi) dari, pihak ketiga yang dapat memberikan dampak negatif secara material terhadap kondisi keuangan dan kegiatan usaha PT Bank Jabar Banten Syariah dan juga tidak akan memberikan dampak

negatif yang material terhadap kelangsungan dan kegiatan usaha Perseroan serta tidak akan menghambat rencana penerbitan Obligasi Subordinasi.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, BJB Syariah telah melakukan kewajiban untuk memenuhi modal inti minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Berdasarkan Surat OJK – Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat No.S-236/KR.02/2020 tanggal 17 Desember 2020 Perihal Penegasan Struktur Kelompok Usaha Bank (KUB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., dinyatakan bahwa OJK telah menatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK, struktur KUB dimana Perseroan adalah pengendali dan/atau perusahaan induk (LJK berbentuk bank) dari PT Bank Jabar Banten Syariah selaku bank umum perusahaan anak. Sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf d Peraturan OJK No.12/POJK.03/2020 dinyatakan bahwa PT Bank Jabar Banten Syariah sebagai bank selain perusahaan induk atau selain pelaksana perusahaan induk dalam KUB yang telah memenuhi skema konsolidasi bank, modal inti minimum yang wajib dipenuhi adalah paling sedikit Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah)

32. PT BJB Sekuritas Jabar selaku anak perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan lebih dari 50% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Akta pendirian PT BJB Sekuritas Jabar beserta perubahan-perubahannya adalah benar dan sah serta sesuai dengan anggaran dasar dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT BJB Sekuritas Jabar adalah benar dan sah serta telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi dan Dewan Komisaris PT BJB Sekuritas Jabar telah diangkat secara sah dan telah memenuhi ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masing-masing telah memiliki izin-izin sebagai wakil perantara pedagang efek dari OJK.

Berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, PT BJB Sekuritas Jabar telah memiliki izin-izin pokok sehubungan dengan kegiatan usahanya sebagai perusahaan efek dari instansi yang berwenang dan hanya menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang termuat dalam anggaran dasar PT BJB Sekuritas Jabar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani antara PT BJB Sekuritas Jabar dengan pihak ketiga yang material adalah sah dan mengikat PT BJB Sekuritas Jabar serta tidak bertentangan dengan anggaran dasar PT BJB Sekuritas Jabar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh PT BJB Sekuritas Jabar dengan pihak ketiga yang dapat menghalangi rencana penerbitan Obligasi Subordinasi yang dilakukan oleh Perseroan dan tidak ada pula pembatasan-pembatasan dari perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh PT BJB Sekuritas Jabar dengan pihak ketiga yang dapat merugikan hak dan kepentingan dari pemegang saham PT BJB Sekuritas Jabar maupun pemegang saham publik dari Perseroan (*negative covenants*).

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, PT BJB Sekuritas Jabar tidak sedang terlibat dalam perkara apapun yang berpengaruh secara material yang negatif terhadap kondisi keuangan dan kegiatan usaha baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan perpajakan serta tidak sedang terlibat dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau tidak terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit dengan pihak lain di badan-badan peradilan.

Disamping itu, PT BJB Sekuritas Jabar tidak pula terlibat dalam suatu sengketa hukum/perselisihan lain yang terjadi di luar pengadilan dengan atau memperoleh teguran (somasi) dari pihak ketiga, yang dapat berpengaruh secara material yang negatif terhadap kondisi keuangan dan kegiatan usaha PT BJB Sekuritas Jabar dan juga tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kelangsungan dan kegiatan usaha Perseroan serta tidak akan menghambat rencana penerbitan Obligasi Subordinasi.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, Direksi dan Dewan Komisaris PT BJB Sekuritas Jabar dalam kedudukannya sebagai pribadi dan sesuai jabatannya masing-masing, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan di badan-badan peradilan di Indonesia baik untuk perkara perdata dan atau perkara pidana dan atau perkara tata usaha negara dan atau perkara hubungan industrial/ketenagakerjaan dan atau arbitrase dan atau perkara perpajakan serta tidak sedang terlibat dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau tidak terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit dan disamping itu Direksi dan Dewan Komisaris PT BJB Sekuritas Jabar tidak pula terlibat dalam suatu sengketa hukum/ perselisihan yang terjadi di luar pengadilan dengan dan/atau mendapatkan teguran (somasi) dari, pihak ketiga yang dapat memberikan dampak negatif secara material terhadap kondisi keuangan dan kegiatan usaha PT BJB Sekuritas Jabar dan juga tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kelangsungan dan kegiatan usaha Perseroan serta tidak akan menghambat rencana penerbitan Obligasi Subordinasi.

33. Perusahaan-perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang dimiliki oleh Perseroan kurang dari 50% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Akta pendirian dari perusahaan-perusahaan tersebut beserta perubahan-perubahannya adalah benar dan sah serta sesuai dengan anggaran dasar dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari perusahaan-perusahaan tersebut adalah benar dan sah serta telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi dan Dewan Komisaris dari perusahaan-perusahaan tersebut telah diangkat secara sah berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, perusahaan-perusahaan tersebut telah memiliki izin-izin pokok sehubungan dengan kegiatan usahanya dan hanya menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang termuat dalam anggaran dasar Perusahaan Terasosiasi berbentuk perseroan terbatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

34. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi Perseroan untuk melakukan penawaran umum Obligasi dan isi mengenai aspek hukum yang termuat dalam Prospektus telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hal-hal yang termuat dalam LHUT dan Pendapat Dari Segi Hukum.

Adapun Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah menggantikan Pendapat Dari Segi Hukum Atas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024 No. Ref.: 013/HKGM-RL/Ext/IV/2024 tanggal 17 April 2024, yang telah kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami buat secara bertanggung jawab dalam profesi kami sebagai konsultan hukum yang bebas dengan penuh kejujuran dan objektif serta tidak dipengaruhi atau terlepas dari kepentingan-kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

HKGM & PARTNERS

Hormat kami,
HKGM & PARTNERS



Ruli Fajar Hidayat W, SH
Partner

Tembusan:

- Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan.
- Yang terhormat Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi berturut-turut yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

**XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**

***PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES***

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022***

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		<i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2023 and 2022</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	9	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL- TANGGAL TERSEBUT**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. Nama | : | Yuddy Renaldi |
| Alamat Kantor | : | Menara bank bjb
Jl. Naripan No. 12-14
Bandung 40111 |
| Alamat Domisili | : | Jl. Kidang Pananjung No. 1A
Bandung |
| Nomor Telepon | : | (022) 4234868 |
| Jabatan | : | Direktur Utama |
| 2. Nama | : | Rio Lanasier |
| Alamat Kantor | : | Menara bank bjb
Jl. Naripan No. 12-14
Bandung 40111 |
| Alamat Domisili | : | Jl. Bungur No.11C,Kel. Bangka, Kec.
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan |
| Nomor Telepon | : | (022) 4234868 |
| Jabatan | : | Direktur |

Dalam kedudukannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, menyatakan bahwa:

- Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. ("Bank") dan Entitas Anak;
- Laporan Keuangan Konsolidasian Bank dan Entitas Anak disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia;
- Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Bank dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - Laporan keuangan konsolidasian Bank dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- Bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalam Bank dan Entitas Anak

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK AND ITS SUBSIDIARIES**

We, the undersigned:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Name | : | Yuddy Renaldi |
| Office address | : | Menara bank bjb
Jl. Naripan No. 12-14
Bandung 40111 |
| Residential address | : | Jl. Kidang Pananjung No. 1A
Bandung |
| Telephone | : | (022) 4234868 |
| Title | : | President Director |
| 2. Name | : | Rio Lanasier |
| Office address | : | Menara bank bjb
Jl. Naripan No. 12-14
Bandung 40111 |
| Residential address | : | Jl. Bungur No.11C,Kel. Bangka, Kec.
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan |
| Telephone | : | (022) 4234868 |
| Title | : | Director |

In the above position acted as and on behalf of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, declare that:

- We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. ("Bank") and Subsidiaries;
- The consolidated financial statement of the Bank and Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard;
- All information in the consolidated financial statements of the Bank and Subsidiaries have been disclosed in a complete and truthful manner;
 - The consolidated financial statements of the Bank and Subsidiaries do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material fact;
- We are responsible for the Bank and Subsidiaries' internal control system.

This statement letter is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors

Bandung, 22 Mei 2024 / May 22, 2024



Yuddy Renaldi
Direktur Utama/President Director

Rio Lanasier
Direktur/Director

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Registered Public Accountants

Nomor/Number : 00727/2.1030/AU.1/07/0499-2/1/V/2024

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners and Directors

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 215140 1340
F +62 215140 1350

www.rsm.id

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dan entitas anaknya ("Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

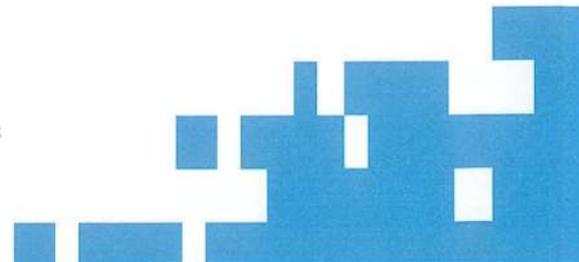
Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk and its subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2023 and 2022, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the years then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of material accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023 and 2022, and its consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Kredit yang Diberikan, dan Pembiayaan dan Piutang Syariah

Pada tanggal 31 Desember 2023, total kredit yang diberikan sebesar Rp116.300.069 juta dan Grup telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.913.951 juta. Pada tanggal 31 Desember 2023, total pembiayaan dan piutang syariah sebesar Rp8.778.114 juta dan Grup telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp216.946 juta.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, seperti yang dijelaskan pada Catatan 2.m, cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan ditentukan berdasarkan kerangka kerugian kredit ekspektasian (KKE) yang memperhitungkan informasi bersifat perkiraan masa depan untuk mencerminkan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah ditentukan oleh Grup berdasarkan sesuai PSAK No. 102 "Akuntansi Murabahah" dengan kerangka *incurred loss*. Untuk selain murabahah, Grup membentuk cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan estimasi kerugian aset produktif yang tidak dapat ditagih sebagaimana diatur dalam PSAK yang berlaku dan kebijakan akuntansi Grup.

Kami fokus pada area ini karena total kredit yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah mewakili 65,29% dari total aset Grup dan total cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk nilainya signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup, serta dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, Grup menerapkan model yang bergantung pada data internal dan eksternal serta membutuhkan pertimbangan manajemen yang subjektif dan melibatkan penggunaan estimasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Key Audit Matters

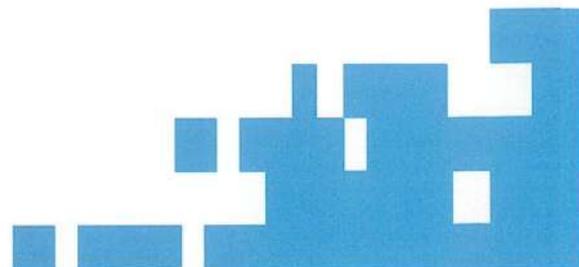
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Allowance for Impairment Losses of Loans, and Sharia Financing and Receivables

As of December 31, 2023, total loans amounted to Rp116,300,069 million and the Group has provided allowance for impairment losses amounted to Rp1,913,951 million. As of December 31, 2023, total sharia financing and receivables amounted to Rp8,778,114 million and the Group has provided allowance for impairment losses amounted to Rp216.946 million.

Based on Indonesian Financial Accounting Standards, as described in Note 2.m, the allowance for impairment of loans is determined based on the expected credit loss (ECL) framework which consider forward-looking information to reflect estimated future economic conditions. For sharia receivables and financing, allowance for impairment losses was determined by considering the provisions of applicable sharia business regulations. The allowance for impairment losses of murabahah receivables was determined by the Group based on SFAS No.102 "Accounting of Murabahah" using incurred loss framework. For other than murabahah receivables, the Group provides the allowance for impairment losses based on the estimated losses from the uncollectible amount of earning assets as stipulated in the applicable SFAS and the Group's accounting policies.

We focused on this area as the total loans, and sharia financing and receivables represent 65.29% of the total assets of the Group and total allowance for impairment losses is significant to the Group's consolidated financial statements, and in calculating the allowance for impairment losses, the Group utilizes models which are reliant on internal and external data and involves subjective management judgement and is subject to a high degree of estimation uncertainty.



Pertimbangan-pertimbangan signifikan yang digunakan dalam menentukan KKE antara lain:

- Menentukan apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan atau terdapat bukti objektif penurunan nilai;
- Mengembangkan model penilaian kolektif yang tepat untuk menghitung KKE. Model secara inheren adalah kompleks dan melibatkan pertimbangan manajemen dalam menentukan dan mempersiapkan model tersebut;
- Mengestimasi skenario perkiraan makroekonomi masa depan;
- Mengidentifikasi dan menentukan penyesuaian *post model* atas model KKE;
- Mengestimasi proyeksi arus kas masa depan dalam menghitung KKE individual; dan
- Menentukan beberapa skenario probabilitas tertimbang dalam menghitung KKE individual.

Pengungkapan Grup mengenai cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah dijelaskan pada Catatan 2.m, 12 dan 13 atas laporan keuangan konsolidasian.

Bagaimana Audit Kami Merespons Hal Audit Utama

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

1. Kami memahami dan menguji pengendalian yang relevan atas cadangan kerugian penurunan nilai. Pengendalian tersebut meliputi:
 - Reviu dan persetujuan atas informasi bersifat perkiraan masa depan yang digunakan dalam model KKE;
 - Penggunaan elemen data penting yang andal dan akurat dalam model KKE;
 - Reviu dan persetujuan atas hasil KKE, termasuk penyesuaian model setelahnya yang diterapkan;
2. Kami memeriksa permodelan dan menilai kewajaran pertimbangan dan asumsi utama yang dibuat oleh manajemen dalam model dan parameter yang digunakan.
3. Kami memahami dan menguji pengendalian yang relevan atas identifikasi aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau bukti objektif penurunan nilai, melalui pengujian atas pengendalian penetapan kolektibilitas kredit yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah dan melakukan pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kredit yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah. Kami memeriksa sampel kredit yang diberikan,

The significant judgements involved in determining ECL include the following:

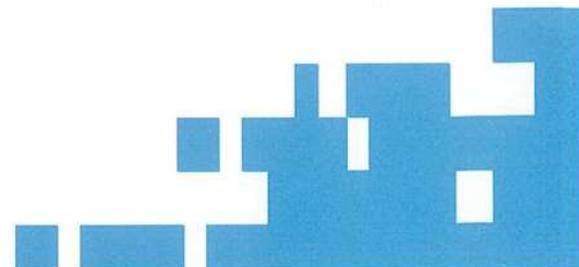
- *Determining whether a significant increase in credit risk has occurred or objective evidence of impairment was identified;*
- *Developing appropriate collective assessment models used to calculate ECL. The models are inherently complex, and management's judgement is applied in determining and preparing the models;*
- *Estimating forward-looking macroeconomic scenarios;*
- *Identifying and determining post model adjustments to the ECL model;*
- *Estimating future cash flow projection in the calculation of individual ECL; and*
- *Determining probability-weighted scenarios in assessing individual ECL.*

The Group's disclosures regarding allowance for impairment losses of loans, and sharia financing and receivables are described in Notes 2.m, 12 and 13 to the consolidated financial statements.

How Our Audit Addressed the Key Audit Matters

We have performed the following audit procedures to address in this key audit matters:

1. *We obtained understanding and tested the relevant controls over allowance for impairment losses of loans. These controls include:*
 - *Review and approval of forward-looking information used in the ECL model;*
 - *Use of reliable and accurate critical data elements in the ECL model;*
 - *Review and approval of the ECL results, including post model adjustments applied;*
2. *We examined the modelling and assessed the reasonableness of key judgements and assumptions made by management in the model and parameters used.*
3. *We obtained understanding and tested the relevant controls over the identification of financial assets that have experienced a significant increase in credit risk or objective evidence of impairment by performing control testing over the collectability of loans, sharia financing and receivables and examining the credit files on a sampling basis. We examined sampled loans, sharia financing and receivables identified by the Group as having lower credit*



pembiayaan dan piutang syariah, yang diidentifikasi oleh Grup memiliki kualitas kredit yang lebih rendah, kredit yang direstrukturisasi, dan membuat penilaian independen kami apakah ada peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti objektif penurunan nilai.

4. Kami menilai kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai yang dihitung secara individual dengan memeriksa baik jumlah dan waktu dari arus kas masa depan yang digunakan oleh Grup dalam perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai, menguji rata-rata probabilitas tertimbang yang digunakan dalam menyusun arus kas, termasuk membandingkan jadwal pembayaran kembali dengan perjanjian kredit dan memeriksa ketepatan penggunaan faktor diskonto.
5. Kami menilai dan menguji metodologi dan asumsi pemodelan signifikan yang digunakan dalam model KKE kolektif, termasuk penentuan *probability of default*, *loss given default* dan *exposure at default*, yang mencakup: evaluasi model dan metodologi yang digunakan dalam perhitungan; evaluasi prakiraan makroekonomi Indonesia dengan membandingkan prakiraan dengan informasi yang tersedia untuk umum tentang prospek makroekonomi Indonesia; dan menguji kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan dalam model dengan data aktual yang tersedia di Grup dan menguji keakuratan perhitungan KKE kolektif.
6. Kami menilai kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan dan piutang syariah berdasarkan persentase tertentu untuk masing-masing kualitas pembiayaan dan piutang syariah dan menguji keakuratan perhitungannya.

Hal-hal Lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen: 00072/2.1030/AU.1/07/0499-2/1/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024 atas laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan opini tanpa modifikasi. Sehubungan dengan rencana Bank untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi

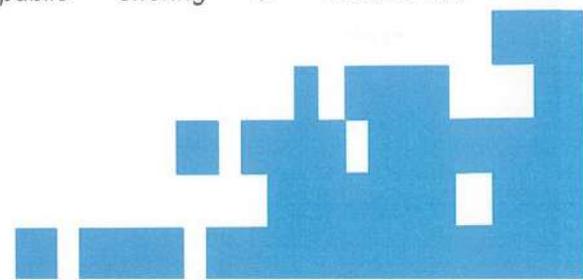
quality, restructured loans, and formed our own independent judgement as to whether there was a significant increase in credit risk or any objective evidence of impairment.

4. *We assessed the adequacy of individual allowance for impairment losses by examining both the quantum and timing of future cash flows used by the Group in the allowance for impairment loss calculation, testing the probability-weighted scenarios used in preparing the cash flows, including comparing the repayment schedule to the credit agreement and checking the appropriateness of discount factor used.*
5. *We assessed and tested the methodologies and significant modelling assumptions within the collective ECL models, which include determination of probability of default, loss given default and exposure at default, which involved evaluating the models and methodologies used in the calculations; evaluating the forecasts of Indonesia macroeconomics by comparing forecasts with publicly available information on the Indonesia macroeconomic outlook; and testing the completeness and accuracy of data used in the model with the actual data available within the Group and accuracy the calculation of the collective ECL.*
6. *We assessed the adequacy of allowance for impairment losses of sharia financing and receivables based on specific percentage for each collectability and tested the accuracy of the calculation.*

Other Matters

This report is issued for the purpose of being included in the offering documents in connection with Sustainable Public Offering of Sustainable Subordinated Bonds IV Bank BJB Phase I Year 2024 and is not intended nor permitted to be used for any other purposes.

Prior to this report, we have issued an independent auditors' report 00072/2.1030/AU.1/07/0499-2/1/II/2024 dated February 29, 2024 on the interim consolidated financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk and its subsidiaries for the year ended December 31, 2023 with the unmodified opinion. In accordance with the Bank's plan to conduct sustainable public offering of Sustainable



Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 57 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Grup telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan konsolidasian Group.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, tetapi bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Subordinated Bonds IV Bank BJB Phase I Year 2024 as described in Note 57 to the accompanying consolidated financial statements, the Group has reissued its interim consolidated financial statements.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

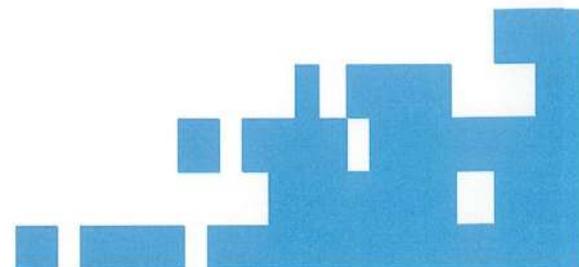
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's consolidated financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.



Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi atas kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*



- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

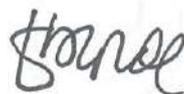
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of audit of the Group's consolidated financial statement. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

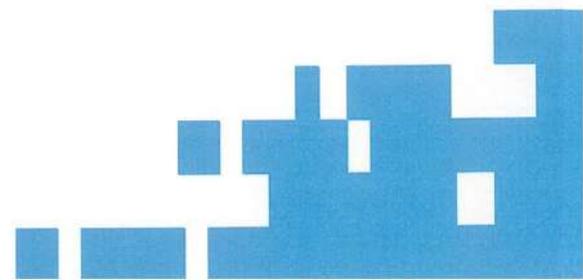
From the matters communicated with those charged with governance, we determine such matter that was of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and is therefore the key audit matter. We describe the matter in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Saptoto Agustomo
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0499/
Public Accountant License Number: AP.0499

Jakarta, 22 Mei 2024/May 22, 2024



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2023 and 2022

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
ASET				ASSETS
Kas	4	3,530,074	3,300,031	Cash
Giro pada				Current accounts with Bank
Bank Indonesia	2e,5	14,879,767	13,032,593	Indonesia
Giro pada bank lain				Current accounts with other banks
- pihak ketiga	2e,6	1,196,787	1,243,695	third parties -
Cadangan kerugian				Allowance for impairment losses
penurunan nilai	2m	(57)	(68)	
		<u>1,196,730</u>	<u>1,243,627</u>	
Penempatan pada Bank				Placements with Bank
Indonesia dan bank lain				Indonesia and other banks
- pihak ketiga	2f,7	3,886,989	7,156,807	third parties -
Cadangan kerugian				Allowance for impairment losses
penurunan nilai	2m	(296)	(2,133)	
		<u>3,886,693</u>	<u>7,154,674</u>	
Tagihan derivatif	2j,2m,8	1,289	17,388	Derivative receivables
Surat berharga				Marketable securities
- pihak ketiga	2g,9	30,976,967	27,387,574	third parties -
Cadangan kerugian				Allowance for impairment losses
penurunan nilai	2m	(11,357)	(5,256)	
		<u>30,965,610</u>	<u>27,382,318</u>	
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji				Receivable from marketable securities purchased
dijual kembali	2h,2m,10	-	5,468,915	under agreements to resell
Wesel ekspor dan tagihan lainnya				Bills and other receivables
- pihak ketiga	2i,2m,11	689,974	843,826	third parties -
Cadangan kerugian				Allowance for impairment losses
penurunan nilai	2m	(351)	-	
		<u>689,623</u>	<u>843,826</u>	
Kredit yang diberikan				Loans
- pihak berelasi	2ee,2k,43	710,248	466,150	related parties -
- pihak ketiga	2k,12	115,589,821	107,873,542	third parties -
		<u>116,300,069</u>	<u>108,339,692</u>	
Cadangan kerugian				Allowance for impairment losses
penurunan nilai	2m	(1,913,951)	(1,631,811)	
		<u>114,386,118</u>	<u>106,707,881</u>	
Pembiayaan dan piutang				Sharia financing and
syariah - setelah dikurangi				receivables - less
margin ditangguhkan				unamortized margin
- pihak berelasi	2ee,43	10,881	-	related parties -
- pihak ketiga	2l,13	8,767,233	7,415,908	third parties -
Cadangan kerugian				Allowance for impairment losses
penurunan nilai	2m	(216,946)	(159,875)	
		<u>8,561,168</u>	<u>7,256,033</u>	
Tagihan akseptasi	2n,14	288,944	227,970	Acceptances receivable
Cadangan kerugian				Allowance for impairment losses
penurunan nilai	2m	(519)	(2,374)	
		<u>288,425</u>	<u>225,596</u>	
Penyertaan saham				Investment in shares
- pihak berelasi	2o,15,42,43	190,089	142,093	related parties -
Cadangan kerugian				Allowance for impairment losses
penurunan nilai	2m	(1,303)	(1,303)	
		<u>188,786</u>	<u>140,790</u>	
Aset tetap dan aset hak guna				Fixed assets and right-of-use assets
Harga perolehan		7,225,400	6,683,040	Cost
Akumulasi penyusutan	2p	(2,429,907)	(2,119,791)	Accumulated depreciation
Nilai buku	2p,16	4,795,493	4,563,249	Book value
Aset pajak tangguhan - neto	2bb,26c	62,046	189,749	Deferred tax assets - net
Bunga yang masih akan diterima	17	1,367,656	1,169,105	Accrued interest income
Aset lain-lain - neto	2d, 2aa, 2m,2q,2r,2s,18	3,496,010	2,545,516	Other assets - net
TOTAL ASET		<u>188,295,488</u>	<u>181,241,291</u>	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)**

As of December 31, 2023 and 2022

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUND AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	2d, 2t,19	2,212,830	2,403,981	Obligations due immediately
Simpanan nasabah	2d, 2u,20			Deposits from customers
- pihak berelasi	2ee,43	6,401,344	9,884,589	related parties -
- pihak ketiga		120,077,043	112,134,754	third parties -
		<u>126,478,387</u>	<u>122,019,343</u>	
Simpanan nasabah - Syariah	2d, 2u,20			Deposits from customers - Sharia
- pihak berelasi	2ee,43	480	274	related parties -
- pihak ketiga		947,836	795,705	third parties -
		<u>948,316</u>	<u>795,979</u>	
Simpanan dari bank lain	2d, 2v,21			Deposits from other banks
- pihak berelasi	2ee,43	86,755	96,339	related parties -
- pihak ketiga		2,454,785	4,365,451	third parties -
		<u>2,541,540</u>	<u>4,461,790</u>	
Liabilitas derivatif	2d, 2j,8	23	2,207	Derivatives payable
Liabilitas akseptasi	2d, 2n,14	288,944	227,970	Acceptances payable
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2h,2m,22	4,244,805	3,081,103	Liabilities from marketable securities sold under agreements to repurchase
Efek utang yang diterbitkan	2d, 1f,2w,23	957,991	1,871,461	Debt securities issued
Pinjaman yang diterima	2d, 2x, 24			Borrowings
- pihak ketiga		20,323,823	17,533,761	third parties -
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	2mm,25	13,131	10,747	Estimated losses on commitments and contingencies
Utang pajak	2bb,26a	82,159	139,347	Taxes payable
Bunga dan bagi hasil yang masih harus dibayar	27	285,191	254,160	Interest and revenue sharing payable
Liabilitas imbalan kerja pasti	2cc,41	293,605	291,904	Defined employee benefits liability
Liabilitas lain-lain	2d, 28	1,229,508	1,347,965	Other liabilities
Obligasi subordinasi	2d, 32	3,678,849	3,679,163	Subordinated bonds
TOTAL LIABILITAS		<u>163,579,102</u>	<u>158,120,881</u>	TOTAL LIABILITIES
Dana syirkah temporer	2u,29			Temporary syirkah fund
Bukan bank				Non-bank
- pihak berelasi	2ee,43	9,316	7,148	related parties -
- pihak ketiga		9,172,780	8,316,448	third parties -
		<u>9,182,096</u>	<u>8,323,596</u>	
Bank				Bank
- pihak ketiga		85,272	50,828	third parties -
Total dana syirkah temporer		<u>9,267,368</u>	<u>8,374,424</u>	Total temporary syirkah fund

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk				Equity attributable to equity holders of the parent entity
Modal saham				Share capital
nilai nominal Rp250 (nilai penuh) per saham				Rp250 (full amount) par value per share
Modal dasar:				Authorized capital:
Seri A - 9.600.000.000 saham				Class A - 9,600,000,000 shares
Seri B - 6.400.000.000 saham				Class B - 6,400,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				Issued and fully paid capital:
Seri A - 7.414.714.661 saham dan Seri B - 3.106.729.025 saham				Class A - 7,414,714,661 shares and Class B - 3,106,729,025 shares
Per 31 Desember 2023 dan 2022	2ii,30	2,630,361	2,630,361	As of December 31, 2023 and 2022
Tambahan modal disetor	2hh, 31	1,812,876	1,812,876	Additional paid in capital
Surplus dari revaluasi aset tetap		2,164,733	2,169,577	Revaluation surplus of fixed assets
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				Unrealized gains (losses) from financial asset measured at fair value through other comprehensive income
- setelah pajak tangguhan		(289,695)	(420,813)	- net of deferred tax
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti				Remeasurement of defined employee benefit liability
- setelah pajak tangguhan		(167,121)	(166,272)	- net of deferred tax
Saldo laba	2jj			Retained earnings
- telah ditentukan penggunaannya		4,786,067	4,785,382	appropriated -
- belum ditentukan penggunaannya		4,622,656	3,947,964	unappropriated -
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk		15,559,877	14,759,075	Total equity attributable to equity holders of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	44	(110,859)	(13,089)	Non-controlling interest
TOTAL EKUITAS		15,449,018	14,745,986	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		188,295,488	181,241,291	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUND AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
PENDAPATAN				INTEREST AND SHARIA
BUNGA DAN SYARIAH				INCOME
Pendapatan bunga	2y,34	13,287,106	12,816,082	Interest income
Pendapatan syariah	2y,34	916,628	772,467	Sharia income
Pendapatan provisi dan komisi	2z,34	34,001	35,228	Provision and commission income
Pendapatan provisi dan komisi syariah	2z,34	20,474	12,197	Sharia provision and commission income
		<u>14,258,209</u>	<u>13,635,974</u>	
BEBAN BUNGA DAN BAGI HASIL SYARIAH	2y,35	<u>(7,194,587)</u>	<u>(5,227,996)</u>	INTEREST EXPENSE AND SHARIA PROFIT SHARING
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH NETO		<u>7,063,622</u>	<u>8,407,978</u>	NET INTEREST AND SHARIA INCOME
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	36			OTHER OPERATING INCOME
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan		1,196,432	1,051,115	Non-loan related provisions and commissions
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus buku		335,778	365,404	Recoveries from loans written-off
Keuntungan transaksi valuta asing - neto		14,095	23,826	Gain from foreign exchange transactions - net
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga - neto		86,529	49,315	Unrealized gain on changes in fair value of marketable securities - net
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar penyertaan saham - neto		40,041	-	Unrealized gain on changes in fair value of investment shares - net
Lain-lain		249,380	150,028	Others
		<u>1,922,255</u>	<u>1,639,688</u>	
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	37			OTHER OPERATING EXPENSES
Beban umum dan administrasi		(2,725,498)	(2,744,760)	General and administrative expenses
Beban tenaga kerja dan tunjangan		(2,580,668)	(3,242,167)	Salaries and employee benefits
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan - neto		(746,262)	(223,976)	Provision for impairment losses on financial and non-financial assets - net
Kerugian dari penjualan surat berharga - neto		(23,164)	(92,808)	Loss on sale of marketable securities - net
Pembalikan kerugian komitmen dan kontinjensi		631	13,192	Reversal of losses on commitments and contingencies
Lain-lain		(762,191)	(908,289)	Others
		<u>(6,837,152)</u>	<u>(7,198,808)</u>	
LABA OPERASIONAL		2,148,725	2,848,858	OPERATING INCOME
BEBAN NON-OPERASIONAL - NETO	38	(22,358)	(13,240)	NON-OPERATING EXPENSES - NET
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		2,126,367	2,835,618	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK - NETO	2bb,26b	<u>(445,190)</u>	<u>(590,336)</u>	TAX EXPENSE - NET
LABA TAHUN BERJALAN		<u><u>1,681,177</u></u>	<u><u>2,245,282</u></u>	INCOME FOR THE YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
Akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit and loss
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	41	(39,442)	(24,657)	<i>Remeasurement of defined benefit plan</i>
Revaluasi aset tetap	16	(4,844)	(31,191)	<i>Fixed assets revaluation</i>
Pajak penghasilan		38,593	4,824	<i>Income tax</i>
Akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi				Items that will be reclassified to profit and loss
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak penghasilan		131,107	(412,236)	<i>Unrealized gains (losses) from financial asset measured at fair value through other comprehensive income - net of tax</i>
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak Penghasilan		125,414	(463,260)	<i>Other Comprehensive Income for the Year - After Tax</i>
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,806,591	1,782,022	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		1,778,395	2,304,376	<i>Equity holders of the parent entity</i>
Kepentingan non-pengendali	44	(97,218)	(59,094)	<i>Non-controlling interest</i>
TOTAL		1,681,177	2,245,282	TOTAL
TOTAL LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		1,903,820	1,840,482	<i>Equity holders of the parent entity</i>
Kepentingan non-pengendali		(97,229)	(58,460)	<i>Non-controlling interest</i>
TOTAL		1,806,591	1,782,022	TOTAL
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (NILAI PENUH)	2dd,42	169.03	219.02	BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT ENTITY (FULL AMOUNT)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

For the Years Ended

December 31, 2023 and 2022

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Saldo per 31 Desember 2021		2,459,697	1,058,541	(146,439)	2,201,402	(8,577)	3,813,887	3,657,863	13,038,374	47,659	13,094,033									
Pembagian Laba tahun 2021		-	-	-	-	-	971,495	(971,495)	-	-	-									
Catatan/	33																			
Tambahan Modal disetor	2R, 33	170,664	754,335	-	-	-	-	(1,042,780)	924,999	(2,288)	(1,046,088)									
Labai tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	2,304,376	2,304,376	(59,094)	2,245,282									
Labai (rugi) komprehensif		-	-	(19,833)	(31,825)	(412,236)	-	-	(463,894)	634	(463,260)									
Saldo per 31 Desember 2022		2,630,361	1,812,876	(166,272)	2,169,577	(420,813)	4,785,392	3,947,964	14,728,075	(13,059)	14,745,985									
Pembagian Laba tahun 2022		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Catatan/	33																			
Dividen kas	2R, 33	-	-	-	-	-	685	(685)	-	-	-									
Perubahan atas pelepasan entitas anak		-	-	-	-	-	-	(1,000,017)	(1,000,017)	(541)	(1,000,017)									
Labai tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	(3,001)	1,778,395	(97,218)	1,881,177									
Labai (rugi) komprehensif		-	-	(849)	(4,944)	131,118	-	-	128,425	(11)	128,414									
Saldo per 31 Desember 2023		2,630,361	1,812,876	(167,121)	2,164,733	(289,695)	4,785,067	4,622,656	15,559,877	(110,859)	15,449,018									

Balance as of December 31, 2022

Balance as of December 31, 2023

Distribution of 2022 Income:
General reserve
Cash dividend
Income (loss) for the year
Other comprehensive income (loss)

Distribution of 2021 Income:
General reserve
Cash dividend
Additional paid capital
Income (loss) for the year
Other comprehensive income (loss)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga, provisi dan komisi	12,370,613	12,711,595	<i>Interest and commissions received</i>
Penerimaan pendapatan syariah	937,102	784,664	<i>Sharia income fees received</i>
Pembayaran bunga	(6,800,492)	(4,898,216)	<i>Interest expenses paid</i>
Pembayaran bagi hasil syariah	(363,064)	(244,294)	<i>Sharia profit sharing paid</i>
Pembayaran beban karyawan	(2,578,967)	(3,125,806)	<i>Employee expenses paid</i>
Pembayaran beban umum dan administrasi	(2,348,388)	(2,744,760)	<i>General and administrative expenses paid</i>
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	1,163,489	1,138,447	<i>Receipts from other operating income</i>
Penerimaan kredit yang telah dihapus buku	335,778	365,404	<i>Recoveries from loan written - off</i>
Pembayaran beban lainnya	(809,060)	(1,035,802)	<i>Other expenses paid</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(459,714)	(563,340)	<i>Income tax paid</i>
Penerimaan kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	<u>1,447,297</u>	<u>2,387,892</u>	<i>Receipts from cash before changes in operating assets and liabilities</i>
Penurunan dalam aset operasi:			<i>Decrease in operating assets:</i>
Surat berharga	(1,025,437)	(10,926,130)	<i>Marketable securities</i>
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	5,468,915	(2,339,883)	<i>Receivable from marketable securities purchased under agreement to resell</i>
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	153,852	(355,914)	<i>Bills and other receivables</i>
Kredit yang diberikan dan pembiayaan dan piutang syariah	(9,322,583)	(13,306,536)	<i>Loans and sharia financing and receivables</i>
Tagihan derivatif	16,099	(13,421)	<i>Derivatives receivable</i>
Tagihan akseptasi	(60,974)	(63,987)	<i>Acceptances receivable</i>
Aset lain-lain	(198,551)	(904,446)	<i>Other assets</i>
Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi:			<i>Increase (decrease) in operating liabilities:</i>
Liabilitas segera	(191,151)	599,423	<i>Obligations due immediately</i>
Simpanan:			<i>Deposits:</i>
Giro	(2,890,653)	(1,121,940)	<i>Current accounts</i>
Tabungan	4,584,519	2,262,626	<i>Savings account</i>
Deposito berjangka	3,358,122	8,352,744	<i>Time deposits</i>
Simpanan dari bank lain	(1,920,250)	2,580,313	<i>Deposits from other banks</i>
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	1,163,702	3,081,103	<i>Liabilities from marketable securities sold under agreements to repurchase</i>
Liabilitas lain-lain	(39,503)	(177,915)	<i>Other liabilities</i>
Liabilitas akseptasi	60,974	63,987	<i>Acceptances payable</i>
Liabilitas derivatif	(2,184)	2,207	<i>Derivatives payable</i>
Utang pajak	10,165	9,235	<i>Taxes payable</i>
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi	<u>612,359</u>	<u>(9,870,642)</u>	<i>Net cash used in operating activities</i>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dividen kas	15	685	5,960	Cash dividends received
Penerimaan dari surat berharga yang telah jatuh tempo dan dijual		438,147	-	Proceeds from matured and sold securities
Penempatan pada surat berharga		(2,511,135)	-	Placements in securities
Pembelian aset tetap	16	(489,544)	(513,133)	Acquisitions of fixed assets
Penjualan aset tetap	16	1,293	-	Sale of fixed assets
Penyertaan Saham		-	(99,969)	Investments Shares
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi		(2,560,554)	(607,142)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	24	8,279,249	12,449,516	Proceeds from borrowings
Pembayaran pinjaman yang diterima	24	(5,489,187)	(7,077,422)	Payment of borrowings
Pembayaran dividen kas	33	(1,100,017)	(1,042,780)	Cash dividend paid
Pembayaran liabilitas sewa		(78,954)	(41,109)	Payment of lease liability
Penerimaan dari obligasi subordinasi	32	-	1,000,000	Proceeds from subordinated bonds
Pembayaran obligasi subordinasi	32	-	(307,000)	Payment for subordinated bonds
Pembayaran efek hutang yang diterbitkan	23	(916,500)	(534,300)	Payment from debt securities issued
Penerimaan penambahan modal		-	923,345	Proceeds from additional capital
Biaya emisi obligasi		-	(3,635)	Bonds issuance cost
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan		694,591	5,366,615	Net cash provided by financing activities
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		(1,253,604)	(5,058,486)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
DAMPAK BERSIH PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		24,733,126	29,767,787	NET EFFECT OF CHANGES IN EXCHANGE RATE ON CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR
Kas dan setara kas pada akhir tahun terdiri dari:				Cash and cash equivalents at end of the year consisted of:
Kas	4	3,530,074	3,300,031	Cash
Giro pada Bank Indonesia	5	14,879,767	13,032,593	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	6	1,196,787	1,243,695	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	7	3,886,989	7,156,807	Placements with Bank Indonesia and other banks - maturing within three months or less since the acquisition date
Total kas dan setara kas		23,493,617	24,733,126	Total cash and cash equivalents

*Lihat Catatan 55 atas laporan keuangan untuk pengungkapan informasi tambahan arus kas

*See Note 55 to the financial statements for the supplemental disclosures of cashflow information

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

1. Informasi Umum

a. Pendirian dan informasi umum Bank

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("Bank") didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan milik Belanda di Indonesia yang dikenakan nasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yaitu N.V. Denis (*De Eerste Nederlandsche Indische Shareholding*) terkena ketentuan tersebut dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Bank telah mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 20 Mei 1961.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1960, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mendirikan Bank Karya Pembangunan, dengan Akta Notaris Noezar No. 152 tanggal 21 Maret 1961 dan No. 184 tanggal 13 Mei 1961 yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 7/GKDN/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961 dengan nama PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972, kedudukan hukum PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat dikukuhkan sebagai Perusahaan Daerah yang berusaha di bidang perbankan. Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1/DP-40/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat mendapat sebutan "Bank Jabar" dan logo baru berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1995.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992, Bank memperoleh status sebagai bank devisa.

Penyesuaian bentuk badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam Akta Notaris No. 4 tanggal 8 April 1999 yang dibuat di hadapan Notaris Popy Kuntari Sutresna, S.H., M. Hum., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-7103.HT.01.01.TH.99 tanggal 16 April 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 1999.

1. General Information

a. Establishment and general information about the Bank

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (the "Bank") was established based on the Government Regulation No. 33 year 1960 regarding the nationalization of a Dutch-owned company domiciled in Indonesia. The regulation applied to a Dutch - owned company, N.V. Denis (De Eerste Nederlandsche Indische Shareholding), which was then handed over to the Regional Government of West Java Province Level I. The Bank started its commercial operations on May 20, 1961.

Following the Government Regulation No. 33 year 1960, the Regional Government of West Java Province Level I established Bank Karya Pembangunan, as covered by Notarial Deeds No. 152 dated March 21, 1961 and No. 184 dated May 13, 1961 of Noezar which was approved based on Decision Letter of the Governor of West Java Province No. 7/GKDN/BPD/61 dated May 20, 1961, using the name of PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat. Based on Provincial Government Regulation No. 11/PD-DPRD/72 dated June 27, 1972 of West Java Province, the legal status of PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat was changed to become a Regional Enterprise engaged in a banking business. Subsequently, based on Provincial Government Regulation No. 1/DP-40/PD/1978 dated June 27, 1978 of West Java Province, PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat changed its name to Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat obtained its trade name of "Bank Jabar" and a new logo based on Provincial Government Regulation No. 11 year 1995.

Based on the Decision Letter No. 25/84/KEP/DIR dated November 2, 1992 of the Directors of Bank Indonesia, the Bank obtained the status of a foreign exchange bank.

The change in the Bank's legal status to a Limited Liability Corporation was stated under Notarial Deed No. 4 dated April 8, 1999 of Popy Kuntari Sutresna, S.H., M. Hum., which was approved by the Minister of Justice in its Decision Letter No. C2-7103.HT.01.01.TH.99 dated April 16, 1999 and was published in the State Gazette No. 39 dated May 14, 1999 of the Republic of Indonesia.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Pada tanggal 12 September 2007, nama Bank diubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten berdasarkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. W8-02673 HT.01.04-TH.2007. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 1065/SK/DIR-PPN/2007 tanggal 29 November 2007, Bank mengubah penyebutan nama menjadi "Bank Jabar Banten".

Berdasarkan Surat Bank Indonesia No.12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni 2010 perihal Rencana Perubahan Logo Bank, serta Surat Keputusan Direksi No. 1337/SK/DIR-PPN/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Perubahan Logo dan Penyebutan Nama serta pemberlakuan *Brand Identity Guidelines*, maka pada tanggal 2 Agustus 2010 perubahan penyebutan nama "Bank Jabar Banten" secara resmi diubah menjadi "Bank BJB".

Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagaimana tertuang di Akta Pendirian No. 4 tanggal 8 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan No. 8 tanggal 15 April 1999 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Nomor 153 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris R. Tedy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung yang telah memperoleh persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0029115.AH.01.02. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk tanggal 21 April 2022 dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0229651 tanggal 21 April 2022.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku pemegang saham mayoritas.

b. Maksud dan tujuan

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar, Bank didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha di bidang perbankan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank antara lain adalah:

- menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- memberikan kredit;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

On September 12, 2007, the name of the Bank was changed to PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten based on the approval of the Minister of Justice and Human Rights in its letter No. W8-02673HT.01.04-TH.2007. Based on the Bank's of Board Directors' Decision Letter No. 1065/SK/DIR - PPN/2007 dated November 29, 2007, the Bank changed its call name to "Bank Jabar Banten".

Based on the letter of Bank Indonesia No.12/78/APBU/Bd dated June 30, 2010 regarding the Amendment Plan of the Bank's logo, as well as Board of Directors' Decision Letter No.1337/SK/DIR-PPN/2010 dated July 5, 2010 regarding the Amendment of Call name and Logo enforcement of Brand Identity Guidelines on August 2, 2010, the change in call name of "Bank Jabar Banten" to "Bank BJB" was officially changed.

The basis for PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Budget and Banten Tbk, is stated in the Deed of Establishment No. 4 dated 8 April 1999 and Amendments to the Deed of Establishment of the Company No. 8 dated 15 April 1999 which has been amended several times, most recently by the Deed of Statement of Resolutions of the General Meeting. Ordinary PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk Number 153 dated March 30, 2022 made by Notary R. Tedy Suwarman, Bachelor of Law, Notary in Bandung who has obtained approval through Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0029115. AH.01.02. Year 2022 concerning Approval of Amendment to the Articles of Association of a Limited Liability Company PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten, Tbk dated April 21, 2022 and has been notified by Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as Letter of Acceptance of Notice of Amendment to the Company's Articles of Association Number AHU-AH.01.03-0229651 dated April 21, 2022.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk is owned by the Provincial Government of West Java as the majority shareholder.

b. Purpose and objectives

According to article 3 of the Bank's Articles of Association, the Bank's objective is to engage in the banking business. To achieve this objective, the scope of the Bank's activities is mainly the following:

- to collect public funds in the form of current account, time deposits, certificates of deposits, savings and/or other similar forms;
- to grant loans;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

- menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang jasa keuangan lainnya atau mendirikan perusahaan baru sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau bertindak sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.

Selain itu, sebagai bank pembangunan daerah, Bank juga membantu Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan institusi jasa keuangan lainnya milik Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Bank, atau Bank sama sekali tidak memiliki saham namun diminta untuk membantu pembinaan BPR dimaksud.

c. Jaringan kantor

Bank berkantor pusat di Menara Bank BJB yang terletak di Jalan Naripan No. 12-14, Bandung 40111.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Bank memiliki 64 kantor cabang dan 820 kantor cabang pembantu dan pada tanggal 31 Desember 2022, Bank memiliki 65 kantor cabang dan 841 kantor cabang pembantu (tidak diaudit).

d. Manajemen eksekutif

Perubahan susunan Pengurus Bank sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Nomor 53 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0166302 Tanggal 22 September 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

- to place fund in, obtain borrowings from, or provide financing to other banks, either by letter, telecommunication facilities, sight letters of credit (L/C), cheque or other facilities;
- to conduct investment activities through share participation in banks or other financial institution companies or establish a new institution in accordance with the prevailing regulation; and
- to conduct activities in foreign currency transactions and or serve as Foreign Exchange Bank in compliance with the regulation prescribed by the authority.

In addition, as a regional development bank, the Bank also assists the Provincial Government, Municipality/Regency of West Java and Banten in developing Rural Banks (BPR) and other financial service institutions owned by the Provincial Government, Municipality/Regency of West Java and Banten where the Bank has or does not have the shares but the Bank is requested to assist in developing the BPR.

c. Office network

The Bank's head office is located at Bank BJB Tower, Naripan Street No. 12-14, Bandung 40111.

As of December 31, 2023, the Bank has 64 branch offices and 820 sub-branches and December 31, 2022, the Bank has 65 branch offices and 841 sub-branches (unaudited).

d. Executive management

The composition changes of the Bank's Management as stated in the Deed of Statement of Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk Number 53 dated May 25, 2023 made by made by Notary R. Tendy Suwarman, Bachelor of Laws, Notary in Bandung City, and has been notified by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as a Letter of Acceptance of Changes to Company Data Number AHU-AH.01.09-0166302 Dated 22 September 2023, the composition of the Bank's Board of Commissioners and Directors is as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

31 Desember 2023

Dewan Komisaris
Komisaris Utama Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Farid Rahman
Setiawan Wangsaatmaja
Tomsu Tohir
Rudie Kusmayadi
Fahlino F. Sjuib
Diding Sakri

December 31, 2023
Board of Commissioners
Independent President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Dewan Direksi
Direktur Utama
Direktur Kepatuhan
Direktur Keuangan
Direktur IT, *Treasury* dan
International Banking
Direktur Konsumer dan Ritel
Direktur Operasional
Direktur Komersial dan UMKM

Yuddy Renaldi
Cecep Trisna
Nia Kania
Rio Lanasier
Suartini
Tedi Setiawan
Nancy Adistiyasari

Board of Directors
President Director
Director of Compliance
Director of Finance
Director of IT, Treasury and
International Banking
Director of Consumer and Retail
Director of Operation
Director of Commercial and Micro

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 30 Maret 2022 yang aktanya dibuat oleh Notaris R. Tendency Suwarman, S.H., No. 154 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Based on the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2021 dated March 30, 2022, the deed of which was made by Notary R. Tendency Suwarman, S.H., No. 154 The composition of the Bank's Board of Commissioners and Directors is as follows:

31 Desember 2022

Dewan Komisaris
Komisaris Utama Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Farid Rahman
Setiawan Wangsaatmaja
Muhadi
Fahlino F. Sjuib
Diding Sakri
Tubagus Raditya Indrajaya*

December 31, 2022
Board of Commissioners
Independent President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Dewan Direksi
Direktur Utama
Direktur Kepatuhan
Direktur Keuangan
Direktur IT, *Treasury* dan
International Banking
Direktur Konsumer dan Ritel
Direktur Operasional
Direktur Komersial dan UMKM

Yuddy Renaldi
Cecep Trisna
Nia Kania
Rio Lanasier
Suartini
Tedi Setiawan
Nancy Adistiyasari

Board of Directors
President Director
Director of Compliance
Director of Finance
Director of IT, Treasury and
International Banking
Director of Consumer and Retail
Director of Operation
Director of Commercial and Micro

* Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan surat OJK No. SR-191/PB.12/2022 tanggal 26 Agustus 2022.

* The results of the Fit and Proper Assessment based on OJK letter No SR-191/PB.12/2022 dated August 26, 2022.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan adalah Widi Hartoto sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 0069/SK/DIR-HCA/2020 tanggal 27 Januari 2020.

As of December 31, 2023 and 2022 the Head of the Corporate Secretary Division is Widi Hartoto in accordance with the Decree of the Board of Directors Number 0069/SK/DIR-HCA/2020 dated January 27, 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 Pemimpin Satuan Kerja Audit Internal Bank adalah Joko Hartono Kalisman, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 1516/SK/DIR-HC/2018 tanggal 13 Desember 2018.

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank's Internal Audit Head is Joko Hartono Kalisman, based on Director Decision Letter No. 1516/SK/DIR-HC/2018 dated December 13, 2018.

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 04/SK/DKO/2023 tanggal 22 Agustus 2023, Surat Keputusan Direksi No. 0450/SK/DIR-CSE/2023 tanggal 3 November 2023 dan Surat Keputusan Direksi No. 0756/SK/DIR-CSE/2022 tanggal 28 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Audit Committee on December 31, 2023 based on the Decree of the Board of Commissioners No. 04/SK/DKO/2023 dated August 22, 2023, Directors Decree No. 0450/SK/DIR-CSE/2023 dated 3 November 2023 and Directors Decree No. 0756/SK/DIR-CSE/2022 dated December 28, 2023 is as follows:

31 Desember 2023

Komite Audit

Ketua	Farid Rahman
Anggota	Mokhammad Anwar
Anggota	Fahlino F.Sjuib
Anggota	Wawan Hermawan
Anggota	Dewi Kania Sugiharti

December 31, 2023

Audit Committee

Chairman
Member
Member
Member
Member

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 06/SK/DKO/2022 tanggal 4 November 2022, Surat Keputusan Direksi No. 011/SK/DIR-CSE/2021 tanggal 6 Januari 2021 dan Surat Keputusan Direksi No. 0665/SK/DIR-CSE/2022 tanggal 9 November 2022 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Audit Committee as of December 31, 2022 is based on the Decree of the Board of Commissioners No. 06/SK/DKO/2022 dated November 4, 2022, Directors Decree No. 011/SK/DIR-CSE/2021 dated January 6, 2021 and, Decree of the Board of November 9, 2022 is as follows:

31 Desember 2022

Komite Audit

Ketua	Farid Rahman
Anggota	Diding Sakri
Anggota	Wawan Hermawan
Anggota	Dewi Kania Sugiharti

December 31, 2022

Audit Committee

Chairman
Member
Member
Member

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank memiliki karyawan masing-masing sebanyak 7.300 dan 7.412 orang (tidak diaudit).

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank has 7,300 and 7,412 employees, respectively (unaudited).

e. Penawaran umum saham

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor S-5901/BL/2010 tanggal 29 Juni 2010 hal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Bank melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering atau "IPO") atas 2.424.072.500 (nilai penuh) saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp250 (nilai penuh) setiap saham dan harga penawaran

e. Public offering of shares

Based on the Letter of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency number S-5901/BL/2010 dated June 29, 2010 regarding Notification of the Effectiveness of the Registration Statement, Ban conducted an Initial Public Offering (IPO) of 2,424,072,500 (full amount) Series B shares. with a nominal value of Rp250 (full amount) per share and an offering price of Rp600 (full amount) for each share to the public. The offered

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

setiap saham sebesar Rp600 (nilai penuh) kepada publik. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2010. Total penerimaan dari IPO tersebut sebesar Rp1.454.443.500.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 26 Desember 2018, Bank melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan menerbitkan 142.495.995 (nilai penuh) saham Seri A yang ditawarkan khusus kepada Pemerintah Daerah di Jawa Barat dan Banten dengan nilai nominal sebesar Rp250 (nilai penuh) setiap saham dan harga penerbitan Rp1.900 (nilai penuh) setiap saham. Total penerimaan dari PMTHMETD tersebut sebesar Rp270.742.390.500 (nilai penuh).

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S-25/D.04/2022 tanggal 21 Februari 2022 hal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Bank melakukan Penawaran Umum Terbatas kepada pemegang saham Bank untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") dengan menerbitkan HMETD sebanyak 682.656.525 (nilai penuh) lembar saham Seri B dengan dengan nilai nominal sebesar Rp250 (nilai penuh) setiap saham dan harga pelaksanaan sebesar Rp1.355 (nilai penuh) setiap saham. Periode perdagangan HMETD Bank dimulai tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan 16 Maret 2022 dan tanggal penjatahan pesanan saham tambahan HMETD pada tanggal 21 Maret 2022. Total penerimaan dari PMHMETD I tersebut sebesar Rp924.999.591.375 (nilai penuh).

Selisih lebih antara harga penerbitan per saham dengan nilai nominal per saham dicatat sebagai "Tambahan Modal Disetor", yang disajikan pada bagian Ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

f. Penawaran umum obligasi

Bank telah menerbitkan Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebanyak 19 (sembilan belas) dan 6 (enam) kali sejak tanggal 8 Juli 1991 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Jumlah Nominal/ Nominal Amount	Jangka Waktu/ Term	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Tingkat Bunga/ Interest
Obligasi I Bank Jabar/ Bank Jabar Bonds I	25,000	5 tahun/years	8 Juli/ July 8, 1996 *)	mengambang hingga jatuh tempo/ floating rate until maturity
Obligasi II Bank Jabar/ Bank Jabar Bonds II	50,000	5 tahun/years	2 Juli/ July 2, 1998 *)	mengambang hingga jatuh tempo/ floating rate until maturity

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

shares were traded on the Indonesia Stock Exchange on July 8, 2010. The total proceeds from the IPO amounted to Rp1,454,443,500,000 (full amount).

On December 26, 2018, Bank made Capital Increases Without Pre-emptive Rights ("PMTHMETD") by issuing 142,495,995 (full amount) Series A shares which were specially offered to Regional Governments in West Java and Banten with a nominal value of Rp250 (full amount) each share and the issuance price of Rp1,900 (full amount) per share. The total revenue from the PMTHMETD amounted to Rp270,742,390,500 (full amount).

Based on the Financial Services Authority Letter number S-25/D.04/2022 dated February 21, 2022 regarding Notification of the Effectiveness of the Registration Statement, Bank conducted a Limited Public Offering to shareholders of Bank for Capital Increase by Granting Pre-emptive Rights I ("PMHMETD I") by issuing Preemptive Rights of 682,656,525 (full amount) Series B shares with a par value of Rp250 (full amount) per share and an exercise price of Rp1,355 (full amount) per share. The trading period of Bank's Preemptive Rights starts on March 9, 2022 until March 16, 2022 and the date of allotment of additional Preemptive Rights shares on March 21, 2022. The total receipts from PMHMETD I amounted to Rp924,999,591,375 (full amount).

The difference between the issuance price per share and the par value per share is recorded as "Additional Paid-in Capital", which is presented in the Equity section of the consolidated statement of financial position.

f. Public offering of bonds

The Bank issued 19 (nineteen) series of Bonds and 6 (six) series of Subordinated Bonds from July 8, 1991 to Desember 31, 2023, with the details as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Jumlah Nominal/ Nominal Amount	Jangka Waktu/ Term	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Tingkat Bunga/ Interest
Obligasi III Bank Jabar/ <i>Bank Jabar Bonds III</i>	150,000	5 tahun/years	18 April/ <i>April 18, 2005 *)</i>	16,25% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ <i>16.25% fixed for first years, floating for remaining years until maturity</i>
Obligasi IV A Bank Jabar/ <i>Bank Jabar Bonds IV A</i>	300,000	3 tahun/years	5 Oktober/ <i>October 5, 2007 *)</i>	11.75% tetap/ <i>fixed</i>
Obligasi IV B Bank Jabar/ <i>Bank Jabar Bonds IV B</i>	700,000	5 tahun/years	5 Oktober/ <i>October 5, 2009 *)</i>	12.50% tetap/ <i>fixed</i>
Obligasi V Bank Jabar/ <i>Bank Jabar Bonds V</i>	1,000,000	5 tahun/years	8 Desember/ <i>December 8, 2011 *)</i>	11.25% tetap/ <i>fixed</i>
Obligasi VI A Bank Jabar/ <i>Bank Jabar Bonds VI A</i>	350,000	3 tahun/years	10 Juli/ <i>July 10, 2012 *)</i>	12.00% tetap/ <i>fixed</i>
Obligasi VII A Bank Jabar/ <i>Bank Jabar Bonds VII A</i>	276,000	3 tahun/years	9 Februari/ <i>February 9, 2014 *)</i>	9.20% tetap/ <i>fixed</i>
Obligasi VI B Bank Jabar/ <i>Bank Jabar Bonds VI B</i>	400,000	5 tahun/years	10 Juli/ <i>July 10, 2014 *)</i>	12.50% tetap/ <i>fixed</i>
Obligasi VII B Bank Jabar/ <i>Bank Jabar Bonds VII B</i>	601,000	5 tahun/years	9 Februari/ <i>February 9, 2016 *)</i>	10.20% tetap/ <i>fixed</i>
Obligasi VII C Bank Jabar/ <i>Bank Jabar Bonds VII C</i>	1,123,000	7 tahun/years	9 Februari/ <i>February 9, 2018 *)</i>	10.40% tetap/ <i>fixed</i>
Obligasi Berkelanjutan I 2017 A <i>Continuing Bonds I 2017 A</i>	251,700	3 tahun/years	6 Desember/ <i>December 6, 2020 *)</i>	7.5% tetap/ <i>fixed</i>
Obligasi Berkelanjutan I 2018 A <i>Continuing Bonds I 2018 A</i>	835,500	3 tahun/years	28 September/ <i>September 28, 2021*)</i>	9.00% tetap/ <i>fixed</i>
Obligasi Berkelanjutan I 2017 B <i>Continuing Bonds I 2017 B</i>	468,300	5 tahun/years	6 Desember/ <i>December 6, 2022*)</i>	8.15% tetap/ <i>fixed</i>
Obligasi Sub Berkelanjutan I 2017 A <i>Continuing Sub Bonds I 2017 A</i>	307,000	5 tahun/years	6 Desember/ <i>December 6, 2022*)</i>	9.6% tetap/ <i>fixed</i>
Obligasi Berkelanjutan I 2018 B <i>Continuing Bonds I 2018 B</i>	916,500	5 tahun/years	28 September/ <i>September 28, 2023*)</i>	9.5% tetap/ <i>fixed</i>
Obligasi Berkelanjutan I 2017 C <i>Continuing Bonds I 2017 C</i>	780,000	7 tahun/years	6 Desember/ <i>December 6, 2024</i>	8.85% tetap/ <i>fixed</i>
Obligasi Berkelanjutan I 2019 A <i>Continuing Bonds I 2019 A</i>	66,000	3 tahun/years	18 Oktober/ <i>October 18, 2022*)</i>	8.25% tetap/ <i>fixed</i>
Obligasi Berkelanjutan I 2019 B <i>Continuing Bonds I 2019 B</i>	108,000	5 tahun/years	18 Oktober/ <i>October 18, 2024</i>	8.5% tetap/ <i>fixed</i>
Obligasi Berkelanjutan I 2019 C <i>Continuing Bonds I 2019 C</i>	74,000	7 tahun/years	18 Oktober/ <i>October 18, 2026</i>	9.0% tetap/ <i>fixed</i>
Obligasi Sub Berkelanjutan I 2017 B <i>Continuing Sub Bonds I 2017 B</i>	693,000	7 tahun/years	6 Desember/ <i>December 6, 2024</i>	9.9% tetap/ <i>fixed</i>
Obligasi Sub Berkelanjutan II-I 2020 A <i>Continuing Sub Bonds II-I 2020 A</i>	132,000	5 tahun/years	3 Maret/ <i>March 3, 2025</i>	8.6% tetap/ <i>fixed</i>
Obligasi Sub Berkelanjutan II-I 2020 B <i>Continuing Sub Bonds II-I 2020 B</i>	368,000	7 tahun/years	3 Maret/ <i>March 3, 2027</i>	9.35% tetap/ <i>fixed</i>
Obligasi Sub Berkelanjutan II-II 2020 A <i>Continuing Sub Bonds II-II 2020 A</i>	162,580	5 tahun/years	17 November/ <i>November 17, 2025</i>	8.50% tetap/ <i>fixed</i>
Obligasi Sub Berkelanjutan II-II 2020 B <i>Continuing Sub Bonds II-II 2020 B</i>	337,420	7 tahun/years	17 November/ <i>November 17, 2027</i>	9.50% tetap/ <i>fixed</i>
Obligasi Sub Berkelanjutan III-I 2021 A <i>Continuing Sub Bonds III-I 2021 A</i>	379,000	5 tahun/years	15 Juli/ <i>July 15, 2026</i>	7.85% tetap/ <i>fixed</i>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Obligasi Sub Berkelanjutan III-I 2021 B <i>Continuing Sub Bonds III-I 2021 B</i>	621,000	7 tahun/years	15 Juli/ July 15, 2028	8.60% tetap/ fixed
Obligasi Sub Berkelanjutan III-II 2022 A <i>Continuing Sub Bonds III-II 2022 A</i>	399,910	5 tahun/years	9 Juni/ June 9, 2027	7.85% tetap/ fixed
Obligasi Sub Berkelanjutan III-II 2022 B <i>Continuing Sub Bonds III-II 2022 B</i>	600,090	7 tahun/years	9 Juni/ June 9, 2029	8.60% tetap/ fixed

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh temponya.

*) *The Bank paid off the bonds issued on maturity date.*

Penerbitan Obligasi di atas didasarkan pada surat-surat pernyataan sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan I berdasarkan Surat OJK Nomor S-449/D.04/2017 tanggal 27 November 2017 Hal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
2. Penawaran Umum Berkelanjutan II berdasarkan Surat OJK Nomor S-74/D.04/2020 tanggal 26 Februari 2020 Hal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
3. Penawaran Umum Berkelanjutan III berdasarkan Surat OJK Nomor S-109/D.04/2021 tanggal 7 Juli 2021 Hal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

The above Bond Issuance is based on the following affidavits:

1. *Sustainable Public Offering I based on OJK Letter Number S-449/D.04/2017 dated November 27, 2017 Regarding Notification of Effective Registration Statement.*
2. *Sustainable Public Offering II based on OJK Letter Number S-74/D.04/2020 dated February 26, 2020 Regarding Notification of Effective Registration Statement.*
3. *Sustainable Public Offering III based on OJK Letter Number S-109/D.04/2021 dated July 7, 2021 Regarding Notification of Effective Registration Statement.*

g. Pendirian dan informasi umum entitas anak

i) PT Bank Jabar Banten Syariah

Pendirian PT Bank Jabar Banten Syariah ("BJBS") merupakan hasil pemisahan (*spin off*) dari Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ("UUS Bank Jabar Banten") menjadi Bank Syariah berdasarkan Pernyataan Persetujuan Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang tertuang dalam Akta Notaris No. 3 oleh notaris Fathiah Helmi, S.H., tanggal 15 Januari 2010.

BJBS didirikan pada tanggal 15 Januari 2010 berdasarkan Akta Notaris No. 4 oleh notaris Fathiah Helmi, S.H., dan akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-04317.AH.01.01 tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 26 Januari 2010. Bank Indonesia telah memberikan izin usaha kepada BJBS berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/35/KEP.GBI/2010 tanggal 30 April 2010.

g. Establishment and general information about the subsidiaries

i) PT Bank Jabar Banten Syariah

The establishment of PT Bank Jabar Banten Syariah ("BJBS") resulted from the spin-off of the Sharia Business Unit of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ("UUS Bank Jabar Banten") to become Sharia General Bank based on the Approval of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk which was stated by Notarial Deed No. 3 of Fathiah Helmi, S.H., dated January 15, 2010.

BJBS was established on January 15, 2010 based on Notarial Deed No. 4 of Fathiah Helmi, S.H. and has been approved by the Minister of Laws and Human Rights through its Decision Letter No. AHU-04317.AH.01.01 year 2010 concerning the Approval of Legal Corporation dated January 26, 2010. Bank Indonesia has issued the operational license to BJBS based on the Decision Letter of the Governor of Bank Indonesia No. 12/35/KEP.GBI/2010 dated April 30, 2010.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

BJBS telah melaporkan tanggal efektif pelaksanaan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masing-masing melalui surat No. 022/DIR-BJBS/2010 tanggal 7 Mei 2010 dan No. 018/DIR-BJBS/2010 tanggal 3 Mei 2010. BJBS menetapkan tanggal 5 Mei 2010 sebagai tanggal *cut off* untuk laporan posisi keuangan dan telah mulai beroperasi sejak tanggal tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 kepemilikan langsung Bank pada BJBS sebesar 99,24%

Kantor pusat BJBS berlokasi di Jl. Braga No. 135, Bandung. Pada tanggal 31 Desember 2023, BJBS memiliki 10 kantor cabang, 53 kantor cabang pembantu, 2 kantor kas, 25 kantor fungsional dan 2 *payment point* dengan jumlah karyawan sebanyak 1.175 orang. Pada tanggal 31 Desember 2022, BJBS memiliki 10 kantor cabang, 53 kantor cabang pembantu, 2 kantor kas, 17 kantor fungsional dan 2 *payment point* dengan jumlah karyawan sebanyak 1.071 orang.

BJBS memiliki total aset sebesar Rp13.649.880 dan Rp12.445.811 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan pendapatan marjin dan bagi hasil sebesar Rp936.921 dan Rp781.855 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

ii) PT BPR Intan Jabar

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Garut Kota didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 3 Tahun 1987, yang selanjutnya dikukuhkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Garut Kota (PD BPR LPK Garut Kota) dengan Peraturan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1996.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

BJBS has reported the effective date of the implementation of its business activity to Bank Indonesia and Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letters No. 022/DIR-BJBS/2010 dated May 7, 2010 and No. 018/DIR-BJBS/2010 dated May 3, 2010, respectively. BJBS determined May 5, 2010 as the cut off date for the balance sheet and started its operation since that date. As of December 31, 2023 and 2022 the Bank has 99.24% of direct ownership.

BJBS head office is located at Jl. Braga No. 135, Bandung. As of December 31, 2023, BJBS has 10 branch offices, 53 sub-branches, 2 cash offices, 25 functional offices and 2 payment point with 1,175 employees. As of December 31, 2022, BJBS has 10 branch offices, 53 sub-branches, 2 cash offices, 17 Functional Offices and 2 payment point with 1,071 employees (unaudited).

BJBS total assets amounted to Rp13,649,880 and Rp12,445,811 as of December 31, 2023 and 2022, respectively, and margin and revenue sharing income of Rp 936,921 and Rp781,503 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

ii) PT BPR Intan Jabar

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Garut Kota was established with Provincial Regulation Level I West Java No. 3 Year 1987, which was further confirmed as a Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Garut Kota (PD BPR LPK Garut Kota) with Provincial Regulation Level I West Java No. 5 Year 1996.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

BPR Garut Kota berubah menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 25 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan dan mendapat izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dari Bank Indonesia sesuai surat No. 31/20/DIR/UBPR/Rahasia tanggal 22 Juni 1998, serta disahkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-467/KM.17/1998 tentang pemberian izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada PD BPR LK Garut Kota.

PD BPR LPK Garut Kota merupakan penggabungan usaha (*merger*) 7 (tujuh) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK yaitu PD BPR LPK Sukawening, PD BPR LPK Bayongbong, PD BPR LPK Cikajang, PD BPR LPK Banjarwangi, PD BPR LPK Cibalong, PD BPR LPK Leuwigoong sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 30 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Jawa Barat No. 14 tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat Kecamatan.

Pada tahun 2012, Bank telah mengakuisisi PD BPR LPK Garut Kota sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 14/79/KEP.GBI/Bd/2012 tanggal 11 Oktober 2012. Bank memiliki kepemilikan langsung sebesar 24% dan 24% pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 1 November 2012, Bank telah ditunjuk sebagai Pemegang Saham Pengendali.

Berdasarkan akta No. 47 tanggal 11 Desember 2014, notaris Intan Rubiyati Dewi, S.H., M.kn, PD BPR LPK Garut Kota berubah menjadi PT BPR Intan Jabar.

Kantor pusat PT BPR Intan Jabar berkedudukan di Jalan Pramuka No. 30 A Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

Jumlah pegawai PT BPR Intan Jabar pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebanyak 101 dan 176 orang pegawai.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

BPR Garut Kota changed to a Regional Company Subdistrict Lending in accordance with Provincial Government Regulation No. 25 Year 2000, of West Java Province, regarding the Regional Company Subdistrict Lending and were approved as rural Bank by Bank Indonesia based on Letter No. 31/20/DIR/UBPR/Rahasia dated June 22, 1998, and approved through decision No. KEP-467/KM.17/1998, Minister of Finance of the Republic of Indonesia, concerning granting of Business Permit as Rural Bank to PD BPR LK Garut Kota.

PD BPR LPK Garut Kota is based on the merger of 7 (seven) Regional Company Rural Banks which were PD BPR LPK Sukawening, PD BPR LPK Bayongbong, PD BPR LPK Cikajang, PD BPR LPK Banjarwangi, PD BPR LPK Cibalong, PD BPR LPK Leuwigoong as regulated by the Provincial Government Regulation No. 30 year 2010 dated December 31, 2010, of West Java Province, concerning Amendment of Regional Company of West Java No. 14 Year 2006 regarding Regional Company Rural Bank and Regional Company Subdistrict Rural Bank.

In 2012, the Bank has acquired PD BPR LPK Garut Kota based on the Decision Letter of the Governor of Bank Indonesia No. 14/79/KEP.GBI/Bd/2012 dated October 11, 2012. The Bank has direct ownership 24% and 24% as of December 31, 2022 and 2021. Based on the General Shareholders meeting dated November 1, 2012 the Bank is appointed as the Controlling Shareholder.

Based on notarial deed No. 47, dated December 11, 2014, of Intan Rubiyati Dewi, S.H., M.kn, PD BPR LPK Garut Kota changed into PT BPR Intan Jabar.

PT BPR Intan Jabar head office is located at Jalan Pramuka No. 30 A, Garut Kota Subdistrict, Garut Regency, West Java Province.

PT BPR Intan Jabar has 101 and 176 employees as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BPR Intan Jabar memiliki total aset sebesar Rp28.934 dan Rp135.049 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dan pendapatan bunga sebesar Rp3.013 dan Rp6.857 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal pada 31 Desember 2023 dan 2022.

iii) PT BPR Karya Utama Jabar

Berdasarkan Akta RUPS Lainnya PT BPR Karya Utama Jabar No. 9 tanggal 17 Maret 2022, terdapat perubahan Pemegang Saham Pengendali dari Bank menjadi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah mendapatkan persetujuan OJK sesuai dengan surat No. SR-38/KR.0221/2023 tanggal 4 Mei 2023.

Sehingga terdapat perubahan status pada PT BPR Karya Utama Jabar dari Perusahaan Anak menjadi Perusahaan Terasosiasi dalam Konglomerasi Bank. Bank memiliki kepemilikan langsung sebesar 20,93% pada tanggal 31 Desember 2023.

iv) PT BJB Sekuritas Jawa Barat

PT BJB Sekuritas Jawa Barat ("BJB Sekuritas") didirikan berdasarkan akta No. 38 tanggal 23 November 2020 dibuat di hadapan R. Tedy Suwarman, S.H., Notaris di Kota Bandung dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 27 November 2020 dengan No.AHU0063135.AH.OI.01. Tahun 2020. Anggaran Dasar BJB Sekuritas telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 73 tanggal 29 Januari 2021 dari R. Tedy Suwarman, S.H., Notaris di Kota Bandung. BJB Sekuritas memulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan September 2021.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar BJB Sekuritas, maksud dan tujuan BJB Sekuritas yaitu menjalankan usaha di bidang aktivitas keuangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BJB Sekuritas melaksanakan kegiatan usaha di bidang aktivitas keuangan selaku Perusahaan Efek yang meliputi usaha sebagai Perusahaan Efek Daerah (PED) yang mencakup kegiatan sebagai perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan khusus didirikan dalam suatu wilayah provinsi yang mencakup kegiatan usaha pihak yang melakukan transaksi efek untuk

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

PT BPR Intan Jabar total assets amounted to Rp28,934 and Rp135,049 as of December 31, 2023 and 2022, respectively, and interest income of Rp3,013 and Rp6,857 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

iii) PT BPR Karya Utama Jabar

Based on Other General Meeting of Shareholders Deed of PT BPR Karya Utama Jabar No. 9 dated March 17, 2022, been amended the Controlling Shareholder (CSH) of the company from Bank to the West Java Provincial Government has been approved by the Financial Service Authority based on the letter No. SR-38/KR.0221/2023 dated May 4, 2023.

Been Amended, status of PT BPR Karya Utama Jabar change from subsidiaries to associated company in the Bank Conglomeration. Bank has direct ownership of 20,93% as of December 31, 2023 .

iv) PT BJB Sekuritas Jawa Barat

PT BJB Sekuritas Jawa Barat ("BJB Sekuritas") was established based on deed No. 38 dated November 23, 2020 by R. Tedy Suwarman, S.H., Notary in Bandung City and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on November 27, 2020 with No. AHU0063135.AH.OI.01 Year 2020. BJB Sekuritas's Articles of Association have been amended and the latest amendments were based on Deed No. 73 dated January 29, 2021 from R. Tedy Suwarman, S.H., Notary in Bandung. BJB Sekuritas started its commercial operations in September 2021.

In accordance with Article 3 of BJB Sekuritas's Article of Association, the purpose and objective of BJB Sekuritas is to run a business in the field of financial activities. To achieve these goals and objectives, BJB Sekuritas carries out business activities in the field of financial activities as a Securities Company which includes business as a Regional Securities Company (PED) which includes activities as a securities company that has a business license from the Financial Services Authority to carry out business activities as a securities broker, which administer customer securities accounts and is specifically established in a provincial area which includes the business activities of parties conducting securities transactions for their own and other parties' interests and/or marketing of

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

kepentingan sendiri dan pihak lain dan/atau pemasaran efek untuk kepentingan perusahaan efek lain, serta kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BJB Sekuritas memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek Daerah (PED) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Keputusan Nomor KEP 29/D.04/2021 tanggal 29 Juni 2021.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BJB Sekuritas melakukan Kerja Sama dengan PT Mandiri Sekuritas berdasarkan Surat Bursa Efek Indonesia No.S-6969/BELANG/09-2021 tanggal 27 September 2021, mengenai pemberian persetujuan kepada PT Mandiri Sekuritas sebagai anggota Bursa Efek untuk melakukan Kerja Sama dengan Perusahaan Efek Daerah (PED) PT BJB Sekuritas Jawa Barat.

BJB Sekuritas berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 10, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BJB Sekuritas memiliki masing-masing 25 dan 22 karyawan. Karyawan BJB Sekuritas seluruhnya merupakan karyawan perbantuan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

BJB Sekuritas memiliki total aset sebesar Rp31.646 dan Rp30.023 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan total penghasilan usaha sebesar Rp2.686 dan Rp426 pada 31 Desember 2023 dan 2022.

Bank dan entitas anak selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Bank dan entitas anak".

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

securities for the benefit of other securities companies, as well as other activities as determined and/or approved by the Service Authority Finance.

BJB Sekuritas obtained a business license as a Regional Securities Company (PED) from the Financial Services Authority (OJK) through Decree Number KEP 29/D.042021 dated June 29, 2021.

In carrying out its business activities, BJB Sekuritas cooperates with PT Mandiri Sekuritas based on the Indonesian Stock Exchange Letter No. S-6969/BELANG/09-2021 dated September 27, 2021, regarding the granting of approval to PT Mandiri Sekuritas as a member of the Stock Exchange to cooperate with Regional Securities Companies (PED) PT BJB Sekuritas Jawa Barat.

BJB Sekuritas is domiciled in Jl. Teuku Umar No. 10, Lebakgede, Coblong District, Bandung City, West Java.

As of December 31, 2023 and 2022, BJB Sekuritas has 25 and 22 employees, respectively. BJB Sekuritas's employees are all second-hand employees of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten, Tbk.

BJB Sekuritas has a total assets of Rp31,646 and Rp30,023 as of December 31, 2023 and 2022 and operating revenue of Rp2.686 and Rp426 as of December 31, 2023 and 2022.

The Bank and its subsidiaries herein after will be referred as "the Bank and its subsidiaries".

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Material

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

2. Summary of Material Accounting Policies

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

Statement of Compliance

The consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which includes the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board Indonesian Institute of Accountants and Bapepam-LK's Regulation No. VIII.G.7, Appendix of the Decision of the Chairman of Bapepam-LK dated June 25, 2012 regarding the "Guidelines on Financial Statements Presentations and Disclosures for Issuers or Public Companies".

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), yaitu PSAK 101 (Revisi 2019) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 102 (Revisi 2019) tentang "Akuntansi Murabahah", PSAK 104 tentang "Akuntansi Istishna", PSAK 105 tentang "Akuntansi Mudharabah", PSAK 106 tentang "Akuntansi Musyarakah", PSAK 107 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi Ijarah", PSAK 110 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi Sukuk", PSAK 111 tentang "Akuntansi Wa'ad", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013). Bank juga menerapkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan dasar akrual, kecuali pendapatan dari istishna dan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

b. Prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Bank dan entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.g.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Bank, yakni Bank terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS"), namely: SFAS 101 (Revised 2019), "Presentation of Sharia Financial Statements", SFAS 102 (Revised 2019), "Accounting for Murabahah", SFAS 104 "Accounting for Istishna", SFAS 105, "Accounting for Mudharabah", SFAS 106, "Accounting for Musyarakah", SFAS 107 (Revised 2016), "Accounting for Ijarah", SFAS 110 (Revised 2020) "Accounting for Sukuk", SFAS No. 111 "Accounting for Wa'ad", Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013). The Bank also applied Indonesian Financial Accounting Standards (FAS) issued by the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI).

The consolidated financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for some accounts that were assessed using another measurement basis as explained in the accounting policies of the account. The consolidated financial statements have been prepared on accrual basis, except for the revenue from istishna and the profit sharing from the mudharabah and musyarakah financing and the consolidated statement of cash flow.

The consolidated statement of cash flows has been prepared using the direct method and the cash flows have been classified based on operating, investing, and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks maturing within 3 (three) months or less from the acquisition date, provided they are not used as collateral for borrowings nor restricted.

The presentation currency used in the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah, which is the Bank and its subsidiaries' functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the consolidated financial statements are rounded off to millions of Rupiah.

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Bank and its subsidiaries as described in Note 1.g.

A subsidiary is an entity controlled by the Bank, the Bank is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Bank memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Bank mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian Bank dan entitas anak mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Bank dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Bank. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Bank dan entitas anak secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

Bank dan entitas anak mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Bank dan entitas anak menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, Bank dan entitas anak menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Bank dan entitas anak kehilangan pengendalian, maka Bank dan entitas anak akan:

- a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Bank has the practical ability to exercise (ie substantive rights) are considered when assessing whether the Bank controls another entity.

The Bank and its subsidiaries' consolidated financial statements incorporate the results, cash flows, assets, and liabilities of the Bank and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Bank effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intra-group transactions, balances, income, expenses, and cash flows relating to transactions between entities of the group are eliminated in full.

The Bank and its subsidiaries attributed the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Bank and its subsidiaries presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (ie transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Bank and its subsidiaries adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to the owners of the parent.

If the Bank and its subsidiaries loses control, so Bank and its subsidiaries will:

- (a) Derecognise the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

- b) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- c) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- d) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- e) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

c. Penjabaran mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Laba atau rugi kurs valuta asing atas aset dan liabilitas moneter merupakan selisih antara biaya perolehan diamortisasi dalam rupiah pada awal tahun, disesuaikan dengan tingkat suku bunga efektif dan pembayaran selama tahun berjalan, dan biaya perolehan diamortisasi dalam valuta asing yang dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs pada akhir tahun.

Aset dan liabilitas non-moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran dalam rupiah pada 31 Desember 2023 dan 2022 yang menggunakan kurs tengah berdasarkan *Reuters* (pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat) (dalam Rupiah penuh).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

- b) Recognise the fair value of the consideration received (if any) from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;*
- c) Recognise any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*
- d) Reclassify to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other FAS, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;*
- e) Recognise any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.*

c. Foreign currency translation

Transactions denominated in foreign currencies are converted into rupiah at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the consolidated statement of financial position, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the exchange rates prevailing at such date.

Exchange gains and losses arising from transactions denominated in foreign currencies and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income for the current year.

The foreign currency gains or losses on monetary assets and liabilities are the difference between amortized cost in rupiah at the beginning of the year, adjusted for effective interest rate and payments during the year, and the amortized cost in foreign currency translated into rupiah using the exchange rate at the end of the year.

Non-monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated using the exchange rates prevailing at the transaction date.

Below are the major exchange rates used for translation into rupiah as of December 31, 2023 and 2022 using the middle rates based on Reuters (at 04:00 PM Western Indonesian Time) (in full amount).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Dolar Amerika Serikat	15,397.00	15,567.50	<i>United States Dollar</i>
Dolar Australia	10,520.77	10,557.88	<i>Australian Dollar</i>
Dolar Singapura	11,676.34	11,592.88	<i>Singapore Dollar</i>
Poundsterling Inggris	19,626.56	18,786.09	<i>Great Britain Poundsterling</i>
Yen Jepang	108.88	117.81	<i>Japanese Yen</i>
Dolar Hong Kong	1,970.73	1,996.55	<i>Hong Kong Dollar</i>
Euro Eropa	17,038.32	16,851.72	<i>European Euro</i>
Riyal Saudi Arabia	4,118.74	4,141.26	<i>Saudi Arabian Riyal</i>
Renminbi	2,169.50	2,234.50	<i>Renminbi</i>

d. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Bank dan entitas anak terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, tagihan derivatif, surat berharga, tagihan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, wesel ekspor dan tagihan lainnya, kredit yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah, tagihan akseptasi, penyertaan saham, bunga yang masih akan diterima, dan aset lain-lain (setoran jaminan).

Liabilitas keuangan Bank dan entitas anak terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan nasabah syariah, simpanan dari bank lain, liabilitas derivatif, liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, liabilitas akseptasi, efek utang yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, bunga yang masih harus dibayar, liabilitas lain-lain.

Bank dan entitas anak menerapkan PSAK 68, "Pengukuran Nilai Wajar". Penerapan PSAK ini mendefinisikan nilai wajar, menetapkan dalam satu pernyataan, suatu kerangka pengukuran nilai wajar dan mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran dan hierarki nilai wajar.

Bank dan entitas anak selain BJBS menerapkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan", yang menggantikan PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

(i) Klasifikasi

Bank dan entitas anak mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
3. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

d. Financial assets and liabilities

The Bank and its subsidiaries' financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, derivative receivables, marketable securities, marketable securities purchased under agreements to resell, bills and other receivables, loans and sharia financing and receivable, acceptances receivable, investments in shares, interest receivables, and other assets (guarantee deposit).

The Bank and its subsidiaries' financial liabilities consist of obligations due immediately, deposits from customers, deposits from customers sharia, deposits from other banks, derivative payable, liabilities from marketable securities sold under agreements to repurchase, acceptances payable, debt securities issued, borrowings, interest payable, other liabilities.

The Bank and its subsidiaries adopted SFAS 68, "Fair Value Measurement". The adoption of the SFAS defines fair value, establishes in a statement, a framework to measure fair value and requires disclosures on fair value measurement and hierarchy.

The Bank and its subsidiaries exclude BJBS adopted SFAS 71, "Financial Instruments", which replaced SFAS 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement".

(i) Classification

The Bank and its subsidiaries classify its financial assets according to the following categories at initial recognition:

1. *Financial assets measured at fair value through profit or loss;*
2. *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;*
3. *Financial assets measured at amortized cost.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Bank dan entitas anak melakukan pengujian karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan yang dikelola untuk mengetahui karakteristik arus kas kontraktual berasal hanya dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang (*Solely Payment of Principal and Interest* atau *Pass SPPI*) yang konsisten dengan pengaturan pinjaman dasar (*Basic Lending Agreement*). Dalam melakukan penilaian, Bank dan entitas anak mempertimbangkan:

- Imbalan untuk nilai waktu dari uang;
- *Leverage*;
- Variabilitas pada waktu dan jumlah arus kas;
- Instrumen yang terkait secara kontraktual;
- Pembayaran dipercepat;
- Ketentuan kontrak tidak sah dan *de minimis*.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI) jika kedua kondisi berikut:

- Aset keuangan yang dikelola untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

Aset keuangan diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) jika tidak memenuhi kondisi yang disyaratkan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pada saat pengakuan awal, Bank dan entitas anak dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- I. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

The business model reflects how Bank and its subsidiaries of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

The Bank and its subsidiaries assess the contractual cash flow characteristics of financial assets to determine the characteristics of contractual cash flows only from the payment of principal and interest from the outstanding principal (*Solely Payment of Principal and Interest* or *Pass SPPI*) that is consistent with basic lending agreement. In making the assessment, the Bank and its subsidiaries considers:

- The time value of money element of interest;
- *Leverage*;
- Variability in timing or amount of cash flows;
- Contractually linked instruments;
- Early repayment;
- Non-genuine features and *de minimis*.

Financial assets are measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- Financial assets are managed where the business model objectives in order to collect the contractual cash flows; and
- The contractual cash flows are solely payments of principal and interest (SPPI).

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI) if both of the following conditions are met:

- Financial assets are managed to collect the contractual cash flows and sell the assets; and
- The contractual cash flows are solely payments of principal and interest (SPPI).

Financial assets are measured at fair value through profit or loss (FVTPL) if do not meet the conditions required to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income.

At initial recognition, the Bank and its subsidiaries may make an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- I. Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;

II. Liabilitas keuangan lain. Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

II. Other financial liabilities. Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ Category as defined by SFAS 71		Golongan (ditentukan oleh Bank)/ Class (as determined by the Bank)	Subgolongan/ Subclasses
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi/ <i>Financial assets at fair value through profit or loss</i>	Tagihan derivatif - Tidak terkait lindung nilai/ <i>Derivative receivables - Non hedging related</i>	
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ <i>Financial assets at amortized cost</i>	Giro pada Bank Indonesia/ <i>Current accounts with Bank Indonesia</i>	
		Giro pada bank lain/ <i>Current accounts with other banks</i>	
		Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain/ <i>Placements with Bank Indonesia and other banks</i>	
		Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/ <i>Receivable from marketable securities purchased under agreements to resell</i>	
		Tagihan akseptasi/ <i>Acceptance receivables</i>	
		Kredit yang diberikan/ <i>Loans</i>	
		Bunga yang masih akan diterima/ <i>Interest receivable</i>	
		Aset lain-lain/ <i>Other assets</i>	Setoran jaminan/ <i>Security deposit</i>
	Surat berharga/ <i>Marketable securities</i>		
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Financial assets at fair value through other comprehensive income</i>	Surat berharga/ <i>Marketable securities</i>		
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial liabilities at fair value through profit or loss</i>	Liabilitas derivatif/ <i>Derivative payables</i>	
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortized cost</i>	Liabilitas segera/ <i>Obligation due immediately</i>	
		Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>	
		Simpanan bank-bank lain/ <i>Deposits from other banks</i>	
		Liabilitas akseptasi/ <i>Acceptance payables</i>	
		Bunga yang masih harus dibayar/ <i>Accrued expenses</i>	
		Liabilitas lain-lain/ <i>Other liabilities</i>	Setoran jaminan/ <i>Security deposits</i>
			Jasa produksi/ <i>Production Service</i>
			Penghargaan kerja/ <i>Gratuity</i>
		Efek hutang yang diterbitkan/ <i>Debt securities issued</i>	
Pinjaman yang diterima/ <i>Borrowings</i>			

(ii) Pengakuan awal

a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian, seperti tanggal perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

(ii) Initial recognition

a. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way purchases) are recognized on the settlement date, i.e., the date that the companies commit to purchase or sell the assets.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Bank dan entitas anak, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul;
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

- b. *Financial assets and liabilities are initially recognized at fair value. For those financial assets and liabilities not measured at fair value through profit and loss, plus directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets and liabilities depends on their classification.*

Transaction costs only include costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and an additional charge that would not occur if the instrument is not acquired or issued. For financial assets, transaction costs are added to the amount recognized in the initial recognition of the asset, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized on initial recognition of a liability. The transaction costs are amortized over the terms of the instrument based on the effective interest rate method and recorded as part of interest income for transaction costs related to the financial asset or as part of interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

The Bank and its subsidiaries, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

- *the application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise;*
- *the financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or*
- *the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated, but unable to measure the embedded derivative separately.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

- (iii) Pengukuran setelah pengakuan awal
Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- (iv) Penghentian pengakuan
- a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - Bank dan entitas anak mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*); dan
 - Antara (a) Bank dan entitas anak telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Bank dan entitas anak tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Bank dan entitas anak telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau di bawah kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*), dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset dan masih memiliki pengendalian atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank dan entitas anak yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Kredit yang diberikan atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal dengan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

- (iii) *Subsequent measurement*
Financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value.

Financial assets classified as amortized cost and other financial liabilities measured at amortized cost using the effective interest rate method.

- (iv) *Derecognition*
a. *Financial assets are derecognized when:*

- *The contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or*
- *The Bank and its subsidiaries have transferred its rights to receive cash flows from the financial assets or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through arrangement'; and*
- *Either (a) the Bank and its subsidiaries has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Bank and its subsidiaries has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset but has transferred control of the asset.*

When the Bank and its subsidiaries has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Bank and its subsidiaries' continuing involvement in the asset.

Loans or other financial assets are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship with the borrowers has ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

- b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, seperti pertukaran atau modifikasi yang diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

- (v) Pengakuan pendapatan dan beban
- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset-aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI), serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- b. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI), kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar diakui secara langsung dalam ekuitas, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

- b. *Financial liabilities are derecognized when they are extinguished, i.e. liabilities stated in the contract are released or cancelled or have expired.*

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income.

- (v) *Income and expense recognition*
- a. *Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI) and financial assets and liabilities measured at amortized cost are recognised in the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income using the effective interest method.*
- b. *Unrealized gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are included in the statement of profit and loss and other comprehensive income.*

Unrealized gains and losses arising from changes in the fair value of financial assets measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI) other than foreign exchange gains and losses from monetary items are recognised directly in equity, until the financial asset is derecognized or impaired.

At the time the financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Bank dan entitas anak mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Bank dan entitas anak memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

(vi) *Reclassification of financial assets*

The Bank and its subsidiaries reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are carrying at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive income are recorded at their fair values.

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to fair value classification through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from fair value classifications through other comprehensive income to the amortized cost classification is recorded at carrying value. Unrealized gains or losses is removed from equity and adjusted against the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value classification through profit or loss to fair value classification through other comprehensive income are recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value classification through profit or loss to amortized cost classification is recorded at fair value.

(vii) *Offsetting*

Financial assets and liabilities are off-set and the net amount is presented in the consolidated statement of financial position when, and only when, the Bank and its subsidiaries have a legal right to off-set the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the Financial Accounting Standards.

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi
Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Bank dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instruments* tidak dapat ditentukan dengan andal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas, dan biaya.

(viii) *Amortized cost measurement*
The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

(ix) *Fair value measurement*
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell an asset or paid to transfer a liability takes place either:

- *in the principal market for the assets and liabilities; or*
- *in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when determining the price of the asset and liability assuming that market participants act in their own economic best interest.

A fair value measurement of non-financial assets considers a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to other market participants that would use the asset in its highest and best use.

The Bank and its subsidiaries use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

In cases when the fair value of unlisted equity instruments cannot be determined reliably, the instruments are carried at cost less impairment value. The fair value for loans and receivables as well as liabilities to banks and customers are determined using a present value model on the basis of contractually agreed cash flows, taking into account credit quality, liquidity and costs.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran;
- Level 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung;
- Level 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Bank dan entitas anak menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hierarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Bank dan entitas anak telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hierarki nilai wajar (Catatan 40).

(x) Aset Keuangan Sukuk

Pada saat pengakuan awal, Bank dan entitas anak menentukan klasifikasi investasi pada sukuk diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar.

Investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah setelah pengakuan awal, diukur sebagai berikut:

a. Diukur pada biaya perolehan

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya;
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi;
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk;
- Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are classified within fair value hierarchy, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1: quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities accessible at the measurement date;
- Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 for the asset and liability, which is directly or indirectly observable;
- Level 3: unobservable inputs for the asset and liability.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, Bank and its subsidiaries determine whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

For the fair value disclosures purposes, Bank and its subsidiaries has determined classes of assets and liabilities based on the nature, characteristics, risks of the asset and liability, and the level of the fair value hierarchy (Note 40).

(x) Sukuk Financial Asset

At initial recognition, Bank and its subsidiaries determines the classification of investments in sukuk either measured at cost or fair value.

After the initial recognition, investment in ijarah sukuk and mudharabah sukuk is measured as follows:

a. Measured at cost

- The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results;
- Sukuk acquisition cost includes transaction cost;
- The difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk;
- Impairment loss is recognized if the recoverable amount is less than the carrying amount and is

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

rugi penurunan nilai di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

- b. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
- Nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut:
 - Kuotasi harga di pasar aktif;
 - Harga yang terjadi dari transaksi terkini, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif;
 - Nilai wajar instrumen sejenis, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi terkini.
 - Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi;
 - Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
- c. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal Sukuk diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu Sukuk;
 - Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat dari investasi Sukuk diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Semua investasi sukuk dilakukan dengan akad ijarah.

e. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi dan dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

f. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi yang dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

presented as an impairment loss in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

- b. Measured at fair value through profit or loss
- The fair value is determined with reference to the following order:
 - Quoted price in active market;
 - Price from the current transaction, if there is no available price quotations in an active market;
 - Fair value of similar instrument, if there is no available price quotations in an active market and no price from the current transaction.
 - Sukuk acquisition cost does not include transaction cost;
 - The difference between fair value and carrying value is presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.
- c. Measured at fair value through other comprehensive income
- Difference between acquisition cost and principal amortized on a straight line basis over the term of Sukuk;
 - Difference between fair value and carrying amount of FVOCI Sukuk recognized as other comprehensive income.

All investment in sukuk was done under ijarah contracts.

e. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

The current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost and stated at amortized cost using the effective interest rate method.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

f. Placements with Bank Indonesia and other banks

The placements with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost which are stated at amortized cost using the effective interest rate method.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

g. Surat berharga

Surat berharga yang dimiliki terdiri dari Obligasi Negara, Sukuk, *Project Based Sukuk* (PBS), Obligasi Retail Indonesia, Reksadana, Obligasi Korporasi, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) yang diperdagangkan di bursa efek.

Pada saat pengakuan awal, efek-efek dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu aset keuangan diklasifikasikan pada biaya perolehan yang diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

h. Tagihan/liabilitas atas efek-efek yang dibeli/dijual dengan janji dijual/dibeli kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan, dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual menggunakan suku bunga efektif.

Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai bunga dibayar di muka dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

i. Wesel ekspor dan tagihan lainnya

Wesel ekspor dan tagihan lainnya terdiri atas tagihan dari *letters of credit* dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada eksportir.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

g. Marketable securities

Marketable securities consist of Government Bonds, Sukuk, *Project Based Sukuk* (PBS), Indonesia Retail Bonds, Mutual Funds, Corporate Bonds, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), and Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) traded on the stock exchange.

At initial recognition, securities are recorded according to their category, i.e., amortized cost, fair value through other comprehensive income or at fair value through profit or loss.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

h. Receivables/liabilities from marketable securities purchased/sold under agreements to resell/repurchase

Securities purchased under agreements to resell are classified as amortized cost.

Securities purchased under agreements to resell are presented as assets in the consolidated statement of financial position, at the resale price net of unamortized interest income and allowance for impairment losses. The difference between the purchase price and the resale price is treated as unearned interest income and recognized as income over the period starting from when those securities are purchased until they are sold using effective interest rate method.

Liabilities from marketable securities sold under agreements to repurchase are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Liabilities from marketable securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the consolidated statement of financial position, at the repurchase price, net of unamortized prepaid interest. The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid interest and recognized as interest expense over the period starting from when those securities are sold until they are repurchased using effective interest rate method.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

i. Bills and other receivables

Bills and other receivables consist of receivables from letters of credit and Domestic Documentary Letters of Credit to exporters.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Wesel ekspor dan tagihan lainnya dicatat pada biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

j. Tagihan derivatif dan liabilitas derivatif

Seluruh instrumen derivatif (termasuk transaksi valuta asing untuk tujuan pendanaan dan perdagangan) dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar dengan menggunakan kurs *Reuters* pada tanggal laporan atau metode diskonto arus kas.

Tagihan derivatif disajikan sebesar keuntungan yang belum direalisasi dari kontrak derivatif, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Liabilitas derivatif disajikan sebesar kerugian yang belum direalisasi dari kontrak derivatif.

Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian berdasarkan tujuan Bank atas transaksi yaitu untuk (1) lindung nilai atas nilai wajar, (2) lindung nilai atas arus kas, (3) lindung nilai atas investasi bersih pada kegiatan operasi luar negeri dan (4) instrumen perdagangan, sebagai berikut:

- Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang ditujukan dan memenuhi syarat sebagai instrumen lindung nilai atas nilai wajar dan keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar aset dan liabilitas yang dilindungi, diakui sebagai laba atau rugi yang dapat saling hapus dalam periode akuntansi yang sama. Setiap selisih yang terjadi menunjukkan terjadinya ketidakefektifan lindung nilai dan secara langsung diakui sebagai laba atau rugi tahun berjalan;
- Bagian efektif dari keuntungan atau kerugian atas kontrak derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai atas arus kas dilaporkan sebagai penghasilan komprehensif lainnya. Bagian yang tidak efektif dari lindung nilai dilaporkan sebagai laba atau rugi tahun berjalan;
- Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai atas investasi bersih pada kegiatan operasi luar negeri dilaporkan sebagai penghasilan komprehensif lainnya, sepanjang transaksi tersebut dianggap efektif sebagai transaksi lindung nilai;
- Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai (atau kontrak derivatif yang tidak memenuhi persyaratan sebagai instrumen lindung nilai) diakui sebagai laba atau rugi pada tahun berjalan.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Bills and other receivables are stated at amortized cost less allowance for impairment losses.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

j. Derivatives receivable and payable

All derivative instruments (including foreign currency transactions for funding and trading) are recorded in the statement of financial position at fair value. Fair value is determined based on market value using Reuters rate at reporting date or discounted cash flow method.

Derivatives receivables are presented for unrealized gains from derivatives contracts, net of allowance for impairment losses. Derivatives payables are presented for unrealized losses from derivatives contracts.

Gains or losses on derivatives contracts are presented in the consolidated financial statements based on its purpose on the transaction, as (1) a hedge of the fair value, (2) a cash flow hedge, (3) a hedge of a net investment in foreign operations and (4) trading instruments, as follows:

- *Gains or losses on derivatives contracts that are designated and qualify as hedging instruments in the fair value and the gains or losses on changes in fair value of assets and liabilities that are protected, recognized as a gain or loss may be offset in the same accounting period. Any difference representing hedge ineffectiveness is recognized as profit or loss for the current year;*
- *The effective portions of gains or losses on derivative contracts designated as cash flow hedge are reported as other comprehensive income. The ineffective portions of the hedge are reported as profit or loss for the current year;*
- *Gains or losses on derivative contracts designated as hedges of a net investment in a foreign operation are reported as other comprehensive income to the extent it is effective as a hedge;*
- *Gains or losses on derivative contracts not designated as a hedging instrument (or derivative contract that does not qualify as a hedging instrument) is recognized as profit or loss for the current year.*

Tagihan derivatif diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, sedangkan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Derivatives receivable are classified as financial assets at fair value through profit or loss, whereas the derivatives payable classified as financial liabilities in measured at fair value through profit or loss.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

k. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan dengan pihak penerima kredit dan mewajibkan pihak penerima kredit untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

k. Loans

Loans represent the lending of money or equivalent receivables under contracts with borrowers, where the borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period of time.

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Loans are initially measured at fair value plus transaction cost that are directly attributable and additional cost to obtain the financial assets. Subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method, net of allowance for impairment losses.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi ataupun penerusan kredit dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank dan entitas anak.

Loans are classified as amortized cost. Loans under syndication or channeling are stated at the principal amount equal to the risk portion assumed by the Bank and its subsidiaries.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Restructured loans are stated at the lower of carrying value on the date of restructuring or value of the future cash receipts after the restructuring. Losses resulting from the difference between the carrying value on the date of restructuring the present value of future cash receipts after the restructuring is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. After the restructuring, all future cash receipts specified by the new terms are recorded as a return of principal loans and interest income in accordance with the terms of the restructuring.

Kredit yang diberikan dihapusbukkan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit atau hubungan antara Bank dan entitas anak dengan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukkan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

Loans are written off when there is no realistic prospect of collection or when the Bank and its subsidiaries relationship with the borrowers has ended. Loans that cannot be repaid are written-off by debiting the allowance for impairment losses.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

I. Pembiayaan dan piutang syariah

Pembiayaan dan piutang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, yang timbul dari transaksi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara Bank dan entitas anak dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu.

Piutang tersebut meliputi piutang murabahah, piutang istishna dan qardh, untuk pembiayaan meliputi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank dan entitas anak, dimana Bank dan entitas anak membiayai kebutuhan investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Mudharabah merupakan pembiayaan kerja sama antara Bank dan entitas anak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan nisbah (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, pembiayaan mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil revidu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil revidu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

I. Sharia financing and receivables

Sharia financing and receivables is receivables from providing funds or other similar form of receivables arising from transactions carried out based on sale or purchase arrangements and profit sharing between Bank and its subsidiaries and other parties for a certain period of time.

Such receivables consist of receivables arising from murabahah transactions, istishna transactions and qardh transactions, for financing consist of mudharabah financing and musyarakah financing.

Murabahah is a sale or purchase contract between the customer and Bank and its subsidiaries, whereby Bank and its subsidiaries finances the investment and working capital needs of the customer sold with a principal price plus a certain margin that is mutually informed and agreed upon. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Murabahah receivables initially measured at fair value plus directly attributable transaction cost and is an additional cost to obtain the respective financial assets, and after the initial recognition murabahah receivables are measured at amortized cost using the effective margin method less any allowance for impairment losses.

Mudharabah represents scheme financing between Bank and its subsidiaries as the owner of the fund (*shahibul maal*) and the customer as the business executor (*mudharib*), during a certain period. Distribution of profit sharing on a project or other business activity is determined in accordance with the mutually agreed nisbah (*pre-determined ratio*). At consolidated statements of financial position date, mudharabah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the financing quality.

Musyarakah is a partnership contract among fund owners (*musyarakah partners*) to contribute funds and conduct business on a joint basis through partnership with nisbah profit sharing based on a predetermined ratio, while loss is shouldered proportionally based on the capital contribution.

At consolidated statement of financial position date, musyarakah financing is stated at the outstanding balance of the financing less allowance for impairment losses based on the management's review on the financing quality.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

Piutang istishna disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Margin istishna yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang istishna.

Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pinjaman Qardh dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil revidu oleh manajemen terhadap kualitas pinjaman yang ada.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

m. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai atas aset keuangan

Bank dan entitas anak mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.

Bank dan entitas anak mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:

- i. Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- ii. Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Bank dan entitas anak menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Istishna is a purchase agreement between an al-mustashni (buyer) and an al-shani (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to make or to supply al-mashnu (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at an agreed price.

Istishna receivables are presented based on the outstanding billings to the final buyer less allowance for impairment losses. Deferred istishna margin is present as contra account of istishna receivable.

Qardh is the provision of funds or equivalent claims based on agreement between the borrower and the lender that requires the borrower to repay the debts after a certain period of time. Qardh are stated at outstanding balance less allowance for impairment losses based on the management's review on the financing quality.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

m. Identification and measurement of impairment for financial assets

The Bank and its subsidiaries recognize the allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss.

There is no allowance for expected credit losses on investment in equity instruments.

The Bank and its subsidiaries measure the allowance for losses for the lifetime of an expected credit losses, except for the following, which are measured according to 12 months expected credit losses:

- i. Debt instruments that have low credit risk at the reporting date; and*
- ii. Other financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.*

The Bank and its subsidiaries consider debt instruments to have low credit risk when the credit risk rating is at par with the globally understood definition of investment grade.

The 12-month expected credit loss is part of the expected credit loss throughout its lifetime that represents an expected credit loss arising from a default on financial instruments that might occur within 12 months after reporting date.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian

Kerugian kredit ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- i. aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank dan entitas anak sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank dan entitas anak);
- ii. aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- iii. komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank dan entitas anak;
- iv. kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Aset keuangan yang direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- i. Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada;
- ii. Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Measurement of expected credit losses

Expected credit loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:

- i. financial assets that do not deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the present value of all cash shortages (i.e. the difference between the cash flows owed to the Bank and its subsidiaries in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Bank and its subsidiaries);*
- ii. financial assets that deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;*
- iii. for undisbursed loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the amount of cash flow if the commitments is withdrawn and the cash flow expected to be received by the Bank and its subsidiaries;*
- iv. for financial guarantee contracts, expected credit losses are measured at the difference between the estimated payments to replace the holder for the credit losses incurred less the amount estimated to be recoverable.*

Restructured financial assets

If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognized and expected credit losses measured as follows:

- i. If the restructuring does not result in the termination of recognition of existing assets, then the estimated cash flows arising from the modified financial assets are included in the calculation of cash shortages of existing assets;*
- ii. If the restructuring will result in a derecognition of the existing assets, the fair value of the new asset is treated as the final cash flow of the existing financial assets at the time of derecognition. This amount is included in the calculation of cash shortages from existing financial assets which are discounted from the date of derecognition to the reporting date using the initial effective interest rate of the existing financial assets.*

Aset keuangan yang memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank dan entitas anak menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi wanprestasi atau tunggakan pembayaran oleh debitur, restrukturisasi kredit atau tagihan oleh Bank dan entitas anak dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, indikasi bahwa debitur atau penerbit akan dinyatakan pailit, hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, atau data yang dapat diobservasi lainnya yang terkait dengan kelompok aset keuangan, seperti memburuknya status pembayaran debitur atau penerbit dalam kelompok tersebut, atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyajian penyisihan kerugian kredit ekspektasian dalam laporan posisi keuangan konsolidasian

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

- i. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- ii. Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- iii. Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Credit-impaired financial assets

At each reporting date, the Bank and its subsidiaries assesses whether the financial assets recorded at amortized cost and the financial assets of debt instruments which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit impaired (worsening). Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

Objective evidence that financial assets are impaired can include default or payment arrears by a borrower, restructuring of a loan or receivable by the Bank and its subsidiaries on terms that the Bank and its subsidiaries would not otherwise consider, indications that a borrower or issuer will enter bankruptcy, the disappearance of an active market for a security due to financial difficulties, or other observable data relating to a Bank and its subsidiaries of assets, such as adverse changes in the payment status of borrowers or issuers in the Bank and its subsidiaries, or economic conditions that correlate with defaults in the Bank and its subsidiaries.

Purchased or originated credit impaired financial assets – POCI

Financial assets are categorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value has included lifetime estimated credit losses. Furthermore, changes in lifetime credit losses, whether positive or negative, are recognized in the statement of profit or loss as part of the allowance for impairment losses.

Presentation of allowance for expected credit losses in the consolidated statements of financial position

Allowance for expected credit losses is presented in the consolidated statement of financial positions as follows:

- i. Financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;
- ii. Loan commitments and financial guarantee contracts, allowance for expected credit losses is presented as a provision;
- iii. Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses are not recognized in the consolidated statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Ketika kredit yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Bank dan entitas anak menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan;
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika kredit yang diberikan atau surat-surat berharga dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini.

Sebagai panduan praktis, Bank dan entitas anak dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi, dimana perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralized financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Kerugian penurunan nilai yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dicatat pada akun "Cadangan kerugian penurunan nilai" sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Recoveries of written-off financial assets

When a loan is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

The Bank and its subsidiaries use the fair value of collateral as the basis for the future cash flow if one of the following conditions is met:

1. *Loans are collateral dependent, i.e., if the source of loans repayment is only from collateral;*
2. *Foreclosure of collateral is most likely to occur and supported by legally binding collateral agreement.*

Impairment losses on financial assets carried at amortized cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets original effective interest rate. If loans or held-to-maturity marketable securities have variable interest rate, the discount rate used to measure loss on impairment is the current effective interest rate.

As a practical guidance, the Bank and its subsidiaries can measure the impairment based on the instrument's fair value by using observable market price, where the calculation of present value of estimated future cash flows on collateralized financial assets reflects the generated cash flow from the foreclosure of collateral net of costs to acquire and sell the collateral, regardless whether such acquisition occurs or not.

Impairment losses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and reflected in an "Allowance for impairment losses" account as a deduction from financial assets carried at amortized cost.

Interest income on the impaired financial assets continues to be recognized using the rate of interest used to discount the future cash flow for the purpose of measuring the impairment loss.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Ketika peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui dalam laba rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Bank dan entitas anak mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi dengan nilai pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian atas investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual tidak boleh dipulihkan melalui pembalikan atas penurunan nilai sebelumnya pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun berjalan.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar surat-surat berharga yang diklasifikasikan dalam kelompok nilai wajar penghasilan komprehensif lain yang mengalami penurunan nilai meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara objektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada tahun terjadinya.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

When subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss is reversed through profit or loss in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

For financial assets classified as available for sale, Bank and its subsidiaries assess on each consolidated statement of financial position reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or a Bank and its subsidiaries of financial assets is impaired. In the case of equity instruments, a significant or prolonged decline in the fair value of the equity instruments below its cost is an objective evidence of impairment resulting in the recognition of an impairment loss. Impairment losses on available for sale marketable securities are recognized by transferring the cumulative loss that has been recognized directly in equity to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The cumulative loss that has been removed from equity and recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income is the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortization) and the current fair value, less any impairment loss previously recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Impairment losses recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income on available for sale equity instruments should not be recovered through a reversal of a previously recognized impairment loss in the current year consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

If in a subsequent period, the fair value of a fair value through other comprehensive income marketable securities increased and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, the impairment loss is reversed, with the amount of reversal recognized in the year it occurred.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Jika persyaratan kredit yang diberikan, piutang atau surat-surat berharga yang diklasifikasikan dalam kelompok nilai perolehan diamortisasi dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Jika pada suatu periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun berjalan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank dan entitas anak terkecuali Bank Jabar Banten Syariah menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum". Bank Jabar Banten Syariah menerapkan (POJK) No.2/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) adalah sebagai berikut:

- a. 1% dari aktiva produktif yang digolongkan Lancar, di luar penempatan pada Bank Indonesia, Obligasi Pemerintah, instrumen hutang lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai;
- b. 5% dari aktiva produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan;
- c. 15% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan;
- d. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan
- e. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

If the term on loans receivable or amortized cost marketable securities are renegotiated or modified since the debtor or issuer has financial difficulties, the impairment is measured with the original effective interest rate used before the modification of terms.

If in the next period, the amount of allowance for impairment losses is decreased and the decreased can be objectively related to an event that occurred after the recognition of the impairment losses (i.e. upgrade of debtor's or issuer's collectibility credit rating), the impairment losses that was previously recognized has to be reversed, by adjusting the allowance account. The reversal amount of financial assets is recognized in the current year consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The recoveries of written-off financial assets are recorded as other operating income.

In compliance with Financial Services Authority (OJK), Bank and its subsidiaries other Bank Jabar Banten Syariah implements Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.40/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 on "Assessment of Commercial Bank's Asset Quality". Bank Jabar Banten Syariah implements Financial Services Authority (POJK) regulations No 2 /POJK.03/2022 dated January 31, 2022 on "Assessment of Commercial Bank's Asset Quality".

The minimum allowance to be provided in accordance with Regulation of the Financial Services Authority (POJK) is as follows:

- a. *1% of earning assets classified as Current, excluding placements with Bank Indonesia, Government Bonds, other debt instruments issued by the Government of the Republic of Indonesia and earning assets secured by cash collateral;*
- b. *5% of earning assets classified as Special Mention, net of deductible collateral;*
- c. *15% of earning assets classified as Sub-standard, net of deductible collateral;*
- d. *50% of earning assets classified as Doubtful, net of deductible collateral; and*
- e. *100% of earning assets classified as Loss, net of deductible collateral.*

The criterias for assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on the Regulation of the Financial Services Authority (POJK).

- n. Tagihan dan liabilitas akseptasi**
Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi *letter of credit* (L/C) yang diaksep oleh bank pengaksep (*accepting bank*). Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.
- Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.
- o. Penyertaan saham**
Penyertaan saham merupakan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan non-publik yang bergerak di bidang jasa keuangan yang tidak melalui pasar modal untuk tujuan jangka panjang.
- Perusahaan asosiasi adalah seluruh entitas di mana Bank dan entitas anak mempunyai pengaruh signifikan, namun tidak memiliki kendali atas entitas-entitas tersebut. Dalam hal ini, Bank dan entitas anak umumnya mempunyai persentase kepemilikan 20% sampai dengan 50% hak suara. Penyertaan saham pada perusahaan asosiasi dicatat dengan metode ekuitas dan pada awalnya dicatat sebesar harga perolehan dan disesuaikan dengan bagian Bank dan entitas anak atas laba atau rugi neto perusahaan asosiasi sesuai dengan jumlah persentase kepemilikan dan dikurangi dengan penerimaan dividen sejak tanggal akuisisi.
- Investasi dengan persentase kepemilikan di bawah 20% dan tidak memiliki pengaruh signifikan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dimiliki untuk dijual dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Investasi dengan persentase kepemilikan di bawah 20% dan tidak memiliki pengaruh signifikan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dimiliki untuk tidak dijual dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.
- Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.
- p. Aset tetap, aset hak guna dan liabilitas sewa**
Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.
- Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.
- n. Acceptance receivable and payable**
Acceptance receivables and acceptance payable are Letter of Credit (L/C) transactions accepted by accepting bank. Acceptance receivables are classified as financial assets measured at amortised cost. Acceptance liabilities are classified financial liabilities measured at amortised cost.
- Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.*
- o. Investment in shares**
Investment in shares represent investments in non-publicly listed companies engaged in the financial services industry that not through capital market held for long term purposes.
- Associated companies are all entities over which the Bank and its subsidiaries has significant influence but does not have control. Generally, the Bank and its subsidiaries' shareholding is between 20% and 50% of the voting rights. Investment in associates is recorded for under the equity method and are initially recognized at cost and adjusted for the Bank and its subsidiaries' share in net profit or loss of the associated companies less dividends received after the acquisition date.*
- Investments with an ownership interest below 20% and have no significant influence classified as financial asset which held for sale is measured at fair value through profit or lost.*
- Investments with an ownership interest below 20% and have no significant influence classified as financial asset which held not for sale is measured at fair value through other comprehensive income.*
- Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.*
- p. Fixed assets, right-of-use assets, and lease liability**
Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.
- Subsequent to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Tanah awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional, dan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laba rugi. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi diakui dalam laba rugi.

Revaluasi akan dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Jika perubahan nilai wajar tidak berbeda secara signifikan, aset tersebut akan direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun sekali.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter diukur dalam nilai wajar, kecuali:

- (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau
- (ii) nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan, sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>	
Bangunan	20	Buildings
Kendaraan	4 - 8	Vehicles
Perlengkapan	4 - 8	Office equipment

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen melakukan pengkajian ulang atas nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

Land is initially recognized at cost and not depreciated. Subsequent to initial recognition, land is measured at fair value at the revaluation date less any subsequent accumulated impairment losses. Valuation of land are performed by appraisers with professional qualification and is done in regular basis to ensure that the carrying amount does not differ materially from its fair value at the end of reporting period.

Increase in the carrying amount arising from revaluation is recorded in "Revaluation Surplus of Fixed Assets" and presented in other comprehensive income. However, the increase is recognized in profit or loss, up to the amount of impairment of the same assets due to revaluation previously recognised in profit or loss. A decrease in carrying value arising as a result of a revaluation should be recognised in profit or loss.

Revaluation is carried out with fairly regular regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the amount determined using the fair value at the end of the reporting period. If the changes in fair value is insignificant, the asset will be revaluated at least between 3 (three) or 5 (five) years.

Fixed assets acquired in exchange for a non-monetary asset or for a combination of monetary and non-monetary assets are measured at fair values, unless:

- (i) the exchange transaction lacks commercial substance, or*
- (ii) the fair value of neither the assets received, nor the assets given up can be measured reliably.*

Depreciation of an asset starts when it is available for use and is computed using the straight-line method, based on the estimated useful lives of the assets, as follows:

At the year end, management conducts a re-assessment of the residual value, useful life and depreciation method and adjusted prospectively, if needed.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomis masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan maupun pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

Aset hak guna dan liabilitas sewa

PSAK 73 memperkenalkan model akuntansi penyewa tunggal dan mensyaratkan penyewa untuk mengakui aset dan liabilitas untuk semua sewa dengan pengecualian sewa jangka pendek dan aset dengan nilai rendah. Penyewa diharuskan untuk mengakui aset hak-guna yang mewakili haknya untuk menggunakan aset sewaan dan liabilitas sewa yang mewakili kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa. PSAK 73 secara substansial masih menggunakan persyaratan akuntansi atas pesewa (*lessor*) sesuai PSAK 30 "Sewa". Oleh karena itu, penyewa masih akan menggunakan klasifikasi sewa dalam sewa operasi atau pembiayaan, dan perlakuan atas kedua tipe sewa tersebut.

Dampak penerapan PSAK 73 adalah Bank dan entitas anak sebagai penyewa atas kontrak sewa properti dan kendaraan. Bank dan entitas anak telah memilih *simplified approach* dalam melakukan transisi dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparatif. Dengan demikian, informasi komparatif tetap dilaporkan sesuai dengan PSAK 30, "Sewa".

Kebijakan sewa

Bank dan entitas anak mengakui liabilitas sewa, sebagai pembayaran sewa yang tersisa termasuk atas opsi perpanjangan dimana perpanjangan hampir dapat dipastikan, didiskontokan menggunakan tingkat bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Sedangkan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

Any gain or loss arising from the derecognition of the asset is directly included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the item is derecognized.

Repairs and maintenance is charged to the profit or loss as incurred. The cost of major renovation and restoration is capitalized to the carrying amount of the related fixed assets when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Right-of-use assets and lease liabilities

SFAS 73 introduces a single lessee accounting model and requires a lessee to recognise assets and liabilities for all leases with the exemptions of short-term leases and the underlying asset is of low value. A lessee is required to recognize a right-of-use asset representing its right to use the underlying leased asset and a lease liability representing its obligation to make lease payments. SFAS 73 substantially carries forward the lessor accounting requirements in SFAS 30 "Leases". Accordingly, a lessor continues to classify its leases as operating leases or finance leases, and to account for those two types of leases differently.

The impact of SFAS 73 at the Bank and its subsidiaries is where the Bank and its subsidiaries is a lessee in property and vehicle lease contracts. The Bank and its subsidiaries has elected the simplified approach of transition and did not restate comparative information. Therefore, the comparative information continues to be reported under SFAS 30, "Leases".

Leases policy

The Bank and its subsidiaries recognised a lease liability, being the remaining lease payments including extensions options where renewal is reasonably certain, discounted using the incremental borrowing rate at the date of initial application. Meanwhile, rights of use assets include the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, recovery costs and lease payments made on or before the start date of the lease, less rental incentives received. Rights of use assets are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Beban keuangan dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian. Aset sewa (disajikan sebagai bagian aset tetap) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewa dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Bank dan entitas anak akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Aset dalam penyelesaian

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap". Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak hukum atau umur ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

q. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir tahun periode pelaporan, Bank dan entitas anak menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Bank dan entitas anak akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai "rugi penurunan nilai".

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Finance expense is recorded in the consolidated statement of profit or loss. Leased assets (presented under fixed assets) are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the assets and the lease term, if there is no reasonable certainty that Bank and its subsidiaries will obtain ownership by the end of the lease term.

Construction in progress

Constructions in progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of construction in progress. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Premises and Equipment" account when the construction is completed and available for intended use. Construction in progress are not depreciated as these are not yet available for use.

The legal cost of land rights in the form of Business Usage Rights ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") and Usage Rights ("Hak Pakai" or "HP") when the land was initially acquired are recognized as part of the cost of the land under the "Fixed Assets". The extension or the legal renewal costs of land rights were recognized as intangible assets and were amortized over the shorter of the rights' legal life or land's economic life.

q. Impairment of non-financial assets

At the end of each reporting year the Bank and its subsidiaries assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, Bank and its subsidiaries makes an estimate of the asset's recoverable amount.

The recoverable amount determined for an individual asset is the higher of an asset's fair value or Cash Generating Unit (CGU) less costs to sell and its value in use, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or Bank and its subsidiaries of assets.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as "impairment losses".

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to the present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, mengacu pada PSAK 68: "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2d).

In determining fair value less costs of disposal, refer to SFAS 68: "Fair Value Measurements" (Note 2d).

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

r. Aset lain-lain

Aset lain-lain terdiri dari biaya dibayar di muka, kliring dalam penyelesaian, uang muka dan lain-lain.

r. Other assets

Other assets include prepaid expenses, clearing in progress, advances and others.

Aset lain-lain disajikan sebesar nilai tercatat setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Other assets are stated at the carrying amounts less allowance for impairment losses.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Bank dan entitas anak melakukan penelaahan terhadap nilai yang dapat diperoleh kembali atas aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2q.

At the consolidated statement of financial position date, the Bank and its subsidiaries evaluate the recoverable amount of its non-financial assets to determine whether there is any indication of impairment as discussed in Note 2q.

s. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

s. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over the useful life using the straight-line method.

t. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterimanya perintah pemindahbukuan, baik dari nasabah maupun dari bank lain.

t. Obligations due immediately

Obligations due immediately are recorded at the time the obligations occur or upon receipt of transfer orders from customers or other banks.

Liabilitas segera dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya.

Obligations due immediately are stated at amortized cost and classified as other financial liabilities.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

u. Simpanan nasabah, simpanan nasabah syariah dan dana syirkah temporer

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemegang giro.

u. Deposits from customers, sharia deposits from customers and temporary syirkah fund

Current accounts represent customers' funds which can be used as payment instruments, that can be withdrawn by the depositors at any time through cheque, or transfers between accounts using cheque and other orders of payment or transfer. These current accounts are stated at the amount due to the current account holder.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemilik tabungan.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian dengan penyimpan. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito atau yang diperjanjikan.

Giro dan tabungan wadiah merupakan giro dan tabungan wadiah *adh-dhamanah* yakni titipan dana dalam bentuk giro dan tabungan pihak lain dimana pemilik dana bisa mendapatkan pendapatan bonus. Giro wadiah dinyatakan sebesar titipan pemegang giro BJBS.

Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh BJBS. BJBS mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan BJBS atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Dana syirkah temporer dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang dana syirkah temporer bank.

Hubungan antara BJBS dan pemilik dana syirkah temporer merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad mudharabah.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena BJBS tidak mempunyai liabilitas ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi BJBS.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

Dana syirkah temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan konsolidasian, hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada BJBS untuk mengelola dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana syirkah temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana syirkah temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi untung.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Savings accounts represent customers' funds, which can only be withdrawn by the depositors under agreed conditions. Savings account are stated at the amount due to the account holders.

Time deposits represent customers' funds, which can only be withdrawn by the depositors at specific maturities according to the deposit agreements. Time deposits are stated at the nominal amount provided in the certificates of deposits or at the amount stated in the agreement.

Wadiah current and saving account is a wadiah adh-dhamanah funds deposits in the form of current and saving account on which the customer may receive bonus income. Wadiah current accounts are stated at the amount due to the account holder of the deposit BJBS.

Temporary syirkah funds represent investment received by the BJBS. The BJBS has the right to manage and invest funds in accordance with either the BJBS' policy or restriction policy by the depositors with the agreed profit sharing. Temporary syirkah funds are stated at the nominal amount as agreed by the temporary syirkah funds holder.

Relationship between the BJBS and the owner of temporary syirkah funds are partnership based on mudharabah agreement.

Temporary syirkah funds can not be classified as liability because BJBS has no obligation to return the fund to the owner when BJBS has loss, unless there is negligence or default by the BJBS.

Temporary syirkah funds can not be classified as equity since they have maturity and the owner of the funds do not have ownership rights as common shareholders, such as voting rights and right of the profit derived from current assets and non-investment assets.

Temporary syirkah funds represent one of the consolidated statements of financial position accounts which is in accordance with sharia principle that provide right to the BJBS to manage fund, including to mixing of one funds with the other funds.

The owner of temporary syirkah funds receive profit sharing in accordance with the agreement and receive loss sharing based on proportion to the total funds. The profit sharing of temporary syirkah funds might be based on profit sharing or revenue sharing concept.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

v. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah dan dana syirkah temporer yang dinyatakan sebesar kewajiban BJBS kepada bank lain. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan simpanan nasabah, dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain dalam bentuk giro, tabungan, *interbank call money*, *deposit on call* dan deposito berjangka.

Di dalam simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro wadiah.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank dan entitas anak kepada nasabah.

Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari total simpanan yang diterima.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

w. Efek utang yang diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan Bank adalah obligasi. Surat berharga yang diterbitkan diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

x. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima oleh Bank dan entitas anak dari Bank Indonesia, pemerintah dan lembaga pembiayaan lain dengan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian pinjaman.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

v. Deposits from other banks

Deposits from other banks are classified as other financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest method, except for sharia deposits and temporary syirkah fund which are stated at the BJBS' liability to the other banks. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

Deposits from other banks represent liabilities to other banks, in the form of current accounts, savings, interbank call money, deposit on call and time deposits.

Deposits from other banks include sharia deposits in the form of wadiah current accounts.

Deposits from other banks are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for sharia deposits which are stated at the Bank and its subsidiaries liability amount to the customer.

Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

w. Debt securities issued

Securities issued by Bank consist of bonds. The securities issued are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

x. Borrowings

Borrowings are funds received by the Bank and its subsidiaries from Bank Indonesia, the Government and other financing institutions with payment obligation based on borrowing agreements.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

y. Pendapatan bunga, beban bunga dan bagi hasil syariah

Konvensional

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank dan entitas anak mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Syariah

Pendapatan operasi syariah utama terdiri dari pendapatan dari transaksi murabahah dan istishna, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah, pendapatan dari transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* dan pendapatan lainnya.

Borrowings are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

y. Interest income, interest expense and sharia profit sharing

Conventional

Interest income and expenses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial assets or liabilities (or, where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, Bank and its subsidiaries estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instruments except future credit losses.

This calculation includes all commissions, provision fees and other forms received by the parties in the contract that are inseparable from the effective interest rate, transaction costs and all other premiums or discounts.

If a financial asset or group of similar financial assets has been impaired as a result of an impairment loss, the subsequent interest income is recognized based on the interest rate used to discount future cash flows in calculating the impairment loss.

Sharia

*The main sharia operating income consists of income from murabahah and istishna transactions, income from revenue sharing of mudharabah and musyarakah financing, income from *ijarah muntahiyah bittamlik* and other income.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan dari transaksi ijarah murabahah dan istishna diakui dengan menggunakan metode akrual. Pendapatan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil. Beban berdasarkan prinsip syariah terdiri dari beban bagi hasil mudharabah dan beban bonus wadiah.

Pendapatan atas piutang murabahah menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif).

Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang murabahah. Pada saat menghitung margin efektif, BJBS mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang.

Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

z. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

aa. Sewa operasi

Kontrak sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset tetap berada di tangan perusahaan sewamenyewa (*lessor*), maka sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Income from ijarah murabahah and istishna revenue sharing is recognized using the accrual method. Income from mudharabah and musyarakah financing are recognized in the period in which the revenue sharing rights occur. Expenses based on Sharia principles consist of mudharabah profit sharing expense and wadiah bonus expense.

Income from murabahah receivables using the effective rate of return method (effective margin).

Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables. When calculating the effective margin, BJBS estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future.

This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

z. Fees and commission

Fees and commissions directly related to lending activities, or fee and commission which relates to a specific period, is amortized over the term of the contract using the effective interest method and classified as part of interest income in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Fees and commissions that are not related to the lending activity or a period of time and/or associated with the service provided, are recognized as revenue at the time of the transaction and recorded under other operating income.

aa. Operating lease

Leases, which do not transfer substantially all the risks and rewards of ownership are retained by the lessor, are classified as operating leases. Payments made under operating leases are charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line method over the period of the lease.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

bb. Pajak penghasilan

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui menggunakan metode posisi keuangan untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum digunakan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal neraca dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan, Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank dan entitas anak, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut.

Untuk setiap entitas yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau liabilitas, disajikan dalam jumlah neto untuk masing-masing entitas tersebut.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

bb. Income tax

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognized, using the statement of financial position method, for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses can be utilized.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to compensate all or part of the benefit of the deferred tax assets.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to applied to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as of the consolidated statement financial position date.

The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Income Tax Benefit (Expense), Deferred" and included in the determination of net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank and its subsidiaries, when the result of such appeal or objection is determined.

For each of the consolidated entity, the tax effects on temporary differences and tax loss carry forward, which can individually be either asset or liability, are shown at the applicable net amounts.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

cc. Imbalan kerja

Bank dan entitas anak menerapkan PSAK 24 (Revisi 2018), "Imbalan Kerja".

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Berdasarkan berita acara No. 0067/HCA-SKE/BA/2022 tanggal 8 Juli 2022 dilakukan pengalihan pengelolaan dana THT dari YKP Bank BJB ke DPLK Bank BJB dimana merubah program pensiun dari program pensiun manfaat pasti menjadi program pensiun iuran pasti.

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank dan entitas anak, dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut. Pembayaran dikurangkan dari utang iuran. Iuran terutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca-kerja dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang menjadi peserta program pensiun Bank dan entitas anak. Bank harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja ("UUCK") sebagaimana telah diamendemen dengan Perpu No.2/2022 dan UU No.6/2023 atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") atau Peraturan Perusahaan ("PP"), mana yang lebih tinggi. Karena UUCK atau PKB atau PP menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UUCK atau PKB atau PP adalah program imbalan pasti.

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:

- (i) Keuntungan dan kerugian aktuarial;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

cc. Employee benefits

Bank and its subsidiaries apply SFAS 24 (Revised 2018), "Employee Benefit".

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined contribution plan

Based on official report No. 0067/HCA-SKE/BA/2022 dated July 8, 2022, there has been a transfer of THT fund management from YKP Bank BJB to DPLK Bank BJB, which transformed the retirement program from defined benefit plan to defined contribution plan.

Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank and its subsidiaries' defined contribution plan is accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. Actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

Defined benefit plan and other long-term employee benefits

The post-employment benefits are accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified Bank and its subsidiaries employees. The Bank is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with Law No. 11/2020 on Job Creation ("JCL") as amended by Perpu No.2/2022 and Law No.6/2023 or the Bank's Collective Labour Agreement (the "CLA") or Company Regulation ("CR"), whichever is higher. Since the JCL or the CLA or the CR sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the JCL or the CLA or the CR represent defined benefit plans.

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the *Projected Unit Credit Method*.

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets), which is recognized as other comprehensive income, consist of:

- (i) Actuarial gains and losses;

- (ii) Imbal hasil atas aset program tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset);
- (iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

dd. Laba per saham dasar

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar selama tahun berjalan.

ee. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Sesuai dengan PSAK 7 (revisi 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi"

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai "entitas pelapor").

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - 1. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - 2. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - 3. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - 1. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya);

- (ii) Return on plan assets excluding amounts that included in net interest on liabilities (assets);
- (iii) The changes in the impact of the asset ceiling, excluding amounts that included in net interest on liabilities (assets).

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets), which is recognized as other comprehensive income are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

For other long-term employee benefits over the current service cost, net interest on net defined benefit liabilities (assets), and the remeasurement of net defined benefit liability (asset) obligations are recognized immediately in the current consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

All past service costs are recognised at the earlier of when the amendment or curtailment occurs, and when the related restructuring or termination costs are recognized, as a result, unvested past service cost can no longer be deferred and recognised over the future vesting period.

dd. Basic earnings per share

Basic earnings per share amounts are computed by dividing income for the year attributable to equity holders of the parent entity by the weighted average number of shares outstanding during the year.

ee. Transactions with related parties

The Bank has transactions with related parties. In accordance with SFAS 7 (revisi 2015) regarding "Related Party Disclosure".

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (in this Standard referred to as the 'reporting entity').

- a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - 1. has control or joint control of the reporting entity;
 - 2. has significant influence over the reporting entity; or
 - 3. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - 1. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

2. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
3. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
4. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
5. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
6. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
7. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
8. Entitas, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank dan entitas anak telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.42/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 43.

ff. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

2. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
3. Both entities are joint ventures of the same third party;
4. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
5. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
6. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
7. A person identified in (a)(1) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); or
8. The entity, or any members of a group of which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Transactions with related parties are made on the same term and conditions as those transactions with third parties. All transaction done by Bank and its subsidiaries have complied with Financial Services Authority Regulation (POJK) No.42/POJK.04/2020 about "Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions".

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements and the details have been presented in Note 43 of the financial statements.

ff. Dividends

Dividends distribution to the shareholders is recognized as a liability in the consolidated financial statements at the date when the dividend distribution is approved by the shareholders.

gg. Informasi segmen usaha

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari kelompok usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Item-item segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar kelompok usaha, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

Bank dan entitas anak menyajikan segmen usaha berdasarkan laporan internal konsolidasian yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional yaitu Direksi.

Bank dan entitas anak telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen usaha) yang terbagi atas konvensional dan syariah, juga berdasarkan segmen geografis.

Segmen geografis meliputi penyediaan barang maupun jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain.

hh. Biaya emisi penerbitan saham

Biaya-biaya emisi yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun Tambahan Modal Disetor, sebagai bagian dari Ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

ii. Modal saham

Modal saham diukur pada nilai nominal untuk semua saham yang diterbitkan.

jj. Saldo laba

Saldo laba merupakan saldo kumulatif dari hasil operasi Bank dan entitas anak, pembagian dividen, penyesuaian periode sebelumnya, efek dari perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian modal lainnya.

kk. Perubahan dalam standar akuntansi

Pernyataan dan interpretasi standar akuntansi baru dan revisi yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Berikut amendemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

gg. Business segment information

A segment is a distinguishable component of the business unit that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and transactions are eliminated as part of consolidation process.

The Bank and its subsidiaries present business segments based on a consolidated internal report which is presented to the chief operating decision maker, namely the Board of Directors.

The Bank and its subsidiaries have identified and disclosed financial information based on their main business activities (business segments) which are divided into conventional and sharia, also based on geographical segments.

A geographical segment is engaged in providing products or services within a particular economic environment with risks and different returns compared to other operating segments in other economic environments.

hh. Issuance cost on shares issued

Issuance costs related to offering of shares to the public (including pre-emptive rights issue) are deducted directly from the proceeds and presented as a deduction on Additional Paid in Capital account, as part of Equity in the consolidated statement of financial position.

ii. Capital stock

Capital stock is measured at par value for all shares issued.

jj. Retained earnings

Retained earnings represent the cumulative balance of the Bank and its subsidiaries results of operations, dividend distributions, prior period adjustments, effects of the changes in accounting policy and other capital adjustments.

kk. Changes in accounting standards

New and revised statements and interpretation of financial accounting standards effective in the current year

The following are amendment and improvements to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2023, with early adoption is permitted, are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal; dan
- Revisi PSAK 107: Akuntansi Ijarah.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Standar akuntansi dan interpretasi standar yang telah disahkan namun masih belum berlaku efektif

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
- Amendemen PSAK 73: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik;
- Revisi PSAK 101: "Penyajian Laporan Keuangan Syariah"; dan
- Revisi PSAK 109: "Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah".

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi; dan
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank.

DSAK-IAI juga mengesahkan perubahan penomoran PSAK dan ISAK yang berlaku efektif pada 1 Januari 2024, dimana perubahan ini tidak memengaruhi substansi pengaturan dalam masing-masing PSAK dan ISAK tersebut.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

- Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;
- Amendments to PSAK 16: Fixed Assets Related to Proceeds Before Intended Use;
- Amendments to PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding Definition of Accounting Estimates;
- Amendment to PSAK 46: Income Tax regarding Asset-Related Deferred Tax and Liabilities Arising from a Single Transaction; and
- Revised PSAK 107: Accounting for Ijara.

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial year.

New accounting standard and interpretation of standards which has been issued but not yet effective

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2024 are as follows:

- Amendment PSAK 1: "Presentation of Financial Statements" insurance contract regarding long-term liabilities with the covenant;
- Amendment PSAK 73: "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-lease back transactions;
- Revised PSAK 101: "Presentation of Shariah Financial Statement"; and
- Revised PSAK 109: "Zakah, Infaq and Sadaqah related to accounting of zakah, infaq and sadaqah".

New standard and amendment to standard which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 74: Insurance Contract; and
- Amendment PSAK 74: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 – Comparative Information.

Until the date of the financial statements is authorized, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Bank's financial statements.

DSAK-IAI also ratified changes to the number of PSAK and ISAK which will be effective on January 1, 2024. This change does not affect the substance of the requirement in each PSAK and ISAK.

II. Provisi

Provisi diakui jika Bank dan entitas anak memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian liabilitas tersebut akan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

mm. Penurunan nilai aset non-keuangan

Nilai tercatat dari aset yang bukan aset keuangan Bank, kecuali aset pajak tangguhan, ditelaah setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika indikasi tersebut ada, maka nilai yang dapat dipulihkan dari aset tersebut akan diestimasi.

Nilai yang dapat diperoleh kembali dari suatu aset atau unit penghasil kas adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi antara nilai pakainya dan nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai kas kini dan risiko spesifik terhadap aset tersebut.

Cadangan penurunan nilai diakui pada tahun sebelumnya dinilai pada setiap tanggal pelaporan untuk melihat adanya indikasi bahwa kerugian telah menurun atau tidak ada lagi. Kerugian penurunan nilai di jurnal balik jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan nilai yang dapat dipulihkan.

Cadangan kerugian penurunan nilai di jurnal balik hanya hingga nilai tercatat aset tidak melebihi nilai tercatat yang telah ditentukan, dikurangi dengan depresiasi atau amortisasi, jika cadangan penurunan nilai tidak pernah diakui.

Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset non produktif, tetapi Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

nn. Peristiwa setelah periode pelaporan

Setiap peristiwa setelah akhir periode yang menyebabkan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Bank dan entitas anak (*adjusting event*) akan disesuaikan dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah akhir periode yang

II. Provisions

Provisions are recognized when the Bank and its subsidiaries have a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

mm. Impairment of non-financial assets

The carrying amounts of the Bank's non-financial assets, other than deferred tax assets, are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists then the asset's recoverable amount will be estimated.

The recoverable amount of an asset or cash generating unit is the greater of its value in use and its fair value less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

If the fair value of the revalued asset change significantly, it is necessary to revalue on an annual basis, whereas if the fair value of the revalued asset does not change significantly, it is necessary to revalue every 3 years, taking the conditions of the related year into considerations.

Allowance for impairment losses is reversed only to the extent that the asset's carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been recognized.

The Bank is not required to provide an allowance for impairment losses for non-productive assets, but the Bank should still calculate the impairment losses in accordance with the applicable accounting standards.

nn. Events after the reporting period

Any event after the end of the period that causes additional information regarding the financial position of the Bank and its subsidiaries (adjusting event) will be adjusted in the consolidated financial statements. Events after the end of the period

bukan merupakan *adjusting events*, jika ada, akan diungkapkan ketika memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

which are not adjusting events, if any, will be disclosed when it has a material impact on the consolidated financial statements.

3. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Signifikan

3. Significant Accounting Judgments, Estimates and Assumptions

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan.

The preparation of the consolidated financial statement requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amounts of the asset and liability affected in future periods.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank dan entitas anak untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank dan entitas anak memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang.

Going concern

The management has made an assessment of the Bank and its subsidiaries' abilities to continue as a going concern and is satisfied that the Bank and its subsidiaries have the resources to continue its business for the foreseeable future.

Selain itu, aset dan liabilitas tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank dan entitas anak untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt to the Bank and its subsidiaries' abilities to continue as a going concern. Therefore, the consolidated financial statement continues to be prepared on the going concern basis.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Manajemen menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti diungkapkan pada Catatan 2d.

Classification of financial assets and financial liabilities

The Management determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the accounting policies disclosed in Note 2d.

Nilai wajar atas dan liabilitas keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

Fair value of financial instruments

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant on the overall fair value measurement:

- Level 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang dapat diakses pada tanggal pengukuran;
- Level 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung;
- Level 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Aset keuangan yang tidak memiliki harga pasar

Bank dan entitas anak mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah nilai tersebut dikutip atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi pada apakah aset keuangan yang dikutip di pasar aktif adalah penentuan apakah harga pasar dapat segera dan secara teratur tersedia, dan apakah mereka mewakili harga aktual dan teratur terjadi transaksi pasar secara *arms-length*.

Kontinjensi

Ketika Bank dan entitas anak sedang terlibat dalam proses hukum, perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum Bank dan entitas anak didasarkan pada analisis hasil yang potensial.

Manajemen Bank dan entitas anak tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

Estimasi dan asumsi

Asumsi dan estimasi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Bank dan entitas anak mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali Bank dan entitas anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut,

- Level 1: quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities accessible at the measurement date;
- Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 for the assets and liabilities, which is directly or indirectly observable;
- Level 3: unobservable inputs for the assets and liabilities.

Financial assets not quoted in an active market

The Bank and its subsidiaries classify financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an *arm's length* basis.

Contingencies

When the Bank and its subsidiaries are currently involved in legal proceedings, the estimate of the probable cost for the resolution of claims determined in consultation with the aid of the legal counsel of the Bank and its subsidiaries based upon an analysis of potential results.

Management of the Bank and its subsidiaries does not believe that the outcome of this matter will affect the results of operations. It is probable, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating to these proceedings.

Estimates and assumptions

The key estimates and assumptions concerning the future and other key sources of estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Bank and its subsidiaries based their assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank and its subsidiaries. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Allowance for impairment losses of financial assets

In the calculation of allowance for impairment losses of financial assets, the specific condition of impaired counterparty is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows,

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

Bank dan entitas anak menelaah portofolio pinjaman dan piutang setiap tahun untuk menilai penurunan nilai dengan memperbaharui provisi yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas kredit.

Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, Bank dan entitas anak membuat penilaian, apakah terdapat data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang dapat diukur dalam laporan perkiraan arus kas masa depan dari portofolio pinjaman sebelum penurunan tersebut dapat diidentifikasi secara individual dalam portofolio tersebut.

Bukti seperti ini dapat termasuk data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan yang merugikan pada status pembayaran kelompok debitur, atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok. Bank dan entitas anak menggunakan perkiraan dalam menentukan jumlah dan waktu dari arus kas masa depan ketika menentukan tingkat penyisihan yang diperlukan. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah penyisihan di masa yang akan datang.

Penurunan nilai untuk surat berharga

Bank dan entitas anak menentukan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Umur ekonomis dari aset tetap

Bank dan entitas anak memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut. Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

management makes judgements about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.

The Bank and its subsidiaries reviews its loan portfolio and receivables to assess impairment on an annual basis with updating provisions made during the intervals as necessary based on the continuing analysis and monitoring of individual accounts by credit officers.

In determining whether an impairment loss should be recorded in the consolidated statements of comprehensive income, the Bank and its subsidiaries make judgments as to whether there is any observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of loans before the decrease can be identified with an individual loan in that portfolio.

This evidence may include observable data indicating that there has been an adverse change in the payment status of borrowers in a Bank and its subsidiaries, or national or local economic conditions that correlate with defaults on assets in the Bank and its subsidiaries. The Bank and its subsidiaries use estimates in the amount and timing of future cash flows when determining the level of allowance required. Such estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, resulting to future changes in the allowance.

Impairment of marketable securities

The Bank and its subsidiaries determine that securities are impaired based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost.

Useful lives of premises and equipment

The Bank and its subsidiaries estimate the useful lives of premises and equipment based on the period over which the assets are expected to be available for use. The estimated useful lives of premises and equipment are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the assets. In addition, estimation of the useful lives of premises and equipment is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas.

Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban operasional yang diakui.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Bank dan entitas anak mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali.

Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) kinerja yang rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan ekspektasi dari hasil operasi historis maupun proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- b) perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- c) industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Bank dan entitas anak mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas).

Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan sejauh terdapat kemungkinan bahwa saldo rugi tersebut dapat dikompensasikan terhadap penghasilan kena pajak di masa yang akan datang. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

Bank dan entitas anak menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in estimates brought about by changes in factors mentioned above.

The amounts and timing of recorded expenses for any period would be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of premises and equipment would increase the recorded operating expenses.

Impairment of non-financial assets

The Bank and its subsidiaries assess impairment on assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable.

The factors that which could trigger an impairment review include the following:

- a) significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;*
- b) significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and*
- c) significant negative industry or economic trends.*

The Bank and its subsidiaries recognize an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's (or Cash Generating Unit's) fair value less costs to sell and its value in use.

Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the cash generating unit to which the asset belongs.

Recognition of deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses and credits to the extent that it is probable that taxable income will be available against which the losses can be utilized. Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable income together with future tax planning strategies.

The Bank and its subsidiaries review their deferred tax assets at each consolidated statement of financial position date and reduce the carrying amount to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi perpajakan

Bank dan entitas anak menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi.

Significant judgement is required in determining the provision for taxes

The Bank and its subsidiaries provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit/loss.

Nilai kini atas kewajiban imbalan pasca kerja dan imbalan jangka panjang lainnya

Biaya atas kewajiban imbalan pasca kerja dan imbalan jangka panjang lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris. Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

Present value of post employment and other long term employment benefits

The cost of post employment and other long term employment benefits is determined using actuarial valuations. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rates, expected rates of return on assets, future salary increases, mortality rates and disability rate. Due to the long-term nature of these plans, such estimates are subject to significant uncertainty.

4. Kas

4. Cash

	31 Desember/December 31, 2023		31 Desember/December 31, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	
Rupiah		3,522,383		3,290,870	Rupiah
Mata uang asing					Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	351,586	5,413	424,211	6,604	United States Dollar
Dolar Singapura	94,809	1,107	108,000	1,252	Singapore Dollar
Euro Eropa	21,318	623	24,191	401	European Euro
Dolar Australia	36,576	278	32,150	339	Australian Dollar
Riyal Saudi Arabia	26,400	88	47,074	195	Saudi Arabian Riyal
Renminbi	613,451	20	85,313	191	Renminbi
Dolar Hong Kong	9,537	27	40,970	82	Hong Kong Dollar
Yen Jepang	3,450	68	271,000	32	Japanese Yen
Poundsterling Inggris	13,565	67	3,455	65	Great Britain Poundsterling
		7,691		9,161	
Total		3,530,074		3,300,031	Total

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp1.137.116 dan Rp1.176.198 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat saldo kas yang digunakan sebagai agunan.

The Rupiah balance includes cash in ATMs (Automated Teller Machines) of Rp1,137,116 and Rp1,176,198 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

As of December 31, 2023 and 2022 there are no cash used as collateral.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

5. Giro pada Bank Indonesia

5. Current Accounts with Bank Indonesia

<u>31 Desember/December 31, 2023</u>		<u>31 Desember/December 31, 2022</u>		
Jumlah nosional mata uang asing/ <i>Notional amount</i>		Jumlah nosional mata uang asing/ <i>Notional amount</i>		
<i>in foreign currencies</i> (angka penuh/ <i>full amount</i>)	Ekuivalen Rupiah/ <i>Equivalent Rupiah</i>	<i>in foreign currencies</i> (angka penuh/ <i>full amount</i>)	Ekuivalen Rupiah/ <i>Equivalent Rupiah</i>	
Rupiah	14,703,643		12,954,640	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	11,438,847	5,007,430	77,953	United States Dollar
Total	14,879,767		13,032,593	Total

Dalam giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp578.671 dan Rp549.453 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Current accounts with Bank Indonesia include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp578,671 and Rp549,453 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The minimum statutory reserves ratio (GWM) as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31,</u>		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Rupiah			Rupiah
Utama	7.91%	8.28%	Primary
PLM	10.45%	12.21%	PLM
Dolar Amerika Serikat	4.35%	4.36%	United States Dollar
Syariah - Rupiah	5.60%	7.50%	Sharia- Rupiah

Mulai berlaku per 1 September 2022, Bank melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif, sehingga Bank mendapatkan insentif berupa kelonggaran GWM dalam Rupiah pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar 2,95% dan 1,50%. Sehingga, GWM dalam rupiah yang harus dipenuhi Bank pada 31 Desember 2023 yang seharusnya sebesar 9,00% dengan ketentuan harian 0,00% dan rata-rata 9,00% menjadi sebesar 6,05% dengan ketentuan harian 0,00% dan rata-rata 6,05% serta sebesar 7,50% dengan ketentuan harian 0,00% dan rata-rata 7,50% untuk 2022.

Effective as of September 1, 2022, Bank undertakes providing funds for certain and inclusive economic activities, so that the Bank gets incentives in the form of a relaxation of GWM in Rupiah on 31 December 2023 and 2022 of 2.95% and 1.50%. GWM in rupiah that must be met by the Bank on 31 December 2023 should be 9.00% with a daily requirement of 0.00% and an average of 9.00% to 6.05% with a daily requirement of 0.00% and an average of 6.05% and 7.50% with a daily requirement of 0.00% and an average of 7.50% for 2022.

GWM Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari GWM Primer masing-masing sebesar 6,05% dan 7,50% dengan menggunakan saldo rekening giro Rupiah, dan sebesar 4,00% dan 4,00% untuk valuta asing pada Bank Indonesia. Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5,00% dan 6,00% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

GWM of the Bank as of December 31, 2023 and 2022 is consist of primary GWM of 6,05% and 7.50%, respectively, through current accounts with Bank Indonesia in Rupiah, and 4.00% and 4.00% for foreign currency, respectively. Macroprudential Liquidity Buffer of 5.00% and 6.00% as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Bank dan entitas anak harus memenuhi persyaratan GWM dalam Rupiah masing-masing sebesar 7,50%, dan 7,50%.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PBI No. 22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020; PBI No. 22/10/PBI/2020 tanggal 28 Juli 2020; PBI No. 23/16/PBI/2021 tanggal 21 Desember 2021; dan terakhir kali dengan PBI No. 24/4/PBI/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang dijelaskan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PADG No. 20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018; PADG No. 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019; PADG No. 21/27/PADG/2019 tanggal 26 Desember 2019; PADG No. 22/2/PADG/2020 tanggal 10 Maret 2020; PADG No. 22/10/PADG/2020 tanggal 29 April 2020; PADG No. 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020; PADG No. 23/27/PADG/2021 tanggal 21 Desember 2021; dan terakhir kali melalui PADG No. 24/3/PADG/2022 tanggal 1 Maret 2022. Serta mengacu pada PADG No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PADG No. 2 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023; dan terakhir kali dengan PADG No. 12 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank juga harus memenuhi PBI No. 20/4/PBI/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PBI No. 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019; PBI No. 22/17/PBI/2020 tanggal 1 Oktober 2020; PBI No. 23/17/PBI/2021 tanggal 21 Desember 2021; dan terakhir kali melalui PBI No. 24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dijelaskan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 tentang tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Based on Sharia principle, as of December 31, 2023 and 2022, based on the Bank Indonesia regulations, the Bank and its subsidiaries is required to maintain GWM in Rupiah of 7.50%, and 7.50%.

The calculation of the GWM ratio as of December 31, 2023 and 2022 is based on Bank Indonesia regulation (PBI) No. 20/3/PBI/2018 dated March 29, 2018 concerning Statutory Reserves for Commercial Banks in Rupiah and Foreign Exchange for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units as amended several times with PBI No.22/3/PBI/2020 dated March 24, 2020; PBI No. 22/10/PBI/2020 dated July 28, 2020; PBI No.23/16/PBI/2021 dated December 21, 2021; and finally through PBI No. 24/4/PBI/2022 dated March 1, 2022 which is explained through the Regulation of Members of the Board of Governors (PADG) No. 20/10/PADG/2018 dated May 31, 2018 concerning Statutory Reserves for Commercial Banks in Rupiah and Foreign Exchange for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units as amended several times with PADG No. 20/30/PADG/2018 dated November 30, 2018; PADG No. 21/14/PADG/2019 dated June 26, 2019; PADG No.21/27/PADG/2019 dated December 26, 2019; PADG No.22/2/PADG/2020 dated March 10, 2020; PADG No. 22/10/PADG 2020 dated April 29, 2020; PADG No.22/19/PADG/2020 dated July 29, 2020; PADG No. 23/27/PADG/2021 dated December 21, 2021; and finally through PADG No. 24/3/PADG/2022 dated March 1, 2022. And also refers to PADG No.24/8/PADG/2022 dated June 30, 2022 concerning regulations for the Fulfillment of Statutory Reserves for Commercial Banks in Rupiah and Foreign Exchange for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units as amended several times with PADG No. 2 year 2023 dated March 24, 2023; and the last time through PADG No. 12 year 2023 dated September 27, 2023.

As December 31, 2023 and 2022, the Bank must also comply with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 20/4/PBI/2018 dated April 3, 2018 concerning Macroprudential Intermediation Ratios and Macroprudential Liquidity Buffers for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Unit which has been amended several times with PBI No. 21/12/PBI/2019 dated November 25, 2019; PBI No. 22/17/PBI/2020 dated October 1, 2020; PBI No. 23/17/PBI/2021 dated December 21, 2021; and finally through PBI No. 24/16/PBI/2022 dated October 31, 2022 which is explained through the Regulation of Members of the Board of Governors (PADG) No. 21/22/PADG/2019 dated November 28, 2019 concerning Macroprudential Intermediation Ratios

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang telah diubah beberapa kali dengan PADG No. 21/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020; PADG No. 22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020; PADG No. 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021; PADG No. 23/31/PADG/2021 tanggal 31 Desember 2021; PADG No. 24/14/PADG/2022 tanggal 31 Oktober 2022; PADG No. 10 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023; dan terakhir kali dengan PADG No. 18 Tahun 2023 tanggal 29 November 2023.

GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. GWM Sekunder dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau excess reserve yang merupakan kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah dari GWM Primer, GWM LFR dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). GWM LFR dan RIM adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, jika LFR dan RIM target Bank Indonesia (84%) atau jika di atas maksimum LFR dan RIM target BI (94%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif BI sebesar 14%.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang GWM Bank Umum.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada giro pada Bank Indonesia yang dijadikan jaminan.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

and Macroprudential Liquidity Buffers for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units which has been amended several times with PADG No. 21/11/PADG/2020 dated April 29, 2020; PADG No. 22/30/PADG/2020 dated October 5, 2020; PADG No. 23/7/PADG/2021 dated April 26, 2021; PADG No. 23/31/PADG/2021 dated December 31, 2021; PADG No. 24/14/PADG/2022 dated October 31, 2022; PADG Number 10 of 2023 dated September 14, 2023, and was last amended by PADG Number 18 of 2023 dated November 29, 2023.

Primary Minimum Statutory Reserve is a minimum reserve that should be maintained by the Bank in Current Accounts with Bank Indonesia. Secondary Minimum Statutory Reserve and Macroprudential Liquidity Buffer are the minimum reserves that should be maintained by the Bank which comprise of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Government Debenture Debt (SUN), Sharia Government Securities (SBSN), and/or excess reserve which represents the excess reserve of the Bank Current Accounts in Rupiah over the Primary Minimum Statutory Reserve, Minimum Statutory Reserve on LFR and Macroprudential Intermediation Ratio (RIM). Minimum Statutory Reserve on LFR and RIM is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of Current Accounts with Bank Indonesia, if the Bank and its subsidiaries' LFR and RIM is below the minimum of LFR and RIM targeted by Bank Indonesia (84%) or if the Bank LFR and RIM is above the maximum of LFR and RIM targeted by BI (94%) and the Capital Adequacy Ratio (CAR) is below BI requirement of 14%.

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank has fulfilled Bank Indonesia's prevailing regulation regarding GWM of Commercial Banks.

As of December 31, 2023 and 2022, there are no current accounts with Bank Indonesia pledged as collateral.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

6. Giro pada Bank Lain

6. Current Accounts with other Banks

a. Berdasarkan mata uang

a. By currency

	31 Desember/December 31, 2023		31 Desember/December 31, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	
Rupiah		582,783		325,659	Rupiah
Mata uang asing					Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	29,655,027	456,598	51,793,563	806,296	United States Dollar
Dolar Singapura	3,611,607	42,170	3,525,981	40,876	Singapore Dollar
Dolar Australia	2,524,102	26,555	2,660,598	28,090	Australian Dollar
Yen Jepang	540,777,244	58,880	167,436,376	19,726	Japanese Yen
Euro Eropa	1,159,948	19,764	902,483	14,965	European Euro
Poundsterling Inggris	388,813	7,631	309,148	5,808	Great Britain Poundsterling
Dolar Hong Kong	527,744	1,040	535,744	1,070	Hong Kong Dollar
Renminbi	629,722	1,366	539,211	1,205	Renminbi
		614,004		918,036	
Total		1,196,787		1,243,695	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai		(57)		(68)	Allowance for impairment losses
Neto		1,196,730		1,243,627	Net

b. Berdasarkan hubungan

b. Based on relationship

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	582,783	325,659	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	456,598	806,296	United States Dollar
Dolar Singapura	42,170	40,876	Singapore Dollar
Dolar Australia	26,555	28,090	Australian Dollar
Yen Jepang	58,880	19,726	Japanese Yen
Euro Eropa	19,764	14,965	European Euro
Poundsterling Inggris	7,631	5,808	Great Britain Poundsterling
Dolar Hong Kong	1,040	1,070	Hong Kong Dollar
Renminbi	1,366	1,205	Renminbi
	614,004	918,036	
Total	1,196,787	1,243,695	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(57)	(68)	Allowance for impairment losses
Neto	1,196,730	1,243,627	Net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

c. Berdasarkan bank

c. By bank

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Rupiah			Rupiah
Bank Pemerintah Daerah			Regional Banks
PT BPD Kalimantan Selatan	12,910	11,590	PT BPD Kalimantan Selatan
PT BPD Bali	11,466	3,738	PT BPD Bali
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	7,029	3,097	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
PT BPD Jawa Tengah	4,027	1,318	PT BPD Jawa Tengah
PT BPD Jawa Timur Tbk	1,598	1,080	PT BPD Jawa Timur Tbk
PT BPD Kalimantan Timur	4	-	PT BPD Kalimantan Timur
PT BPD Sulawesi Utara	1	1	PT BPD Sulawesi Utara
PT BPD Riau Kepri	1	1	PT BPD Riau Kepri
PT BPD Lampung	1	1	PT BPD Lampung
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	1	1	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT BPD Banten Tbk	-	13	PT BPD Banten Tbk
	<u>37,038</u>	<u>20,840</u>	
Bank Umum			Commercial Banks
PT Bank Central Asia Tbk	524,756	270,099	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Sahabat Sampoerna	16,255	15,780	PT Bank Sahabat Sampoerna
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2,943	3,225	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	1,238	4,389	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Standard Chartered Indonesia	399	434	Standard Chartered Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	152	3,529	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1	1	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	3,232	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	2,086	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	1,898	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Oke Indonesia	-	129	PT Bank Oke Indonesia
PT Bank KEB Hana Indonesia	-	14	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	2	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	-	1	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
	<u>545,744</u>	<u>304,819</u>	
	<u>582,782</u>	<u>325,659</u>	
Mata uang asing			Foreign currencies
Citibank, N.A	299,015	293,891	Citibank, N.A
PT Bank Central Asia Tbk	69,789	195,367	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	91,725	183,642	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	57,721	151,049	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Standard Chartered Bank Overseas-Chinese Banking Corporation, Ltd	47,235	46,938	Standard Chartered Bank Overseas-Chinese Banking Corporation, Ltd
Kookmin Bank Industrial and Commercial	42,170	40,876	Kookmin Bank Industrial and Commercial
PT Bank ICBC Indonesia	4,747	4,799	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,366	1,205	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Indover Bank, Amsterdam	180	201	Indover Bank, Amsterdam
	<u>57</u>	<u>68</u>	
	<u>614,005</u>	<u>918,036</u>	
Total	1,196,787	1,243,695	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(57)	(68)	Allowance for impairment losses
Neto	<u>1,196,730</u>	<u>1,243,627</u>	Net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

d. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

d. Average interest rates per annum

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Rupiah			Rupiah
Mata uang asing	1.38%	1.20%	Foreign currencies
	0.00%	0.00%	

e. Perubahan nilai tercatat bruto
Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai
berikut:

e. Movement in the gross carrying amount
The movements in the gross carrying amount are
as follows:

	31 Desember/December 31, 2023					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Nilai tercatat bruto awal	1,243,695	-	-	-	1,243,695	Initial gross carrying amount
Aset baru	156	-	-	-	156	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya : dilunasi (kecuali hapus buku)	(23,066)	-	-	-	(23,066)	Assets derecognized write off
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	(18,362)	-	-	-	(18,362)	Remeasurement
Penghapusbukuan	-	-	-	-	-	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	(5,636)	-	-	-	(5,636)	Foreign exchange and other movement
Nilai tercatat bruto akhir	1,196,787	-	-	-	1,196,787	Ending gross carrying amount
	31 Desember/December 31, 2022					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Nilai tercatat bruto awal	2,691,297	-	-	-	2,691,297	Initial gross carrying amount
Aset baru	64,186	-	-	-	17,278	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau hapus buku)	(1,549,430)	-	-	-	(1,549,430)	Assets derecognized write off
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	12,825	-	-	-	12,825	Remeasurement
Penghapusbukuan	-	-	-	-	-	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	71,725	-	-	-	71,725	Foreign exchange and other movement
Nilai tercatat bruto akhir	1,290,603	-	-	-	1,243,695	Ending gross carrying amount

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

f. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

f. *Movements in the allowance for impairment losses*

	31 Desember/December 31, 2023					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Saldo awal	-	-	68	-	68	Initial balance
Aset Baru	-	-	-	-	--	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	-	-	-	-	-	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	-	-	-	-	-	Remeasurement
Penghapusbukuan	-	-	-	-	-	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	-	-	(11)	-	(11)	Foreign exchange and other movement
Saldo akhir	-	-	57	-	57	Ending balance

	31 Desember/December 31, 2022					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Saldo awal	-	-	66	-	66	Initial balance
Aset Baru	-	-	-	-	--	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	-	-	-	-	--	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	-	-	-	-	--	Remeasurement
Penghapusbukuan	-	-	-	-	--	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	-	-	2	-	2	Foreign exchange and other movement
Saldo akhir	-	-	68	-	68	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the above allowance for impairment losses is adequate.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 46.

Information with respect to classification of impaired and not impaired of financial assets are disclosed in Note 46.

g. Berdasarkan kolektibilitas
Kolektibilitas giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

g. *By collectibility*
The collectibility of current accounts with other banks are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Lancar	1,196,730	1,243,627	Current
Macet	57	68	Loss
Total	1,196,787	1,243,695	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(57)	(68)	Allowance for impairment losses
Neto	1,196,730	1,243,627	Net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

h. Giro pada bank lain yang digunakan sebagai agunan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang digunakan sebagai agunan.

h. *Current account with other banks pledged as collateral*

As of December 31, 2023 and 2022 there are no current accounts with other banks which are used as collateral.

7. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

7. *Placements with Bank Indonesia and Other Banks*

a. Berdasarkan jenis, hubungan dan mata uang

a. *Based on type, relationship and currency*

	31 Desember/December 31, 2023		31 Desember/December 31, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount		Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount		
	in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	
Pihak ketiga					<i>Third parties</i>
Rupiah					<i>Rupiah</i>
Deposit Facility					<i>Deposit Facility</i>
Bank Indonesia		-		4,999,341	<i>Bank Indonesia</i>
Bank Indonesia Syariah		71,000		390,000	<i>Bank Indonesia Syariah</i>
Call Money		950,000		1,000,000	<i>Call Money</i>
Deposito berjangka		385,875		762,450	<i>Time Deposits</i>
Tabungan		128		5,016	<i>Savings</i>
		<u>1,407,003</u>		<u>7,156,807</u>	
Dolar Amerika Serikat					<i>United States Dollar</i>
Call Money		76,985		-	<i>Call Money</i>
Deposit Facility Bank Indonesia		<u>2,403,001</u>		-	<i>Deposit Facility Bank Indonesia</i>
		<u>2,479,986</u>		-	
Cadangan kerugian penurunan nilai		(296)		(2,133)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto		<u>3,886,693</u>		<u>7,154,674</u>	Net

b. Berdasarkan sisa umur hingga jatuh tempo

b. *By remaining period until maturity*

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
< 1 bulan	3,886,989	7,060,682	<i>< 1 month</i>
> 1 bulan < 3 bulan	-	40,725	<i>> 1 month < 3 months</i>
>1 bulan ≤ 3 bulan	-	55,400	<i>>1 bulan ≤ 3 bulan</i>
Total	<u>3,886,989</u>	<u>7,156,807</u>	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(296)	(2,133)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	<u>3,886,693</u>	<u>7,154,674</u>	Net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

c. Berdasarkan jenis dan nama bank

c. By type and counterparty bank

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Rupiah			Rupiah
Bank Indonesia			Bank Indonesia
<i>Deposit Facility</i>	-	4,999,341	<i>Deposit Facility</i>
<i>Deposit Facility - Syariah</i>	71,000	390,000	<i>Deposit Facility - Sharia</i>
	<u>71,000</u>	<u>5,389,341</u>	
<i>Call Money</i>			<i>Call Money</i>
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	225,000	-	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT Bank Mayapada International Tbk	300,000	-	PT Bank Mayapada International Tbk
PT BPD Maluku	150,000	25,000	PT BPD Maluku
PT Bank Capital Indonesia Tbk	100,000	320,000	PT Bank Capital Indonesia Tbk
PT BPD Bengkulu	75,000	75,000	PT BPD Bengkulu
PT BPD Sulawesi Tenggara	50,000	225,000	PT BPD Sulawesi Tenggara
PT Bank DBS Indonesia Tbk	50,000	-	PT Bank DBS Indonesia Tbk
PT Bank Sahabat Sampoerna	-	100,000	PT Bank Sahabat Sampoerna
PT BPD Aceh	-	50,000	PT BPD Aceh
PT BPD Lampung	-	50,000	PT BPD Lampung
PT Bank Nationalnoba Tbk	-	50,000	PT Bank Nationalnoba Tbk
PT BPD Nusa Tenggara Timur	-	50,000	PT BPD Nusa Tenggara Timur
PT Bank Ina Perdana Tbk	-	30,000	PT Bank Ina Perdana Tbk
PT BPD Kalimantan Tengah	-	25,000	PT BPD Kalimantan Tengah
	<u>950,000</u>	<u>1,000,000</u>	
Deposito berjangka			Time deposits
PT BPD Riau Kepri (Unit Usaha Syariah)	46,700	-	PT BPD Riau Kepri (Unit Usaha Syariah)
PT Bank Sahabat Sampoerna	31,100	10,000	PT Bank Sahabat Sampoerna
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	28,900	35,050	PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo
PT Bank Nagari	30,200	261,900	PT Nagari
PT BPD Sulawesi Tengah	25,750	24,800	PT BPD Sulawesi Tengah
PT Bank Nationalnoba Tbk	22,850	28,650	PT Bank Nationalnoba Tbk
PT BPD Aceh	19,800	-	PT BPD Aceh
PT BPD Lampung	19,450	23,650	PT BPD Lampung
PT BPD Kalimantan Barat	18,400	194,650	PT BPD Kalimantan Barat
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	15,900	51,050	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
PT BPD Sumatera Selatan & Bangka Belitung	13,900	16,500	PT BPD Sumatera Selatan & Bangka Belitung
PT BPD Jambi	12,800	6,000	PT BPD Jambi
PT BPD Kalimantan Tengah	8,400	25,400	PT BPD Kalimantan Tengah
PT Bank Mega Tbk	7,800	22,650	PT Bank Mega Tbk.
PT Bank DKI	7,500	24,150	PT Bank DKI
PT BPD Sumatera Utara	6,900	-	PT BPD Sumatera Utara
PT BPD Jawa Timur Tbk	6,000	5,000	PT BPD Jawa Timur Tbk
PT Bank Nagari (Unit Usaha Syariah)	6,000	-	PT Bank Nagari (Unit Usaha Syariah)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Unit Usaha Syariah)	5,800	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Unit Usaha Syariah)
PT Bank Victoria International	5,400	15,400	PT Bank Victoria International
PT Bank MNC International Tbk	5,400	-	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5,250	26,000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT BPD Jawa Timur Tbk (Unit Usaha Syariah)	5,000	-	PT BPD Jawa Timur Tbk (Unit Usaha Syariah)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	5,000	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk (Unit Usaha Syariah)	5,000	-	PT Bank Sinarmas Tbk (Unit Usaha Syariah)
PT BPD Kalimantan Barat (Unit Usaha Syariah)	5,000	-	PT BPD Kalimantan Barat (Unit Usaha Syariah)
PT Bank DKI (Unit Usaha Syariah)	5,000	-	PT Bank DKI (Unit Usaha Syariah)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4,675	89,050	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	4,500	-	PT Bank Maspion Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan National Tbk (Unit Usaha Syariah)	1,500	-	PT Bank Tabungan Pensiunan National Tbk (Unit Usaha Syariah)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
PT Bank Raya Indonesia Tbk	-	27,000	<i>PT Bank Raya Indonesia Tbk</i>
PT Bank Capital Indonesia Tbk	-	25,800	<i>PT Bank Capital Indonesia Tbk</i>
PT BPD Sulawesi Tenggara	-	25,000	<i>PT BPD Sulawesi Tenggara</i>
PT BPD Bali	-	12,650	<i>PT BPD Bali</i>
PT Bank KB Bukopin Tbk	-	12,650	<i>PT Bank KB Bukopin Tbk</i>
PT BPD Riau Kepri	-	5,400	<i>PT BPD Riau Kepri</i>
PT BPD Maluku	-	5,400	<i>PT BPD Maluku</i>
PT BPD Jawa Tengah	-	5,000	<i>PT BPD Jawa Tengah</i>
PT BPR Kertaraharja Soreang	-	4,000	<i>PT BPR Kertaraharja Soreang</i>
PT BPR Lexi Pratama Mandiri	-	500	<i>PT BPR Lexi Pratama Mandiri</i>
	<u>385,875</u>	<u>762,450</u>	
Tabungan			<i>Savings</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6	3,205	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	108	1,732	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT BPR Srie Artha Lestari	12	65	<i>PD BPR Srie Artha Lestari</i>
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	-	12	<i>PT Bank Muamalat Indonesia Tbk</i>
PT BPR Karyajatnika Sadaya	1	2	<i>PT BPR Karyajatnika Sadaya</i>
PT BPR Supra Artapersada	1	-	<i>PT BPR Supra Artapersada</i>
	<u>128</u>	<u>5,016</u>	
	<u>1,407,003</u>	<u>7,156,807</u>	
Dollar Amerika Serikat			<i>United States Dollar</i>
Bank Indonesia			<i>Bank Indonesia</i>
<i>Deposit Facility</i>	2,403,001	-	<i>Deposit Facility</i>
<i>Call Money</i>			<i>Call Money</i>
PT BPD Jawa Tengah	76,985	-	<i>PT BPD Jawa Tengah</i>
	<u>3,886,989</u>	<u>7,156,807</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai			<i>Allowance</i>
	(296)	(2,133)	<i>for impairment losses</i>
Neto	<u><u>3,886,693</u></u>	<u><u>7,154,674</u></u>	<i>Net</i>

Dalam penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain termasuk penempatan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah dengan nilai tercatat sebesar Rp71.000 dan Rp540.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

As of December 31, 2023 and 2022, placements with Bank Indonesia and other banks include placements based on sharia banking principles with carrying amounts of Rp71,000 and Rp540,000, respectively.

d. Tingkat bagi hasil syariah rata-rata per tahun

d. Average sharia profit sharing rate per annum

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Rupiah	4.30%	4.04%	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	1.34%	1.50%	<i>United States Dollar</i>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

- e. Perubahan nilai tercatat bruto
Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

- e. *Movement in the gross carrying amount*
The movements in the gross carrying amount are as follows:

	31 Desember/December 31, 2023					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Nilai tercatat bruto awal	7,156,807	-	-	-	7,156,807	Initial gross carrying amount
Aset baru	3,440,861	-	-	-	3,440,861	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(5,971,655)	-	-	-	(5,971,655)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	(739,024)	-	-	-	(739,024)	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	--	--	--	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-	-	Foreign exchange and other movement
Nilai tercatat bruto akhir	3,886,989	-	-	-	3,886,989	Ending gross carrying amount

	31 Desember/December 31, 2022					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Nilai tercatat bruto awal	11,428,774	-	-	-	11,428,774	Initial gross carrying amount
Aset baru	7,156,807	-	-	-	7,156,807	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(11,428,774)	-	-	-	(11,428,774)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	-	-	-	-	-	Remeasurement
Penghapusbukuan - Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-	-	Foreign exchange and other movement
Nilai tercatat bruto akhir	7,156,807	-	-	-	7,156,807	Ending gross carrying amount

- f. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

- f. *Movements in the allowance for impairment losses*

	31 Desember/December 31, 2023					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Saldo awal	2,133	-	-	-	2,133	Initial balance
Aset Baru	262	-	-	-	262	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(1,892)	-	-	-	(1,892)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	(207)	-	-	-	(207)	Remeasurement
Penghapusbukuan	-	-	-	-	-	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Saldo akhir	296	-	-	-	296	Ending balance

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/December 31, 2022				Total	
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia		
Saldo awal	2,268	-	-	-	2,268	Initial balance
Aset Baru	2,134	-	-	-	2,134	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(2,269)	-	-	-	(2,269)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	-	-	-	-	-	Remeasurement
Penghapusbukuan	-	-	-	-	-	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-	-	Foreign exchange and other movement
Saldo akhir	2,133	-	-	-	2,133	Ending balance

Saldo cadangan kerugian penurunan nilai merupakan cadangan yang dibentuk terhadap saldo penempatan pada bank lain oleh Bank dan entitas anak.

The balance of allowance for impairment losses is provided for the balance of placement with other banks by Bank and its subsidiaries.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the above allowance for impairment losses is adequate.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 46.

Information with respect the classification of impaired and not impaired of financial assets are disclosed in Note 46.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat dana pada bank bermasalah, bank beku operasi dan likuiditas.

As of December 31, 2023 and 2022, there are no funds in troubled banks, banks with frozen operations and liquidity.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat saldo penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai agunan.

As of December 31, 2023 and 2022 there are no placement with other banks which are used as collateral.

8. Tagihan dan Liabilitas Derivatif

8. Derivatives Receivable and Payable

Dalam melakukan usaha bisnis, Bank melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti swap mata uang asing, transaksi spot, dan transaksi forward.

In the normal course of business, Bank enters transactions involving derivative financial instruments such as currency swaps, spot, and forward.

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

a. By type and currency

Instrumen	31 Desember/December 31, 2023			Instruments
	Jumlah nosional mata uang asing (jumlah penuh)/ Notional amount foreign currency (full amount)	Nilai wajar/Fair values		
		Tagihan derivatif/ Derivatives receivable	Liabilitas derivatif/ Derivatives payable	
Terkait Nilai Tukar				
Spot Mata Uang Asing - Beli				Spot Mata Uang Asing - Beli
USD	13,000,000	246	-	USD
FX Forward Mata Uang Asing - Beli				FX Forward Mata Uang Asing - Beli
EUR	174,922	-	9	EUR
FX SWAP Mata Uang Asing - Beli				FX SWAP Mata Uang Asing - Beli
USD	37,000,000	932	14	USD
JPY	370,000,000	111	-	JPY
Total		1,289	23	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Instrumen	31 Desember/December 31, 2022			Instruments
	Jumlah nosional mata uang asing (jumlah penuh)/ Notional amount foreign currency (full amount)	Nilai wajar/Fair values		
		Tagihan derivatif/ Derivatives receivable	Liabilitas derivatif/ Derivatives payable	
Terkait Nilai Tukar				Exchange Rate Related
FX Forward Mata Uang Asing - Jual				Foreign Currency Fx- Forward - Sell
EUR	112,896	-	157	EUR
FX SWAP Mata Uang Asing - Jual				Foreign Currency Fx- SWAP - Sell
USD	210,000,000	17,388	2,050	USD
		17,388	2,207	

b. Berdasarkan hubungan
Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
tidak ada transaksi derivatif dengan pihak
berelasi.

b. *By relationship*
As of December 31, 2023 and 2022, there is no
derivative transaction with related party.

9. Surat Berharga

9. Marketable Securities

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan hubungan

a. *By type, currency and relationship*

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
	Biaya perolehan yang diamortisasi		
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Obligasi	5,422,215	5,851,325	Bonds
Diskonto yang belum diamortisasi	-	(7,183)	Unamortized discount
	5,422,215	5,844,142	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya			Fair value through other comprehensive income
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Obligasi	15,771,414	12,919,048	Bonds
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Obligasi	2,361,756	2,228,239	Bonds
	18,133,170	15,147,287	
Nilai wajar melalui laba rugi			Fair value through profit or loss
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Reksadana	5,226,836	4,859,178	Mutual funds
Obligasi	2,194,746	1,536,967	Bonds
	7,421,582	6,396,145	
Total	30,976,967	27,387,574	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11,357)	(5,256)	Allowance for impairment losses
Net	30,965,610	27,382,318	Net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Berikut adalah perubahan efek-efek dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:

Movements on marketable securities classified fair value through other comprehensive income:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			Fair value through other comprehensive income
Saldo awal	(420,813)	(8,577)	Beginning balance
Aset keuangan yang baru dibeli	-	(77,145)	New purchased financial asset
Aset keuangan yang jatuh tempo atau dijual	(8,189)	-	Matured or sold financial asset
Kenaikan (penurunan) dari perubahan nilai wajar	165,950	(427,445)	Increase (decrease) from change in fair value
Dampak pajak tangguhan	(26,643)	92,354	Deferred tax impact
Saldo akhir	(289,695)	(420,813)	Ending balance

b. Berdasarkan penerbit

b. By issuer

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Nilai wajar melalui laba rugi			Fair value through profit or loss
Pemerintah Republik Indonesia	2,044,212	1,536,966	Government of Republic Indonesia
PT Syailendra Capital	2,440,527	2,339,051	PT Syailendra Capital
PT BNI Asset Management	1,318,838	1,264,315	PT BNI Asset Management
PT Trimegah Asset Management	795,662	706,436	PT Trimegah Asset Management
PT PNM Investment Management	226,538	246,856	PT PNM Investment Management
PT BRI Manajemen Investasi	252,628	201,734	PT BRI Manajemen Investasi
PT Manulife Asset Management Indonesia	151,706	100,787	PT Manulife Asset Management Indonesia
PT Bahana TCW Investment Management	40,949	-	PT Bahana TCW Investment Management
PT Permodalan Nasional Madani	25,424	-	PT Permodalan Nasional Madani
PT PLN (Persero)	41,714	-	PT PLN (Persero)
PT Federal International Finance	15,765	-	PT Federal International Finance
PT Indosat Tbk	13,007	-	PT Indosat Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	8,111	-	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Pegadaian (Persero)	6,856	-	PT Pegadaian (Persero)
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	4,950	-	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Pupuk Indonesia (Persero)	4,904	-	PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	3,105	-	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	9,825	-	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	16,861	-	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
	7,421,582	6,396,145	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			Fair value through other comprehensive income
Pemerintah Republik Indonesia	16,828,151	13,823,492	Government of Republic Indonesia
Bank Indonesia	192,864	-	Bank Indonesia
PT Perusahaan Pengelola Aset	137,990	161,605	PT Perusahaan Pengelola Aset
PT Pegadaian (Persero)	126,332	126,425	PT Pegadaian (Persero)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	104,871	84,389	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	90,108	56,593	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Federal International Finance	76,134	60,251	PT Federal International Finance
PT BPD Kalimantan Selatan	71,130	72,027	PT BPD Kalimantan Selatan
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	59,143	58,949	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	56,700	155	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tbk	53,636	53,671	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tbk
PT Astra Sedaya Finance	49,439	50,388	PT Astra Sedaya Finance
PT Mandiri Tunas Finance	48,509	-	PT Mandiri Tunas Finance
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	39,948	38,937	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT BPD Sulselbar	38,460	39,496	PT BPD Sulselbar
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	34,052	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT XL Axiata Tbk	29,925	35,157	PT XL Axiata Tbk
PT Trimegah Asset Management	22,552	23,433	PT Trimegah Asset Management
PT Permodalan Nasional Madani	19,844	19,898	PT Permodalan Nasional Madani
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	19,765	19,567	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	19,754	-	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Medco Energi Internasional	9,860	20,004	PT Medco Energi Internasional
PT Indosat Tbk	2,006	48,198	PT Indosat Tbk
PT Bank Mandiri Taspen	1,997	2,263	PT Bank Mandiri Taspen

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk	-	101,963	PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	-	89,942	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	-	51,082	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Perkebunan Nusantara (Persero)	-	50,825	PT Perkebunan Nusantara (Persero)
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	-	33,379	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	-	25,182	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	16	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	<u>18,133,170</u>	<u>15,147,287</u>	
Biaya perolehan yang diamortisasi			Amortized Cost
Pemerintah Republik Indonesia	2,791,318	3,668,177	Government of Republic Indonesia
Bank Indonesia	1,484,375	1,841,101	Bank Indonesia
PT Bank Aceh Syariah	200,000	-	PT Bank Aceh Syariah
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	200,000	-	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (UUS)	200,000	-	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (UUS)
PT Bank Kalbar Unit Usaha Syariah	100,000	-	PT Bank Kalbar Unit Usaha Syariah
PT Bank Mega Syariah	100,000	-	PT Bank Mega Syariah
PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	100,000	-	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
PT Bank Victoria Syariah	90,000	100,000	PT Bank Victoria Syariah
PT Bahana TCW Investment Management	50,655	-	PT Bahana TCW Investment Management
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	45,000	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Avrist Asset Management	30,000	-	PT Avrist Asset Management
PT Mandiri Manajemen Investasi	20,000	-	PT Mandiri Manajemen Investasi
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3,985	124,911	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	3,140	-	PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	1,980	-	PT Kalbe Farma Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	1,356	-	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	375	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	13	-	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Indika Energy Tbk	12	-	PT Indika Energy Tbk
PT Aneka Gas Industri Tbk	6	-	PT Aneka Gas Industri Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	-	70,000	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	30,000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT PLN (Persero)	-	9,953	PT PLN (Persero)
	<u>5,422,215</u>	<u>5,844,142</u>	
Total	30,976,967	27,387,574	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11,357)	(5,256)	Allowance for impairment losses
Net	30,965,610	27,382,318	Net

Peringkat obligasi berdasarkan hasil pemeringkatan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan Fitch Rating adalah sebagai berikut:

The bond ratings based on the result of rating by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) and Fitch Rating are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	AAA	AAA	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	AAA	AAA	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	AAA	AAA	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT PLN (Persero)	AAA	AAA	PT PLN (Persero)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	AAA	AAA	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Pegadaian (Persero)	AAA	AAA	PT Pegadaian (Persero)
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	AAA	AAA	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
PT Astra Sedaya Finance	AAA	AAA	PT Astra Sedaya Finance
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	AAA	AAA	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT XL Axiata Tbk	AAA-	AAA	PT XL Axiata Tbk
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	AAA	AAA	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
PT Federal International Finance	AAA	AAA	PT Federal International Finance
PT Indosat Tbk	AAA	AAA	PT Indosat Tbk
PT Bank Mandiri Taspen	AAA	AA+	PT Bank Mandiri Taspen
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	AA+	AA+	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk	AA-	AA-	PT Medco Energi Internasional Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	AA+	AA	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
PT Permodalan Nasional Madani	AA+	AA	PT Permodalan Nasional Madani
PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk	AA	AA	PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk
PT Perusahaan Pengelola Aset	AA	AA	PT Perusahaan Pengelola Aset
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	A+	A+	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
PT Adhi Karya Persero Tbk	A-	A-	PT Adhi Karya Persero Tbk
PT Bank Victoria Syariah	A-	A-	PT Bank Victoria Syariah
PT Trimegah Sekuritas Indonesia	A	A	PT Trimegah Sekuritas Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	A	A	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	AAA	-	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Mandiri Tunas Finance	AAA	-	PT Mandiri Tunas Finance
PT. Bank Central Asia Tbk	AAA	-	PT. Bank Central Asia Tbk
PT. Dayamitra Telekomunikasi Tbk	AAA	-	PT. Dayamitra Telekomunikasi Tbk
PT. Perusahaan Gas Negara Tbk	AAA	-	PT. Perusahaan Gas Negara Tbk
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	AA+	-	PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	AAA	-	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	A+	-	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	AAA	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Aceh Syariah	A	-	PT Bank Aceh Syariah

c. Berdasarkan jatuh tempo

c. By maturity

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Kurang dari 1 tahun	1,959,366	6,055,841	Less than 1 year
1 - 5 tahun	8,623,162	10,333,856	1 - 5 years
Lebih dari 5 - 10 tahun	10,003,201	6,409,790	More than 5 - 10 years
Lebih dari 10 - 15 tahun	6,101,009	3,889,130	More than 10 - 15 years
Lebih dari 15 tahun	4,290,229	698,957	More than 15 years
Total	30,976,967	27,387,574	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11,357)	(5,256)	Allowance for impairment losses
Neto	30,965,610	27,382,318	Net

d. Jatuh tempo dan suku bunga

d. Maturity and interest rate

Penerbit Rupiah	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer Rupiah
Rupiah				
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)				
OBL SMF VI II 2021(A)	Obligasi/ Bonds	17 November/ November 17, 2026	6.00% tetap/ fixed	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) OBL SMF VI II 2021 (A)
OBLIGASI SMF IA 2021(A)	Obligasi/ Bonds	8 Juli/ July 8, 2024	5.60% tetap/ fixed	OBLIGASI SMF IA 2021(A)
OBLIGASI SMF IV TH 2023	Obligasi/ Bonds	22 Februari/ February 22, 2028	6.85% tetap/ fixed	OBLIGASI SMF IV TH 2023
Permodalan Nasional Madani				
OBL BKLJT IV PNM TAHAP I 2021 SERI B	Obligasi/ Bonds	10 Desember/ December 10, 2024	5.50% tetap/ fixed	OBL BKLJT IV PNM TAHAP I 2021 SERI B
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
OBLIGASI GREEN BOND I MANDIRI THP I 2023 SERI A	Obligasi/ Bonds	4 Juli/ July 4, 2026	5.80% tetap/ fixed	OBLIGASI GREEN BOND I MANDIRI THP I 2023 SERI A
OBLIGASI GREEN BOND I MANDIRI THP I 2023 SERI B	Obligasi/ Bonds	4 Juli/ July 4, 2028	6.10% tetap/ fixed	OBLIGASI GREEN BOND I MANDIRI THP I 2023 SERI B
PT Bank Mandiri Taspen				
OBL MANTAP IIA 2021	Obligasi/ Bonds	28 April/ April 28, 2024	6.50% tetap/ fixed	OBL MANTAP IIA 2021
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk				
OBL GB I BRI TH I 2022 SERI B	Obligasi/ Bonds	20 Juli/ July 20, 2025	5.75% tetap/ fixed	OBL GB I BRI TH I 2022 SERI B
OBL GREEN BOND BKLJT I BRI THP II TH 2023 SERI B	Obligasi/ Bonds	17 Oktober/ 17-Oct-25	6.35% tetap/ fixed	OBL GREEN BOND BKLJT I BRI THP II TH 2023 SERI B
PT BPD Sulseibar				
OBL SULSEL IA 2021	Obligasi/ Bonds	29 Desember/ December 29, 2024	6.45% tetap/ fixed	OBL SULSEL IA 2021
OBL SULSEL IB 2021	Obligasi/ Bonds	29 Desember/ December 29, 2026	6.95% tetap/ fixed	OBL SULSEL IB 2021

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Penerbit Rupiah	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer Rupiah
PT Perusahaan Pengelola Aset				PT Perusahaan Pengelola Aset
OBL II PPA 2022 SERI B	Obligasi/ Bonds	8 Juli/ July 8, 2027	7.80% tetap/ fixed	OBL II PPA 2022 SERI B
PT Trimegah Sekuritas Indonesia				PT Trimegah Sekuritas Indonesia
MTN II TRIMEGAH I 2021(A)	Obligasi/ Bonds	9 Maret/ March 9, 2024	10.50% tetap/ fixed	MTN II TRIMEGAH I 2021(A)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk				PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
OBL BTN IIA 2022	Obligasi/ Bonds	24 Mei/ May 24, 2025	5.50% tetap/ fixed	OBL BTN IIA 2022
OBL BTN IIB 2022	Obligasi/ Bonds	24 Mei/ May 24, 2027	6.00% tetap/ fixed	OBL BTN IIB 2022
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan				PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
MTN BANK KALSEL TH 2022	Obligasi/ Bonds	4 Oktober/ October 4, 2025	8.00% tetap/ fixed	MTN BANK KALSEL TH 2022
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk				PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
ADIRA III C TH 2022	Obligasi/ Bonds	22 Maret/ March 22, 2027	6.25% tetap/ fixed	ADIRA III C TH 2022
SUKUK ADIRA III C TH 2022	Obligasi/ Bonds	22 Maret/ March 22, 2027	6.25% tetap/ fixed	SUKUK ADIRA III C TH 2022
PT Astra Sedaya Finance				PT Astra Sedaya Finance
ASF TAHAP IV B TH 2022	Obligasi/ Bonds	22 Maret/ March 22, 2025	5.70% tetap/ fixed	ASF TAHAP IV B TH 2022
PT Pegadaian				PT Pegadaian
SUKUK PEGADAIAN IB 2022	Obligasi/ Bonds	26 April/ April 26, 2025	5.35% tetap/ fixed	SUKUK PEGADAIAN IB 2022
OBL PEGADAIAN IB 2022	Obligasi/ Bonds	26 April/ April 26, 2025	5.35% tetap/ fixed	OBL PEGADAIAN IB 2022
SUKUK PEGADAIAN IIB 2022	Obligasi/ Bonds	16 Agustus/ August 16, 2025	5.75% tetap/ fixed	SUKUK PEGADAIAN IIB 2022
PT Waskita Karya (Persero) Tbk				PT Waskita Karya (Persero) Tbk
OBL IV WASKITA A TH 2022	Obligasi/ Bonds	12 Mei/ May 12, 2027	6.65% tetap/ fixed	OBL IV WASKITA A TH 2022
PT Adhi Karya Persero, Tbk				PT Adhi Karya Persero, Tbk
OBL III ADHI KARYA IIIA 2022	Obligasi/ Bonds	24 Mei/ May 24, 2025	8.25% tetap/ fixed	OBL III ADHI KARYA IIIA 2022
PT. Medco Energi Internasional Tbk				PT. Medco Energi Internasional Tbk
OBL MEDCO III 2022 SERI A	Obligasi/ Bonds	26 Juli/ July 26, 2025	7.00% tetap/ fixed	OBL MEDCO III 2022 SERI A
PT XL Axiata Tbk				PT XL Axiata Tbk
SUKUK III XL AXIATA SERI A	Obligasi/ Bonds	1 September/ September 1, 2025	6.75% tetap/ fixed	SUKUK III XL AXIATA SERI A
PT. Indosat Tbk				PT. Indosat Tbk
OBL BKLJT IV INDOSAT THP I TH 2022 SERI B	Obligasi/ Bonds	26 Oktober/ October 26, 2027	7.70% tetap/ fixed	OBL BKLJT IV INDOSAT THP I TH 2022 SERI B
PT Federal International Finance				PT Federal International Finance
OBL BKLJT V FIF THP IV TH 2022 SERI B	Obligasi/ Bonds	28 Oktober/ October 28, 2025	6.80% tetap/ fixed	OBL BKLJT V FIF THP IV TH 2022 SERI B
OBL BKLJT V FIF THP VB THN 2023	Obligasi/ Bonds	24 Februari/ February 24, 2026	6.80% tetap/ fixed	OBL BKLJT V FIF THP IV TH 2022 SERI B
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)				PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
MTN I BPUI TH 2022	Obligasi/ Bonds	2 November/ November 2, 2027	9.00% tetap/ fixed	MTN I BPUI TH 2022
PT Sarana Multi Infrastruktur				PT Sarana Multi Infrastruktur
SUKUK BKLJT II SMI THP IB TH 2022	Obligasi/ Bonds	5 Agustus/ August 5, 2025	5.75% tetap/ fixed	SUKUK BKLJT II SMI THP IB TH 2022
PT Mandiri Tunas Finance				PT Mandiri Tunas Finance
OBL VI MTF II A 2023	Obligasi/ Bonds	27 September/ September 27, 2026	6.50% tetap/ fixed	OBL VI MTF II A 2023
Pemerintah				Government
INDOIS 26	Obligasi/ Bonds	09 Juni/ June 9, 2026	1.50% tetap/ fixed	INDOIS 26
INDOIS 25	Obligasi/ Bonds	28 Mei/ May 28, 2025	4.33% tetap/ fixed	INDOIS 25
INDOIS 25	Obligasi/ Bonds	23 Juni/ June 23, 205	2.30% tetap/ fixed	INDOIS 25
INDOIS 27	Obligasi/ Bonds	6 Juni/ June 6, 2027	4.40% tetap/ fixed	INDOIS 27
INDOIS 30	Obligasi/ Bonds	23 Juni/ June 23, 2030	2.80% tetap/ fixed	INDOIS 30
INDOIS 33	Obligasi/ Bonds	15 November/ November 15, 2033	5.60% tetap/ fixed	INDOIS 33

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Penerbit Rupiah	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer Rupiah
PBS017	Obligasi/ Bonds	15 Oktober/ October 15, 2025	6.13% tetap/ fixed	PBS017
PBS021	Obligasi/ Bonds	15 November/ November 15, 2026	8.50% tetap/ fixed	PBS021
PBS031	Obligasi/ Bonds	15 Juli/ July 15, 2024	4.00% tetap/ fixed	PBS031
PBS032	Obligasi/ Bonds	15 Juli/ July 15, 2026	4.88% tetap/ fixed	PBS032
PBS036	Obligasi/ Bonds	15 Agustus/ August 15, 2025	5.38% tetap/ fixed	PBS036
SUN FR 47	Obligasi/ Bonds	15 Februari/ February 15, 2028	10.00% tetap/ fixed	SUN FR 47
SUN FR 56	Obligasi/ Bonds	15 September/ September 15, 2026	8.38% tetap/ fixed	SUN FR 56
SUN FR 58	Obligasi/ Bonds	15 Juni/ June 15, 2032	8.25% tetap/ fixed	SUN FR 58
SUN FR 59	Obligasi/ Bonds	15 Mei/ May 15, 2027	6.38% tetap/ fixed	SUN FR 59
SUN FR 64	Obligasi/ Bonds	15 Mei/ May 15, 2028	6.13% tetap/ fixed	SUN FR 64
SUN FR 65	Obligasi/ Bonds	15 Mei/ May 15, 2033	6.63% tetap/ fixed	SUN FR 65
SUN FR 68	Obligasi/ Bonds	15 Maret/ March 15, 2034	8.38% tetap/ fixed	SUN FR 68
SUN FR 70	Obligasi/ Bonds	15 Maret/ March 15, 2024	8.38% tetap/ fixed	SUN FR 70
SUN FR 72	Obligasi/ Bonds	15 Mei/ May 15, 2036	8.25% tetap/ fixed	SUN FR 72
SUN FR 73	Obligasi/ Bonds	15 Mei/ May 15, 2031	8.75% tetap/ fixed	SUN FR 73
SUN FR 77	Obligasi/ Bonds	15 Mei/ May 15, 2024	8.13% tetap/ fixed	SUN FR 77
SUN FR 78	Obligasi/ Bonds	15 Mei/ May 15, 2029	8.25% tetap/ fixed	SUN FR 78
SUN FR 81	Obligasi/ Bonds	15 Juni/ June 15, 2025	6.50% tetap/ fixed	SUN FR 81
SUN FR 82	Obligasi/ Bonds	15 September/ September 15, 2030	7.00% tetap/ fixed	SUN FR 82
SUN FR 86	Obligasi/ Bonds	15 April/ April 15, 2026	5.50% tetap/ fixed	SUN FR 86
SUN FR 87	Obligasi/ Bonds	15 Februari/ February 15, 2031	6.50% tetap/ fixed	SUN FR 87
SUN FR 90	Obligasi/ Bonds	15 April/ April 15, 2027	5.13% tetap/ fixed	SUN FR 90
SUN FR 91	Obligasi/ Bonds	15 April/ April 15, 2032	6.38% tetap/ fixed	SUN FR 91
SUN FR 95	Obligasi/ Bonds	15 Agustus/ Agustus 15, 2028	6.38% tetap/ fixed	SUN FR 95
SUN FR 96	Obligasi/ Bonds	15 Februari/ February 15, 2033	7.00% tetap/ fixed	SUN FR 96
SUN FR 98	Obligasi/ Bonds	15 Juni/ June 15, 2038	7.13% tetap/ fixed	SUN FR 98
SUN FR 100	Obligasi/ Bonds	15 Februari/ 15-Feb-34	6.63% tetap/ fixed	SUN FR 100
SUN FR 101	Obligasi/ Bonds	15 April/ 15-Apr-29	6.88% tetap/ fixed	SUN FR 101
INDON 28	Obligasi/ Bonds	11 Januari/ January 11, 2028	3.50% tetap/ fixed	INDON 28
INDON 31	Obligasi/ Bonds	12 Maret/ March 12, 2031	1.85% tetap/ fixed	INDON 31
INDON 31	Obligasi/ Bonds	28 Juli/ July 28, 2031	2.15% tetap/ fixed	INDON 31
INDON 32	Obligasi/ Bonds	31 Maret/ March 31, 2032	3.55% tetap/ fixed	INDON 32
INDON 32	Obligasi/ Bonds	20 September/ September 20, 2032	4.65% tetap/ fixed	INDON 32
SR014	Obligasi/ Bonds	10 Maret/ March 10, 2024	5.47% tetap/ fixed	SR014
SR015	Obligasi/ Bonds	10 September/ September 10, 2024	5.10% tetap/ fixed	SR015

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Penerbit Rupiah	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer Rupiah
SR016	Obligasi/ Bonds	10 Maret/ March 10, 2025	4.95% tetap/ fixed	SR016
SR017	Obligasi/ Bonds	10 September/ September 10, 2025	5.90% tetap/ fixed	SR017
ORI019	Obligasi/ Bonds	15 Februari/ February 15, 2024	5.57% tetap/ fixed	ORI019
ORI020	Obligasi/ Bonds	15 Oktober/ October 15, 2024	4.95% tetap/ fixed	ORI020
ORI021	Obligasi/ Bonds	15 Februari/ February 15, 2025	4.90% tetap/ fixed	ORI021
ORI022	Obligasi/ Bonds	15 Oktober/ October 15, 2025	5.95% tetap/ fixed	ORI022
SR018T3	Obligasi/ Bonds	10 Maret/ March 10, 2026	6.25% tetap/ fixed	SR018T3
SRBI 050624	Obligasi/ Bonds	5 Juni/ June 5, 2024	6.73% tetap/ fixed	SRBI 050624
SRBI 070624	Obligasi/ Bonds	7 Juni/ June 7, 2024	6.75% tetap/ fixed	SRBI 070624
SRBI 190624	Obligasi/ Bonds	19 Juni/ June 19, 2024	6.75% tetap/ fixed	SRBI 190624
SRBI 180924	Obligasi/ Bonds	18 September/ September 18, 2024	6.85% tetap/ fixed	SRBI 180924
SVBI 220124	Obligasi/ Bonds	22 Januari/ January 22, 2024	5.70% tetap/ fixed	SVBI 220124
SVBI 210324	Obligasi/ Bonds	21 Maret/ March 21, 2024	5.76% tetap/ fixed	SVBI 210324
SVBI 310124	Obligasi/ Bonds	31 Januari/ January 31, 2024	5.70% tetap/ fixed	SVBI 310124

e. Berdasarkan pemerintah dan bukan pemerintah

e. By government and non-government

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pemerintah			Government
Obligasi Negara	17,579,705	15,242,331	Government Bonds
Sukuk	201,552	2,000,227	Sukuk
Project Based Sukuk (PBS)	3,860,558	450,736	Project Based Sukuk (PBS)
Obligasi Retail Indonesia	21,881	172,098	Indonesia Retail Bonds
Subtotal	21,663,696	17,865,392	Subtotal
Korporasi			Corporate
Reksadana	5,327,888	6,022,423	Mutual funds
Sukuk	2,656,969	1,905,824	Sukuk
Obligasi	988,232	1,292,016	Bonds
Medium Term Notes	147,318	301,919	Medium Term Notes
SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia)	116,416	-	SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia)
SVBI (Sekuritas Valas Bank Indonesia)	76,448	-	SVBI (Sekuritas Valas Bank Indonesia)
Subtotal	9,313,271	9,522,182	Subtotal
Total	30,976,967	27,387,574	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11,357)	(5,256)	Allowance for impairment losses
Net	30,965,610	27,382,318	Net

f. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

f. Average interest rates per annum

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Obligasi			Bonds
Rupiah	6.10%	6.00%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	2.40%	2.20%	United States Dollar

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

- g. Perubahan nilai tercatat bruto
Perubahan nilai tercatat bruto adalah
sebagai berikut:

- g. *Movement in the gross carrying amount*
The movement in the gross carrying amount
are as follow:

	31 Desember/December 31, 2023					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Nilai tercatat bruto awal	27,387,574	-	-	-	27,387,574	Initial gross carrying amount
Aset baru	6,173,059	-	-	-	6,173,059	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(1,211,132)	-	-	-	(1,211,132)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali Valuta asing dan perubahan lain	(1,347,552)	-	-	-	(1,347,552)	Remeasurement Foreign exchange and other movement
Nilai tercatat bruto akhir	30,976,967	-	-	-	30,976,967	Ending gross carrying amount

	31 Desember/December 31, 2022					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Nilai tercatat bruto awal	16,978,900	-	-	-	16,978,900	Initial gross carrying amount
Aset baru	15,571,230	-	-	-	15,571,230	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(5,305,493)	-	-	-	(5,305,493)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali Valuta asing dan perubahan lain	114,619	-	-	-	114,619	Remeasurement Foreign exchange and other movement
Nilai tercatat bruto akhir	27,387,574	-	-	-	27,387,574	Ending gross carrying amount

- h. Perubahan cadangan kerugian penurunan
nilai

- h. *Movements in the allowance for impairment*
losses

	31 Desember/December 31, 2023					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Saldo awal	5,256	-	-	-	5,256	Beginning balance
Aset Baru	22,806	-	-	-	22,806	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(16,705)	-	-	-	(16,705)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	-	-	-	-	-	Remeasurement
Penghapusbukuan	-	-	-	-	-	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-	-	Foreign exchange and other movement
Saldo akhir	11,357	-	-	-	11,357	Ending balance

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/December 31, 2022				Total	
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia		
Saldo awal	5,917	-	-	-	5,917	Initial balance
Aset Baru	4,822	-	-	-	4,822	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(1,363)	-	-	-	(1,363)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	(4,120)	-	-	-	(4,120)	Remeasurement
Penghapusbukuan	-	-	-	-	-	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-	-	Foreign exchange and other movement
Saldo akhir	5,256	-	-	-	5,256	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the above allowance for impairment losses is adequate.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 46.

Information with respect to classification of impaired and not impaired of financial assets are disclosed in Note 46.

- i. Berdasarkan kolektibilitas
Kolektibilitas surat berharga pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah lancar.

- i. By collectibility
The collectibility of securities as of December 31, 2023 and 2022 is current.

Bank dan entitas anak mengakui kerugian atas penjualan surat berharga sebesar Rp23.164 dan Rp92.808 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam akun "Kerugian dari penjualan surat berharga yang diperdagangkan - neto" di beban operasional lainnya (Catatan 37).

The Bank and its subsidiaries recognized loss on sale of marketable securities Rp23,164 and Rp92,808 for the year ended December 31, 2023 and 2022 which is presented in the other operating expense as "Loss on sale marketable securities measured at fair value through profit or loss - net" (Note 37).

Nilai pasar surat berharga yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi (FVPL) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing berkisar antara 97,97% sampai dengan 105,42% dan 93,04% sampai dengan 100,82%.

As of December 31, 2023 and 2022, the market values of securities classified as fair value through profit or loss (FVPL) ranging from 97.97% to 105.42% dan 93.04% to 100.82%, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada surat berharga yang digunakan sebagai agunan.

As of December 31, 2023 and 2022 no marketable securities that are used as collateral.

10. Tagihan atas Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

10. Receivable from Marketable Securities Purchased Under Agreements to Resell

Pada posisi 31 Desember 2023 Bank tidak memiliki portfolio efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

As of December 31, 2023, the Bank does not have a portfolio of securities purchased with resell agreement.

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Marketable securities purchased under agreements to resell as of December 31, 2022 are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

31 Desember/December 31, 2022

Counterpart	Jenis Surat Berharga/ Type of Securities	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Tanggal Dimulai/ Commencement Date	Tanggal Pembelian Kembali/ Repurchase Date	Harga Pembelian Kembali/ Repurchase Price	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Interest Expense	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Bank Indonesia	VR0062	6,900	29 Des/ Dec 29, 2022	5 Jan/ Jan 5, 2023	6,571	4	6,567
	VR0035	743,100	29 Des/ Dec 29, 2022	5 Jan/ Jan 5, 2023	711,421	434	710,987
	VR0035	750,000	29 Des/ Dec 29, 2022	5 Jan/ Jan 5, 2023	718,028	438	717,590
	VR0035	750,000	30 Des/ Dec 30, 2022	6 Jan/ Jan 6, 2022	718,171	548	717,623
	VR0035	250,000	30 Des/ Dec 30, 2022	6 Jan/ Jan 6, 2022	239,391	183	239,208
	VR0045	750,000	29 Des/ Dec 29, 2022	12 Jan/ Jan 12, 2023	694,753	1,222	693,531
	VR0045	250,000	29 Des/ Dec 29, 2022	12 Jan/ Jan 12, 2023	231,584	407	231,177
	VR0036	750,000	30 Des/ Dec 30, 2022	13 Jan/ Jan 13, 2023	719,014	1,380	717,634
	VR0036	750,000	30 Des/ Dec 30, 2022	13 Jan/ Jan 13, 2023	719,014	1,380	717,634
	VR0036	500,000	30 Des/ Dec 30, 2022	13 Jan/ Jan 13, 2023	479,343	920	478,423
	VR0067	250,000	30 Des/ Dec 30, 2022	29 Des/ Dec 29, 2023	254,606	16,065	238,541
Total		5,750,000			5,491,896	22,981	5,468,915

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali diklasifikasikan lancar pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Marketable securities purchased under agreements to resell as of December 31, 2023 and 2022, are classified as current.

11. Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya

11. Bills and Other Receivables

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan hubungan

a. By type, currency, and relationship

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Open Account Financing	122,060	199,873	Open Account Financing
Wesel Ekspor	140,529	172,935	Bills
Trade Financing	-	25,886	Trade Financing
Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri	2,737	8,709	Domestic Document Letter of Credit
Forfaiting	-	5,982	Forfaiting
Supply Chain Financing	378,006	-	Supply Chain Financing
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Surat Keterangan Berdokumen dalam Negeri	38,293	5,075	Domestic Document Letter of Credit
Forfaiting	8,349	6,609	Forfaiting
Trade Financing	-	418,757	Trade Financing
Total	689,974	843,826	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(351)	-	Allowance for impairment losses
Net	689,623	843,826	Net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

- b. Berdasarkan kolektibilitas
Seluruh wesel ekspor dan tagihan lainnya diklasifikasikan lancar pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Bank melakukan penilaian wesel ekspor dan tagihan lainnya secara kolektif dengan menggunakan bukti objektif atas penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.

- c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

- b. *By collectibility*
All bills and other receivables as of December 31, 2023 and 2022, are classified as current.

Bank assessed bills and other receivables with respect collectively for impairment using objective evidence of impairment.

Management believes that the above allowance for impairment losses is adequate.

- c. *Average interest rates per annum*

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Rupiah	4.00%	5.50%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	1.50%	1.50%	United States Dollars

Informasi mengenai jatuh tempo wesel ekspor dan tagihan lainnya diungkapkan pada Catatan 48.

Information with respect to maturities of bills and other receivables is disclosed in Note 48.

12. Kredit yang Diberikan

12. Loans

- a. Berdasarkan hubungan, jenis, dan mata uang

- a. *By relationship, type, and currency*

	31 Desember/ December 31, 2023		31 Desember/ December 31, 2022		
	<i>Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)</i>	<i>Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah</i>	<i>Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)</i>	<i>Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah</i>	
Pihak berelasi (Catatan 43)					Related parties (Note 43)
Rupiah					Rupiah
Modal kerja		528,103		345,644	Working capital
Karyawan		115,539		101,293	Employees
Investasi		61,479		15,261	Investment
Konsumsi		4,822		3,444	Consumer
Program pemerintah		305		508	Government programs
		<u>710,248</u>		<u>466,150</u>	
Pihak ketiga					Third parties
Rupiah					Rupiah
Konsumsi		77,662,217		72,456,149	Consumer
Modal kerja		27,046,559		24,437,785	Working capital
Sindikasi		2,463,320		3,617,948	Syndicated
Investasi		2,023,987		1,543,727	Investment
Program pemerintah		3,153,558		2,634,668	Government programs
Karyawan		2,723,894		2,007,101	Employees
		<u>115,073,535</u>		<u>106,697,378</u>	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2023		31 Desember/ December 31, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
Modal kerja	20,023,409	307,940	70,834,998	1,102,724	Working capital
Sindikasi	13,547,432	208,346	4,717,528	73,440	Syndicated
		516,286		1,176,164	
		<u>115,589,821</u>		<u>107,873,542</u>	
Total		116,300,069		108,339,692	Total
Cadangan kerugian					Allowance
penurunan nilai		(1,913,951)		(1,631,811)	for impairment losses
Neto		<u>114,386,118</u>		<u>106,707,881</u>	Net

b. Berdasarkan kolektibilitas

b. By collectibility

	31 Desember/ December 31, 2023		31 Desember/ December 31, 2022		
	Pokok/ Principal	Cadangan/ Allowance	Pokok/ Principal	Cadangan/ Allowance	
Individual					Individual
Dalam perhatian khusus	1,325,209	99,876	--	--	Special mention
Kurang lancar	259,923	96,243	12,950	3,468	Substandard
Diragukan	42,251	24,799	12,379	10,089	Doubtful
Macet	377,653	262,510	355,431	333,652	Loss
Kolektif					Collective
Lancar	110,736,522	502,850	104,904,715	424,957	Current
Dalam perhatian khusus	2,521,763	447,362	2,083,481	396,916	Special mention
Kurang lancar	55,342	14,860	132,110	26,603	Substandard
Diragukan	134,266	38,848	85,618	29,415	Doubtful
Macet	847,140	426,603	753,008	406,711	Loss
Total	<u>116,300,069</u>	<u>1,913,951</u>	<u>108,339,692</u>	<u>1,631,811</u>	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

c. Berdasarkan sektor ekonomi

c. By economic sector

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Perdagangan	9,531,189	9,141,167	Trading
Konstruksi	6,934,581	7,300,299	Construction
Pengangkutan dan pergudangan	4,710,398	345,372	Transportation and warehousing
Pertanian	1,684,033	1,440,600	Farming
Jasa-jasa dunia usaha	876,390	245,216	Business services
Jasa-jasa sosial	538,524	190,430	Social services
Listrik, gas, dan air	615,373	85,420	Electricity, gas, and water
Industri	486,276	5,828,120	Industry
Pertambangan	104,383	877,866	Mining
Lain-lain	90,818,922	82,885,202	Others
Total	116,300,069	108,339,692	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,913,951)	(1,631,811)	Allowance for impairment losses
Neto	114,386,118	106,707,881	Net

Rincian kredit yang diberikan kepada sektor ekonomi "Lain-lain" adalah sebagai berikut:

The details of loans granted to "Others" are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Guna Bhakti	27,646,404	27,081,257	Guna Bhakti
Pra Purna Bhakti	6,752,973	7,472,033	Pra Purna Bhakti
Purna Bhakti	9,710,314	8,779,618	Purna Bhakti
Lain-lain	46,709,231	39,552,294	Others
Total	90,818,922	82,885,202	Total

- Kredit Guna Bhakti merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Bank untuk debitur berpenghasilan tetap yang gajinya telah disalurkan melalui Bank dan/atau tempat debitur bekerja telah memiliki perjanjian Kerja Sama dengan Bank dimana sumber pengembaliannya berasal dari gaji debitur yang digunakan untuk keperluan konsumtif.
- Kredit Pra Purna Bhakti merupakan pembiayaan multiguna yang diberikan oleh Bank untuk debitur dengan status sebagai pegawai aktif berpenghasilan tetap yang akan memasuki masa pensiun sampai dengan debitur menjalani masa pensiun, yang gajinya pada saat pegawai aktif dibayarkan melalui Bank atau belum melalui Bank. Sumber pengembalian kredit tersebut dapat berasal dari gaji debitur/manfaat Tabungan Hari Tua/manfaat pensiun lainnya pada saat pegawai aktif dan manfaat pensiun yang disalurkan melalui Bank pada saat debitur pensiun.

- Guna Bhakti loan is a loan facility granted to debtors with regular, whose salaries have been channeled through the Bank and/or where the debtor's employees have had a cooperation agreement with the Bank based on which the sources of repayments will be derived from the debtor's salaries used for consumptive purposes.
- Pra Purna Bhakti loan is a multipurpose financing provided by Bank for debtors with the status of a fixed income active employee who will retire until the debtor is retired, whose salary is paid when active employees has been channeled through Bank or not via Bank. The source of the return on credit can be derived from the debtor's salary / Old Age Savings benefits / other retirement benefits when active employees and pension benefits has been channeled through Bank when the debtor is retired.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

- Kredit Purna Bhakti merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Bank untuk debitur dengan status pensiunan sendiri atau pensiunan janda/duda yang gaji pensiunnya telah disalurkan melalui Bank di mana sumber pengembaliannya berasal dari gaji pensiun debitur yang digunakan untuk keperluan konsumtif.
- Pembayaran kredit tersebut di atas sebagian besar dilakukan melalui pemotongan gaji bulanan oleh Bank.

- *The Purna Bhakti loan is financing provided by the Bank to a debtor who has retired or his widow/her widower pension salary has been channeled based on which the sources of repayments will be derived from the debtor's salaries used for consumptive purposes.*
- *Loan repayments are mostly collected through monthly salary deducted by the Bank.*

d. Berdasarkan periode sisa jatuh tempo

d. *By remaining period to maturity*

	31 Desember/ December 31, 2023		31 Desember/ December 31, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currency (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currency (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	
Rupiah					Rupiah
≤ 1 tahun		20,524,143		18,782,580	≤ 1 year
> 1 - 5 tahun		30,146,139		28,846,395	> 1 - 5 years
> 5 - 10 tahun		29,819,420		27,584,297	> 5 - 10 years
> 10 tahun		35,294,081		31,950,256	> 10 years
		<u>115,783,783</u>		<u>107,163,528</u>	
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
≤ 1 tahun	--	--	70,834,998	1,102,724	≤ 1 year
> 1 - 5 tahun	20,023,409	307,940	--	--	> 1 - 5 years
>5 - 10 Tahun	13,547,432	208,346	4,717,528	73,440	>5 - 10 Tahun
		<u>516,286</u>		<u>1,176,164</u>	
Total		116,300,069		108,339,692	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1,913,951)		(1,631,811)	Allowance for impairment losses
Neto		<u><u>114,386,118</u></u>		<u><u>106,707,881</u></u>	Net

e. Berdasarkan jangka waktu perjanjian kredit

e. *By term of credit agreements*

	31 Desember/ December 31, 2023		31 Desember/ December 31, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currency (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currency (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	
Rupiah					Rupiah
≤ 1 tahun		14,792,982		14,122,677	≤ 1 year
> 1 - 5 tahun		27,278,657		25,383,622	> 1 - 5 years
> 5 - 10 tahun		28,548,417		27,111,488	> 5 - 10 years
> 10 tahun		45,163,727		40,545,741	> 10 years
		<u>115,783,783</u>		<u>107,163,528</u>	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2023		31 Desember/ December 31, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount		Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount		
	<i>in foreign currency</i> (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	<i>in foreign currency</i> (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
> 1 - 5 tahun	20,023,409	307,940	70,834,998	1,102,724	> 1 - 5 years
> 5 - 10 tahun	13,547,432	208,346	4,717,528	73,440	> 5 - 10 years
		516,286		1,176,164	
Total		116,300,069		108,339,692	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1,913,951)		(1,631,811)	Allowance for impairment losses
Neto		114,386,118		106,707,881	Net

f. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

f. Average interest rates per annum

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Rupiah	12.11%	12.15%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	6.84%	2.27%	United States Dollar

g. Kredit *non-performing* berdasarkan sektor ekonomi

g. Non-performing loans by economic sector

	31 Desember/ December 31, 2023		31 Desember/ December 31, 2022		
	Kredit non- performing/ Non - performing loans	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Kredit non- performing/ Non - performing loans	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	
Rupiah					Rupiah
Konstruksi	654,872	371,884	397,318	291,119	Construction
Perdagangan	24,621	19,057	282,248	174,120	Trading
Industri	41,965	23,985	28,499	18,226	Industry
Pertanian	33,669	12,581	20,134	13,881	Farming
Jasa dunia usaha	417,500	277,449	20,526	17,547	Business services
Pertambangan	3,413	3,156	2,427	2,416	Mining
Jasa-jasa sosial	657	294	3,383	3,192	Social services
Pengangkutan dan pergudangan	80	73	468	224	Transportation and warehousing
Lain-lain	539,798	155,384	596,493	289,213	Others
Total	1,716,575	863,863	1,351,496	809,938	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Rasio *non-performing loans* - kotor adalah 1,48% dan 1,25% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Non-performing loans - gross ratios are 1.48% and 1.25% as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

Rasio *non-performing loans* - bersih adalah 0,67% dan 0,73% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Non-performing loans - net ratios are 0.67% and 0.73% as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

Rasio *non-performing loans* - kotor (entitas induk) adalah 1,35% dan 1,16% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Non-performing loans - gross ratios (parent only) are 1.35% and 1.16% as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

Rasio *non-performing loans* - bersih (entitas induk) adalah 0,75% dan 0,47% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Non-performing loans - net ratios (parent only) are 0.75% and 0.47% as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

h. Kredit yang direstrukturisasi
Kredit yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp6.383.421 dan Rp5.454.172. Rincian kredit yang direstrukturisasi adalah sebagai berikut:

h. *Restructured loans*
Restructured loans as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp6,383,421 and Rp5,454,172, respectively. Details of the restructured loans are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Perpanjangan jangka waktu dan penyesuaian suku bunga	483,961	459,794	<i>Extension of loan period and interest rate adjustment</i>
Perpanjangan jangka waktu kredit	880,384	913,812	<i>Extension of loan period</i>
Perpanjangan jangka waktu kredit dan skema lain	5,019,076	4,080,566	<i>Extension of loan period and other schemes</i>
Total	6,383,421	5,454,172	Total

Rincian kredit yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas dan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

Restructured loans by collectibility and economic sector are as follows:

	31 Desember/December 31, 2023					Total	
	Lancar/ <i>Current</i>	Dalam perhatian khusus/ <i>Special mention</i>	Kurang lancar/ <i>Substandard</i>	Diragukan/ <i>Doubtful</i>	Macet/ <i>Loss</i>		
Konstruksi	2,851,832	31,906	-	1,227	21,678	2,906,643	<i>Construction</i>
Perdagangan	616,565	36,095	48	2,574	12,745	668,027	<i>Trading</i>
Industri	280,661	15,786	59	2,171	11,952	310,629	<i>Industry</i>
Jasa-jasa dunia usaha	134,030	4,941	-	2,762	-	141,733	<i>Business services</i>
Pengangkutan dan pergudangan	92,192	-	-	259	-	92,451	<i>Transportation and warehousing</i>
Jasa-jasa sosial	43,527	275	4,997	-	836	49,635	<i>Social services</i>
Pertanian	40,077	5,808	-	735	98	46,718	<i>Farming</i>
Pertambangan	8,087	-	-	-	-	8,087	<i>Mining</i>
Listrik, Gas, dan Air	3,254	3,047	-	-	-	6,301	<i>Electricity, Gas and Water</i>
Lain-lain	1,939,165	155,482	43,918	3,948	10,684	2,153,197	<i>Others</i>
Total	6,009,390	253,340	49,022	13,676	57,993	6,383,421	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

31 Desember/December 31, 2022							
Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total		
Konstruksi	1,107,986	40,502	88,973	-	28,437	1,265,898	Construction
Perdagangan	809,451	60,008	1,662	7,987	46,646	925,754	Trading
Industri	212,093	570,599	10	519	12,723	795,944	Industry
Jasa-jasa dunia usaha	99,377	3,106	-	-	61,527	164,010	Business services
Pengangkutan dan pergudangan	116,961	56,263	-	-	143	173,367	Transportation and warehousing
Jasa-jasa sosial	112,664	-	-	390	-	113,054	Social services
Pertanian	117,837	18,712	-	115	1,114	137,778	Farming
Pertambangan	40,616	-	-	2,576	-	43,192	Mining
Listrik, Gas, dan Air	6,538	-	-	-	-	6,538	Electricity, Gas and Water
Lain-lain	1,344,923	266,247	18,916	13,743	184,808	1,828,637	Others
Total	3,968,446	1,015,437	109,561	25,330	335,398	5,454,172	Total

Pembiayaan dan piutang syariah yang direstrukturisasi sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp695.992 dan Rp230.902 terhadap pembiayaan dan piutang Syariah sesuai dengan ketentuan OJK dan internal Bank BJB Syariah (entitas anak).

The restructured sharia financing and receivable up to December 31, 2023 and 2022 is Rp695,992 and Rp230,902 for Sharia financing and receivables in accordance with the provisions of the OJK and internal Bank BJB Syariah (subsidiary).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank dan entitas anak telah melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2021 tentang perubahan atas 48/POJK.03/2020 dan POJK No. 11/POJK.03/2020 "Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019" tertanggal 10 September 2021 dan Surat keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/KDK.03/2022 Tentang Penetapan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum, Sektor Tekstil Dan Produk Tekstil Serta Alas Kaki, Segmen Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Serta Provinsi Bali Sebagai Sektor Dan Daerah Yang Memerlukan Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Bank.

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank and its subsidiaries has restructured credit for debtors affected by the Covid-19 pandemic in accordance with POJK No. 17/POJK.03/2021 regarding the changes of POJK No. 48/POJK.03/2020 and POJK No. 11/POJK.03/2020, "National Economic Stimulus as countercyclical Policy Impact of Coronavirus Disease spread 2019" dated September 10, 2021 and Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number 34/KDK.03/2022 concerning the Determination of the Accommodation and Food and Drink Provision Sector, the Textile and Textile Products and Footwear Sector, the Micro, Small and Medium Enterprises Segment, and Bali Province as Sectors and Regions that Require Special Treatment For Bank Credit or Financing

- i. Perubahan nilai tercatat bruto
Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

- i. Movement in the gross carrying amount
The movement in the gross carrying amount are as follow:

	31 Desember/December 31, 2023				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Total	
Saldo awal	102,221,615	3,561,315	2,556,762	108,339,692	Beginning balance
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	3,947,776	(1,370,368)	(2,577,408)	-	Transferred to 12 month expected credit losses (Stage 1)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	(454,461)	3,354,482	(1,456,781)	1,443,240	Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(987,324)	(1,676,454)	2,663,778	-	Transferred to credit impaired (Stage 3)
Penyisihan (pembalikan) cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	3,552,438	1,272,158	2,276,288	7,100,884	Provision (reversal) of allowance impairment losses during the year
Penghapusbukuan	-	-	(534,057)	(534,057)	Written-off
Lain-lain	(24,178)	(25,512)	-	(49,690)	Others
Saldo akhir	108,255,866	5,115,621	2,928,582	116,300,069	Ending balance

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Nilai lain-lain pada perubahan nilai tercatat bruto merupakan nilai kredit yang diberikan atas pelepasan PT BPR Karya Utama Jabar sebagai entitas anak.

Another value in the change in gross carrying value is the credit value given for the disposal of PT BPR Karya Utama Jabar as a subsidiary.

31 Desember/December 31, 2022					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Total	
Saldo awal	93,118,267	962,585	1,732,194	95,813,046	Beginning balance
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	119,930	(129,362)	(4,334)	(13,766)	Transferred to 12 month expected credit losses (Stage 1)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	(1,476,240)	1,484,055	(7,815)	-	Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(1,584,973)	(186,412)	1,771,385	-	Transferred to credit impaired (Stage 3)
Penyisihan (pembalikan) cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	11,880,489	1,430,449	(547,949)	12,762,989	Provision (reversal) of allowance impairment losses during the year
Penghapusbukuan	-	-	(386,719)	(386,719)	Written-off
Lain-lain	164,142	-	-	164,142	Others
Saldo akhir	102,221,615	3,561,315	2,556,762	108,339,692	Ending balance

j. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

j. Movements in the allowance for impairment losses

31 Desember/December 31, 2023					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Total	
Saldo awal	246,186	499,257	886,368	1,631,811	Beginning balance
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	8,417	(6,619)	(1,798)	-	Transferred to 12 month expected credit losses (Stage 1)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	(7,784)	7,784	-	-	Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(3,133)	(47,002)	50,135	-	Transferred to credit impaired (Stage 3)
Penyisihan (pembalikan) cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	290,330	78,071	459,109	827,510	Provision (reversal) of allowance impairment losses during the year
Penghapusbukuan	-	-	(534,057)	(534,057)	Written-off
Lain-lain	(11,313)	-	-	(11,313)	Others
Saldo akhir	522,703	531,491	859,757	1,913,951	Ending balance

31 Desember/December 31, 2022					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Total	
Saldo awal	383,131	92,580	1,333,661	1,809,372	Beginning balance
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	(70,573)	(12,746)	(4,718)	(88,037)	Transferred to 12 month expected credit losses (Stage 1)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	(27,285)	104,365	(77,080)	-	Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(37,505)	(20,398)	60,854	2,951	Transferred to credit impaired (Stage 3)
Penyisihan (pembalikan) cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	(17,996)	335,456	(39,630)	277,830	Provision (reversal) of allowance impairment losses during the year
Penghapusbukuan	-	-	(386,719)	(386,719)	Written-off
Lain-lain	16,414	-	-	16,414	Others
Saldo akhir	246,186	499,257	886,368	1,631,811	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible loans.

- | | |
|--|--|
| <p>k. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kredit yang diberikan dijamin dengan deposito, agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan. 2) Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kredit perorangan lainnya. 3) Kredit Program Pemerintah terdiri atas Kredit Usaha Tani, Kredit Koperasi Primer dan Anggotanya, dan Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro. 4) Kredit Karyawan atau Kredit Abdi Bhakti (KAB) adalah kredit yang diberikan kepada pegawai untuk tujuan multiguna dengan rata-rata tingkat bunga sebesar 6,5% dan jangka waktu maksimal 20 tahun. Pinjaman dan bunganya dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan. 5) Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank dan entitas anak memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). 6) Rasio kredit UMKM terhadap kredit yang diberikan adalah 10,56% dan 10,95% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. 7) Keikutsertaan Bank dan entitas anak dalam pinjaman sindikasi dengan bank lain adalah sebesar Rp2.463.320 dan Rp3.691.388 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Partisipasi Bank dan entitas anak dalam pinjaman sindikasi tersebut berkisar antara 2,22% – 32,00% dan 2,22% – 32,00% pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (tidak diaudit). 8) Kredit yang telah dihapusbukukan oleh Bank dan entitas anak dicatat sebagai bagian dari rekening administratif. 9) Giro yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar dan Rp1.466.333 dan Rp1.663.090 (Catatan 20d). 10) Deposito yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp677.349 dan Rp528.916 (Catatan 20e). 11) Deposito dari bank lain yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp346.587 dan 504.652 (Catatan 21d). | <p>k. <i>Other significant information relating to loans</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Loans are secured by deposits, collateral bound by hypothecation or a power of attorney to sell and other collateral commonly accepted by banks.</i> 2) <i>Consumer credit consists of housing, vehicles, and other personal loans.</i> 3) <i>Government Program Loans consist of Agricultural Business Loans, Primary and Member Cooperative Loans, and Small and Micro Business Loans.</i> 4) <i>Loans Employee or Loan Abdi Bhakti (KAB) is credit given to employees for multipurpose purposes with an average interest rate of 6.5% and a maximum period of 20 years. The loan and interest are repaid through salary deductions every month.</i> 5) <i>As of December 31, 2023 and 2022, the Bank and its subsidiaries complied with the Legal Lending Limit (LLL) requirements of Bank Indonesia.</i> 6) <i>The ratio of UMKM credit to total loans are 10.56% and 10.95% as of December 31, 2023 and 2022, respectively.</i> 7) <i>The Bank and its subsidiaries' participation in syndicated loans with other banks amounted to Rp2,463,320 and Rp3,691,388 as of December 31, 2023 and 2022, respectively. The Bank and its subsidiaries' participation in syndicated loans ranged between 2.22% – 32.00% and 2.22% - 32.00% as of December 31, 2023 and 2022, respectively (unaudited).</i> 8) <i>The loans written off by the Bank and its subsidiaries are recorded as part of administrative accounts.</i> 9) <i>Current accounts blocked and pledged as loan, sharia financing and receivables collateral as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp1,466,333 and Rp1,663,090, respectively (Note 20d).</i> 10) <i>Time deposits blocked and pledged as loan, sharia financing and receivables collateral as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp677,349 and Rp528,916, respectively (Note 20e).</i> 11) <i>Time deposits from other banks blocked and pledged as loan and and receivable collateral as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp346,587 dan Rp504,652, respectively (Note 21d).</i> |
|--|--|

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

12) Pada 31 Desember 2023, Bank telah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Asuransi Bangun Askrida, PT Jamkrida Jabar, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk., PT Asuransi Jasaraharja Putera, dan PT Jamkrindo Syariah untuk Asuransi Kredit Mikro, Komersial, Lembaga Keuangan Mikro dan Korporasi. Sementara Bank telah melakukan kerja sama dengan PT Asuransi Kredit Indonesia untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kerja Sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk Penjaminan Kredit dan PT Jaminan Kredit Indonesia untuk Kredit Skema Subsidi Resi Gudang. Untuk penutupan Asuransi Kerugian Agunan, Bank bekerja sama dengan PT Asuransi Bangun Askrida, PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Dayin Mitra Tbk, dan PT Asuransi Central Asia. Bank juga bekerja sama dengan Perusahaan Pialang Asuransi PT Brocade Insurance Broker, PT Nusantara Insurance Broker & Consultant, PT Estika Jasatama, PT Fresnel Perdana Mandiri serta PT Trasmi Pialang Asuransi d/h PT Grasia Media Utama dalam mengelola pertanggungjawaban pada segmen Kredit Konsumer dan Kredit Ritel, PT Brocade Insurance Broker, dan PT Nusantara Insurance Broker & Consultant, untuk Kredit Mikro Utama serta PT Nusantara Insurance Broker & Consultant dan PT Trasmi Pialang Asuransi d/h PT Grasia Media Utama dalam mengelola pertanggungjawaban pada segmen Kredit KPR.

13) Bank telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan Kredit Multiguna dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (BPD SulutGo) dengan bentuk penerusan (*channeling*) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, S.H. No. 40 tanggal 13 November 2015.

Dalam kerja sama ini, Bank memberikan kuasa kepada BPD SulutGo untuk menyalurkan fasilitas kredit, menandatangani perjanjian kredit dan pengikatan jaminan masing-masing debitur, melaksanakan hak Bank sehubungan dengan jaminan dan melakukan penagihan pembayaran fasilitas kredit oleh debitur.

Maksimum fasilitas dalam rangka kerja sama ini adalah sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu kerja sama dan penarikan dana maksimal 12 bulan sejak

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

12) As of December 31, 2023, the Bank has entered into Cooperation Agreements with PT Asuransi Bangun Askrida, PT Jamkrida Jabar, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk., PT Asuransi Jasaraharja Putera, and PT Jamkrindo Syariah for Micro Credit Insurance, Commercial, Microfinance Institutions And Corporations. Meanwhile the Bank has collaborated with PT Asuransi Kredit Indonesia for Kredit Usaha Rakyat (KUR), collaborated with the Indonesian Eximbank for Credit Guarantees and collaborated with PT Jaminan Kredit Indonesia for Kredit Skema Subsidi Resi Gudang. For the closure of Collateral Loss Insurance, the Bank cooperates with PT Asuransi Bangun Askrida, PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk., PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Dayin Mitra Tbk. and PT Asuransi Central Asia. The Bank also works with Insurance Brokerage Companies PT Brocade Insurance Broker, PT Nusantara Insurance Broker & Consultant, PT Estika Jasatama, PT Fresnel Perdana Mandiri and PT Trasmi Pialang Asuransi in managing coverage in the Consumer Credit and Retail Credit segments, PT Brocade Insurance Broker, and PT Nusantara Insurance Broker & Consultant, for Main Micro Credit as well as PT Nusantara Insurance Broker & Consultant and PT Trasmi Broker Asuransi in managing coverage in the KPR Credit segment.

13) The Bank entered into an agreement with PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (BPD SulutGo) to provide Kredit Multiguna loans in the form of channeling as notarized in the Notarial Deed No. 40 dated November 13, 2015 of Herdimansyah Chaidirsyah, S.H.

Under the agreement, the Bank gives authority to BPD SulutGo to provide credit facilities, to sign the credit agreement and collateral binding agreement of each debtors, to execute the Bank's right relating to guarantees and to receive repayment of the credit facility by the debtors.

The maximum amount of the facility amounted to Rp500,000 with the period of the agreement and fund withdrawal for 12 months since the date the agreement

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

perjanjian ditandatangani. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah realisasi penyaluran kredit *channeling* adalah masing-masing sebesar Rp6.501 yang terdiri dari 81 debitur dan Rp9.789 yang terdiri dari 109 debitur.

- 14) Bank telah melakukan pembelian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (BPD Sulteng) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bank dan BPD Sulteng sesuai dengan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna, S.H., M.Hum., No.4 tanggal 26 Februari 2015. Perjanjian Jual Beli Piutang No. 5 tanggal 26 Februari 2015 dan Perjanjian Pengalihan Piutang No. 6 tanggal 26 Februari 2015.

Jumlah komitmen pembelian kredit ini adalah sebesar Rp250.000. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah realisasi pembelian kredit adalah masing-masing sebesar Rp1.457 yang terdiri dari 32 debitur dan Rp2.515 yang terdiri dari 49 debitur.

Transaksi pembelian kredit tersebut merupakan transaksi *without recourse*. Semua hak, kepemilikan dan kepentingan atas kredit telah dialihkan kepada Bank dan Bank memperoleh seluruh keuntungan dan kerugian yang timbul dari kredit tersebut.

Dalam hal terjadi tunggakan dari debitur, BPD Sulteng secara aktif berkewajiban untuk melakukan penagihan kepada debitur untuk kepentingan Bank sesuai prosedur yang berlaku.

Kredit tersebut merupakan Kredit Multiguna yang disalurkan oleh BPD Sulteng kepada pegawai negeri sipil aktif di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kriteria antara lain:

(a) maksimum plafon kredit sebesar Rp200 per debitur, (b) memiliki kolektibilitas 1 (satu)/lancar, (c) jangka waktu disesuaikan dengan jangka waktu kredit setiap debitur maksimal 12 (dua belas) tahun sejak tanggal pengalihan (d) Debitur yang dialihkan adalah debitur yang gajinya telah disalurkan melalui BPD Sulteng.

Setelah pengalihan kredit tersebut, BPD Sulteng akan bertindak sebagai agen pengelolaan, atau pihak yang mengelola pembayaran dari debitur dan mengadministrasikan dokumen kredit debitur sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna, S.H., M.Hum., No. 7 tanggal 26 Februari 2015

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)**

was signed. Up to December 31, 2023 and 2022, the total realization of the loan channeling amounted to Rp6,501 which consisted of 81 debtors and Rp9,789 which consisted of 109 debtors, respectively.

- 14) The Bank purchased loans from PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (BPD Sulteng) based on the agreement between the Bank and BPD Sulteng which was notarized under Notarial Deed No. 4 dated February 26, 2015 of Popy Kuntari Sutresna, S.H., M.Hum., Sales Agreement No.5 dated February 26, 2015 and Cessie Agreement No. 6 dated February 26, 2015.

The total commitment of the loans purchased amounted to Rp250,000. As of December 31, 2023 and 2022, the total realization of the loans purchased amounted to Rp1,457 which consisted of 32 debtors and Rp2,515 which consisted of 49 debtors, respectively.

The loans purchase transaction is a non recourse transaction. All rights, ownership and interests of the loans are transferred to the Bank and the Bank obtains all benefits and risks on the loan.

When the debtors' default, BPD Sulteng is obliged to conduct the collection procedures from the debtors on behalf of the Bank in accordance with the applicable procedures.

These loans are Multiguna loans which are provided by BPD Sulteng for active government employees of province and municipalities/ regencies in the province of Sulawesi Tengah with criteria of among others:

(a) maximum credit limit of Rp200 per debtor, (b) collectibility 1 (one)/current, (c) period of loan is adjusted for each debtor to a maximum of 12 (twelve) years since purchase date, (d) Debtors transferred are the debtor whose salary has been channeled through the BPD Sulteng.

After the purchase of loans, BPD Sulteng acts an agent, or the party which manages the payment from debtors and administers the debtor's loan documents based on deed No. 7 dated February 26, 2015 of Popy Kuntari Sutresna, S.H., M.Hum., regarding receivable management agreement between Bank

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

tentang Perjanjian Pengelolaan Piutang antara Bank dan BPD Sulteng. Atas jasa pengelolaan piutang tersebut, BPD Sulteng mendapat imbalan sebesar 20% dari setiap liabilitas bunga debitur yang telah disetor oleh BPD Sulteng dan diterima oleh Bank.

- 15) Bank telah melakukan pembelian Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (BPD Sultra) sebagaimana tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama antara Bank dan BPD Sultra sesuai dengan Akta Notaris Yenni Yunithawati Rukmana, S.H., No. 98 tanggal 28 Desember 2018, Akta Notaris Ida Bagus Sidi Mantra, S.H., M.Kn., No.465 tanggal 28 Juli 2017 dan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna, S.H., M.Hum., No. 2 tanggal 16 Juni 2015. Perjanjian Jual Beli Piutang No. 3 tanggal 16 Juni 2015 dan Perjanjian Pengalihan Piutang No. 4 tanggal 16 Juni 2015. Jumlah komitmen pembelian piutang ini adalah sebesar Rp300.000. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah realisasi pembelian piutang adalah masing-masing sebesar Rp1.163 yang terdiri dari 40 debitur dan Rp1.879 yang terdiri dari 70 debitur.

Transaksi pembelian kredit tersebut merupakan transaksi *without recourse*. Semua hak, kepemilikan, dan kepentingan atas kredit telah dialihkan kepada Bank dan Bank memperoleh seluruh keuntungan dan kerugian yang timbul dari kredit tersebut.

Setelah pembelian kredit tersebut, BPD Sultra akan bertindak selaku pihak yang melakukan penagihan kepada debitur, memelihara dan mengadministrasikan tagihan secara tertib untuk kepentingan Bank, dan melakukan penyeteroran atas pembayaran yang diterima dari debitur baik berupa angsuran, bunga dan/atau liabilitas lainnya yang menjadi hak Bank termasuk dalam hal terjadinya pembayaran dipercepat oleh debitur ke rekening penampung BPD Sultra di Bank BJB, selambat-lambatnya dua hari kerja berikutnya sejak diterimanya pembayaran dari debitur. Atas jasa pengelolaan piutang tersebut, BPD Sultra mendapat imbalan sebesar 30% dari setiap liabilitas bunga debitur yang telah disetor oleh BPD Sultra dan diterima oleh Bank.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

and BPD Sulteng. For the services rendered, BPD Sulteng will receive a fee at 20% of every debtor interest obligation paid by BPD Sulteng and received by the Bank.

- 15) The Bank has purchased the Credit of the Southeast Sulawesi Regional Development Bank (BPD Sultra) as stated in the Amendment to the Cooperation Agreement between the Southeast Sulawesi Bank and BPD in accordance with Notarial Deed Yenni Yunithawati Rukmana, SH, No. 98 dated December 28, 2018, Ida Bagus Sidi Mantra's Notary Deed, S.H., M.Kn., No.465 dated July 28, 2017 and Notary Deed Popy Kuntari Sutresna, S.H., M.Hum., No. 2 June 16, 2015. Receivable Sale and Purchase Agreement No. 3 dated June 16, 2015 and Accounts Receivable Transfer Agreement No. 4 dated June 16, 2015. The total commitment to purchase these receivables is Rp300,000. As of December 31, 2023 and 2022, the total realized purchases of receivables amounted to Rp1,163 consisting of 40 debtors and Rp1,879 consisting of 70 debtors, respectively.

The loans purchase transaction is a non-recourse transaction. All rights, ownership and interests of the loans are transferred to the Bank and the Bank obtains all benefits and risks on the loan.

After the loan purchase, BPD Sultra will act as the party that collects debtors, maintains and administers bills in an orderly manner for the Bank's interests and deposits for payments received from debtors in the form of installments, interest and/or other liabilities which are included in the Bank's rights. In the event of an expedited payment by the debtor to the Southeast Sulawesi BPD holding account at BJB Bank, no later than two subsequent working days from receipt of payment from the debtor. For the accounts receivable management services, the Southeast Sulawesi BPD receives 30% of each debtor interest liability that has been deposited by the Southeast Sulawesi BPD and received by the Bank.

13. Pembiayaan dan Piutang Syariah

13. Sharia Financing and Receivables

Pembiayaan dengan prinsip syariah seluruhnya diberikan dalam mata uang rupiah.

All sharia financing were granted in rupiah currency.

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas

a. By type and collectibility

31 Desember 2023	Dalam Perhatian					Total/ Total	December 31, 2023
	Lancar/ Current	khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss		
Pihak Berelasi (Catatan 43)							Related parties (Note 43)
Konsumsi	10,881	-	-	-	-	10,881	Consumption
Pihak ketiga							Third parties
Konsumsi	5,222,019	225,539	5,629	4,684	89,645	5,547,516	Consumption
Modal kerja	1,569,154	64,212	-	92	175,728	1,809,186	Working capital
Investasi	1,369,806	27,075	-	317	13,333	1,410,531	Investment
Total	8,171,860	316,826	5,629	5,093	278,706	8,778,114	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35,235)	(11,468)	(118)	(670)	(169,455)	(216,946)	Allowance for impairment losses
Neto	8,136,625	305,358	5,511	4,423	109,251	8,561,168	Net

31 Desember 2022	Dalam Perhatian					Total/ Total	December 31, 2022
	Lancar/ Current	khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss		
Pihak Berelasi (Catatan 43)							Related parties (Note 43)
Konsumsi	29,437	-	-	-	-	29,437	Consumption
Pihak ketiga							Third parties
Konsumsi	4,746,781	134,793	11,048	5,587	58,610	4,956,819	Consumption
Modal kerja	1,001,868	89,824	165	-	123,928	1,215,785	Working capital
Investasi	1,164,810	33,336	142	292	15,287	1,213,867	Investment
Total	6,942,896	257,953	11,355	5,879	197,825	7,415,908	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(24,622)	(12,834)	(446)	(594)	(121,379)	(159,875)	Allowance for impairment losses
Neto	6,918,274	245,119	10,909	5,285	76,446	7,256,033	Net

b. Berdasarkan jenis akad

b. By type of agreement

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Murabahah	5,271,424	4,571,830	Murabahah
Musyarakah	3,091,178	2,464,254	Musyarakah
Mudharabah	308,388	271,492	Mudharabah
Qardh	106,646	107,729	Qardh
Istishna	478	603	Istishna
Total	8,778,114	7,415,908	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(216,946)	(159,875)	Allowance for impairment losses
Neto	8,561,168	7,256,033	Neto

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

c. Berdasarkan sektor ekonomi

c. By economic sector

31 Desember 2023	Dalam Perhatian Khusus/ Kurang					Total/	December 31, 2023
	Lancar/ Current	Special mention	lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss		
Industri	319,221	-	-	92	1,936	321,249	Industry
Perdagangan	384,217	8,513	-	317	7,461	400,508	Trading
Jasa-jasa sosial	629,585	2,140	-	-	5,584	637,309	Social services
Listrik, gas dan air	79,857	-	-	-	-	79,857	Electricity, gas, and water
Pertanian	17,073	18,544	-	-	2,076	37,693	Farming
Jasa dunia usaha	335,868	2,001	-	-	92,646	430,515	Business services
Pengangkutan dan pergudangan	306,211	19,352	-	-	28,824	354,387	Transportation and warehousing
Konstruksi	451,441	40,612	-	-	50,273	542,326	Constructions
Pertambangan	106,083	124	-	-	109	106,316	Mining
Lain-lain	5,542,304	225,540	5,629	4,684	89,797	5,867,954	Others
Total	8,171,860	316,826	5,629	5,093	278,706	8,778,114	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35,235)	(11,468)	(118)	(670)	(169,455)	(216,946)	Allowance for impairment losses
Neto	8,136,625	305,358	5,511	4,423	109,251	8,561,168	Net

31 Desember 2022	Dalam Perhatian Khusus/ Kurang					Total/	December 31, 2022
	Lancar/ Current	Special mention	lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss		
Industri	232,738	138	-	-	2,940	235,816	Industry
Perdagangan	216,150	2,702	307	158	10,622	229,939	Trading
Jasa-jasa sosial	577,605	87	-	-	6,066	583,758	Social services
Listrik, gas dan air	55,705	-	-	-	-	55,705	Electricity, gas, and water
Pertanian	28,390	15	-	-	2,253	30,658	Farming
Jasa dunia usaha	427,449	44,743	-	-	72,053	544,245	Business services
Pengangkutan dan pergudangan	349,422	53,090	-	-	-	402,512	Transportation and warehousing
Konstruksi	214,228	22,384	-	-	45,141	281,753	Constructions
Pertambangan	88,516	-	-	134	140	88,790	Mining
Lain-lain	4,752,693	134,794	11,048	5,587	58,610	4,962,732	Others
Total	6,942,896	257,953	11,355	5,879	197,825	7,415,908	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(24,622)	(12,834)	(446)	(594)	(121,379)	(159,875)	Allowance for impairment losses
Neto	6,918,274	245,119	10,909	5,285	76,446	7,256,033	Net

d. Berdasarkan periode sisa jatuh tempo

d. By remaining period to maturity

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Rupiah			Rupiah
< 1 tahun	1,300,636	1,092,907	< 1 year
> 1 - 5 tahun	2,379,504	1,831,861	> 1 - 5 years
> 5 - 10 tahun	2,432,236	1,974,142	> 5 - 10 years
> 10 tahun	2,665,738	2,516,998	> 10 years
Total	8,778,114	7,415,908	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(216,946)	(159,875)	Allowance for impairment losses
Neto	8,561,168	7,256,033	Net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

e. Berdasarkan jangka waktu perjanjian kredit

e. By term of credit agreements

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Rupiah			Rupiah
< 1 tahun	848,940	574,943	< 1 year
> 1 - 5 tahun	1,949,470	974,960	> 1 - 5 years
> 5 - 10 tahun	2,425,031	2,041,277	> 5 - 10 years
> 10 tahun	<u>3,554,673</u>	<u>3,824,728</u>	> 10 years
Total	8,778,114	7,415,908	Total
Cadangan			Allowance
kerugian penurunan nilai	(216,946)	(159,875)	for impairment losses
Neto	<u>8,561,168</u>	<u>7,256,033</u>	Net

f. Kisaran marjin dan setara bagi hasil per tahun adalah sebagai berikut:

f. Range of margin and equivalent revenue sharing per annum are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Rupiah	5% - 58%	5% - 56%	Rupiah

g. Pembiayaan syariah *non-performing* berdasarkan sektor ekonomi

g. *Non-performing sharia financing by economic sector*

	31 Desember/December 31, 2023		31 Desember/December 31, 2022		
	Kredit non - performing/ Non - performing loans	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Kredit non - performing/ Non - performing loans	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	
Pengangkutan dan pergudangan	28,824	(21,525)	11,088	(5,856)	Transportation and warehousing
Pertambangan	108	(49)			Mining
Industri	2,028	(595)	2,940	(1,553)	Industry
Perdagangan	7,778	(1,595)	-	-	Trading
Konstruksi	50,273	(30,080)	45,141	(23,841)	Constructions
Jasa dunia usaha	92,798	(69,995)	72,053	(38,055)	Business services
Jasa-jasa sosial	5,584	(848)	6,066	(3,204)	Social services
Pertanian	2,077	(1,378)	2,253	(1,190)	Farming
Listrik, gas dan air	-	-	-	-	Electricity, gas and water
Lain-lain	99,958	(44,178)	75,518	(48,721)	Others
Total	<u>289,428</u>	<u>(170,243)</u>	<u>215,059</u>	<u>(122,420)</u>	Total

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rasio pembiayaan syariah *non-performing* - kotor terhadap jumlah pembiayaan syariah masing-masing sebesar 3,30% dan 2,90%.

As of December 31, 2023 and 2022, non-performing sharia financing ratios - gross to total sharia financing are 3.30% and 2.90%, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rasio pembiayaan syariah *non-performing* - neto terhadap jumlah pembiayaan syariah masing-masing sebesar 1,69% dan 1,25%.

As of December 31, 2023 and 2022, non-performing sharia financing ratios - net to total sharia financing are 1.69% and 1.25%, respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

h. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	h. <i>Movements in the allowance for impairment losses</i>
Saldo awal	159,875	129,348	<i>Beginning balance</i>
Penyisihan selama tahun berjalan	140,393	67,568	<i>Provision during the year</i>
Pembalikan selama tahun berjalan	(56,515)	(89,440)	<i>Reversal during the year</i>
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(45,006)	(5,785)	<i>Write-offs during the year</i>
Penerimaan kembali pembiayaan yang telah dihapus buku	18,199	58,184	<i>Recovery from loans written-off</i>
Saldo akhir	<u>216,946</u>	<u>159,875</u>	<i>Ending balance</i>

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan syariah yang diberikan.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible sharia financing.

14. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

14. *Acceptances Receivable and Payable*

a. Tagihan akseptasi	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	a. <i>Acceptance receivable</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Rupiah	217,837	185,493	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	<u>71,107</u>	<u>42,477</u>	<i>United States Dollar</i>
Total	<u>288,944</u>	<u>227,970</u>	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(519)	(2,374)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	<u>288,425</u>	<u>225,596</u>	<i>Net</i>
 b. Liabilitas akseptasi			 b. <i>Acceptance payable</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Rupiah	217,837	185,493	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	<u>71,107</u>	<u>42,477</u>	<i>United States Dollar</i>
Total	<u>288,944</u>	<u>227,970</u>	<i>Total</i>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

- c. Perubahan nilai tercatat bruto
Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

- c. *Movement in the gross carrying amount*
The movement in the gross carrying amount are as follow:

31 Desember/December 31, 2023						
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Nilai tercatat bruto awal	227,970	-	-	-	227,970	Initial gross carrying amount
Aset baru	288,944	-	-	-	288,944	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(227,970)	-	-	-	(227,970)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	-	-	-	-	-	Remeasurement
Valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-	-	Foreign exchange and other movement
Nilai tercatat bruto akhir	288,944	-	-	-	288,944	Ending gross carrying amount
31 Desember/December 31, 2022						
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Nilai tercatat bruto awal	163,983	-	-	-	163,983	Initial gross carrying amount
Aset baru	227,970	-	-	-	227,970	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(163,983)	-	-	-	(163,983)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	-	-	-	-	-	Remeasurement
Valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-	-	Foreign exchange and other movement
Nilai tercatat bruto akhir	227,970	-	-	-	227,970	Ending gross carrying amount

- d. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

- d. *Movement in the allowance for impairment losses*

31 Desember/December 31, 2023						
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Saldo awal	2,374	-	-	-	2,374	Initial balance
Aset Baru	519	-	-	-	519	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(2,374)	-	-	-	(2,374)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	-	-	-	-	-	Remeasurement
Penghapusbukuan	-	-	-	-	-	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-	-	Foreign exchange and other movement
Ending balance	519	-	-	-	519	Ending balance
31 Desember/December 31, 2022						
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Saldo awal	1,616	-	-	-	1,616	Initial balance
Aset Baru	2,374	-	-	-	2,374	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(1,616)	-	-	-	(1,616)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	-	-	-	-	-	Remeasurement
Penghapusbukuan	-	-	-	-	-	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-	-	Foreign exchange and other movement
Ending balance	2,374	-	-	-	2,374	Ending balance

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Informasi mengenai jatuh tempo tagihan dan liabilitas akseptasi diungkapkan pada Catatan 48.

Information with respect to maturities of acceptances receivable and payable is disclosed in Note 48.

Bank melakukan penilaian tagihan akseptasi secara individual dengan menggunakan bukti objektif atas penurunan nilai.

Bank assessed acceptances receivable individually for impairment using objective evidence of impairment.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the above allowance for impairment losses is adequate.

Seluruh tagihan akseptasi yang dimiliki tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diklasifikasikan sebagai lancar.

All of acceptances receivable as of December 31, 2023 and 2022, are classified as current.

15. Penyertaan Saham

15. Investments in Shares

	31 Desember/ December 2023		
	Total	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	
BPR			BPR
Kabupaten Subang	7,955	21%	Subang Regency
Kabupaten Cianjur	2,816	10%	Cianjur Regency
Kabupaten Serang	2,400	5%	Serang Regency
Kabupaten Bogor	1,590	9%	Bogor Regency
Kabupaten Indramayu	1,260	7%	Indramayu Regency
Kabupaten Tangerang	1,050	1%	Tangerang Regency
Kabupaten Bekasi	990	4%	Bekasi Regency
Kabupaten Tasikmalaya	600	2%	Tasikmalaya Regency
Kabupaten Majalengka	423	3%	Majalengka Regency
Kabupaten Lebak	405	3%	Lebak Regency
Kabupaten Ciamis	300	4%	Ciamis Regency
Kabupaten Pandeglang	150	1%	Pandeglang Regency
Lainnya			Others
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	99,969	7%	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu
PT Asuransi Bangun Askrida	70,181	9%	PT Asuransi Bangun Askrida
Total	190,089		Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,303)		Allowance for impairment losses
Neto	188,786		Net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)**

		<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>			
		<u>Total</u>	<u>Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership</u>		
BPR				BPR	
	Kabupaten Cianjur	2,816	12%		Cianjur Regency
	Kabupaten Serang	2,400	5%		Serang Regency
	Kabupaten Bogor	1,590	9%		Bogor Regency
	Kabupaten Indramayu	1,260	11%		Indramayu Regency
	Kabupaten Tangerang	1,050	1%		Tangerang Regency
	Kabupaten Bekasi	990	6%		Bekasi Regency
	Kabupaten Tasikmalaya	600	4%		Tasikmalaya Regency
	Kabupaten Majalengka	423	5%		Majalengka Regency
	Kabupaten Lebak	405	4%		Lebak Regency
	Kabupaten Ciamis	300	7%		Ciamis Regency
	Kabupaten Pandeglang	150	2%		Pandeglang Regency
Lainnya				Others	
	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	99,969	7%		PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu
	PT Asuransi Bangun Askrida	30,140	11%		PT Asuransi Bangun Askrida
	Total	142,093			Total
	Cadangan				Allowance for
	kerugian penurunan nilai	(1,303)			impairment losses
	Neto	140,790			Net

a. PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (Bank Bengkulu)

Dalam rangka implementasi strategi dalam corporate plan Bank di bidang kolaborasi dan anorganik, Bank berencana untuk melakukan pengembangan struktur Kelompok Usaha Bank yang telah dimiliki. Adanya ketentuan mengenai modal inti minimum pada POJK No 12 Tahun 2020 mengenai Konsolidasi Bank Umum menimbulkan adanya kebutuhan dari beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan modal inti dibawah 3 Triliun untuk bergabung ke dalam KUB. Dilatarbelakangi oleh dua hal tersebut, Bank selaku BPD terbesar di Indonesia, berinisiasi untuk mengembangkan struktur KUB melalui penyertaan modal pada BPD lain.

b. PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (Bank Bengkulu)

Dalam rangka implementasi strategi dalam corporate plan Bank di bidang kolaborasi dan anorganik, Bank berencana untuk melakukan pengembangan struktur Kelompok Usaha Bank yang telah dimiliki. Adanya ketentuan mengenai modal inti minimum pada POJK No 12 Tahun 2020 mengenai Konsolidasi Bank Umum menimbulkan adanya kebutuhan dari beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan modal inti dibawah 3 Triliun untuk bergabung ke dalam KUB. Dilatarbelakangi oleh dua hal tersebut, Bank selaku BPD terbesar di Indonesia, berinisiasi untuk mengembangkan struktur KUB melalui penyertaan modal pada BPD lain.

a. PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (Bank Bengkulu)

In order to implement the strategy in The Bank's corporate plan in the field of collaboration and inorganics, The Bank plans to develop the structure of the Bank's Business Group that it already has. The existence of provisions regarding minimum core capital in POJK No. 12 of 2020 concerning Commercial Bank Consolidation has created a need for several Regional Development Banks (BPD) with core capital below 3 trillion to join KUB. Against the background of these two things, The Bank as the largest BPD in Indonesia, took the initiative to develop the KUB structure through capital participation in other BPDs.

b. PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (Bank Bengkulu)

In order to implement the strategy in The Bank's corporate plan in the field of collaboration and inorganics, The Bank plans to develop the structure of the Bank's Business Group that it already has. The existence of provisions regarding minimum core capital in POJK No. 12 of 2020 concerning Commercial Bank Consolidation has created a need for several Regional Development Banks (BPD) with core capital below 3 trillion to join KUB. Against the background of these two things, The Bank as the largest BPD in Indonesia, took the initiative to develop the KUB structure through capital participation in other BPDs.

c. Penyertaan Modal Tahap I

Realisasi Pengembangan struktur KUB dilakukan dengan melakukan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu. Sesuai dengan akta PKS Penyertaan Modal Dalam Rangka Pembentukan Kelompok Usaha Bank antara Bank dan Bank Bengkulu no 135 tanggal 29 Juli 2022, penyertaan modal dilakukan melalui 2 tahap, tahap I senilai maksimal Rp100.000 direalisasikan di tahun 2022 dan penyertaan modal tahap II senilai maksimal Rp150.000 direalisasikan di tahun 2023.

Bank melakukan realisasi setoran modal tahap I pada tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp 100.000. Pengefektifan setoran modal tahap I Bank pada Bank Bengkulu senilai Rp99,969 dilakukan pada tanggal 29 November 2022 atas dasar persetujuan OJK melalui surat no S-49/KR.02/2022 tanggal 28 Oktober 2022 perihal Persetujuan Penyertaan Modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu untuk pembelian 2.617 lembar saham seri A baru (right issue) dengan harga kesepakatan senilai Rp.38 / lembar saham Seri A. Atas penyertaan modal tersebut Bank menjadi pemegang saham minoritas dengan presentase kepemilikan 7,15%. Perubahan komposisi pemegang saham dalam anggaran dasar memperoleh persetujuan Kemenkumham AHU-AH.01.03-0318833 di tanggal yang sama dengan penyertaan modal.

d. Penyertaan Modal Tahap II

Bank kembali melakukan realisasi proses penyertaan modal tahap II (subsequent) senilai Rp149.960, di tahun 2023 pada Bank Bengkulu dalam rangka pengembangan struktur Kelompok Usaha Bank (KUB). Harga perlembar saham yang disepakati kedua belah pihak adalah Rp.40,75/ lembar saham Seri A. Penyertaan modal dilakukan dengan membeli saham baru (right issue) dengan proyeksi kepemilikan saham Bank di Bank Bengkulu menjadi 15.57% (pembelian dilakukan untuk 8.45% saham Bank Bengkulu).

Saat ini Bank telah mendapatkan persetujuan OJK atas penyertaan modal tahap II melalui surat OJK no S-57/KR.02/2023 Tanggal 4 September 2023 dan Keputusan Dewan Komisiner OJK no KEP-24/D.03/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Izin Pembelian 8,45% Saham PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk.

c. Participation of Phase I Capital

The realization of the development of the KUB structure was carried out by investing capital in PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu. In accordance with the PKS deed of capital participation in the context of the formation of a bank business group between The Bank and bank Bengkulu no. 135 dated 29 July 2022, capital participation is carried out in 2 stages, stage I with a maximum value of Rp.100,000 realized in 2022 and stage capital participation II with a maximum value of Rp150,000 will be released in 2023.

The Bank realized phase I capital deposits on July 29 2022 amounting to Rp.100,000. The effectiveness of The Bank phase I capital deposit at Bank Bengkulu worth Rp99,969 was carried out on November 29 2022 on the basis of OJK approval via letter no S-49/ KR.02/2022 dated 28 October 2022 concerning Approval of Capital Participation in PT Bank Pembangunan Daerah West Java and Banten, Tbk. to PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu for the purchase of 2,617 new series A shares (right issue) with an agreement price of Rp.38/ share Sei A. Due to this capital participation, The Bank became a minority shareholder with an ownership percentage of 7.15%. Changes in the composition of shareholders in the articles of association received approval from the Ministry of Law and Human Rights AHU-AH.01.03-0318833 on the same date as the capital participation.

d. Participation of Phase II Capital

The Bank is again carrying out the process of capital participation in phase II (subsequent) worth Rp.149,960, in 2023 at Bank Bengkulu in the context of developing the structure of the Bank Business Group (KUB). The price per share agreed upon by both parties is Rp.40.75 / Series A share. Capital participation was carried out by purchasing new shares (right issue) with a projection of The Bank share ownership in Bank Bengkulu to be 15.57% (purchase was made for 8.45% of Bank Bengkulu shares).

Currently The Bank has received OJK approval for phase II capital participation through OJK letter no S-57/KR.02/2023 dated 4 September 2023 and OJK Board of Commissioners Decree no KEP-24/D.03/2024 dated 21 February 2024 concerning Permit to Purchase 8.45% of PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Shares by PT Bank Pembangunan Daerah West Java and Banten, Tbk.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Pengukuran Nilai Wajar (Level 3)

Pada 31 Desember 2023, Bank menghitung nilai wajar atas penyertaan saham pada PT Asuransi Bangun Askrida dengan menggunakan perhitungan metode nilai wajar (Level3) menggunakan pendekatan pasar dengan metode *Guideline Publicly Traded Company Method* (GPTCM) dan pendekatan pendapatan dengan metode discounted cash flow, model arus kas bersih untuk ekuitas

Nilai wajar penyertaan saham pada tanggal 31 Desember 2023 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar oleh KJPP Salam dan Rekan (terdaftar di OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.PB-53/PM.223/2022 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

a. Berdasarkan kolektibilitas

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Lancar	179,461	139,843	Current
Kurang lancar	7,955	1,260	Substandard
Diragukan	1,413	-	Doubtful
Macet	<u>1,260</u>	<u>990</u>	Loss
Total	190,089	142,093	Total
Cadangan kerugian			Allowance
penurunan nilai	<u>(1,303)</u>	<u>(1,303)</u>	for impairment losses
Neto	<u>188,786</u>	<u>140,790</u>	Net

b. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul atas penyertaan saham.

c. Penerimaan dividen dari penyertaan saham pada PT Asuransi Bangun Askrida, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, dan BPR pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp685 dan Rp5.960.

Fair Value Measurement (Level 3)

As of December 31, 2023, the Bank has assess the fair value of investment in shares in PT Asuransi Bangun Askrida using the fair value method calculation (Level3) using a market approach using the *Guideline Publicly Traded Company Method* (GPTCM), and an income approach using the discounted cash flow method, free cash flow to equity.

The fair value of equity investments on December 31, 2023 is estimated based on an assessment of market value by KJPP Salam and Partners (registered with the OJK) with Capital Market Supporting Professional Registration Certificate Number STTD.PB-53/PM.223/2022 issued by the Financial Services Authority.

a. By collectibility

b. *Movements in the allowance for impairment losses*

Management believes that the allowance for impairment losses mentioned above is sufficient to cover impairment losses on investments in shares.

c. *Dividend income received from investments in shares in PT Asuransi Bangun Askrida, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, and BPR as of December 31, 2023 and 2022, is amounting to Rp685 and Rp5,960, respectively.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

16. Aset Tetap dan Aset Hak Guna

16. Fixed Assets and Right-of-Use Assets

31 Desember/December, 31 2023							
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassifications	Revaluasi/ Revaluations	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya perolehan/Nilai revaluasi Kepemilikan langsung							Cost/Revaluation value Direct ownership
Tanah	2,469,692	-	(446)	-	(4,844)	2,464,402	Land
Bangunan	628,598	3,808	(1,452)	4,720	-	635,674	Buildings
Perlengkapan	1,908,311	279,198	(3,186)	150,397	-	2,334,720	Office equipment
Kendaraan	65,879	210	(6,436)	-	-	59,653	Vehicles
	5,072,480	283,216	(11,520)	155,117	(4,844)	5,494,449	
Aset dalam penyelesaian	737,461	206,328	(132)	(155,117)	-	788,540	Construction in progress
	5,809,941	489,544	(11,652)	-	(4,844)	6,282,989	
Aset Hak Guna	873,099	83,699	(14,387)	-	-	942,411	Right Of Use Assets
	6,683,040	573,243	(26,039)	-	(4,844)	7,225,400	
Akumulasi penyusutan Kepemilikan langsung							Accumulated depreciation Direct ownership
Bangunan	(417,512)	(25,318)	1,032	-	-	(441,798)	Buildings
Perlengkapan	(1,432,538)	(268,498)	2,361	-	-	(1,698,675)	Office equipment
Kendaraan	(36,687)	(5,621)	5,683	-	-	(36,625)	Vehicles
	(1,886,737)	(299,437)	9,076	-	-	(2,177,098)	
Aset Hak Guna	(233,054)	(34,142)	14,387	-	-	(252,809)	Right-of-use assets
	(2,119,791)	(333,579)	23,463	-	-	(2,429,907)	
Nilai buku neto	4,563,249					4,795,493	Net book value
31 Desember/December 31, 2022							
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions		Reklasifikasi/ Reclassifications	Revaluasi/ Revaluations	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya perolehan/Nilai revaluasi Kepemilikan langsung							Cost/Revaluation value Direct ownership
Tanah	2,447,183	55,531	-	-	(33,022)	2,469,692	Land
Bangunan	625,682	-	2,916	-	-	628,598	Buildings
Perlengkapan	1,651,616	106,184	150,511	-	-	1,908,311	Office equipment
Kendaraan	64,851	1,028	-	-	-	65,879	Vehicles
	4,789,332	162,743	153,427	-	(33,022)	5,072,480	
Aset dalam penyelesaian	624,235	315,698	(202,472)	-	-	737,461	Construction in progress
	5,413,567	478,441	(49,045)	-	(33,022)	5,809,941	
Aset Hak Guna	961,946	34,692	(123,539)	-	-	873,099	Right Of Use Assets
	6,375,513	513,133	(172,584)	-	(33,022)	6,683,040	
Akumulasi penyusutan Kepemilikan langsung							Accumulated depreciation Direct ownership
Bangunan	(387,688)	(29,824)	-	-	-	(417,512)	Buildings
Perlengkapan	(1,228,862)	(203,676)	-	-	-	(1,432,538)	Office equipment
Kendaraan	(30,345)	(6,342)	-	-	-	(36,687)	Vehicles
	(1,646,895)	(239,842)	-	-	-	(1,886,737)	
Aset Hak Guna	(172,260)	(65,086)	4,292	-	-	(233,054)	Right-of-use assets
	(1,819,155)	(304,928)	4,292	-	-	(2,119,791)	
Nilai buku neto	4,556,358					4,563,249	Net book value

Manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan.

Management has reviewed the estimated economic life, depreciation method, and residual value at the end of each reporting period.

Pada tahun 2023, termasuk didalam pengurangan aset tetap adalah dampak dari dekonsolidasi entitas anak BPR KU sebesar nilai buku aset tetap yaitu Rp2.444.

In 2023, included in the disposals in fixed assets is the impact of the deconsolidation of the subsidiary BPR KU, the book value of fixed assets amounting to Rp2,444.

Rincian penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of sale of fixed assets are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Hasil penjualan aset tetap	1,293	-	Proceeds from sale of fixed assets
Nilai buku	-	-	Net book value
Labanya penjualan aset tetap	1,293	-	Gain on sale of fixed assets

Pengurangan aset pada posisi 31 Desember 2023 merupakan penjualan atas kendaraan sebesar Rp1.293.

The asset reduction on December 31, 2023 is the sale of vehicles of Rp1,293.

Pada tahun 2023, berkaitan dengan pelepasan anak perusahaan BPR KU, Bank telah melakukan hapus buku atas aset BPR KU sebesar nilai bukunya yaitu Rp2.444.

In 2023, according to BPR KU which is no longer a subsidiary, the Bank has written off the fixed asset of BPR KU amounted to Rp2,444.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Pada tahun 2023, terdapat aset dalam proses yang dibebankan pada laba rugi tahun berjalan sebesar Rp132.

In 2023, there are assets in progress that are charged to the current year profit or loss amounting to Rp132.

Aset Hak Guna

Right of Use Assets

		31 Desember/December 31, 2023						
		Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
Biaya perolehan:							Cost:	
Tanah dan Bangunan		860,900	83,624	(14,387)	-	930,137	Land and Building	
Inventaris Kantor		12,199	75	-	-	12,274	Office Inventory	
		<u>873,099</u>	<u>83,699</u>	<u>(14,387)</u>	<u>-</u>	<u>942,411</u>		
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:	
Tanah dan Bangunan		(232,259)	(30,336)	14,387	-	(248,208)	Land and Building	
Inventaris Kantor		(795)	(3,806)	-	-	(4,601)	Office Inventory	
		<u>(233,054)</u>	<u>(34,142)</u>	<u>14,387</u>	<u>-</u>	<u>(252,809)</u>		
Nilai buku-neto		<u>640,045</u>				<u>689,602</u>	Net book value	
		31 Desember/December 31, 2022						
		Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
Biaya perolehan:							Cost:	
Tanah dan Bangunan		826,208	34,692	-	-	860,900	Land and Building	
Inventaris Kantor		135,738	-	-	(123,539)	12,199	Office Inventory	
		<u>961,946</u>	<u>34,692</u>	<u>-</u>	<u>(123,539)</u>	<u>873,099</u>		
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:	
Tanah dan Bangunan		(167,173)	(65,086)	-	-	(232,259)	Land and Building	
Inventaris Kantor		(5,087)	-	-	4,292	(795)	Office Inventory	
		<u>(172,260)</u>	<u>(65,086)</u>	<u>-</u>	<u>4,292</u>	<u>(233,054)</u>		
Nilai buku-neto		<u>789,686</u>				<u>640,045</u>	Net book value	

Bank dan entitas anak menyewa beberapa aset termasuk bangunan kantor, rumah dinas, mesin ATM, dan lain-lain. Rata-rata masa sewa adalah 5 (lima) tahun.

Bank and its subsidiaries had rent a number of assets which include building, official houses, ATM machine, and others. The average of lease term is 5 (five) years.

Jumlah penyusutan yang dibebankan pada beban operasional lain sebesar Rp332.118 dan Rp304.928 masing-masing pada 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 37).

Total depreciation expense charged to other operating expenses amounted to Rp332,118 and Rp304,928 as of December 31, 2023 and 2022, respectively (Note 37).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah tercatat liabilitas sewa adalah sebesar Rp512.507 dan Rp448.901 (Catatan 28).

As of December 31, 2023 and 2022, the carrying amount of lease liabilities was Rp512,507 and Rp448,901 (Note 28), respectively.

Berikut ini ringkasan komponen liabilitas sewa yang disajikan pada laporan laba rugi dan laporan arus kas:

The following summarize the component of lease liabilities presented in statement of profit or loss and a statement of cash flows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Jumlah diakui di laba rugi			Amounts recognized in profit or loss
Beban bunga atas liabilitas sewa	39,194	43,663	Interest expense on lease liabilities
Beban penyusutan aset hak guna	34,142	60,794	Depreciation of right of use assets
Beban terkait liabilitas sewa dengan nilai rendah atau jangka pendek (Catatan 37)	240,160	251,291	Expenses relating to short-term or low value lease liabilities (Note 37)
Jumlah diakui dalam laporan arus kas			Amounts recognized in cashflow
Jumlah kas keluar untuk pembayaran liabilitas sewa	(78,954)	(41,109)	Total cash outflow for payment of leases

Persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berkisar antara 34% sampai dengan 96% dan 92% sampai dengan 98%. Estimasi penyelesaian yaitu pada tahun 2024.

The percentage of completion of the constructions in progress as of December 31, 2023 and 2022 is approximately 34% to 96% and 92% to 98%. The estimated completion date is in 2024.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Nilai tercatat bruto dari aset tetap yang telah di depresiasi penuh oleh Bank dan entitas anak namun masih digunakan adalah sebesar Rp1.270.548 dan Rp1.079.759 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The gross carrying amount of the Bank and its subsidiaries' fully depreciated fixed assets that are still in use amounted to Rp1,270,548 and Rp1,079,759 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

Bank telah mengasuransikan aset tetap untuk menutupi kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan bencana alam dengan nilai pertanggungan asuransi per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.662.969 dan Rp1.663.642 pada PT. Asuransi Bangun Askrida, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, dan PT Asuransi Cakrawala Proteksi.

The Bank has insured its fixed assets to cover possible losses due to fire, theft, and natural disasters as of December 31, 2023 and 2022 for a total coverage of Rp1,662,969 and Rp1,663,642, respectively, with PT Asuransi Bangun Askrida, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, and PT Asuransi Cakrawala Proteksi.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coverage is sufficient to cover possible losses on these insured fixed assets.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan potensial atas nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Management believes that there is no indication of potential impairment in values of fixed assets as of December 31, 2023 and 2022.

Tidak terdapat aset tetap yang dijaminan oleh Bank dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

There are no fixed assets pledged as collateral by the Bank and its subsidiaries as of December 31, 2023 and 2022.

Bank menerapkan kebijakan akuntansi atas tanah dengan model revaluasi. Penilaian atas tanah dilakukan oleh penilai independen eksternal KJPP Jimmy Prasetyo dan Rekan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.PP-153/PM.223/2020 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tanggal 27 Februari 2020. Penilaian oleh KJPP disampaikan melalui laporannya tanggal 16 November 2022 dan 01 Desember 2023 dengan Audrey Angelina, MAPPI (Cert) selaku penilai independen penandatangan laporan.

The Bank changed its accounting policy of land revaluation model. The valuations of land are generally performed by the external independent appraisers KJPP Jimmy Prasetyo dan Rekan with Capital Market Supporting Professional Registration Certificate Number STTD.PP-153/PM.223/2020 issued by the Financial Services Authority on 27 February 2020. The valuation by KJPP was submitted through its report dated, November 16, 2022 and December 01, 2023 with Audrey Angelina, MAPPI (Cert) as the independent appraisal who signed the report.

Penilaian dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI & SPI) serta POJK 28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim dan menggunakan pendekatan penilaian.

Appraisals are performed based on Indonesian Appraisers Ethics Code and Indonesian Appraise Standards (KEPI & SPI) and POJK 28/POJK.04/2021 concerning Valuation and Presentation of Property Valuation Reports in the Capital Market market based on references from recent market transactions and ensue within the clause.

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap untuk kelompok aset tanah yang dilakukan Bank adalah sebagai berikut:

Information on the revaluation of land performed by Bank as follows:

	31 Desember/December 31, 2023			
	Nilai Buku sebelum Revaluasi/ Amount Before Revaluation	Nilai Buku setelah Revaluasi/ Amount after Revaluation	Keuntungan/(Kerugian) Revaluasi/Revaluation Surplus/(Deficit)	
Tanah	2,469,692	2,464,848	(4,844)	Land

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

31 Desember/December 31, 2022

	Nilai Buku sebelum Revaluasi/ Carrying Amount Before Revaluation	Nilai Buku setelah Revaluasi/ Carrying Amount after Revaluation	Keuntungan/(Kerugian) Revaluasi/Revaluation Surplus/(Deficit)	
Tanah	2,436,670	2,469,692	(33,022)	Land

Penilaian kembali tanah milik Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 untuk tujuan akuntansi dilakukan oleh KJPP Jimmy Prasetyo dan Rekan melalui laporannya tanggal 2 November 2023 dan 16 November 2022. Masing-masing revaluasi berjumlah Rp2.464.848 dan Rp2.469.692, keuntungan/(kerugian) yang diperoleh sejumlah (Rp4.844) dan (Rp33.022). Kenaikan/(penurunan) nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus/(Defisit) Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

Revaluation of land owned by Bank as December 31, 2023 and 2022 for accounting purposes are generally performed by the external independent appraisers KJPP Jimmy Prasetyo dan Rekan through its report dated November 2, 2023 and November 16, 2022. Revaluation are amounting to Rp 2,464,848 and Rp2,469,692, the profit/(loss) is amounting to (Rp4,844) and (Rp33,022). Increase/(decrease) in the carrying amount arising from revaluation is recorded in "Surplus/(deficit) on Revaluation of Fixed Asset" and presented in other comprehensive income. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

Aset dalam penyelesaian per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Constuction in progress as of December 31, 2023 and 2022 as follow:

31 Desember/December 31, 2023

Jenis Aset/Asset Classifications	Nilai Aset Tetap Dalam Proses/ Fixed Assets in Process Value	Nilai Kontrak/ Contract Value	% Penyelesaian/ % of Completion	Estimasi Penyelesaian/ Estimated Completion
Pembangunan Bangunan Kantor/ Office Tower Construction	718,097	750,340	96%	2024
Pembelian Inventaris & Software/ Inventory & Software Purchases	70,150	120,078	53%	2024
Rehabilitasi Gedung Kantor/ Office Tower Rehabilitation	293	852	34%	2024

31 Desember/December 31, 2022

Jenis Aset/Asset Classifications	Nilai Aset Tetap Dalam Proses/ Fixed Assets in Process Value	Nilai Kontrak/ Contract Value	% Penyelesaian/ % of Completion	Estimasi Penyelesaian/ Estimated Completion
Pembangunan Bangunan Kantor/ Office Tower Construction	540,139	549,964	98%	2023
Pembelian Inventaris & Software/ Inventory & Software Purchases	180,213	215,273	84%	2023
Pembelian Tanah/ Land Purchases	1,955	2,135	92%	2023

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

17. Bunga yang Masih Akan Diterima

17. Accrued Interest Receivables

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/December 31, 2023		31 Desember/December 31, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currency (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currency (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	
Rupiah					Rupiah
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah		1,040,876		905,048	Loans and sharia financing
Surat berharga		310,459		252,548	Marketable securities
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		1,630		1,515	Placement with Bank Indonesia and other banks
		<u>1,352,965</u>		<u>1,159,111</u>	
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	251,761	3,870	12,361	178	Loans and sharia financing
Surat berharga	687,307	10,570	683,155	9,816	Marketable securities
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	16,352	251	-	-	Placement with Bank Indonesia and other banks
Total		<u>1,367,656</u>		<u>1,169,105</u>	Total

18. Aset Lain-Lain

18. Other Assets

	31 Desember/December 31, 2023		31 Desember/December 31, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currency (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currency (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	
Rupiah					Rupiah
Biaya dibayar di muka		2,342,265		1,689,878	Prepaid expenses
Uang muka pajak		390,256		229,347	Tax advance
Beban ditangguhkan untuk pinjaman karyawan		174,244		180,064	Deferred expense for employee loan
Tagihan atas transaksi ATM		191,333		162,968	Receivables from ATM transactions
Agunan yang diambil alih		60,120		63,998	Foreclosed collaterals
Persediaan keperluan kantor		64,055		52,305	Office supplies
Aset ijarah		4,320		24,423	Ijarah assets
Setoran jaminan		13,551		12,762	Security deposits
Lain-lain		255,852		129,757	Others
		<u>3,495,996</u>		<u>2,545,502</u>	
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
Biaya dibayar di muka	929	14	929	14	Prepaid expenses
		<u>14</u>		<u>14</u>	
Total		<u>3,496,010</u>		<u>2,545,516</u>	Total

Pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalam biaya dibayar di muka adalah uang muka pajak sehubungan dengan lebih bayar pajak penghasilan badan tahun 2019 dan pembayaran sehubungan dengan pemeriksaan pajak masing-masing sebesar Rp52.845 dan Rp337.245 (Catatan 26.d).

As of December 31, 2023, included in prepaid expenses are corporate income tax overpayment year 2019 and payment as tax advance regarding to the tax examination amounting to Rp52,845 and Rp337,245, respectively (Note 26.d)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Termasuk di dalam aset lain-lain adalah aset terbenkakai dalam bentuk tanah dengan nilai perolehan sebesar Rp2.006 dan nilai pasar sebesar Rp37.753 berdasarkan perhitungan dari KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dalam laporannya tertanggal 1 Desember 2023 serta pra penyertaan modal tahap II kepada Bank Bengkulu sebesar Rp149.960.

Included in other assets are abandoned property in the form of land with an acquisition value of Rp2,006 and a market value of Rp37,753 based on calculations from KJPP Jimmy Prasetyo & Partners in their report dated Desember 1, 2023 and pre-participation of phase II capital to Bank Bengkulu amounting to Rp149,960.

19. Liabilitas Segera

19. Obligations Due Immediately

	31 Desember/December 31, 2023		31 Desember/December 31, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currency (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currency (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	
Rupiah					Rupiah
Rekening titipan		1,606,746		1,847,666	Accounts not yet settled
Kiriman uang		387,502		396,467	Money transfers
Liabilitas kepada Kantor Bendahara dan Kas Negara		164,719		143,026	Liabilities to the State Treasury and Cash Office
Setoran Jaminan yang telah jatuh tempo tetapi belum diambil nasabah		10,206		10,469	Matured security deposits not yet collected by customers
Zakat, Infaq dan Shadaqah		313		386	Zakat, Infaq, and Shadaqah
Titipan kredit dan pembiayaan dan piutang syariah		1,171		1,227	Loans and sharia financing and receivable not yet settled
Titipan dana bantuan pemerintah		6,517		175	Unsettled loans from government aid
		<u>2,177,174</u>		<u>2,399,416</u>	
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
Setoran jaminan yang telah jatuh tempo tetapi belum diambil oleh nasabah	274,936	4,233	274,927	4,280	Matured security deposits not yet collected by customers
Lain-lain	2,040,830	31,423	18,295	285	Others
		<u>35,656</u>		<u>4,565</u>	
Total		<u>2,212,830</u>		<u>2,403,981</u>	Total

Rekening titipan merupakan hasil dari uang titipan yang diterima Bank dan entitas anak atas transaksi pembayaran dari nasabah yang akan disetorkan pihak bank ke rekening tujuan.

Accounts not yet settled were payment transactions received from customers by the Bank and its subsidiaries as collecting bank before deposited to destined account.

Kiriman uang digunakan untuk membukukan setoran transfer sebelum mengkredit atau mendebit rekening nasabah.

Money transfers were used to record deposit transfers before credited or debited to destined account.

Liabilitas kepada Kantor Bendahara dan Kas Negara merupakan hasil penerimaan pajak dari para wajib pajak baik perorangan maupun perusahaan yang diterima Bank sebagai bank persepsi.

Liabilities to the State Treasury and Cash Office were tax payments received from individuals or companies by the Bank as a collecting bank.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

**20. Simpanan Nasabah dan Simpanan Nasabah
Syariah**

**20. Deposits from Customers and Sharia Deposits
from Customers**

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

a. By type and currency

i. Simpanan nasabah

i. Deposits from customers

	31 Desember/December 31, 2023		31 Desember/December 31, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currency (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currency (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	
Pihak- berelasi (Catatan 43)					Related parties (Note 43)
Rupiah					Rupiah
Giro		6,184,407		9,678,923	Current accounts
Tabungan					Savings
Tandamata Gold		7,221		14,337	Tandamata Gold
Simpeda		11,226		11,665	Simpeda
Tandamata		26,162		26,467	Tandamata
Lain-lain		6,866		3,762	Others
		51,475		56,231	
Deposito berjangka		164,687		148,390	Time deposits
		6,400,569		9,883,544	
Mata Uang Asing					Foreign Currency
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
Tabungan Tandamata	17,689	272	32,351	504	Tandamata Savings
Deposito berjangka	22,227	342	34,124	531	Time deposits
Dolar Singapura					Singapore Dollar
Tabungan Tandamata	13,786	161	834	10	Tandamata Savings
		775		1,045	
Subtotal - pihak berelasi		6,401,344		9,884,589	Subtotal - related parties
Pihak ketiga					Third parties
Rupiah					Rupiah
Giro		15,041,139		14,431,852	Current accounts
Tabungan					Savings
Tandamata		14,052,900		14,687,242	Tandamata
Simpeda		2,393,645		2,651,053	Simpeda
Tandamata Gold		917,842		986,118	Tandamata Gold
Tandamata Purnabakti		2,209,804		1,952,467	Tandamata Purnabakti
TabunganKu		374,013		369,532	TabunganKu
Tandamata Berjangka		248,382		233,664	Tandamata Berjangka
Lain-lain		11,013,459		5,664,336	Others
		31,210,045		26,544,412	
Deposito berjangka		67,759,697		69,590,814	Time deposits
Subtotal - rupiah		114,010,881		110,567,078	Subtotal - rupiah

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/December 31, 2023		31 Desember/December 31, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currency (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currency (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
Giro	2,204,884	33,949	41,752,506	649,981	Current accounts
Tabungan Tandamata	2,310,787	35,580	3,858,827	60,072	Tandamata Savings
Deposito Berjangka	388,985,715	5,989,213	54,675,455	851,161	Time deposits
Dolar Singapura					Singapore Dollar
Giro	3,696	43	6,628	77	Current accounts
Tabungan Tandamata	406,314	4,744	424,916	4,926	Tandamata Savings
Deposito berjangka	205,347	2,398	90,247	1,046	Time deposits
Euro Eropa					European Euro
Giro	8,238	140	21,827	362	Current accounts
Renminbi					Renminbi
Giro	35,100	76	19,562	44	Current accounts
Yen Jepang					Japanese Yen
Giro	139,969	15	14,200	2	Current accounts
Dolar Australia					Australian Dollar
Giro	363	4	447	5	Current accounts
		6,066,162		1,567,676	
Subtotal - pihak ketiga		120,077,043		112,134,754	Subtotal - third parties
Total		126,478,387		122,019,343	Total

ii. Simpanan nasabah syariah

ii. Deposits from customers – sharia

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak berelasi (Catatan 43)			Related parties (Note 43)
Rupiah			Rupiah
Tabungan Wadiah	-	274	Wadiah savings
Tabungan iB	480	-	iB Savings
	480	274	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Giro Wadiah	211,910	114,542	Wadiah current accounts
Tabungan Wadiah	3,694	257,710	Wadiah savings
Tabunganku iB	732,232	423,453	Tabunganku iB
	947,836	795,705	
Total	948,316	795,979	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

b. Rincian deposito berjangka berdasarkan jangka waktu

b. Details of time deposits by term

	31 Desember/December 31, 2023		31 Desember/December 31, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currency (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currency (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	
Rupiah					Rupiah
1 bulan		19,775,980		22,700,767	1 month
3 bulan		20,696,871		17,635,591	3 months
6 bulan		11,774,724		3,735,942	6 months
12 bulan		12,810,289		25,570,354	12 months
Lebih dari 12 bulan		2,866,521		96,550	More than 12 months
		<u>67,924,385</u>		<u>69,739,204</u>	
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
1 bulan	215,507,862	3,318,174	17,182,526	267,489	1 month
3 bulan	170,368,367	2,623,162	681,847	10,615	3 months
6 bulan	1,749,441	26,936	1,706,157	26,561	6 months
12 bulan	1,382,272	21,282	35,139,049	547,027	12 months
		<u>5,989,554</u>		<u>851,692</u>	
Dolar Singapura					Singapore Dollar
1 bulan	117,000	1,366	-	-	1 month
6 bulan	88,347	1,032	90,247	1,046	6 month
		<u>2,398</u>		<u>1,046</u>	
Total		<u><u>73,916,337</u></u>		<u><u>70,591,942</u></u>	Total

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

c. Average interest rates per annum

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Giro			Current accounts
Rupiah	0.06%	0.13%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	0.02%	0.02%	United States Dollar
Tabungan			Savings
Rupiah	0.12%	0.27%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	0.04%	0.04%	United States Dollar
Deposito Berjangka			Time deposits
Rupiah	3.48%	3.38%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	1.31%	0.47%	United States Dollar

d. Giro yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan dan pembiayaan dan piutang syariah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.466.333 dan Rp1.663.090 (Catatan 12.k.9).

d. Current accounts blocked and pledged as loan and sharia financing and receivable collateral as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp1,466,333 and Rp1,663,090, respectively (Note 12.k.9).

e. Deposito yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan dan pembiayaan dan piutang syariah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp677.349 dan Rp528.916 (Catatan 12.k.10).

e. Time deposits blocked and pledged as loan and sharia financing and receivable collateral as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp677,349 and Rp528,916, respectively (Note 12.k.10).

f. Bank memberikan *special rate* deposito khusus kepada nasabah institusi rupiah dengan minimal penempatan dana diatas Rp2.000 (dua miliar rupiah) untuk mata uang rupiah dan USD 100.000,- (seratus ribu USD) (nilai penuh) dengan suku bunga yang diberikan antara 3.00% - 8.00% untuk rupiah dan 0.75% - 6.00% untuk USD. Untuk *Special Rate* Giro diberikan kepada Nasabah Institusi rupiah dengan penempatan dana diatas Rp2.000 (dua miliar rupiah) dengan tingkat dengan suku bunga yang diberikan antara 1,50% - 5.00%.

f. The Bank provides a special deposit rate for rupiah institutional customers with a minimum placement of funds above IDR 2,000 (two billion rupiah) for rupiah currency and USD 100,000 (one hundred thousand USD) (full amount) with an interest rate of between 3.00% - 8.00% for rupiah and 0.75% - 6.00% for USD. Special Rate Giro is given to rupiah Institutional Customers with funds placed above IDR 2,000 (two billion rupiah) with an interest rate given between 1.50% - 5.00%.

21. Simpanan dari Bank Lain

21. Deposits from Other Banks

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

a. By type and currency

	31 Desember/December 31, 2023		31 Desember/December 31, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ <i>Notional amount in foreign currency (angka penuh/ full amount)</i>	Ekuivalen Rupiah/ <i>Equivalent Rupiah</i>	Jumlah nosional mata uang asing/ <i>Notional amount in foreign currency (angka penuh/ full amount)</i>	Ekuivalen Rupiah/ <i>Equivalent Rupiah</i>	
Pihak berelasi (Catatan 43)					Related parties (Note 43)
Rupiah					Rupiah
Tabungan		32,263		33,892	Savings
Deposito berjangka		36,447		7,155	Time deposits
Giro		18,045		55,292	Current accounts
		<u>86,755</u>		<u>96,339</u>	
Pihak ketiga					Third parties
Rupiah					Rupiah
Deposito berjangka		648,583		597,908	Time deposits
Tabungan		410,314		358,945	Savings
Call money		860,000		2,850,000	Call money
Giro		510,734		558,598	Current accounts
Sertifikat deposito		25,154		-	Certificate of deposits
		<u>2,454,785</u>		<u>4,365,451</u>	
Total		<u>2,541,540</u>		<u>4,461,790</u>	Total

b. Rincian deposito berjangka berdasarkan jangka waktu

b. Details of time deposits by term

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Rupiah			Rupiah
1 bulan	421,011	281,969	1 month
3 bulan	73,535	51,883	3 months
6 bulan	66,913	58,058	6 months
12 bulan	120,652	209,734	12 months
24 bulan	2,919	3,419	24 months
Total	<u>685,030</u>	<u>605,063</u>	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

c. Average interest rates per annum

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Giro			Current accounts
Rupiah	0.45%	0.66%	Rupiah
Tabungan			Savings
Rupiah	1.07%	1.09%	Rupiah
Deposito berjangka			Time deposits
Rupiah	4.34%	3.52%	Rupiah
Call Money			Call money
Rupiah	6.27%	0.00%	Rupiah

d. Deposito dari bank lain yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp346.587 dan Rp504.652 (Catatan 12.k.11).

d. Time deposits from other banks blocked and pledged as loan and collateral as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp346,587 and Rp504,652, respectively (Note 12.k.11).

22. Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

22. Liabilities from marketable securities sold under agreements to repurchase

Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Liabilities from marketable securities sold under agreements to repurchase as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

31 Desember/December 31, 2023							
Nasabah/ Customer	Jenis Surat Berharga/ Type of Securities	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Tanggal Dimulai/ Commencement Date	Tanggal Pembelian Kembali/ Repurchase Date	Harga Pembelian Kembali/ Repurchase Price	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Interest Expense	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Pihak ketiga/ Third parties							
Bank Indonesia							
	SUN FR 59	500,000	27 Des/ Dec 27, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	487,415	169	487,246
	SUN FR 82	500,000	27 Des/ Dec 27, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	483,976	168	483,808
	SUN FR 65	500,000	28 Des/ Dec 28, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	468,414	161	468,253
	SUN FR 86	500,000	28 Des/ Dec 28, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	471,575	162	471,413
	SUN FR 86	500,000	28 Des/ Dec 28, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	471,575	162	471,413
	SUN FR 90	500,000	28 Des/ Dec 28, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	462,794	159	462,635
	SUN FR 90	500,000	28 Des/ Dec 28, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	462,794	159	462,635
	SUN FR 91	500,000	28 Des/ Dec 28, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	464,475	160	464,315
	SUN FR 87	500,000	28 Des/ Dec 28, 2023	4 Jan/ Jan 4, 2024	473,335	247	473,087
Total		4,500,000			4,246,353	1,547	4,244,805

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

31 Desember/December 31, 2022

Nasabah/ Customer	Jenis Surat Berharga/ Type of Securities	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Tanggal Dimulai/ Commencement Date	Tanggal Pembelian Kembali/ Repurchase Date	Harga Pembelian Kembali/ Repurchase Price	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Interest Expense	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Pihak ketiga/ Third parties							
Bank Indonesia	SUN FR 95	250,000	28 Des / Dec 28, 2022	4 Jan / Jan 4, 2023	235,810	113	235,697
	SUN FR 87	250,000	28 Des / Dec 28, 2022	4 Jan / Jan 4, 2023	231,702	111	231,591
	SUN FR 87	500,000	28 Des / Dec 28, 2022	4 Jan / Jan 4, 2023	463,404	222	463,182
	SUN FR 87	250,000	28 Des / Dec 28, 2022	4 Jan / Jan 4, 2023	231,702	111	231,591
	SUN FR 87	450,000	28 Des / Dec 28, 2022	2 Jan / Jan 2, 2023	416,925	65	416,859
	SUN FR 87	250,000	29 Des / Dec 29, 2022	5 Jan / Jan 5, 2023	231,726	148	231,578
	SUN FR 59	500,000	29 Des / Dec 29, 2022	3 Jan / Jan 3, 2023	492,317	153	492,164
	SUN FR 87	250,000	29 Des / Dec 29, 2022	2 Jan / Jan 2, 2023	231,608	35	231,573
	SUN FR 64	300,000	29 Des / Dec 29, 2022	2 Jan / Jan 2, 2023	273,475	41	273,434
	SUN FR 64	300,000	29 Des / Dec 29, 2022	2 Jan / Jan 2, 2023	273,475	41	273,434
Total		3,300,000			3,082,144	1,040	3,081,103

23. Efek Utang yang Diterbitkan

23. Debt Securities Issued

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Bank Jabar Banten	780,000	780,000	Continuing Bonds I of Bank Jabar Banten Phase I
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Bank Jabar Banten	-	916,500	Continuing Bonds I of Bank Jabar Banten Phase II
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Bank Jabar Banten	182,000	182,000	Continuing Bonds I of Bank Jabar Banten Phase III
	<u>962,000</u>	<u>1,878,500</u>	
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(4,009)	(7,039)	Unamortized bonds issuance cost
Total	957,991	1,871,461	Total

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Bank Jabar Banten terdiri dari:

- 1) Seri C dengan nilai nominal Rp780.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8,85% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2024.

Continuing Bonds I of Bank Jabar Banten Phase I consisted of:

- 1) Series C with nominal value of Rp780,000 with fixed interest rate of 8.85% per annum which is payable every three months; with a seven-year term; and are due on December 6, 2024.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, peringkat Obligasi Berkelanjutan I Tahap I menurut Pefindo masing-masing adalah idAA dan idAA.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Bank Jabar Banten terdiri dari:

- 1) Seri B dengan nilai nominal Rp916.500 dengan suku bunga tetap sebesar 9.50% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama lima tahun dan telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 28 September 2023.

Pada tanggal 31 Desember dan 2022, peringkat Obligasi Berkelanjutan I Tahap II menurut Pefindo adalah idAA.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Bank Jabar Banten terdiri dari:

- 1) Seri B dengan nilai nominal Rp108.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8,50% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2024.
- 2) Seri C dengan nilai nominal Rp74.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8.75% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2026.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 peringkat Obligasi Berkelanjutan I Tahap III untuk Seri B dan Seri C menurut Pefindo masing-masing adalah idAA dan idAA.

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah mengamortisasi biaya emisi obligasi masing-masing sebesar Rp5.458 dan Rp5.472 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Bertindak sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, II dan III adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Hubungan dengan Wali Amanat bukan merupakan pihak berelasi Bank.

Tidak terdapat jaminan ataupun pembentukan dana untuk pelunasan pokok obligasi dengan menunjuk pos yang berhubungan.

Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Bank (*debt covenants*) adalah Bank tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan bidang usaha utama;
2. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, kecuali pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan);

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

As of December 31, 2023 and 2022, the rating of Continuing Bonds I Phase I by Pefindo is idAA and idAA, respectively.

Continuing Bonds I of Bank Jabar Banten Phase II consisted of:

- 1) Series B with a nominal value of Rp916,500 with a fixed interest rate of 9.50% per year which is paid every three months and a period of five years and has been due and fully paid on September 28, 2023.

As of December 31, and 2022, The rating of Continuing Bonds I Phase II by Pefindo is idAA.

Continuing Bonds I of Bank Jabar Banten Phase III consisted of:

- 1) Series B with a nominal value of Rp108,000 with a fixed interest rate of 8.50% per year which is paid every three months and a period of five years and will be due on October 18, 2024.
- 2) Series C with nominal value of Rp74,000 with fixed interest rate of 8.75% per annum which is paubale every three months; with a seven-year term; and are due on October 18, 2026.

As of December 31, 2023, and 2022 of the rating of Continuing Bonds I Phase III Series B and Series C by Pefindo is idAA and idAA.

On December 31, 2023 and 2022, the Bank has amortized the bonds issuance cost, amounting to Rp5,458 and Rp5,472, respectively, which recorded in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Acting as a Trustee in the issuance of Continuing Bonds Phase I, II and III is PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Relationship with The Trustee is not a related party to the Bank.

There is no guarantee or establishment of funds for the repayment of bond principal by appointing related posts.

Financial restrictions and other restrictions on the Bank (*debt covenants*) are banks without the prior written consent of the Trustee will not do the following:

1. Make changes in the main field of business;
2. Reduce share capital, issued capital and paid-up capital, unless such deduction is made upon request and/or order from the competent authority (including but not limited to the Financial Services Authority);

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

3. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Bank, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Bank, kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semua syarat dan kondisi Obligasi Subordinasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Bank bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi Subordinasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi Subordinasi dan perusahaan penerus tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang Perbankan; atau
 - b. Disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 4. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik Bank kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Bank berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan;
 5. Melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Bank atau setidaknya-tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Bank dari pihak ketiga yang bukan afiliasi dalam transaksi yang lazim;
 6. Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Bank dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Bank.
3. *Enter into mergers, consolidations, and acquisitions with other companies that cause the dissolution of the Bank, or which will have negative consequences on the continuity of the Bank's business, except to the full discretion in accordance with the following provisions:*
 - a. *All terms and conditions of subordinated bonds in the Agreement of Association and other relevant documents remain in force and are fully binding on the surviving company, and in the event that the Bank is not a successor company, all obligations of subordinated bonds have been lawfully transferred to the successor company, and the successor company has adequate assets and capabilities to guarantee the payment of Subordinated Bonds and the successor company one of its business fields is engaged in Banking; or*
 - b. *Required by the applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia.*
 4. *Make the sale or transfer of fixed assets belonging to the Bank to any party, either in whole or most of /exceed 50% (fifty percent) of all fixed assets owned by the Bank based on the last audited financial statements, in one transaction or combined transaction in 1 (one) year running;*
 5. *Make transactions with affiliated parties unless the transaction is conducted on terms that benefit the Bank or at least the same as the terms obtained by the Bank from a third party who is not an affiliate in the usual transaction;*
 6. *Lending to or making investments in the form of share participation in other parties, unless done in connection with activities in accordance with their business fields or in connection with the construction of Bank business facilities and loans to employees, cooperatives and foundations of Bank employees.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

24. Pinjaman yang Diterima

24. Borrowings

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Rupiah			<i>Rupiah</i>
PT Bank Central Asia Tbk	5,700,000	5,700,000	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	5,059,407	3,842,719	<i>Ministry of Public Works And Public Housing of Republic of Indonesia</i>
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	4,000,000	4,000,000	<i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,500,000	1,500,000	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank DKI	1,500,000	1,500,000	<i>PT Bank DKI</i>
PT Bank BTPN Tbk	1,000,000	-	<i>PT Bank BTPN Tbk</i>
PT Bank ICBC Indonesia	800,000	800,000	<i>PT Bank ICBC Indonesia</i>
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	500,000	-	<i>PT Bank Maybank Indonesia Tbk</i>
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	200,000	100,000	<i>PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)</i>
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	34,465	59,200	<i>Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</i>
PT BPR Daya Lumbung Asia	7,768	9,260	<i>PT BPR Daya Lumbung Asia</i>
BPR Supra Artapersada	11,200	11,200	<i>PT BPR Supra Artapersada</i>
PT Bank Oke Indonesia Tbk	5,566	5,428	<i>PT Bank Oke Indonesia Tbk</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	5,417	5,954	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
Total	20,323,823	17,533,761	Total

PT Bank Central Asia Tbk

Bank mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk sebagai berikut:

- a. *Term Loan Non Revolving 2* dengan plafon Rp2.000.000. Sebelumnya pinjaman ini memiliki jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sampai tanggal 27 Maret 2020 dengan tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan + 0,75% per tahun. Pada 10 Desember 2019, Bank melakukan perpanjangan atas pinjaman ini sehingga jatuh tempo pinjaman menjadi tanggal 27 Maret 2026 namun tingkat suku bunga tidak berubah.
- b. *Term Loan Non Revolving 3* dengan plafon Rp2.000.000. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sampai tanggal 17 Oktober 2024 dengan tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan + 0,5% per tahun.
- c. *Term Loan Non Revolving 4* dengan plafon Rp1.500.000. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sampai tanggal 30 Juni 2025 dengan tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan + 1,15% per tahun.
- d. *Term Loan Non Revolving 5* dengan plafon Rp200.000. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sampai tanggal 29 Oktober 2025 dengan tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan + 1,15% per tahun.

PT Bank Central Asia Tbk

The Bank received 2 (two) borrowing facilities from PT Bank Central Asia Tbk as follows:

- a. *Non Revolving Term Loan 2* with a plafond of Rp2,000,000. The borrowing has a period 24 (twenty four) months until March 27, 2020 with interest rate is JIBOR 3 months + 0,75% per annum. On December 10, 2019 Bank extended the loan and maturity of the loan becomes March 27, 2026 but interest rate was not changed.
- b. *Non Revolving Term Loan 3* with a ceiling of Rp2,000,000. The borrowing has period 24 (twenty four) months until October 17, 2024 with interest rate is JIBOR 3 months + 0.5% per annum.
- c. *Term Loan Non Revolving 4* with a ceiling of IDR 1,500,000. This loan has a term of 24 (twenty four) months until June 30, 2025 with an interest rate of 3 months JIBOR + 1.15% per annum.
- d. *Term Loan Non Revolving 5* with a ceiling of Rp200,000. This loan has a term of 24 (twenty four) months until October 29, 2025 with an interest rate of 3 months JIBOR + 1.15% per annum.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan BCA tersebut pada 31 Desember 2023 dan 2022 berturut-turut adalah sebesar Rp1.700.000 dan Rp1.700.000 serta Rp4.000.000 dan Rp1.700.000.

Bank mendapatkan fasilitas pinjaman untuk melakukan pengembangan ekspansi kredit.

Selama masa pinjaman, Bank memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan antara lain (i) menyerahkan laporan keuangan selambat-lambatnya 14 hari setelah tanggal publikasi, (ii) memberitahukan perubahan susunan anggaran dasar; (iii) kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan pemberian fasilitas.

Bank telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian untuk tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Bank tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

BJBS mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) berdasarkan akad pembiayaan No. 124/AKAD/SMF-BJBS/XI/2018 tanggal 4 September 2018 yang berjangka waktu 15 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 September 2033. Porsi nisbah yang disepakati adalah 77,75% untuk SMF dan 22,25% untuk BJBS.

Bank mendapatkan fasilitas pinjaman untuk melakukan pengembangan ekspansi kredit.

Selama masa pinjaman, BJBS memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan antara lain (i) menyerahkan laporan keuangan setiap 6 (enam) bulan, (ii) perubahan akta pendirian dan anggaran Bank, (iii) kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan pemberian fasilitas.

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan SMF tersebut pada tahun 31 Desember 2023 dan 2022 berturut-turut adalah sebesar Rp200.000 dan Rp100.000 serta Nihil dan Rp100.000.

BJBS telah memenuhi semua persyaratan ditetapkan dalam perjanjian untuk tahun 31 Desember 2023 dan 2022. Atas pinjaman *Term Loan* I, BJBS menjaminkan agunan berupa fidusia atas piutang penerbitan KPR.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Bank mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan limit Rp1.500.000. Jangka waktu kredit selama 2 (dua) tahun dari tanggal 25 September 2023 sampai dengan 24 September 2025 dengan tingkat suku bunga pinjaman adalah JIBOR 3 M + 0.60%.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

The total receipt of funds and payments for the BCA financing in the current year of December 31, 2023 and 2022 was Rp1.700.000, and Rp1.700.000, and Rp4,000,000, and Rp1,700,000, respectively.

The Bank received Term Loan facility to develop credit expansion.

Over the period of borrowing, the Bank is required to comply with terms of the borrowing as follows; (i) provide financial statement no later than 14 days after the publication; (ii) Notify amendment of the Bank's Deed of Establishment and Article of Association; (iii) Conformity between the use of fund and the purpose of the borrowing facility.

The Bank has complied with all of the existing terms of the fund borrowing agreement in December 31, 2023 and 2022. The Bank does not provide any collateral for this loan.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

BJBS received borrowing facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) based on financing agreement No. 124/AKAD/SMF-BJBS/XI/2018 dated September 4, 2018 which has 15 years period and will due on September, 4 2033. The agreed nisbah portion for PT SMF are 77.75% and 22.25% for BJBS.

The Bank received Term Loan facility to develop credit expansion.

Over the period of borrowing, BJBS is required to comply with terms of the borrowing as follows; (i) provide financial statement semiannually, (ii) Amendment of the Bank's Deed of Establishment and Article of Association, (iii) Conformity between the use of fund and the purpose of the borrowing facility.

The total receipt of funds and payments for the SMF financing in the current year of December 31, 2023 and 2022 was Rp200,000 and Rp100.000, and Nil and Rp100.000, respectively.

BJBS has complied with all of the existing terms of the fund borrowing agreement for the years December 31, 2023 and 2022. For Term Loan I, the BJBS pledge as fiducia of KPR mortgage.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

The Bank received Term Loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with a plafond Rp1.500.000. The Term Loan has period 2 (two) year from September 25, 2023 until September 24, 2025 with interest rate is JIBOR 3 M + 0.60%.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Bank mendapatkan fasilitas pinjaman untuk melakukan pengembangan ekspansi kredit. Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:

- a. Menjaga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal sebesar 10,28% atau sesuai dengan ketentuan OJK untuk Bank Buku III dan profil risiko bank mana yang lebih besar;
- b. Menjaga maksimum *Non Performing Loan* (NPL) net sebesar 3,50%;
- c. Menjaga *net income* tahun berjalan dengan angka positif;
- d. Menjaga *Liquidity Coverage Ratio* minimal sebesar 100% pada posisi laporan keuangan triwulan.

Bank juga mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan limit Rp500.000. Jangka waktu kredit selama 1 tahun dari tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 19 Desember 2023 dengan tingkat suku bunga JIBOR 3M + 1%.

Selama masa pinjaman, Bank memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan antara lain (i) memastikan ketersediaan laporan keuangan *audited* oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; (ii) ketersediaan penggunaan dana dengan tujuan pemberian fasilitas; dan (iii) menyampaikan akta perubahan anggaran dasar debitur setiap ada perubahan.

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 31 Desember 2023 dan 2022 berturut-turut adalah sebesar Rp1.500.000, dan Rp1.500.000, serta Nihil dan Nihil.

Bank telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian untuk 31 Desember 2023 dan 2022. Bank tidak menjaminkan apapun atas pinjaman ini.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Pinjaman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPUPERA) Republik Indonesia merupakan fasilitas penyaluran dana program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Sejahtera Syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan Perjanjian Kerja Sama Operasional No. HK.02.03-Sg.DL/03/2017, No. 001/PKS/DIR-KS/2017 tanggal 3 Januari 2017 dan Perjanjian Kerja Sama Operasional No. 13/PKS/Satker-DJPB/2017, No. 003/PKS/DIR-KS/2017 tanggal 5 Januari 2017. Pinjaman memiliki tingkat suku bunga sebesar 4,40%.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

The Bank received Term Loan facility to develop credit expansion. The significant requirements (financial covenants) in the Bank's loan agreement include the following:

- a. Capital Adequacy Ratio (CAR) minimum of 10.28% or in accordance with OJK regulations for Bank Book III and which bank's risk profile is greater;*
- b. Non-Performing Loan (NPL) ratio maximum of 3.50%;*
- c. Net income for the current year with positive numbers;*
- d. Liquidity Coverage Ratio minimum of 100% for quarterly financial statement positions.*

Bank also received Term Loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with a ceiling Rp500,000. The Term Loan has period 1 (two) years of March 28, 2022 until December 19, 2023 with interest rate is JIBOR 3 M + 1%.

Over the period of borrowing, the Bank is required to comply with terms of the borrowing as follows; (i) ensure the availability of audited financial statement by Public Accounting Firm registered by OJK; (ii) conformity between the use of fund and the purpose of the borrowing facility; and (iii) amendment of the debtor's article of association whenever there are changes.

The total receipts and payments of Mandiri financing on December 31, 2023 and 2022 were Rp1.500.000, and Rp1.500.000, and Nil, and Nil, respectively.

The Bank has complied with all of the existing terms of the fund borrowing agreement for the December 31, 2023 and 2022. The Bank does not provide any collateral for this loan.

Ministry of Public Works and Public Housing of Republic of Indonesia

Loan from the Ministry of Public Works and Public Housing (KEMENPUPERA) of the Republic of Indonesia is a funding facility for the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) program through Sharia Housing Ownership Financing (PPR) for low income households under the Cooperation Agreement No. HK.02.03-Sg.DL/03/2017, No. 001/PKS/DIRKS/2017 dated January 3, 2017 and the Agreement on Cooperation of Operations No. 13/PKS/SatkerDJPB/2017, No: 003/PKS/DIR-KS/2017 dated January 5, 2017. The interest rate of borrowings is 4.40%.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Ketentuan perjanjian Kerja Sama tersebut sebagai berikut:

- a. Akad penanaman dana dari KEMENPUPERA sebagai pemilik dana kepada BJBS dengan sistem bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati dengan sistem *revenue sharing*;
- b. Objek dalam perjanjian tersebut adalah Dana KPR Sejahtera yang terdiri dari dana KEMENPUPERA dan BJBS dengan jumlah paling tinggi sebesar Rp237.000 untuk pembiayaan KPR Sejahtera paling rendah 2.500 unit, dengan dana yang disiapkan oleh pihak BJBS paling rendah sebesar 10% dari total dana yang diperjanjikan;
- c. Atas dana yang dikelola oleh BJBS, KEMENPUPERA menerima pembayaran imbal bagi hasil setiap bulan sebesar *counter* nisbah imbal hasil maksimal yang berlaku di BJBS;
- d. Imbal hasil yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian x jumlah hari x (*gross yield* x nisbah)/365 sebagaimana perjanjian antara BJBS dengan KEMENPUPERA;
- e. BJBS menyediakan laporannya yang terkait dengan pelaksanaan FLPP yang mencakup data nasabah dan lainnya;
- f. Kelompok sasaran KPR Sejahtera merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dengan batasan penghasilan tertentu sesuai dengan Peraturan Kementerian PUPERA No. 552/KPTS/M/2016, antara lain:
 - Nilai KPR paling tinggi sebesar batasan harga jual rumah dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan;
 - Margin KPR paling tinggi 5,00% (lima persen) per tahun (bersifat tetap);
 - Jangka waktu KPR Sejahtera paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- g. Pengembalian pokok dana FLPP ke KEMENPUPERA dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya sejak bank menerima perintah pemindahbukuan dana FLPP.

Bank mendapatkan fasilitas pinjaman untuk melakukan pengembangan ekspansi kredit.

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan KEMENPUPERA pada 31 Desember 2023 dan 2022 berturut-turut adalah sebesar Rp1.564.587, dan Rp347.899, serta Rp2.928.716 dan 2.069.000

BJBS telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman di atas. Bank tidak menjaminkan apapun atas pinjaman ini.

PT Bank ICBC Indonesia

Bank memiliki fasilitas *Bilateral Committed Loan Credit Facility* dari PT Bank ICBC Indonesia dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

The terms of agreement as follows:

- a. Contract of fund investment from customer KEMENPUPERA as the owner of funds to the BJBS, with profit sharing system based on ratio agreed with revenue sharing system;
- b. The object of the agreement is the fund of KPR Sejahtera consisting of KEMENPUPERA and BJBS funds with the highest amount of Rp237,000 for KPR Sejahtera financing at the minimum of 2,500 units, with funds prepared by the bank minimum of 10% of the total funds agreed;
- c. For the funds managed by BJBS, KEMENPUPERA receives payment of profit sharing each month amounting to the maximum counter rate of the maximum yield applicable in BJBS;
- d. The yields calculated based on the average daily balance x the number of days x (*gross yield* x nisbah)/365 as the interbank agreement with KEMENPUPERA;
- e. BJBS prepares its reports relating to the implementation of FLPP covering customer and other data;
- f. KPR Sejahtera targets Bank and its subsidiaries for low income households with certain income limits in accordance with the Regulation of the Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia No.552/KPTS/M/2016, among others:
 - The highest value of Housing Ownership Loan is the selling price of the house less the determined down payment;
 - The highest margin for Housing Ownership Loan is at 5.00% (five percent) per annum (fix rate mortgage);
 - The maximum duration for Housing Ownership Loan is 20 (twenty) years;
- g. Refund of FLPP funds to KEMENPUPERA shall be made on the 10th of the ensuing month after the bank receives the FLPP fund book-entry instruction.

The Bank received Term Loan facility to develop credit expansion.

The total receipts and payments of KEMENPUPERA financing on December 31, 2023 and 2022 were Rp1.564.587, and Rp347.899, and Rp2.928.716, and Rp2.069.000, respectively.

BJBS has complied with all of the existing terms of the fund borrowing agreement. The Bank does not provide any collateral for this loan.

PT Bank ICBC Indonesia

Bank received *Bilateral Committed Loan Credit Facility* from PT ICBC Indonesia with from PT ICBC Indonesia, this borrowings has period 24 (twenty

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

sejak tanggal 28 Desember 2023 hingga
28 Desember 2025 dengan plafon Rp800.000
dengan bunga sebesar JIBOR 3M + 0.70%.

Selama masa pinjaman, Bank harus
menyerahkan laporan keuangan (*audited*) dalam
waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah
tanggal tutup buku tahunan, Bank harus
menyerahkan laporan keuangan beserta
dokumen lainnya.

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran
pembiayaan ICBC pada 31 Desember 2023 dan
2022 berturut-turut adalah sebesar Rp800.000
dan Rp800.000 serta Rp800 dan Nihil.

Bank telah memenuhi semua persyaratan yang
ditetapkan dalam perjanjian untuk 31 Desember
2023 dan 2022. Bank tidak memberikan jaminan
apapun atas pinjaman ini.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Bank memiliki fasilitas Kredit Angsuran Berjangka
dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan
plafon Rp1.500.000 yang memiliki jangka waktu
3 (tiga) tahun sejak 28 September 2022 hingga
26 September 2025 dengan bunga 7,15%.

Bank juga mendapatkan fasilitas kredit dari
PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan limit
Rp1.000.000. Jangka waktu kredit selama
2 tahun dari tanggal 28 Maret 2022 sampai
dengan 28 Maret 2024 dengan tingkat suku
bunga tetap 4,50%.

Selama masa pinjaman, Bank memiliki kewajiban
untuk menjaga agar kolektibilitas debitor pada
setiap kreditur dari debitor adalah tetap pada
kolektibilitas 1 sesuai aturan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran
pembiayaan Danamon pada 31 Desember 2023
dan 2022 berturut-turut adalah sebesar
Rp1.000.000 dan Rp1.000.000 serta Rp4.000.000
dan Nihil.

Bank telah memenuhi semua persyaratan yang
ditetapkan dalam perjanjian untuk
31 Desember 2023 dan 2022. Bank tidak
memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

**Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Bank mendapatkan pinjaman dari Lembaga
Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB) dengan
plafon sebesar Rp200.000. Pinjaman memiliki
jangka waktu 5 (lima) tahun setelah pencairan
pertama. Bank melakukan pencairan pertama
pada September 2019.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

four) months since December 28, 2023 until
December 28, 2025 with a plafond Rp800.000 and
rate JIBOR 3M + 0.70%.

Over the period of borrowing, the Bank is required
to comply with terms of the borrowing to provide
financial statement (*audited*) with maximum period
180 (one hundred eighty) days after year end
closing and also followed by other relevant
documents.

The total receipts and payments of ICBC financing
on December 31, 2023 and 2022 were Rp800.000
and Rp800.000, and Rp800, and Nil, respectively.

The Bank has complied with all of the existing
terms of the fund borrowing agreement for the
December 31, 2023 and 2022. The Bank does not
provide any collateral for this loan.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Bank received "Kredit Angsuran Berjangka"
Facility from PT Bank Danamon Indonesia Tbk
with a plafond Rp1,500,000 and has period 3
(three) years since September 28, 2022 until
September 26, 2025 with rate 7.15%.

Bank also received Term Loan from PT Bank
Danamon Indonesia Tbk with a plafond
Rp1,000,000. The Term Loan has period 2 (two)
years of March 28, 2022 until March 28, 2024 with
interest rate 4,50% fixed rate.

During the borrowing period, the Bank is required
to ensure that the debtor's collectability for each
creditor of the debtor remains at collectability 1
in accordance with the rules set by Bank Indonesia.

The total receipts and payments of Danamon
financing on December 31, 2023 and 2022 were
Rp1.000.000, and Rp1.000.000, and Rp4.000.000,
and Nil, respectively.

The Bank has complied with all of the existing
terms of the fund borrowing agreement for the
December 31, 2023 and 2022. The Bank does not
provide any collateral for this loan.

**Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Bank received borrowing facilities from Lembaga
Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah with a total ceiling of
Rp200,000. The borrowing has period 5 (five)
years after first disbursement. The first
disbursement is in September, 2019.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Pinjaman yang diberikan kepada Bank nantinya akan disalurkan sebagai kredit kepada Koperasi Usaha Mikro dan Menengah. Porsi penyaluran kredit dari Bank adalah 80% dari plafon atau Rp160.000, untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan 40% atau Rp40.000 untuk Koperasi. Tingkat suku bunga yang diberikan dari LPDB ke Bank sebesar 5% dan suku bunga dari Bank kepada Usaha Mikro dan Menengah sebesar maksimal 16% pertahun.

Jaminan atas pinjaman ini adalah jaminan fidusia atas piutang dengan kategori sehat dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun, dengan nilai minimal sebesar 125% dari plafon pinjaman.

Berdasarkan perjanjian pinjaman Bank disyaratkan untuk memperhatikan dan menjaga tingkat kesehatan keuangannya sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Bank Umum dengan tingkat kesehatan minimal "SEHAT".

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan LPDB-KUMKM selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 berturut-turut adalah sebesar Rp14.524, dan Rp39.259, serta Rp20.000 dan Nihil.

Bank berkewajiban melakukan pengembalian pokok dilakukan secara bulanan, selambat-lambatnya pada tanggal 25 (dua puluh lima), sesuai dengan jadwal angsuran pinjaman ke Rekening Pengembalian Pokok Dana Bergulir LPDB-KUMKM.

Bank telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian untuk 31 Desember 2023 dan 2022. Bank tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

PT Bank DKI

Bank mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank DKI dengan limit Rp1.500.000. Jangka waktu kredit selama 2 (dua) tahun dari tanggal 29 September 2022 sampai dengan 27 September 2024 dengan tingkat suku bunga pinjaman adalah JIBOR 3 M + 0,65%.

Selama masa pinjaman, Bank memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar OJK selambat-lambat 180 hari setelah tanggal penutupan buku.

Bank mendapatkan fasilitas pinjaman untuk tujuan memenuhi kebutuhan likuiditas.

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan Bank DKI pada 31 Desember 2023 dan 2022 berturut-turut adalah sebesar Nihil dan Nihil serta Rp1.500.000 dan Nihil

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

The borrowings are distributed to micro, small and middle bussines. The portion of loans from the Bank is 80% of the limit or Rp160,000, for micro, small and medium bussines and 40% or IDR40,000 for the cooperative. The interest rate given from Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah for Bank is 5% and from Bank for micro, small and medium bussines is a maximum 16% for annum.

The collateral for this loan is a fiduciary guarantee for receivables with category of healthy and is not being guaranteed to any party, with a minimum is 125% of the limit.

Based on the loan agreement, Bank is required to maintain the financial health in accordance with Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Number 14/SEOJK.03/2017 about Tingkat Kesehatan Keuangan Bank Umum dengan tingkat kesehatan minimal "SEHAT".

Total receipts and payments of LPDB-KUMKM financing for the year ended on December 31, 2023 and 2022 were Rp14.524, and Rp39.259, and Rp20.000, and Nil, respectively.

Over the period of borrowing, the Bank is required to repay its principal, before the 25th (twenty fifth) of each month, as required by the borrowing schedule to the revolving fund account of LPDB-KUMKM.

The Bank has complied with all of the existing terms of the fund borrowing agreement for the years December 31, 2023 and 2022. The Bank does not provide any collateral for this loan.

PT Bank DKI

The Bank received term loan from PT Bank DKI with a plafond Rp1,500,000. The Term Loan has period 2 (two) years from September 29, 2022 until September 27, 2022 with interest rate is JIBOR 3 M + 0.65%.

During the borrowing period, the Bank is required to provide audited financial statement no later than 180 days after the closing date.

The Bank received term loan facility to to meet liquidity needs

The total receipts and payments of DKI financing on December 31, 2023 and 2022 were Nil and Nil, and Rp1,500,000, and Nil, respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Bank telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian untuk tahun 31 Desember 2023 dan 2022. Bank tidak menjaminkan apapun atas pinjaman ini.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berdasarkan persetujuan kredit No. 28 tanggal 23 Maret 2018, BPR Intan Jabar memperoleh fasilitas Pinjaman modal kerja dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. Jumlah fasilitas kredit sebesar Rp 15.000, dengan tingkat suku bunga sebesar 9% per tahun, jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2022. Pinjaman tersebut dijamin dengan Piutang usaha yang berasal dari fasilitas kredit yang diberikan.

Fasilitas kredit pada PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan nilai nominal Rp15.000 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2022.

Berdasarkan persetujuan kredit No. 1792 tanggal 30 Desember 2019, BPR Intan Jabar memperoleh fasilitas Pinjaman modal kerja dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. Jumlah fasilitas kredit sebesar Rp7.500, dengan tingkat suku bunga sebesar 10% per tahun, jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2025. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha yang berasal dari fasilitas kredit yang diberikan.

Fasilitas kredit pada PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan nilai nominal Rp40.000 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo pada tanggal 6 September 2022.

Fasilitas kredit pada PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan nilai nominal Rp40.000 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo pada tanggal 17 September 2022.

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan PT CIMB Niaga Tbk pada 31 Desember 2023 dan 2022 berturut-turut adalah sebesar Nihil dan Rp537 serta Nihil dan Nihil.

BPR Intan Jabar telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Bank tidak menjaminkan apapun atas pinjaman ini.

PT Bank Oke Indonesia Tbk

BPR Intan Jabar memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Oke Indonesia Tbk dengan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp40.000 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman No. 086/BA/JKT/V/2017 tanggal 28 Mei 2017 BPR Intan Jabar mendapatkan fasilitas pinjaman dengan plafon Rp20.000. Pinjaman memiliki jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan. Tingkat suku bunga pinjaman ini adalah 10,75% per tahun;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

The Bank has complied with all of the existing terms of the fund borrowing agreement as of December 31, 2023 and 2022. The Bank does not provide any collateral for this loan.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Based on the agreement No. 28 on March 23, 2018 BPR Intan Jabar received a facility of Working Capital Loan from PT Bank CIMB Niaga Tbk. Ceiling of the facility is Rp15,000, with interest rate of 9% per annum for the period of 48 (fourty eight) months, until March 23, 2022. The borrowing facility is guaranteed by the Account Receivable of the loan.

Credit facility at PT Bank CIMB Niaga Tbk with nominal value of Rp15,000 had been repaid by the Bank on the due on March 23, 2022.

Based on the agreement No. 1792 on December 30, 2019 BPR Intan Jabar received a facility of Working Capital Loan from PT Bank CIMB Niaga Tbk. Ceiling of the facility is Rp7,500, with interest rate of 10% per annum for the period of 72 (seventy two) months, until December 30, 2025. The borrowing facility is guaranteed by the Account Receivable of the loan.

Credit facility at PT Bank CIMB Niaga Tbk with nominal value of Rp40,000 had been repaid by the Bank on the due on September 6, 2022.

Credit facility at PT Bank CIMB Niaga Tbk with nominal value of Rp40,000 had been repaid by the Bank on the due on September 17, 2022.

The total receipts and payments of PT Bank CIMB Niaga Tbk financing on December 31, 2023 and 2022 were nil and Rp537, and Nil, and Nil, respectively.

BPR Intan Jabar has complied with all of the existing terms of the fund borrowing agreement as of December 31, 2023 and 2022. The Bank does not provide any collateral for this loan.

PT Bank Oke Indonesia Tbk

PT BPR Intan Jabar received a working capital loan from PT Bank Oke Indonesia Tbk with a plafond of Rp40,000 as follows:

- a. Based on the loan agreement No. 086/BA/JKT/V2017 dated May 28, 2017, BPR Intan Jabar received borrowing facility with a plafond Rp20,000. The borrowing has period 48 (fourty eight) months. The interest rate is 10.75% per annum;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

- b. Berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman No. 078/BOI/BD/IV/2018 tanggal 5 April 2018 BPR Intan Jabar mendapatkan fasilitas pinjaman dengan plafon Rp20.000. Pinjaman memiliki jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan. Tingkat suku bunga pinjaman ini adalah 10,50% per tahun.

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha yang berasal dari fasilitas kredit yang diberikan.

BPR Intan Jabar telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan PT Bank Oke Indonesia Tbk pada 31 Desember 2023 dan 2022 berturut-turut adalah sebesar Rp138 dan Nihil serta Nihil dan Nihil.

Fasilitas kredit pada PT Bank Oke Indonesia Tbk dengan nilai nominal Rp15.000 telah dilunasi oleh BPR Intan Jabar pada tanggal jatuh tempo pada tanggal 7 Agustus 2022.

PT BPR Daya Lumbung Asia

PT BPR Intan Jabar memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT BPR Daya Lumbung Asia dengan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp6.000 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman No. 0119/BPR-DLA/KREDIT/IV/2020 tanggal 27 April 2020 BPR Intan Jabar mendapatkan fasilitas pinjaman dengan plafon Rp3.000. Pinjaman memiliki jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. Tingkat suku bunga pinjaman ini adalah 5,93% per tahun;
- b. Pada tanggal 9 Juli 2020 BPR Intan Jabar mendapatkan fasilitas pinjaman dengan plafon Rp2.000. Pinjaman memiliki jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. Tingkat suku bunga pinjaman ini adalah 5,79% per tahun;
- c. Pada tanggal 14 September 2020 BPR Intan Jabar mendapatkan fasilitas pinjaman dengan plafon Rp1.000. Pinjaman memiliki jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. Tingkat suku bunga pinjaman ini adalah 11,00% per tahun.
- d. Berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. 14 tanggal 26 Desember 2022, BPR Intan Jabar mendapat fasilitas restrukturisasi kredit eksisting dengan plafon sebesar Rp3.000. Pinjaman memiliki jangka waktu 60 (enam puluh) bulan. Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 9,00% efektif per tahun.
- e. Berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. 59 tanggal 26 Desember 2022, BPR Intan Jabar mendapat fasilitas restrukturisasi kredit eksisting dengan plafon sebesar Rp5.000. Pinjaman memiliki jangka waktu 60 (enam puluh) bulan. Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 9,00% efektif per tahun.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

- b. Based on the loan agreement No. 078/BOI/BD/IV/2018 dated April 5, 2018, BPR Intan Jabar received borrowing facility with a plafond Rp20,000. The borrowing has period of 48 (fourty eight) monts. The interest rate is 10.50% per annum.

The borrowing is guaranteed with accounts receivables from credit facility provided.

BPR Intan Jabar has complied with all of the existing terms of the fund borrowing agreement.

The total receipts and payments of PT Bank Oke Indonesia Tbk financing on December 31, 2023 and 2022 were Rp138, and Nil, and Nil, and Nil, respectively.

Credit facility at PT Bank Oke Indonesia Tbk with nominal value of Rp15,000 had been repaid by BPR Intan Jabar on the due on August 7, 2022.

PT BPR Daya Lumbung Asia

PT BPR Intan Jabar received a working capital loan from PT BPR Daya Lumbung Asia with a limit of Rp6,000 as follows:

- a. Based on the loan agreement No. 0119/BPR-DLA/KREDIT/IV/2020 dated April 27, 2020, BPR Intan Jabar received borrowing facility with a plafond Rp3,000. The borrowing has period 24 (twenty four) months. The interest rate is 5.93% per annum;
- b. On July 9, 2020, BPR Intan Jabar received borrowing facility with a plafond of Rp2,000. The borrowing has period 24 (twenty four) months. The interest rate is 5.79% per annum;
- c. On September 14, 2020, BPR Intan Jabar received borrowing facility with a plafond of Rp1,000. The borrowing has period 24 (twenty four) months. The interest rate is 11.00% per annum.
- d. Based on the loan restructuring agreement No. 14 dated December 26, 2022, BPR Intan Jabar received an existing loan restructuring facility with a plafond Rp3,000. The borrowing has period 60 (sixty) months. The interest rate is 9.00% per annum.
- e. Based on the loan restructuring agreement No. 59 dated December 26, 2022, BPR Intan Jabar received an existing loan restructuring facility with a plafond Rp5,000. The borrowing has period 60 (sixty) months. The interest rate is 9.00% per annum.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

- f. Berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. 36 tanggal 26 Desember 2022, BPR Intan Jabar mendapat fasilitas restrukturisasi kredit eksisting dengan plafon sebesar Rp5.000. Pinjaman memiliki jangka waktu 60 (enam puluh) bulan. Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 9,00% efektif per tahun.

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan PT BPR Daya Lumbung Asia pada 31 Desember 2023 dan 2022 berturut-turut adalah sebesar Nihil dan Rp1.492 serta Nihil dan Rp8.814

PT BPR Intan Jabar telah memenuhi semua semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian untuk tahun 31 Desember 2023 dan 2022. PT BPR Intan Jabar tidak menjaminkan apapun atas pinjaman ini.

PT BPR Supra Artapersada

PT BPR Intan Jabar memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT BPR Supra Artapersada dengan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp10.000. Pada tanggal 15 September 2020, BPR Intan Jabar mendapatkan fasilitas pinjaman dengan plafon Rp10.000. Pinjaman memiliki jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan. Tingkat suku bunga pinjaman ini adalah 11,75% per tahun.

Berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. 58 tanggal 14 September 2023, BPR Intan Jabar mendapat fasilitas restrukturisasi kredit eksisting dengan plafon sebesar Rp10.000. Pinjaman memiliki jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan. Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 11,75% efektif per tahun.

Berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. 26 tanggal 14 September 2023, BPR Intan Jabar mendapat fasilitas restrukturisasi kredit eksisting dengan plafon sebesar Rp5.000. Pinjaman memiliki jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan. Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 11,00% efektif per tahun.

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan PT BPR Supra Artapersada pada 31 Desember 2023 dan 2022 berturut-turut adalah sebesar Nihil dan Nihil serta Nihil dan Rp5.603

PT BPR Intan Jabar telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian untuk 31 Desember 2023 dan 2022. PT BPR Intan Jabar tidak menjaminkan apapun atas pinjaman ini.

PT Bank BTPN Tbk

Bank mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank BTPN Tbk dengan limit Rp1.000.000. Jangka waktu kredit selama 1 (satu) tahun dari tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan 28 Desember 2024 dengan tingkat suku bunga pinjaman adalah JIBOR 3M + 0.25%.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

- f. Based on the loan restructuring agreement No. 36 dated December 26, 2022, BPR Intan Jabar received an existing loan restructuring facility existing with a plafond Rp5,000. The borrowing has period 60 (sixty) months. The interest rate is 9.00% per annum.

The total receipts and payments of PT BPR Daya Lumbung Asia financing on December 31, 2023 and 2022 were Nil and Rp1.492, and Nil, and Rp8.814, respectively.

PT BPR Intan Jabar has complied with all of the existing terms of the fund borrowing agreement as of December 31, 2023 and 2022. PT BPR Intan Jabar does not provide any collateral for this loan.

PT BPR Supra Artapersada

PT BPR Intan Jabar received a working capital loan from PT BPR Supra Artapersada with a limit of Rp10,000. Dated September 15, 2020, BPR Intan Jabar received borrowing facility with a plafond Rp10,000. The borrowing has period of 36 (thirty six) months. The interest rate is 11.75% per annum.

Based on the loan restructuring agreement No. 58 dated September 14, 2023, BPR Intan Jabar received an existing loan restructuring facility with a plafond Rp10,000. The borrowing has period 36 (thirty six) months. The interest rate is 11,75% per annum.

Based on the loan restructuring agreement No. 26 dated September 14, 2023, BPR Intan Jabar received an existing loan restructuring facility with a ceiling Rp5,000. The borrowing has period 36 (thirty six) months. The interest rate is 11,00% per annum.

The total receipts and payments of PT BPR Supra Artapersada financing on December 31, 2023 and 2022 were Nil, and Nil, and Nil, and Rp5.603, respectively.

PT BPR Intan Jabar has complied with all of the existing terms of the fund borrowing agreement as of December 31, 2023 and 2022. PT BPR Intan Jabar does not provide any collateral for this loan.

PT Bank BTPN Tbk

The Bank received Term Loan from PT Bank BTPN Tbk with a plafond Rp1.000.000. The Term Loan has period 1 (one) years from December 28, 2023 until December 28, 2024 with interest rate is JIBOR 3M + 0.25%.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Selama masa pinjaman, Bank memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar OJK selambat-lambat 180 hari setelah tanggal penutupan buku.

Persyaratan-persyaratan penting (financial covenants) dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:

- Menjaga Capital Adequacy Ratio (CAR) minimal sebesar 14.00%;
- Menjaga maksimum Gross Non Performing Loan (NPL) sebesar 5.00%;
- Menjaga net income tahun berjalan dengan angka positif

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan PT Bank BTPN Tbk pada 31 Desember 2023 dan 2022 berturut-turut adalah sebesar Rp1.000.000 dan Nihil serta Nihil dan Nihil.

Bank telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian untuk tahun 31 Desember 2023 dan 2022. Bank tidak menjaminkan apapun atas pinjaman ini.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Bank mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan limit Rp500.000. Jangka waktu kredit selama 2 (dua) tahun dari tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan 28 Desember 2025 dengan tingkat suku bunga pinjaman adalah JIBOR 3M + 0.65%.

Selama masa pinjaman, Bank memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar OJK selambat-lambat 180 hari setelah tanggal penutupan buku.

Bank mendapatkan fasilitas pinjaman untuk tujuan umum Bank. Persyaratan-persyaratan penting (financial covenants) dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:

- Menjaga Capital Adequacy Ratio (CAR) minimal sebesar 14.00%;
- Menjaga rasio maksimum Nett Non Performing Loan (NPL) sebesar 4.00%;
- Mematuhi hukum dan peraturan dari Bank Indonesia dan/atau OJK atau institusi lainnya yang mengawasi debitur.

Jumlah penerimaan dana dan pembayaran pembiayaan PT Bank Maybank Indonesia Tbk pada 31 Desember 2023 dan 2022 berturut-turut adalah sebesar Rp500.000 dan Nihil serta Nihil dan Nihil.

Bank telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian untuk tahun 31 Desember 2023 dan 2022. Bank tidak menjaminkan apapun atas pinjaman ini.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

During the borrowing period, the Bank is required to provide audited financial statement no later than 180 days after the closing date.

The significant requirements (financial covenants) in the Bank's loan agreement include the following:

- Capital Adequacy Ratio (CAR) minimum of 14.00%;*
- Gross Non-Performing Loan (NPL) ratio maximum of 5.00%;*
- Net income for the current year with positive numbers*

The total receipts and payments of PT Bank BTPN Tbk on December 31, 2023 and 2022 were Rp1.000.000, and Nil, and Nil, and Nil, respectively.

The Bank has complied with all of the existing terms of the fund borrowing agreement as of December 31, 2023 and 2022. The Bank does not provide any collateral for this loan.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

The Bank received Term Loan from PT Bank Maybank Indonesia Tbk with a plafond Rp500.000. The Term Loan has period 2 (two) years from December 28, 2023 until December 28, 2025 with interest rate is JIBOR 3M + 0.65%.

During the borrowing period, the Bank is required to provide audited financial statement no later than 180 days after the closing date.

The Bank received Term Loan facility to meet general purpose of Bank needs. The significant requirements (financial covenants) in the Bank's loan agreement include the following:

- Capital Adequacy Ratio (CAR) minimum of 14.00%;*
- Nett Non-Performing Loan (NPL) ratio maximum of 4.00%;*
- Comply with laws and regulations from Bank Indonesia and/or OJK or other institutions that supervise debtors.*

The total receipts and payments of PT Bank Maybank Indonesia Tbk on December 31, 2023 and 2022 were Rp500.000 and Nil and Nil and Nil, respectively.

The Bank has complied with all of the existing terms of the fund borrowing agreement as of December 31, 2023 and 2022. The Bank does not provide any collateral for this loan.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Seluruh fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh Bank bertujuan untuk melakukan pengembangan ekspansi kredit dan menjaga likuiditas Bank.

All borrowings facilities owned by the Bank aim to develop credit expansion and maintain the Bank's liquidity.

25. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

25. Estimated Losses on Commitments and Contingencies

a. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

a. Estimated losses on commitments and contingencies

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Rupiah			Rupiah
Fasilitas kredit yang belum digunakan	13,043	9,864	<i>Unused loan facility</i>
Bank garansi	88	883	<i>Bank guarantee</i>
Total	13,131	10,747	Total

b. Perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

b. Movements in the estimated losses on commitments and contingencies

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal	10,747	22,794	<i>Beginning balance</i>
Penyisihan selama tahun berjalan	6,506	1	<i>Provision during the year</i>
Pembalikan selama tahun berjalan	(4,122)	(12,048)	<i>Reversal during the year</i>
Saldo akhir	13,131	10,747	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa jumlah estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the above estimated losses on commitments and contingencies are adequate.

26. Pajak Penghasilan

26. Income Tax

a. Utang pajak

a. Taxes payable

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Bank			Bank
Pajak penghasilan badan (Pasal 29)	29,675	87,764	<i>Corporate Income tax (Article 29)</i>
Pajak penghasilan badan (Pasal 25)	22,435	31,699	<i>Corporate Income tax (Article 25)</i>
Pajak penghasilan			<i>Income tax</i>
Pasal 21	6,165	5,784	<i>Article 21</i>
Pasal 4(2) dan 23	14,827	8,093	<i>Article 4(2) and 23</i>
	<u>73,102</u>	<u>133,340</u>	
Entitas anak			Subsidiary
Pajak penghasilan badan	64	705	<i>Corporate Income tax (Article 29)</i>
Pajak penghasilan			<i>Income tax</i>
Pasal 21	2,566	361	<i>Article 21</i>
Pasal 4(2) dan 23	6,427	4,941	<i>Article 4(2) and 23</i>
	<u>9,057</u>	<u>6,007</u>	
Total	82,159	139,347	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

b. Beban (manfaat) pajak

b. Tax expense (benefit)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Bank			Bank
Pajak kini	378,448	563,416	Current tax
Pajak tangguhan	50,163	4,920	Deferred tax
	<u>428,611</u>	<u>568,336</u>	
Entitas anak			Subsidiary
Pajak kini	13,913	823	Current tax
Pajak tangguhan	2,666	21,177	Deferred tax
	<u>16,579</u>	<u>22,000</u>	
Neto	<u>445,190</u>	<u>590,336</u>	Net

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak dan beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the tax expense computed by applying the applicable tax rate on the income before tax expense and the tax expense shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Laba sebelum beban pajak	2,126,367	2,835,618	<i>Income before tax expense</i>
Laba sebelum beban pajak entitas anak	38,684	(43,645)	<i>Income before tax expense subsidiaries</i>
Transaksi eliminasi	(20,172)	-	<i>Elimination transaction</i>
Laba sebelum beban pajak (Bank)	<u>2,144,879</u>	<u>2,791,973</u>	<i>Income before tax expense (Bank only)</i>
Pajak dihitung pada tarif pajak yang berlaku (19%)	407,527	530,475	<i>Tax expense calculated at prevailing tax rate (19%)</i>
Pengaruh beban yang tidak dapat dikurangkan	(11,371)	37,861	<i>Non-deductible expenses</i>
Manfaat (beban) pajak entitas anak	16,579	22,000	<i>Tax benefit (expense) of subsidiaries</i>
Dampak penyesuaian pajak tangguhan	32,455	-	<i>Impact of deferred tax adjustment</i>
Beban pajak - neto	<u>445,190</u>	<u>590,336</u>	Tax expense - net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak, adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income, as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Laba sebelum beban pajak (Bank)	2,144,879	2,791,973	<i>Income before tax expense (Bank only)</i>
Beda waktu			<i>Timing differences</i>
			<i>Reversal of allowance for loan losses</i>
Pembalikan kerugian kredit	(39,977)	(103,063)	<i>Gratuity</i>
Penghargaan kerja	13,078	3,584	<i>Provision for Corporate Social Responsibility</i>
Penyisihan beban <i>Corporate Social Responsibility</i>	(31,711)	13,085	<i>Provision for defined employee benefits</i>
Penyisihan beban imbalan kerja pasti	4,688	71,769	
Pembalikan kerugian aset nonproduktif dan aset produktif selain kredit yang diberikan	(6,566)	11,694	<i>Reversal for possible losses on non-earning assets earning assets other than loans</i>
Kerugian (keuntungan) dari perubahan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(59,115)	(22,962)	<i>Loss (gain) from financial assets at fair value through profit or loss</i>
Aset hak guna dan liabilitas sewa	26,404	-	<i>Right of use assets and lease liability</i>
	<u>(93,199)</u>	<u>(25,893)</u>	
Beda tetap			<i>Permanent differences</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	(59,850)	199,265	<i>Non-deductible expenses</i>
Laba kena pajak	<u>1,991,830</u>	<u>2,965,345</u>	<i>Taxable income</i>
Beban pajak penghasilan badan			<i>Corporate income tax expense</i>
2023: 19% x Rp1.991.830	378,448	-	<i>2023: 19% x Rp1.991.830</i>
2022: 19% x Rp2.965.345	-	563,416	<i>2022: 19% x Rp2.965.345</i>
Dikurangi pajak dibayar dimuka	<u>(348,773)</u>	<u>(475,652)</u>	<i>Less prepaid tax</i>
Utang pajak penghasilan	<u>29,675</u>	<u>87,764</u>	<i>Corporate income tax payable</i>

Bank telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tahun 2022 sesuai dengan prinsip *self assessment* pada Bulan April 2023.

The Bank has submitted the Annual Corporate Income Tax Return for 2022 according to the self assessment principle in April 2023.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi digunakan untuk menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Taxable income from the reconciliation is used as basis for preparing annual corporate income tax (SPT) return for the year ended December 31, 2023.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)**

c. Aset (liabilitas) pajak tangguhan – neto
Perhitungan manfaat (beban) pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

c. Deferred tax assets (liabilities) – net
The computation of deferred tax benefit (expense) deferred tax assets are detailed below:

	31 Desember 2022/ December 31, 2022		31 Desember 2022/ December 31, 2022		31 Desember/ December 31	
	1 Januari/ January 1	Penyesuaian pajak tangguhan ke laba rugi/ Adjustment on deferred tax to profit or loss	Penyesuaian pajak tangguhan ke penghasilan komprehensif lain/ Adjustment on deferred tax to OCI	Diakui pada laporan laba rugi/ Recognized in statement of profit or loss		
Entitas Induk						Parent Entity
Penyisihan beban Corporate Social Responsibility	26,406	--	--	(6,025)	--	Provision for Corporate Social Responsibility
Penyisihan liabilitas imbalan kerja pasti	90,178	--	(38,395)	891	(198)	Provision for defined employee benefit liability
Penyisihan kerugian kredit	(48,740)	--	--	(7,596)	--	Provision for loan losses
Perubahan nilai wajar surat berharga yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain	97,447	--	--	--	(26,643)	Changes in fair value of marketable securities measured at fair value through other comprehensive income
Perubahan nilai wajar surat berharga yang diukur melalui laba rugi	1,705	--	--	(11,232)	--	Changes in fair value of marketable securities measured at fair value through profit or loss
Pencadangan penghargaan direksi	9,636	--	--	2,485	--	Gratuity
Penyisihan kerugian aset nonproduktif dan aset produktif selain dari kredit yang diberikan	(180)	--	--	(1,248)	--	Provision for losses on non-earning assets and earning assets other than loan
Aset hak guna	--	(143,573)	--	29,524	--	Right of use assets
Liabilitas sewa	--	111,118	--	(24,507)	--	Lease liabilities
Entitas Induk	176,452	(32,455)	(38,395)	(17,708)	(26,841)	Parent Entity
Entitas Anak	13,297	--	--	(2,666)	(9,638)	Subsidiary
Aset Pajak Tangguhan - Neto	189,749	(32,455)	(38,395)	(20,374)	(36,479)	Deferred Tax Assets - Net

	31 Desember 2022/ December 31, 2022		31 Desember 2022/ December 31, 2022		31 Desember/ December 31	
	1 Januari/ January 1	Penyesuaian pajak tangguhan/ Adjustment on deferred tax	Diakui pada laporan laba rugi/ Recognized in statement of profit or loss	Diakui pada penghasilan komprehensif lain/ Recognized in other comprehensive income		
Entitas Induk						Parent Entity
Penyisihan beban Corporate Social Responsibility	23,920	--	2,486	--	26,406	Provision for Corporate Social Responsibility
Penyisihan liabilitas imbalan kerja pasti	71,717	--	13,636	4,825	90,178	Provision for defined employee benefit liability
Penyisihan kerugian kredit	(29,161)	--	(19,579)	--	(48,740)	Provision for loan losses
Perubahan nilai wajar surat berharga yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain	(307)	--	--	97,754	97,447	Changes in fair value of marketable securities measured at fair value through other comprehensive income
Perubahan nilai wajar surat berharga yang diukur melalui laba rugi	6,068	--	(4,363)	--	1,705	Changes in fair value of marketable securities measured at fair value through other comprehensive income
Pencadangan penghargaan kerja	8,957	--	679	--	9,636	Gratuity
Penyisihan kerugian aset nonproduktif dan aset produktif selain dari kredit yang diberikan	(2,402)	--	2,222	--	(180)	Provision for losses on non-earning assets and earning assets other than loan
Entitas Induk	78,792	--	(4,919)	102,579	176,452	Parent Entity
Entitas Anak	34,334	--	(21,177)	140	13,297	Subsidiary
Aset Pajak Tangguhan - Neto	113,126	--	(26,096)	102,719	189,749	Deferred Tax Assets - Net

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan dan dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa mendatang.

Management believes that deferred tax assets can be realized and can be compensated against future taxable income.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Atas putusan Pengadilan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung berdasarkan surat Nomor S-3591/PJ.07/2021.

Based on the decision of the Tax Court, the Directorate General of Taxes submitted a Judicial Review to the Supreme Court based on letter Number S-3591/PJ.07/2021.

Pada Tahun 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan surat keputusan Nomor MPK-3663/PAN/2021 yaitu menolak pengajuan peninjauan kembali dari Direktorat Jenderal Pajak.

In 2022, the Supreme Court issued a decision letter Number MPK-3663/PAN/2021, namely refusing a request for review from the Directorate General of Taxes.

27. Bunga yang Masih Harus Dibayar dan Bagi Hasil

27. Interest Payable and Revenue Sharing

	31 Desember/December 31, 2023		31 Desember/December 31, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	
Rupiah					Rupiah
Simpanan nasabah		170,431		158,593	Deposits from customer
Efek utang yang diterbitkan		44,302		45,027	Debt securities issued
Pinjaman yang diterima		33,489		32,584	Borrowings
Bagi hasil syariah		17,735		15,589	Sharia profit sharing
Simpanan dari bank lain		1,215		2,307	Deposits from other banks
		<u>267,172</u>		<u>254,100</u>	
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
Simpanan nasabah	1,170,294	<u>18,019</u>	3,859	<u>60</u>	Deposits from customer
Total		<u>285,191</u>		<u>254,160</u>	Total

28. Liabilitas Lain-Lain

28. Other Liabilities

	31 Desember/December 31, 2023		31 Desember/December 31, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	
Rupiah					Rupiah
Jasa produksi		341,049		441,819	Employee bonus
Setoran jaminan		93,673		84,337	Guarantee deposits
Dana Corporate Social Responsibility		106,377		138,977	Corporate Social Responsibility fund
Provisi dan komisi diterima dimuka		16,838		19,264	Unearned provisions and commission
Penghargaan kerja		63,804		50,726	Gratuity
Liabilitas sewa		512,507		448,901	Lease liabilities
Lain-lain		93,841		162,509	Others
		<u>1,228,089</u>		<u>1,346,533</u>	
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
Setoran jaminan	92,015	1,417	92,015	1,432	Guarantee deposits
Lain-lain	110	<u>2</u>	-	-	Others
		<u>1,419</u>		<u>389,579</u>	
Total		<u>1,229,508</u>		<u>1,347,965</u>	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Lain-lain terutama terdiri dari rekening titipan,
rekening dalam penyelesaian, dan titipan THR.

Others mainly consist of entrusted account,
accounts in process, and religious holiday
allowance.

29. Dana Syirkah Temporer

29. Temporary Syirkah Funds

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

a. By type and currency

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak-pihak berelasi (Catatan 43)			Related parties (Note 43)
Rupiah			Rupiah
Bukan bank			Non - bank
Giro Mudharabah	1,740	3,176	Mudharabah current savings
Tabungan mudharabah	3,906	2,847	Mudharabah savings
Deposito mudharabah berjangka	3,670	1,125	Mudharabah time deposits
	<u>9,316</u>	<u>7,148</u>	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Bukan bank			Non - bank
Giro mudharabah	1,428,716	820,450	Mudharabah current account
Tabungan mudharabah	1,602,938	1,654,435	Mudharabah savings
Deposito mudharabah berjangka	6,141,126	5,841,563	Mudharabah time deposits
	<u>9,172,780</u>	<u>8,316,448</u>	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Bank			Bank
Giro mudharabah	14,261	10,273	Mudharabah current account
Tabungan mudharabah	13,269	14,434	Mudharabah savings
Deposito mudharabah berjangka	57,742	26,121	Mudharabah time deposits
	<u>85,272</u>	<u>50,828</u>	
Total	<u>9,267,368</u>	<u>8,374,424</u>	Total

b. Rincian deposito berjangka mudharabah
berdasarkan jangka waktu

b. Details of mudharabah time deposits by term

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Rupiah			Rupiah
Bukan bank			Non - bank
1 bulan	3,693,701	3,782,198	1 month
3 bulan	1,406,055	1,299,598	3 months
6 bulan	714,269	359,930	6 months
12 bulan	309,600	380,615	12 months
Lebih dari 12 bulan	21,171	20,346	More than 12 months
	<u>6,144,796</u>	<u>5,842,687</u>	
Bank			Bank
1 bulan	17,092	18,914	1 month
3 bulan	26,000	3,000	3 months
6 bulan	4,500	1,000	6 months
12 bulan	9,850	3,207	12 months
Lebih dari 12 bulan	300	-	More than 12 months
	<u>57,742</u>	<u>26,121</u>	
Total	<u>6,202,538</u>	<u>5,868,808</u>	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

c. Tingkat bagi hasil deposito berjangka mudharabah
Deposito berjangka mudharabah merupakan
investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan
bagi hasil dari pendapatan BJBS atas penggunaan
dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan
disetujui sebelumnya.

Tingkat setara bagi hasil per tahun untuk deposito
berjangka mudharabah adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
1 bulan	3.06%	2.71%
3 bulan	3.06%	2.71%
6 bulan	3.26%	2.89%
12 bulan	3.26%	2.89%
Lebih dari 12 bulan	3.26%	2.89%

c. *Profit sharing rate from mudharabah time deposits
Mudharabah time deposits are entitled to receive a
share in the income derived by the BJBS from the
use of such funds based on a pre-determined ratio.*

*The annual profit sharing rate for mudharabah time
deposits are as follows:*

1 month
3 months
6 months
12 months
More than 12 months

30. Modal Saham

30. Share Capital

Pemegang Saham	31 Desember/December 31, 2023			31 Desember/December 31, 2022		
	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total dalam Rupiah/ Amount in Rupiah	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total dalam Rupiah/ Amount in Rupiah
A PEMERINTAH DAERAH						
2 Pemerintah Kota & Kab. se-Jawa Barat (lanjutan)						
Kabupaten Sukabumi						
Saham Seri A	86,889,260		21,722	86,889,260		21,722
Saham Seri B	6,028,743		1,507	6,028,743		1,507
Total Kabupaten Sukabumi	92,918,003	0.88%	23,229	92,918,003	0.88%	23,229
Kabupaten Subang						
Saham Seri A	44,937,610		11,234	44,937,610		11,234
Saham Seri B	-		-	-		-
Total Kabupaten Subang	44,937,610	0.43%	11,234	44,937,610	0.43%	11,234
Kabupaten Indramayu						
Saham Seri A	87,986,270		21,997	87,986,270		21,997
Saham Seri B	7,380,073		1,845	7,380,073		1,845
Total Kabupaten Indramayu	95,366,343	0.91%	23,842	95,366,343	0.91%	23,842
Kabupaten Bekasi						
Saham Seri A	73,550,504		18,388	73,550,504		18,388
Saham Seri B	5,103,243		1,276	5,103,243		1,276
Total Kabupaten Bekasi	78,653,747	0.75%	19,664	78,653,747	0.75%	19,664
Kabupaten Sumedang						
Saham Seri A	46,052,684		11,513	46,052,684		11,513
Saham Seri B	3,195,329		799	3,195,329		799
Total Kabupaten Sumedang	49,248,013	0.47%	12,312	49,248,013	0.47%	12,312
Kabupaten Bogor						
Saham Seri A	202,523,232		50,631	202,523,232		50,631
Saham Seri B	14,051,915		3,513	14,051,915		3,513
Total Kabupaten Bogor	216,575,147	2.06%	54,144	216,575,147	2.06%	54,144
Kabupaten Cianjur						
Saham Seri A	102,416,760		25,604	102,416,760		25,604
Saham Seri B	-		-	-		-
Total Kabupaten Cianjur	102,416,760	0.97%	25,604	102,416,760	0.97%	25,604
Kabupaten Kuningan						
Saham Seri A	28,797,110		7,199	28,797,110		7,199
Saham Seri B	1,845,018		461	1,845,018		461
Total Kabupaten Kuningan	30,642,128	0.29%	7,660	30,642,128	0.29%	7,660
Kabupaten Majalengka						
Saham Seri A	35,462,669		8,866	35,462,669		8,866
Saham Seri B	7,380,073		1,845	7,380,073		1,845
Total Kabupaten Majalengka	42,842,742	0.41%	10,711	42,842,742	0.41%	10,711
Kabupaten Garut						
Saham Seri A	26,366,698		6,592	26,366,698		6,592
Saham Seri B	4,428,044		1,107	4,428,044		1,107
Total Kabupaten Garut	30,794,742	0.29%	7,699	30,794,742	0.29%	7,699
Kabupaten Purwakarta						
Saham Seri A	51,219,171		12,805	51,219,171		12,805
Saham Seri B	5,904,059		1,476	5,904,059		1,476
Total Kabupaten Purwakarta	57,123,230	0.54%	14,281	57,123,230	0.54%	14,281
Kabupaten Bandung Barat						
Saham Seri A	5,263,157		1,316	5,263,157		1,316
Saham Seri B	7,380,073		1,845	7,380,073		1,845
Total Kabupaten Bandung Barat	12,643,230	0.12%	3,161	12,643,230	0.12%	3,161
Kabupaten Pangandaran						
Saham Seri A	-		-	-		-
Saham Seri B	2,656,826		664	2,656,826		664
Total Kabupaten Pangandaran	2,656,826	0.03%	664	2,656,826	0.03%	664

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

31 Desember/December 31, 2023				31 Desember/December 31, 2022			
Pemegang Saham	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total dalam Rupiah/ Amount in Rupiah	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total dalam Rupiah/ Amount in Rupiah	
A PEMERINTAH DAERAH							
3 Pemerintah Provinsi Banten							
Saham Seri A	520,589,856		130,147	520,589,856		130,147	
Saham Seri B	-		-	-		-	
Total Provinsi Banten	520,589,856	4.95%	130,147	520,589,856	4.95%	130,147	
4 Pemerintah Kota & Kab. se-Banten							
Kota Tangerang							
Saham Seri A	125,117,942		31,279	125,117,942		31,279	
Saham Seri B	8,681,210		2,170	8,681,210		2,170	
Total Kota Tangerang	133,799,152	1.27%	33,449	133,799,152	1.27%	33,449	
Kota Cilegon							
Saham Seri A	60,631,578		15,158	60,631,578		15,158	
Saham Seri B	4,059,041		1,015	4,059,041		1,015	
Total Kota Cilegon	64,690,619	0.61%	16,173	64,690,619	0.61%	16,173	
Kota Tangerang Selatan							
Saham Seri A	-		-	-		-	
Saham Seri B	7,380,073		1,845	7,380,073		1,845	
Total Kota Tangerang Selatan	7,380,073	0.07%	1,845	7,380,073	0.07%	1,845	
Kota Serang							
Saham Seri A	-		-	-		-	
Saham Seri B	7,380,073		1,845	7,380,073		1,845	
Total Kota Serang	7,380,073	0.07%	1,845	7,380,073	0.07%	1,845	
Kabupaten Serang							
Saham Seri A	151,092,304		37,773	151,092,304		37,773	
Saham Seri B	10,332,103		2,583	10,332,103		2,583	
Total Kabupaten Serang	161,424,407	1.53%	40,356	161,424,407	1.53%	40,356	
Kabupaten Tangerang							
Saham Seri A	289,306,189		72,327	289,306,189		72,327	
Saham Seri B	20,073,282		5,018	20,073,282		5,018	
Total Kabupaten Tangerang	309,379,471	2.94%	77,345	309,379,471	2.94%	77,345	
Kabupaten Lebak							
Saham Seri A	37,586,022		9,397	37,586,022		9,397	
Saham Seri B	2,607,876		652	2,607,876		652	
Total Kabupaten Lebak	40,193,898	0.38%	10,049	40,193,898	0.38%	10,049	
Kabupaten Pandeglang							
Saham Seri A	110,162,524		27,541	110,162,524		27,541	
Saham Seri B	-		-	-		-	
Total Kabupaten Lebak	110,162,524	1.05%	27,541	110,162,524	1.05%	27,541	
B PUBLIK							
Saham Seri A	-		-	-		-	
Saham Seri B	2,572,850,355		643,213	2,572,850,355		643,213	
Total Publik	2,572,850,355	24.45%	643,213	2,572,850,355	24.45%	643,213	
TOTAL							
Saham Seri A	7,414,714,661		1,853,679	7,414,714,661		1,853,679	
Saham Seri B	3,106,729,025		776,682	3,106,729,025		776,682	
Total	10,521,443,686		2,630,361	10,521,443,686		2,630,361	

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saham Seri A khusus dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota dan kabupaten sedangkan saham Seri B dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan, Masyarakat dan Pemerintah.

Saham Seri A memiliki hak khusus dalam kuorum kehadiran dan persetujuan pada agenda Rapat Umum Pemegang Saham tertentu, yaitu :

- 1) pengangkatan, pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris;
- 2) perubahan Anggaran Dasar, pengeluaran Efek bersifat Ekuitas atau perubahan Modal ditempatkan dan disetor;
- 3) penyetoran saham dalam bentuk benda lain uang, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud; dan
- 4) penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan serta pengajuan permohonan agar Bank dinyatakan pailit dan pembubaran Bank

Share capital as of December 31, 2023 and 2022, Class A shares are specially owned by the central government, provinces, cities and districts while the Class B shares are owned by board of director, board of commissioner, employee, public, and Government.

Series A Shares have special rights in the quorum of attendance and approval on the agenda of a certain General Meeting of Shareholders, namely:

- 1) appointment, dismissal and approval of the resignation of the Board of Directors and Board of Commissioners;
- 2) amendments to the Articles of Association, issuance of Equity Securities or changes to issued and paid up Capital;
- 3) deposit of shares in the form of other cash objects, both tangible and intangible objects; and
- 4) merger, consolidation, acquisition and separation as well as submission of applications for the Bank to be declared bankrupt and the Bank to be dissolved.

31. Tambahan Modal Disetor

31. Additional Paid in Capital

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rincian tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022, details of additional paid in capital are as follows:

	31 Desember 2023 dan 2022/ December 31, 2023 and 2022	
Masyarakat	987,821	<i>Public</i>
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	404,511	<i>Pemerintah Provinsi Jawa Barat</i>
Pemerintah Kab. Bandung	106,731	<i>Pemerintah Kab. Bandung</i>
Pemerintah Kab. Bogor	30,485	<i>Pemerintah Kab. Bogor</i>
Pemerintah Kab. Serang	22,606	<i>Pemerintah Kab. Serang</i>
Pemerintah Kab. Tangerang	22,181	<i>Pemerintah Kab. Tangerang</i>
Pemerintah Kota Tangerang	18,857	<i>Pemerintah Kota Tangerang</i>
Pemerintah Kab. Bandung Barat	16,839	<i>Pemerintah Kab. Bandung Barat</i>
Pemerintah Kab. Karawang	15,075	<i>Pemerintah Kab. Karawang</i>
Pemerintah Kab. Indramayu	14,653	<i>Pemerintah Kab. Indramayu</i>
Pemerintah Kab. Sukabumi	13,079	<i>Pemerintah Kab. Sukabumi</i>
Pemerintah Kab. Tasikmalaya	11,009	<i>Pemerintah Kab. Tasikmalaya</i>
Pemerintah Kota Tasikmalaya	9,530	<i>Pemerintah Kota Tasikmalaya</i>
Pemerintah Kota Bekasi	9,405	<i>Pemerintah Kota Bekasi</i>
Pemerintah Kota Bandung	8,894	<i>Pemerintah Kota Bandung</i>
Pemerintah Kota Cilegon	8,827	<i>Pemerintah Kota Cilegon</i>
Pemerintah Kab. Cirebon	8,448	<i>Pemerintah Kab. Cirebon</i>
Pemerintah Kab. Pandeglang	8,158	<i>Pemerintah Kab. Pandeglang</i>
Pemerintah Kab. Majalengka	8,155	<i>Pemerintah Kab. Majalengka</i>
Pemerintah Kota Tangerang Selatan	8,155	<i>Pemerintah Kota Tangerang Selatan</i>
Pemerintah Kota Serang	8,155	<i>Pemerintah Kota Serang</i>
Pemerintah Kota Cimahi	7,974	<i>Pemerintah Kota Cimahi</i>
Pemerintah Kota Depok	6,923	<i>Pemerintah Kota Depok</i>
Pemerintah Kab. Purwakarta	6,524	<i>Pemerintah Kab. Purwakarta</i>
Pemerintah Kota Sukabumi	5,801	<i>Pemerintah Kota Sukabumi</i>
Pemerintah Kab. Lebak	5,665	<i>Pemerintah Kab. Lebak</i>
Pemerintah Kab. Bekasi	5,639	<i>Pemerintah Kab. Bekasi</i>
Pemerintah Kab. Garut	4,893	<i>Pemerintah Kab. Garut</i>
Pemerintah Kab. Ciamis	4,485	<i>Pemerintah Kab. Ciamis</i>
Pemerintah Kab. Kuningan	4,166	<i>Pemerintah Kab. Kuningan</i>
Pemerintah Kota Bogor	3,583	<i>Pemerintah Kota Bogor</i>
Pemerintah Kab. Sumedang	3,531	<i>Pemerintah Kab. Sumedang</i>
Pemerintah Kab. Subang	3,318	<i>Pemerintah Kab. Subang</i>
Pemerintah Kota Banjar	3,180	<i>Pemerintah Kota Banjar</i>
Pemerintah Kab. Pangandaran	2,936	<i>Pemerintah Kab. Pangandaran</i>
Pemerintah Kota Cirebon	2,684	<i>Pemerintah Kota Cirebon</i>
Total	1,812,876	Total

32. Obligasi Subordinasi

32. Subordinated Bonds

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Bank Jabar Banten	693,000	693,000	<i>Continuing Subordinated Bonds I of Bank Jabar Banten Phase I</i>
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I Bank Jabar Banten	500,000	500,000	<i>Continuing Subordinated Bonds II of Bank Jabar Banten Phase I</i>
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II Bank Jabar Banten	500,000	500,000	<i>Continuing Subordinated Bonds II of Bank Jabar Banten Phase II</i>
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Bank Jabar Banten	1,000,000	1,000,000	<i>Continuing Subordinated Bonds III of Bank Jabar Banten Phase I</i>
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap II Bank Jabar Banten	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>	<i>Continuing Subordinated Bonds III of Bank Jabar Banten Phase II</i>
	<u>3,693,000</u>	<u>3,693,000</u>	
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	<u>(14,151)</u>	<u>(13,837)</u>	<i>Unamortized bonds issuance cost</i>
Total	<u>3,678,849</u>	<u>3,679,163</u>	Total

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Bank Jabar Banten terdiri dari Seri B dengan nilai nominal Rp693.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,90% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2024.

Continuing Subordinated Bonds I of Bank Jabar Banten Bonds Phase I consisted of Series B with nominal value of Rp693,000 with fixed interest rate of 9.90% per annum which is payable every three months with a seven-year term; and are due on December 6, 2024.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I Bank Jabar Banten terdiri dari:

- 1) Seri A dengan nilai nominal Rp132.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8,60% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2025;
- 2) Seri B dengan nilai nominal Rp368.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,35% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2027.

Continuing Subordinated Bonds II of Bank Jabar Banten Bonds Phase I consisted of:

- 1) *Series A with nominal value of Rp132,000 with fixed interest rate of 8.60% per annum which is payable every three months with a five-years term and are due on March 3, 2025;*
- 2) *Series B with nominal value of Rp368,000 with fixed interest rate of 9.35% per annum which is payable every three months with a seven-year term and are due on March 3, 2027.*

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II Bank Jabar Banten terdiri dari:

- 1) Seri A dengan nilai nominal Rp162.580 dengan suku bunga tetap sebesar 8,50% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 November 2025;
- 2) Seri B dengan nilai nominal Rp337.420 dengan suku bunga tetap sebesar 9,00% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 November 2027.

Continuing Subordinated Bonds II of Bank Jabar Banten Bonds Phase II consisted of:

- 1) *Series A with nominal value of Rp162,580 with fixed interest rate of 8.50% per annum which is payable every three months with a five-year term and are due on November 17, 2025;*
- 2) *Series B with nominal value of Rp337,420 with fixed interest rate of 9.00% per annum which is payable every three months with a seven-year term and are due on November 17, 2027.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I Bank Jabar Banten terdiri dari:

- 1) Seri A dengan nilai nominal Rp379.000 dengan suku bunga tetap sebesar 7,85% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2026;
- 2) Seri B dengan nilai nominal Rp621.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8,60% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2028;

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap II Bank Jabar Banten terdiri dari:

- 1) Seri A dengan nilai nominal Rp399.910 dengan suku bunga tetap sebesar 7,85% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2027;
- 2) Seri B dengan nilai nominal Rp600.090 dengan suku bunga tetap sebesar 8,60% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2029.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, peringkat obligasi subordinasi berkelanjutan ini menurut Pefindo adalah idA+ dan idA+.

Selama jangka waktu obligasi tersebut di atas, tanpa ijin tertulis dari wali amanat, Bank tidak diperkenankan untuk:

- 1) Menerbitkan obligasi atau instrumen utang lainnya yang sejenis yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan pembayaran didahulukan dari efek utang, kecuali pengeluaran obligasi atau instrumen utang lain yang sejenis yang tidak mempunyai jaminan khusus; maka Bank tidak memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat, namun cukup menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada wali amanat, segera setelah Bank mempunyai rencana untuk mengeluarkan obligasi atau instrumen utang lain yang sejenis tersebut;
- 2) Mengurangi modal dasar dan modal disetor;
- 3) Melakukan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Bank, atau yang mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Bank, atau mengizinkan entitas anak (bila ada) untuk melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya entitas anak (bila ada) atau yang mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha entitas anak (bila ada), kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Continuing Subordinated Bonds III of Bank Jabar Banten Bonds Phase I consisted of:

- 1) *Series A with nominal value of Rp379,000 with fixed interest rate of 7.85% per annum which is payable every three months; with a five-year term; and are due on July 15, 2026;*
- 2) *Series B with nominal value of Rp621,000 with fixed interest rate of 8.60% per annum which is payable every three months; with a seven-year term; and are due on July 15, 2028.*

Continuing Subordinated Bonds III of Bank Jabar Banten Bonds Phase II consisted of:

- 1) *Series A with nominal value of Rp399,910 with fixed interest rate of 7.85% per annum which is payable every three months; with a five-year term; and are due on June 9, 2027;*
- 2) *Series A with nominal value of Rp600,090 with fixed interest rate of 8.60% per annum which is payable every three months; with a seven-year term; and are due on June 9, 2029.*

As of December 31, 2023 and 2022, the rating of the subordinated bonds based on Pefindo was idA+ and idA+.

During the term of the above bonds, without the written permission of the trustee, the Bank is not allowed to:

- 1) *Issue bonds or other similar debt instruments which have a higher rank than the debt securities issued and whose payments are prioritized over the debt securities issued, except for the issue of bonds where the collateral is not bound under the existing trust agreements; except for the issue of bonds or other similar debt instruments which do not have specific collateral, then the Bank does not need written permission from the trustee, the Bank only required to submit written announcement to the trustee, right after the Bank's plan to issue the bonds or other similar debt instruments;*
- 2) *Reduce the authorized capital and paid-up capital;*
- 3) *Perform any merger, consolidation or acquisition with other companies which causes the liquidation of the Bank, or has a negative impact on the continuity of the Bank's business, or to allow subsidiaries (if any) to perform any merger, consolidation, and/or acquisition with other companies which would cause the liquidation of the subsidiary (if any), or have a negative impact on the continuity of the subsidiary's business (if any), except if it is conducted by the following criteria:*

- i. Semua syarat dan kondisi obligasi dalam perjanjian perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Bank bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran obligasi dan perusahaan penerus tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang perbankan; atau
- ii. Disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- 4) Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap milik Bank kepada pihak manapun yang dalam satu tahun berjalan melebihi 50% dari seluruh aset tetap milik Bank berdasarkan laporan keuangan terakhir yang diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan;
- 5) Melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Bank atau setidaknya tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Bank dari pihak ketiga yang bukan terafiliasi dalam transaksi yang lazim
- i. All requirements and conditions of the bonds in the trustee agreement and other related documents are still valid and completely bind the surviving company, and in the case where the Bank is not a surviving company, then all obligations related to the bond have been transferred legally to the surviving company, and the surviving company have adequate assets and capability to guarantee the payment of the bond and one of the surviving company's business line is engaged in banking industry; or
- ii. Is required by the prevailing law in Indonesia;
- 4) Sell or transfer the Bank's fixed assets to other parties which in one year exceed 50% of all fixed assets owned by the Bank based on the last audited financial statements, in one or combined transaction, in 1 (one) year;
- 5) Conduct transactions with affiliated parties, except if the transaction is performed with terms and conditions which bring benefits to the Bank or at a minimum, similar to the terms and conditions of transactions conducted with third parties which are affiliated in common transactions

33. Penggunaan Laba

Penggunaan laba tahun buku 2022 ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 4 April 2023 sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Notaris No. 4 oleh R. Tenny Suwarman, SH.

Berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, penggunaan laba tahun 2022 dan 2021 ditetapkan sebagai berikut:

Laba tahun berjalan/Income for the year			
31 Desember/December 31,			
2022	2021		
Dividen	1,100,017	1,042,780	Dividend
Cadangan umum	685	971,495	General reserve

Jasa produksi dan beban *Corporate Social Responsibility* dibukukan sebagai beban pada laba rugi tahun berjalan.

33. Distribution of Income

Income distribution of the year 2022 was made based on the General Shareholders' Meeting dated April 4, 2023 as stated in Notarial Deed No. 4 of R. Tenny Suwarman, SH.

Based on the above General Shareholders' Meeting, the distributions of income in 2022 and 2021, were as follows:

Employee bonus and Corporate Social Responsibility expenses are recorded as expense in the current year statement of profit.

34. Pendapatan Bunga dan Syariah

34. Interest and Sharia Income

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pendapatan Bunga			Interest Income
Rupiah			Rupiah
Kredit yang diberikan	11,525,355	11,020,502	Loans
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	258,162	435,552	Placements with Bank Indonesia and other banks
Giro pada Bank Indonesia	81,444	63,248	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1,484	1,690	Current accounts with other banks
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	23,553	16,499	Bills and other receivables
Nilai wajar melalui laba rugi			Fair value through profit or loss
Surat berharga	120,071	164,730	Marketable securities
Biaya perolehan yang diamortisasi			At amortized cost
Surat berharga	271,793	648,024	Marketable securities
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			Fair value through other comprehensive income
Surat berharga	955,632	440,920	Marketable securities
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Kredit yang diberikan	17,254	5,839	Loans
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	23,929	13,532	Placements with Bank Indonesia and other banks
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	8,429	5,546	Bills and other receivables
	13,287,106	12,816,082	
Pendapatan syariah			Sharia income
Rupiah			Rupiah
Syariah			Sharia
Margin	460,359	436,167	Margin
Bagi Hasil	441,534	321,371	Profit Sharing
Pendapatan Sewa Ijarah	14,735	14,929	Ijarah lease income
	916,628	772,467	
Provisi dan Komisi			Provision and Commissions
Provisi dan komisi	34,001	35,228	Provision and commissions
Provisi dan Komisi Syariah			Sharia Provision and Commissions
Provisi dan komisi syariah	20,474	12,197	Sharia provision and commissions
Total	14,258,209	13,635,974	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

35. Beban Bunga dan Bagi Hasil Syariah	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	35. Interest Expense and Sharia Profit Sharing
Beban Bunga			Interest Expense
Rupiah			Rupiah
Simpanan nasabah	4,278,974	3,112,534	Deposits from customers
Pinjaman yang diterima	1,032,090	675,203	Borrowings
Efek utang yang diterbitkan	542,387	530,765	Debt securities issued
Premi penjaminan	257,285	264,985	Guarantee premium
Premi asuransi kredit	395,240	249,060	Loan insurance premium
Simpanan dari bank lain	136,187	37,502	Deposits from other banks
Lain-lain	121,178	112,139	Others
	<u>6,763,341</u>	<u>4,982,188</u>	
Mata uang asing			Foreign currencies
Simpanan nasabah	78,657	11,810	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	803	-	Deposits from other banks
	<u>79,460</u>	<u>11,810</u>	
	<u>6,842,801</u>	<u>4,993,998</u>	
Rupiah			Rupiah
Bagi hasil syariah	351,786	233,998	Sharia profit sharing
	<u>351,786</u>	<u>233,998</u>	
Total	<u><u>7,194,587</u></u>	<u><u>5,227,996</u></u>	Total
36. Pendapatan Operasional Lainnya			36. Other Operating Income
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan			Non-loan related provision and commissions
Rupiah			Rupiah
Provisi dan komisi	1,157,083	1,013,852	Provision and commissions
Fee komitmen	33,438	34,302	Commitment fees
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Provisi dan komisi	5,910	2,960	Provision and commissions
Fee komitmen	1	1	Commitment fees
	<u>1,196,432</u>	<u>1,051,115</u>	
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga - neto	86,529	49,315	Unrealized gain on changes in fair value of marketable securities - net
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus buku	335,778	365,404	Recoveries from loans written-off
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar penyertaan saham - neto	40,041	-	Unrealized gain on changes in fair value of investment shares - net
Keuntungan transaksi valuta asing - neto	14,095	23,826	Gain from foreign exchange transactions - net
Lain-lain	249,380	150,028	Others
Total	<u><u>1,922,255</u></u>	<u><u>1,639,688</u></u>	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

37. Beban Operasional Lainnya

37. Other Operating Expenses

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Beban umum dan administrasi			<i>General and administrative expenses</i>
Gaji tenaga kerja kontrak	476,348	478,210	<i>Contracted employee salaries</i>
Promosi	425,401	423,031	<i>Promotion</i>
Penyusutan (Catatan 16)	333,579	304,928	<i>Depreciation (Note 16)</i>
Pemeliharaan dan perbaikan	314,466	299,124	<i>Maintenance and repairs</i>
Sewa (Catatan 16)	240,160	251,291	<i>Rental (Note 16)</i>
<i>Fee konsultan</i>	177,793	175,361	<i>Consultant fees</i>
Komunikasi	127,538	127,073	<i>Communication</i>
Alat tulis kantor	65,912	66,414	<i>Office supplies</i>
Biaya listrik, air, dan gas	59,341	58,657	<i>Electricity, water, and gas</i>
Perjalanan dinas	40,584	50,327	<i>Business trip</i>
Premi asuransi	25,183	31,721	<i>Insurance premium</i>
Amortisasi biaya efek-efek yang diterbitkan	5,459	5,472	<i>Amortized debt securities issued</i>
Lain-lain	433,734	473,151	<i>Others</i>
	<u>2,725,498</u>	<u>2,744,760</u>	
Beban tenaga kerja dan tunjangan			<i>Salaries and employee benefits</i>
Gaji dan upah	1,290,257	1,340,756	<i>Salaries and wages</i>
Tunjangan karyawan	914,158	1,399,460	<i>Employee benefits</i>
Jasa produksi	330,762	441,621	<i>Employees bonus</i>
Pendidikan dan pelatihan	45,491	60,330	<i>Education and training</i>
	<u>2,580,668</u>	<u>3,242,167</u>	
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan - neto			<i>Provision for impairment losses on financial and non-financial assets - net</i>
Kredit yang diberikan	659,986	215,128	<i>Loans</i>
Pembiayaan dan piutang syariah	83,878	7,685	<i>Sharia financing and receivable</i>
Giro pada bank lain	(11)	(1)	<i>Current accounts with other banks</i>
Surat berharga	6,101	(661)	<i>Marketable securities</i>
Tagihan akseptasi	(1,855)	753	<i>Acceptances receivables</i>
Penempatan pada bank lain	(1,837)	1,072	<i>Placements with other banks</i>
	<u>746,262</u>	<u>223,976</u>	
Kerugian dari penjualan surat berharga - neto	23,164	92,808	<i>Loss on sale of marketable securities - net</i>
Pembalikan kerugian komitmen dan kontinjensi	(631)	(13,192)	<i>Reversal of losses on commitment and contingencies</i>
Beban lainnya			<i>Others expenses</i>
<i>Corporate Social Responsibility</i>	107,830	138,977	<i>Corporate Social Responsibility</i>
Operasional pemasaran	229,963	240,493	<i>Marketing operations</i>
Iuran	11,915	46,392	<i>Contributions</i>
Lain-lain	412,483	482,427	<i>Others</i>
	<u>762,191</u>	<u>908,289</u>	
Total	<u>6,837,152</u>	<u>7,198,808</u>	Total

38. Pendapatan (Beban) Non-Operasional			38. Non-Operating Income (Expenses)
Akun ini terdiri dari:			<i>This account consists of:</i>
	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pendapatan non-operasional			<i>Non-operating income</i>
Pendapatan dividen	6,818	5,960	<i>Dividend income</i>
Lain-lain	20,742	27,615	<i>Others</i>
	<u>27,560</u>	<u>33,575</u>	
Beban non-operasional			<i>Non-operating expenses</i>
<i>Transfer payment</i>	(19,678)	(24,885)	<i>Transfer payment</i>
Lain-lain	(30,240)	(21,930)	<i>Others</i>
	<u>(49,918)</u>	<u>(46,815)</u>	
Total beban non operasional neto	<u>(22,358)</u>	<u>(13,240)</u>	<i>Total non operating expense - net</i>
<hr/>			
39. Komitmen dan Kontinjensi			39. Commitments and Contingencies
	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Tagihan komitmen			<i>Commitments receivables</i>
Fasilitas pinjaman yang belum di tarik	108,000	108,000	<i>Unused loan facilities</i>
Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif / <i>forward</i>	811,455	3,286,296	<i>Forex positions to be received from spot and derivative/forward transactions</i>
Lainnya	8,265,019	6,997,082	<i>Others</i>
	<u>9,184,474</u>	<u>10,391,378</u>	
Liabilitas komitmen			<i>Commitments liabilities</i>
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	(7,617,674)	5,887,321	<i>Unused loan facilities</i>
Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif / <i>forward</i>	810,136	3,269,175	<i>Forex positions to be received from spot and derivative/forward transactions</i>
<i>Irrevocable letters of credit</i> yang masih berjalan	440,345	553,324	<i>Outstanding irrevocable letters of credit</i>
Lainnya	8,789,656	7,541,741	<i>Others</i>
	<u>2,422,463</u>	<u>17,251,561</u>	
Tagihan kontinjensi			<i>Contingent receivables</i>
Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian (PBDP)	280,401	-	<i>Interest Receivable on non performing assets</i>
Lainnya	(7,888)	8,272	<i>Others</i>
	<u>272,513</u>	<u>8,272</u>	
Liabilitas kontinjensi			<i>Contingent liabilities</i>
Garansi yang diterbitkan	1,075,969	1,183,057	<i>Guarantees issued</i>
	<u>1,075,969</u>	<u>1,183,057</u>	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

40. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

40. Financial Assets and Financial Liabilities

Nilai wajar yang diungkapkan di bawah ini adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

The fair values disclosed below are based on available relevant information at the consolidated statement of financial position date and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after the date of the consolidated statement of financial position.

Tabel di bawah ini menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Bank dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The tables below present the carrying amounts and fair values of the Bank and its subsidiaries financial assets and liabilities as of December 31, 2023 and 2022.

31 Desember/December 31, 2023							Nilai wajar/ Fair value
	Nilai Tercatat/Carrying amount					Total nilai tercatat/ Total carrying amount	Total nilai wajar/ Total fair value
	Kredit yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Fair value through other comprehensive income	Nilai wajar melalui laba rugi/ Fair value through profit or loss	Kewajiban keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortized cost		
Aset Keuangan							Financial Assets
Kas	3,530,074	-	-	-	-	3,530,074	Cash
Giro pada Bank Indonesia	14,879,767	-	-	-	-	14,879,767	Bank Indonesia Current accounts with
Giro pada bank lain	1,196,730	-	-	-	-	1,196,730	other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3,886,693	-	-	-	-	3,886,693	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga	-	5,410,858	18,133,170	7,421,582	-	30,965,610	Marketable securities
Wesel Ekspor dan tagihan lainnya	689,623	-	-	-	-	689,623	Bills and other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan dan piutang syariah***)	122,947,286	-	-	-	-	122,947,286	Loans and sharia financing and receivables***)
Tagihan akseptasi	288,425	-	-	-	-	288,425	Acceptances receivable
Tagihan Derivatif	-	-	-	1,289	-	1,289	Derivatif receivable
Penyertaan saham	-	-	-	188,786	-	188,786	Investments in shares
Bunga yang masih akan diterima	1,367,656	-	-	-	-	1,367,656	Accrued interest income
Aset lain-lain*)	17,871	-	-	-	-	17,871	Other assets*)
	148,804,125	5,410,858	18,133,170	7,611,657	-	179,959,810	Total financial assets
Liabilitas Keuangan							Financial Liabilities
Liabilitas segera	-	-	-	-	2,212,830	2,212,830	Obligations due immediately
Simpanan nasabah dan simpanan nasabah syariah	-	-	-	-	127,426,703	127,426,703	Deposits from customers and deposits from customer sharia
Simpanan dari bank lain	-	-	-	-	2,541,540	2,541,540	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	23	23	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	288,944	288,944	Acceptance liabilities
Efek hutang yang diterbitkan	-	-	-	-	957,991	957,991	Debts securities issued
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	4,244,805	4,244,805	Liabilities from marketable securities sold under agreements to repurchase
Pinjaman yang diterima	-	-	-	-	20,323,823	20,323,823	Borrowings
Bunga yang masih harus dibayar dan bagi hasil	-	-	-	-	285,191	285,191	Accrued interest expense and revenue sharing
Liabilitas lain-lain**)	-	-	-	-	499,943	499,943	Other liabilities**)
Total liabilitas keuangan	-	-	-	-	158,781,793	158,781,793	Total financial liabilities

*) Terdiri dari setoran jaminan dan aset ijarah

*) Consist of security deposits and ijarah assets

**) Terdiri dari setoran jaminan, jasa produksi, dan penghargaan kerja

**) Consist of security deposits, production service, and gratuity

***) Nilai wajar untuk kredit yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah

***) Fair value for loans and sharia financing and receivables

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)**

31 Desember/December 31, 2022							Nilai wajar/ Fair value
Nilai Tercatat/Carrying amount							
Kredit yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain <i>Fair value through other comprehensive income</i>		Nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Fair value through profit or loss</i>	Kewajiban keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortized cost</i>	Total nilai tercatat/ <i>Total carrying amount</i>	Total nilai wajar/ <i>Total fair value</i>
Aset Keuangan							
Financial Assets							
Kas	3,300,031	-	-	-	-	3,300,031	3,300,031
							<i>Cash</i>
Giro pada Bank Indonesia	13,032,593	-	-	-	-	13,032,593	13,032,593
							<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank lain	1,243,627	-	-	-	-	1,243,627	1,243,627
							<i>Current accounts with other banks</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	7,154,674	-	-	-	-	7,154,674	7,154,674
							<i>Placements with Bank Indonesia and other banks</i>
Surat berharga	-	5,833,631	14,539,512	7,009,175	-	27,382,318	27,382,318
							<i>Marketable securities</i>
Wesel Ekspor dan tagihan lainnya	843,826	-	-	-	-	843,826	843,826
							<i>Bills and other receivables</i>
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	5,468,915	-	-	-	-	5,468,915	5,468,915
							<i>Marketable securities purchased under agreement to resell</i>
Kredit yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah***)	113,963,914	-	-	-	-	113,963,914	113,963,914
							<i>Loans and sharia financing and receivables***)</i>
Tagihan derivatif	-	-	-	17,388	-	17,388	17,388
							<i>Derivative payable</i>
Tagihan akseptasi	225,596	-	-	-	-	225,596	225,596
							<i>Acceptances receivable</i>
Penyertaan saham	-	-	-	140,790	-	140,790	140,790
							<i>Investments in shares</i>
Bunga yang masih akan diterima	1,169,105	-	-	-	-	1,169,105	1,169,105
							<i>Accrued interest income</i>
Aset lain-lain*)	37,185	-	-	-	-	37,185	37,185
							<i>Other assets**)</i>
	146,439,466	5,833,631	14,539,512	7,167,353	-	173,979,962	173,979,962
							Total financial assets
Liabilitas Keuangan							
Financial Liabilities							
Liabilitas segera	-	-	-	-	1,804,558	1,804,558	1,804,558
							<i>Obligations due immediately</i>
Simpanan nasabah dan simpanan nasabah syariah	-	-	-	-	114,379,626	114,379,626	114,379,626
							<i>Deposits from customers and deposits from customer sharia</i>
Simpanan dari bank lain	-	-	-	-	1,881,477	1,881,477	1,881,477
							<i>Deposits from other banks</i>
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	163,983	163,983	163,983
							<i>Acceptance liabilities</i>
Efek hutang yang diterbitkan	-	-	-	-	2,403,547	2,403,547	2,403,547
							<i>Debts securities issued</i>
Pinjaman yang diterima	-	-	-	-	12,161,667	12,161,667	12,161,667
							<i>Borrowings</i>
Bunga yang masih harus dibayar dan bagi hasil	-	-	-	-	168,674	168,674	168,674
							<i>Accrued interest expense and revenue sharing</i>
Liabilitas lain-lain**)	-	-	-	-	576,882	576,882	576,882
							<i>Other liabilities**)</i>
Total liabilitas keuangan	-	-	-	-	133,540,414	133,540,414	133,540,414
							Total financial liabilities

- *) Terdiri dari setoran jaminan & aset ijarah
 **) Terdiri dari setoran jaminan, jasa produksi, dan penghargaan kerja
 ***) Nilai wajar untuk kredit yang diberikan dan pembiayaan

- *) *Consist of security deposits & ijarah assets*
 **) *Consist of security deposits, production service, and gratuity*
 ***) *Fair value for loans and sharia financing and receivables*

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

- (i) Tingkat 1: dikutip dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
 (ii) Tingkat 2: yang melibatkan input selain dari harga pasar aktif yang dikutip yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (seperti harga) atau tidak langsung (turunan dari harga);

The tables below shows the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

- (i) *Level 1: quoted (unadjusted) prices in active markets for identical financial assets or liabilities;*
 (ii) *Level 2: those involving inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices);*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

(iii) Tingkat 3: input untuk aset dan liabilitas yang tidak didasarkan pada data yang dapat diobservasi di pasar (input yang tidak dapat diobservasi).

(iii) *Level 3: those with inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).*

31 Desember/December 31, 2023				
Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	Total	
Aset Keuangan				Financial Assets
Nilai wajar melalui laba rugi				<i>Fair value through profit or loss</i>
Obligasi	2,194,746	-	2,194,746	<i>Bonds</i>
Reksadana	5,226,836	-	5,226,836	<i>Mutual funds</i>
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya				<i>Fair value through other comprehensive income</i>
Obligasi	18,133,170	-	18,133,170	<i>Bonds</i>
Biaya perolehan yang diamortisasi				<i>Amortised cost</i>
Obligasi	5,422,215	-	5,422,215	<i>Bonds</i>
Kredit yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah	110,195,200	13,562,223	1,320,760	<i>Loans and sharia financing and receivables</i>
Tagihan Derivatif	-	1,289	-	<i>Derivative payable</i>
Total Aset Keuangan	141,172,167	13,563,512	1,320,760	156,056,439
				Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Pinjaman yang diterima	-	20,323,823	-	<i>Borrowings</i>
Liabilitas derivatif	-	23	-	<i>Derivatifes payable</i>
Efek hutang yang diterbitkan	-	957,991	-	<i>Debts securities issued</i>
Total Liabilitas Keuangan	-	21,281,837	-	21,281,837
				Total Financial Liabilities
31 Desember/December 31, 2022				
Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	Total	
Aset Keuangan				Financial Assets
Nilai wajar melalui laba rugi				<i>Fair value through profit or loss</i>
Obligasi	1,536,967	-	1,536,967	<i>Bonds</i>
Reksadana	4,859,178	-	4,859,178	<i>Mutual Funds</i>
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya				<i>Fair value through other comprehensive income</i>
Obligasi	15,147,287	-	15,147,287	<i>Bonds</i>
Biaya perolehan yang diamortisasi				<i>Amortised cost</i>
Obligasi	5,844,142	-	5,844,142	<i>Bonds</i>
Kredit yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah	69,453,360	28,938,900	17,363,340	<i>Loans and sharia financing and receivables</i>
Tagihan Derivatif	-	17,388	-	<i>Derivative payable</i>
Total Aset Keuangan	96,840,934	28,956,288	17,363,340	143,160,562
				Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Pinjaman yang diterima	-	17,533,761	-	<i>Borrowings</i>
Liabilitas derivatif	-	2,207	-	<i>Derivatifes payable</i>
Efek hutang yang diterbitkan	-	1,871,461	-	<i>Debts securities issued</i>
Total Liabilitas Keuangan	-	19,407,429	-	19,407,429
				Total Financial Liabilities

(i) Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali kredit yang diberikan, surat-surat berharga, efek utang yang diterbitkan, dan pinjaman yang diterima mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

(i) *The fair values of certain financial assets and liabilities, except for loans, marketable securities, marketable securities issued, and borrowings, approximate their carrying values due to their short-term maturities.*

Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

The estimated fair values of certain financial assets are determined based on discounted cash flows using money market interest rates for instruments with similar credit risk and remaining maturities.

Estimasi nilai wajar terhadap kewajiban keuangan tertentu yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

The estimated fair values of certain financial obligations which are not quoted in an active market are determined based on discounted cash flows using interest rates of instruments with similar remaining maturities.

- (ii) Kredit yang diberikan
Portofolio kredit secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan kredit yang diberikan dengan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan biaya perolehan yang diamortisasi. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima dengan menggunakan suku bunga pasar.

- (ii) *Loans*
The credit portfolio generally consists of loans with floating interest rates and short term loan with fixed interest rate. Loans are stated at amortized cost. The fair value of loans shows the estimated value of discounted future cash flows expected to be received using current market interest rates.

Nilai tercatat dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan pinjaman jangka pendek dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajarnya.

Carrying value of loans with floating interest rates and short-term loans with fixed interest rate are the reasonable estimate of fair values.

- (iii) Surat berharga
Nilai wajar untuk surat-surat berharga biaya perolehan yang diamortisasi ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dengan menggunakan metode penilaian internal.

- (iii) *Marketable securities*
The fair value for marketable securities at amortized cost is determined based on market price or quoted price of broker/dealer. If this information is not available, fair value is estimated using quoted market prices of securities with similar credit maturity and yield characteristics or using internal valuation model.

- (iv) Efek utang yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima
Nilai wajar agregat dihitung berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk sisa periode jatuh temponya.

- (iv) *Debt securities issued and borrowings*
The aggregate fair value is calculated based on discounted cash flow model using current market rate for the remaining period to maturity.

41. Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Jangka Panjang Lainnya

41. Post Employment and Other Long Term Employment Benefits

Bank dan entitas anak memberikan imbalan pasca kerja dan imbalan jangka panjang lainnya kepada para karyawannya yang memenuhi syarat yang terdiri dari program pensiun manfaat pasti, Tunjangan Hari Tua (THT), Penghargaan Masa Kerja (PMK), Masa Persiapan Pensiun (MPP), Cuti Besar dan Kompensasi PKWT.

The Bank and its subsidiaries provides post-employment and long-term benefits to all qualified employees which consist of defined benefit pension plan, Old-age Benefit Plan (THT), Allowance for Gratuity for Services (PMK), Pension Preparation Period (MPP), Grand Leaves and PKWT Compensation.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Program pensiun manfaat pasti Bank untuk karyawan Bank yang diangkat sebelum tahun 2008 dikelola oleh Dana Pensiun Karyawan Bank Jabar, sedangkan untuk karyawan yang diangkat sejak tahun 2008 dikelola oleh DPLK Bank Jabar Banten. Kontribusi pegawai adalah sebesar 5,00% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut dikontribusi oleh Bank.

Program dana pensiun iuran manfaat yang terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.0787/SK/DIR-HCA/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang telah disahkan dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-12/NB.1/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang pengesahan atas peraturan Dana pensiun dari Dana pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.

Program Tunjangan Hari Tua per Juli 2022 dilakukan pengalihan pengelolaan dari YKP bank bjb ke DPLK bank bjb sesuai Berita Acara nomor 0067/HCA-SKE/BA/2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang Penyesuaian Pengelolaan Program Tunjangan Hari Tua. Kontribusi pegawai adalah sebesar 5,00% dari penghasilan dasar pensiun (PhDP) karyawan. Oleh karena itu, sejak tahun 2023, program Tunjangan Hari Tua dicatat bersamaan dengan program Pensiun Manfaat Pasti.

Program Penghargaan Masa Kerja dikelola sendiri oleh Bank dan entitas anak dan diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0117/SK/DIR-HCA/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Penghasilan dan Fasilitas Kepegawaian. Imbalan PMK berupa pembayaran yang jumlahnya sebesar 2 kali penghasilan dan 3 kali penghasilan yang besarnya ditentukan dari *single salary* kepada pegawai dengan masa kerja 15 tahun dan 25 tahun dengan syarat hasil penilaian kinerja dua tahun terakhir berpredikat baik.

Program Masa Persiapan Pensiun dikelola sendiri oleh Bank dan merupakan program imbalan kerja bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama Nomor 148/PKS/DIR-HCA/2021, ketentuan MPP berlaku untuk pegawai yang telah berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih pada tanggal 01 Januari 2018 dan memiliki usia pensiun normal 55 (lima puluh lima) tahun diberikan Fasilitas MPP. Pelaksanaan MPP bagi Pegawai tersebut selama 12 (dua belas) bulan sebelum jatuh tempo usia Pensiun.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

The Bank's defined benefit pension plan for employees registered before 2008, is managed by Dana Pensiun Karyawan Bank Jabar and for new employees registered from 2008 onwards, is managed by DPLK Bank Jabar Banten. The employee's contribution is 5.00% of the employee's pension base salary and the remaining amounts required to fund the plan are contributed by the Bank.

The latest defined benefit pension plan regulation as stipulated in Board of Directors' Decision Letter No.0784/SK/DIR-HCA/2020 dated December 9, 2021 that the Pension Fund Regulation of the Pension Fund of Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten which was approved by the decree of Board of Commissioner of Indonesia Financial Services Authority No. Kep-12/NB.1/2022 dated February 17, 2022 on Approval of the Pension Fund's Regulation of the Pension Fund of the Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.

The Old-age benefit plan as July 2022 has been change the diversion management from YKP bank bjb to DPLK bank bjb according to Minutes number 0067/HCA-SKE/BA/2022 dated July 8, 2022. The employee contribution is 5.00% of the employee's basic retirement income (PhDP). Therefore, starting in 2023, the recording of old-age benefit plan is included in the defined benefit pension plan.

Allowance for Gratuity for Services Program is self-managed by the Bank and its subsidiaries and is based on the latest PMK plan regulation which is stipulated in the Directors' Decision Letter No. 0117/SK/DIR-HCA/2022 dated March 16, 2022 about Operational Standard and Income Management Procedures and Staffing Facilities. The PMK benefit represents a payment amounting to times from single salary and 3 times from single salary of the employee's to employees with working service periods of 15 and 25 years, respectively. The qualifying employee is required to have good results in the performance of evaluation for the last two years.

Pension Preparation Period is self-managed by the Bank and is an employee benefit plan for employees who will enter pension age.

In accordance with the Collective Labor Agreement Number 148/PKS/DIR-HCA/2021, MPP provisions apply to Employees who are 50 (fifty) years of age or more on January 1 2018 and have a normal retirement age of 55 (fifty five) years are given the Facility MPP. Implementation of the MPP for these Employees for 12 (twelve) months before the retirement age is due.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Namun apabila pegawai tersebut memiliki usia pensiun 56 tahun karena menempati jabatan tertentu tidak diberikan fasilitas MPP.

However, if the employee has a retirement age of 56 years due to occupying a certain position, MPP facilities will not be given.

Program Cuti Besar dikelola sendiri oleh Bank dan merupakan program imbalan kerja bagi karyawan untuk penggantian hak cuti besar.

Grand leave program is self-managed by the Bank and is an employee benefit plan for replacement of grand leave rights.

Program Kompensasi PKWT dikelola sendiri oleh Bank dan merupakan program imbalan kerja bagi pegawai PKWT yang telah berakhir masa kontrak kerja.

The PKWT Compensation Program is managed solely by the Bank and is an employee benefit program for PKWT employees whose work contracts have ended.

Perhitungan aktuaria atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja dihitung oleh aktuaria independen (PT Bestama Aktuaria saat ini bernama KKA Enny Diah Awal) untuk tahun 31 Desember 2023 dan 2022 dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Perhitungan aktuaria untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut masing-masing berdasarkan laporan aktuaria 29 Desember 2023 dan 13 Januari 2023.

The actuarial calculation of long-term and post-employment benefit liabilities is calculated by an independent actuarial (PT Bestama Aktuaria currently named KKA Enny Diah Awal) for the year December 31, 2023 and 2022 using the projected unit credit method. The actuarial calculations for the years ended on these dates are based on the actuarial reports dated December 29, 2023 and January 13, 2023, respectively.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

Key assumptions used in the actuarial calculation are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Asumsi ekonomi			<i>Economic assumptions</i>
Tingkat diskonto per tahun			<i>Annual discount rate</i>
Penghargaan Masa Kerja	6.7% - 7.8%	6.0% - 7.1%	<i>Allowance for gratuity for services</i>
Masa Persiapan Pensiun	6.0% - 6.5%	3.4% - 4.2%	<i>Pension preparation period</i>
Cuti Besar	7.3% - 6.8%	4.3% - 5.5%	<i>Grand leaves</i>
Program pensiun	7.1% - 7.4%	7.6% - 7.8%	<i>Pension plan</i>
THT	-	7.5% - 7.8%	<i>Old-age benefit plan</i>
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset			<i>Investment yield of plan asset</i>
Program pensiun	8.20%	8.20%	<i>Pension plan</i>
THT	8.10%	8.10%	<i>Old-age benefit plan</i>
Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun	6.0%	6.0%	<i>Annual salary growth rate</i>
Asumsi lainnya	TMII 2019/ TMII 2019/	TMII 2019/ TMII 2019/	<i>Other assumptions</i>
Tabel mortalitas			<i>Mortality table</i>
Tingkat cacat	0.25% dari TMI III 2019/ 0.25% of TMI III 2019/	0.25% dari TMI III 2019/ 0.25% of TMI III 2019/	<i>Disability rate</i>
Usia pensiun normal	55	55	<i>Normal retirement age</i>
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			<i>Retirement rate per year for ages:</i>
18 - 44 tahun	1.00%	1.00%	18 - 44 years old
45 - 54 tahun	1.00%	1.00%	45 - 54 years old

Status aset (liabilitas) program imbalan kerja pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The employee benefits plan assets (liabilities) status as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

a. Biaya program imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

a. Employee benefits expenses for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

31 Desember 2023/December 31, 2023

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program THT/ THT Benefit Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Biaya jasa kini	(12,279)	-	(70,064)	(82,343)	Current service cost
Biaya bunga	(64,970)	-	(17,049)	(82,019)	Interest cost
Laba aktuarial	-	-	19,751	19,751	Actuarial gain
Biaya jasa lalu	-	-	7,044	7,044	Past service cost
Imbal hasil atas aset program	78,621	-	-	78,621	Return on plan assets
Bunga atas dampak batasan aset	(13,202)	-	-	(13,202)	Interest of the asset ceiling
Total	(11,830)	-	(60,318)	(72,148)	Total

31 Desember 2022/December 31, 2022

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program THT/ THT Benefit Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Biaya jasa kini	(12,939)	(19,191)	(66,590)	(98,720)	Current service cost
Biaya bunga	(65,484)	(25,710)	(9,817)	(101,011)	Interest cost
Laba aktuarial	-	-	339	339	Actuarial gain
Biaya jasa lalu	-	(61,961)	31,388	(30,573)	Past service cost
Imbal hasil atas aset program	79,917	35,094	-	115,011	Return on plan assets
Bunga atas dampak batasan aset	(13,918)	(8,936)	-	(22,854)	Interest of the asset ceiling
Total	(12,424)	(80,704)	(44,680)	(137,808)	Total

- b. Rekonsiliasi atas perubahan aset (liabilitas) imbalan kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- b. Following are the reconciliation of the movements of employee benefit assets (liabilities) during the years:

31 Desember 2023/December 31, 2023

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program THT/ THT Benefit Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo awal	-	-	(291,904)	(291,904)	Beginning balance
Beban tahun berjalan	(11,830)	-	(60,318)	(72,148)	Current year expense
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan kerja - neto	(204)	-	(843)	(1,047)	Reameasurement of employee benefit liability (asset) - net
Pembayaran Imbalan	-	-	59,460	59,460	Actual benefits paid
Kontribusi pemberi kerja	12,034	-	-	12,034	Employer's contribution
Saldo akhir	-	-	(293,605)	(293,605)	Ending balance

31 Desember 2022/December 31, 2022

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program THT/ THT Benefit Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo awal	-	-	(203,356)	(203,356)	Beginning balance
Beban tahun berjalan	(12,424)	(80,704)	(44,680)	(137,808)	Current year expense
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan kerja - neto	1,453	55,883	(81,993)	(24,657)	Reameasurement of employee benefit liability (asset) - net
Pembayaran Imbalan	-	-	38,125	38,125	Actual benefits paid
Kontribusi pemberi kerja	10,971	24,821	-	35,792	Employer's contribution
Saldo akhir	-	-	(291,904)	(291,904)	Ending balance

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada aset yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian karena ketentuan untuk pengakuan aset yang disyaratkan dalam standar akuntansi tidak terpenuhi.

As of December 31, 2023 and 2022, the above assets were not recognized in the consolidated statement of financial position as the assets did not meet the recognition criteria under the accounting standards.

- c. Mutasi nilai kini liabilitas pensiun adalah sebagai berikut:

- c. The movements in the present value of retirement obligation are as follows:

31 Desember 2023/December 31, 2023					
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program THT/ THT Benefit Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo awal	(907,142)	-	(291,904)	(1,199,046)	Beginning balance
Biaya jasa kini	(15,105)	-	(70,064)	(85,169)	Current service cost
Biaya bunga	(64,970)	-	(17,049)	(82,019)	Interest cost
Biaya jasa lalu	-	-	7,044	7,044	Past service cost
Beban pesangon	-	-	6,767	6,767	Annual leave obligation
Pembayaran Imbalan	61,071	-	59,460	120,531	Actual benefits paid
Laba aktuarial pada kewajiban	(28,394)	-	12,141	(16,253)	Actuarial gain on obligation
Saldo akhir	(954,540)	-	(293,605)	(1,248,145)	Ending balance

31 Desember 2022/December 31, 2022					
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program THT/ THT Benefit Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo awal	(892,151)	(598,303)	(203,356)	(1,693,810)	Beginning balance
Biaya jasa kini	(62,729)	(25,520)	(12,289)	(100,538)	Current service cost
Biaya bunga	(18,282)	(30,956)	(64,119)	(113,357)	Interest cost
Biaya jasa lalu	-	(61,961)	31,388	(30,573)	Past service cost
Kuartilment/Penyelesaian	-	-	2,766	2,766	Curtailment
Pembayaran Imbalan	61,051	18,987	38,125	118,163	Actual benefits paid
Laba aktuarial pada kewajiban	4,970	(28,618)	(36,343)	(59,991)	Actuarial gain on obligation
Saldo akhir	(907,141)	(726,371)	(243,828)	(1,877,340)	Ending balance

- d. Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

- d. The movements in the fair value of plan assets are as follows:

31 Desember 2023/December 31, 2023				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program THT/ THT Benefit Plan	Total	
Saldo awal	1,085,550	--	1,085,550	Beginning balance
Hasil yang diharapkan atas aset dana pensiun	78,621	--	78,621	Expected return on plan assets
Kontribusi Bank	14,859	--	14,859	Bank's contribution
Imbalan yang dibayarkan	(61,071)	--	(61,071)	Actual benefits paid
Laba aktuarial pada aset program	862	--	862	Actuarial gain on plan asset
Saldo akhir	1,118,821	--	1,118,821	Ending balance

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

31 Desember 2022/December 31, 2022				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program THT/ THT Benefit Plan	Total	
Saldo awal	1,075,283	794,852	1,870,135	<i>Beginning balance</i>
Hasil yang diharapkan atas aset dana pensiun	79,917	35,094	115,011	<i>Expected return on plan assets</i>
Kontribusi Bank	13,560	36,396	49,956	<i>Bank's contribution</i>
Imbalan yang dibayarkan	(61,051)	(18,987)	(80,038)	<i>Actual benefits paid</i>
Laba aktuarial pada aset program	(22,158)	(120,981)	(143,139)	<i>Actuarial gain on plan asset</i>
Saldo akhir	1,085,551	726,374	1,811,925	<i>Ending balance</i>

e. Pengukuran kembali (aset) liabilitas imbalan kerja neto

e. *Remeasurement of net employee benefit (asset) liabilities*

31 Desember 2023/December 31, 2023					
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program THT/ THT Benefit Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo awal	(69,774)	-	(57,520)	(127,294)	<i>Beginning balance</i>
(Keuntungan) kerugian aktuaris	(28,394)	-	12,141	(16,253)	<i>Actuary (gain) loss</i>
Imbal hasil atas aset program	862	-	-	862	<i>Return on plan assets</i>
Perubahan atas dampak atas aset diluar bunga neto aset/liabilitas	27,328	-	-	27,328	<i>Change in effect of the asset ceiling excluding net interest of asset/liabilities</i>
Saldo akhir	(69,978)	-	(45,379)	(115,357)	<i>Ending balance</i>

31 Desember 2022/December 31, 2022					
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program THT/ THT Benefit Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo awal	(66,492)	(149,707)	32,922	(183,277)	<i>Beginning balance</i>
(Keuntungan) kerugian aktuaris	4,970	(28,618)	(36,558)	(60,206)	<i>Actuary (gain) loss</i>
Imbal hasil atas aset program	(22,158)	(120,981)	-	(143,139)	<i>Return on plan assets</i>
Perubahan atas dampak atas aset diluar bunga neto aset/liabilitas	18,641	205,482	-	224,123	<i>Change in effect of the asset ceiling excluding net interest of asset/liabilities</i>
Saldo akhir	(65,039)	(93,824)	(3,636)	(162,499)	<i>Ending balance</i>

f. Portofolio investasi aset program yang ditempatkan dalam bentuk instrumen keuangan Bank terdiri dari surat berharga negara, *deposit on call*, deposito berjangka, saham, obligasi, unit penyertaan reksadana, efek beragunan aset dari kontrak investasi kolektif beragunan aset, penempatan langsung, tanah dan bangunan.

f. *The asset program's investment portfolio that placed in the form of bank's financial instruments consist of government securities, deposit on call, time deposits, shares of stocks, bonds, mutual funds, asset-backed security, direct placement, land and building.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

g. Sensitivitas dari imbalan kerja terhadap perubahan asumsi aktuarial sebagai berikut:

g. The sensitivity of employee benefit to the changes in actuarial assumptions is as follow:

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Tingkat Diskonto			Discount Rate
Kenaikan 1%	1,013,206	1,510,170	Increase 1%
Penurunan 1%	1,210,039	1,687,725	Decrease 1%
Tingkat Gaji			Salary Rate
Kenaikan 1%	1,152,988	1,564,524	Increase 1%
Penurunan 1%	1,061,521	1,528,650	Decrease 1%

h. Jatuh tempo kewajiban dana manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

h. The maturity of defined benefit plan obligation as of December 31, 2022 and 2021 is as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Dalam waktu 12 bulan berikutnya (periode laporan tahun berikutnya)	174,284	182,925	Within next 12 months (the next annual reporting period)
Antara 2 dan 5 tahun	283,964	350,800	Between 2 and 5 years
Di atas 5 tahun	525,474	881,824	Beyond 5 years
Total	983,722	1,415,549	Total

42. Laba Per Saham Dasar

42. Basic Earnings Per Share

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

Earnings per share are computed by dividing income for the period/year attributable to the equity holders of the parent entity by the weighted average number of outstanding common stock during the year.

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Labanya tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1,778,395	2,304,376	Income for the year attributable to equity holders of the parent entity
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (jumlah penuh)	10,521,443,686	10,521,443,686	Weighted average number of outstanding common stock (full amount)
Labanya per saham dasar (nilai penuh)	169.03	219.02	Basic earnings per share (full amount)

43. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

43. Related Party Transactions

Dalam kegiatan normal usaha, Bank dan entitas anak melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

In the normal course of business, the Bank and its subsidiaries enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

No.	Pihak-pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan istimewa/ <i>Nature of relationship</i>	Transaksi/ <i>Transaction</i>
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat/ <i>The Government of the West Java Province</i>	Pemegang saham pengendali/ <i>Controlling shareholders</i>	a. Giro/Demand deposits b. Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i> c. Kredit yang diberikan/ <i>Loans</i>
2	Manajemen kunci/ <i>Key management personnel</i>	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan/ <i>Relation through control in the Bank's operation</i>	a. Kredit yang diberikan/ <i>Loans</i> b. Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
3	BPR dan PD-LPK/ <i>BPR and PD-LPK</i>	Hubungan kepemilikan melalui pemerintah provinsi dan kabupaten/ <i>Ownership relation through province and regional government</i>	a. Penyertaan saham/ <i>Investment in shares</i> b. Simpanan dari bank lain/ <i>Deposits from other banks</i>
4	PT Asuransi Bangun Askrida	Hubungan kepemilikan melalui pemerintah provinsi dan kabupaten/ <i>Ownership relation through province and regional government</i>	a. Asuransi aset tetap/ <i>Fixed asset Insurance</i>

Tabel berikut menunjukkan jumlah agregat dari transaksi pihak yang berelasi (selain manajemen kunci) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

The following tables show the aggregate amounts of transactions with related parties (except for key management) as of December 31, 2023 and 2022:

	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2023	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2022	
Aset			Assets
Kredit yang diberikan (Catatan 12)	710,248	466,150	<i>Loans receivables (Note 12)</i>
Pembiayaan dan piutang syariah (Catatan 13)	10,881	--	<i>Sharia financing and receivable (Note 13)</i>
Penyertaan saham (Catatan 15)	190,089	142,093	<i>Investment in shares (Note 15)</i>
Total aset dari pihak berelasi	911,218	608,243	Total assets from related parties
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(12,403)	(10,040)	<i>Allowance for impairment losses for related parties</i>
Total aset dari pihak berelasi - neto	898,815	598,203	Total assets from related parties - net
Persentase total aset pihak berelasi terhadap total aset	0.48%	0.33%	Percentage of total assets from related parties to total assets
Liabilitas			Liabilities
Simpanan nasabah dan simpanan nasabah syariah (Catatan 20)	6,401,824	9,884,863	<i>Deposits from customer and deposits from customer - sharia (Note 20)</i>
Simpanan dari bank lain (Catatan 21)	86,755	96,339	<i>Deposits from other banks (Note 21)</i>
Dana syirkah temporer (Catatan 29)	9,316	7,148	<i>Temporary syirkah fund (Note 29)</i>
Total liabilitas dan dana syirkah temporer kepada pihak-pihak berelasi	6,497,895	9,988,350	Total liabilities and temporary syirkah fund to related parties

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Persentase total liabilitas dan dana syirkah temporer pihak berelasi terhadap total liabilitas dan total dana syirkah temporer	3.76%	6.00%	Percentage of total liabilities and temporary syirkah fund to related parties to total liabilities and temporary syirkah fund
Pendapatan bunga dan bagi hasil			Interest income and income from profit sharing
Kredit yang diberikan dan pembiayaan dan piutang syariah (Catatan 34)	47,821	26,866	Loans and sharia financing and receivables (Note 34)
Total pendapatan bunga dan syariah dari pihak berelasi	47,821	26,866	Total interest income and income from sharia from related parties
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan syariah	0.34%	0.20%	Percentage to total interest and sharia income
Beban bunga			Interest expense
Simpanan nasabah, simpanan nasabah syariah, dan dana syirkah temporer (Catatan 35)	365,711	282,771	Deposits from customer, deposits from sharia customer, and temporary syirkah fund (Note 35)
Simpanan dari bank lain (Catatan 35)	1,690	2,665	Deposits from other banks (Note 35)
Total beban bunga dari pihak berelasi	367,401	285,436	Total interest expense from related parties
Persentase terhadap total beban bunga	5.29%	5.46%	Percentage to total interest expense

44. Kepentingan Non-Pengendali

Rincian bagian kepentingan non-pengendali atas aset neto dan laba periode/tahun berjalan entitas anak yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

44. Non-Controlling Interest

Details of non-controlling interests proportionate share in the net assets and income for the period/year of the consolidated subsidiaries are as follows:

	31 Desember/December 31, 2023		31 Desember/December 31, 2022		
	Aset neto/ Net asset	Laba tahun berjalan/ Income for the year	Aset neto/ Net asset	Laba tahun berjalan/ Income for the year	
Entitas anak					Subsidiaries
PT Bank Jabar Banten Syariah	10,528	480	(3,171)	771	PT Bank Jabar Banten Syariah
PT BPR Intan Jabar	(123,169)	(97,630)	(38,021)	(61,452)	PT BPR Intan Jabar
PT Karya Utama Jabar	-	-	26,558	2,020	PT Karya Utama Jabar
PT BJB Sekuritas Jawa Barat	1,782	(68)	1,545	(433)	PT BJB Sekuritas Jawa Barat
Neto	(110,859)	(97,218)	(13,089)	(59,094)	Net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

45. Informasi Segmen Usaha

45. Segment Information

Bank mempertimbangkan jenis usaha sebagai segmen utama dan lokasi geografis sebagai segmen sekunder.

The Bank considers the nature of its business as the primary segment and geographical areas as the secondary segment.

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang utama dari Bank dan entitas anak disajikan dalam tabel di bawah ini:

Information concerning the primary segment of the Bank and its subsidiaries is set out in the table below:

31 Desember/December 31, 2023					
Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Total		
Pendapatan segmen	13,322,032	937,001	(824)	14,258,209	<i>Segment income</i>
Beban segmen	(7,684,649)	(363,064)	853,126	(7,194,587)	<i>Segment expenses</i>
Pendapatan segmen - neto	<u>5,637,383</u>	<u>573,937</u>	<u>852,302</u>	<u>7,063,622</u>	<i>Segment Income - net</i>
Pendapatan operasional lainnya	1,883,579	38,705	(29)	1,922,255	<i>Other operating income</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan nonkeuangan	(703,089)	(63,345)	20,172	(746,262)	<i>Provision for impairment losses on financial and non-financial assets</i>
Pembalikan kerugian komitmen dan kontinjensi	631	-	-	631	<i>Reversal of losses on commitment and contingencies</i>
Beban operasional lainnya	(6,697,863)	606,342	-	(6,091,521)	<i>Other operating expenses</i>
Laba operasional	120,641	1,155,639	872,445	2,148,725	<i>Income from operations</i>
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(27,898)	5,540	-	(22,358)	<i>Non-operating income (expenses) - net</i>
Beban pajak - neto	(461,770)	16,580	-	(445,190)	<i>Tax expense - net</i>
Laba (rugi) tahun berjalan	<u>(369,027)</u>	<u>1,177,759</u>	<u>872,445</u>	<u>1,681,177</u>	<i>Income (expense) for the year</i>
Total aset	<u>176,534,191</u>	<u>13,649,880</u>	<u>(1,888,583)</u>	<u>188,295,488</u>	<i>Total assets</i>
31 Desember/December 31, 2022					
Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Total		
Pendapatan segmen	12,845,427	793,700	(3,153)	13,635,974	<i>Segment income</i>
Beban segmen	(4,986,855)	(244,294)	3,153	(5,227,996)	<i>Segment expenses</i>
Pendapatan segmen - neto	<u>7,858,572</u>	<u>549,406</u>	<u>-</u>	<u>8,407,978</u>	<i>Segment Income - net</i>
Pendapatan operasional lainnya	1,607,843	31,845	-	1,639,688	<i>Other operating income</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan nonkeuangan	(214,785)	(9,191)	-	(223,976)	<i>Provision for impairment losses on financial and non-financial assets</i>
Pembalikan kerugian komitmen dan kontinjensi	12,049	1,143	-	13,192	<i>Reversal of losses on commitment and contingencies</i>
Beban operasional lainnya	(6,545,092)	(442,932)	-	(6,988,024)	<i>Other operating expenses</i>
Laba operasional	2,718,587	130,271	-	2,848,858	<i>Income from operations</i>
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(18,053)	4,813	-	(13,240)	<i>Non-operating income (expenses) - net</i>
Beban pajak - neto	(569,219)	(21,117)	-	(590,336)	<i>Tax expense - net</i>
Laba (rugi) tahun berjalan	<u>2,131,315</u>	<u>113,967</u>	<u>-</u>	<u>2,245,282</u>	<i>Income (expense) for the year</i>
Total aset	<u>170,743,998</u>	<u>12,445,811</u>	<u>(1,948,518)</u>	<u>181,241,291</u>	<i>Total assets</i>

46. Risiko Kredit

Sesuai dengan karakteristiknya, kredit yang ada di Bank dan entitas anak saat ini terbagi dalam kredit produktif dan kredit konsumtif. Untuk mengelola risikonya, Bank dan entitas anak mengukur risiko kredit dari portofolio yang ada baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Hal ini untuk memastikan kemungkinan kerugian dari tidak dibayarnya pinjaman yang diberikan menjadi seminimal mungkin, baik untuk debitur individual maupun secara keseluruhan.

Sistem dan prosedur kredit Bank dan entitas anak telah dibakukan untuk menjamin diterapkannya kebijakan dan pelaksanaan pemberian pinjaman secara konsisten. Untuk kredit produktif, Bank dan entitas anak menggunakan model *Internal Credit Risk Rating* untuk menganalisis risiko bisnis dan finansial dari debitur secara objektif dan memberikan *rating* kepada nasabahnya. Selain itu, Bank dan entitas anak juga menggunakan *Credit Risk Capital Allocation and Pricing* untuk menguantifikasi risiko kredit dan menentukan harga yang sesuai berdasarkan risiko kredit.

Untuk kredit konsumtif maupun produktif, Bank dan entitas anak menggunakan model *Internal Credit Scoring* untuk menganalisis dan menghitung risiko dari pemberian kredit kepada konsumen.

Dalam rangka menerapkan prinsip pemberian kredit yang sehat, Bank dan entitas anak menerapkan prinsip *Four Eyes* (pengambilan keputusan kredit yang dilakukan oleh dua orang atau lebih) pada setiap kantor cabang dengan penggunaan *Credit Scoring* dan *Credit Reviewer*.

Berikut ini adalah rasio kredit bermasalah/*non-performing loans* (NPL) tidak termasuk pembiayaan syariah dan rasio kualitas aset produktif Bank dan entitas anak (konsolidasian):

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Rasio NPL-bruto	1.48%	1.25%	<i>NPL ratio - gross</i>
Rasio NPL-neto	0.67%	0.73%	<i>NPL ratio - net</i>
Rasio kualitas aset produktif (tidak diaudit)	0.85%	0.85%	<i>Earnings assets quality ratio (unaudited)</i>

Rasio kualitas aset produktif merupakan rasio aset yang diklasifikasikan sebagai *non-performing* dibandingkan dengan jumlah aset produktif.

46. Credit Risk

In accordance with the loan characteristics, the Bank and its subsidiaries' loan portfolios are classified into productive loans and consumer loans. In order to manage the risk, the Bank and its subsidiaries measure credit risk arising from the existing portfolios quantitatively and qualitatively to ensure that the potential losses from default loans are minimized, both for individual borrowers and the overall portfolio.

The Bank and its subsidiaries' credit system and procedures have been formalized to ensure consistent implementation and policy in credit approval. For productive loans, the Bank and its subsidiaries use the Internal Credit Risk Rating model to analyze the business and financial risks of debtors objectively and to give ratings to debtors. In addition, the Bank and its subsidiaries also use Credit Risk Capital Allocation and Pricing in quantifying credit risk and determining the appropriate pricing.

For both consumer loans and productive loans, the Bank and its subsidiaries uses the internal Credit Scoring model to analyze and calculate the credit risk for consumer.

To implement a healthy credit granting process, the Bank and its subsidiaries apply the Four Eyes Principle (credit decision-making by two persons or more) at each branch office by using Credit Scoring and Credit Reviewer.

The following are the non-performing loans (NPL) ratios not include sharia financing and the earnings asset quality ratio of the Bank and its subsidiaries (consolidated):

Earnings asset quality ratio is the ratio of assets classified as non-performing to total earning assets.

Sistem pengelolaan manajemen risiko kredit Bank dan entitas anak telah dibakukan dalam suatu ketentuan Pedoman Perusahaan (PP) dan dikaji secara periodik.

The Bank and its subsidiaries credit risk management system has been standardized in the Bank's Guidelines and reviewed periodically.

- (i) Analisis eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya:

- (i) *Analysis on maximum exposures against credit risks after considering the impact of collateral and other credit risks mitigation:*

Nilai tercatat dari aset keuangan Bank selain kredit yang diberikan dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

The carrying value of the Bank's financial assets other than loans and marketable securities purchased under agreement to resell represents its maximum exposure to credit risk.

Tabel di bawah ini menunjukkan *net maximum exposure* atas risiko kredit untuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

The table below show the net maximum exposure to credit risk of marketable securities purchased under agreement to resell as of December 31, 2023 and 2022:

31 Desember/December 31, 2023		
Eksposur Maksimum/ Maximum Exposure	Agunan/Collateral	Net Eksposur/ Nett Exposure
3,129,032	3,118,291	10,741
31 Desember/December 31, 2022		
Eksposur Maksimum/ Maximum Exposure	Agunan/Collateral	Net Eksposur/ Nett Exposure
5,468,915	5,491,896	-

Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijamin sesuai skema kredit dan perkiraan tingkat risiko kredit dari *counterparty* sebagai *second way out* yang ditetapkan. Jenis dari agunan terdiri dari:

The Bank determined the type and value of collateral according to the loan scheme as well as estimated credit risk level from the counterparty as a determined second way out. The types of collateral are as follows:

- a) *Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan;
- b) *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro, dan deposito), surat berharga, dan lain-lain;
- c) Lainnya berupa garansi, lembaga penjamin, dan lain-lain.

- a) *Physical collateral*, such as land and buildings;
- b) *Financial collateral*, such as third party funds (saving deposits, current accounts, and time deposits), securities, etc;
- c) *Others*, such as guarantees, guarantee institution, etc.

Pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Bank diatur dalam kebijakan dan prosedur perkreditan dimana untuk setiap jenis atau skema kredit telah ditentukan agunan minimal yang harus dipenuhi.

The loan granting conducted by the Bank is stipulated in the loan policy and procedure in which every loan type or scheme has minimum determinable collaterals that should be fulfilled.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Untuk segmen kredit komersial, sesuai ketentuan perkreditan wajib dijamin oleh agunan yang memadai. Agunan dapat berupa *physical collateral*, *financial collateral* atau lainnya berupa tagihan usaha atau garansi. Untuk seluruh agunan khususnya *physical collateral* akan dilakukan taksasi yang akan dipergunakan dalam menentukan kecukupan nilai agunan (*coverage ratio*).

Selain aspek agunan untuk meminimalkan risiko kredit, pemberian kredit oleh Bank selalu dilakukan berdasarkan evaluasi dan analisis kelayakan sehingga kemampuan pengembalian kredit (*first way out*) dapat dipastikan.

Adanya keharusan bagi debitur untuk memenuhi agunan yang dipersyaratkan, evaluasi atas kelayakan kredit, pengikatan kredit secara legal dan prosedur *pre-screening* akan menurunkan eksposur risiko kredit Bank ke tingkat yang layak dan dapat diterima.

Manajemen yakin akan kemampuan Bank dan entitas anak untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari kredit yang diberikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bank dan entitas anak telah memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan dan proses kredit yang mencakup seluruh aspek pemberian kredit yang dilakukan. Setiap pemberian kredit harus senantiasa mengacu pada kebijakan tersebut;
- Bank dan entitas anak telah memiliki sistem deteksi dini masalah melalui "*early warning system*" dan pemantauan yang disiplin.

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasi dengan eksposur risiko kredit

a) Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank dan entitas anak pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Untuk tabel ini, Bank dan entitas anak telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis tempat mereka beroperasi.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

For commercial loans segment, according to the loan policy has to be collateralized adequately. The collaterals can be physical collateral, financial collateral or others such as accounts receivable or guarantees. All collaterals particularly for physical collateral will be assessed in which the collateral's liquidation value will be use in determining the coverage ratio.

In addition collateral aspect to minimize credit risk, loan granting is conducted based on evaluation and feasibility analysis so that the loan repayment ability (*first way out*) can be ascertained.

The necessity for debtors to comply with collaterals requirement, loan feasibility evaluation, notarial agreement and pre screening procedures will decrease the Bank's credit risk exposure to the acceptable level.

Management believes on the Bank and its subsidiaries' abilities to control and maintain their credit risk exposure arising from loans based on the following:

- The Bank and its subsidiaries has written guidelines regarding credit policies and processes that cover all aspects of loans granted. Each granting of credit should always refer to such policy;
- The Bank and its subsidiaries has an early problem detection system through 'early warning system' and disciplined monitoring.

(ii) Concentration of consolidated financial asset risk with credit risk exposure

a. Geographic sector

The following tables describe the details of the Bank and its subsidiaries' credit exposures at the carrying amount (without calculating collateral or other credit support), which are categorized according to geographic areas as of December 31, 2023 and 2022.

This table displays that the Bank and its subsidiaries have identified exposure by geographical area where they are operating.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

31 Desember/December 31, 2023							
	Jawa	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Bali	Total	
Giro pada							Current accounts with
Bank Indonesia	14,879,767	-	-	-	-	14,879,767	Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1,178,359	3	11,590	3,097	3,738	1,196,787	Current accounts with
Penempatan pada							other banks
Bank Indonesia							Placements with
dan bank lain	3,886,989	-	-	-	-	3,886,989	Bank Indonesia
Tagihan derivatif	1,289	-	-	-	-	1,289	and other banks
Surat-surat berharga	30,976,967	-	-	-	-	30,976,967	Derivative receivable
Wesel Ekspor							Marketable securities
dan tagihan lainnya	678,400	10,929	-	645	-	689,974	Bills and
Tagihan akseptasi	288,944	-	-	-	-	288,944	other receivable
Kredit yang diberikan							Acceptances receivable
dan pembiayaan							
syariah	118,085,281	3,479,213	1,144,679	1,637,102	731,908	125,078,183	Loans and sharia
Penyertaan saham	190,089	-	-	-	-	190,089	financing
Bunga yang masih							Investment in shares
akan diterima	1,302,598	26,209	8,567	4,763	25,519	1,367,656	Accrued interest
Aset lain-lain*)	17,871	-	-	-	-	17,871	income
Total kotor	171,486,554	3,516,354	1,164,836	1,645,607	761,165	178,574,516	Other assets*)
							Total - gross
Cadangan kerugian							Allowance for
penurunan nilai						(2,144,780)	impairment losses
Total neto						176,429,736	Total net

31 Desember/December 31, 2022							
	Jawa	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Bali	Total	
Giro pada							Current accounts with
Bank Indonesia	11,900,072	-	-	-	-	11,900,072	Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2,684,386	3	2,654	1,338	2,916	2,691,297	Current accounts with
Penempatan pada							other banks
Bank Indonesia							Placements with
dan bank lain	11,428,774	-	-	-	-	11,428,774	Bank Indonesia
Tagihan derivatif	3,967	-	-	-	-	3,967	and other banks
Surat-surat berharga	16,978,899	-	-	-	-	16,978,899	Derivative receivable
Efek-efek yang							Marketable securities
dibeli dengan janji							Receivable from marketable
dijual kembali	3,129,032	-	-	-	-	3,129,032	securities purchased under
Wesel Ekspor							agreements to resell
dan tagihan lainnya	479,902	8,010	-	-	-	487,912	Bills and
Tagihan akseptasi	163,983	-	-	-	-	163,983	other receivable
Kredit yang diberikan							Acceptances receivable
dan pembiayaan							
syariah	96,905,537	2,771,543	1,050,138	883,885	775,837	102,386,940	Loans and sharia
Penyertaan saham	42,124	-	-	-	-	42,124	financing
Bunga yang masih							Investment in shares
akan diterima	973,517	23,781	8,296	6,075	17,721	1,029,390	Accrued interest
Aset lain-lain*)	22,662	-	-	-	-	22,662	income
Total kotor	144,712,855	2,803,337	1,061,088	891,298	796,474	150,265,052	Other assets*)
							Total - gross
Cadangan kerugian							Allowance for
penurunan nilai						(1,949,890)	impairment losses
Total neto						148,315,162	Total net

*) Terdiri dari setoran jaminan dan aset ijarah

*) Consists of security deposits dan ijarah assets

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif konsolidasian adalah sebagai berikut:

Credit risk exposure on the consolidated administrative accounts are as follows:

31 Desember/December 31, 2023							
	Jawa	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Bali	Total	
Rekening Administratif							Administrative Accounts
<i>Irrevocable letters of credit</i> yang masih berjalan	102,912	-	-	-	-	102,912	Outstanding irrevocable letters of credit
Garansi yang diberikan	633,021	76,068	9,381	36,559	1,330	756,359	Guarantees issued
Total	735,933	76,068	9,381	36,559	1,330	859,271	Total
31 Desember/December 31, 2022							
	Jawa	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Bali	Total	
Rekening Administratif							Administrative Accounts
<i>Irrevocable letters of credit</i> yang masih berjalan	553,324	-	-	-	-	553,324	Outstanding irrevocable letters of credit
Garansi yang diberikan	979,112	111,248	2,018	90,679	-	1,183,057	Guarantees issued
Total	1,532,436	111,248	2,018	90,679	-	1,736,381	Total

b. Sektor industri

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank dan entitas anak pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri.

b. Industry sector

The following tables describe the details of the Bank and its subsidiaries' credit exposures at the carrying amount (without calculating the collateral or other credit support), which are categorized by industry sector.

31 Desember/December 31, 2023							
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other Companies	Perseorangan/ Individuals	Total	
Giro pada Bank Indonesia	14,879,767	-	-	-	-	14,879,767	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	1,196,787	-	-	-	1,196,787	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	3,886,989	-	-	-	3,886,989	Placements with Bank Indonesia and other banks
Tagihan Derivatif	-	1,289	-	-	-	1,289	Derivative receivable
Surat berharga	21,663,695	1,177,217	537,818	7,598,237	-	30,976,967	Marketable securities
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	-	-	-	689,974	-	689,974	Bills and other receivables
Tagihan akseptasi	-	-	-	288,944	-	288,944	Acceptances receivable
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	7,680,966	4,500,592	736,047	28,137,935	84,022,643	125,078,183	Loans and sharia financing
Penyertaan saham	-	-	-	190,089	-	190,089	Investment in shares
Bunga yang masih akan diterima	85,114	45,141	7,383	387,270	842,748	1,367,656	Accrued interest income
Aset lain-lain*)	-	-	-	17,871	-	17,871	Other assets*)
Total kotor	44,309,542	10,808,015	1,281,248	37,310,320	84,865,391	178,574,516	Total - gross
Cadangan kerugian penurunan nilai						(2,144,780)	Allowance for impairment losses
Total neto						176,429,736	Total - net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)**

31 Desember/December 31, 2022							
Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other Companies	Perseorangan/ Individuals	Total		
Giro pada						Current accounts with	
Bank Indonesia	13,032,593	-	-	-	13,032,593	Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	-	1,243,695	-	-	1,243,695	Current accounts with other banks	
Penempatan pada						Placements with	
Bank Indonesia	-	7,156,807	-	-	7,156,807	Bank Indonesia and other banks	
dan bank lain	-	17,388	-	-	17,388	Derivative receivable	
Tagihan Derivatif	-	356,729	5,784,752	800,804	27,387,574	Marketable securities	
Surat berharga	20,445,289	-	-	-	5,468,915	Marketable securities purchased under agreements to resell	
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	5,468,915	-	-	-	843,826	Bills and other receivables	
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	-	-	-	843,826	227,970	Acceptances receivable	
Tagihan akseptasi	-	-	-	227,970	-	-	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	7,680,966	4,500,592	736,047	18,815,352	84,022,643	115,755,600	Loans and sharia financing
Penyertaan saham	-	-	-	142,093	-	142,093	Investment in shares
Bunga yang masih akan diterima	85,115	45,141	7,383	188,718	842,748	1,169,105	Accrued interest income
Aset lain-lain*)	-	-	-	37,185	-	37,185	Other assets*)
Total kotor	46,712,878	13,320,352	6,528,182	21,055,948	84,865,391	172,482,751	Total - gross
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-	(1,802,820)	Allowance for impairment losses
Total neto	-	-	-	-	-	170,679,931	Total - net

*)Terdiri dari setoran jaminan dan aset ijarah

*) Consists of security deposits dan ijarah assets

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif konsolidasian adalah sebagai berikut:

Credit risk exposure on the consolidated administrative accounts are as follows:

31 Desember/December 31, 2023							
Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other Companies	Perseorangan/ Individuals	Total		
Rekening Administratif						Administrative Accounts	
Irrevocable letters of credit yang masih berjalan	74,007	-	-	28,905	102,912	Outstanding irrevocable letters of credit	
Garansi yang diterbitkan	2,745	-	23,439	727,364	2,811	756,359	Guarantees issued
Total	76,752	-	23,439	756,269	2,811	859,271	Total
31 Desember/December 31, 2022							
Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other Companies	Perseorangan/ Individuals	Total		
Rekening Administratif						Administrative Accounts	
Irrevocable letters of credit yang masih berjalan	258,818	-	294,506	-	553,324	Outstanding irrevocable letters of credit	
Garansi yang diterbitkan	252,346	-	9,970	918,112	2,630	1,183,058	Guarantees issued
Total	511,164	-	304,476	918,112	2,630	1,736,382	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

(iii) Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(iii) Impairment of financial assets as of
December 31, 2023 and 2022

1. Giro pada bank lain

1. Current accounts with other banks

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Rupiah	582,783	325,659	<i>Rupiah</i>
Mata Uang Asing	<u>614,004</u>	<u>918,036</u>	<i>Foreign currencies</i>
Total	1,196,787	1,243,695	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(57)</u>	<u>(68)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	<u>1,196,730</u>	<u>1,243,627</u>	<i>Net</i>

2. Penempatan pada Bank Indonesia dan
bank lain

2. Placement with Bank Indonesia and other
banks

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Rupiah	1,407,003	7,156,807	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	<u>2,479,986</u>	<u>-</u>	<i>United States Dollar</i>
Total	3,886,989	7,156,807	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(296)</u>	<u>(2,133)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	<u>3,886,693</u>	<u>7,154,674</u>	<i>Net</i>

3. Tagihan akseptasi

3. Acceptance receivable

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ Decemeber 31, 2022</u>	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Rupiah	217,837	185,493	<i>Rupiah</i>
Mata Uang Asing	<u>71,107</u>	<u>42,477</u>	<i>Foreign currencies</i>
Total	288,944	227,970	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(519)</u>	<u>(2,374)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	<u>288,425</u>	<u>225,596</u>	<i>Net</i>

4. Surat berharga

4. Marketable securities

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Biaya perolehan yang diamortisasi			<i>At amortized cost</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Rupiah			<i>Rupiah</i>
Obligasi	5,422,215	5,851,325	<i>Bonds</i>
Diskonto yang belum diamortisasi	<u>-</u>	<u>(7,183)</u>	<i>Unamortized discount</i>
Neto	<u>5,422,215</u>	<u>5,844,142</u>	<i>Net</i>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Nilai wajar yang melalui penghasilan komprehensif lainnya			Fair value through other comprehensive income
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Obligasi	15,771,414	12,919,048	Bonds
Dolar Amerika Serikat			US Dollar
Obligasi	2,361,756	2,228,239	Bonds
	<u>18,133,170</u>	<u>15,147,287</u>	
Nilai wajar melalui laba rugi			Fair value through profit or loss
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Reksadana	5,226,836	4,859,178	Mutual funds
Obligasi	2,194,746	1,536,967	Bonds
	<u>7,421,582</u>	<u>6,396,145</u>	
Total	<u>30,976,967</u>	<u>27,387,574</u>	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11,357)	(5,256)	Allowance for impairment losses
Neto	<u>30,965,610</u>	<u>27,382,318</u>	Net

5. Kredit yang diberikan dan piutang dan pembiayaan syariah

5. Loans and sharia financing and receivables

	31 Desember/December 31, 2023						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/Neither past due nor impaired		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past-due but not Impaired		Mengalami penurunan nilai/ Impaired		Total
	Tingkat Tinggi/ High Grade	standar/ Standard grade	Tingkat Tinggi/ High Grade	standar/ Standard grade			
Kredit yang diberikan dan piutang dan pembiayaan syariah						<i>Loans and sharia financing and receivables</i>	
Perdagangan	12,040	8,901,227	528,882	489,566	9,931,715	Trading	
Jasa-jasa dunia usaha	-	1,097,995	10,918	117,419	1,226,332	Business services	
Konstruksi	-	6,923,509	85,627	467,773	7,476,909	Construction	
Pengangkutan dan gudang	-	837,652	25,777	29,481	892,910	Transportation and warehousing	
Industri	547	4,405,729	590,221	35,150	5,031,647	Industry	
Jasa-jasa sosial	4,777	1,493,978	5,946	8,997	1,513,698	Social services	
Pertanian	30	1,590,974	86,712	44,011	1,721,727	Farming	
Listrik, gas dan air	-	179,793	4,367	80	184,240	Electricity, gas and water	
Pertambangan	-	679,042	39,993	2,653	721,688	Mining	
Lain-lain	33,067,791	61,214,052	1,485,278	610,196	96,377,317	Others	
Total	<u>33,085,185</u>	<u>87,323,951</u>	<u>2,863,721</u>	<u>1,805,326</u>	<u>125,078,183</u>	Total	
Cadangan kerugian penurunan nilai					(2,130,897)	Allowance for impairment losses	
Neto					<u>122,947,286</u>	Net	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

31 Desember/December 31, 2022

	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past-due but not impaired		Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total	
	Tingkat		Tingkat				
	Tinggi/ <i>High Grade</i>	standar/ <i>Standard grade</i>	Past-due but not impaired	Past-due but not impaired			
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah							<i>Loans and sharia financing/receivables</i>
Perdagangan	87,095	8,835,974	154,703	293,336	9,371,108		<i>Trading</i>
Jasa-jasa dunia usaha	-	642,140	54,743	92,579	789,462		<i>Business services</i>
Konstruksi	310	7,028,371	110,912	442,459	7,582,052		<i>Construction</i>
Pengangkutan dan gudang	-	691,154	56,263	468	747,885		<i>Transportation and warehousing</i>
Industri	738	5,448,781	582,977	31,439	6,063,935		<i>Industry</i>
Jasa-jasa sosial	-	764,113	627	9,449	774,189		<i>Social services</i>
Pertanian	293	1,410,860	37,718	22,387	1,471,258		<i>Farming</i>
Listrik, gas dan air	-	141,019	82	24	141,125		<i>Electricity, gas and water</i>
Pertambangan	-	963,955	-	2,700	966,655		<i>Mining</i>
Lain-lain	34,751,591	51,290,851	1,210,085	595,404	87,847,931		<i>Others</i>
Total	34,840,027	77,217,218	2,208,110	1,490,245	115,755,600		Total
Cadangan kerugian penurunan nilai					(1,791,686)		<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto					113,963,914		Net

Bank dan entitas anak melakukan penilaian secara individual untuk: (a) kredit dengan plafon di atas Rp5.000 dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet; dan (b) kredit yang direstrukturisasi.

Bank and its subsidiaries assesses individually for: (a) loans with plafond above Rp1.000 which are classified as substandard, doubtful and loss; and (b) restructured loans.

Penilaian secara kolektif dilakukan untuk kredit dengan plafon sama dengan atau lebih kecil dari Rp1.000 dan tidak direstrukturisasi.

Collective assessment is applied to loans with plafond equal to or less than Rp1,000 and not restructured.

- (iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (nilai yang disajikan adalah bruto).

- (iv) *The tables below show the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses).*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

31 Desember/December 31, 2023							
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past-due but not impaired</i>		Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Total	
	Tingkat Tinggi/ <i>High Grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>					
Nilai wajar melalui laba rugi							<i>Fair value through profit or loss</i>
Surat berharga	7,421,582	-	-	-	-	7,421,582	<i>Marketable securities</i>
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya							<i>Fair value through other comprehensive income</i>
Surat berharga	18,133,170	-	-	-	-	18,133,170	<i>Marketable securities</i>
Biaya perolehan yang diamortisasi							<i>Amortised cost</i>
Surat berharga	5,410,858	-	-	11,357	-	5,422,215	<i>Marketable securities</i>
Giro pada bank Indonesia	14,879,767	-	-	-	-	14,879,767	<i>Bank Indonesia Current accounts with</i>
Giro pada bank lain	1,196,730	-	-	57	-	1,196,787	<i>other banks Placements with</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3,886,693	-	-	296	-	3,886,989	<i>Bank Indonesia and other banks</i>
Tagihan derivatif	1,289	-	-	-	-	1,289	<i>Derivative receivable</i>
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	689,623	-	-	351	-	689,974	<i>Bills and other receivable</i>
Tagihan akseptasi	288,425	-	-	519	-	288,944	<i>Acceptance receivables</i>
Penyertaan saham	-	188,786	-	1,303	-	190,089	<i>Investment in shares</i>
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah							<i>Loans and sharia financing/receivables</i>
Perdagangan	87,095	8,835,974	154,703	293,336	-	9,371,108	<i>Trading</i>
Jasa-jasa dunia usaha	-	642,140	54,743	92,579	-	789,462	<i>Business Services</i>
Konstruksi	310	7,028,371	110,912	442,459	-	7,582,052	<i>Construction</i>
Pengangkutan dan gudang	-	691,154	56,263	468	-	747,885	<i>Transportation and warehousing</i>
Industri	738	5,448,781	582,977	31,439	-	6,063,935	<i>Industry</i>
Jasa-jasa sosial	-	764,113	627	9,449	-	774,189	<i>Social services</i>
Pertanian	293	1,410,860	37,718	22,387	-	1,471,258	<i>Farming</i>
Listrik, gas dan air	-	141,019	82	24	-	141,125	<i>Electricity, gas and water</i>
Pertambangan	-	963,955	-	2,700	-	966,655	<i>Mining</i>
Lain-lain	34,751,591	51,290,851	1,210,085	595,404	-	87,847,931	<i>Others</i>
Bunga yang masih akan diterima	-	1,367,656	-	-	-	1,367,656	<i>Accrued Interest Income</i>
Aset lain-lain*)	-	17,871	-	-	-	17,871	<i>Other assets*)</i>
Total	86,748,164	78,791,531	2,208,110	1,504,128	-	169,251,933	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai						(2,144,780)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto						167,107,153	Net

*) Terdiri dari setoran jaminan dan aset ijarah

*) Consists of security deposits and ijarah assets

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

31 Desember/December 31, 2022							
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past-due but not impaired</i>		Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Total	
	Tingkat Tinggi/ <i>High Grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>	<i>Impaired</i>	<i>Impaired</i>			
Nilai wajar melalui laba rugi							<i>Fair value through profit or loss</i>
Surat berharga	6,396,145	-	-	-	6,396,145		<i>Marketable securities</i>
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya							<i>Fair value through other comprehensive income</i>
Surat berharga	15,147,287	-	-	-	15,147,287		<i>Marketable securities</i>
Biaya perolehan yang diamortisasi							<i>Amortised cost</i>
Surat berharga	5,844,142	-	-	-	5,844,142		<i>Marketable securities</i>
Giro pada bank Indonesia	13,032,593	-	-	-	13,032,593		<i>Bank Indonesia Current accounts with other banks</i>
Giro pada bank lain	1,243,627	-	-	68	1,243,695		<i>Placements with Bank Indonesia and other banks</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	7,156,807	-	-	-	7,156,807		<i>Derivative receivable</i>
Tagihan derivatif	17,388	-	-	-	17,388		<i>Bills and other receivable</i>
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	843,826	-	-	-	843,826		<i>Receivable from marketable securities purchased under agreement to resell</i>
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	5,468,915	-	-	-	5,468,915		<i>Acceptance receivables</i>
Tagihan akseptasi	227,970	-	-	-	227,970		<i>Investment in shares</i>
Penyertaan saham	-	139,843	-	2,250	142,093		<i>Loans and sharia financing/receivables</i>
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah							<i>Trading</i>
Perdagangan	87,095	8,835,974	154,703	293,336	9,371,108		<i>Business Services</i>
Jasa-jasa dunia usaha	-	642,140	54,743	92,579	789,462		<i>Construction</i>
Konstruksi	310	7,028,371	110,912	442,459	7,582,052		<i>Transportation and warehousing</i>
Pengangkutan dan gudang	-	691,154	56,263	468	747,885		<i>Industry</i>
Industri	738	5,448,781	582,977	31,439	6,063,935		<i>Social services</i>
Jasa-jasa sosial	-	764,113	627	9,449	774,189		<i>Farming</i>
Pertanian	293	1,410,860	37,718	22,387	1,471,258		<i>Electricity, gas and water</i>
Listrik, gas dan air	-	141,019	82	24	141,125		<i>Mining</i>
Pertambangan	-	963,955	-	2,700	966,655		<i>Others</i>
Lain-lain	34,751,591	51,290,851	1,210,085	595,404	87,847,931		
Bunga yang masih akan diterima	-	1,169,105	-	-	1,169,105		<i>Interest receivables</i>
Aset lain-lain*)	-	37,185	-	-	37,185		<i>Other assets*)</i>
Total	90,218,727	78,563,351	2,208,110	1,492,563	172,482,751		Total
Cadangan kerugian penurunan nilai					(1,802,820)		<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto					170,679,931		Net

*) Terdiri atas setoran jaminan dan aset ijarah

*) Consists of security deposits and ijarah assets

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

Tingkat tinggi

- a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi pemerintah, transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.
- b) Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, tagihan derivatif dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu kredit, debitur dengan tingkat stabilitas dan keragaman yang tinggi, memiliki kemampuan membayar yang kuat dan rasio-rasio neraca yang konservatif.
- c) Surat berharga dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali yang termasuk dalam *investment grade* dengan *rating* minimal BBB- (Pefindo) atau Baa3 (Moody's).

Tingkat standar

- a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank lokal yang tidak terdaftar di bursa.
- b) Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, penyertaan saham dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan tidak pernah menunggak 90 hari atau lebih; memiliki kemampuan membayar yang cukup.
- c) Surat berharga dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali yang termasuk dalam *investment grade* dengan *rating* antara idBB+ sampai dengan idB (Pefindo) atau Ba1 sampai dengan B2 (Moody's).

The credit quality are defined as follows:

High grade

- a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks which are current accounts or placements with the government, transaction with reputable banks with low probability of insolvency.
- b) Loans and sharia financing/receivables, interests receivables, derivative receivables and third party receivables are borrowers with very satisfactory track record of loan repayment and whose accounts did not turn past due during the term of the loan, borrowers with high degree of stability and diversity, very strong debt service capacity and has conservative balance sheet ratios.
- c) Marketable securities and marketable securities purchased under agreement to resell which included in investment grade securities with a rating of at least BBB- (Pefindo) or Baa3 (Moody's).

Standard grade

- a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with the local banks not listed in the stock exchange.
- b) Loans and sharia financing/receivables, interest receivables, investment in share, and third party receivables are borrowers who have an average track record of loan repayment and whose account did not turn past due for 90 days and over; debt service capacity is adequate.
- c) Marketable securities and marketable securities purchased under agreement to resell which included in investment grade securities with a rating between idBB+ to idB (Pefindo) or Ba1 to B2 (Moody's).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)**

(v) Analisis umur pinjaman yang jatuh tempo, tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

(v) *The aging analysis of past due but not impaired loans as of December 31, 2023 and 2022, are as follows:*

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Industri	590,221	582,977	<i>Industry</i>
Perdagangan	528,882	154,703	<i>Trading</i>
Pertanian	86,712	37,718	<i>Farming</i>
Konstruksi	85,627	110,912	<i>Construction</i>
Pertambangan	39,993	-	<i>Mining</i>
Pengangkutan dan gudang	25,777	56,263	<i>Transportation and warehousing</i>
Jasa-jasa dunia usaha	10,918	54,743	<i>Business services</i>
Jasa-jasa sosial	5,946	627	<i>Social services</i>
Listrik, gas dan air	4,367	82	<i>Electricity, gas and water</i>
Lain-lain	1,485,278	1,210,085	<i>Others</i>
Total	2,863,721	2,208,110	Total

47. Risiko Nilai Tukar

47. Foreign Exchange Risk

Risiko nilai tukar timbul sebagai kerugian yang ditimbulkan oleh posisi terbuka neto valuta asing pada sisi aktiva, sisi pasiva ataupun rekening administratif akibat perubahan nilai tukar valuta asing. Kegiatan perdagangan mata uang asing meliputi transaksi nilai tukar valuta asing *spot, forward, swap, interest rate swap*, dan *cross currency swap*.

Foreign exchange risk arises as losses arising from net open positions of foreign exchange on assets, liabilities or administrative accounts due to changes in foreign exchange rates. Foreign exchange trading activities include spot, forward, swap, interest rate swaps, and foreign exchange transactions cross currency swap.

Penerapan Manajemen risiko nilai tukar yang dijalankan oleh Bank adalah dengan melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko nilai tukar secara berkala baik secara *bankwide* maupun parsial. Secara *bankwide*, bank melakukan pengukuran risiko nilai tukar melalui simulasi *value at risk (var)* dengan berbagai metode (*Variance Covariance & Historical*) yang disesuaikan dengan karakteristik transaksi bank.

Implementation of Forex Risk Management in Bank through a measurement, monitoring, and controlling of foreign exchange risk periodically both partial and comprehensive. comprehensively, bank measure foreign exchange risk through value at risk simulation with several methods (Variance Covariance & Historical) and adjusted to characteristic of transactions.

Pemantauan risiko nilai tukar dilakukan melalui pemantauan Posisi Devisa Neto (PDN) dan sebagai bentuk pengendalian risiko nilai tukar, Bank membuat limit internal PDN baik untuk neraca maupun secara keseluruhan sebagai bentuk *risk tolerance* Bank dalam menghadapi risiko nilai tukar. Sedangkan, penerapan manajemen risiko nilai tukar Bank secara parsial pada aktivitas tresuri adalah melalui pengukuran & pengendalian *budget loss limit & open position* untuk setiap transaksi nilai tukar dan sebagai bentuk pemantauan risiko nilai tukar, Bank melakukan pelaporan transaksi tresuri sesuai dengan ketentuan secara periodik untuk memastikan bahwa *exposure* yang timbul oleh pergerakan nilai tukar berada pada batas yang telah ditentukan oleh ketentuan internal Bank dan sesuai dengan ketentuan regulasi Bank Indonesia.

Bank monitor foreign exchange risk through monitoring of Net Open Position (NOP) and intraday and for a foreign exchange risk control, bank establish internal limit of NOP both on balance sheet and overall as risk tolerance to foreign exchange risk. Meanwhile, implementation of forex risk management partially on treasury activities is performed through measurement & control of budget loss limit & open position for every transaction and for monitoring, bank create Treasury transactions report periodically to ensure that exposure arise from foreign exchange risk is at the limit which has been specified by the internal Bank dan Bank Indonesia Regulations.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 perubahan keempat atas PBI No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum tanggal 17 Juli 2003, PDN ditetapkan maksimum sebesar 20% dari modal.

PDN secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih aset dan liabilitas baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing.

Berikut adalah PDN pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 per mata uang (dalam ekuivalen rupiah) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (tidak diaudit):

According to Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015 the fourth amendment to PBI No. 5/13/PBI / 2003 concerning the Net Open Position of Commercial Banks on July 17, 2003, the NOP is set at a maximum of 20% of capital.

The overall NOP is the sum of the absolute value of the difference between each foreign currency asset and liability on the statement of financial position and the difference between commitments and contingent assets and liabilities in administrative accounts for each foreign currency.

Below is the NOP as of December 31, 2023 and 2022 by currency (in equivalent rupiah) based on Bank Indonesia regulations (unaudited):

31 Desember/December 31, 2023					
Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Rekening Administratif/ Administratif Account	Posisi Devisa Neto/Net Open Position		
Mata Uang					Currency
KESELURUHAN (LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF)					AGGREGATE (STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AND ADMINISTRATIVE ACCOUNTS)
Dolar Amerika Serikat	5,754,574	6,271,578	(769,850)	1,286,854	United States Dollar
Dolar Australia	26,833	4	-	26,829	Australian Dollar
Dolar Singapura	43,277	5,975	-	37,302	Singapore Dollar
Yen Jepang	58,947	15	(40,286)	18,646	Japanese Yen
Euro Eropa	23,257	141	-	23,116	European Euro
Poundsterling Inggris	7,699	-	-	7,699	Great Britain Poundsterling
Dolar Hongkong	1,067	39	-	1,028	Hong Kong Dollar
Renminbi	1,387	76	-	1,311	Renminbi
Riyal Saudi Arabia	86	-	-	86	Saudi Arabian Riyal
Total				1,402,871	Total
Total modal - 31 Desember 2023 (Catatan 51)				17,676,494	Total Capital - December 31, 2023 (Note 51)
Rasio PDN (Keseluruhan)				7.94%	NOP ratio (Aggregate)

31 Desember/December 31, 2022					
Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Rekening Administratif/ Administratif Account	Posisi Devisa Neto/Net Open Position		
Mata Uang					Currency
KESELURUHAN (LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF)					AGGREGATE (STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AND ADMINISTRATIVE ACCOUNTS)
Dolar Amerika Serikat	4,795,570	1,610,783	(3,269,175)	84,388	United States Dollar
Dolar Australia	28,429	5	-	28,424	Australian Dollar
Dolar Singapura	42,128	6,059	-	36,069	Singapore Dollar
Yen Jepang	19,758	2	-	19,756	Japanese Yen
Euro Eropa	15,366	519	-	14,847	European Euro
Poundsterling Inggris	5,873	-	-	5,873	Great Britain Poundsterling
Dolar Hongkong	1,152	-	-	1,152	Hong Kong Dollar
Renminbi	1,396	44	-	1,352	Renminbi
Riyal Saudi Arabia	195	-	-	195	Saudi Arabian Riyal
Total				192,056	Total
Total modal - 31 Desember 2021 (Catatan 51)				18,368,631	Total Capital - December 31, 2021 (Note 51)
Rasio PDN (Keseluruhan)				1.05%	NOP ratio (Aggregate)

Risiko mata uang adalah kemungkinan kerugian pendapatan yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank dan entitas anak mengelola paparan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing dengan mempertahankan risiko mata uang asing dalam pedoman peraturan yang ada (yaitu menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia).

Foreign currency risk is the probability of loss to earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Bank and its subsidiaries manages exposure to effects of fluctuations in foreign currency exchange rates by maintaining foreign currency exposure within the existing regulatory guidelines (i.e maintaining the Net Open Position based on Bank Indonesia regulations).

31 Desember 2023/December 31, 2023			
	Perubahan basis poin/ Changes in basis point	Pengaruh ke laporan laba rugi/ Changes in statement profit or loss	
Dolar Amerika Serikat	0.30%	43	United States Dollar
	0.35%	50	
31 Desember 2022/December 31, 2022			
	Perubahan basis poin/ Changes in basis point	Pengaruh ke laporan laba rugi/ Changes in statement profit or loss	
Dolar Amerika Serikat	0.30%	47	United States Dollar
	0.35%	54	

Sensitivitas atas laporan laba rugi konsolidasian merupakan dampak yang diestimasi atas perubahan yang diasumsikan atas perubahan nilai tukar berdasarkan aset dan liabilitas keuangan yang dalam mata uang asing.

The sensitivity (of the consolidated statements of income is the estimated effect of the assumed change in foreign exchange rates on income, based on foreign currency denominated assets and liabilities.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dampak atas perubahan nilai tukar dari mata uang lainnya seperti Poundsterling Inggris, Euro Eropa, Yen Jepang, Dolar Singapura, Dolar Australia dan Dolar Hong Kong tidak material.

As of December 31, 2023 and 2022, the effect of fluctuations in exchange rates of other currencies, such as Great Britain Poundsterling, European Euro, Japanese Yen, Singapore Dollar, Australian Dollar and Hong Kong Dollar was not material.

48. Risiko Likuiditas

48. Liquidity Risk

Risiko akibat ketidakmampuan Bank dan entitas anak untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank dan entitas anak. Besar kecilnya risiko likuiditas ditentukan antara lain:

- Kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana;
- Ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana;
- Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas;
- Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of last resort*.

Risk due to the inability of the Bank and its subsidiaries to fulfill maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high-quality liquid assets that can be pledged, without disrupting the activities and financial condition of the Bank and its subsidiaries. The size of the liquidity risk is determined, among others:

- Accuracy in cash flow or flow of fund planning based on financing and fund growth prediction, include observe the fund rate volatility;*
- The precision in managing the fund structure, including the adequacy of funding;*
- The availability of asset that is ready to be converted into cash;*
- Ability to create access to the interbank market or other funding sources, including the lender of last resort facilities.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Apabila kesenjangan tersebut cukup besar maka akan menurunkan kemampuan Bank dan entitas anak untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu untuk mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, maka diperlukan manajemen likuiditas, yang merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas.

Kebijakan likuiditas Bank dan entitas anak ditujukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dana dapat dipenuhi, baik untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo atau untuk memenuhi fasilitas kredit yang belum digunakan.

Penerapan manajemen risiko likuiditas diantaranya melalui pengelolaan dan pemantauan posisi likuiditas Bank dan entitas anak berada dalam tanggung jawab Bagian Manajemen ALM & Likuiditas di Divisi *Treasury* sedangkan pengukuran serta analisa terhadap risiko likuiditas menjadi tugas Divisi Manajemen Risiko diantaranya *stress test* likuiditas berdasarkan tiga skenario dan pembuatan profil risiko yang terkait risiko likuiditas, selain itu Bank telah melakukan perhitungan Basel III terkait risiko likuiditas yaitu perhitungan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR).

Pengelolaan kelebihan dana likuiditas yang tidak terserap penyaluran kredit, dioptimalisasi melalui pengelolaan *treasury*.

Sebagian besar kelebihan dana likuiditas tersalurkan melalui instrumen-instrumen yang berjangka pendek dan aman. Umumnya, kondisi likuiditas bank terjaga baik dimana penarikan dana nasabah dapat terpenuhi sekaligus kelebihan dana dioptimalkan dengan imbal hasil yang optimal.

Sumber dana dan waktu jatuh tempo deposito dikelola untuk menghindari adanya dana yang *idle* dan menentukan jumlah serta instrumen aset likuid yang tepat untuk menjamin tingkat likuiditas yang terkendali secara terus menerus.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

If the gap is large enough it will reduce the Bank and its subsidiaries' ability to meet its liabilities at maturity. Therefore, liquidity management is needed to anticipate liquidity risk, which is a part of the management liability.

The Bank and its subsidiaries' liquidity policies are aimed to ensuring that fund requirements can be fulfilled, either to pay time deposits at maturity or to fulfill unused loan facility.

The application of liquidity risk management includes managing and monitoring the Bank and its subsidiaries' liquidity position in the responsibility of the ALM Management & Liquidity Division in the Treasury Division while measuring and analyzing liquidity risk is the task of the Risk Management Division including stress test liquidity based on three scenarios and risk-related risk profiles liquidity, in addition banks have made Basel III calculations related to liquidity risk, namely the calculation of Net Stable Funding Ratio (NSFR) and Liquidity Coverage Ratio (LCR).

Managing the excess of liquidity fund, which are not absorbed by loans, disbursement will be optimized through managing treasury.

Most of the excess of liquidity will be placed in short-term and secured instruments. In general, the Bank and its subsidiaries' liquidity condition is well maintained where the customers withdrawal can be fulfilled while the excess fund can be optimized with optimum return.

Sources of funds and maturity dates of time deposits are managed to avoid idle funds and determine the appropriate liquidity level and liquid asset instrument to ensure a sustainable liquidity level.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Tabel berikut ini menggambarkan analisis jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan Bank dan entitas anak dihitung berdasarkan sisa periode jatuh tempo kontrak pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian:

The following tables illustrate the maturity profile analysis of the Bank and its subsidiaries' financial assets and liabilities according to their remaining maturity period at the consolidated statement of financial position date:

		31 Desember/December 31, 2023							
	Tidak mempunyai tanggal jatuh tempo	Sampai dengan 1 bulan/	Lebih dari 1 sampai 3 bulan/	Lebih dari 3 sampai 12 bulan/	Lebih dari 1 sampai 2 tahun/	Lebih dari 2 sampai 5 tahun/	Lebih dari 5 tahun/		
Nilai tercatat/ Carrying value	No contractual maturity	Up to 1 month	More than 1 to 3 months	More than 3 to 12 months	More than 1 to 2 years	More than 2 to 5 years	More than 5 years		
ASET									
Kas	3,530,074	3,530,074	-	-	-	-	-	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	14,879,767	-	14,879,767	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain - neto	1,196,730	-	1,196,730	-	-	-	-	Current accounts with other banks - net	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	3,886,693	-	3,886,693	-	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other bank - net	
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan dengan janji dijual kembali	-	-	-	-	-	-	-	Receivable from marketables securities purchased under agreements to resell	
Surat berharga - neto	30,965,610	-	240,667	338,258	1,380,456	2,507,678	6,104,112	20,394,439	Marketable securities - net
Wesel ekspor dan tagihan lainnya - neto	689,623	-	29,820	36,286	623,517	-	-	-	Bills and other receivables - net
Kredit yang diberikan - neto	114,386,118	-	2,246,725	4,634,231	12,230,429	5,746,626	23,912,120	65,615,987	Loans - net
Pembiayaan syariah - neto	8,561,168	-	277,942	395,860	571,078	335,986	1,850,999	5,129,303	Sharia financing - net
Tagihan Derivatif	1,289	1,289	-	-	-	-	-	-	Derivative payable
Tagihan akseptasi - neto	288,425	-	88,802	106,732	92,891	-	-	-	Acceptances receivable - net
Penyerahan saham - neto	188,786	188,786	-	-	-	-	-	-	Investments in shares - net
Bunga yang masih akan diterima	1,367,656	-	1,367,656	-	-	-	-	-	Accrued interest income
Aset lain-lain - neto*)	17,871	17,871	-	-	-	-	-	-	Other assets - net*)
Total	179,959,810	3,738,020	24,214,802	5,511,367	14,898,371	8,590,290	31,867,231	91,139,729	Total
LIABILITAS									
Liabilitas segera	2,212,830	2,212,830	-	-	-	-	-	-	Obligations due immediately
Simpanan nasabah	126,478,387	53,555,892	28,967,414	33,412,790	8,890,652	1,651,639	-	-	Deposits from customers
Simpanan nasabah - syariah	948,316	948,316	-	-	-	-	-	-	Deposits from customers-sharia
Simpanan dari bank lain	2,541,540	-	2,239,641	132,062	155,712	14,125	-	-	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	23	23	-	-	-	-	-	-	Derivatives payable
Liabilitas akseptasi	288,944	-	89,149	54,491	145,304	-	-	-	Marketable securities Acceptances payable
Efek hutang yang diterbitkan - neto	957,991	-	-	-	598,613	319,191	40,187	-	Debt securities issued - net
Pinjaman yang diterima	20,323,823	-	1,338,477	4,613	3,520,233	15,460,500	-	-	Borrowings
Bunga yang masih harus dibayar dan bagi hasil	285,191	-	285,191	-	-	-	-	-	Accrued interest expense and revenue sharing
Liabilitas lain-lain **)	499,943	499,943	-	-	-	-	-	-	Other liabilities**)
Obligasi subordinasi	3,678,849	-	-	-	690,344	2,988,505	-	-	Subordinated bonds
	158,215,837	57,217,004	32,919,872	33,603,956	14,000,858	20,433,960	40,187	--	
Perbedaan jatuh tempo	21,743,973	(53,478,984)	(8,705,070)	(28,092,589)	897,513	(11,843,670)	31,827,044	91,139,729	Maturity gap

*) Terdiri dari setoran jaminan dan aset ijarah

*) Consists of security deposits and ijarah assets

***) Terdiri dari setoran jaminan, jasa produksi, dan penghargaan kerja

**) Consist of security deposits, production service, and gratuity

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

31 Desember/December 31, 2022

	Nilai tercatat/ Carrying value	Tidak mempunyai tanggal jatuh tempo	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 sampai 3 bulan/ More than 1 to 3 months	Lebih dari 3 sampai 12 bulan/ More than 3 to 12 months	Lebih dari 1 sampai 2 tahun/ More than 1 to 2 years	Lebih dari 2 sampai 5 tahun/ More than 2 to 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
		kontraktual/ No contractual maturity							
ASET									ASSETS
Kas	3,300,031	3,300,031	-	-	-	-	-	-	Cash
Giro pada									Current accounts with
Bank Indonesia	13,032,593	-	13,032,593	-	-	-	-	-	Bank Indonesia
Giro pada bank									Current accounts with
lain - neto	1,243,627	-	1,243,627	-	-	-	-	-	other banks - net
Penempatan pada Bank									Placements with Bank
Indonesia dan									Indonesia and
bank lain - neto	7,154,674	-	7,154,674	-	-	-	-	-	other bank - net
Tagihan atas efek-efek yang dibeli									Receivable from marketables securities
dengan dengan janji dijual kembali	5,468,915	-	5,230,374	-	-	-	-	238,541	purchased under agreements to resell
Surat berharga - neto	27,382,318	-	7,870,093	915,660	1,684,004	3,040,084	6,892,094	6,980,383	Marketable securities - net
Wesel ekspor dan									Bills and
tagihan lainnya - neto	843,826	-	29,931	753,604	60,291	-	-	-	other receivables - net
Kredit yang diberikan - neto	106,707,881	-	2,145,657	5,705,168	11,083,071	6,066,425	21,891,835	59,815,725	Loans - net
Pembiayaan syariah - neto	7,256,033	-	301,892	327,769	441,686	299,911	1,482,227	4,402,548	Sharia financing - net
Tagihan Derivatif	17,388	17,388	-	-	-	-	-	-	Derivative payable
Tagihan akseptasi - neto	225,596	-	90,343	93,658	41,595	-	-	-	Acceptances receivable - net
Penyertaan saham - neto	140,790	140,790	-	-	-	-	-	-	Investments in shares - net
Bunga yang masih									Accrued interest
akan diterima	1,169,105	-	1,169,105	-	-	-	-	-	income
Aset lain-lain - neto*)	37,185	37,185	-	-	-	-	-	-	Other assets - net*)
Total	173,979,962	3,495,394	38,268,289	7,795,859	13,310,647	9,406,420	30,266,156	71,437,197	Total
LIABILITAS									LIABILITIES
Liabilitas segera	2,403,981	2,403,981	-	-	-	-	-	-	Obligations due immediately
Simpanan nasabah	122,019,343	51,428,590	20,803,090	21,256,884	25,503,985	3,023,887	2,907	-	Deposits from customers
Simpanan nasabah - syariah	948,316	948,316	-	-	-	-	-	-	Deposits from customers-
Simpanan dari bank lain	4,461,790	-	4,126,070	117,814	113,739	104,167	-	-	sharia
Liabilitas derivatif	2,207	2,207	-	-	-	-	-	-	Deposits from other banks
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan									Derivatives payable
janji dibeli kembali	3,081,103	-	3,081,103	-	-	-	-	-	Liabilities from marketable securities
Liabilitas akseptasi	227,970	-	90,343	96,031	41,596	-	-	-	sold under agreements to repurchase
Efek utang yang									Acceptances payable
diterbitkan - neto	1,871,461	-	-	-	903,103	884,672	83,686	-	Debt securities
Pinjaman yang diterima	17,533,761	-	993,190	-	3,206,553	7,335,558	3,044,030	2,954,430	issued - net
Bunga yang masih harus									Borrowings
dibayar dan bagi hasil	254,160	-	254,160	-	-	-	-	-	Accrued interest expense
Liabilitas lain-lain**)	576,882	576,882	-	-	-	-	-	-	and revenue sharing
Obligasi subordinasi	3,679,163	-	-	-	-	690,403	1,772,245	1,216,515	Other liabilities**)
	157,060,137	55,359,976	29,347,956	21,470,729	29,768,976	12,038,687	4,902,868	4,170,945	Subordinated bonds
Perbedaan jatuh tempo	16,919,825	(51,864,582)	8,920,333	(13,674,870)	(16,458,329)	(2,632,267)	25,363,288	67,266,252	Maturity gap

*) Terdiri dari setoran jaminan dan aset ijarah

*) Consists of security deposits and ijarah assets

***) Terdiri dari setoran jaminan, jasa produksi, dan penghargaan kerja

**) Consist of security deposits, production service, and gratuity

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Bank dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan pada pembayaran kontraktual yang tidak didiskonto:

The table below summarizes the maturity profile of the Bank and its subsidiaries financial liabilities as of December 31, 2023 and 2022 based on undiscounted contractual payments:

31 Desember 2023/December 31, 2023							
				Lebih dari 1 Bulan sampai 3 Bulan/ More than 1 Month to 3 Months	Lebih dari 3 Bulan sampai 12 Bulan/ More than 3 Months to 12 Months	Lebih dari 12 Bulan/ More than 12 Months	
Total	Pada permintaan/ On demand	1 Bulan/ 1 Month					
Liabilitas Keuangan							Financial Liabilities
Liabilitas segera	2,212,830	2,212,830	-	-	-	-	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah dan syariah	129,968,243	50,986,313	26,397,835	30,843,211	20,089,245	1,651,639	Deposits from customers and sharia
Simpanan dari bank lain	2,541,540	-	2,274,746	132,062	120,607	14,125	Deposits from other banks
Liabilitas akseptasi	288,944	-	89,149	54,491	145,304	-	Acceptances payable
Efek hutang yang diterbitkan - neto	957,991	-	-	-	879,704	78,287	Debt securities issued - net
Pinjaman yang diterima	20,323,823	-	1,338,477	4,613	3,520,233	15,460,500	Borrowings
Bunga yang masih harus dibayar dan bagi hasil	285,191	-	285,191	-	-	-	Accrued interest expense and revenue sharing
Liabilitas lain-lain*)	499,943	499,943	-	-	-	-	Other liabilities*)
Obligasi subordinasi	3,678,849	-	-	-	690,344	2,988,505	Subordinated bonds
Total liabilitas keuangan	160,757,354	53,699,086	30,385,398	31,034,377	25,445,437	20,193,056	Total financial liabilities

*) Terdiri dari setoran jaminan, jasa produksi, dan penghargaan kerja

*) Consist of security deposits, production service, and gratuity

31 Desember 2022/December 31, 2022							
				Lebih dari 1 Bulan sampai 3 Bulan/ More than 1 Month to 3 Months	Lebih dari 3 Bulan sampai 12 Bulan/ More than 3 Months to 12 Months	Lebih dari 12 Bulan/ More than 12 Months	
Total	Pada permintaan/ On demand	1 Bulan/ 1 Month					
Liabilitas Keuangan							Financial Liabilities
Liabilitas segera	2,212,830	2,212,830	-	-	-	-	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah dan syariah	122,815,322	52,224,569	20,803,090	21,256,884	25,503,985	3,026,794	Deposits from customers and sharia
Simpanan dari bank lain	4,461,790	-	4,126,070	117,814	113,739	104,167	Deposits from other banks
Liabilitas akseptasi	227,970	-	90,343	96,031	41,596	-	Acceptances payable
Kewajiban derivatif	2,207	2,207	-	-	-	-	Derivatives payable
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3,081,103	-	3,081,103	-	-	-	Liabilities from marketable securities sold under agreements to repurchase
Efek utang yang diterbitkan - neto	1,871,461	-	-	-	903,103	968,358	Debt securities issued - net
Pinjaman yang diterima	17,533,761	-	993,190	-	3,206,553	13,334,018	Borrowings
Bunga yang masih harus dibayar dan bagi hasil	285,191	-	285,191	-	-	-	Accrued interest expense and revenue sharing
Liabilitas lain-lain*)	576,882	576,882	-	-	-	-	Other liabilities*)
Obligasi subordinasi	3,679,163	-	-	-	-	3,679,163	Subordinated bonds
Total liabilitas keuangan	156,747,680	55,016,488	29,378,987	21,470,729	29,768,976	21,112,500	Total financial liabilities

*) Terdiri dari setoran jaminan, jasa produksi, dan penghargaan kerja

*) Consist of security deposits, production service, and gratuity

Bank dan entitas anak telah membangun model pengukuran risiko likuiditas untuk mengukur risiko likuiditas dari portofolio aset dan liabilitas Bank dan

The Bank and its subsidiaries has developed a liquidity risk measurement model to measure the liquidity risk of the Bank and its subsidiaries' assets

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)**

entitas anak berdasarkan skenario normal, spesifik, dan krisis secara triwulan dengan proses *stress test* likuiditas.

and liabilities portfolio, based on normal case, specific case, and crisis case scenarios by liquidity stress testing process.

49. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga merupakan potensi kerugian Bank dan entitas anak yang timbul akibat fluktuasi suku bunga pasar yang berlawanan dengan posisi portofolio Bank dan entitas anak.

Bank dan entitas anak melakukan pengukuran risiko suku bunga meliputi penilaian risiko suku bunga yang melekat pada aset, kewajiban, dan pada posisi *off balance sheet*; penggunaan konsep keuangan yang berlaku secara umum dan teknik-teknik manajemen risiko; asumsi dan parameter yang terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala; terintegrasi dengan proses manajemen risiko secara rutin baik dari aspek pengambilan keputusan, struktur *governance* maupun proses alokasi modal internal. Dengan menggunakan metodologi tersebut, Bank dan entitas anak dapat mengidentifikasi risiko suku bunga dari portofolio aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga serta menentukan besaran risiko terhadap Bank dan entitas anak.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 :

49. Interest Rate Risk

Interest rate risk is the Bank and its subsidiaries' potential losses arising from market interest rates fluctuations as opposed to the position of the Bank and its subsidiaries' portfolios.

The Bank and its subsidiaries conduct measurement of interest rate risk that includes assessing inherent interest rate risk in asset, liabilities, and off balance sheet positions; implementation of the generally applicable financial concept and risk management techniques; assumptions and parameters which are documented and evaluated regularly; integrated with periodic risk management process either from the aspect of decision making, governance structure or internal capital allocation process. By using such methodologies, the Bank and its subsidiaries can identify interest rate risk of asset and liabilities portfolio that are sensitive to interest rate changes and determine the risk scale for the Bank and its subsidiaries.

The following table presents information on the average annual interest rates for significant financial assets and liabilities for the years ended December 31, 2023 and 2022 :

	31 Desember/ December 31, 2023		31 Desember/ December 31, 2022		
	Rupiah/ Rupiah	Mata uang asing/ Foreign currencies	Rupiah/ Rupiah	Mata uang asing/ Foreign currencies	
ASET					ASSETS
Giro pada bank lain	1.38	0.00	1.18	0.05	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank Indonesia dan bank Lain	4.30	1.34	3.98	0.53	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga	6.10	2.40	6.00	2.20	Marketable securities
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	6.22	0.00	5.73	0.00	Receivable from marketable securities purchased under agreement to resell
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	4.00	1.50	6.80	0.00	Bills and other receivables
Kredit yang diberikan	12.11	6.84	12.15	2.27	Loans
LIABILITAS					LIABILITIES
Simpanan nasabah					Deposits from customers
- Giro	0.06	0.02	0.13	0.02	Current accounts -
- Tabungan	0.12	0.04	0.27	0.04	Savings -
- Deposito berjangka	3.48	1.31	3.38	0.47	Time deposits -
Simpanan dari bank lain					Deposits from other banks
- Giro	0.45	0.00	0.66	0.00	Current accounts -
- Tabungan	1.07	0.00	1.09	0.00	Savings -
- Deposito berjangka	4.34	0.00	3.52	0.00	Time deposits -
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	0.00	0.00	6.05	0.00	Liabilities from marketable securities sold under agreement to repurchase
Pinjaman yang diterima	8.92	0.00	7.15	0.00	Borrowings
Efek utang yang diterbitkan	8.04	0.00	8.44	0.00	Debt securities issued

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank dan entitas anak terhadap risiko tingkat suku bunga (gross):

The following tables summarize the Bank and its subsidiaries' exposures to the interest rate risk (gross):

Aset Keuangan	31 Desember/December 31, 2023										Suku bunga tetap/ Fixed Interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non Interest bearing	Total	
	Lebih dari 3 bulan tapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but not more than 1 year	Lebih dari 1 tahun tapi tidak lebih dari 2 tahun/ More than 1 year but not more than 2 years	Lebih dari 2 tahun tapi tidak lebih dari 3 tahun/ More than 2 years but not more than 3 years	Lebih dari 3 tahun tapi tidak lebih dari 4 tahun/ More than 3 years but not more than 4 years	Lebih dari 4 tahun tapi tidak lebih dari 5 tahun/ More than 4 years but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	5 years	5 years	5 years	Total				
Aset Keuangan														
Kas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.530.074	-	3.530.074
Giro pada Bank Indonesia	14.879.767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.879.767
Giro pada bank lain	1.196.787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.196.787
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.886.989	-	3.886.989
Surat berharga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.976.967	-	30.976.967
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	-	689.974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	689.974
Tagihan derivatif	1.289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.289
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288.944	-	288.944
Kredit yang diberikan	3.556.636	9.501.328	3.432.278	4.400.409	1.555.200	26.027	12.892.792	80.935.399	-	-	-	8.778.114	-	116.300.069
Pembayaran syaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.089	-	190.089
Penyertaan saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.367.656	-	1.367.656
Bunga yang masih akan diterima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.871	-	17.871
Aset lain-lain*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total aset keuangan	19.634.479	10.191.302	3.432.278	4.400.409	1.555.200	26.027	12.892.792	116.098.299	13.883.804	17.871	-	182.104.590	-	182.104.590
Liabilitas Keuangan														
Liabilitas segera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.212.830
Simpanan nasabah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.289.773
- Giro	21.259.773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.259.773
- Tabungan	31.302.277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.302.277
- Deposito berjangka	46.420.617	2.881.565	24.614.155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.916.337
Simpanan syaria	948.316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	948.316
Simpanan dari bank lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giro	528.779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528.779
- Tabungan	442.577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442.577
- Deposito berjangka	494.546	187.565	2.919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685.030
- Interbank call/money	880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880.000
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.244.805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.244.805
Liabilitas derivatif	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288.944	-	288.944
Efek hutang yang diterbitkan	957.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	957.991
Pinjaman yang diterima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bunga yang masih harus dibayar dan bagi hasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.323.823	-	20.323.823
Liabilitas lain-lain**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285.191	-	285.191
Total liabilitas keuangan	107.459.704	3.068.130	24.617.074	4.400.409	1.555.200	26.027	12.892.792	20.612.767	10.885.840	489.943	-	158.756.539	-	158.756.539
Total gap repricing suku bunga	(87.825.225)	7.122.172	(21.184.795)	-	-	-	-	95.475.532	2.997.964	489.943	-	23.347.951	-	23.347.951

*) Terdiri dari setoran jaminan dan aset lancar

**) Terdiri dari setoran jaminan, jasa produksi, dan penghargaan kerja

*) Consists of security deposits and loan assets

**) Consist of security deposits, production service, and gratuity

- i. Risiko tingkat suku bunga
Analisis sensitivitas untuk beberapa faktor pasar menunjukkan bagaimana laba rugi dan ekuitas dapat dipengaruhi oleh perubahan dari beberapa faktor risiko sesuai dengan tabel dibawah ini. Secara umum, sensitivitas diestimasi dengan membandingkan suatu nilai awal ke nilai tertentu setelah perubahan tertentu dari faktor pasar, dengan mengasumsikan seluruh variabel lainnya tetap. Sensitivitas atas laporan laba rugi merupakan efek atas perubahan estimasi suku bunga atas laba rugi untuk suatu periode, berdasarkan nilai suku bunga mengambang atas aset dan liabilitas yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan yang dimiliki Bank dan entitas anak. Analisis sensitivitas atas laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dihitung dengan menilai kembali perubahan estimasi suku bunga tetap atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Jumlah sensitivitas atas laporan laba rugi komprehensif konsolidasian didasarkan pada asumsi bahwa terdapat perubahan paralel dalam kurva penghasilan.

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Bank dan entitas anak terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

- i. *Interest rate risk*
Sensitivity analysis for several market factors showing how profit or loss and equity could be affected by changes in the relevant risk factor are in the following tables below. In general, sensitivity is estimated by comparing an initial value to the value derived after a specified change in the market factor, assuming all other variables are constant. The sensitivity of the statement of income is the effect of the assumed changes in interest rates on the profit or loss for a period, based on the floating rate trading and non-trading financial assets and liabilities held by the Bank and its subsidiaries. The sensitivity of the consolidated statement of comprehensive income is calculated by revaluing fixed rate available-for-sale financial assets for the effects of the assumed changes in interest rates. The total sensitivity of the consolidated statement of comprehensive income is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

The table below demonstrates the sensitivity of the Bank and its subsidiaries' consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income to reasonably possible changes in interest rates for fixed rate financial assets and liabilities as of December 31, 2023 and 2022:

		31 Desember 2023/December 31, 2023	
		Dampak ke	
		laporan laba rugi dan	
		penghasilan komprehensif	
		lain konsolidasian	
		sebelum pajak/	
		Impact to the	
		consolidated	
		statement	
		of comprehensive	
		income before tax	
Perubahan basis	poin/Change		
in basis point			
Rupiah	+125	(198,406)	Rupiah
	+50	(79,362)	
	-50	79,362	
	-125	198,406	
Valas	+125	(53,641)	Foreign currency
	+50	(21,456)	
	-50	21,456	
	-125	53,641	

31 Desember 2022/December 31, 2022

	Perubahan basis point/Change in basis point	Dampak ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebelum pajak/ Impact to the consolidated statement of comprehensive income before tax	
Rupiah	+125	(407)	Rupiah
	+50	(112,002)	
	-50	112,002	
	-125	407	
Valas	+125	(74,952)	Foreign currency
	+50	(29,981)	
	-50	29,981	
	-125	74,952	

50. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank dan entitas anak.

Sebagai wujud pelaksanaan proses terhadap risiko operasional yang mungkin terjadi, Bank dan entitas anak telah mengembangkan suatu sistem dengan menggunakan metodologi pengukuran sendiri, menggunakan *tools Risk Control Self Assessment (RCSA)* yang dilakukan oleh masing-masing *risk taking unit*, melakukan penilaian terhadap terhadap indikator-indikator utama (*Key Risk Indicator*) Bank dan entitas anak yang digunakan sebagai *early warning system* serta wajib melaporkan timbulnya kerugian/potensi kerugian yang timbul akibat risiko operasional dalam *tools Lost Event Database (LED)*. Keseluruhan proses dimaksud merupakan upaya guna meningkatkan *risk awareness* terhadap potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh Bank dan entitas anak dan sebagai pedoman bagi manajemen guna melakukan pengendalian dan mitigasi terhadap dampak risiko yang timbul.

Sebagai bentuk kecukupan penerapan manajemen risiko, Bank dan entitas anak menerapkan proses manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank dan entitas anak

50. Operational Risk

Operational risk is the risk due to the inadequacy and/or non-functioning of internal processes, human error, system failure, and/or the existence of external events affecting the Bank and its subsidiaries' operations.

As a possible implementation of the process of operational risks, the Bank and its subsidiaries has developed a system using its own measurement methodology, using Risk Control Self Assessment (RCSA) tools performed by each risk taking unit, assessing key indicators (Key Risk Indicator) Bank used as early warning system and must report loss/potential loss arising from operational risk in Lost Event Database (LED) tools. The whole process referred to is an effort to increase risk awareness to the potential risks faced by the Bank and its subsidiaries and as a guide for management to control and mitigate the impact of risks arising.

As a form of the adequacy of risk management implementation, the Bank and its subsidiaries implements a risk management process in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 concerning the Implementation of

Umum diantaranya melakukan pengkajian atas produk dan/atau aktivitas baru atau pengembangan yang meningkatkan profil risiko produk dan/atau aktivitas Bank dan entitas anak.

Risk Management for Commercial Banks among others undertaking an assessment of new products and/or activities or increase the risk profile of the Bank and its subsidiaries' product and/or activity.

Bank dan entitas anak telah melakukan perhitungan beban modal risiko operasional berdasarkan *Basel Committee on Banking Supervision* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bank dan entitas anak dalam melakukan perhitungan ATMR risiko operasional menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*). Bank dan entitas anak menggunakan metodologi pendekatan *Basic Indicator* dan saat ini masih dalam proses pengembangan dengan metode yang lebih kompleks.

The Bank and its subsidiaries has calculated the operational risk capital charge under the Basel Committee on Banking Supervision and the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2016 dated January 29, 2016 regarding the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks. Based on these provisions, the Bank and its subsidiaries performs operational risk calculations using the Basic Indicator Approach. The Bank and its subsidiaries use the methodology of the Basic Indicator approach and are currently in a more complex development process method.

Bank dan entitas anak memiliki *Business Continuity Management* (BCM) yaitu proses manajemen atau protokol terpadu dan menyeluruh untuk memastikan kelangsungan operasional Bank dan entitas anak dalam menjalani bisnis dan melayani nasabah. Ruang lingkup BCM terdiri dari *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai prosedur kelangsungan usaha Bank dan entitas anak serta *Emergency Response Plan* (ERP) sebagai prosedur tanggap darurat bencana dalam rangka penyelamatan data dan aset serta *Disaster Recovery Plan* (DRP) sebagai prosedur kelangsungan sistem dan infrastruktur pendukung Teknologi Informasi dan terus disempurnakan serta disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan sistem yang dimiliki Bank dan entitas anak.

The Bank and its subsidiaries has a Business Continuity Management (BCM), which is an integrated and comprehensive management or protocol process to ensure the continuity of the Bank and its subsidiaries' operations in conducting business and serving customers. The BCM scope consists of a Business Continuity Plan (BCP) as a Bank and its subsidiaries business continuity procedure and Emergency Response Plan (ERP) as a disaster emergency response procedure in order to save data and assets as well as a Disaster Recovery Plan (DRP) as a continuation procedure for Information Technology supporting systems and infrastructure and is continuously refined and adapted to the business and system developments of the Bank and its subsidiaries.

51. Manajemen Modal dan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

51. Capital Management and Capital Adequacy Ratio (CAR)

Tujuan manajemen permodalan Bank dan entitas anak adalah untuk memastikan bahwa permodalan telah memenuhi persyaratan permodalan dari ketentuan eksternal, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit, untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dalam memaksimalkan nilai pemegang saham.

The objective of the Bank and its subsidiaries' capital management is to ensure that capital meets capital requirements of external provisions, as a buffer to absorb operating losses and other losses, as a basis for establishing the maximum crediting limit, to evaluate bank's ability to generate profits in maximizing shareholder value.

Bank dan entitas anak mengatur struktur modal dan membuat penyesuaian atas perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko kegiatannya. Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Bank dan entitas anak melakukan pengukuran tingkat kecukupan modal yang dinyatakan dalam rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR).

The Bank and its subsidiaries regulates the capital structure and makes adjustments to changes in economic conditions and risk characteristics of its activities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Bank and its subsidiaries measures the level of capital adequacy expressed in the capital adequacy ratio (CAR).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

CAR pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dimana komponen modal terdiri dari modal inti (modal inti utama/*Common Equity Tier 1* dan modal inti tambahan) dan modal pelengkap (*Tier 2*).

Penentuan kepatuhan Bank dan entitas anak terhadap ketentuan pemenuhan minimum rasio kecukupan modal yang berlaku berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016. Adapun berdasarkan penilaian *self-asesessment* atas profil risiko 31 Desember 2022 berada pada peringkat *low to moderate*, maka CAR minimum per 31 Desember 2023 dan 2022 ditetapkan masing-masing sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (entitas induk) adalah sebagai berikut:

CAR on December 31, 2023 and 2022 was calculated based on the Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) Number 34/POJK.03/2016 dated September 22, 2016 concerning Amendments to the Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) Number 11/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks where capital consist of core capital (*Common Equity Tier 1* and additional *Tier 1*) and supplementary capital (*Tier 2*).

The determination of the Bank and its subsidiaries' compliance with the provisions on the fulfillment of the minimum capital adequacy ratio applicable based on the Financial Services Authority (POJK) Regulation No.11/POJK.03/2016. Based on the Bank and its subsidiaries' risk assessment as of December 31, 2022, which are low to moderate the minimum CAR as of December 31, 2023 and 2022 are set at 9% to less than 10%.

The capital adequacy ratio as of December 31, 2023 and 2022 (parent entity) are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Modal Inti (<i>Tier 1</i>)			<i>Core Capital (Tier 1)</i>
- Modal Inti Utama	15,957,427	14,153,318	<i>Common Equity Tier 1 -</i>
- Modal Inti Tambahan		-	<i>Additional Tier 1 -</i>
Jumlah modal inti (<i>Tier 1</i>)	<u>15,957,427</u>	<u>14,153,318</u>	<i>Total Core Capital (Tier 1)</i>
Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>)	<u>4,279,495</u>	<u>4,216,313</u>	<i>Supplementary Capital (Tier 2)</i>
Total modal	<u>20,236,922</u>	<u>18,369,631</u>	<i>Total Capital</i>
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit	81,782,417	75,595,792	<i>Risk Weighted Assets for Credit Risk</i>
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional	7,050,353	3,482,497	<i>Risk Weighted Assets for Operational Risk</i>
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Pasar	<u>4,929,560</u>	<u>15,586,791</u>	<i>Risk Weighted Assets for Market Risk</i>
Total ATMR	<u>93,762,330</u>	<u>94,665,080</u>	<i>Tota RWA</i>
Rasio CET 1	17.02%	14.95%	<i>CET 1 Ratio</i>
Rasio <i>Tier 1</i>	17.02%	14.95%	<i>Tier 1 Ratio</i>
Rasio <i>Tier 2</i>	4.56%	4.45%	<i>Tier 2 Ratio</i>
Total rasio	21.58%	19.40%	<i>Ratio Total</i>
Rasio Minimum <i>Tier 1</i>	6.00%	6.00%	<i>Tier 1 Minimum Ratio</i>
Rasio Minimum CET 1	4.50%	4.50%	<i>CET 1 Minimum Ratio</i>
CAR Minimum berdasarkan Profil Risiko	9.24%	9.24%	<i>Minimum CAR Based on Risk Profile</i>

52. Manajemen Risiko

Bank dan entitas anak telah mengimplementasikan prosedur manajemen risiko sesuai dengan POJK No.18/POJK.03/2016, tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sehingga Bank dan entitas anak harus mengelola serta melakukan mitigasi risiko sesuai ruang lingkup aktivitas bisnisnya, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan.

Profil Risiko

Bank dan entitas anak juga membuat profil risiko yang secara garis besar dapat memetakan unit kerja yang memiliki risiko maupun potensi risiko yang mengganggu kelangsungan bisnis Bank dan entitas anak serta menggunakan 5 (lima) komposit untuk delapan jenis risiko yang dihadapi Bank dan entitas anak.

Bank dan entitas anak telah membentuk struktur organisasi manajemen risiko yang terpusat dan independen yang memiliki fungsi mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengelola risiko-risiko dasar serta menetapkan pedoman serta kebijakan risiko.

Pengungkapan mengenai risiko kredit, risiko nilai tukar, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko pasar, dan risiko operasional telah diungkapkan dalam catatan tersendiri (Catatan 46, 47, 48, dan 49).

a. Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis dalam bisnis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Bank dan entitas anak mengelola risiko hukum dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dan entitas anak dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dan entitas anak dari segi hukum.

b. Risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank dan entitas anak atau persepsi negatif terhadap Bank dan entitas anak.

52. Risk Management

The Bank and its subsidiaries has implemented risk management procedures in accordance with the POJK No.18/POJK.03/2016, dated March 16, 2016 regarding the Implementation of Risk Management for Commercial Banks and SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 concerning the Application of Risk Management for Commercial Banks so the Bank and its subsidiaries must manage and mitigate risks according to the scope of its business activities, namely credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk.

Risk Profile

The Bank and its subsidiaries also prepare a risk profile which is able to map those business units which carry risks as well as the potential risks that affect the Bank and its subsidiaries' abilities to continue as a going concern and also use five composites for eight types of risk encountered by the Bank and its subsidiaries.

The Bank and its subsidiaries have established an independent and centralized organization structure for risk management which has the function to identify measure, monitor and maintain basic risk and to set guidelines and risk policy.

The disclosure on credit risk, foreign exchange risk, liquidity risk, interest rate risk, market risk, and operational risk has been made in separate notes (Notes 46, 47, 48, and 49).

a. Legal risks

Legal risk is the risk raised by weaknesses in juridical aspects of the business, which may be caused by legal claims, non-existence of supported regulation or weaknesses in agreements, such as unfulfilled terms and conditions in contracts and binding collateral which is not complete.

Legal risks are managed by ensuring that all activities and business relationships between the Bank and its subsidiaries with third parties are based on rules and conditions which able to protect the Bank and its subsidiaries' interests from a legal perspective.

b. Reputational risks

Reputational risk is the risk that is caused by negative publicity related to the business activity of the Bank and its subsidiaries or negative perception of the Bank and its subsidiaries.

Bank dan entitas anak mengelola risiko reputasi dengan memastikan kesesuaian antara aktivitas kegiatan usaha Bank dan entitas anak bersama-sama dengan aktivitas lain sehingga reputasi Bank dan entitas anak tetap terjaga.

c. Risiko strategis

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank dan entitas anak yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank dan entitas anak terhadap perubahan eksternal.

Bank dan entitas anak mengelola risiko strategis melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan setiap kebijakan strategis secara kolektif dan komprehensif oleh Direksi dan Komite-Komite yang telah dibentuk.

d. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank dan entitas anak tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank dan entitas anak melaksanakan fungsi kepatuhan meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank dan entitas anak;
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank dan entitas anak; tindakan mengelola risiko kepatuhan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
4. Memastikan kepatuhan Bank dan entitas anak terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank dan entitas anak kepada Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

The Bank and its subsidiaries manage their reputational risk by ensuring that its business activities are in conformity with its other activities, so as to maintain the Bank and its subsidiaries' reputation.

c. Strategic risks

Strategic risk is the risk that is caused by inappropriate determination and implementation of the Bank and its subsidiaries strategy, inappropriate business decisions or being un-responsive to external changes.

The Bank and its subsidiaries manage strategic risks through a consideration of, and decision-making process regarding every strategic policy in a collective and comprehensive manner performed by the established Directors and Committees.

d. Compliance risks

Compliance risk is the risk that rises because Bank and its subsidiaries did not comply and/or did not follow the law and regulation, including sharia principle for Sharia Bank and Sharia Business Unit.

The Bank and its subsidiaries perform compliance function including:

1. *To create compliance culture in all level of organization and the Bank and its subsidiaries' business activities;*
2. *Manages compliance risk face by the Bank and its subsidiaries; managing compliance risk is based on Bank Indonesia's regulation about Risk Management for the Bank and its subsidiaries;*
3. *Ensure policy, regulation, system and procedure, and bank business activities inline with Bank Indonesia's regulation and law, including sharia principle for Sharia Bank and Sharia Business Unit; and*
4. *Ensure bank's compliance with commitments made by the Bank and its subsidiaries to Indonesia and/or other monitoring authority.*

**53. Jaminan Pemerintah terhadap Liabilitas
Pembayaran Bank Umum**

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, dinyatakan dalam pasal 8 bahwa dengan diakhirinya tugas dan dibubarkannya BPPN, Program Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum yang semula dilakukan oleh BPPN berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 tahun 1998 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1998, selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) sebagaimana diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 2004, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tatacara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Program Penjaminan Pemerintah melalui UP3 telah berakhir pada tanggal 22 September 2005, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Terhadap Pembayaran Bank Umum untuk periode 1 Juli sampai 21 September 2005. Sebagai pengganti UP3 Pemerintah telah membentuk Lembaga Independen, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dimana LPS menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000 untuk per nasabah per bank.

Pada tanggal 13 Januari 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Perppu No. 3/2008 menjadi Undang-undang.

Suku bunga penjaminan LPS pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 4,25% dan 3,75% untuk simpanan dalam mata uang rupiah, dan masing-masing sebesar 2,25% dan 1,75% untuk simpanan dalam mata uang asing.

**53. Government Guarantee for Payment Liability of
Commercial Banks**

Based on Article 8 of the Decision No. 15 year 2004 of the President of the Republic of Indonesia regarding the termination of the role and winding-up of IBRA, the Government Guarantee Program on the obligations of domestic banks, which was originally handled by IBRA based on the Decisions of the President of the Republic of Indonesia No. 26 year 1998 and No. 27 year 1998, shall be handled by the Ministry of Finance, specifically by the Government Guarantee Implementation Unit (Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah) (UP3) as provided in the Decision of the President of the Republic of Indonesia No. 17 year 2004, which was further regulated by the Decision No. 84/KMK.06/2004 dated February 27, 2004 of the Ministry of Finance regarding the Amendment of Decision No. 179/ KMK.017/2000 of the Ministry of Finance on the Terms, Implementing Guidelines, and Conditions of the Government Guarantees on the obligations of commercial banks.

The Guarantee Program by the Government through UP3 ended on September 22, 2005, as stated in Regulation No. 68/PMK.05/2005 dated August 10, 2005 of the Ministry of Finance concerning the Calculation and Payments of Premium on Guarantee Program from Commercial Banks for the period July 1 to September 21, 2005. To replace UP3, the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS), which is an independent institution that guarantees public funds including funds from other banks in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, savings deposits and/or other equivalent form, was established based on Law of the Republic of Indonesia No. 24 year 2004 dated September 22, 2004.

Based on Government Regulation No. 66 year 2008 dated October 13, 2008 regarding the Amount of Deposit Guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation, the amount of deposit covered by LPS is up to Rp2,000 per depositor per bank.

On January 13, 2009, the Government of the Republic of Indonesia stipulated Perppu No. 3/2008 to become a law.

LPS interest rates guarantee as of December 31, 2023 and 2022 were 4.25% and 3.75%, respectively, for deposits in Rupiah and 2.25% and 1.75% for deposits in foreign currencies.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank dan entitas anak telah membayar premi program penjaminan masing-masing sebesar Rp257.285 dan Rp264.985.

The Bank and its subsidiaries paid a premium on the guarantee program amounting to Rp257,285 and Rp264,985 and for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

54. Perikatan-Perikatan yang Signifikan

54. Significant Agreements

a. Perjanjian penyelenggaraan Anjungan Tunai Mandiri (“ATM”) Bersama

1. Pada tanggal 1 Agustus 2007, Bank mengadakan perjanjian sebagai *Issuer Bank* dengan PT Rintis Sejahtera. Dalam perjanjian tersebut, Bank akan mendapatkan manfaat jaringan ATM PRIMA di 75.744 ATM di seluruh Indonesia. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 14 Mei 2023.
2. Pada tanggal 1 April 2008, Bank mengadakan perjanjian penyelenggaraan ATM Bersama dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronik. Dalam perjanjian tersebut, Bank akan mendapatkan manfaat jaringan ATM Bersama di 81.728 ATM di seluruh Indonesia. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 8 Juni 2024.

a. Joint Automated Teller Machine (“ATM”) agreement

1. On August 1, 2007, the Bank entered into a Joint Issuer Bank agreement with PT Rintis Sejahtera. Based on this agreement, the Bank will utilize a joint ATM network of 75,744 ATM units throughout Indonesia. The agreement will due on May 14, 2023.
2. On April 1, 2008, the Bank entered into a Joint ATM agreement with PT Artajasa Pembayaran Elektronik. Based on this agreement, the Bank will utilize a joint ATM network of 81,728 ATM units throughout Indonesia. The agreement will due on June 8, 2024.

b. Jasa Bank Pengumpulan Uang Tol

Bank telah mengadakan perikatan pengumpulan uang tol dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan data sebagai berikut:

b. Collection of Toll Fees

The Bank has signed an agreement for toll fees collections with PT Jasa Marga (Persero) Tbk summarized as follows:

No.	Kantor Cabang/ Branch	Perusahaan/ Company	No. Perjanjian/ Agreement No.	Tanggal Perjanjian/ Agreement Date
1	Purbaleunyi	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	CH.HK08.004 dan 001/SK-OPS.PKS/2016	1 Februari / February 1, 2016

Berdasarkan perjanjian tersebut, pengelola jalan tol memberi kuasa kepada Bank untuk mengambil hasil pendapatan tol dan menyimpannya di rekening pengelola jalan tol pada Bank.

Based on the agreement, the management of the toll roads gives authorization to the Bank to take the toll fees revenue in cash and deposit it in the management’s account at the Bank.

Masa berlaku perjanjian dimulai sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

The validity period of these agreements started since they were signed and can be extended in accordance with the agreements of the parties.

c. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan beberapa perusahaan BUMN dan Institusi lainnya di Indonesia

1. Pada tanggal 6 Juni 2021, Bank telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

c. Memorandum of Understanding (MoU) and Cooperation Agreements with several state-owned enterprises and other institutions in Indonesia

1. On June 6, 2021, the Bank has signed a Cooperation Agreement with the West Java Provincial Government.

Ruang lingkup Kerja Sama ini tentang pemanfaatan fasilitas layanan perbankan dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan BUMDes di Wilayah Jawa Barat. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 5 tahun.

The scope of this collaboration is about the use of banking service facilities in the context of managing village finances and BUMDes in the West Java region. This agreement has a term of 5 years.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

2. Pada tanggal 15 September 2021, Bank telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Tim Pembina Samsat Provinsi Banten.

Ruang lingkup Kerja Sama ini tentang pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, penerimaan negara bukan pajak dan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta pengesahan surat tanda nomor kendaraan melalui seluruh jaringan kantor dan jaringan elektronik PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada wilayah hukum kepolisian daerah Banten di Provinsi Banten. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 3 tahun.

3. Pada tanggal 16 Agustus 2022 Bank telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Ruang Lingkup Kerja Sama Ini tentang Produk dan Jasa Layanan Perbankan Bagi Pekerja Migran Indonesia. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 3 tahun.

4. Pada tanggal 21 Oktober 2022, Bank telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu.

Ruang Lingkup Kerja Sama Ini tentang Layanan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara *Host to Host*. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 3 tahun.

5. Pada tanggal 26 Januari 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI).

Ruang Lingkup Kerja Sama Ini tentang Pemberian Fasilitas Kredit Ritel, Bantuan Penagihan dan Pembayaran Kolektif Angsuran Kredit Ritel, Layanan Pembayaran Gaji Karyawan, Layanan bjb *Virtual Account Online*.

6. Pada tanggal 1 Februari 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PT Kereta Cepat Indonesia – China (KCIC).

Ruang Lingkup Kerja Sama Ini tentang Pengembangan Integritas Sistem Pembayaran, Penjualan Tiket, dan Jasa Layanan Perbankan.

2. On September 15, 2021, the Bank has signed a Cooperation Agreement with the Banten Province Samsat Development Team.

The scope of this cooperation concerning services for payment of motor vehicle taxes, transfer fees for motor vehicles, contribution of mandatory funds for road traffic accidents, non-tax state revenues and registration and identification of motorized vehicles as well as ratification of vehicle numbers through all office networks and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk in the legal territory of the Banten Regional Police in Banten Province. This agreement has a term of 3 years.

3. On August 16, 2022 the Bank has signed a Memorandum of Understanding with Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

The Scope of This Cooperation Is About Banking Products and Services for Indonesian Migrant Workers. This agreement has a term of 3 years.

4. On October 21, 2022, the Bank has signed a Cooperation Agreement with PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu.

The Scope of This Cooperation Concerning Services for Accepting Local Tax Payments and Regional Retribution on a Host to Host basis. This agreement has a term of 3 years.

5. On January 26, 2023 the Bank signed a Cooperation Agreement with Jenderal Achmad Yani University (UNJANI).

The Scope of This Collaboration Regarding the Provision of Retail Credit Facilities, Payment Services, Online bjb Virtual Account Services Billing Assistance and Collective Payment of Retail Credit Installments, Employee Salary

6. On February 1, 2023 the Bank has signed a Memorandum of Understanding with PT Kereta Api Indonesia - China (KCIC).

The scope of This Cooperation Concerns the Development of Payment System Integrity, Ticket Sales and Banking Services.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

7. Pada tanggal 18 Februari 2023 Bank telah melakukan pendatanganan Nota Kesepahaman dengan Polda Jawa Barat.

Ruang Lingkup Kerja Sama Ini tentang Layanan Penyaluran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Daerah Jawa Barat.
 8. Pada tanggal 10 Maret 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Polda Jawa Barat.

Ruang Lingkup Kerja Sama Ini tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan.
 9. Pada tanggal 16 Maret 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PT Jasa Sarana.

Ruang Lingkup Kerja Sama Ini tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan.
 10. Pada tanggal 19 Juni 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Universitas Gadjah Mada.

Ruang Lingkup Kerja Sama Ini tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 11. Pada tanggal 7 Juni 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Universitas Trisakti.

Ruang Lingkup Kerja Sama Ini tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 12. Pada tanggal 23 Juni 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PT Pertamina (Persero).

Ruang Lingkup Kerja Sama Ini tentang Penempatan Dana Jangka Pendek.
 13. Pada tanggal 03 Juli 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Adhi Persada Beton.

Ruang lingkup Kerja Sama ini tentang Layanan Pembayaran Gaji Karyawan (*Payroll Service*).
 14. Pada tanggal 6 Juli 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Surakarta.
7. On February 18, 2023 the Bank has signed a Memorandum of Understanding with the West Java Regional Police.

The scope of this collaboration concerns the distribution of performance allowances for civil servants at the West Java Regional Police.
 8. On March 10, 2023 the Bank has signed a Memorandum of Understanding with the West Java Regional Police.

The Scope of This Cooperation Regarding the Utilization of Banking Products and Services.
 9. On March 16, 2023 the Bank has signed a Memorandum of Understanding with PT Jasa Sarana.

The Scope of This Cooperation Regarding the Utilization of Banking Products and Services.
 10. On June 19, 2023 the Bank has signed a Memorandum of Understanding with Gadjah Mada University.

The Scope of This Cooperation Concerning Education, Research, and Community Service.
 11. On June 7, 2023 the Bank has signed a Memorandum of Understanding with Trisakti University.

The Scope of This Cooperation Concerning Education, Research, and Community Service.
 12. On June 23, 2023 the Bank has signed a Memorandum of Understanding with PT Pertamina (Persero).

The Scope of This Cooperation Regarding Placement of Short Term Funds
 13. On July 3, 2023 the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Adhi Persada Beton.

The scope of this collaboration is About Employee Salary Payment Services (Payroll Service).
 14. On July 6, 2023 the Bank signed a Cooperation Agreement with the Surakarta City Government.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

- Ruang Lingkup Kerja Sama ini tentang Penyediaan Layanan Perbankan Dalam Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta.
15. Pada tanggal 18 Juli 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon.
- Ruang lingkup Kerja Sama ini tentang Layanan Penerimaan Pembayaran Tiket BRT Trans Cirebon.
16. Pada tanggal 21 Juli 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan BPKAD Kota Cimahi.
- Ruang lingkup Kerja Sama ini tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Kota Cimahi.
17. Pada tanggal 24 Juli 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Flaga Media Asia.
- Ruang lingkup Kerja Sama ini tentang Layanan Pembayaran Gaji Karyawan (*Payroll Service*).
18. Pada tanggal 14 Agustus 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan BPKAD Kota Banjar.
- Ruang Lingkup Kerja Sama ini tentang Layanan Penerimaan Setoran Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjar.
19. Pada tanggal 24 Agustus 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Waskita Karya Infrastruktur
- Ruang Lingkup Kerja Sama ini tentang Layanan Pembayaran Gaji Karyawan (*Payroll Service*).
20. Pada tanggal 25 Agustus 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Ruang Lingkup Kerja Sama ini tentang Layanan Penerimaan Setoran Pajak Daerah di Kabupaten Pangandaran.
21. Pada tanggal 13 September 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Mandiri.
- Ruang Lingkup Kerja Sama ini tentang Jasa Layanan Perbankan.
- The scope of this collaboration concerns the provision of banking services for regional tax revenues in the city of Surakarta.*
15. On July 18, 2023 the Bank signed a Cooperation Agreement with the Cirebon City Regional Development Company.
- The scope of this collaboration concerns the Trans Cirebon BRT Ticket Payment Acceptance Service.*
16. On July 21, 2023 the Bank signed a Cooperation Agreement with BPKAD Cimahi City.
- The scope of this collaboration concerns Cimahi City Regional Tax Payment Receipts.*
17. On July 24, 2023 the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Flaga Media Asia.
- The scope of this collaboration is About Employee Salary Payment Services (Payroll Service).*
18. On August 14, 2023 the Bank signed a Cooperation Agreement with BPKAD Banjar City.
- The scope of this collaboration is about the Service for Accepting Regional Original Income Deposits in Banjar City.*
19. On August 24, 2023 the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Waskita Karya Infrastruktur.
- The scope of this collaboration is about Employee Salary Payment Services (Payroll Service).*
20. On August 25, 2023 the Bank signed a Cooperation Agreement with the Pangandaran Regency Regional Revenue Agency.
- The scope of this collaboration is about Regional Tax Deposit Receiving Services in Pangandaran Regency.*
21. On September 13, 2023 the Bank signed a Cooperation Agreement with Mandiri University.
- The scope of this collaboration concerns banking services.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

22. Pada tanggal 16 September 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia.
- Ruang Lingkup Kerja Sama ini tentang Pemanfaatan Produk Jasa Layanan Perbankan Untuk Mendukung Kegiatan Organisasi.
23. Pada tanggal 16 Oktober 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Bekasi.
- Ruang Lingkup Kerja Sama ini tentang Pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
24. Pada tanggal 16 Oktober 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Universitas Widyatama.
- Ruang Lingkup Kerja Sama ini tentang Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi dan Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan.
25. Pada tanggal 03 November 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Universitas Sriwidjaya.
- Ruang Lingkup Kerja Sama ini tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya serta Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan.
26. Pada tanggal 15 November 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kota Banjar.
- Ruang Lingkup Kerja Sama ini tentang Pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah Domestik Bank bjb.
27. Pada tanggal 17 November 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PT Telkomsel.
- Ruang Lingkup Kerja Sama ini tentang Pemanfaatan Produk Jasa Layanan Perbankan dan Telekomunikasi.
28. Pada tanggal 08 Desember 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Perum Bulog.
- Ruang Lingkup Kerja Sama ini tentang Pemanfaatan Fasilitas Kartu ATM dan Debet Co – Branding Member Boss Food.
22. On September 16, 2023 the Bank signed a Memorandum of Understanding with the Indonesian Sheep and Goat Breeders Association
- The scope of this collaboration concerns the use of banking products and services to support organizational activities*
23. On October 16, 2023 the Bank signed a Cooperation Agreement with the Bekasi City Government.
- The scope of this collaboration concerns regional government credit card management.*
24. On October 16, 2023 the Bank signed a Memorandum of Understanding with Widyatama University.
- The scope of this collaboration is about Tridharma Collaboration in Higher Education and the Utilization of Banking Products and Services.*
25. On November 3, 2023 the Bank signed a Memorandum of Understanding with Sriwidjaya University.
- The scope of this collaboration concerns education, research, community service and resource development and utilization of banking services.*
26. On November 15, 2023 the Bank signed a cooperation agreement with the Banjar City Government.
- The scope of this collaboration concerns the management of domestic government credit cards at Bank bjb.*
27. On November 17, 2023 the Bank signed a Memorandum of Understanding with PT Telkomsel.
- The scope of this collaboration concerns the utilization of banking and telecommunications services products.*
28. On December 8, 2023 the Bank signed a Cooperation Agreement with Perum Bulog.
- The scope of this collaboration concerns the use of ATM and Debit Card Facilities Co - Boss Food Member Branding.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

29. Pada tanggal 13 Desember 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Depok.

Ruang Lingkup Kerja Sama ini tentang Pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah Domestik.

30. Pada tanggal 15 Desember 2023 Bank telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PT Perusahaan Pengembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia.

Ruang Lingkup Kerja Sama ini tentang Addendum MOU Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan.

29. On December 13, 2023 the Bank signed a Cooperation Agreement with the Depok City Government.

The scope of this collaboration concerns the management of domestic government credit cards.

30. On December 15 2023, the Bank signed a Memorandum of Understanding with PT Rajawali Nusantara Indonesia National Economic Development Company.

The scope of this collaboration concerns the Addendum to the MOU for Utilization of Banking Products and Services.

55. Informasi Tambahan Arus Kas

55. Additional Information on Cash Flows

a. Transaksi non-kas

a. Non-cash transaction

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Penambahan aset hak guna melalui liabilitas sewa	83,698	-	<i>Additional right of use assets through lease liabilities</i>

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan.

b. Reconciliation of liability arising from financing activities.

	31 Desember/ December 31, 2022	Arus kas/Cash flows		Lain-lain/ Others	31 Desember/ December 31, 2023	
		Penerimaan/ Receipt	Pembayaran/ Payment			
Pinjaman yang diterima	17,533,761	8,279,249	(5,489,187)	-	20,323,823	<i>Borrowing</i>
Efek hutang yang diterbitkan	1,871,461	-	(916,500)	3,030	957,991	<i>Debt securities issued</i>
Liabilitas sewa	448,901	-	(78,954)	83,698	453,645	<i>Lease liability</i>
Total	23,533,286	8,279,249	(6,484,641)	86,728	21,735,459	Total

	31 Desember/ December 31, 2021	Arus kas/Cash flows		Lain-lain/ Others	31 Desember/ December 31, 2022	
		Penerimaan/ Receipt	Pembayaran/ Payment			
Pinjaman yang diterima	12,161,667	12,449,516	(7,077,422)	-	17,533,761	<i>Borrowing</i>
Efek hutang yang diterbitkan	2,403,547	-	(534,300)	2,214	1,871,461	<i>Debt securities issued</i>
Obligasi subordinasi	2,988,492	1,000,000	(307,000)	(2,329)	3,679,163	<i>Subordinated bonds</i>
Liabilitas sewa	589,310	-	(41,109)	(99,300)	448,901	<i>Lease liability</i>
Total	18,143,016	13,449,516	(7,959,831)	(99,415)	23,533,286	Total

56. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

56. Subsequent Events

a. Penyertaan Modal Tahap II

Atas penyertaan modal Bank ke PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank telah mendapatkan persetujuan OJK untuk menjadi pemegang saham pengendali Bank Bengkulu melalui keputusan Dewan Komisiner OJK No KEP-21/D.03/2024 Tanggal 21 Februari 2024 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk Sebagai Calon Pemegang Saham Pengendali Dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai Calon Ultimate Shareholder PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu.

a. Participation of Phase II Capital

For the Bank's capital investment into PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, The Bank has also received OJK approval to become the controlling shareholder of Bank Bengkulu through the decision of the OJK Board of Commissioners No KEP-21/D.03/2024 dated 21 February 2024 concerning the results of the fit and proper test of PT Bank Pembangunan Daerah West Java and Banten Tbk as a candidate Controlling Shareholders and the Regional Government of West Java Province as Candidates for Ultimate Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu.

b. Perubahan susunan Manajemen

Pada tanggal 2 April 2024, Bank telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 yang salah satu keputusannya adalah terkait dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Pengurus Bank, sehingga susunan Pengurus Bank menjadi sebagai berikut:

b. Changes in management structure

On April 2 2024, the Bank held an Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 Financial Year, one of the decisions of which was related to the dismissal and appointment of members of the Banks Management, so that the composition of the Bank's Management became as follows:

Dewan Komisaris		Board of Commissioners
Komisaris Utama Independen	Ventje Rahardjo Soedigno *)	Independent President Commissioner
Komisaris	Tomsi Tohir	Commissioner
Komisaris	Rudie Kusmayadi	Commissioner
Komisaris Independen	Diding Sakri	Independent Commissioner
Dewan Direksi		Board of Directors
Direktur Utama	Yuddy Renaldi	President Director
Direktur Kepatuhan	Cecep Trisna	Director of Compliance
Direktur Keuangan	Hana Dartiwan *)	Director of Finance
Direktur IT & Transaction Banking	Rio Lanasier	Director of IT & Transaction Banking
Direktur Konsumer dan Ritel	Yusuf Saadudin *)	Director of Consumer and Retail
Direktur Operasional	Tedi Setiawan	Director of Operation
Direktur Komersial dan UMKM	Nancy Adistiyasari	Director of Commercial and Micro

*) dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

*) can carry out their duties after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK) for the Fit and Proper Test.

57. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian

57. Completion of the Consolidated Financial Statements

Dalam rangka rencana Bank untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2024, Bank telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran.

With respect to the Bank's plan to conduct sustainable public offering of Sustainable Subordinated Bonds IV Phase I Year 2024, the Bank has reissued its consolidated financial statements for the year ended December 31, 2023 for inclusion in the offering documents.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Dalam laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali ini terdapat penambahan pengungkapan referensi kepada Catatan atas laporan Keuangan pada Laporan Arus Kas Konsolidasian, dan sedikit perubahan pengungkapan pada catatan 3, 24, 26, 55, 56 dan 57 atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

In this reissued consolidated financial statements there are additional referring information to the notes to the financial statements in the consolidated Cash Flow Statement, and minor changes in the notes 3, 24, 26, 55, 56 and 57 to the Consolidated Financial Statements.

58. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab penuh terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 22 Mei 2024.

58. Completion of the Consolidated Financial Statements

The Management is responsible for the preparation of the accompanying consolidated financial statements that were completed and authorized for issue by the Board of Directors on May 22, 2024.

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT
DAN BANTEN, Tbk**

Menara Bank BJB
Jl. Naripan No.12 -14, Bandung 40111, Indonesia
Telepon: (022) 4234868 Faksimili: (022) 4206099
Situs internet: www.bankbjb.co.id
Email: ir@bankbjb.co.id